SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

b. bahwa sebagai daerah otonom baru, Provinsi Kalimantan Utara memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun guna pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional;

c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005–2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

(2) RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara disusun sesuai dengan kondisi umum, karakteristik, dan potensi daerah dan mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
BAB V SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

(2) RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi, dan mengacu pada RPJMN untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

Pasal 5

(1) RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dengan memperhatikan RPJP Nasional.

(2) RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan acuan RPJM Daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dengan memperhatikan RPJM Nasional

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah kepada Gubernur.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada calon Kepala Daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah untuk menjamin RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjadi acuan dalam penyusunan Visi dan Misi calon Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJM kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Maret 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

Drs. H. BADRUN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUHARTO, SH
NIP 19561022 197904 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:1,1/2016

SALINAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2005-2025

I. UMUM

RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Provinsi Kalimantan Utara dan strategi untuk mencapainya. RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional.

Dalam pelaksanaannya, RPJP Daerah 2005-2025 dibagi menjadi empat tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Kepala Daerah serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang pelaksanaan pemerintahannya dimulai pada tanggal 22 April 2013, maka perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara periode Tahun 2013 – 2014 mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 mengacu pada RPJMN sampai terpilihnya Kepala Daerah Kalimantan Utara defenitif. Sehingga penyusunan RPJPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD sampai dengan Tahun 2025.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025. Namun, periodisasi RPJM Daerah dapat tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUHARTO, SH
NIP 19561022 197904 1 001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2005-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Mengacu pada RPJP Nasional maka RPJPD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai rentang waktu dari tahun 2005-2025. Demikian pula untuk Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dengan memperhatikan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJPD sebagai pedoman pembangunan jangka panjang.

Provinsi Kalimantan Utara terbentuk tanggal 17 Nopember 2012 berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang relatif masih baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. membutuhkan suatu pedoman pembangunan yang memuat seluruh aspek pembangunan yang dituangkan dalam visi, misi dan arah kebijakan. Dengan semakin cepatnya pengaruh yang sangat besar dari pasar global terhadap perkembangan daerah, maka pedoman pembangunan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mengakomodasi rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007, pedoman yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Sebagai dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang (20 tahun ke depan), RPJPD merupakan dokumen penting yang akan menjadi acuan penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala lebih rendah seperti RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 adalah sebagai berikut:

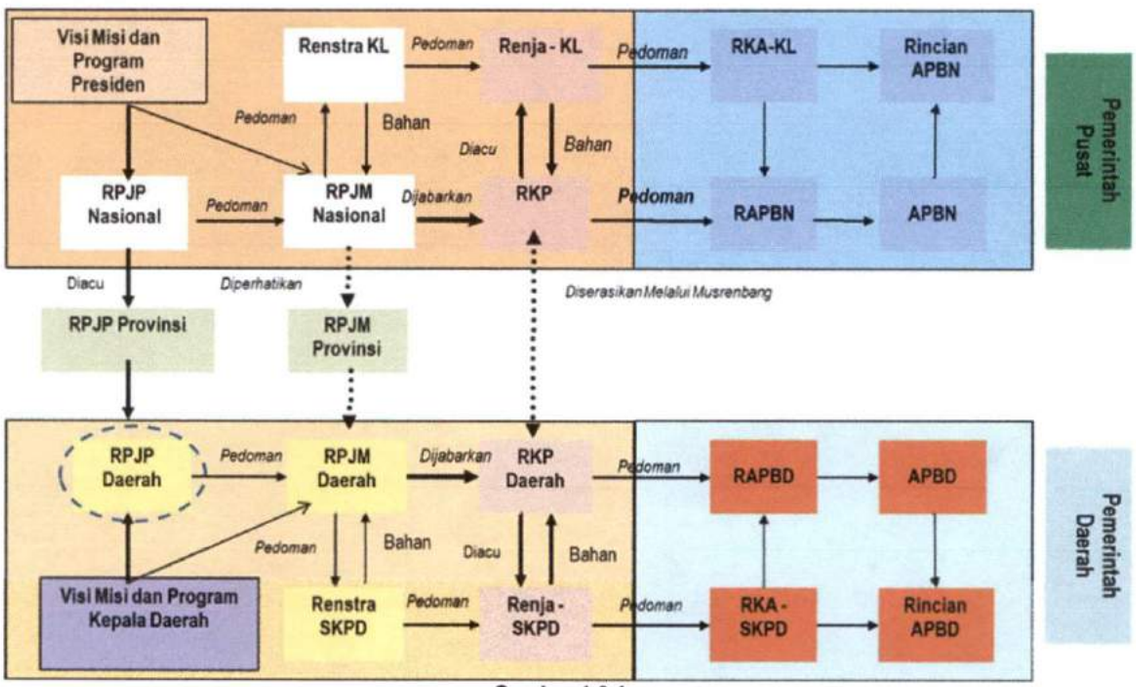
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran II).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJPD harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Utara. RTRW Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Sesuai dengan undang-undang tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD harus mengacu pada RPJPN dan memperhatikan RPJPD provinsi sekitarnya yang dalam hal ini merupakan provinsi induk yakni RPJPD Provinsi Kalimantan Timur serta RPJPD kabupaten/kota lainnya. Dengan mengacu arahan

pembangunan nasional, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara pada 4 (empat) tahap atau periode pembangunan jangka menengah. Visi dan misi RPJPD diterjemahkan ke dalam sasaran pokok pembangunan lima tahunan dan arah kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD. Gambar 1.3.1. menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPJMD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga terciptanya sinkronosasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasioanl RPJPD yang sudah diterjemahkan dalam RPJMD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA SKPD).



Gambar 1.3.1.
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, terdiri dari:

BAB I **Pendahuluan:** berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah:** menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III **Analisis Isu-isu Strategis**: menyajikan isu-isu daerah yang meliputi permasalahan pembangunan, kebijakan nasional dan regional, serta isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IV **Visi dan Misi:** berisi pernyataan visi, misi pembangunan daerah jangka panjang, tujuan dan sasaran.

BAB V **Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah:** berisi sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang, arah kebijakan dan tahapan prioritas pembangunan lima tahunan.

BAB VI **Kaidah Pelaksanaan:** berisi prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi hasil RPJPD.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman dan arah penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan dalam masa 20 tahun ke depan. Dengan demikian RPJPD Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi

landasan bagi semua dokumen perencanaan daerah baik RPJMD dan RKPD serta dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 adalah merumuskan visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2005-2025.

SALINAN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi baru yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas lima wilayah administrasi, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Ibukota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Tanjung Selor, yang saat ini berada di Kabupaten Bulungan. Berikut ini merupakan gambaran umum dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI

A. Luas dan Letak Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas ± 75.467,70 km², sementara berdasar batas kewenangan provinsi luas lautan seluas 11.579 Km² (13% dari luas wilayah total). Provinsi ini terletak pada posisi antara 01°00'00" - 04°30'00" LU dan 114°30'00" - 118°30'00" BT. Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.

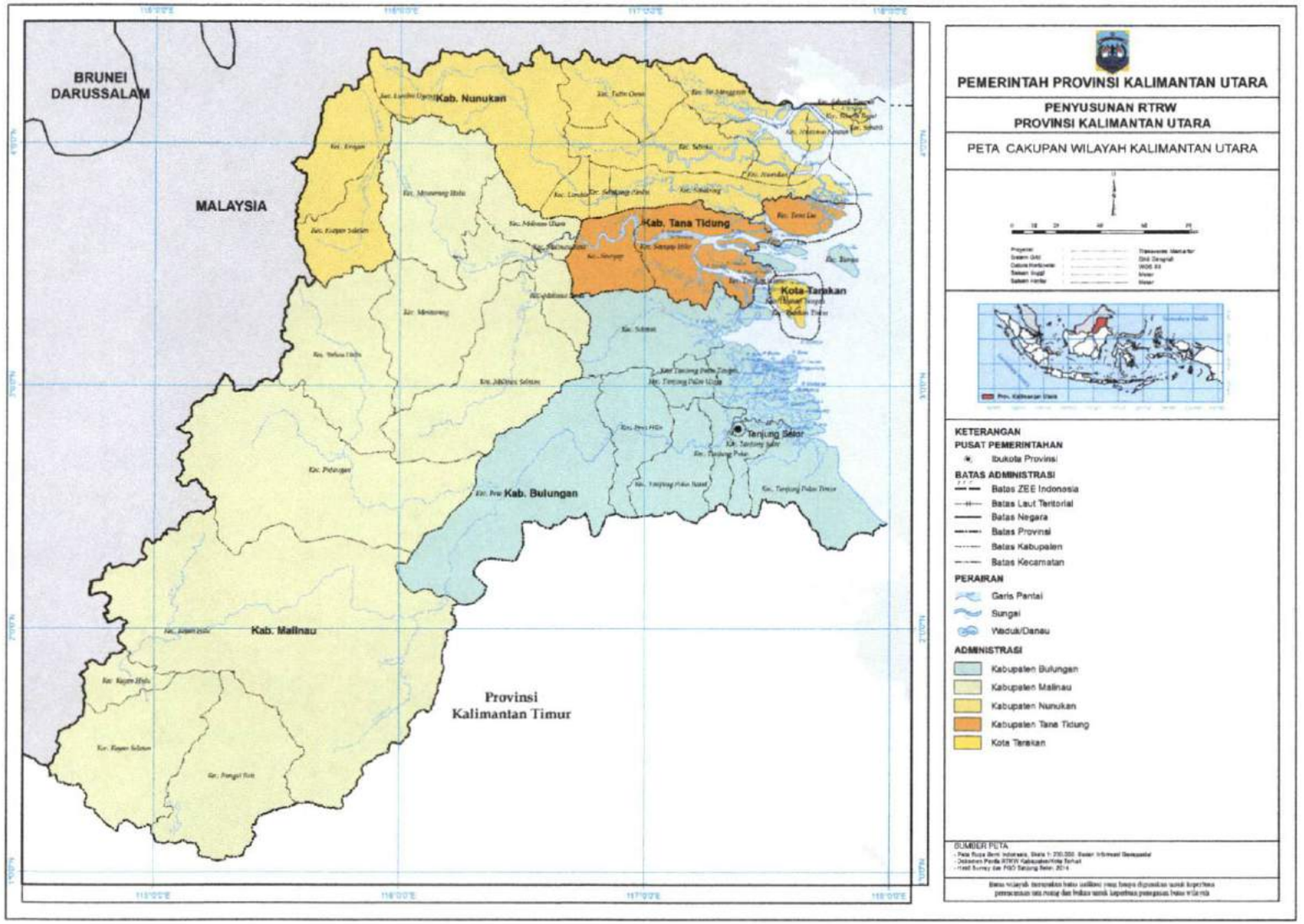
Sebelah Utara : Negara Bagian Sabah (Malaysia)
Sebelah Timur : Laut Sulawesi
Sebelah Selatan : Kabupaten Mahakam Hulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah Barat : Negara Bagian Sarawak (Malaysia)

Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara terletak di bagian timur laut Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Posisi geografis tersebut membuat provinsi ini berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Gambar 2.1.1 menunjukkan peta wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.1.1
Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Bulungan	Tanjung Selor	10	81
Malinau	Malinau	15	109
Nunukan	Nunukan	15	204
Tana Tidung	Tideng Pale	3	23
Tarakan	Tarakan	4	20

Sumber:http://www.Kalimantan Utaraprov.go.id, diakses pada Mei 2014 + UU No. 20/2012



Gambar 2.1.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Draft RTRW Provinsi Kalimantan Utara

Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara selain berupa pegunungan juga kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3597 m^2. Pulau-pulau terbesar yaitu Pulau Tarakan (249 m^2), Pulau Sebatik (245 m^2), Pulau Nunukan (233 m^2), Pulau Tanah Merah (352 m^2). Sementara panjang garis pantai provinsi ini adalah 3.955 Km, 908 Km (23%) merupakan garis pantai daratan dan 3.047 Km (77%) merupakan garis pantai kepulauan.

B. Kondisi Topografi

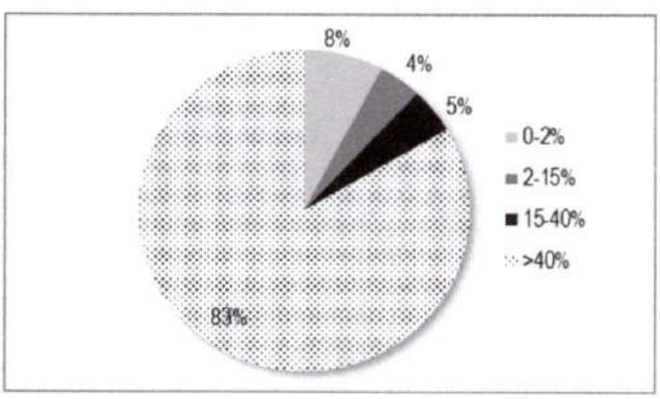
Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakteristik fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi di suatu daerah. Tabel 2.1.1.B.1 dan Gambar 2.1.1.B.1 menunjukkan luas wilayah menurut kelas lereng/kemiringan dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.1.2
Kelas Kemiringan Lereng di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

No.	Kabupaten	Kelas Lereng/Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
1	Bulungan	319.440	185.018	216.359	590.017	1.310.834
2	Malinau	13.500	72.500	147.177	3.745.417	3.978.594
3	Nunukan	287.739	6.039	81.639	990.129	1.365.546
4	Tana Tidung	134.202	159.013	15.573	22.052	330.840
5	Tarakan	6.154	1.984	16.942	0	25.080
Prov. Kalimantan Utara		441.595	239.536	261.433	4.757.598	5.700.162

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2013

Tabel dan Gambar 2.1.1.A.2 menunjukan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kemiringan lereng > 40%, dengan persentase mencapai 80% dari luas wilayah provinsi ini. Pegunungan yang berada di bagian barat dan selatan terletak di Kabupaten Malinau. Kondisi topografi Kabupaten Malinau, Nunukan dan Bulungan didominasi oleh kemiringan lereng di atas 40%. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Wilayah yang relatif landai terletak di pinggiran pantai seperti di Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.



Gambar 2.1.2
Diagram Persentase Kelas Kemiringan Lereng di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Hasil Analisis , 2014

Hampir setengah (48,33%) dari luas wilayah provinsi ini berada di kelas ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut, hanya 5,88% yang berada di kelas ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai. Wilayah

pegunungan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dijadikan kawasan lindung dan *recharge area*. Tabel di bawah ini menunjukkan luas wilayah menurut kelas ketinggian dari permukaan laut dan kabupaten/kota.

Tabel 2.1.3
Kelas Ketinggian di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kabupaten	Kelas Ketinggian					
		0-7 M	7-25 M	25-100 M	100-500 M	500-1.000 M	>1.000 M
1	Bulungan	213.561	249.257	220.119	531.364	193.172	273.749
2	Malinau	11.687	77.937	532.249	831.204	2.258.433	151.317
3	Nunukan	174.434	138.156	199.312	155.112	284.981	269.467
4	Tana Tidung	11.034	246.733	51.029	22	302	0
5	Tarakan	2.937	8.940	13.092	111 *)	0	0
Prov. Kalimantan Utara		417.636	730.243	1.002.709	1.517.702	2.736.888	694.533

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2013, Bappeda Kota Tarakan, 2014

*Keterangan : *) Data Kelas Ketinggian Kota Tarakan 100,1 – 110 M*

Kabupaten Malinau merupakan wilayah yang sebagian besar (58,47%) wilayahnya berada di kelas ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, sebaliknya Kabupaten Tana Tidung didominasi (79,82%) dengan kelas ketinggian antara 7-25 meter. Sementara Kota Tarakan mempunyai wilayah dengan kelas ketinggian di antara 7-25 meter di atas permukaan laut (72,41%) dan kelas ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut (27,59%).

C. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, terlebih letak provinsi ini berada di utara lintang 0º. Suhu udara maksimal terjadi pada bulan Agustus dengan 32,5º C dan minimal terjadi pada bulan Januari yaitu 23,5º C. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan 444 mm, sedangkan paling rendah terjadi pada bulan Februari dengan 209 mm. Hari hujan paling banyak dalam sebulan terjadi di bulan Januari dan Maret dengan 25 hari sedangkan paling rendah terjadi pada Agustus, hanya 19 hari. Rata-rata penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2008-2012 cukup fluktuatif, rata-rata pada tahun 2012 penyinaran matahari selama 44 hari.

Tabel 2.1.4
Kondisi Klimatologi di Provinsi Kalimantan Utara

Bulan	Suhu Udara (◦C)			Kelembapan Udara (%)	Tekanan Udara (Mbs)	Kecepatan Angin (Knot)	Curah Hujan (Mm)	Penyinaran Matahari (%)	Hari Hujan
	Min	Max	Rata-Rata						
Januari	23,50	30,58	26,73	87,25	1.009,95	3,40	344,30	32,50	25,00
Februari	23,65	31,35	27,16	84,50	1.009,90	3,75	209,95	42,75	20,00
Maret	23,53	30,50	26,84	86,00	1.009,98	3,45	444,43	32,25	25,00
April	23,80	31,65	27,50	84,75	1.010,78	3,70	226,33	51,50	23,00
Mei	23,75	32,20	27,69	84,50	1.010,08	3,98	374,15	51,25	24,00
Juni	23,83	32,35	27,81	85,00	1.010,05	3,90	275,10	49,25	21,75
Juli	23,45	32,15	27,50	84,75	1.009,88	3,83	223,90	47,50	21,50
Agustus	23,63	32,50	27,79	84,00	1.010,68	4,00	319,05	55,25	19,00
September	23,48	32,30	27,60	84,50	1.010,95	4,08	321,13	44,50	20,50
Oktober	24,05	31,80	27,41	85,00	1.010,78	4,08	281,85	46,00	21,75
November	24,38	31,48	27,49	86,50	1.010,35	4,08	681,88	39,25	22,00
Desember	24,28	31,55	27,41	85,75	1.009,80	4,13	248,58	41,50	21,25
2012*	23,75	31,68	27,38	84,00	1.010,40	3,83	275,04	44,27	21,85
2011*	25,73	31,60	28,40	85,00	1.010,05	4,00	298,64	41,77	21,80
2010*	23,40	32,70	27,70	85,00	1.010,48	4,15	255,20	45,86	21,54
2009*	22,85	33,40	28,14	83,75	1.010,28	4,00	248,28	42,19	20,58
2008*	23,27	32,20	27,73	84,33	1.009,23	5,33	274,83	52,00	22,80

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2009-2013

***Keterangan**: * Rata-rata Kondisi Iklim per bulan ** Data klimatologis tanpa Kabupaten Malinau*

D. Kondisi Geologi

Kondisi geomorfologi atau fisiografi Provinsi Kalimantan Utara meliputi daratan dan lautan. Daratan berada di bagian barat, sedangkan lautan berada di bagian timur hingga kawasan perairan Ambalat. Bagian barat yang berupa daratan tercermin sebagai pegunungan hingga perbukitan yang merupakan unit geomorfologi (bentang alam) struktur baik berupa lipatan maupun patahan, sedangkan bagian timur terekpresikan sebagai dataran hingga pantai atau dikenal sebagai bentang alam aluvial, sedangkan bentang alam laut berada di bagian paling timur wilayah.

Litostratigrafi tersusun atas batuan Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoium dan Kwarter. Batuan Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum dan Kawrter banyak tersingkap di bagian barat Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan). Batuan Tersier yang belum banyak tersingkap terdapat di kawasan pantai dan di bawah laut (Selat Sulawesi). Batuan Paleozoikum dan Mesozoikum berupa batuan metamorfosa seperti sekis, pilit, marmer, gneiss, dan kwarsit, maupun batuan beku seperti granit/diorit, dan batuan sedimen seperti batupapasir, batulanau, batulempung, batugamping yang umumnya telah mengalami diagenesis atau metamorfisme. Batuan Kenozoikum (Tersier) antara lain terdiri dari beberapa formasi yang berupa batuan sedimen seperti batupasir, batulanau, batulempung, batubara dan batugamping, serta batuan volkan atau batuan beku seperti granit, rhyolit, trachit, diorit dan andesit. Batuan sedimen Tersier tersebut terbentuk dalam suatu cekungan yang dikenal sebagai Cekungan Tarakan dan termasuk salah satu cekungan penghasil minyak dan gas di Kalimantan Utara.

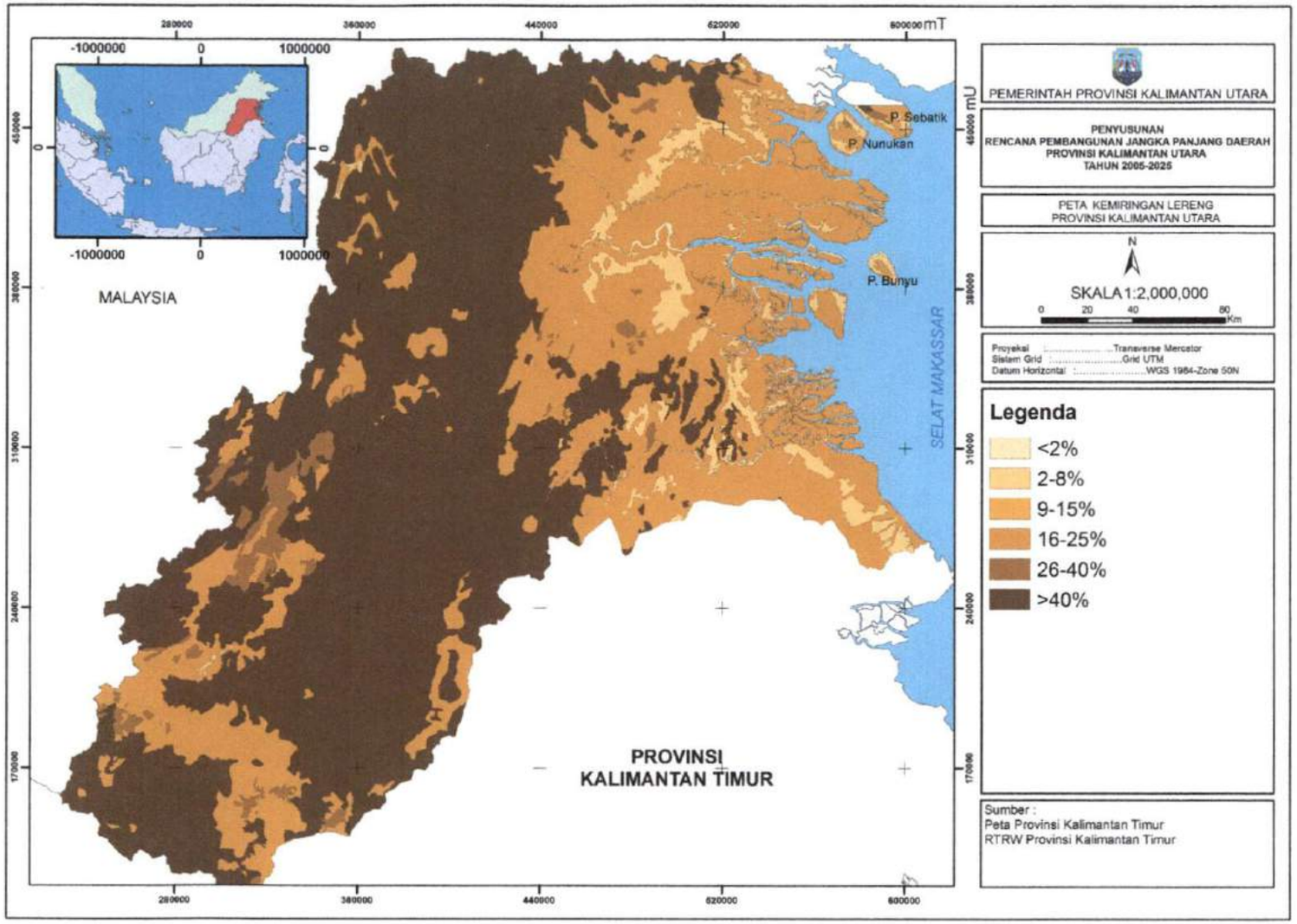
Struktur geologi berupa lipatan yang berarah barat daya-timur laut berupa antiklin dan sinklin serta struktur patahan geser dengan arah barat laut-tenggara hingga utara-selatan dan sesar naik berarah barat daya-timur laut. Sturktur antiklin dan patahan seringkali berfungsi sebagai perangkap minyak dan gas. Perangkap minyak dan gas dapat pula berupa perangkap stratigrafi.

Berdasarkan stratigrafi Tersier di Cekungan Tarakan yang terdiri dari bermacam batuan sedimen yang dapat berfungsi sebagai batuan induk, batuan reservoir, dan batuan penutup, sedangkan kondisi gradient geothermis dan perangkap geologi minyak dan gas bumi baik struktur geologi dan stratigrafi, maupun terjadinya migrasi minyak dan gas bumi memenuhi syarat bagi sistem perminyakan yang ada di Cekungan Tarakan. Dengan demikian Cekungan Tarakan yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang sebagian besar masih dalam taraf penyelidikan eksplorasi, dan sebagian kecil sudah berproduksi seperti di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

Dari stratigrafinya, Cekungan Tarakan mempunyai potensi batubara yang melimpah pada formasi batuan sedimen yang berumur Tersier. Penambangan batubara sudah dilakukan di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan.

Selain itu terdapat batuan beku asam hingga batuan beku menengah seperti granit, rhyolit, trachyt, diorit dan andesit yang mengindikasikan adanya kegiatan magmatik pada saat Miosen. Adanya kegiatan magmatik asam hingga menengah ini dapat menyebabkan terjadinya mineralisasi bijih dalam bentuk senyawa sulfida yang mengandung unsur emas, tembaga, perak, seng, dan timbal sebagai endapan epitermal maupun mesotermal. Dampak lain dari kegiatan magmatik ini adalah terjadinya alterasi hidrotermal terhadap batuan batuan yang lebih tua sehingga menghasilkan bahan galian seperti kaolin dan bentonit yang berpotensi sebagai bahan dasar untuk industri keramik. Kondisi stratigrafi juga memungkinkan terbentuknya batu gamping dari formasi yang berumur Tersier dan tersingkap di permukaan seperti di Kabupaten Bulungan dalam jumlah yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku semen. Ditemukan juga pasir kwarsa yang merupakan hasil rombakan batuan Tersier baik batuan beku, sedimen, maupun metamorf seperti yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Pasir kwarsa ini berpotensi sebagai bahan dasar untuk industri kaca atau bahan bangunan yang lain.

Potensi sumberdaya geologi yang berupa sumberdaya mineral khususnya emas secara informasi tidak resmi terdapat di Kabupaten Nunukan yang diperkirakan mempunyai cadangan cukup besar, namun belum dikelola dengan baik. Penambangan sumberdaya mineral khususnya emas harus memperhatikan masalah lingkungan yang terkait dengan pencemaran unsur unsur berbahaya seperti As dan Hg terhadap air tanah maupun air permukaan.



Gambar 2.1. 3
Peta Kemiringan Lereng Kalimantan Utara
Sumber: Hasil Analisis, 2014

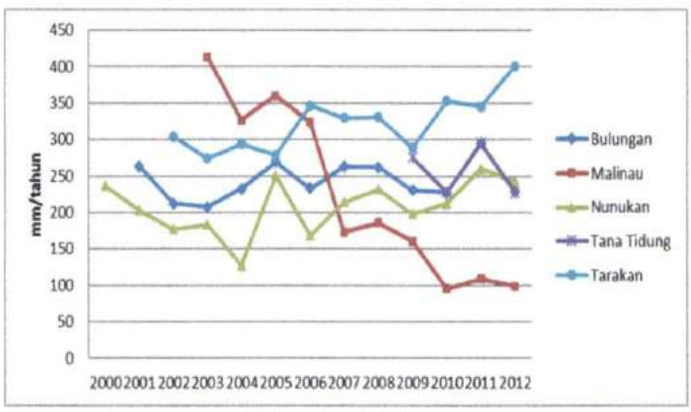
E. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi wilayah Kalimantan Utara dapat berupa air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Air permukaan tercermin sebagai aliran sungai yang terbagi menjadi beberapa DAS (daerah aliran sungai), mata air dan air tanah. Terdapat 80 sungai di provinsi Kalimantan Utara yang termasuk dalam 6 DAS, DAS yang terluas adalah DAS Kerang-Segendang (36733 Km^2) Air permukaan dan air tanah sangat dipengaruhi oleh kawasan resapan air (*recharge area*) dan kawasan tangkapan air (*catchment area*). Kawasan resapan air terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang terletak di bagian barat, diantaranya terdapat di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, sedangkan kawasan tangkapan air terletak di bagian timur yang berupa dataran aluvial dan dataran fluvial. Data curah hujan rata rata per bulan dalam setahun di lima kabupaten/kota berkisar 200 mm-250 mm (Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung) hingga 325 mm (Kota Tarakan). Namun perlu diperhatikan di Kabupaten Malinau terjadi penurunan curah hujan 2003-2012 hingga mencapai 100 mm/bulan yang berarti pasokan terhadap air permukaan dan air bawah tanah berkurang.

Tabel 2.1.5
Curah Hujan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2012 (rata-rata mm/tahun)

Kabupaten/ Kota	Curah Hujan (mm rata-rata per bulan dalam 1 tahun)												
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan		263,50	212,50	207,50	232,50	269,10	232,80	262,60	262,20	230,80	227,50	294,80	228,20
Malinau				413,17	326,50	359,75	323,42	173,08	185,90	160,60	95,50	108,90	98,60
Nunukan	237,00	203,40	177,20	183,30	127,40	250,20	168,70	214,20	231,50	198,40	212,40	259,80	242,70
TanaTidung										275,40	228,17	294,75	227,42
Tarakan			304,10	274,20	293,60	278,50	346,20	329,50	330,80	288,50	353,50	345,20	401,10

Sumber :
1) *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2003-2011*
2) *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2007-2013*
3) *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2003-2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2012-2013*
5) *Kota Tarakan Dalam Angka 2003-2013*



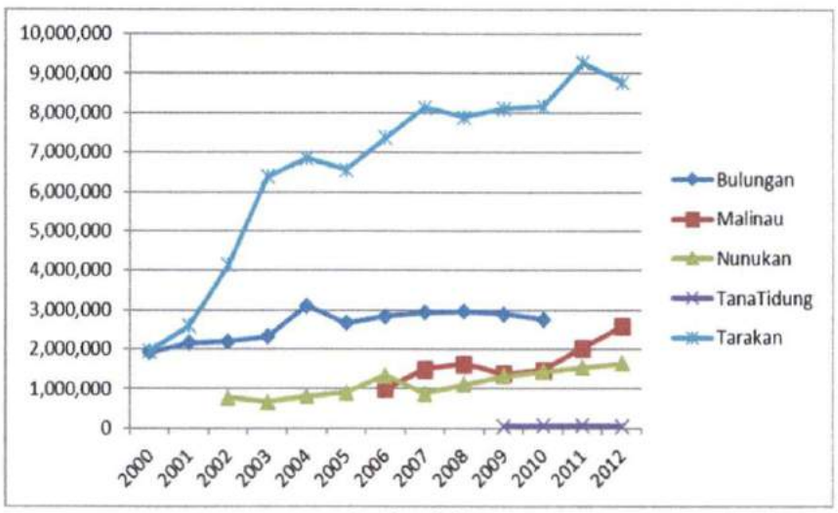
Gambar 2.1.4
Grafik Curah Hujan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

Air permukaan yang bersumber pada air sungai dan mata air merupakan air yang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi pertanian, air minum/rumah tangga dan industri. Produksi PDAM Kabupaten Nunukan dari tahun 2002-2012 terjadi kecenderungan meningkat dari 771.998 m^3 pada tahun 2002 dan meningkat menjadi 1.645.741 m^3 pada tahun, sedangkan jumlah air yang disalurkan ke pelanggan juga terjadi kecenderungan meningkat dari 385,179 m^3 pada tahun 2002 menjadi 1.645.741 m^3 pada tahun 2012. Dengan demikian kebutuhan air di Kabupaten Nunukan tidak terdapat kelebihan.

Tabel 2.1.6
Produksi PDAM di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2012 (m^3)

Kabupaten /Kota	Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan (m^3)												
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	1.916.249	2.159.573	2.195.628	2.311.510	3.101.402	2.668.479	2.833.207	2.933.367	2.960.469	2.883.883	2.758.182		
Malinau							997.239	1.494.530	1.628.104	1.372.254	1.476.127	2.029.289	2.585.465
Nunukan			771.978	664.116	817.428	906.441	1.333.395	887.632	1.112.028	1.320.968	1.427.523	1.543.102	1.645.741
TanaTidung										57.151,35	71.360	60.759	59.052,40
Tarakan	1.951.776	2.576.264	4.140.546	6.383.160	6.852.776	6.559.056	7.367.944	8.140.617	7.900.492	8.103.582	8.164.658	9.268.235	8.776.401

Sumber :
1) *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2003-2011*
2) *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2007-2013*
3) *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2003-2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2012-2013*
5) *Bappeda Kota Tarakan, 2014*



Gambar 2.1.5
Grafik Produksi PDAM di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

Produksi PDAM Kabupaten Bulungan dari tahun 2000-2010 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 1.916.249 m^3 pada tahun 2000 menjadi 2.758.182 m^3 pada tahun 2010, sedangkan jumlah air yang disalurkan ke pelanggan juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 1.300.485 m^3 pada tahun 2002 menjadi 2.284.575 m^3 pada tahun 2010. Dengan demikian kebutuhan air di Kabupaten Bulungan masih terdapat kelebihan produksi PDAM.

Produksi PDAM Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2009 -2012 terjadi kecenderungan peningkatan dari 57.151 m^3 pada tahun 2009 menjadi 59.052 m^3 pada tahun 2012, sedangkan jumlah air yang disalurkan ke pelanggan juga cenderung meningkat dari 46.862 m^3 pada tahun 2008 menjadi 51.852 m^3 pada tahun 2012. Dengan demikian kebutuhan air di Kabupaten Tana Tidung masih menunjukkan kelebihan produksi PDAM.

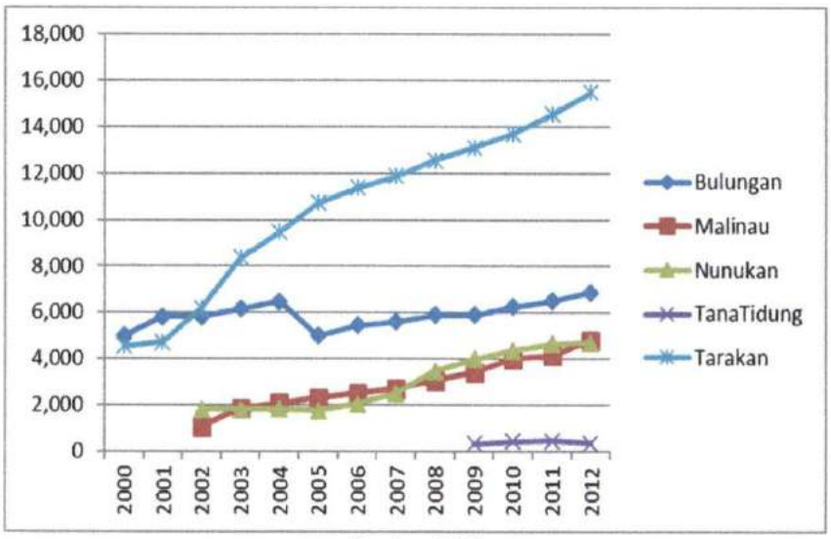
Produksi PDAM Kabupaten Malinau dari tahun 2006-2012 terjadi kecenderungan peningkatan dari 997.239 m^3 pada tahun 2006 menjadi 2.585.465 m^3 pada tahun 2012, sedangkan jumlah air yang disalurkan ke pelanggan juga cenderung meningkat dari 257.751m^3 pada tahun 2006 menjadi 1.339.601 m^3 pada tahun 2010. Dengan demikian kebutuhan air di Kabupaten Malinau masih terdapat kelebihan produksi PDAM.

Selanjutnya, untuk Kota Tarakan diketahui bahwa produksi PDAM Kota Tarakan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2012. Jumlah air yang disalurkan ke pelangga juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pula, yakni 2.427.912 m^3 pada tahun 2003 menjadi 5.617.663 m^3 pada tahun 2012.

Tabel 2.1.7
Banyaknya Pelanggan Perusahaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2012 (Unit)

Kabupaten/ Kota	Banyaknya Pelanggan Perusahaan Air Minum												
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	5.010	5.821	5.831	6.144	6.471	4.998	5.453	5.594	5.891	5.894	6.244	6.508	6.884
Malinau			1.074	1.872	2.092	2.327	2.528	2.725	3.080	3.409	4.030	4.146	4.835
Nunukan			1.812	1.810	1.828	1.777	2.065	2.524	3.461	3.986	4.370	4.651	4.734
TanaTidung										333	443	464	371
Tarakan	4.545	4.719	6.172	8.359	9.459	10.714	11.366	11.873	12.561	13.108	13.696	14.524	15.478

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2003-2011
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2007-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2003-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2012-2013
5) Bappeda Kota Tarakan, 2014

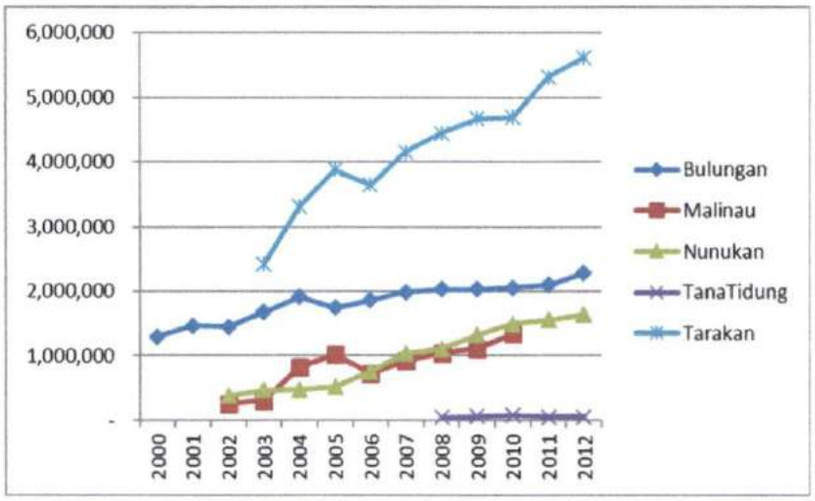


Gambar 2.1.6
Grafik Banyaknya Pelanggan Perusahaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

Tabel 2.1.8
Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2012 (m^3)

Kabupaten /Kota	Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan (m^3)												
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	1.300.485	1.467.227	1.449.451	1.677.833	1.915.071	1.743.797	1.861.618	1.990.109	2.032.774	2.030.592	2.057.123	2.093.122	2.284.575
Malinau			257.751	305.052	827.045	1.018.229	723.501	922.875	1.045.135	1.111.147	1.339.601		
Nunukan			385.179	468.832	470.339	514.418	756.006	1.040.016	1.112.028	1.320.968	1.495.973	1.556.751	1.645.741
TanaTidung									46.862	59.508	77.256	57.456	51.852
Tarakan				2.427.912	3.313.546	3.882.804	3.644.421	4.158.091	4.443.542	4.673.276	4.690.510	5.315.835	5.617.663

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2003-2011
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2007-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2003-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2012-2013
5) Bappeda Kota Tarakan, 2014



Gambar 2.1.7
Grafik Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2012
Sumber :Hasil Analisis 2014

F. Pemanfaatan Lahan

Malingreau (1978) berpendapat penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik secara menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kebutuhan kedua-duanya.

Penggunaan Lahan di provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh hutan negara, dengan luasan mencapai 5.590.569 hektar atau 80 % dari luasan total wilayah. Luasan perkebunan hanya 4 % atau 340.071 Ha dari total luas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di sebagian besar kabupaten seperti Kabupaten Malinau (89 %), Kabupaten Nunukan (74 %), dan Kabupaten Bulungan (43%). Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang memiliki kemiringan lereng yang curam sehingga dimanfaatkan sebagai hutan lindung. Penggunaan lahan permukiman di Provinsi Kalimantan Utara hanya 45.769 hektar atau 0,5 %. Persentase penggunaan lahan permukiman paling tinggi berada di Kota Tarakan, yaitu 6,7 % dari total luas wilayah. Kota Tarakan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Utara sehingga kegiatan ekonominya lebih intensif sehingga lahan terbangunnya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Perubahan penggunaan lahan di Kalimantan Utara selama tahun 2007-2012 menunjukkan luasan permukiman semakin meningkat dan lahan hutan semakin berkurang. Data Penggunaan Lahan tahun 2007 luas permukiman hanya 12.826 Ha (0,2 %) sedangkan di tahun 2012 meningkat menjadi 45.769 Ha (0,5 %). Luas Hutan di tahun 2007 adalah 5.846.665 Ha (83 %) berkurang di tahun 2012 menjadi 5.590.569 Ha (80 %). Luas perkebunan meningakt dari tahun 2007-2012, di tahun 2007 luasnya hanya 45.267 Ha sedangkan di tahun 2012 mencapai 340.071.

Tabel 2.1.9
Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Jenis Penggunaan Lahan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
Bulungan	1.113.629	3.687	3.687	10.459	19.855	98.179	0	73.780	
Malinau	3.818.732	3.372	12.749	339	43.009	20.776	5.754	0	
Nunukan	902.413	4.391	14.205	34.297	5.958	17.237	3.527	0	
Tana Tidung	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tarakan	11.891	1.376	0	172	9.055	0	999	1.587	
Kalimantan Utara	5.846.665	12.826	30.641	45.267	77.877	136.192	10.280	75.367	0

Sumber :
1) Profil Kabupaten Malinau 2008 dan 2013
2) Tarakan dalam Angka tahun 2008
3) Neraca Penggunaan Tanah Kabupaten Bulungan tahun 2007 dan 2012
4) Profil Kabupaten Nunukan tahun 2008
5) www.dispertan.kaltimprov.go.id diakses pada tanggal 20 April 2014

Keterangan :
1 = Hutan; 2 = Permukiman; 3 = Sawah; 4 = Perkebunan; 5 = Tegalan/Tanah Terbuka/Semak/Ladang; 6 = Tambak/Tubuh Air; 7 = Rawa; 8 = Mangrove; 9 = Lainnya
**Data Kabupaten Tana Tidung masih digabung dengan Kabupaten Bulungan*

Tabel 2.1.10
Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jenis Penggunaan Lahan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Bulungan	1.005.575	4.338	6.566	112.388	170.493	109.374	0		1.653
Malinau	3.689.716	26.508	77.417	24.885	36.282	0	14.240		49.313
Nunukan	855.857	11.608	13.390	125.397	32.808	17.106	9.446		86.488
Tana Tidung	25.650	1.649	4.056	77.396	1.322	22.538	82.120		267.774
Tarakan	13.771	1.666	172	5	5.180	1.422	400		2.576
Kalimantan Utara	5.590.569	45.769	97.549	340.071	246.085	150.440	106.206	0	407.804

Sumber :
1) Profil Kabupaten Malinau 2008 dan 2013
2) Tarakan dalam Angka tahun 2008
3) Neraca Penggunaan Tanah Kabupaten Bulungan tahun 2007 dan 2012
4) Profil Kabupaten Nunukan tahun 2008
5) www.dispertan.kaltimprov.go.id diakses pada tanggal 20 April 2014

Keterangan :
1 = Hutan; 2 = Permukiman; 3 = Sawah; 4 = Perkebunan; 5 = Tegalan/Tanah Terbuka/Semak/Ladang; 6 = Tambak/Tubuh Air; 7 = Rawa; 8 = Mangrove; 9 = Lainnya

G. Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi rawan bencana alam maupun bencana alam geologi, yang meliputi:

1) **Kawasan rawan bencana** alam:
   a. **Kawasan rawan tanah longsor**, meliputi kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
   b. **Kawasan rawan dampak kebakaran hutan,** terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
   c. **Kawasan rawan banjir,** meliputi kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

2) **Kawasan rawan bencana alam geologi**:

a. **Kawasan rawan gempa bumi**, meliputi kawasan yang diidentifikasikan dapat terjadi mengalami goncangan gempabumi dengan skala lebih dari VI MMI. Kawasan gempa bumi terdapat di sepanjang pantai provinsi Kalimantan Utara.

b. **Kawasan liquifaksi**, meliputi kawasan yang diidentifikasikan dapat terjadi liquifaksi, terutama yang mempunyai ketebalan litologi pasir hingga lanau lebih dari 10 meter, jenuh terhadap airtanah dengan muka airtanah kurang dari 1 meter dan gempa bumi lebih dari VI skala MMI. Kawasan liquifaksi terdapat di kecamatan yang berada di sepanjang pantai timur Provinsi Kalimantan Utara serta termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai.

c. **Kawasan yang terletak di zona patahan aktif**, terdapat di daerah daratan Provinsi Kalimantan Utara dengan indikasi Endapan Aluvial yang terpotong oleh patahannya. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tindung.

d. **Kawasan rawan tsunami,** meliputi kawasan yang diidentifikasikan kemungkinan dapat terjadi mengalami gelombang air laut pasang apabila gempa bumi mempunyai skala goncangan lebih dari VI skala MMI. Kawasan tsunami terdapat di sepanjang pantai timur Provinsi Kalimantan Utara termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai.

e. **Kawasan abrasi**, ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Sementara itu jika dilihat dari peta kawasan rawan bencana masing-masing kabupaten/kota yang bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah, maka masing-masing kabupaten/kota memiliki potensi bencana yang berbeda sesuai dengan kondisi geografi dan topografi wilayahnya.

1) **Kabupaten Nunukan**

Berdasarkan peta potensi bencana, di Kabupaten Nunukan terdapat tiga jenis ancaman bencana yaitu banjir, tanah longsor dan abrasi.

a. Kawasan potensi tanah longsor seluas kurang lebih 20.398 (dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi: Kecamatan Simenggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai.

b. Kawasan potensi abrasi seluas kurang lebih 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga ribu) hektar tersebar meliputi: Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

c. Kawasan potensi banjir seluas kurang lebih 22.471 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar meliputi: Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Sebatik Tengah.

2) **Kabupaten Bulungan**

Kawasan potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Bulungan meliputi: Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Palas Timur, dan kawasan potensi banjir yang meliputi Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Palas Tengah dan Kecamatan Peso.

3) **Kabupaten Malinau**

Kawasan potensi bencana di Kabupaten Malinau berupa tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan.

a. Kawasan potensi bencana tanah longsor, meliputi:

1. Kawasan yang terletak di sepanjang aliran sungai yang rawan terhadap longsornya tebing sungai, meliputi: Malinau Seberang, Respen Tubu, Malinau Hilir, Malinau Kota, Malinau Hulu, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Lidung Kemenci, Pulau Sapi, Long Pujungan, Long Nawan, Bakau Hulu, Pujungan.

2. Kawasan di sekitar gunung atau perbukitan curam yang rawan terhadap terjadinya longsor, meliputi: Data Dian, Long Berang, Sempayang dan Long Loreh.

b. Kawasan potensi bencana banjir
Kawasan potensi bencana banjir, meliputi: permukiman di sepanjang aliran Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan Sungai Pujungan dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Malinau.

c. Kawasan potensi bencana kebakaran hutan
Kawasan potensi bencana kebakaran hutan, meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan karena kandungan batubara maupun aktivitas budidaya masyarakat dan atau penebangan hutan yang lokasinya menyebar secara acak berbentuk spot-spot pada kawasan hutan, yang terdapat di: Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh.

4) Kabupaten Tana Tidung

Kawasan potensi bencana tanah longsor dan bencana banjir di Kabupaten Tana Tidung meliputi:

a. Kawasan potensi bencana tanah longsor, meliputi: kawasan yang berada di sekitar Kecamatan Sesayap dan Kawasan Gunung Rian dan sekitarnya
b. Kawasan potensi bencana banjir, meliputi: Desa Sengkong, Bandan Bikis, Bebatu dan Menjelutung

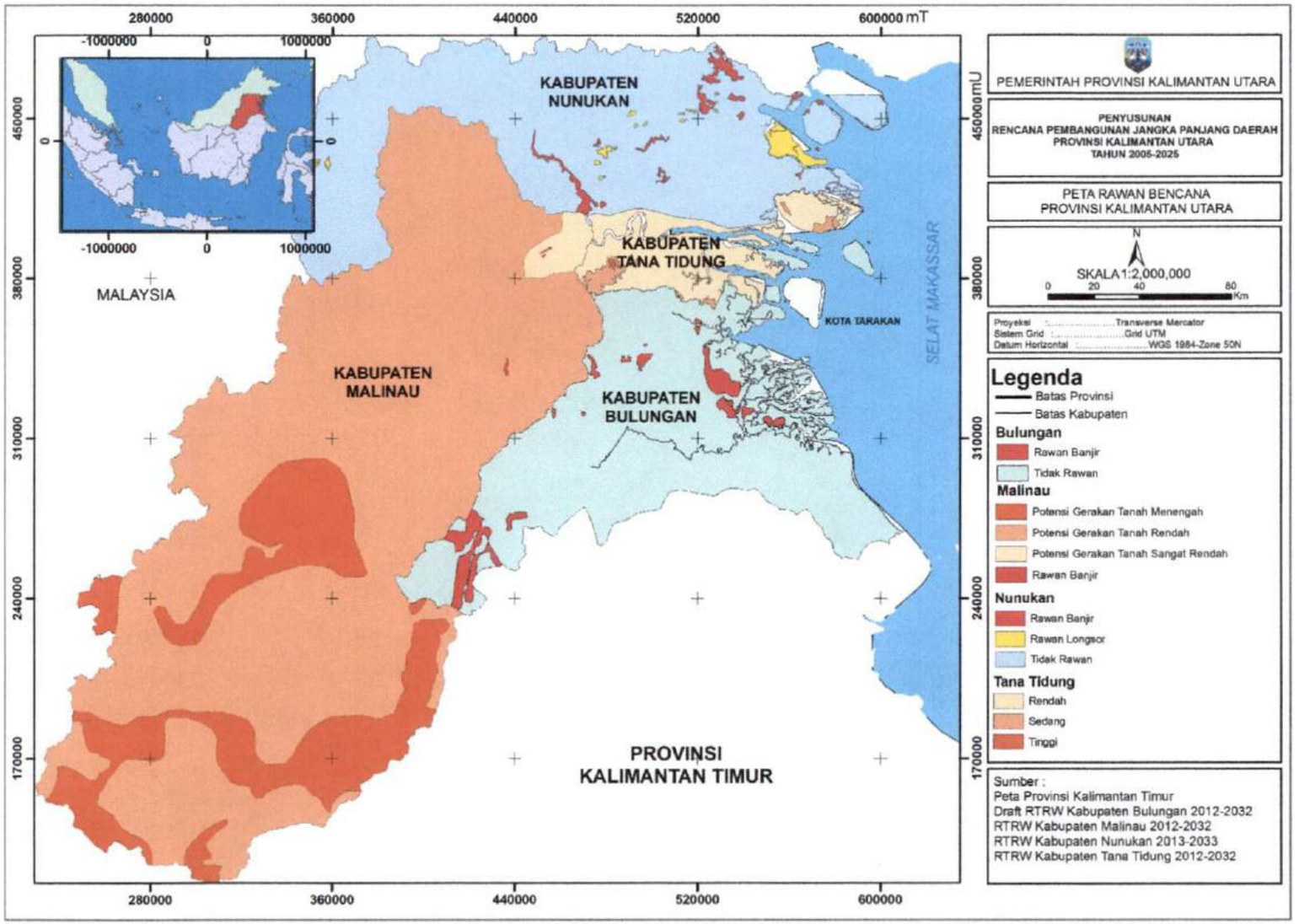
5) Kota Tarakan

Kawasan potensi bencana di Kota Tarakan meliputi bencana tanah longsor dan banjir:

a. Kawasan potensi bencana tanah longsor, meliputi: Kelurahan Karanganyar, Sebengkok, Pamusian, Kampung Empat, Pantai Amal, Kampung Enam, dan Mamburungan.
b. Kawasan potensi bencana banjir meliputi:
   1. Kecamatan Tarakan Timur meliputi: Jalan Sungai Sesayap, Jalan Meranti, Jalan Akasia, Jalan Bengkirai, Jalan Tengkawang;
   2. Kecamatan Tarakan Tengah meliputi: Jalan Sebengkok Tiram, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Sebengkok AL, Jalan Martadinata;
   3. Kecamatan Tarakan Barat meliputi: Jalan Slamet Riadi, Jalan Kenanga, Jalan Seroja, Jalan Anggrek, Jalan Matahari, Jalan Mulawarman dan;
   4. Kecamatan Tarakan Utara meliputi: Jalan P. Aji Iskandar.

Bencana yang potensial terjadi di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adalah bencana banjir. Pada tahun 2013 bencana banjir terjadi di Kabupaten Nunukan yang mengakibatkan 1.500 orang menderita dan 1.000 hektar lahan mengalami kerusakan. Sementara awal tahun 2015 terjadi bencana banjir di Kabupaten Bulungan yang mengakibatkan 1.000 orang menderita, 4 unit fasilitas kesehatan dan 1 unit fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Sementara informasi yang berasal dari media cetak (Koran Tempo) menyebutkan bahwa pada awal tahun 2014, tepatnya pada bulan Januari terjadi bencana banjir di Kabupaten Nunukan.

Menurut Kaltara Online, dalam kurun waktu tahun 2013-2014 Kota Tarakan sering terjadi bencana banjir yang disebabkan oleh hujan lebat. Meskipun durasinya tidak berlangsung lama, namun banjir tersebut hampir mencapai ketinggian 3 meter. Hujan lebat juga menyebabkan bencana longsor di beberapa wilayah di Kota Tarakan, seperti yang terliput media pada tahun 2010-2014. Pada awal tahun 2015, Kabupaten Bulungan mengalami kejadian tanah longsor yang menyebabkan terputusnya jalur darat antar desa menujua ibukota kecamatan maupun ke pusat pemerintahan kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.



Gambar 2.1. 8
Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Hasil Analisis, 2014

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

A. Struktur Penduduk

1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan, selain itu penduduk juga dapat menjadi beban atau potensi pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

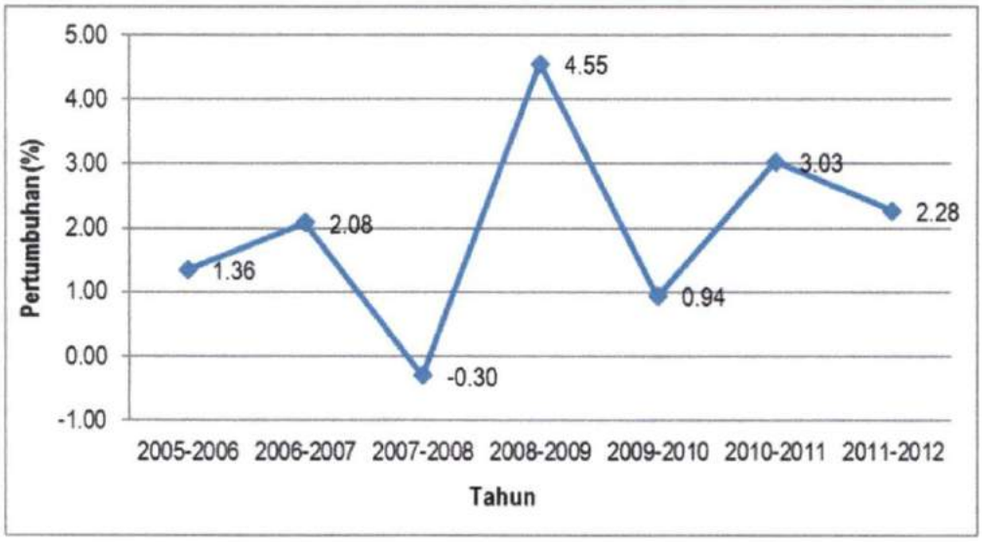
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2012 adalah 580.026 jiwa dengan rincian 308.2017 laki-laki dan 271.819 perempuan.

Tabel 2.1.11
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2005	234.005	204.936	438.941	
2006	241.135	209.893	451.028	1,36
2007	253.228	216.979	470.207	2,08
2008	248.322	219.075	467.397	-0,30
2009	271.030	240.912	511.942	4,55
2010	227.478	244.150	521.628	0,94
2011	294.674	259.550	554.224	3,03
2012	308.207	271.819	580.026	2,28

Sumber :
1) Kabupaten Malinau dalam Angka 2005-2013
2) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2005-2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka 2005-2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010-2013
5) Kota Tarakan dalam Angka 2005-2013
6) Hasil Analisis,2014

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2005-2012 cenderung fluktuatif, persentase pertumbuhan paling tinggi yaitu di tahun 2008-2009 sebesar 4,55 %. Tahun 2007-2008 persentase pertumbuhan penduduknya paling rendah yaitu -0,3 %. Jumlah penduduk provinsi ini selama tahun 2005-2012 semakin meningkat, kecuali di tahun 2007-2008. Jumlah penduduk di tahun 2005 mencapai 438.941 jiwa, sedangkan di tahun 2012 mencapai 580.026 jiwa. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi, di tahun 2012, adalah Kota Tarakan yaitu 212.100 jiwa sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Tana Tidung dengan 17.709 jiwa.



Gambar 2.1.9
Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2005-2012 sebesar 1,99%, Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung yaitu 3,14%. Relatif tingginya rata-rata pertumbuhan penduduk di kabupaten ini jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya mungkin disebabkan oleh karena kabupaten ini merupakan daerah otonom baru, yang menyebabkan migrasi masuk ke wilayah meningkat. Pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Bulungan yaitu sebesar 1,61%. Tabel 2.1.2.A.2 menunjukkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tiap kabupaten/kota tahun 2005-2012.

Tabel 2.1.12
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2005-2012

Kabupaten	Jumlah Penduduk								Pertumbuhan (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Bulungan	96.229	97.598	104.361	109.503	112.428	112.660	117.019	120.600	1,61
Malinau	50.692	47.980	50.643	53.454	56.422	59.555	62.580	66.845	1,98
Nunukan	115.210	118.737	125.585	129.011	136.042	140.841	154.269	163.402	2,50
Tana Tidung	11.009	11.621	12.637	13.240	14.620	15.202	16.356	17.079	3,14
Tarakan	165.801	175.092	176.981	162.189	192.430	193.370	204.000	212.100	1,76
Prov. Kalimantan Utara	438.941	451.028	470.207	467.397	511.942	521.628	554.224	580.026	1,99

Sumber :
1) Kabupaten Malinau dalam Angka 2005-2013
2) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2005-2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka 2005-2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010-2013
5) Kota Tarakan dalam Angka 2005-2013
6) Hasil Analisis,2014

2. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan seperti permintaan akan barang atau jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih

baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi dapat dikatakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi begitu pula sebaliknya.

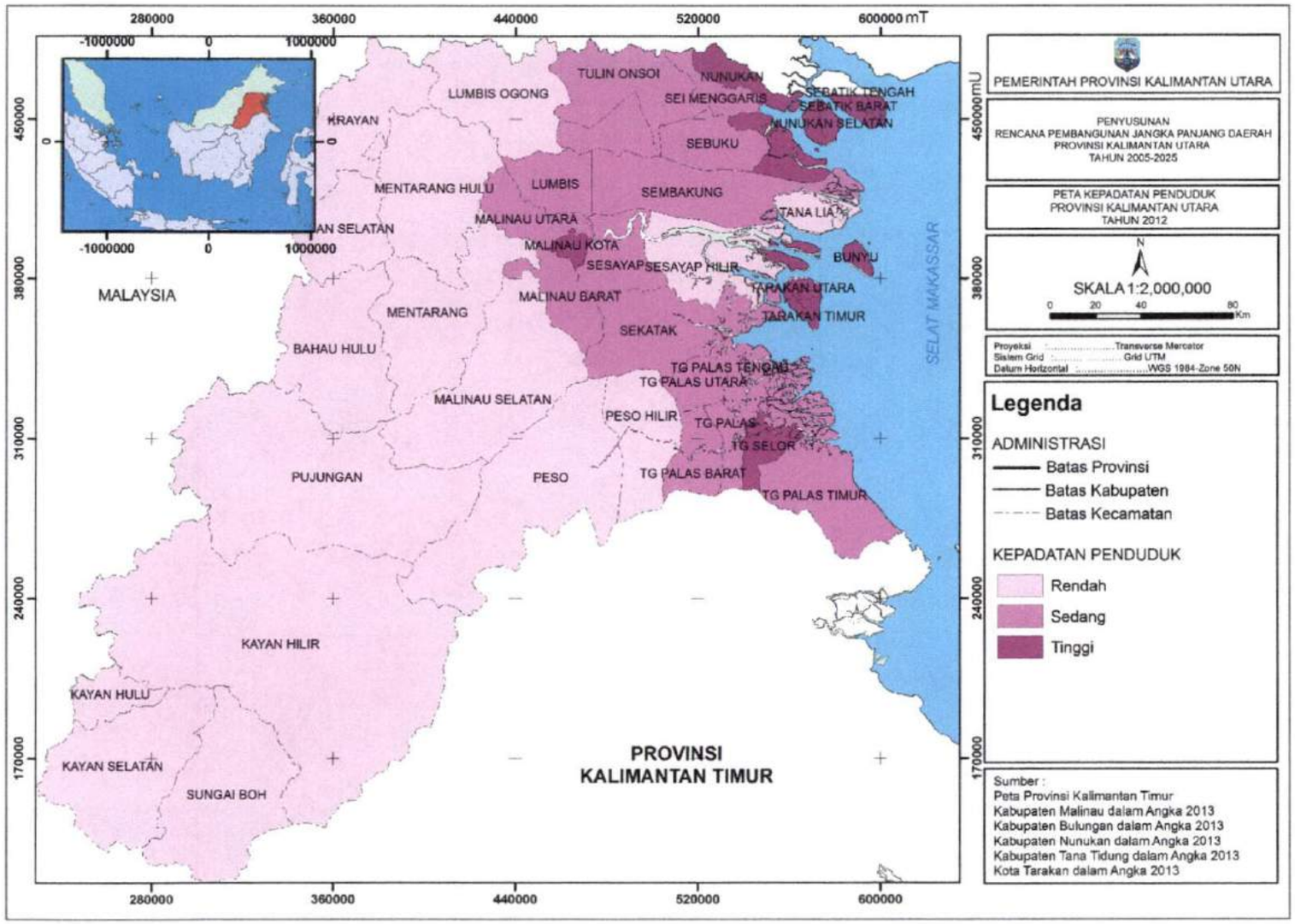
Tabel 2.1.13
Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2005-2012

Kabupaten	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	13.925,72	7	7	7	8	8	8	8	9
Malinau	39.785,94	1	1	1	1	1	1	1	2
Nunukan	13.841,90	8	9	9	9	10	10	11	12
Tana Tidung	4.828,58	2	2	3	3	3	3	3	4
Tarakan	250,81	661	698	706	647	767	771	813	846
Prov. Kalimantan Utara	75.467,71	6	6	6	6	7	7	7	8

Sumber :
1) Kabupaten Malinau dalam Angka 2005-2013
2) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2005-2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka 2005-2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010-2013
5) Kota Tarakan dalam Angka 2005-2013
6) Hasil Analisis,2014

Tabel di atas menunjukkan adanya ketimpangan dalam persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara. Kepadatan penduduk di Kota Tarakan mencapai ratusan jiwa per km² akan tetapi kabupaten/kota lainnya hanya 1-12 jiwa per km². Kota Tarakan merupakan daerah paling padat dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu mencapai 846 jiwa Km². Kabupaten Malinau merupakan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu hanya dua jiwa per km².

Kota Tarakan merupakan salah satu pusat perkembangan di Provinsi Kalimantan Utara, sarana prasarana di daerah tersebut relatif lebih lengkap sehingga menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk lebih memilih tinggal di Kota Tarakan. Sementara luas Kota Tarakan juga relatif sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di provinsi ini. Kondisi geografis juga dapat mempengaruhi persebaran penduduk, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan yang mempunyai kondisi topografi bergunung dengan kemiringan lereng sebagian besar di atas 40%, cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Kota Tarakan memiliki topografi yang landai lebih mudah untuk pengembangan permukiman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus segera meratakan persebarannya penduduk agar dapat mengurangi tekanan penduduk di satu daerah.



Gambar 2.1.10
Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012
Sumber: Hasil Pengolahan, 2014

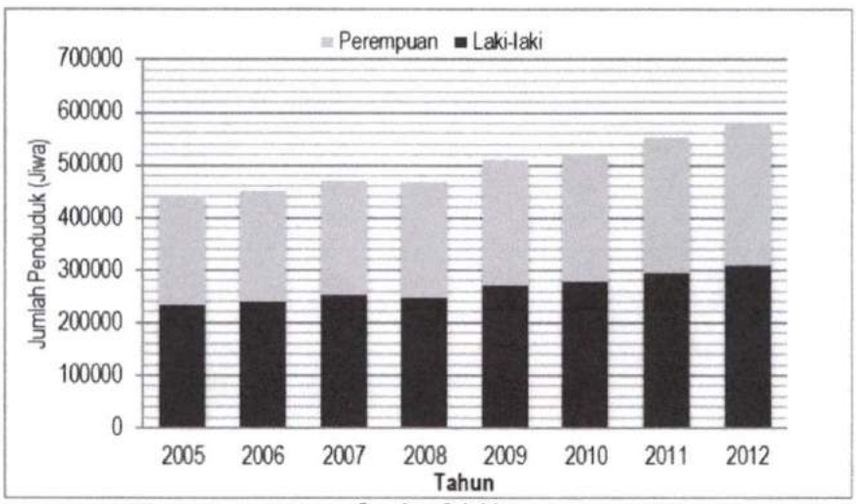
3. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah. Rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2005-2012 relatif tetap, hal ini menunjukkan perbandingan penduduk laki-laki dan wanita semakin seimbang. Rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005 adalah 1,41 sedangkan di tahun 2012 rasionya 1,16.

Tabel 2.1.14
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	
2005	234.005	204.936	141
2006	241.135	209.893	144
2007	253.228	216.979	116
2008	248.322	219.075	115
2009	271.030	240.912	116
2010	277.478	244.150	116
2011	294.674	259.550	116
2012	308.207	271.819	116

Sumber :
1) Kabupaten Malinau dalam Angka 2005-2013
2) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2005-2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka 2005-2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010-2013
5) Kota Tarakan dalam Angka 2005-2013
6) Hasil Analisis,2014



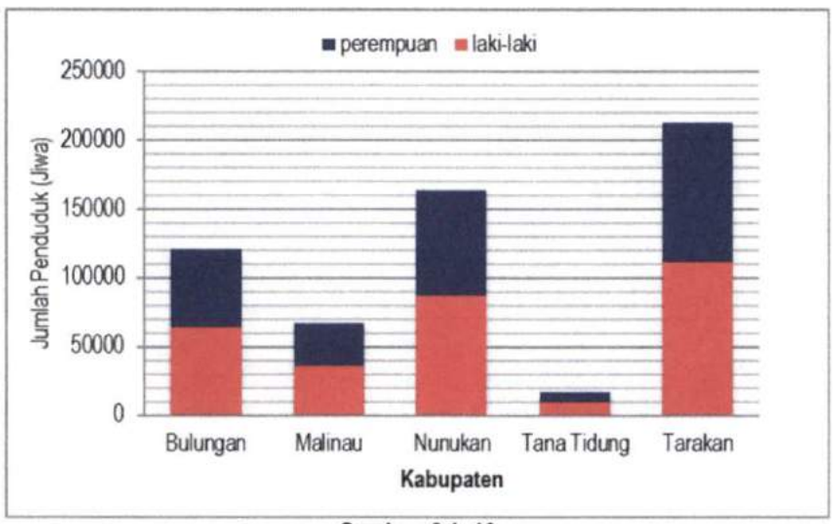
Gambar 2.1.11
Grafik Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012
Sumber :Hasil Analisis 2014

Rasio jenis kelamin tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dalam Tabel 2.1.2.A.5 dan Gambar 2.1.2.A.3. Rasio jenis kelamin paling tinggi yaitu di Kabupaten Tana Tidung yaitu 122, sedangkan yang terendah adalah Kota Tarakan rasionya adalah 110.

Tabel 2.1.15
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	
Bulungan	64.529	56.071	115
Malinau	35.960	30.885	116
Nunukan	87.224	76.178	115
Tana Tidung	9.394	7.685	122
Tarakan	111.100	101.000	110
Prov. Kalimantan Utara	308.207	271.819	116

Sumber :
1) Kabupaten Malinau dalam Angka 2013
2) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka 2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2013
5) Kota Tarakan dalam Angka 2013
6) Hasil Analisis,2014

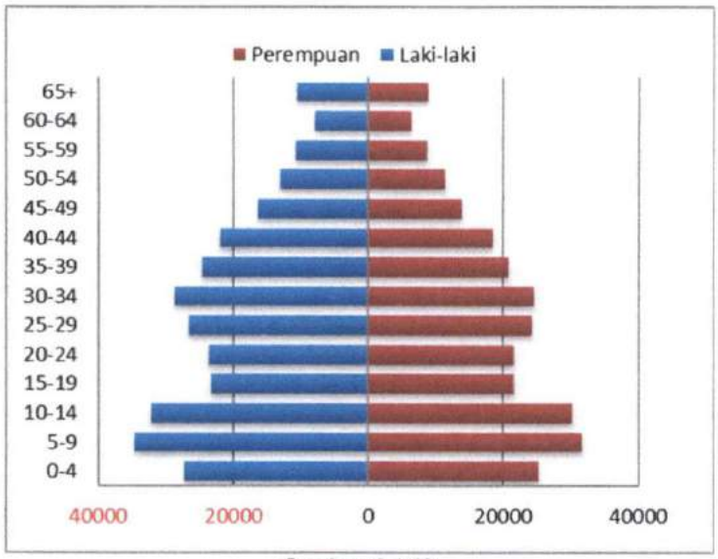


Gambar 2.1. 12
Grafik Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Gambar 2.1.2.A.4 menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok usia 5-9 dan 10-14 mempunyai jumlah paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah penduduk menurut kelompok usia 5-9 mencapai 66.314 jiwa dan usia 10-14 sebanyak 62.437 jiwa. Jumlah penduduk usia 5-9 dan 10-14 mencapai 21% dari total penduduk.

Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengembang di bagian bawah yang artinya penduduk usia muda cukup dominan di provinsi ini. Persentase usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 64%, sedangkan usia tua (64 tahun ke atas) persentasenya mencapai 3%. Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



Gambar 2.1.13
Grafik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

5. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Tabel 2.1.2.A.6 menunjukkan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan agama yang dianut tahun 2010. Mayoritas penduduk di provinsi ini memeluk agama Islam, yaitu 72%, kemudian diikuti pemeluk agama Kristen sebesar 20,84% dan pemeluk Katolik sebesar 5,60%. Keberagaman agama di provinsi ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan agar dapat hidup dengan harmonis.

Tabel 2.1.16
Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010

Keterangan	Penduduk	
	Jumlah	%
Islam	378.478	72,14
Kristen	109.358	20,84
Katolik	29.366	5,60
Hindu	288	0,05
Budha	3.879	0,74
Khong Hu Chu	175	0,03
Lainnya	25	0,00
Tidak Terjawab	454	0,09
Tidak Ditanyakan	2.633	0,50

Sumber: Sensus Penduduk tahun 2010

6. Komposisi Penduduk Menurut Suku

Jika didasarkan pada suku, provinsi ini memiliki keanekaragaman suku yang cukup tinggi. Suku Dayak Kayan, Dayak Kenyah, Berusu, Dayak Punan, Bulungan, Lundayeh, Tingalan, Tidung merupakan penduduk asli provinsi ini. Sementara suku Jawa, Bugis dan Toraja merupakan penduduk pendatang.

Tabel 2.1.17
Suku Mayoritas Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Suku
Bulungan	Jawa, Berusu, Bulungan, Dayak Kayan, Dayak Kenyah, Bugis,
Malinau	Dayak Punan, Lundayeh, Dayak Kenyah, Jawa, Tidung
Nunukan	Bugis, Lundayeh, Tingalan, Tagol, Makassar
Tana Tidung	Dayak Berusu, Tidung, Lundayeh, Jawa
Tarakan	Bugis, Jawa, Toraja, Tidung, Banjar

Sumber : Dokumen Potensi Desa (Podes) Tahun 2011

Tabel di atas menunjukkan suku Jawa sebagian besar tinggal di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, hal ini mungkin disebabkan karena Kota Tarakan merupakan kota jasa dan perdagangan yang sudah sejak lama terbentuk, sementara Kabupaten Bulungan merupakan wilayah tujuan dari transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Suku Bugis, yang dikenal sebagai suku perantau dan penjelajah wilayah-wilayah di tepi pantai banyak berdiam di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Keberagaman suku-suku yang ada di provinsi ini merupakan modal sosial dasar bagi pembangunan, sepanjang kerjasama dapat diciptakan dan dibangun di antara semua suku tersebut.

B. Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usaha/lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sebagian besar penduduk masih memiliki mata pencaharian di sektor primer yakni pertanian terutama di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2005, dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian, namun selama kurun waktu tersebut telah terjadi pergeseran, dimana penduduk yang bergerak di sektor pertanian semakin berkurang selama 5 tahun dari 80% menjadi 40% (Podes). Pertanian, jasa dan perdagangan merupakan lapangan usaha utama penduduk Provinsi Kalimantan Utara karena 75% masyarakat bekerja di bidang-bidang tersebut, dengan rincian, pertanian (41%), jasa (21%) dan perdagangan (13%).

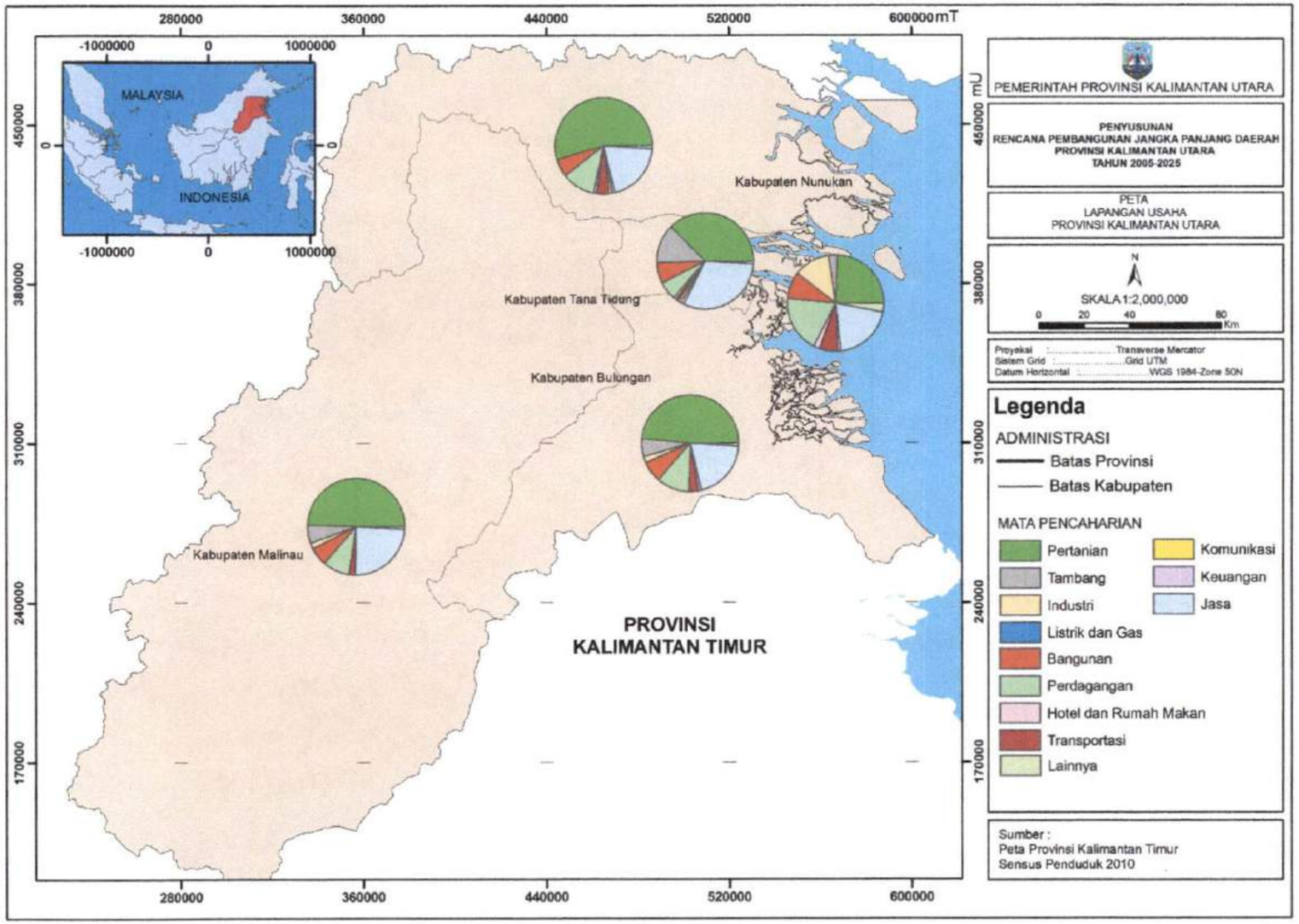
Sementara sektor jasa merupakan mata pencaharian terbesar kedua, diikuti sektor perdagangan bagi penduduk setelah sektor pertanian di semua kabupaten dan kota provinsi ini. Kota Tarakan sebagai kota jasa dan perdagangan memperlihatkan tingginya (18,74%) penduduk yang bergerak di sektor ini dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi sektor tersier mulai berkembang di kota ini. Hal ini ditunjukkan oleh tumbuh dan beerkembangnya industri pengolahan yang memungkinkan penduduk untuk masuk dalam kegiatan ekonomi tersebut dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.1.18
Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 (%)

Kabupaten/ Kota	Lapangan Usaha (%)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Malinau	48,63	6,18	1,91	0,10	5,64	8,83	0,47	2,42	0,22	0,27	24,15	1,17
Bulungan	48,36	5,71	1,81	0,26	7,34	10,68	0,87	3,16	0,26	0,37	20,10	1,07
Nunukan	53,99	0,87	0,90	0,19	5,93	10,97	1,13	3,77	0,43	0,46	20,12	1,23
Tana Tidung	37,38	13,43	0,97	0,14	6,97	5,99	0,98	1,50	0,23	0,25	30,75	1,39
Kota Tarakan	23,72	2,95	11,63	0,70	8,52	18,74	2,42	6,33	0,95	1,16	20,19	2,69

Sumber: Sensus Penduduk 2010

Keterangan :
1 = Pertanian; 2 = Pertambangan dan Penggalian; 3 = Industri Pengolahan; 4 = Listrik dan Gas; 5 = Kontruksi/Bangunan; 6 = Perdagangan; 7 = Hotel dan Rumah Makan; 8 = Transportasi dan Pergudangan; 9 = Informasi dan Komunikasi; 10 = Keuangan dan Asuransi; 11 = Jasa 12 = Lainnya



Gambar 2.1.14
Peta Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010
Sumber : Hasil Pengolahan, 2014

C. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu. Ukuran-ukuran migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Data migrasi dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah asal dan wilayah migran selain itu dapat digunakan juga untuk proyeksi penduduk berdasarkan asumsi perpindahan di masa mendatang.

Tabel 2.1.19
Penduduk Berdasarkan Status Migrasi Berdasarkan Wilayah Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Status Migrasi (%)	
	Non Migran Kabupaten/Kota	Migran Kabupaten/Kota
Bulungan	59,14	40,86
Malinau	73,28	26,72
Nunukan	54,98	45,02
Tana Tidung	57,81	42,19
Kota Tarakan	48,36	51,64
Prov. Kalimantan Timur	55,32	44,68

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Tabel di atas memperlihatkan penduduk berdasarkan status migrasinya, sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara merupakan penduduk asli. Migran kabupaten/kota menunjukkan banyaknya migrasi penduduk dari wilayah sekitar yang masuk ke daerah tersebut. Angka migrasi paling tinggi di Kota Tarakan yaitu 51%, hal ini tidak mengherankan karena Kota Tarakan merupakan daerah paling berkembang. di provinsi ini. Masyarakat yang bermigrasi dengan alasan ekonomi tentu akan mendatangi pusat kegiatan ekonomi yang berada di Kota Tarakan sehingga angka migrasi menuju Kota Tarakan relatif tinggi.

Angka migrasi masuk ke kabupaten lainnya tidak terlalu tinggi karena potensi ekonomi belum setinggi Kota Tarakan. Kabupaten Malinau memiliki persentase migrasi masuk paling rendah yaitu 26%. Kabupaten Malinau dengan kondisi geografis wilayah bergunung dan didominasi hutan kurang memungkinkan memiliki daya tarik yang besar untuk migrasi, kecuali jika ada transmigran dengan penempatan di Kabupaten Malinau.

D. Fertilitas

1. Angka Fertilitas Total dan ASFR

Angka fertilitas total (*Total Fertility Rate*, TFR) didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan angka fertilitas menurut umur (*Age Specific Fertility Rates*, ASFR) menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh perempuan kelompok umur tertentu antara 15-49 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur tertentu per 1000 perempuan.

Tabel 2.1.20
TFR dan ASFR di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010

Kabupaten/Kota	ASFR							TFR
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Bulungan	24	168	173	87	57	16	4	2,64
Malinau	38	224	143	137	69	27	7	3,22
Nunukan	31	124	160	118	85	33	1	2,76
Tana Tidung	45	130	161	110	85	36	1	2,85
Kota Tarakan	37	151	164	108	61	17	10	2,74

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Keterangan : Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa angka masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan

Tabel ASFR dan TFR kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan melahirkan 2-3 anak sampai akhir masa reproduksinya. Angka TFR tertinggi ada di Kabupaten Malinau dengan 3,22 anak dan terendah di Kabupaten Bulungan dengan 2,64 anak. Jumlah kelahiran terbanyak seorang perempuan adalah di usia 20-24, 25-29 tahun. Angka Fertilitas dapat dijadikan dasar proyeksi pertambahan penduduk sehingga memudahkan pemerintah untuk mempersiapkan kebutuhan fasilitas umum seperti kesehatan dan pendidikan.

2. Anak Lahir Hidup

Anak lahir hidup (ALH) adalah semua anak yang waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya.

Tabel 2.1.21
Angka Anak Lahir Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Rata-rata Banyaknya Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup										
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55+	ALH
Bulungan	0,00	0,12	0,77	1,54	2,36	2,89	3,26	3,52	3,66	4,25	1,98
Malinau	0,00	0,12	0,82	1,60	2,48	3,19	3,57	3,73	3,93	4,30	1,98
Nunukan	0,00	0,11	0,77	1,57	2,35	3,03	3,56	3,78	4,13	4,37	1,97
Tana Tidung	0,00	0,14	0,66	1,38	2,18	2,87	3,50	3,81	4,30	4,65	1,94
Kota Tarakan	0,00	0,07	0,57	1,28	2,01	2,57	3,01	3,35	3,50	4,11	1,71

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Keterangan : Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa angka masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan

Tabel angka lahir hidup menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki angka paling tinggi yaitu 1,97 dan Kota Tarakan paling rendah yaitu 1,71. Semakin tinggi usia perempuan tersebut melahirkan maka kelahiran hidup akan semakin tinggi. Semakin muda perempuan melahirkan maka angka lahir hidup semakin kecil. Kelahiran di usia muda banyak memiliki resiko seperti kondisi bayi ataupun kondisi ibu yang rentan.

3. Anak Masih Hidup

Anak masih hidup (AMH) adalah semua anak yang dilahirkan hidup pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah. Indikator ini untuk menunjukkan bayi yang masih hidup setelah dilahirkan, hal ini mengindikasikan keadaan kesehatan bayi dan ibu.

Tabel 2.1.22
Anak Masih Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup										
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55+	AMH
Malinau	0,00	0,12	0,80	1,56	2,40	3,10	3,43	3,51	3,62	3,82	1,87
Bulungan	0,00	0,11	0,75	1,51	2,30	2,81	3,13	3,34	3,42	3,80	1,88
Nunukan	0,00	0,10	0,75	1,53	2,27	2,91	3,39	3,54	3,79	3,89	1,85
Tana Tidung	0,00	0,14	0,65	1,33	2,11	2,77	3,39	3,66	4,06	4,16	1,85
Kota Tarakan	0,00	0,07	0,56	1,26	1,98	2,52	2,92	3,24	3,32	3,78	1,65

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Keterangan : Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa angka masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan

Anak masih hidup kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2010 tidak jauh berbeda, dengan kisaran 1,65-1,87.. AMH paling tinggi terdapat di Kabupaten Bulungan yaitu 1,88 dan paling rendah di Kota Tarakan dengan 1,65. Semakin tinggi usia perempuan tersebut melahirkan maka angka anak masih hidup akan semakin tinggi. Semakin muda perempuan melahirkan maka angka anak masih hidup semakin kecil.

E. Perkawinan

Konsep perkawinan lebih difokuskan kepada keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini hidup bersama dapat dikukuhkan dengan perkawinan yang syah sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ada (*perkawinan de jure*) ataupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*).

Sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara sudah mempunyai status kawin, sedangkan sebagian kecil memiliki status cerai baik karena ditinggal mati ataupun hidup. Status perkawinan paling tinggi berada di Kota Tarakan yaitu 62% sedangkan yang terendah di Kabupaten Tana Tidung yaitu hanya 55%. Tinggi rendahnya angka perkawinan di suatu daerah akan mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas di daerah tersebut.

Tabel 2.1.23
Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan (%)				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Tidak Ditanyakan
Malinau	38	56	1	3	2
Bulungan	36	59	2	4	0
Nunukan	37	57	2	3	0
Tana Tidung	41	55	2	3	0
Kota Tarakan	33	62	2	3	1

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Keterangan : Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa angka masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Perkembangan PDRB

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu Indikator yang krusial dalam analisis perkembangan wilayah. Peningkatan PDRB dalam rentang waktu tertentu dapat menggambarkan dinamika kegiatan ekonomi penduduk di dalam wilayah tersebut.

Dalam rentang waktu tahun 2007-2012, PDRB Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren positif dimana selalu terjadi peningkatan nilai PDRB. Pada Tahun 2012, PDRB Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai nilai sebesar 7,03 triliun rupiah, sedangkan PDRB tanpa migas ADHK sebesar 6,67 triliun rupiah.

Selain dapat dimanfaatkan untuk mengalisis perkembangan perekonomian penduduk, PDRB juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur perekonomian dari suatu wilayah. Melalui kontribusi masing-masing sektor/lapangan usaha yang ada, akan diperoleh kesimpulan mengenai lapangan usaha yang menjadi sektor utama dalam wilayah yang bersangkutan.

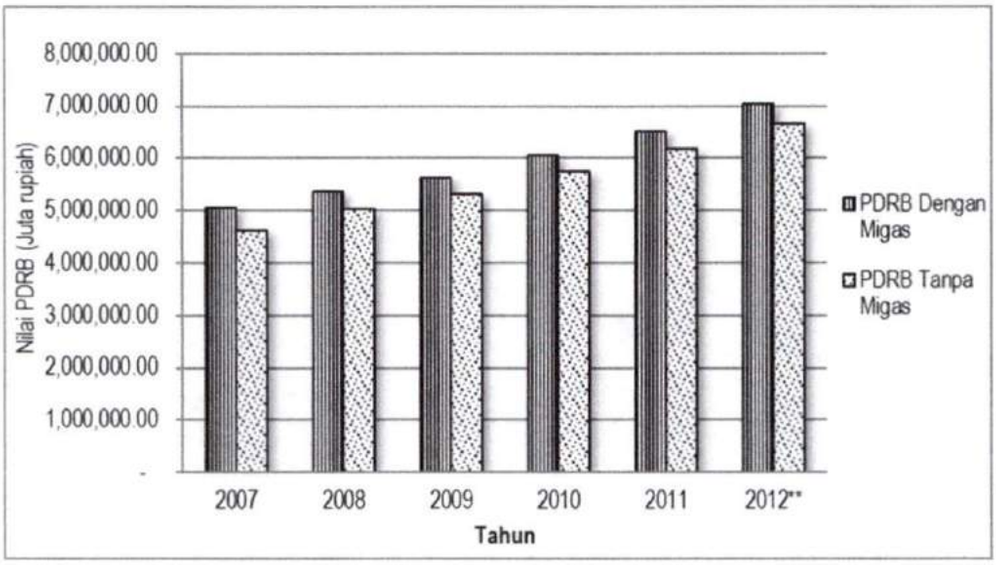
Melalui data pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa selisih antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dari tahun 2007-2012 sukup besar yaitu sekitar 300-450 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa migas merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.2.1
PDRB Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga KonstanTahun 2007-2012

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012*
1	**Pertanian**	**1.133.589,59**	**1.147.082,74**	**1.151.884,36**	**1.196.790,88**	**1.237.801,56**	**1.261.728,87**
	a. Tanaman Bahan Pangan	205.600,42	218.452,97	235.245,75	237.228,18	236.833,31	219.316,36
	b. Tanaman Perkebunan	71.076,47	95.358,64	122.781,91	139.835,65	144.943,64	152.596,91
	c. Peternakan dan Hasil-Hasilnya	126.337,39	135.255,78	144.338,44	148.496,44	152.055,66	165.195,75
	d. Kehutanan	482.258,80	426.592,55	350.666,66	347.622,02	345.849,57	347.176,08
	e. Perikanan	248.316,51	271.422,80	298.851,60	323.608,59	358.119,38	377.443,77
2	**Pertambangan dan Penggalian**	**985.375,81**	**1.067.942,68**	**1.184.422,64**	**1.333.611,19**	**1.537.959,02**	**1.754.529,66**
	a. Minyak dan Gas Bumi	430.923,60	349.333,67	324.292,20	309.260,06	335.846,66	361.934,38
	b. Pertambangan Tanpa Migas	508.212,95	670.034,17	809.198,27	972.940,12	1.147.721,12	1.337.316,25
	c. Penggalian	46.239,26	48.574,84	50.932,17	51.411,01	54.391,24	55.279,03
3	**Industri Pengolahan**	**359.436,44**	**389.717,24**	**369.719,79**	**341.575,63**	**304.575,49**	**315.983,66**
	a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	359.436,44	389.717,24	369.719,79	341.575,63	304.575,49	315.983,66
4	**Listrik, Gas dan Air Minum**	**70.741,91**	**75.762,99**	**80.230,34**	**86.179,63**	**92.809,66**	**97.624,81**
	a. Listrik	65.157,80	69.799,75	73.844,12	79.145,73	84.955,43	89.031,96
	b. Gas	-	-	-	-	-	1,12
	c. Air Minum	5.584,11	5.963,24	6.386,22	7.033,90	7.854,23	8.591,73
5	**Bangunan**	**310.470,85**	**341.138,71**	**366.344,38**	**402.170,03**	**424.213,08**	**447.662,38**
6	**Perdagangan, Hotel dan Restoran**	**1.314.723,52**	**1.390.215,58**	**1.450.957,43**	**1.583.366,19**	**1.715.921,29**	**1.867.077,27**
	a. Perdagangan	1.175.851,77	1.243.702,65	1.294.677,18	1.416.774,68	1.537.206,71	1.674.684,35
	b. Hotel	31.811,25	34.143,36	36.812,12	39.422,87	41.649,03	43.263,80
	c. Restoran	107.060,50	112.369,57	119.468,13	127.168,64	137.065,55	149.129,12
7	**Pengangkutan dan Komunikasi**	**367.525,27**	**407.060,95**	**441.916,18**	**477.981,37**	**518.300,85**	**559.097,77**
	a. Angkutan	256.828,91	282.810,82	302.535,93	323.008,24	348.089,71	371.762,08
	a1. Angkutan Jalan Raya	18.385,87	19.473,95	20.716,30	21.885,65	23.281,78	24.350,29
	a2. Angkutan Penyeberangan	10.887,22	11.262,01	12.093,23	13.274,83	14.040,59	14.820,85
	a3. Angkutan Laut	100.355,20	106.507,27	110.585,26	116.821,29	126.383,84	133.987,87
	a4. Angkutan Udara	95.839,08	110.035,88	119.113,79	128.165,79	137.917,24	148.512,33
	a5. Jasa Penumpang Angkutan	31.361,54	35.531,71	40.027,35	42.860,68	46.466,26	50.090,74
	b. Komunikasi	110.696,36	124.250,13	139.380,25	154.973,13	170.211,14	187.335,69
8	**Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**	**223.783,46**	**237.692,09**	**252.546,45**	**272.946,77**	**300.922,73**	**326.059,93**
	a. Bank	74.261,31	74.339,06	77.832,83	83.477,74	94.848,99	103.570,80
	b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	13.845,03	15.978,50	16.789,52	18.475,16	19.458,24	20.335,18
	c. Jasa Penunjang Keuangan	144,53	163,00	177,26	186,36	195,84	210,58
	d. Sewa Bangunan	133.757,88	145.263,81	155.546,23	168.384,18	183.775,81	199.109,26
	e. Jasa Perusahaan	1.774,71	1.947,72	2.200,61	2.423,33	2.643,85	2.834,11
9	**Jasa-Jasa**	**287.465,42**	**314.323,50**	**336.170,59**	**363.143,28**	**382.298,76**	**400.146,92**
	a. Pemerintahan Umum	251.535,92	275.239,40	294.323,65	319.062,10	335.158,61	349.917,13
	b. Swasta	35.929,50	39.084,10	41.846,94	44.081,18	47.140,15	50.229,79
	b1. Jasa Hiburan dan Rekreasi	9.504,95	10.402,78	11.234,85	9.595,56	10.275,31	10.928,80
	b2. Jasa Sosial Kemasyarakatan	10.636,66	11.390,77	12.032,81	14.969,16	16.285,41	17.521,51
	b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	15.787,89	17.290,55	18.579,28	19.516,46	20.579,43	21.779,48
PDRB Dengan Migas		**5.053.112,27**	**5.370.936,48**	**5.634.192,16**	**6.057.764,97**	**6.514.802,44**	**7.029.911,27**
PDRB Tanpa Migas		**4.622.188,67**	**5.021.602,81**	**5.309.899,96**	**5.748.504,91**	**6.178.955,78**	**6.667.976,89**

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2010 dan 2000-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah

Keterangan:*angka sementara*
Catatan: *PDRB Provinsi Kalimantan Utara adalah hasil akumulasi dari PDRB kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan*



Gambar 2.2.1
Grafik Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Untuk melihat lebih lanjut sektor apa saja yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu dilihat kontribusi dari sektor yang ada. Melalui persentase kontribusi, akan diketahui sektor apa saja yang mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dan bagaimana tren perkembangannya.

Tabel 2.2.2

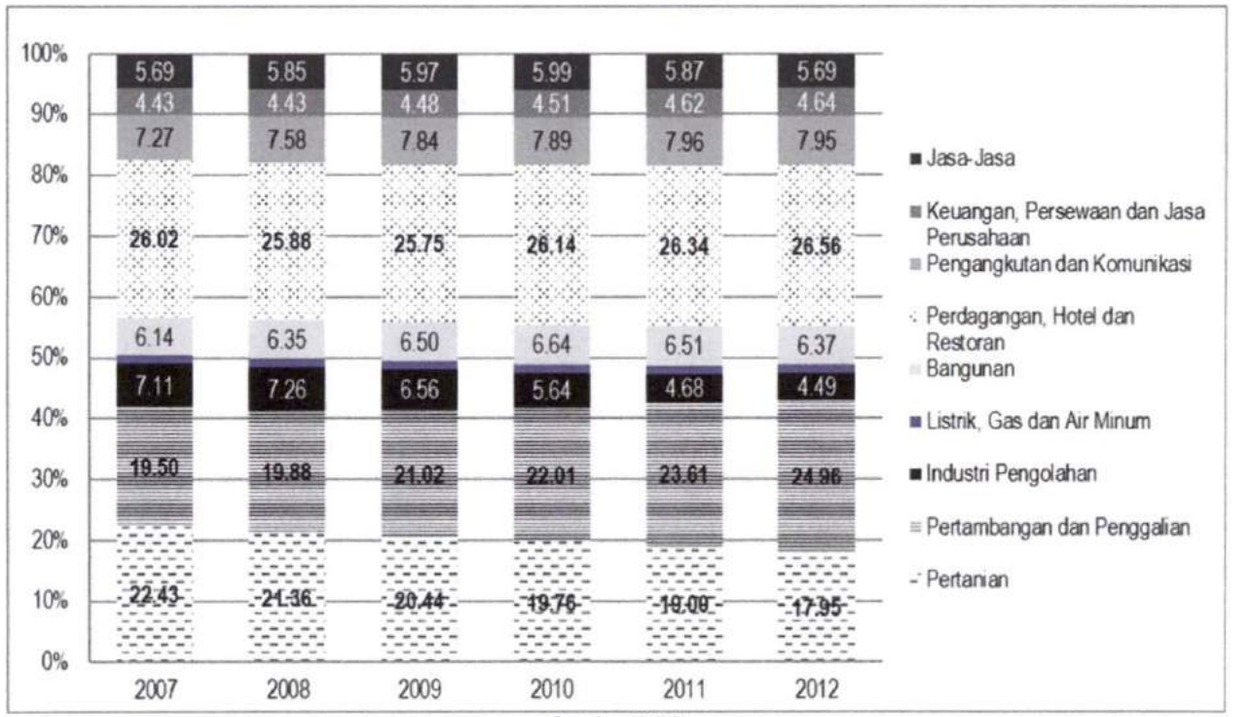
Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)													
		dengan Migas							Tanpa Migas						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pergeseran	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pergeseran
1	**Pertanian**	**22,43**	**21,36**	**20,44**	**19,76**	**19,00**	**17,95**	**-4,49**	**24,52**	**22,84**	**21,69**	**20,82**	**20,03**	**18,92**	**-5,60**
	a. Tanaman Bahan Pangan	4,07	4,07	4,18	3,92	3,64	3,12	-0,95	4,45	4,35	4,43	4,13	3,83	3,29	-1,16
	b. Tanaman Perkebunan	1,41	1,78	2,18	2,31	2,22	2,17	0,76	1,54	1,90	2,31	2,43	2,35	2,29	0,75
	c. Peternakan dan Hasil-Hasilnya	2,50	2,52	2,56	2,45	2,33	2,35	-0,15	2,73	2,69	2,72	2,58	2,46	2,48	-0,26
	d. Kehutanan	9,54	7,94	6,22	5,74	5,31	4,94	-4,61	10,43	8,50	6,60	6,05	5,60	5,21	-5,23
	e. Perikanan	4,91	5,05	5,30	5,34	5,50	5,37	0,45	5,37	5,41	5,63	5,63	5,80	5,66	0,29
2	**Pertambangan dan Penggalian**	**19,50**	**19,88**	**21,02**	**22,01**	**23,61**	**24,96**	**5,46**	**12,00**	**14,31**	**16,20**	**17,82**	**19,45**	**20,88**	**8,89**
	a. Minyak dan Gas Bumi	8,53	6,50	5,76	5,11	5,16	5,15	-3,38							0,00
	b. Pertambangan Tanpa Migas	10,06	12,48	14,36	16,06	17,62	19,02	8,97	11,00	13,34	15,24	16,93	18,57	20,06	9,06
	c. Penggalian	0,92	0,90	0,90	0,85	0,83	0,79	-0,13	1,00	0,97	0,96	0,89	0,88	0,83	-0,17
3	**Industri Pengolahan**	**7,11**	**7,26**	**6,56**	**5,64**	**4,68**	**4,49**	**-2,62**	**7,78**	**7,76**	**6,96**	**5,94**	**4,93**	**4,74**	**-3,04**
	a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	b. Industri Tanpa Migas	7,11	7,26	6,56	5,64	4,68	4,49	-2,62	7,78	7,76	6,96	5,94	4,93	4,74	-3,04
4	**Listrik, Gas dan Air Minum**	**1,40**	**1,41**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,39**	**-0,01**	**1,53**	**1,51**	**1,51**	**1,50**	**1,50**	**1,46**	**-0,07**
	a. Listrik	1,29	1,30	1,31	1,31	1,30	1,27	-0,02	1,41	1,39	1,39	1,38	1,37	1,34	-0,07
	b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Air Minum	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,01	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,01
5	**Bangunan**	**6,14**	**6,35**	**6,50**	**6,64**	**6,51**	**6,37**	**0,22**	**6,72**	**6,79**	**6,90**	**7,00**	**6,87**	**6,71**	**0,00**
6	**Perdagangan, Hotel dan Restoran**	**26,02**	**25,88**	**25,75**	**26,14**	**26,34**	**26,56**	**0,54**	**28,44**	**27,68**	**27,33**	**27,54**	**27,77**	**28,00**	**-0,44**
	a. Perdagangan	23,27	23,16	22,98	23,39	23,60	23,82	0,55	25,44	24,77	24,38	24,65	24,88	25,12	-0,32
	b. Hotel	0,63	0,64	0,65	0,65	0,64	0,62	-0,01	0,69	0,68	0,69	0,69	0,67	0,65	-0,04
	c. Restoran	2,12	2,09	2,12	2,10	2,10	2,12	0,00	2,32	2,24	2,25	2,21	2,22	2,24	-0,08
7	**Pengangkutan dan Komunikasi**	**7,27**	**7,58**	**7,84**	**7,89**	**7,96**	**7,95**	**0,68**	**7,95**	**8,11**	**8,32**	**8,31**	**8,39**	**8,38**	**0,43**
	a. Angkutan	5,08	5,27	5,37	5,33	5,34	5,29	0,21	5,56	5,63	5,70	5,62	5,63	5,58	0,02
	a1. Angkutan Jalan Raya	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	-0,02	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	-0,03
	a2. Angkutan Penyeberangan	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	0,00	0,24	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	-0,01
	a3. Angkutan Laut	1,99	1,98	1,96	1,93	1,94	1,91	-0,08	2,17	2,12	2,08	2,03	2,05	2,01	-0,16
	a4. Angkutan Udara	1,90	2,05	2,11	2,12	2,12	2,11	0,22	2,07	2,19	2,24	2,23	2,23	2,23	0,15
	a5. Jasa Penumpang Angkutan	0,62	0,66	0,71	0,71	0,71	0,71	0,09	0,68	0,71	0,75	0,75	0,75	0,75	0,07
	b. Komunikasi	2,19	2,31	2,47	2,56	2,61	2,66	0,47	2,39	2,47	2,62	2,70	2,75	2,81	0,41
8	**Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**	**4,43**	**4,43**	**4,48**	**4,51**	**4,62**	**4,64**	**0,21**	**4,84**	**4,73**	**4,76**	**4,75**	**4,87**	**4,89**	**0,05**
	a. Bank	1,47	1,38	1,38	1,38	1,46	1,47	0,00	1,61	1,48	1,47	1,45	1,54	1,55	-0,05
	b. Lemaga Keuangan Bukan Bank	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,02	0,30	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,01
	c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Sewa Bangunan	2,65	2,70	2,76	2,78	2,82	2,83	0,19	2,89	2,89	2,93	2,93	2,97	2,99	0,09
	e. Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
9	**Jasa-Jasa**	**5,69**	**5,85**	**5,97**	**5,99**	**5,87**	**5,69**	**0,00**	**6,22**	**6,26**	**6,33**	**6,32**	**6,19**	**6,00**	**-0,22**
	a. Pemerintahan Umum	4,98	5,12	5,22	5,27	5,14	4,98	0,00	5,44	5,48	5,54	5,55	5,42	5,25	-0,19
	b. Swasta	0,71	0,73	0,74	0,73	0,72	0,71	0,00	0,78	0,78	0,79	0,77	0,76	0,75	-0,02
	b1. Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,19	0,19	0,20	0,16	0,16	0,16	-0,03	0,21	0,21	0,21	0,17	0,17	0,16	-0,04
	b2. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,21	0,21	0,21	0,25	0,25	0,25	0,04	0,23	0,23	0,23	0,26	0,26	0,26	0,03
	b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	0,31	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,00	0,34	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	-0,01

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)													
		dengan Migas							Tanpa Migas						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pergeseran	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pergeseran
PDRB Dengan Migas		100	100	100	100	100	100	0							0
PDRB Tanpa Migas									100	100	100	100	100	100	

Sumber:

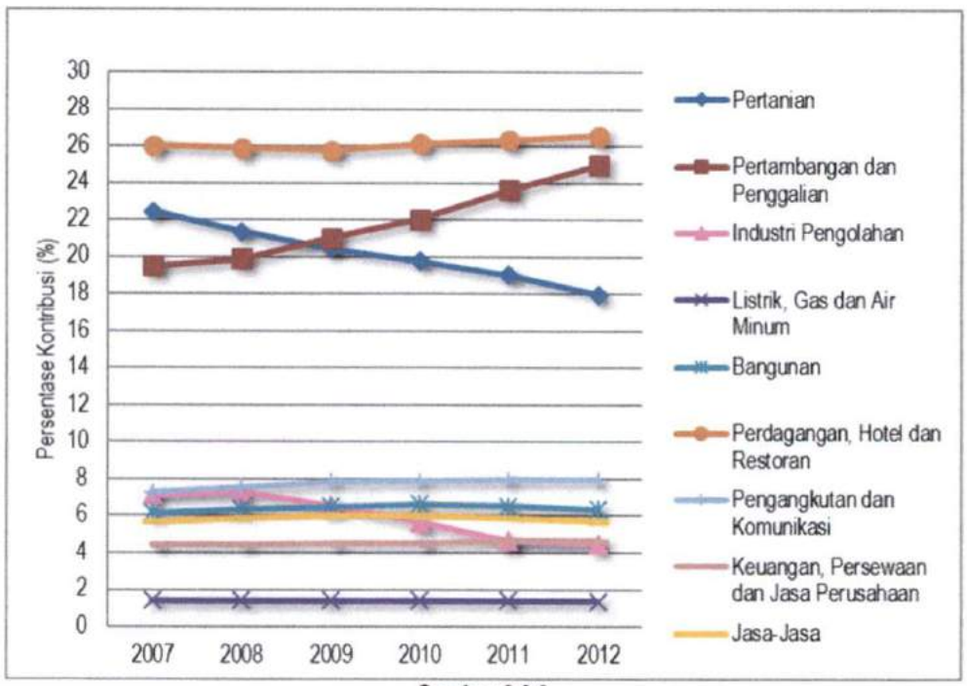
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah



Gambar 2.2.2
Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Sektor perekonomian yang paling dominan di Provinsi Kalimantan Utara adalah kegiatan perdagangan, hotel dan restoran. Dalam data PDRB ADHK dengan migas, pada tahun 2012 kontribusi sektor ini mencapai seperempat nilai total PDRB (26,56%). Sektor lain yang juga memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 24,96%. Meskipun dalam sektor ini sub sektor pertambangan migas mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun sub sektor pertambangan tanpa migas yang mengalami kenaikan secara cukup signifikan membuat sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang positif.

Sektor yang memiliki kontribusi besar lainnya adalah sektor pertanian. Namun, kontribusi sektor ini selama lima tahun terakhir menunjukkan tren negatif dengan penurunan secara konsisten. Hal ini dapat diidentifikasi melalui pergeseran nilai kontribusi sektor pertanian yang relatif besar dari tahun 2007-2012 yaitu mencapai -4,49%.Pergeseran persentase nilai kontribusi yang cukup besar pada sektor pertanian paling banyak disumbang oleh sub sektor kehutanan. Sub sektor ini dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan persentase kontribusi yang cukup drastis dibandingkan dengan sub sektor peternakan dan perkebunan.



Gambar 2.2.3
Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektoral
PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

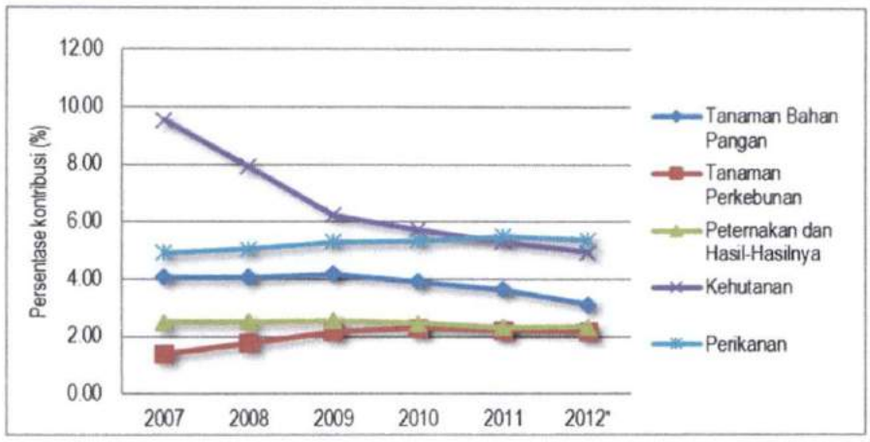
a. Sektor Pertanian

Terdapat lima sub sektor yang berperan dalam pembentukan PDRB sektor pertanian. Dalam kasus Provinsi Kalimantan Utara, sub sektor perikanan dan kehutanan merupakan sub sektor yang memiliki persentase paling besar. Luasnya wilayah hutan yang dimiliki provinsi ini (kurang lebih 80% dari total luas wilayah) menjadikan nilai tambah sub sektor ini lebih besar dibanding sub sektor lainnya. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi tren perkembangannya, sub sektor kehutanan menunjukkan penurunan dari segi proporsinya dalam sektor pertanian. Apabila dibandingkan dengan tren positif yang ditunjukkan oleh sub sektor tanaman perkebunan, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan penurunan yang terjadi pada sub sektor kehutanan adalah karena mulai maraknya fenomena pembukaan lahan untuk pengembangan areal perkebunan.

Tabel 2.2.3
Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

No	Lapangan Usaha	Perkembangan Proporsi Sub Sektor (%)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Pertanian		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
a	Tanaman Bahan Pangan	18,14	19,04	20,42	19,82	19,13	17,38
b	Tanaman Perkebunan	6,27	8,31	10,66	11,68	11,71	12,09
c	Peternakan dan Hasil-Hasilnya	11,14	11,79	12,53	12,41	12,28	13,09
d	Kehutanan	42,54	37,19	30,44	29,05	27,94	27,52
e	Perikanan	21,91	23,66	25,94	27,04	28,93	29,91

Sumber: Hasil Analisis, 2014



Gambar 2.2.4
Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Sementara apabila dilihat dari segi sebaran spasial, pada tahun 2012 kabupaten/kota yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB sektor pertanian adalah Kabupaten Nunukan dengan persentase kontribusi sebesar 32,7% dari total nilai PDRB sektor pertanian. Sementara untuk kabupaten/kota dengan persentase kontribusi paling kecil adalah Kabupaten Tana Tidung yang hanya menyumbang 5,4% dari total nilai PDRB sektor pertanian.

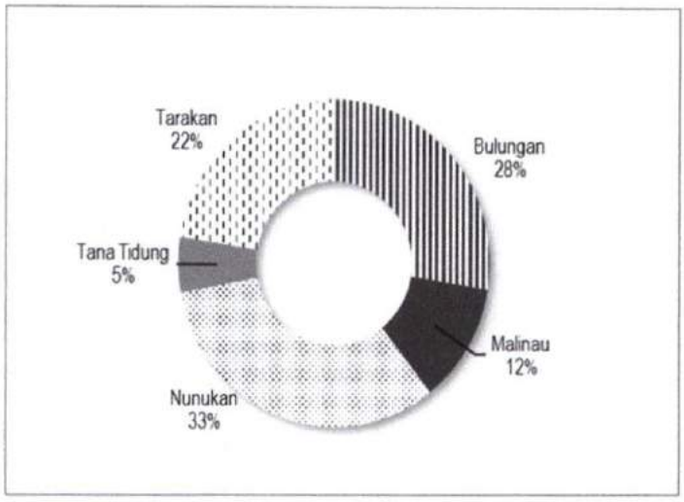
Tabel 2.2.4
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Kontribusi Sektoral (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	23,3	24,4	25,3	26,5	27,4	27,5
Malinau	20,3	18,5	14,8	14,4	13,0	11,9
Nunukan	31,9	31,7	33,4	32,6	32,4	32,7
Tana Tidung	5,1	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4
Tarakan	19,4	20,0	21,0	21,0	21,7	22,5
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*

Selain dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kegiatan sektor pertanian terpusat di Kabupaten Nunukan, melalui tren kontribusi yang ditunjukkan oleh masing-masing kabupaten/kota juga diketahui bahwa dari lima kabupaten/kota yang ada, Kabupaten Malinau adalah satu-satunya wilayah yang mengalami perkembangan negatif (penurunan persentase kontribusi) dalam sektor pertanian.



Gambar 2.2.5
Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan merupakan satu dari tiga sektor dengan persentase kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian memiliki pergeseran positif dengan angka yang paling besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya (51,6% dari total PDRB sektor pertambangan dan penggalian). Oleh karena itu, sub sektor pertambangan tanpa migas merupakan kunci dari besarnya perkembangan persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian karena dua sub sektor lainnya menunjukkan pergeseran persentase kontribusi yang negatif.

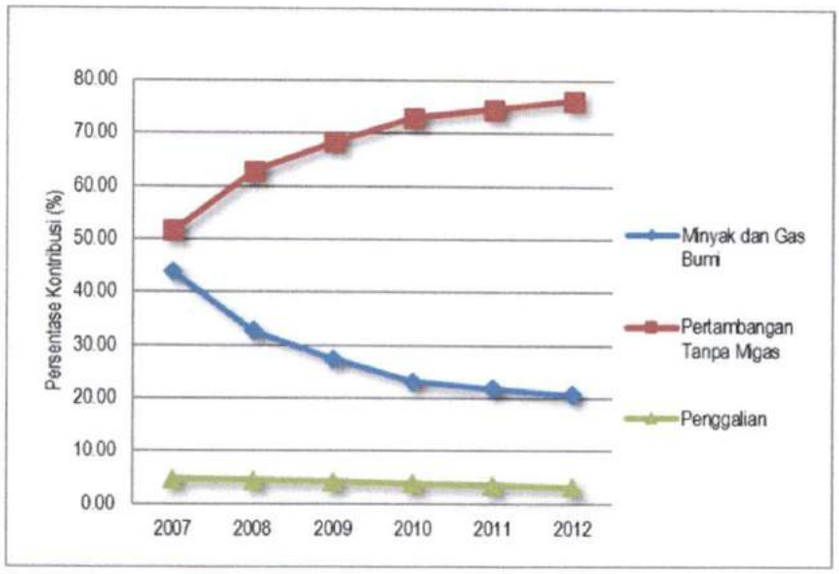
Tabel 2.2.5
Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Pertambangan dan Penggalian		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
a	Minyak dan Gas Bumi	43,73	32,71	27,38	23,19	21,84	20,63
b	Pertambangan Tanpa Migas	51,58	62,74	68,32	72,96	74,63	76,22
c	Penggalian	4,69	4,55	4,30	3,86	3,54	3,15

Sumber: Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*

Sub sektor minyak dan gas bumi memiliki nilai kontribusi yang relatif cukup besar pada tahun 2007 (43,7% dari total kotribusi sektor pertambangan dan penggalian) namun cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya sehingga nilai kontribusinya hanya tinggal 20,6% pada tahun 2012. Penurunan kontribusi juga terjadi pada sub sektor penggalian namun pergeseran yang ditunjukkan tidaklah begitu besar yaitu hanya sebesar -0,13% pada tahun 2007-2012.



Gambar 2.2.6
Grafik Perkembangan Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Sementara apabila dilihat dari segi sebaran spasial, pada tahun 2012 kabupaten/kota yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB sektor pertambangan dan penggalian adalah Kabupaten Nunukan. Namun yang perlu dicermati adalah meskipun memiliki kontribusi paling besar, Kabupaten Nunukan menunjukkan perkembangan yang menurun tiap tahunnya.

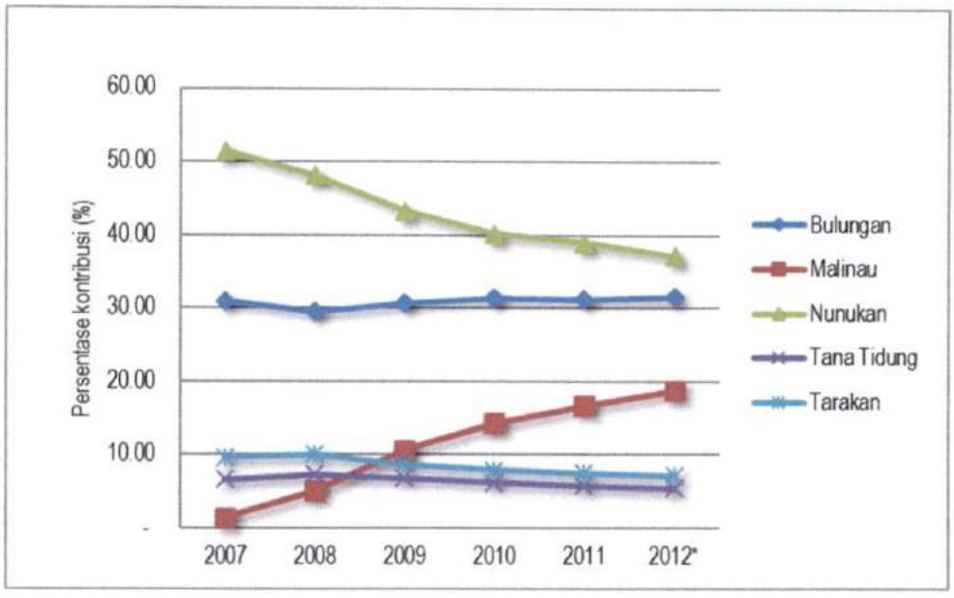
Tabel 2.2.6
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	31,0	29,5	30,6	31,4	31,2	31,5
Malinau	1,4	5,1	10,6	14,3	16,6	18,7
Nunukan	51,4	48,1	43,3	40,2	39,0	37,2
Tana Tidung	6,6	7,3	6,7	6,2	5,7	5,4
Tarakan	9,6	10,0	8,7	7,9	7,5	7,1
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

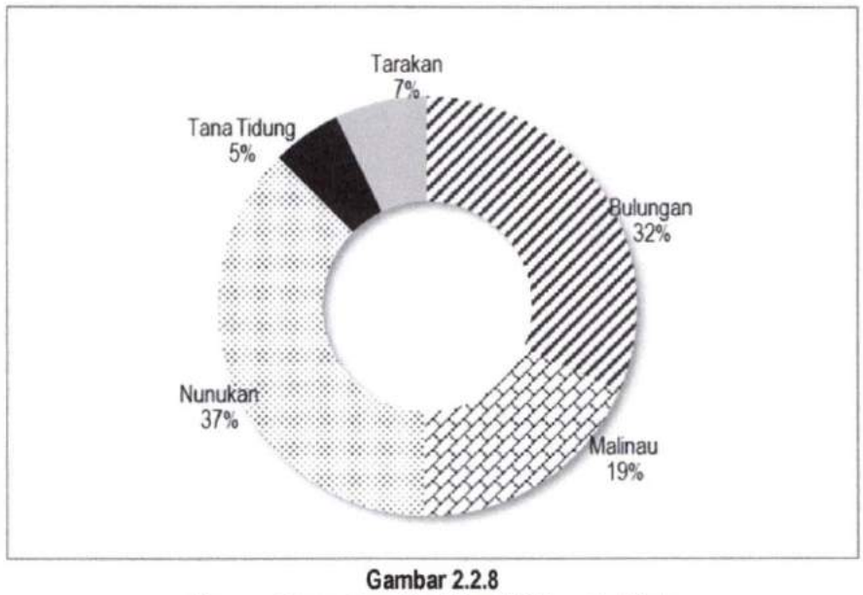
Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah.

*Keterangan:*angka sementara*

Kabupaten yang menunjukkan perkembangan positif cukup dramatis adalah Kabupaten Malinau. Pada tahun 2007 persentase kontribusi kabupaten ini hanya sebesar 1,4% dari total nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara sementara pada tahun 2012 nilai kontribusinya telah mencapai 18,7%.



Gambar 2.2.7
Grafik Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014



Gambar 2.2.8
Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

c. Sektor Industri Pengolahan

Terdapat dua sub sektor penyusun dalam sektor industri pengolahan, yaitu sub sektor industri migas dan industri non migas. Dalam PDRB Provinsi Kalimantan Utara, sub sektor industri migas sama sekali tidak memiliki kontribusi. Hal ini dapat diartikan bahwa di Provinsi Kalimantan Utara tidak ada industri pengolahan migas sehingga nilai tambah yang dihasikan oleh sektor industri pengolahan hanya disumbang oleh sub sektor industri pengolahan

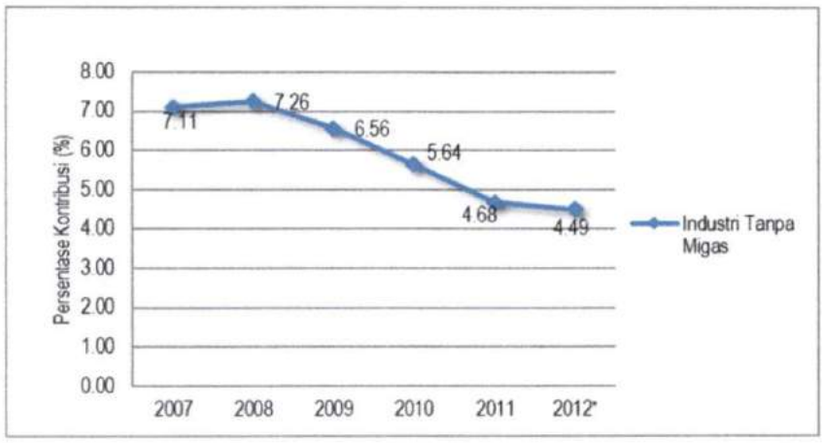
non migas. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan dari tahun 2007 hingga 2012 menunjukkan tren negatif dengan pergeseran persentase kontribusi sebesar -2,62%.

Tabel 2.2.7
Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Industri Pengolahan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
a. Industri Migas	0	0	0	0	0	0
b. Industri Tanpa Migas	100	100	100	100	100	100

Sumber:Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*



Gambar 2.2.9
Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Sementara apabila dilihat dari segi sebaran spasial, pada tahun 2012 kabupaten/kota yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB sektor industri pengolahan adalah Kota Tarakan. Kontribusi Kota Tarakan dalam PDRB sektor industri pengolahan mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2007 (69,4%) hingga pada tahun 2012 mencapai 96,4% dari total PDRB sektor industri pengolahan. Melalui capaian persentase kontribusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan terkonsentrasi secara penuh di Kota Tarakan.

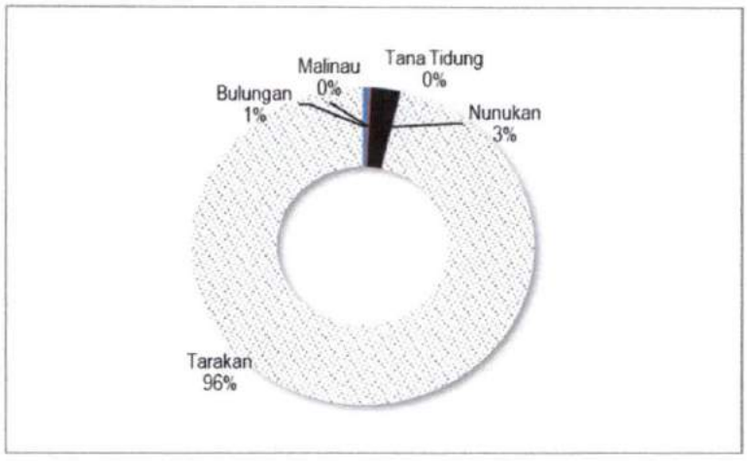
Tren yang cukup mengkhawatirkan ditunjukkan oleh Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2007, persentase kontribusi Kabupaten Bulungan masih berada pada angka 29,9% atau hampir sepertiga total PDRB sektor industri pengolahan. Namun pada tahun 2012 persentase kontribusi kabupaten ini menurun tajam hingga tinggal 0,6%. Penurunan persentase kontribusi yang sangat drastis ini perlu diwaspadai mengingat apabila dilihat dari kontribusi sektor ini sendiri terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan pergeseran negatif.

Tabel 2.2.8
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Persentase Kontribusi Kab/Kota terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	29,9	31,2	25,1	14,2	0,6	0,6
Malinau	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Nunukan	0,5	0,7	1,2	1,9	2,3	2,7
Tana Tidung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tarakan	69,4	67,8	73,4	83,6	96,7	96,4
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah.

*Keterangan:*angka sementara*



Gambar 2.2.10
Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

d. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum

Sektor listrik, gas dan air minum memiliki nilai kontribusi yang kecil terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara (kurang dari 2%). Dari ketiga sub sektor yang ada, sub sektor listrik merupakan penyumbang terbesar pada PDRB sektor ini. Akan tetapi apabila dilihat dari perkembangan yang ada, tren yang ditunjukkan sub sektor ini cenderung menurun namun masih dalam rentang pergeseran yang sangat kecil. Berbeda dengan sub sektor listrik, sub sektor air minum mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun dengan persentase yang kecil.

Tabel 2.2.9
Kontribusi Sub Sektor terhadap Sektor Listrik, Gas dan Air Minum terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Listrik, Gas dan Air Minum		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
a	Listrik	92,11	92,13	92,04	91,84	91,54	91,20
b	Gas	0	0	0	0	0	0
c	Air Minum	7,89	7,87	7,96	8,16	8,46	8,80

Sumber: Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*

Apabila dilihat secara spasial, sektor listrik, gas dan air minum ini terkonsentrasi di Kota Tarakan. Akan tetapi meskipun menjadi dominan, tren yang ditunjukkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau serta Kabupaten Nunukan yang menunjukkan perkembangan setiap tahunnya. Hal ini cukup bagus karena dapat diindikasikan bahwa mulai terjadi pemerataan dan dominasi Kota Tarakan tidak lagi terlalu kuat.

Tabel 2.2.10
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Minum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Persentase Kontribusi Kab/Kota terhadap PDRB Listrik, Gas dan Air Minum					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	11,5	11,5	11,6	11,8	11,9	12,4
Malinau	2,8	2,9	3,1	3,2	4,0	4,7
Nunukan	11,6	10,9	11,2	11,7	12,0	12,7
Tana Tidung	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0
Tarakan	71,0	71,6	71,1	70,3	69,1	67,2
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*

e. Sektor Bangunan/Konstruksi

Sektor bangunan/konstruksi terdiri dari satu sektor tunggal sehingga tidak ada sub sektor di dalamnya. Oleh karena itu, apabila dilihat persentase kotribusi sub sektor maka angka yang ditunjukkan akan selalu 100% sehingga analisis dibatasi pada kontribusi. Sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam PDRB Provinsi Kalimantan Utara, yaitu pada rentang 6-7% dari total PDRB. Apabila dilihat dari segi perkembangan, sektor ini mengalami perkembangan namun tidak begitu signifikan yaitu dari 6,14% (tahun 2007) menjadi 6,37% (tahun 2012).

Tabel 2.2.11
Kontribusi Sektor Bangunan/Konstruksi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	Pergeseran
Bangunan/konstruksi	6,14	6,35	6,50	6,64	6,51	6,37	0,22

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah.

*Keterangan:*angka sementara*

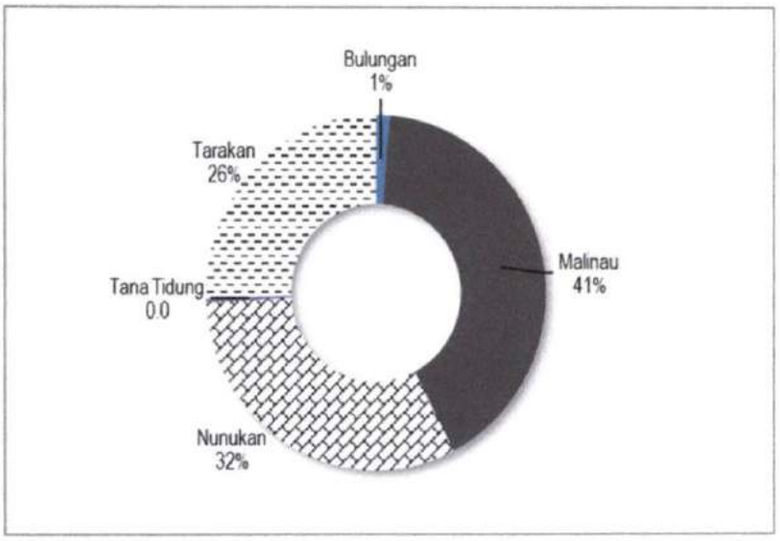
Apabila dilihat sebaran spasial, pada tahun 2012 sebaran sektor bangunan/konstruksi cenderung terpusat pada tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Malinau (41,1%), Kabupaten Nunukan (31,7%) dan Kota Tarakan (25,5%). Sementara untuk Kabupaten Bulungan (1,3%) dan Kabupaten Tana Tidung (0,3%) memiliki nilai kontribusi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.2.12
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Bangunan/Konstruksi
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Kontribusi Kab/Kota terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3
Malinau	38,4	38,7	39,7	38,6	39,8	41,1
Nunukan	31,8	32,6	32,3	34,4	33,1	31,7
Tana Tidung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tarakan	28,6	27,5	26,5	25,6	25,6	25,5
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah.

*Keterangan:*angka sementara*



Gambar 2.2.11
Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Bangunan/Konstruksi Tahun 2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

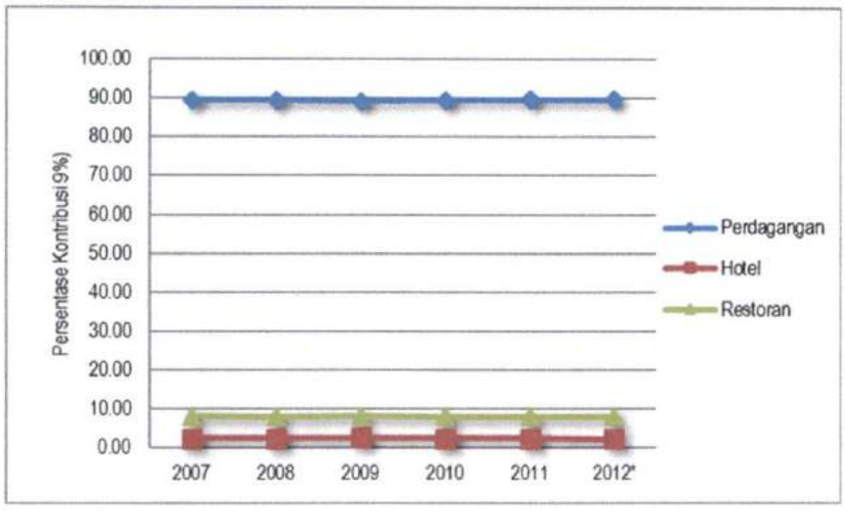
Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dengan nilai kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Sektor ini terbagi menjadi tiga sub sektor utama yaitu sub sektor perdagangan, sub sektor hotel dan restoran. Masing-masing sub sektor memiliki peranan masing-masing dalam kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Sub sektor pedagangan merupakan sub sektor dengan persentase kontribusi paling besar terhadap PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2007 hingga tahun 2012, persentase sub sektor perdagangan mencapai 89% dari total PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang berarti dari segi persentase kontribusi, namun sub sektor perdagangan tetap dominan dalam sektor ini.

Tabel 2.2.13
Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Perdagangan, Hotel dan Restoran	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
a. Perdagangan	89,44	89,46	89,23	89,48	89,58	89,70
b. Hotel	2,42	2,46	2,54	2,49	2,43	2,32
c. Restoran	8,14	8,08	8,23	8,03	7,99	7,99

Sumber:Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*



Gambar 2.2.12
Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Apabila dilihat dari segi sebaran spasial pada rentang tahun 2007-2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terbesar berasal dari Kota Tarakan dengan capaian sebesar 68% dari total PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara untuk kabupaten yang memiliki kontribusi paling rendah adalah Kabupaten Tana Tidung dengan kontribusi kurang dari 2%.

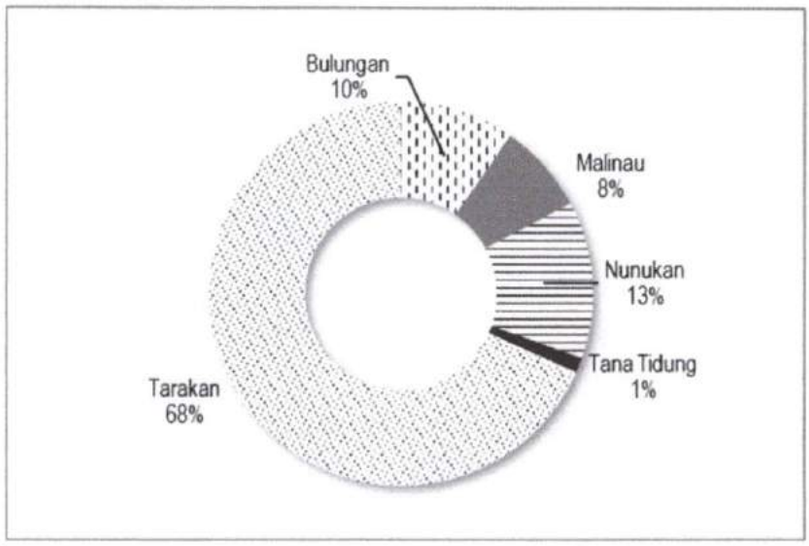
Secara umum perkembangan kontribusi dari masing-masing kabupaten mengalami fluktuasi namun dengan pergeseran yang sangat rendah dan hampir tidak terlihat karena persentase yang begitu kecil.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kontribusi sektor ini pada masing-masing kabupaten cenderung stabil.

Tabel 2.2.14
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	8,9	8,9	9,0	9,0	9,3	9,6
Malinau	8,2	7,9	7,7	7,5	7,5	7,6
Nunukan	13,2	14,0	14,0	13,3	12,8	13,2
Tana Tidung	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Tarakan	68,5	68,0	67,9	68,8	69,0	68,3
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah.

*Keterangan:*angka sementara*



Gambar 2.2.13
Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi tersusun atas dua sub sektor, yaitu sub sektor pengangkutan dan sub sektor komunikasi.Sub sektor pengangkutan terbagi menjadi beberapa sub sektor yang lebih detil, yaitu sub sektor angkutan jalan raya, angkutan penyebrangan, angkutan laut dan angkutan udara. Analisis pada sub sektor-sub sektor ini menjadi penting karena Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya bertumpu pada angkutan jalan raya. Pada tahun 2012, persentase kontribusi sub sektor angkutan laut (24%) dan angkutan udara (26,6%) terhadap PDRB Kalimantan Utara terhitung lebih besar jika dibandingkan dengan sub sektor angkutan jalan raya (4,4%).

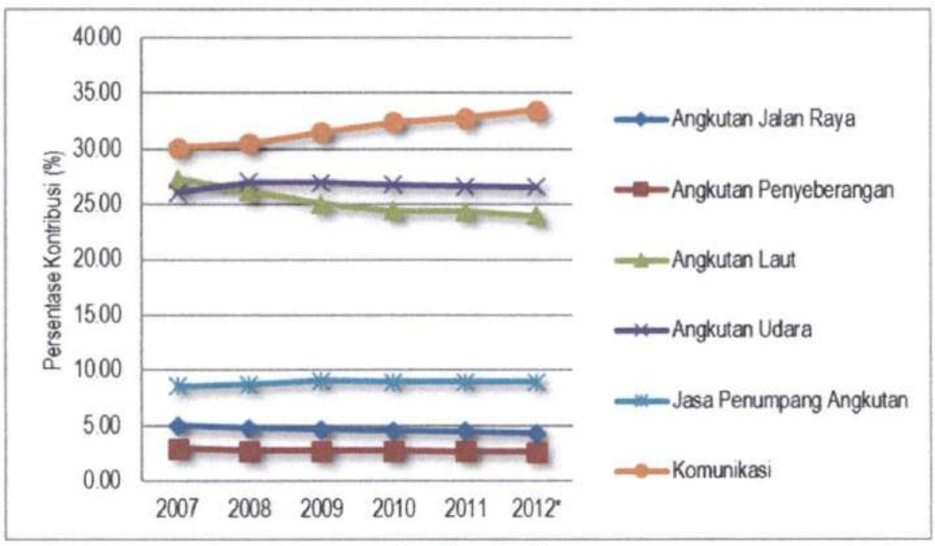
Tabel 2.2.15
Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Pengangkutan dan Komunikasi		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
a	**Angkutan**	**69,88**	**69,48**	**68,46**	**67,58**	**67,16**	**66,49**
	Angkutan Jalan Raya	5,00	4,78	4,69	4,58	4,49	4,36
	Angkutan Penyeberangan	2,96	2,77	2,74	2,78	2,71	2,65
	Angkutan Laut	27,31	26,16	25,02	24,44	24,38	23,97
	Angkutan Udara	26,08	27,03	26,95	26,81	26,61	26,56
	Jasa Penumpang Angkutan	8,53	8,73	9,06	8,97	8,97	8,96
b	**Komunikasi**	**30,12**	**30,52**	**31,54**	**32,42**	**32,84**	**33,51**

Sumber:Hasil Analisis, 2014.

*Keterangan:*angka sementara*

Apabila dilihat pada tren perkembangannya, terdapat perkembangan negatif dalam pergeseran persentase kontribusi dari sub sektor angkutan penyebrangan (-0,02%) dan sub sektor angkutan laut (-0,08%). Meskipun nilai pergeserannya relatif kecil, namun hal ini perlu diperhatikan mengingat kedua jenis angkutan ini merupakan angkutan utama yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara untuk sub sektor yang memiliki perkembangan positif dengan angka yang relatif besar adalah sub sektor angkutan udara. Hal ini baik karena perkembangan nilai kontribusi angkutan udara mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian pada sub sektor ini meningkat dan menunjukkan bahwa angkutan udara semakin optimal sebagai salah satu opsi sarana transportasi di provinsi Kalimantan Utara. Sementara apabila dilihat pada sub sektor komunikasi, angka perkembangan kontribusi pada sub sektor ini tidak cukup besar dan cenderung membentuk tren positif.



Gambar 2.2.14
Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Apabila dilihat dari segi sebaran spasial, Kota Tarakan merupakan wilayah dengan kontribusi paling besar dalam PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun 2012, kontribusi Kota Tarakan dalam sektor ini mencapai 68,2%. Meskipun tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun besarnya persentase kontribusi ini menjadikan Kota Tarakan sebagai konsentrasi kegiatan pengangkutan dan komunikasi.

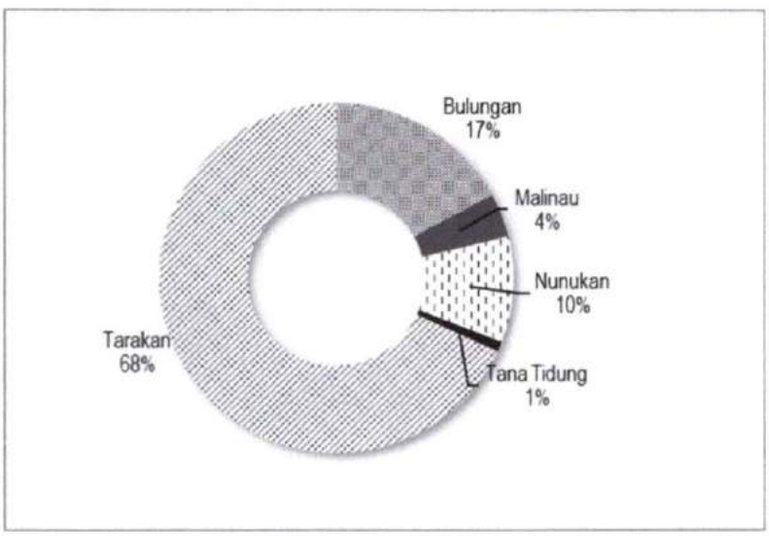
Kabupaten/kota yang terus mengalami penurunan persentase kontribusi dari tahun 2007-212 adalah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung, sementara kabupaten yang mengalami kenaikan adalah Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.2.16
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	19,9	18,9	18,1	17,7	17,8	17,1
Malinau	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,0
Nunukan	8,1	8,1	8,5	8,9	9,1	9,8
Tana Tidung	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9
Tarakan	66,9	68,1	68,4	68,3	68,1	68,2
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah.

*Keterangan:*angka sementara*



Gambar 2.2.15
Diagram Persentase Kontribusi Kabupaten/Kota
terhadap PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Tahun 2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

h. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Terdapat lima sub sektor penyusun dalam sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sub sektor yang memiliki persentase kontribusi paling besar adalah sub sektor sewa bangunan. Dari tahun 2007-2012, kontribusi sub sektor ini mencapai 61,7% dari total kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Meskipun menunjukkan tren yang fluktuattif, akan tertapi perkembangan tetap memiliki kecenderungan ke arah positif.

Sub sektor lain yang juga cukup berpengaruh terhadap perkembangan sektor ini adalah sub sektor bank dengan persentase kontribusi mencapai 31,8% pada tahun 2012. Tren yang ditunjukkan juga fluktuatif dengan kecenderungan bergerak ke arah positif.

Tabel 2.2.17
Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
a. Bank	33,18	31,28	30,82	30,58	31,52	31,76
b. Lemaga Keuangan Bukan Bank	6,19	6,72	6,65	6,77	6,47	6,24
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
d. Sewa Bangunan	59,77	61,11	61,59	61,69	61,07	61,07
e. Jasa Perusahaan	0,79	0,82	0,87	0,89	0,88	0,87

Sumber: Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*

Apabila dilihat secara spasial, sektor ini terpusat di Kota Tarakan. Persentase sektor ini di Kota Tarakan mencapai 96%, artinya kegiatan perekonomian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebagian terjadi di Kota Tarakan. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat Kota Tarakan merupakan pusat perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi, konsentrasi yang berlebihan dan kontras (tidak merata) dapat mengakibatkan ketimpangan pada daerah lainnya. Oleh karena itu diperlukan stimulasi sektor ini di setiap kabupaten yang ada di provinsi ini.

Tabel 2.2.18
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6
Malinau	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Nunukan	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
Tana Tidung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Tarakan	96,0	96,1	96,0	95,8	95,8	95,8
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*

i. Sektor Jasa-Jasa

Sub sektor dalam sektor jasa-jasa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sub sektor pemerintahan umum dan sub sektor swasta. Sub sektor pemerintahan umum menujukkan tren yang relatif stabil. Begitu pula dengan sub sektor swasta yang menunjukkan fluktuasi dengan rentang fluktuasi tidak begitu lebar.

Sub sektor swasta terdiri atas jasa hiburan dan rekreasi, sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan dan rumah tangga. Sub sektor dengan nilai persentase kontribusi paling kecil adalah sub sektor jasa hiburan dan rekreasi. Selain menunjukkan angka yang kecil, tren yang ditunjukkan oleh sub sektor ini fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Nilai persentase jasa hiburan dan rekreasi yang kecil merupakan salah satu indikasi bahwa potensi pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara belum begitu berkembang.

Tabel 2.2.19
Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Jasa-Jasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Sektoral (%)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Jasa-Jasa		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
a	Pemerintahan Umum	87,50	87,57	87,55	87,86	87,67	87,45
b	Swasta	12,50	12,43	12,45	12,14	12,33	12,55
	1. Jasa Hiburan dan Rekreasi	3,31	3,31	3,34	2,64	2,69	2,73
	2. Jasa Sosial Kemasyarakatan	3,70	3,62	3,58	4,12	4,26	4,38
	3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	5,49	5,50	5,53	5,37	5,38	5,44

Sumber: Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*

Apabila dilihat dari sisi spasial, tidak ada dominasi secara berlebih pada masing-masing kabupaten/kota dalam sektor jasa-jasa.Terdapat tiga kabupaten/kota dengan persentase yang cukup besar jka dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

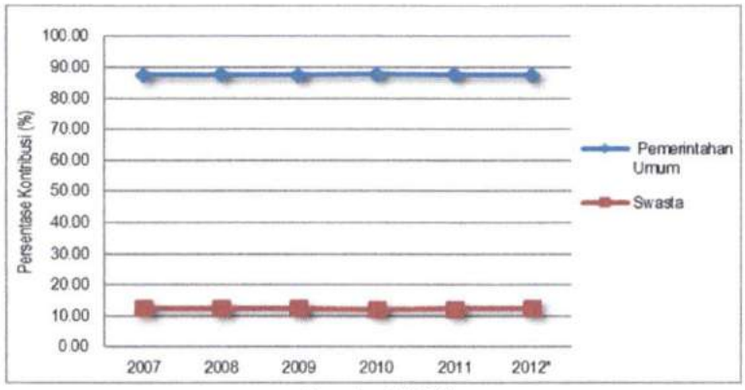
Tabel 2.2.20
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Nilai PDRB Sektor Jasa-Jasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Sektor Jasa-Jasa (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Bulungan	20,5	19,1	18,9	18,3	18,4	17,9
Malinau	8,7	8,7	8,8	8,5	8,4	8,5
Nunukan	22,5	23,0	23,9	25,1	24,9	25,2
Tana Tidung	3,3	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2
Tarakan	45,0	46,1	45,3	44,9	45,0	45,2
Prov. Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisis, 2014

*Keterangan:*angka sementara*

Persentase kontribusi Kota Tarakan adalah sebesar 45% atau hampir mencapi separuh dari total PDRB sektor jasa-jasa di Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi dominasi ini tidak begitu besar mengingat masih ada dua kabupaten lain dengan persentase yang cukup besar. Terpusatnya sektor jasa-jasa di Kota Tarakan masih sangat erat kaitannya dengan faktor Kota Tarakan sebagai pusat perekonomian. Selain itu, Kota Tarakan yang berfungsi sebagai hub/lokasi transit bagi orang-orang yang memiliki tujuan ke kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara menjadikan kota ini banyak dikunjungi dan tentunya hal ini berpengaruh terhadap permintaan layanan jasa-jasa.



Gambar 2.2.16
Grafik Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Jasa-Jasa PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

2. Laju Inflasi

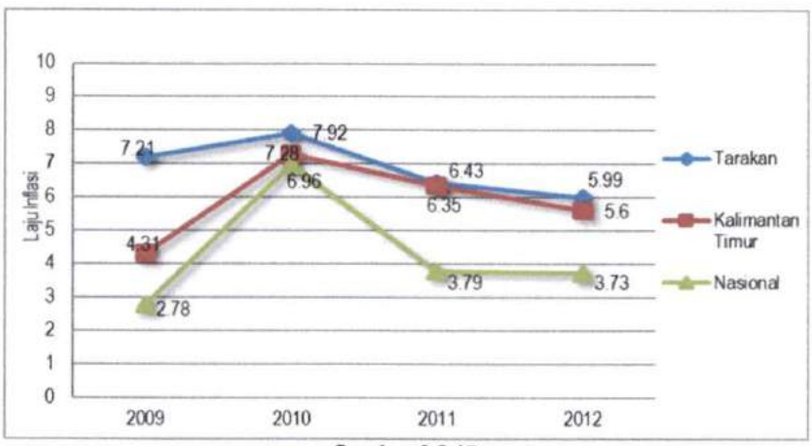
Laju inflasi merupakan indikator yang berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk dalam suatu wilayah.Kenaikan/penurunan dari laju inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga indikator ini merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Data laju inflasi Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia sehingga untuk melihat perkembangan laju inflasi pada provinsi ini merujuk pada data provinsi induk (Kalimantan Timur) dan data inflasi nasional.

Tabel 2.2.21
Laju Inflasi Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2009-2012

Wilayah	Laju Inflasi			
	2009	2010	2011	2012
Kota Tarakan	7,21	7,92	6,43	5,99
Provinsi Kalimantan Timur	4,31	7,28	6,35	5,6
Nasional	2,78	6,96	3,79	3,73

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2009, 2010 dan 2013

Laju inflasi Kota Tarakan secara umum dari tahun ke tahun mengalami penurunan, begitu pula dengan laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Angka inflasi yang stabil (tidak mengalami fluktuasi secara ekstrim) memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang sangat rentan terhadap perubahan laju inflasi.



Gambar 2.2.17
Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2009-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk melihat nilai PDRB per satu orang penduduk atau dengan kata lain indikator ini merupakan salah satu dari representasi tingkat kemakmuran penduduk di dalam suatu wilayah. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari nominal 11,1 juta menjadi 12,3 juta rupiah.

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 adalah sebesar 12,3 juta rupiah. Jumlah ini melampaui rata-rata PDRB per kapita Indonesia yang hanya sebesar 10,7 juta rupiah namun masih berada di bawah rata-rata PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 31,4 juta rupiah.

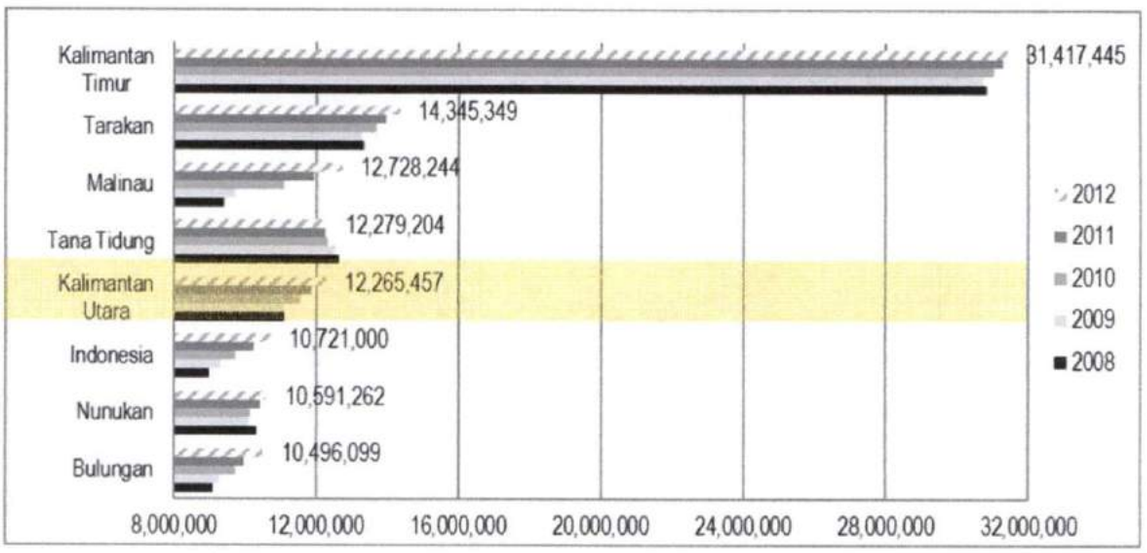
Apabila dilihat dari skala kabupaten/kota, wilayah yang memiliki angka PDRB per kapita paling tinggi adalah Kota Tarakan. Hal ini wajar karena Kota Tarakan merupakan wilayah pusat kegiatan perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara Untuk wilayah dengan PDRB paling rendah adalah Kabupaten Bulungan. Hal ini menjadi ironis apabila dibandingkan dengan status Kabupaten Bulungan yang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.2.22
PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita (rupiah)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	9.067.967	9.259.036	9.710.497	9.948.883	10.496.099
Malinau	9.412.099	9.725.321	11.085.608	11.942.519	12.728.244
Nunukan	10.297.034	10.115.137	10.147.846	10.428.470	10.591.262
Tana Tidung	12.641.735	12.521.196	12.323.173	12.253.142	12.279.204
Tarakan	13.324.289	13.267.820	13.686.546	13.962.735	14.345.349
Prov. Kalimantan Utara	**11.074.536**	**11.094.507**	**11.532.119**	**11.874.038**	**12.265.457**
Prov. Kalimantan Timur	**30.841.101**	**30.719.720**	**31.042.434**	**31.289.814**	**31.417.445**
Indonesia	**8.990.000**	**9.281.000**	**9.703.000**	**10.255.000**	**10.721.000**

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2009-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2006-2009 dan 2009-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2003, 2004-2007 dan 2009-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 dan 2013,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2005, 2007, 2012 dan 2013.
6) PDRB Kalimantan Timur menurut lapangan usaha tahun 2011 dan 2013,
7) Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013.

Kabupaten/kota yang memiliki tren cukup berbeda adalah Kabupaten Tana Tidung. PDRB per kapita kabupaten ini dari tahun 2008-2012 terus mengalami penurunan padahal kabupaten/kota lainnya menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat disebabkan karena tidak seimbangnya perkembangan nilai PDRB dengan peningkatan jumlah penduduk pada kabupaten tersebut.



Gambar 2.2.18
Grafik Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

4. Indeks Gini

Dari kacamata ekonomi ketimpangan perekonomian penduduk dapat dilihat melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah hasil penghitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam indeks gini adalah 0-1. Semakin indeks gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila indeks gini semakin mendekati angka satu maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di dalam masyarakat semakin besar.

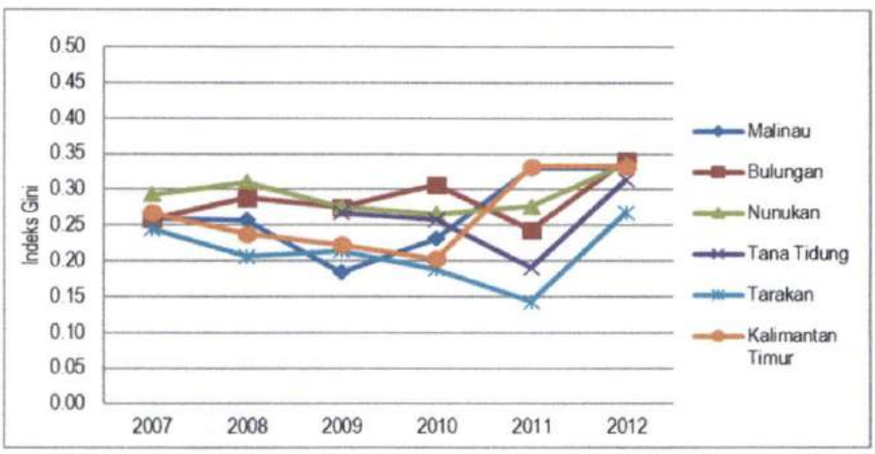
Indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2007-2012 secara umum berada di bawa hangka 0,35. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan perekonomian masyarakat di provinsi ini adalah rendah. Masing-masing kabupaten/kota menunjukkan angka yang mirip dengan selisih yang tidak begitu besar. Pada tahun 2012, kabupaten/kota dengan ketimpangan paling rendah adalah Kota Tarakan ditunjukkan melalui indeks gini sebesar 0,27.

Tabel 2.2.23
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Indeks Gini					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	0,26	0,29	0,28	0,31	0,24	0,34
Malinau	0,26	0,26	0,18	0,23	0,33	0,33
Nunukan	0,29	0,31	0,28	0,27	0,28	0,34
Tana Tidung	-	-	0,27	0,26	0,19	0,31
Tarakan	0,25	0,21	0,21	0,19	0,14	0,27
Prov. Kalimantan Timur	**0,27**	**0,24**	**0,22**	**0,20**	**0,33**	**0,33**

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2012 dan 2013

Catatan: Indikator Indeks Gini Kabupaten/Kota tidak dapat diakumulasi menjadi Indeks Gini Provinsi karena data yang tersedia hanya sebatas keluaran akhir dari formula perhitungan data awal (bukan data mentah yang dapat diolah)



Gambar 2.2 .19
Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Selain indeks gini, terdapat indikator lain untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, yaitu indikator pemerataan pendapatan versi bank dunia. Dalam versi bank dunia, pendapatan penduduk dibagi ke dalam 3 kelompok pendapatan yaitu 40% pendapatan terendah, 40% pendapatan menengah, dan 20% pendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan dilihat dari distribusi pendapatan penduduk ke dalam ketiga kelompok tersebut, melalui pembagian tersebut akan dilihat proporsi sebaran pada masing-masing kelompok sehingga dapat ditentukan apakah wilayah tersebut masuk ke kategori dari ketimpangan wilayahnya. Berikut kriteria rinci kategori ketimpangan menurut versi Bank Dunia:

a. Ketimpangan Rendah : 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan
b. Ketimpangan Moderat : 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12%-17% jumlah pendapatan
c. Ketimpangan Tinggi : 20% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan

Pada tahun 2011-2012, penduduk yang masuk ke dalam kategori 40% pendapatan terendah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara menerima lebih dari 17% total pendapatan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun-tahun tersebut memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Ketimpangan rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut relatif merata.

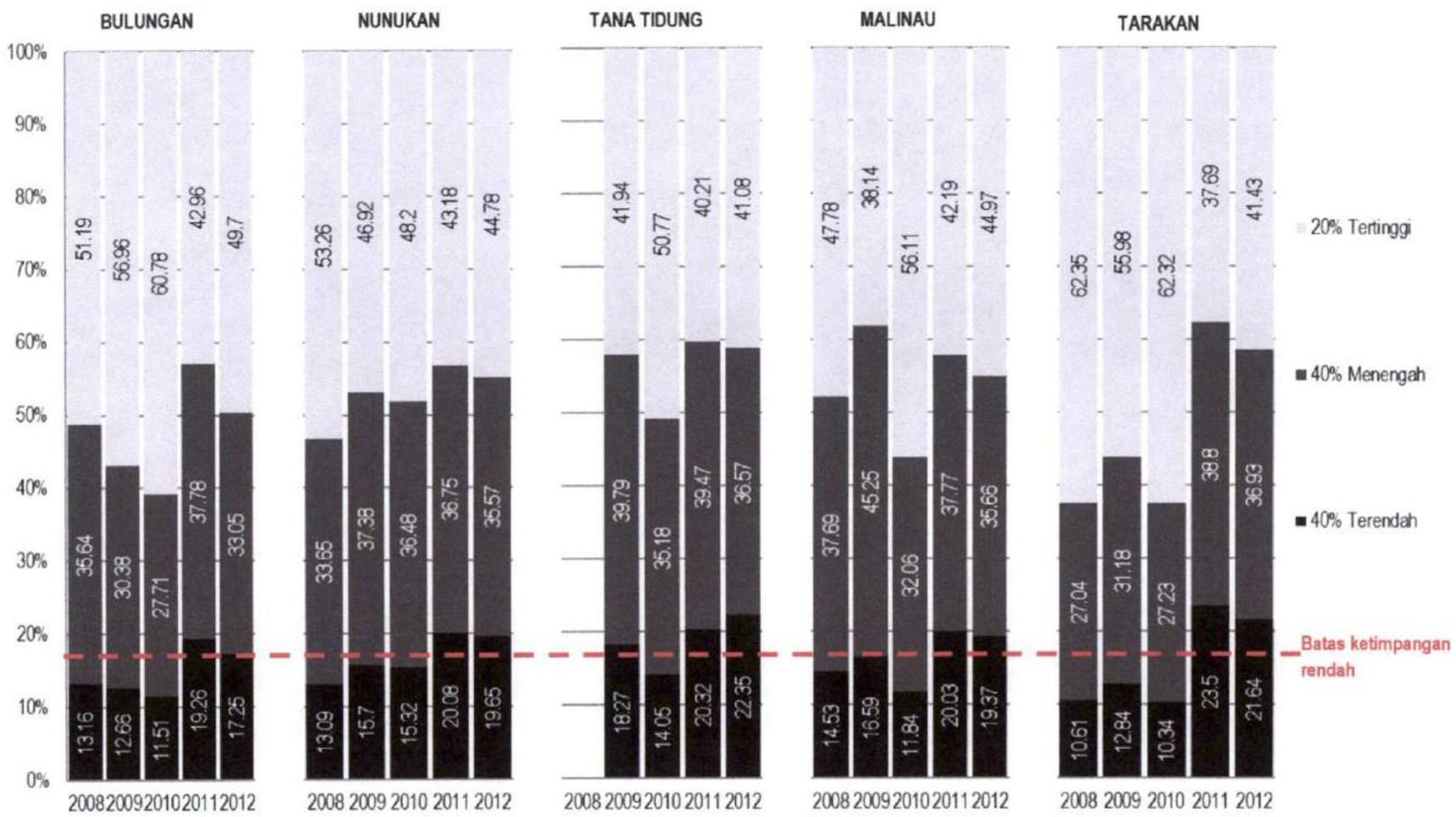
Pada Tahun 2012, penduduk yang masuk dalam kelompok 40% pendapatan terendah di kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara menerima pendapatan dengan persentase yang berkisar pada angka 17,25% (Kabupaten Bulungan) hingga 22,35% (Kabupaten Tana Tidung) dari total jumlah pendapatan.

Tabel 2.2.24
Distribusi Penerimaan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Distribusi Pembagian Pendapatan	Distribusi Total pendapatan (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan					
40% Terendah	13,16	12,66	11,51	19,26	17,25
40% Menengah	35,64	30,38	27,71	37,78	33,05
20% Tertinggi	51,19	56,96	60,78	42,96	49,7
Malinau					
40% Terendah	14,53	16,59	11,84	20,03	19,37
40% Menengah	37,69	45,25	32,06	37,77	35,66
20% Tertinggi	47,78	38,14	56,11	42,19	44,97
Nunukan					
40% Terendah	13,09	15,7	15,32	20,08	19,65
40% Menengah	33,65	37,38	36,48	36,75	35,57
20% Tertinggi	53,26	46,92	48,2	43,18	44,78
Tana Tidung					
40% Terendah		18,27	14,05	20,32	22,35
40% Menengah		39,79	35,18	39,47	36,57
20% Tertinggi		41,94	50,77	40,21	41,08
Tarakan					
40% Terendah	10,61	12,84	10,34	23,5	21,64
40% Menengah	27,04	31,18	27,23	38,8	36,93
20% Tertinggi	62,35	55,98	62,32	37,69	41,43
Prov. Kalimantan Timur					
40% Terendah	9,95	11,54	9,68	19,75	18,95
40% Menengah	27,43	31,15	26,4	38,07	36,37
20% Tertinggi	62,63	57,31	63,92	42,19	44,68

Sumber:
1) Indeks kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bulungan 2008 dan 2011,
2) Indeks Pembangunan Manusia Tana Tidung 2012,
3) Statistik Daerah Kabupaten Nunukan 2012,
4) Indikator Sosial Kabupaten Nunukan 2004,
5) Indeks Pembangunan Manusia Malinau 2012,
6) Kalimantan Timur dalam Angka 2011 dan 2013

Keterangan: data Kabupaten Tana TIdung Tahun 2008 masih tergabung dengan Kabupaten Bulungan
Catatan: Indikator Distribusi total pendapatan per kabupaten/kota tidak dapat diakumulasi menjadi distribusi total pendapatan provinsi karena data yang tersedia hanya sebatas keluaran akhir dari formula perhitungan data awal (bukan data mentah yang dapat diolah)



Gambar 2.2.20
Grafik Komposisi Kelompok Pemerataan Pendapatan Kabupaten/Kota d Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

6. Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks ketimpangan Williamson adalah pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Indeks Williamson digunakan untuk melihat ketimpangan antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Rentang angka dalam indeks Williamson adalah 0-1. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka artinya ketimpangan antar wilayah dalam provinsi tersebut semakin besar.

Pengukuran indeks Williamson memperlukan dua jenis data yaitu data PDRB per kapita dan juga data jumlah penduduk dari kabupaten yang ada di dalam Provinsi Kalimantan Utara. Melalui formula yang telah dirumuskan, didapatkan hasil bahwa besaran indeks ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008-2012 cukup rendah, yaitu berkisar pada angka 0,1-0,2.

Indeks ketimpangan Williamson yang tergolong rendah ini menunjukkan bahwa perekonomian pada kelima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara cukup setara. Ketimpangan yang ada tidak begitu mengkhawatirkan malah sebaliknya, dengan nilai indeks Williamson yang rendah seperti ini merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.2.25
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita (rupiah)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	9.067.967	9.259.036	9.710.497	9.948.883	10.496.099
Malinau	9.412.099	9.725.321	11.085.608	11.942.519	12.728.244
Nunukan	10.297.034	10.115.137	10.147.846	10.428.470	10.591.262
Tana Tidung	12.641.735	12.521.196	12.323.173	12.253.142	12.279.204
Tarakan	13.324.289	13.267.820	13.686.546	13.962.735	14.345.349
Prov. Kalimantan Utara	**10.948.625**	**10.977.702**	**11.390.734**	**11.707.150**	**12.088.032**

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2009-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2006-2009 dan 2009-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2003, 2004-2007 dan 2009-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 dan 2013,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2005, 2007, 2012 dan 2013.
6) PDRB Kalimantan Timur menurut lapangan usaha tahun 2011 dan 2013,
7) Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013.

Tabel 2.2.26
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	109.503	112.428	112.660	117.019	120.600
Malinau	56.421	59.555	62.580	66.052	66.845
Nunukan	129.011	132.542	140.841	154.269	154.308
Tana Tidung	13.240	14.620	15.202	16.356	17.079
Tarakan	162.189	192.430	193.370	204.281	210.504
Prov. Kalimantan Utara	**470.364**	**511.575**	**524.653**	**557.977**	**569.336**

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2011, 2013.
2) Kabupaten Malinau dalam angka 2011, 2013
3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2011, 2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2011, 2013
5) Kota Tarakan dalam angka 2011 dan 2013. Diolah

Tabel 2.2.27
Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Provinsi	Indeks Ketimpangan Williamson				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kalimantan Utara	0,16	0,16	0,15	0,12	0,14

Sumber: hasil analisis, 2014

7. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

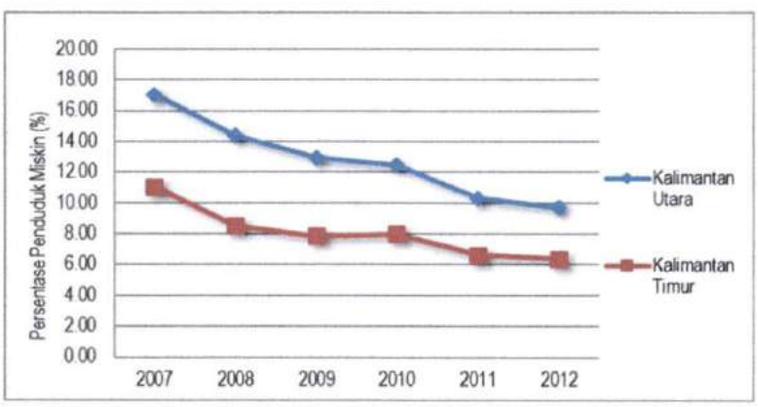
Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan digunakan merupakan langkah lanjutan dari analisa kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2007, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara masih relatif besar yaitu sebesar 17,06% atau setara dengan 77.800 jiwa dari total penduduk yang ada. Angka ini terus mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai 2012 dengan penurunan yang stabil dimana itu artinya jumlah proporsi penduduk miskin di provinsi ini semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan hasil analisis PDRB per kapita yang terus mengalami kenaikantiap tahunnya dan memberikan kesimpulan positif terhadap kesejahteraan penduduk Provinsi Kalimantan Utara dari segi ekonomi. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, persentase penduduk di bawah kemiskinan masih lebih besar.

Tabel 2.2.28
Perkembangan Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kalimantan Utara				Kalimantan Timur
Tahun	Jumlah Penduduk Total (000)	Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2007	455,97	77,80	17,06	11,04
2008	484,50	69,66	14,38	8,53
2009	509,87	66,15	12,97	7,86
2010	528,37	65,90	12,47	8,00
2011	551,82	57,00	10,33	6,63
2012	584,75	56,70	9,70	6,38

Sumber:
1) Kalimantan Timur dalam Angka 2008, 2009, 2010, 2013 dan,
2) Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012



Gambar 2.2.21
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

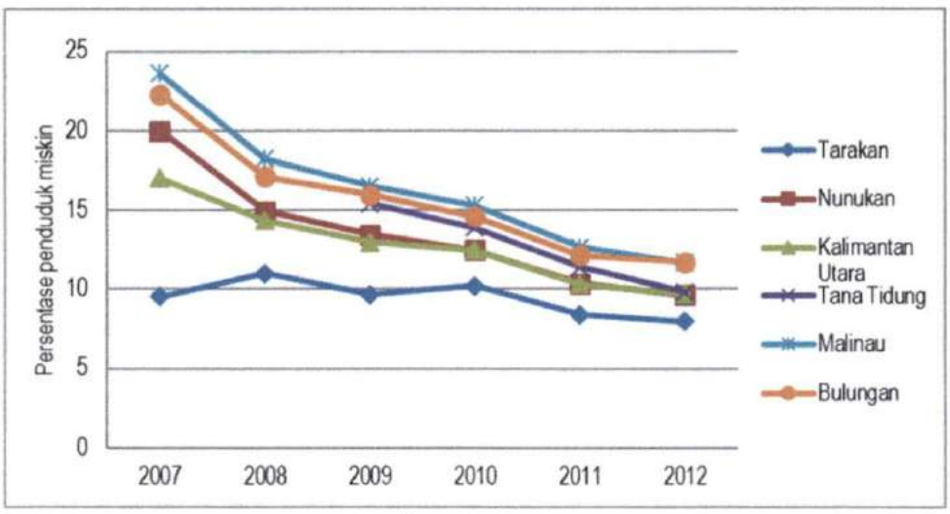
Apabila dilihat dari segi sebaran spasial, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau merupakan dua kabupaten dengan nilai persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Sementara untuk persentase penduduk miskin terendah dimiliki Kota Tarakan. Sedangkan apabila dilihat dari segi perkembangan, semua kabupaten/kota menunjukkan tren positif dimana tiap tahunnya terjadi penurunan persentase penduduk miskin.

Tabel 2.2.29
Perkembangan Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	22,31	17,14	15,96	14,58	12,14	11,73
Malinau	23,6	18,24	16,55	15,31	12,67	11,68
Nunukan	20,02	14,96	13,47	12,45	10,38	9,60
Tana Tidung	-	-	15,42	13,89	11,41	9,81
Tarakan	9,54	10,99	9,65	10,23	8,41	7,95
Prov. Kalimantan Utara	**17,06**	**14,38**	**12,97**	**12,47**	**10,33**	**9,70**

Sumber:
1) Kalimantan Timur dalam Angka 2008, 2009, 2010, 2013 dan
2) Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012

Keterangan: Data Kabupaten Tana Tidung tahun 2007-2008 masih bergabung dengan Kabupaten Bulungan



Gambar 2.2. 22
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

8. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Indikator angka kriminalitas yang tertangani digunakan sebagai langkah mengidentifikasi permasalahan kesenjangan kesejahteraan yang dilihat dari angka kriminal. Angka Kriminalitas tertangani adalah penanganan tindak kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Berdasarkan data yang tersedia terlihat sejumlah fluktuasi penanganan tindak kriminal dalam beberapa tahun terakhir di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Angka penanganan tindak kriminal di Kota Tarakan paling tinggi daripada kabupaten yang lain. Kabupaten Tana Tidung memiliki angka penanganan tindak kriminal paling rendah dari pada kabupaten/kota di provinsi ini. Secara umum kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara jumlah angka penanganan tindak kriminal mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun.

Tabel 2.2.30
Angka Tindak Kriminal Tertangani dalam 1 Tahun Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Tindak Kriminal Tertangani dalam 1 Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	24	16	11	16	14
Malinau	17	15	15	18	19
Nunukan	15	16	11	14	15
Tana Tidung	11		3	0	0
Tarakan	25	17	15	27	21
Prov. Kalimantan Utara	21		13	19	17

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2009,2010,2011,2012
2) Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2009,2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2009, 2011, 2012
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2011
5) Kota Tarakan dalam Angka Tahun 2011, 2013
6) Provinsi Kaimantan Timur dalam Angka Tahun 2009, 2013

Keterangan: Jumlah Angka Kriminalitas Tertangani pada tahun 2009 Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena tidak adanya informasi lengkap terutama di Tana Tidung pada tahun tersebut.

2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 14 tahun yang dapat dapat membaca dan menulis. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pengertian dari Angka melek huruf adalah, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin besar nilai angka melek huruf suatu kabupaten/kota maka, semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis.

Tabel 2.2.31
Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

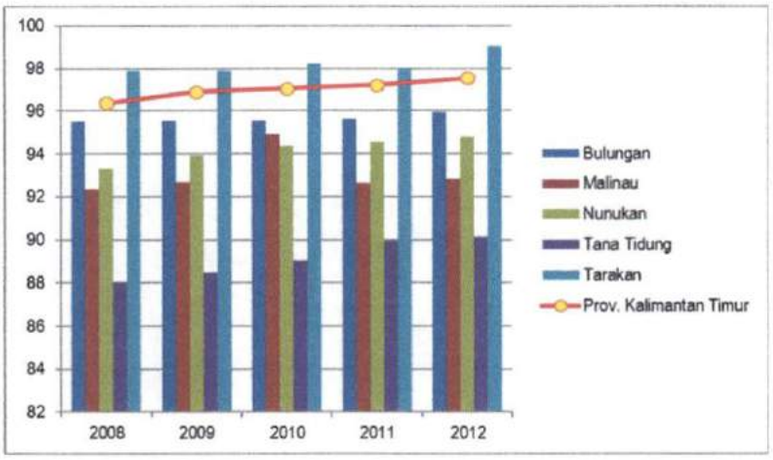
Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf				
	2008[1]	2009[1]	2010[2]	2011[2]	2012[2]
Bulungan	95,50	95,55	95,56	95,61	95,95
Malinau	92,33	92,65	94,92	92,63	92,81
Nunukan	93,30	93,94	94,35	94,56	94,79
Tana Tidung	88,00	88,49	89,05	89,93	90,15
Tarakan	97,89	97,92	98,23	98,02	99,04
Prov. Kalimantan Timur[3]	96,36	96,89	97,05	97,21	97,55

Sumber :
1) IPM Kabupaten Malinau, 2011 IPM Kabupaten Tana Tidung 2013
2) Data Base Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2013
3) IPM Kabupaten Nunukan, 2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan data dari tabel di atas, dari tahun 2008 hingga tahun 2012, kabupaten dengan nilai angka melek huruf paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan. Pada tahun 2008 Kota Tarakan memiliki nilai angka melek huruf sebesar 97,89, dan angka ini meningkat menjadi 99,04% pada akhir tahun 2012. Perkembangan nilai angka melek huruf yang hampir 100% ini membuktikan bahwa program dari Dinas Pendidikan dan dibantu pendanaan dari pemerintah kota telah mampu setidaknya meningkatkan dan mengurangi jumlah masyarakat yang buta aksara, atau tidak dapat membaca dan menulis. Berbanding terbalik dengan Kota Tarakan, dari tahun 2008 hingga tahun 2012, Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan sejak tahun 2009 memiliki nilai angka melek huruf yang paling rendah di Kalimantan Utara jika dibandingkan dengan

kabupaten disekitarnya. Hal ini dapat dipahami mengingat kabupaten ini merupakan daerah otonom baru yang pada awalnya merupakan kecamatan dari Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2009 nilai angka melek huruf di Kabupaten Tana Tidung sebesar 88%, dan pada akhir tahun 2012 nilai angka melek huruf kabupaten ini meningkat menjadi 90,15%. Berdasarkan nilai memang nilai angka melek huruf di kabupaten ini relatif tertinggal, namun juga dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir selalu ada peningkatan nilai angka melek huruf di Kabupaten Tana Tidung.



Gambar 2.2.23
Grafik Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Grafik di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan provinsi induk dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Timur, sejak dari tahun 2008 hingga tahun 2012, nilai angka melek huruf hampir semua kabupaten di Kalimantan Utara berada di bawah angka melek huruf Provinsi Kalimantan Timur, kecuali untuk Kota Tarakan yang memiliki angka lebih tinggi. Angka melek huruf yang relatif paling tinggi di Kota Tarakan menunjukkan bahwa sektor pendidikan berkembang dengan baik, hal ini tidak terlepas dari peran Kota Tarakan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi kawasan Kalimantan bagian utara. Sebagai pusat kegiatan ekonomi secara otomatis berakibat pada meningkatnya kemampuan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan yang merupakan salah satu indikator dari meningkatnya kemampuan dan daya beli masyarakat memberikan efek berupa kemampuan secara ekonomi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Secara umum angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara sudah baik, meskipun jika dibandingkan dengan capaian angka melek huruf Provinsi Kalimantan Timur hanya Kota Tarakan yang melampaui capaian angka melek huruf Provinsi Kalimantan Timur, sementara empat kabupaten/kota lain masih berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa harus ada sinergi, kerja sama dan komitmen dari semua *stakeholder* yang ada di Provinsi Kalimantan Utara untuk bekerja sama meningkatkan nilai angka melek huruf, paling tidak setara dengan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jendang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Angka rata-rata lama sekolah menunjukan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Berdasarkan data dari tabel di atas, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kabupaten dengan angka rata-rata lama sekolah paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan. Pada tahun 2008, angka rata-rata lama sekolahdi Kota Tarakan selama 9,3 tahun dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2012 naik menjadi 9,44 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Kota Tarakan baru mampu menempuh pendidikan sampai

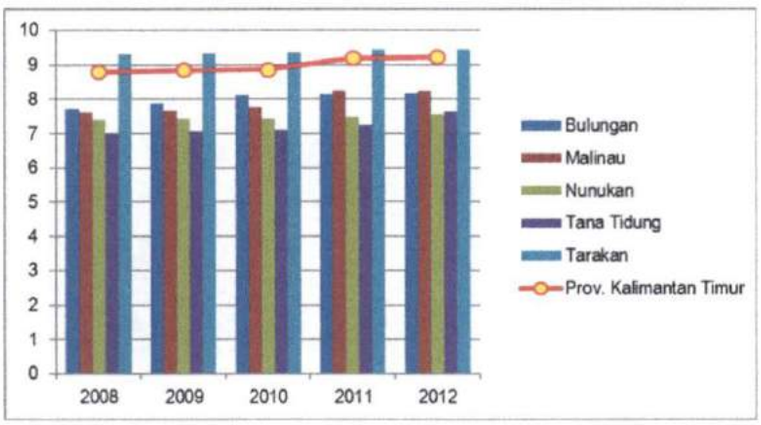
dengan kelas 3 SMP dan putus sekolah pada kelas 1 SMA. Sementara kabupaten yang mempunyai angka rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Tana Tidung. Pada tahun 2008, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tana Tidung selama 7 tahun dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2012 dapat mencapai angka rata-rata lama sekolah selama 7,64 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata penduduk di Tana Tidung bersekolah sampai dengan kelas 1 SMP dan putus sekolah pada kelas 2 SMP.

Tabel 2.2.32
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Rata-rata Lama Sekolah				
	2008(1)	2009(1)	2010(2)	2011(2)	2012(2)
Bulungan	7,72	7,88	8,11	8,15	8,17
Malinau	7,61	7,67	7,76	8,25	8,26
Nunukan	7,40	7,42	7,42	7,47	7,55
Tana Tidung	7,00	7,08	7,10	7,24	7,64
Tarakan	9,30	9,33	9,36	9,43	9,44
Prov. Kalimantan Timur	8,80	8,85	8,87	9,19	9,22

Sumber :
1) IPM Kabupaten Malinau 2011,
2) IPM Kabupaten Nunukan2013,
3) IPM Kabupaten Tana Tidung2013
4) Data Base Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena tidak tersedia data mentah untuk menghitung rata-rata lama sekolah berdasarkan rumus dari Permendagri No 54 Tahun 2010.



Gambar 2.2.24
Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Jika dibandingkan dengan provinsi induk dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Timur, sejak dari tahun 2008 hingga tahun 2012, nilai angka rata-rata lama sekolah hampir semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah angka melek huruf Provinsi Kalimantan Timur, kecuali untuk Kota Tarakan yang memiliki angka lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Tarakan merupakan pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara sehingga secara otomatis mampu meningkatkan kemampuan penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Pada umumnya, angka rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hanya Kota Tarakan (9,44 tahun 2012) yang mampu melebihi angka rata-rata lama sekolah dari Provinsi Kalimantan Timur (9,22 tahun 2012). Dalam hal ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, penduduk dan stakeholder untuk dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan penduduk dalam hal mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Pada tahun 2008 APK untuk jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa Kota Tarakan memiliki nilai APK jenjang SMA/MA/SMK tertinggi (85,29%), sebaliknya kabupaten/kota dengan APK jenjang SMA/MA/SMK yang paling rendah adalah Kabupaten Nunukan (59,09%). Sementara pada tahun 2012, kabupaten/kota yang memiliki nilai APK jenjang SMA/MA/SMK yang paling tinggi Kabupaten Bulungan (98,33%), sedangkan Kota Tarakan mengalami penurunan menjadi 68,53%. Kabupaten/kota yang memiliki nilai APK jenjang SMA/MA/SMK dengan nilai paling rendah adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai 54,42%. Berdasarkan kecenderungan perkembangan selama lima tahun terakhir dari tahun 2008 hingga 2012, terjadi penurunan nilai APK jenjang SMA/MA/SMK di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, sementara tiga kabupaten lain justru mengalami peningkatan.

Jika dilihat dalam konstelasi wilayah, akan terlihat posisi capaian APK SMA/MA/SMK Provinsi Kalimantan Utara. Capaian APK SMA/MA/SMK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 sebesar 71,26%. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, maka hanya Kabupaten Bulungan yang memiliki nilai APK SMA/MA/SMK yang lebih tinggi, sedangkan 4 kabupaten lain masih di bawah capaian dari Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam 5 tahun terakhir di beberapa kabupaten/kota mulai muncul berkurangnya keinginan masyarakat untuk melanjutkan dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, karena terjadi kecenderungan berkurangnya tingkat partisipasi masyarakat.

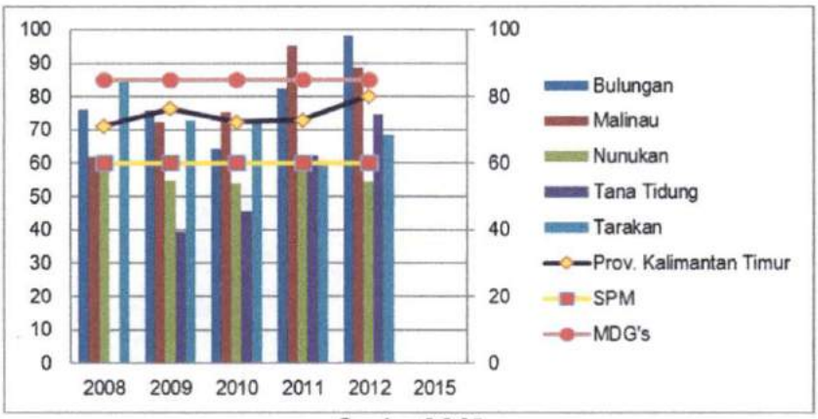
Tabel 2.2.33
Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/MA/SMK				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	76,04	75,84	64,33	82,55	98,33
Malinau	61,87	72,47	75,41	95,14	88,79
Nunukan[2]	59,09	54,74	53,97	60,48	54,42
Tana Tidung	na	39,37	45,61	62,21	74,65
Tarakan[3]	85,29	73,01	72,61	60,34	68,53
SPM	60	60	60	60	60
Prov. Kalimantan Timur	71,26	76,38	72,39	73	80,08
MDG's	85	85	85	85	85

Sumber :
1) Data Base Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2013
2) Data Profil Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2013
3) Data Profil Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2008-2012

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam konstelasi wilayah secara regional, target MDG's untuk capaian APK untuk jenjang SMA sederajat sebesar 85. Jika melihat hasil capaian dan juga Kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir, maka hanya ada dua kabupaten yang relatif sudah memenuhi target capaian MDG's di tahun 2015, yaitu Kabupaten Malinau dan Bulungan. Seangkan untuk tiga kabupaten/kota lain membutuhkan kerja keras dan kerja sama dengan semua stakeholder untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah.



Gambar 2.2.25
Grafik Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/MA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yang mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkan berbeda dengan angka rata-rata lama sekolah, jika angka rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah pada suatu kabupaten/kota. Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut, dengan demikian dapat dirumuskan rekomendasi dan masukan untuk meningkatkan angka ini, apabila kondisi yang terjadi sangat buruk. Angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini terbagi menjadi lima kategori.

Tabel 2.2.34
Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	na	na	26,75	25,75	25,21
Malinau	na	na	21,16	31,64	28,82
Nunukan	na	na	32,45	33,17	32,77
Tana Tidung	na	na	32,66	34,23	26,82
Tarakan	na	na	17,93	17,11	19,21
Prov. Kalimantan Timur	22,23	21,13	19,83	18,76	17,98

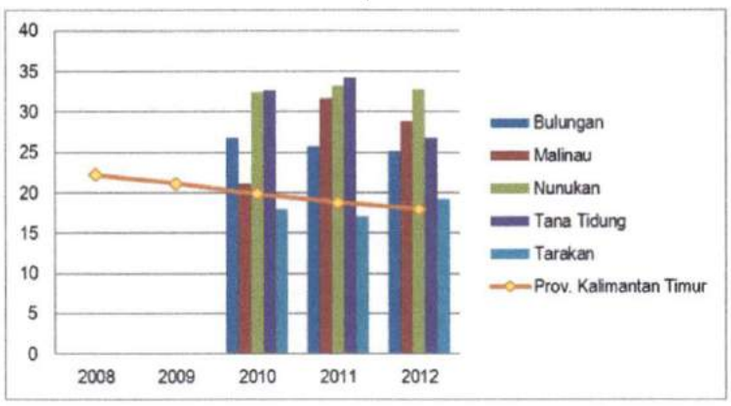
Sumber :Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2011-2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Kategori yang pertama adalah angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2010 hingga 2012. Indikator ini menunjukkan persentase masyarakat yang tidak pernah sekolah atau belum tamat SD. Pada tahun 2010, persentase tertinggi ada di Kabupaten Tana Tidung dengan persentase sebesar 32,66%, angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Tana Tidung. Ini berarti terdapat sebesar 32,66% penduduk yang belum pernah sekolah atau belum tamat sekolah dari total seluruh masyarakat. Angka mengisyaratkan bahwa 1/3 masyarakat dari semua golongan umur di Kabupaten Tana Tidung yang belum pernah atau tidak lulus sekolah dasar. Sedangkan pada tahun yang sama kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase terendah adalah Kota Tarakan dengan nilai persentase 17,93%. Paling rendahnya persentase di Kota Tarakan menunjukkan bahwa apresiasi dan kesadaran masyarakat untuk bersekolah sudah lebih baik, dan mungkin ini juga karena faktor

kemampuan masyarakat secara ekonomi yang sudah semakin lebih baik, serta faktor wilayah yang tidak terlalu luas berpengaruh pada pelayanan fasilitas pendidikan yangmudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2012, kabupaten/kota dengan persentase tertinggi adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai persentase mencapai 32,77%. Jika dilihat dari kecenderungan perkembangan dari 2010 hingga 2012, Kabupaten Nunukan menunjukkan perkembangan yang stagnan atau memiliki perkembangan namun tidak terlalu baik, seakan-akan seperti berjalan ditempat. Namun kecenderunganpenurunan tersebut nampaknya tidak hanya terjadi di Kabupaten Nunukan, namun juga hampir di semua kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota rata-rata mengalami perkembangan stagnan dan bahkan cenderung menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian dari Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2010 sebesar 19,83%, dan pada akhir tahun 2012 sebesar 17,98%, menunjukkan bahwa di provinsi induk punmengalami penurunan. Dengan kondisi demikian maka dibutuhkan usaha dan kerja keras dari semua stakeholder yang terkait untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan kemauan masyarakat serta aspek daya layan fasilitas pendidikan untuk masyarakat.



Gambar 2.2.26
Grafik Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Jenjang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kategori yang kedua adalah angka rata-rata pendidikan tertinggi untuk jenjang pendidikan lulusan SD sederajat. Indikator ini mencerminkan persentase masyarakat yang mencapai tingkat pendidikan lulus SD. Pada tahun 2010 kabupaten/kota dengan nilai persentase paling besar ada di Kabupaten Nunukan dengan nilai sebesar 29,88%. Jika ditambah dengan persentase penduduk yang tidak pernah atau tidak lulus SD pada tahun yang sama, maka lebih dari 50% penduduk di Nunukan hanya lulus SD, dengan rasio yang lebih besar tidak pernah atau tidak lulus SD. Sementara kabupaten/kota yang memiliki nilai paling kecil pada tahun 2010 adalah Kota Tarakan (24,93%). Untuk jenjang pendidikan lulus SD nampaknya di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memiliki persentase yang relatif sama, dengan perbedaan yang tidak terlampau besar.

Perkembangan dari tahun 2008 hingga tahun 2010 di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara relatif stagnan dan stabil, tidak terjadi kenaikan atau penurunan persentase pendidikan tertinggi untuk jenjang SD sederajat. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang SD di Kabupaten Nunukan pada tahun 2008 sebesar29,88%, namun pada tahun 2012 justru mengalami penurunan menjadi 25,31%. Sementara di Kabupaten Bulungan, jenjang pendidikan tertinggi SD pada tahun 2008 adalah sebesar 27,99%, dan pada tahun 2012 justru meningkat menjadi 28,47%. Dinamika dan kecenderungan perkembangan yang relatif naik dan turun di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk tidak dapat dicapai secara instan dan dalam waktu yang cepat, dibutuhkan program, rencana dan aksi untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat untuk jangka panjang.

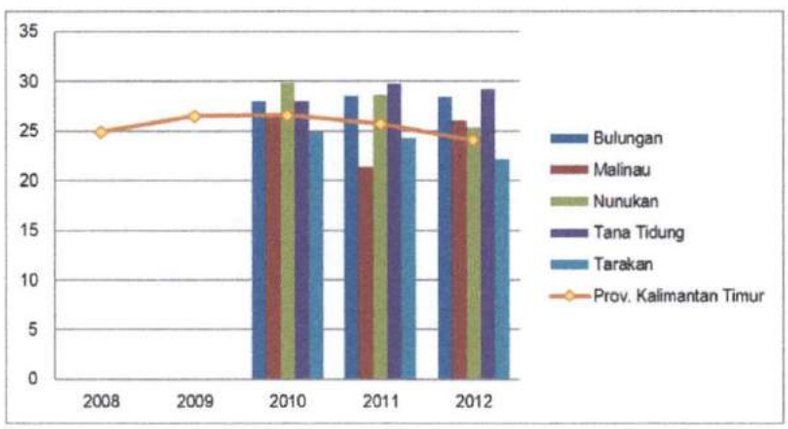
Tabel 2.2.35
Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SD Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SD Sederajat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	na	na	27,99	28,54	28,47
Malinau	na	na	26,7	21,33	26,02
Nunukan	na	na	29,88	28,65	25,31
Tana Tidung	na	na	27,96	29,76	29,2
Tarakan	na	na	24,93	24,25	22,15
Prov. Kalimantan Timur	24,92	26,5	26,58	25,73	24,06

Sumber:Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2011-2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Jika dibandingkan dengan capaian dari Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2010 berada pada level 26,58%, maka sebenarmya capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tidak terlalu jauh tingkat perbedaannya, bahkan capaian Kota Tarakan justru lebih rendah, yaitu sebesar 24,93%. Kecenderungan perkembangan dari tahun 2010 hingga 2012 di Provinsi Kalimantan Timur juga cenderung menurun, menurunnya persentase rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan jenjang SD ini dapat disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Apabila kemungkinan tersebut benar, maka kecenderungan yang menurun dapat terjadi karena meningkatnyatingkat pendidikan masyarakat.



Gambar 2.2.27
Grafik Angka Rata–rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SD Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kategori berikutnya adalah angka rata-rata pendidikan tertinggi untuk jenjang SMP sederajat. Indikator ini mencerminkan persentase masyarakat yang mencapai jenjang pendidikan tingkat SLTP sederajat di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2010 kabupaten/kota dengan nilai persentase paling besar adalah Kabupaten Malinau dengan persentase sebesar 21,53%. Sedangkan kabupaten/kota dengan nilai persentase paling kecil adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai 10,16%. Nilai ini mencerminkan bahwa derajat pendidikan pada tahun 2010 di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sudah sedikit membaik, indikasi membaik adalah apabila dibandingkan dengan rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang SD sederajat tidak terlalu jauh, yang berarti partisipasi masyarakat untuk bersekolah sudah lebih baik. Kecenderungan perkembangan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan

persentase, misalnya di Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung, dengan persentase peningkatan paling tinggi ada di Kabupaten Tana Tidung, yang pada tahun 2010 sebesar 10,16%, meningkat menjadi 14,33% pada tahun 2012. Selain peningkatan, juga terjadi Kecenderungan perkembangan yang menurun. Kecenderungan perkembangan yang semakin menurun terjadi di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan. Nilai penurunan di kedua kabupaten/kota ini hampir sama besarnya.

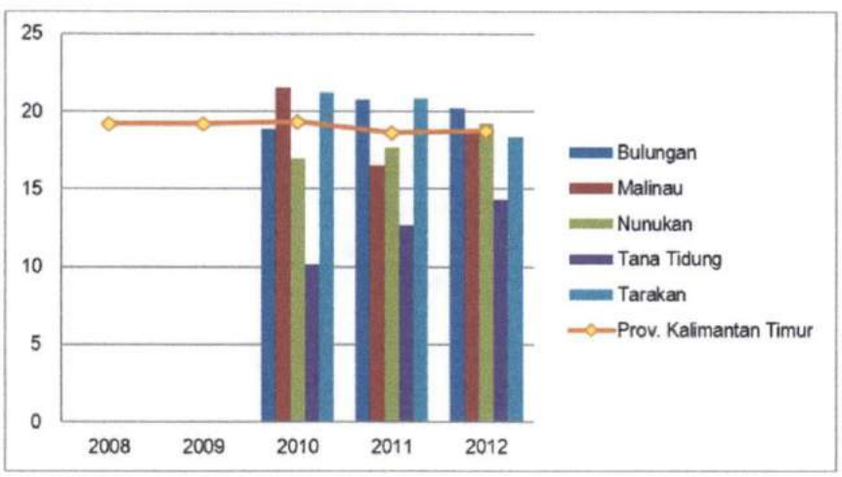
Capaian angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang SLTP sederajat di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 19,32. Apabila dibandingkan dengan capaian di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, maka hanya Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan yang memiliki capaian lebih baik, selebihnya masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. pada tahun 2012 capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 18,75%. Apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Utara, maka hanya Kabupaten Bulungan dan Nunukan yang sudah melampai capaian di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan sedikit di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Kecenderungan perkembangan di Provinsi Kalimantan Timur juga sedikit mengalami penurunan jika dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Semakin menurunnya capaian pendidikan tertinggi untuk jenjang SMP sederajat ini tidak terlalu berpengaruh, apabila pada tahun yang sama atau tahun berikutnya capaian untuk jenjang SMA sederajat juga ikut meningkat. Apabila capaian tingkat SMA juga ikut menurun maka hal ini akan menjadi masalah.

Tabel 2.2.36
Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTP Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTP Sederajat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	na	na	18,89	20,75	20,23
Malinau	na	na	21,53	16,5	18,64
Nunukan	na	na	16,93	17,65	19,26
Tana Tidung	na	na	10,16	12,64	14,33
Tarakan	na	na	21,24	20,86	18,33
Prov. Kalimantan Timur	19,20	19,19	19,32	18,61	18,75

Sumber:Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2011-2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.2.28
Grafik Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTP Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kategori berikutnya adalah rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan SMA sederajat. Indikator ini mencermnkan persentase masyarakat yang mencapai jenjang pendidikan SLTA sederajat pada tahun tertentu. Semakin besar angka persentase ini mencerminkan semakin besar pula masyarakat yang telah mengenyam pendidikan hingga SLTA. Pada tahun 2010 kabupaten/kota dengan persentase terbesar angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk jenjang SLTA sederajat adalah Kota Tarakan dengan persentase sebesar 29,43%. Sedangkan kabupaten/kota dengan persentase paling rendah adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai 17,23%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada jenjang pendidikan SLTP pada tahun sebelumnya, maka hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara memiliki persentase jenjang pendidikan tertinggi jenjang SLTA lebih besar, artinya sebenarnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah sudah baik, hal ini berarti juga bahwa program pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun dapat dikatakan berhasil, namun tetap harus dilakukan program-program yang terkait untuk menurunkan persentase masyarakat yang tidak sekolah atau tidak lulus SD yang masih cukup besar. Pada tahun 2012, kabupaten/kota dengan persentase capaian paling besar ada di Kota Tarakan dengan capaian sebesar 33,35%, hal ini berarti ada peningkatan dalam 3 tahun terakhir di Kota Tarakan. Sementara kabupaten/kota dengan nilai persentase paling rendah adalah Kabupaten Tana Tidung dengan persentase sebesar 17,51%. Apabila dilihat Kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir, maka kabupaten/kota dengan Kecenderungan perkembangan yang baik antara lain adalah Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan yang mengalami peningkatan persentase, sedangkan tiga kabupaten lain justru mengalami penurunan.

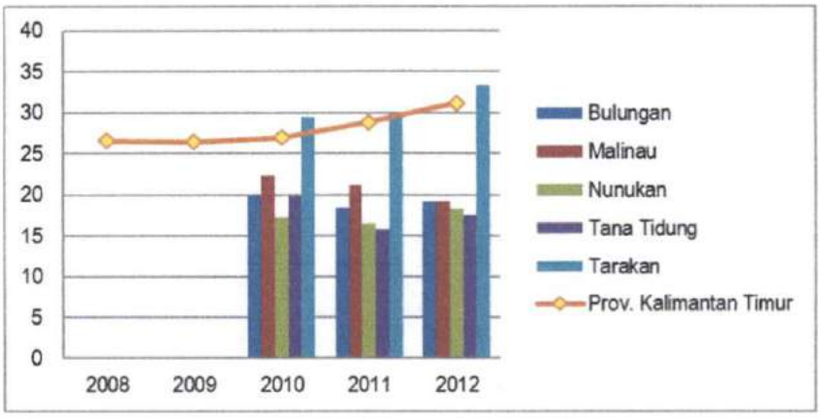
Tabel 2.2.37
Angka Rata–rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTA Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Rata–rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTA Sederajat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	na	na	20,02	18,4	19,20
Malinau	na	na	22,36	21,17	19,21
Nunukan	na	na	17,23	16,41	18,24
Tana Tidung	na	na	19,82	15,74	17,51
Tarakan	na	na	29,43	29,9	33,35
Prov. Kalimantan Timur	26,53	26,46	26,95	28,86	31,16

Sumber :Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2011-2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Capaian persentase untuk jenjang pendidikan SLTA di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 26,95%. Apabila dibandingkan dengan capaian di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun yang sama maka hanya Kota Tarakan saja yang memiliki persentase capaian yang lebih tinggi, sedangkan 4 kabupaten lain masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan pada tahun 2012, capaian persentase untuk jenjang pendidikan SLTA di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 31,16%, pada saat yang sama lagi-lagi hanya Kota Tarakan yang memiliki capaian kinerja yang lebih baik, sedangkan empat kabupaten lain masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Jika dibandingkan pada jenjang pendidikan tertinggi untuk jenjang SLTP pada tahun yang sama, maka ada peningkatan pada jenjang SLTA, hal ini berarti bahwa semakin banyak orang yang mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu hal ini juga memiliki arti bahwa kesadaran masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, hal ini dapat disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang sudah semakin meningkat.



Gambar 2.2.29
Grafik Angka Rata–rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang SLTA Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kategori berikutnya adalah rata-rata jenjang pendidikan tertinggi untuk jenjang perguruan tinggi. Angka persentase ini menunjukkan persentase masyarakat yang mencapai jenjang perguruan tinggi. Semakin besar persentase ini menunjukkan bahwa apresiasi, kepedulian, partisipasi dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang paling tinggi sudah baik, hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, tahap selanjutnya akan mengurangi pengangguran dan secara ekonomi wilayah akan terjadi peningkatan. Pada tahun 2010, Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten/kota dengan persentase masyarakat yang tamat perguruan tinggi tertinggi dengan persentase 9,4%, sedangkan kabupaten/kota dengan capaian persentase paling rendah ada di Kabupaten Nunukan dengan nilai 3,5%. Kategori ini menunjukkan derajat pendidikan tinggi di masyarakat.

Capaian persentase kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tidak ada yang melebihi 10%, ini menunjukkan bahwamasyarakat cukup sulit untuk mendapatkan akses pendidikan tersebut selain karena apresiasi terhadap pendidikan yang masih kurang, mungkin juga karena keterbatasan ekonomi. Akses yang cukup sulit ini dapat dimaknai dalam hal ketersediaan fasilitas perguruan tinggi yang terbatas, tidak semua kabupaten/kota memiliki perguruan tinggi. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal, tidak seperti pada jenjang SMA atau yang di bawahnya. Pada tahun 2012, Kabupaten Tana Tidung masih memiliki persentase lulusan perguruan tinggi yang paling banyak dengan capaian sebesar 12,13%, dan Kabupaten Nunukan masih dengan rasio lulusan paling sedikit dengan nilai 4,42%. Kecenderungan perkembangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten/kota memiliki perkembangan yang meningkat, namun dengan nilai peningkatan yang relatif kecil, pengecualian untuk Kabupaten Tana Tidung. Namun masih ada juga kabupaten/kota yang memiliki kecenderungan perkembangan yang semakin kecil, misalnya Kabupaten Malinau yang pada tahun 2010 memiliki persentase sebesar 8,26% namun pada tahun 2010 justru mengalami penurunan menjadi 7,31%.

Tabel 2.2.38
Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Rata-rata Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenjang Perguruan Tinggi				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	na	na	6,34	6,56	6.89
Malinau	na	na	8,26	9,35	7,31
Nunukan	na	na	3,50	4,10	4,42
Tana Tidung	na	na	9,40	7,63	12,13
Tarakan	na	na	6,48	7,88	6,96
Prov. Kalimantan Timur	7,12	6,63	7,33	8,05	8,22

Sumber :Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2011-2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Capaian persentase masyarakat yang lulus perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 7,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Tana Tidung yang memiliki persentase capaian yang melebihi, sedangkan kabupaten/kota lain masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2012, persentase capaian lulusan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 8,22%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara, maka hanya Kabupaten Tana Tidung yang memiliki capaian lebih baik, sedangkan empat kabupaten/kota lain masih memiliki capaian di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan masih kurang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus membuat perencanaan yang jelas dan terarah untuk meningkatkan jumlah lulusan di kabupaten/kota, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi atau menyekolahkan siswa berprestasi ke universitas yang baik dapat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah.

5. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu wilayah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Menurut BPS, angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.Semakin besar nilai APM suatu kabupaten/kota pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu wilayah.

APM untuk jenjang SMA/MA/SMK adalah perbandingan jumlah siswa yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang SMA dengan jumlah seluruh penduduk yang berada pada jenjang umur tersebut. Berdasarkan tabel APM untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2008 nilai capaian APM jenjang SMA yang paling tinggi adalah di Kota Tarakan dengan nilai sebesar 60,71%. Sedangkan kabupaten/kota dengan capaian APM jenjang SMA/MA/SMK paling rendah adalah Kabupaten Malinau dengan nilai 36,88%. Perkembangan pada tahun 2012, kabupaten/kota dengan capaian APM jenjang SMA sederajat yang paling besar adalah Kabupaten Bulungan dengan nilai 72,59%.

Jika melihat kecenderungan perkembangan dari tahun 2008 hingga tahun 2012, maka kabupaten/kota dengan kecenderungan perkembangan yang paling baik adalah Kabupaten Malinau dengan perkembangan hampir 30%. Sedangkan kabupaten/kota dengan kecenerungan yang menurun adalah di Kota Tarakan dengan penurunan sekitar 13%. Kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai capaian APM antara lain Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Kota Tarakan justru mengalami penurunan yang cukup besar. Kecenderungan perkembangan yang semakin meningkat ini hendaknya tetap dijaga dan ditingkatkan oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan bagi pemerintah Kota Tarakan hendaknya hal ini

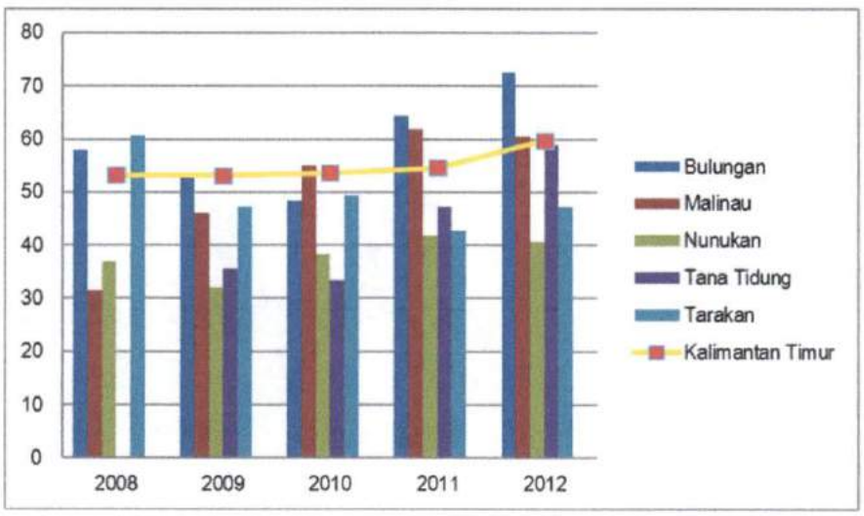
dijadikan peringatan, bahwa sudah mulai muncul permasalahan pendidikan dan partisipasi masyarakat yang mulai menurun.

Tabel 2.2.39
Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/SMK/MA
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/SMK/MA				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	58,05	53,37	48,33	64,32	72,59
Malinau	31,46	46,14	55,13	61,79	60,51
Nunukan(2)	36,88	31,97	38,27	41,85	40.53
Tana Tidung	tad	35,60	33,33	47,20	58,86
Tarakan(3)	60,71	47,26	49,39	42,77	47,26
Prov. Kalimantan Timur	53,19	53,10	53,66	54,58	59,75

Sumber :
1) Data Base Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2013
2) Data Profil Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2013
3)Data Profil Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2008-2012

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.2.30
Grafik Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Capaian APM jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 adalah sebesar 53,19%. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, maka hanya Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan yang melebihi capaian Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan tiga kabupaten lain masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Perkembangan pada tahun 2012, nilai capaian APM di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 59,75%, hal ini berarti ada kenaikan jika dibandingkan capaian pada tahun 2008. Jika dibandingkan dengan capaian APM di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012, maka hanya Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau yang melebihi capaian Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Kabupaten Tana Tidung hanya sedikit di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Melihat capaian dan kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir dan jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur, maka dibutuhkan program prioritas pembangunan sektor pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sedangkan tigakabupaten lain capaian kinerja yang sudah dicapai hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

B. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat dapat digambarkan dari berbagai unsur yang mempengaruhinya.seperti kualitas hidup, mortalitas, morbiditas, dan status gizi masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator derajat kesehatan. Indikator yang dinilai paling peka dan telah disepakati secara nasional sebagai ukuran derajat kesehatan suatu wilayah antara lain: (1) Angka kematian bayi, (2) Angka kematian balita, (3) Angka kematian ibu, (4) Usia harapan hidup, dan (5) status gizi balita. Situasi derajat kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian *neonatal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian *post neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

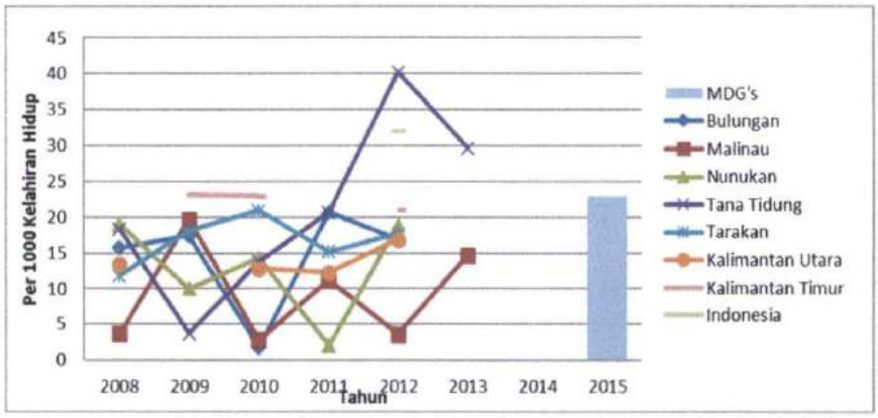
Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Tabel 2.2.40
Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2012

Kabupaten/Kota	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	15,72	17,41	1,72	20,69	16,94	n/a
Malinau	3,61	19,70	2,79	11,16	3,57	14,71
Nunukan	19,06	10,03	14,26	2,03	18,93	n/a
Tana Tidung	18,35	3,72	13,79	20,67	40,20	29,63
Tarakan	11,84	18,07	20,94	15,19	17,68	n/a
Prov. Kalimantan Utara	13,47	n/a	12,82	12,27	16,86	n/a
Prov. Kalimantan Timur	n/a	23,20	23,00	n/a	21,00	n/a

Sumber:
1) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012
2) Profil Kesehatan kabupaten Bulungan 2008-2012,
3) Kabupaten Malinau dalam angka 2008-2011,Profil Kesehatan Malinau 2012-2013
4) Renstra Dinkes Tarakan 2008-2009, Profil Kesehatan Tarakan 2010-2012
5) IPM Kabupaten Tana Tidung 2009-2010; Profil Kesehatan Tana Tidung 2012-2013

Angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel di atas. Data dalam bentuk satu provinsi secara langsung tidak dapat diperoleh karena provinsi ini baru resmi terbentuk pada tahun 2013, sehingga data Kalimantan Utara diperoleh dengan cara menggabungkan data-data dasar indikator (jumlah kematian bayi dan jumlah bayi lahir hidup) di setiap kabupaten dan kota. Jika tidak ditemukan data dasar di salah satu kabupaten maka data untuk Kalimantan Utara tidak dapat dihitung meskipun data AKB di setiap kabupaten/kota tersebut tersedia. Hal ini berlaku juga untuk indikator-indikator yang lainnya.



Gambar 2.2.31
Grafik Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
Sumber: Hasil Analisis 2014

Angka kematian bayi di Kalimantan Utara pada kurun waktu 2008-2011 menunjukkan trend yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Memasuki tahun 2012 angka kematian bayi justru mengalami kenaikan menjadi 16,86 per 1.000 kelahiran hidup. Target MDG's 2015 adalah menurunkan angka kematian bayi hingga mencapai 23 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan target MDG's, Provinsi Kalimantan Utara bisa dikatakan berhasil menekan angka kematian bayi di bawah target yang ditetapkan MDG's. Pada tahun 2012 jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Utara sebayak 191 kasus dari 12.547 kelahiran hidup. Jumlah kasus di tahun 2012 ini meningkat 37 kasus dibandingkan tahun 2011. Jadi, meskipun angka kematian bayi Provinsi Kalimantan Utara masih di bawah batas MDG's, peningkatan cukup besar yang terjadi di tahun 2012 perlu menjadi perhatian pemerintah.

2. Angka Kematian Balita (AKABA)

Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematin Balita menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu.

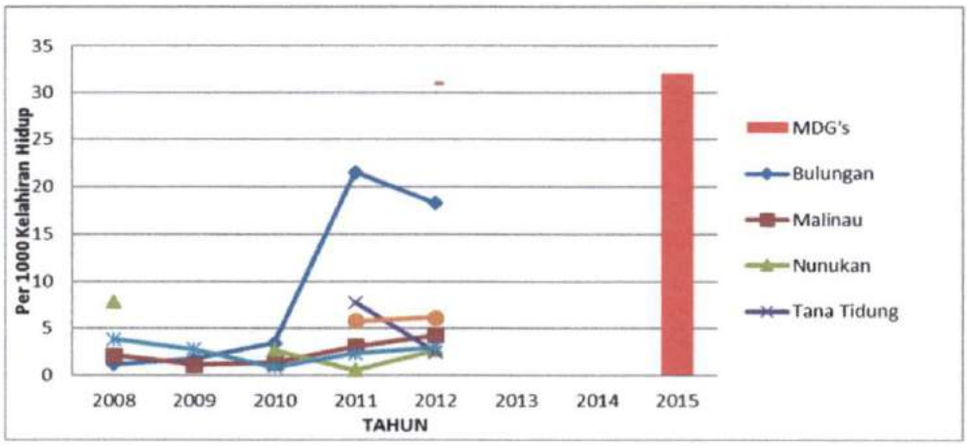
Tabel 2.2.41
Angka Kematian Balita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	1,21	1,74	3,44	21,51	18,25
Malinau	2,17	1,16	1,39	3,10	4,28
Nunukan	7,80	n/a	2,72	0,58	2,70
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	7,75	2,51
Tarakan	3,85	2,82	0,91	2,35	3,02
Prov. Kalimantan Utara	n/a	n/a	n/a	5,82	6,18
Prov. Kalimantan Timur	n/a	n/a	n/a	n/a	31

Sumber:
1) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012
2) Profil Kesehatan kabupaten Bulungan 2008-2010 dan 2012
3) Kabupaten Malinau dalam angka 2008-2013, Profil Kesehatan Malinau 2013
4) Dinkes Tarakan 2008-2010, Profil Kesehatan Tarakan 2011-2012
5) IPM Kabupaten Tana Tidung 2009-2010; Profil Kesehatan Tana Tidung 2012-2013

Jumlah kematian balita di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2011 sebanyak 73 kasus dibandingkan 12.547 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2012 ada 70 balita meninggal dibanding 11.327 kelahiran hidup. Angka kematian Balita (AKABA) tersebut sebesar 6.18 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan Kalimantan Timur, AKABA tersebut jauh sekali perbedaannya yang mencapai 31 per 1.000 kelahiran hidup (Survei Demografi Kesehatan Indonesia, 2012).

MDG's Indonesia menargetkan angka kematian balita turun hingga 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, Angka kematian balita di provinsi Kalimantan Utara jauh di bawah batas ambang MDG's. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa angka kematian balita di Kalimantan Utara memiliki kecenderungan yang naik dari tahun 2011 ke tahun 2012.



Gambar 2.2.32
Grafik Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka Kematian Ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

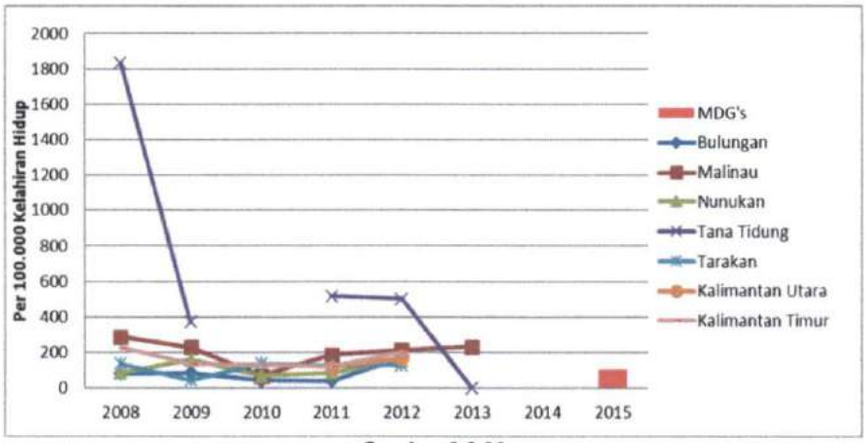
Tabel 2.2.42
Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 -2013

Kabupaten	Angka Kematian Ibu karena kehamilan, persalinan, dan ibu nifas per 100.000 kelahiran hidup					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	80,61	87,03	42,99	41,37	173,76	n/a
Malinau	286,90	228,30	69,40	185,99	214,13	232,20
Nunukan	86,66	161,76	67,91	86,83	154,56	n/a
Tana Tidung	1835,00	372,00	n/a	516,80	502,51	0,00
Tarakan	137,67	46,94	136,55	128,34	129,37	n/a
Kalimantan Utara	n/a	n/a	n/a	119,55	167,74	n/a
Kalimantan Timur	228,00	137,00	129,00	122,24	202,20	n/a

Sumber:
1) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012,
2) Profi Kesehatan Kabupaten Bulungan 2008-2010
3) Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2008, 2010
4) Dinas Kesehatan Tarakan 2008-2010
5) Tarakan dan Malinau Dalam Angka 2008-2013
6) Renstra Kabupaten Tana Tidung 2008
7) IPM KabupatenTana Tidung 2009-2010

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dilihat hanya di tahun 2011 dan 2012 karena hanya pada tahun tersebut data semua kabupaten dapat diperoleh dengan lengkap. Dilihat dari dua tahun tersebut, Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 119,55 menjadi 167,74 per 100.000

KH. Hal serupa juga terjadi bila dilihat di masing-masing kabupaten, AKI mengalami kecenderungan naik kecuali di Kabupaten Tana Tidung yang sedikit menurun di tahun 2012, bahkan hingga mencapai angka 0 di tahun 2013.



Gambar 2.2.33
Grafik Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

Angka Kematian Ibu masih menjadi permasalahan di Indonesia. Berdasarkan SDKI 2007, AKI di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian ini masih jauh dari target 118 di tahun 2014 dan target MDG's 2015. Target MDG's adalah menurunkan kematian ibu sebesar ¾ di tahun 2015 dibandingkan tahun 1990 yaitu menjadi sekitar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan target tersebut, Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2011 masih jauh dari target dan justru semakin menjauh di tahun 2012 yang mencapai 167.74 per 100.000 KH.

Untuk mengetahui penyebab masih tingginya angka kematian ibu ini, harus dilihat dari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Angka kematian ibu ini dapat dikaitkan dengan indikator lain yang cukup berkaitan yaitu seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, pelayanan selama antenatal (K4), serta kemudahan akses terhadap sarana kesehatan.

4. Presentase Balita Gizi Buruk

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu tersebut. Status gizi seorang ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Apabila janin yang dilahirkan bermasalah maka akan menimbulkan permasalahan kesehatan pada bayi tersebut di kemudian hari dan jika tidak ditangani akan berdampak pada pertumbuhan selanjutnya. Masalah ini hanya akan menjadi lingkaran setan jika tidak segera diputus rantainya.

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score < -3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Presentase Balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada aktu yang sama.

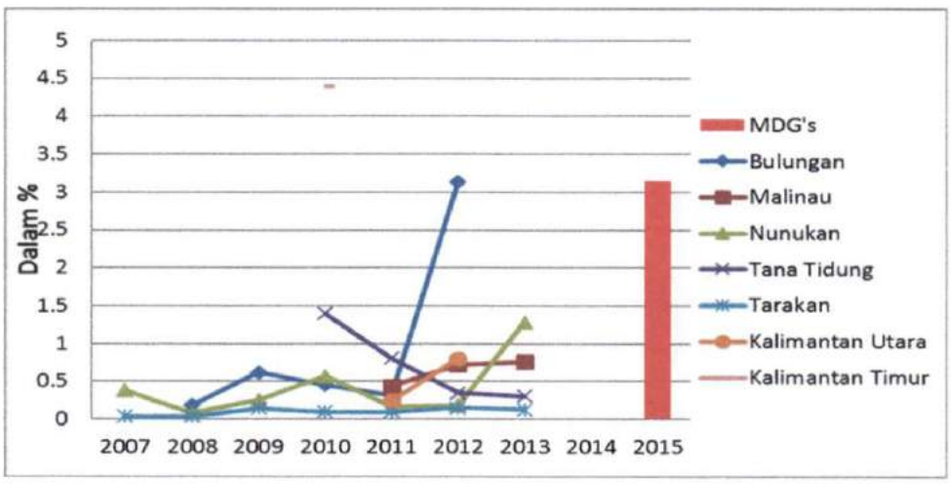
Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut).

Tabel 2.2.43
Persentase Gizi Buruk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007 - 2013

Kabupaten	Presentase Gizi Buruk Balita (%)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	n/a	0,18	0,62	0,45	0,32	3,14	n/a
Malinau	n/a	n/a	n/a	n/a	0,44	0,73	0,76
Nunukan	0,38	0,08	0,25	0,57	0,17	0,18	1,28
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	1,40	0,81	0,35	0,30
Tarakan	0,03	0,04	0,15	0,10	0,10	0,16	0,13
Kalimantan Utara	n/a	n/a	n/a	n/a	**0,25**	**0,80**	n/a
Kalimantan Timur	n/a	n/a	n/a	4,4	n/a	n/a	n/a

Sumber:
1) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012,
2) Profi Kesehatan Kabupaten Bulungan 2008-2010; Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2008-2013
3) Profil Kesehatan Kabupaten Malinau 2013
4) Tarakan Dalam Angka 2007-2008
5) IPM Kabupaten Tana Tidung 2011, RPJMD KabupatenTana Tidung,
6) Profil Kesehatan Nunukan 2008, 2010; Lakip Kabupaten Nunukan 2013,
7) Profil Kesehatan Indonesia 2012

Presentase gizi buruk Kalimantan Utara berada pada angka yang rendah yaitu tidak mencapai 1% di tahun 2011 dan 2012. Akan tetapi melihat kecenderungan dari tahun 2011 ke 2012 presentase tersebut mengalami kenaikan. Hal ini berarti tidak terjadi perbaikan dalam pencegahan gizi buruk. Kenaikan kasus gizi buruk di Kalimantan Utara terjadi karena adanya lonjakan kasus gizi buruk yang sangat besar sekali di Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2011, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, ditemukan 47 kasus balita gizi buruk. Angka ini melonjak tajam di tahun 2012 yaitu menjadi 359 kasus. Penyebab lonjakan besar tersebut tidak dijelaskan di dalam Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan tahun 2012.



Gambar 2.2.34
Grafik Persentase Gizi Buruk Balita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2013
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

Di Indonesia sendiri terdapat 5,7% balita gizi buruk pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013). MDG's Indonesia menargetkan prevalensi balita gizi buruk di Indonesia turun hingga berada pada angka 3,15% di tahun 2015. Bila dilihat secara keseluruhan maka baik tahun 2011 maupun 2012, presentase gizi buruk di Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapai target MDG's. Akan tetapi jika dilihat per kabupaten, masih ada permasalahan di Kabupaten Bulungan yang cukup tinggi pada tahun 2012 yaitu mencapai 3,14%.

5. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

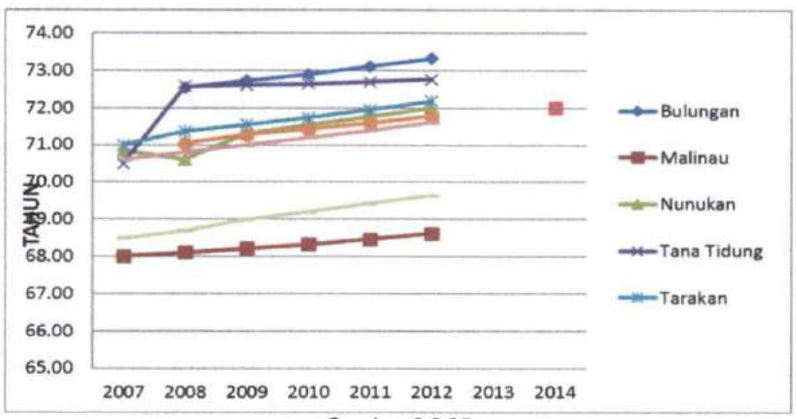
Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variable yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itulah untuk meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikanhal-hal seperti penanganan terhadap kehamilan yang beresiko, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, jumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan, hingga latar balakang pendidikan masyarakat.

Tabel 2.2.44
Angka Usia Harapan Hidup Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007 - 2012

Kabupaten/Kecamatan	Angka Usia Harapan Hidup					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	n/a	72,55	72,73	72,90	73,11	73,32
Malinau	68,01	68,11	68,22	68,33	68,47	68,62
Nunukan	70,84	70,60	71,30	71,54	71,77	72,01
Tana Tidung	70,50	72,58	72,61	72,64	72,70	72,76
Tarakan	71,00	71,37	71,55	71,74	71,96	72,19
Kalimantan Utara	-	71,04	71,28	71,43	71,60	71,78
Kalimantan Timur	70,60	70,80	71,00	71,20	71,40	71,61
Indonesia	68,50	68.70	69.00	69.21	69.43	69.65

Sumber:
1) Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2008-2009;
2) Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010
3) Inkesra Kalimantan Timur 2010 dan 2012
4) RPJP Tarakan 2004-2007 dan RPJMD Kota Tarakan 2009-2014
5) IPM Kabupaten Malinau 2010, LPPD Kabupaten Malinau 2012
6) Profil kesehatan KTT 2007; Renstra KTT 2010-2014
7) Profil Kesehatan Indonesia 2012

Berdasarkan data dari 4 kabupaten dan 1 kota, diperoleh rata-rata Usia Harapan Hidup di provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2007 hingga 2012 mengalami kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kualitas hidup di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik. Berdasarkan RPJM Nasional 2010-2014 target Usia Harapan Hidup di Indonesia adalah sebesar 72 tahun di tahun 2014. Melihat posisi yang berada pada angka 71.8 di tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara sudah mendekati target RPJM Nasional.



Gambar 2.2.35
Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

6. Penyakit

Data tentang penyakit penting diketahui untuk melihat derajat kesehatan di masyarakat tersebut. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya KLB atau wabah yang menyerang. Berdasarkan PODES 2011 diperlihatkan data wabah penyakit selama satu tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Utara. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan mala petaka (UU No 4. Tahun 1984).

Kalimantan yang selama ini terkenal di masyarakat sebagai daerah *endemic* malaria, berdasarkan data PODES 2011, jumlah penderita malaria mengalami penurunan yang sangat berarti dibandingkan tahun 2008. Bahkan menurut penjelasan dari petugas bagian Kepegawaian dan Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, jumlah kejadian malaria akhir-akhir ini sudah menurun dan bisa dikatakan bukan lagi endemic di Kalimantan Utara. Wabah lain yang terjadi di Kalimantan Utara dengan jumlah penderitanya sangat banyak adalah ISPA dan Diare.

Tabel 2.2.45
Wabah Penyakit Selama Satu Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2008 dan 2011

No	Wabah	Kabupaten/ Kota	Podes 2008		Podes 2011	
			penderita	Penderita Mati	penderita	Penderita Mati
1	Muntaber/Diare	Bulungan	446	3	47	0
		Malinau	524	2	367	1
		Nunukan	1376	11	437	0
		Tana Tidung	3	0	5	0
		Tarakan	138	0	98	0
		KALIMANTAN UTARA	**2487**	**16**	**954**	**1**
2	Demam berdarah	Bulungan	42	4	7	0
		Malinau	28	0	56	2
		Nunukan	134	11	11	0
		Tana Tidung	0	0	7	1
		Tarakan	170	3	47	0
		KALIMANTAN UTARA	**374**	**18**	**128**	**3**
3	campak	Bulungan	32	0	6	0
		Malinau	178	0	51	0
		Nunukan	238	3	137	1
		Tana Tidung	0	0	45	0
		Tarakan	10	0	2	0
		KALIMANTAN UTARA	**458**	**3**	**241**	**1**
4	ISPA	Bulungan	1321	5	50	1
		Malinau	642	4	667	0
		Nunukan	658	15	1255	2
		Tana Tidung	0	0	0	0
		Tarakan	43	0	0	0
		KALIMANTAN UTARA	**2664**	**24**	**1972**	**3**
5	Malaria	Bulungan	513	4	33	0
		Malinau	833	0	94	15
		Nunukan	994	24	272	1
		Tana Tidung	6	0	13	1
		Tarakan	15	0	0	0
		KALIMANTAN UTARA	**2361**	**28**	**412**	**17**
6	Flu burung	Bulungan	0	0	0	0
		Malinau	0	0	0	0
		Nunukan	0	0	0	0
		Tana Tidung	0	0	0	0

No	Wabah	Kabupaten/ Kota	Podes 2008		Podes 2011	
			penderita	Penderita Mati	penderita	Penderita Mati
		Tarakan	0	0	0	0
		KALIMANTAN UTARA	**0**	**0**	0	0
7	TB	Bulungan	22	0	13	0
		Malinau	249	5	32	0
		Nunukan	320	7	199	7
		Tana Tidung	0	0	2	0
		Tarakan	18	1	0	0
		KALIMANTAN UTARA	**609**	**13**	**246**	**7**

Sumber: Podes 2008 dan 2011

C. Ketenagakerjaan

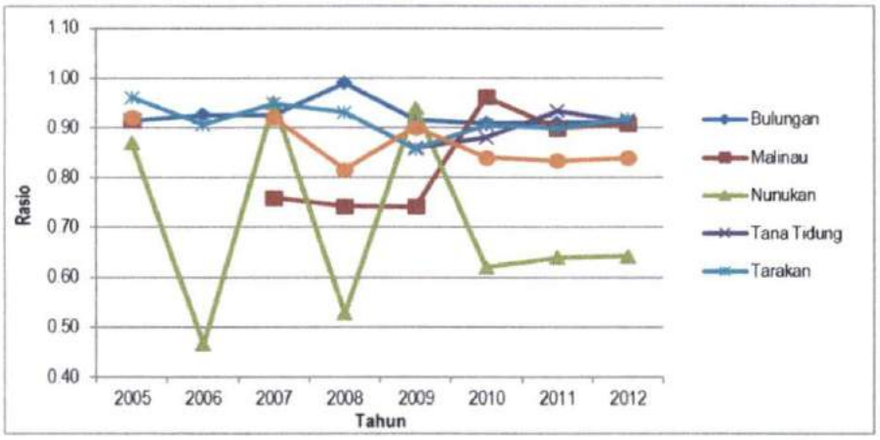
1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi nilai rasio menggambarkan bahwa masyarakat di suatu daerah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Semakin banyak masyarakat yang sudah bekerja maka kesejahteraan mereka dimungkinkan akan tinggi dan sebaliknya apabila suatu daerah didominasi masyarakat yang belum bekerja maka beban pemerintah semakin tinggi. Rasio ini juga dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Tabel di bawah menunjukkan rasio penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2007-2012.

Tabel 2.2.46
Rasio Penduduk yang Bekerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Rasio Penduduk yang Bekerja					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	0,92	0,99	0,92	0,91	0,91	0,91
Malinau	0,76*	0,74*	0,74*	0,96	0,90	0,91
Nunukan	0,95	0,53	0,94	0,62	0,64	0,64
Tana Tidung			0,86	0,88	0,93	0,91
Tarakan	0,95	0,93	0,86	0,91	0,90	0,92
Prov. Kalimantan Utara	0,92	0,82	0,90	0,84	0,83	0,84
Prov. Kalimantan Timur		0,57	0,57	0,59	0,62	0,61

Sumber :
1) Kabupaten Malinau dalam Angka 2008-2013
2) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2008-2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka 2008-2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010-2013
5) Kota Tarakan dalam Angka 2008-2013
6) Database Pembangunan Provinsi Kalimantan Tmur Tahun 2013,
7) Hasil Analisis 2014



Gambar 2.2.36
Grafik Rasio penduduk yang Bekerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan utara sudah bekerja, hal ini ditunjukkan rasio penduduk yang sudah bekerja di atas 0,6 , bahkan di beberapa kabupaten mencapai 0,9. Hal ini mencerminkan tingginya rasio penduduk yang sudah bekerja di Provinsi Kalimantan Utara. Perkembangan rasio penduduk yang sudah bekerja di Provinsi Kalimantan Utara, fluktuatif, tahun 2009 rasionya mencapai 0,9 kemudian menurun di tahun 2011 menjadi 0,83 dan meningkat kembali di tahun 2012. Kinerja perkembangan rasio penduduk yang sudah bekerja tahun 2007-2012 tiap kabupaten/kota cenderung fluktuatif, di tahun 2012 hampir semua kabupaten/kota memiliki rasio di atas 0,9 kecuali Kabupaten Nunukan. Banyaknya pabrik batubara ataupun minyak bumi di provinsi ini dimungkinkan menjadi salah satu sebab tinggi rasio penduduk yang sudah bekerja.

Angka rasio penduduk yang sudah bekerja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Gambar di bawah menunjukkan perkembangan rasio penduduk yang sudah bekerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2007-2012.

2.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Indikator jumlah grup kesenian merupakan tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga. Berdasarkan informasi yang tersedia, Kabupaten Nunukan memiliki grup kesenian terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara, yakni 34 grup kesenian di tahun 2012 meningkat menjadi 43 pada tahun 2013. Kabupaten Bulungan memiliki jumlah grup kesenian yang tergolong masih minim terlihat data dari tahun 2008 sampai 2010, yakni tiga grup kesenian di tahun 2008, turun menjadi dua grup di tahun 2009, kemudian menjadi tiga grup kesenian di tahun 2010. Kota Tarakan tidak memiliki sama sekali grup kesenian. Sementara jumlah grup kesenian di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung tidak dapat diketahui perkembangannya karena keterbatasan data pendukung.

B. Pemuda dan Olah Raga

1. Jumlah Klub Olahraga

Indikator jumlah klub olahraga digunakan untuk menjelaskan tolok ukur sejumlah kelompok kegiatan penunjang aktivitas bidang olahraga. Indikator ini merupakan aspek penunjang dalam menjelaskan beberapa pusat pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Berdasarkan indikator jumlah klub olahraga hanya ditemukan data Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan memiliki 61 klub olahraga pada tahun 2013 *(Sumber:*

Lakip Kabupaten Nunukan tahun 2013). Sementara kecenderungan perkembangan jumlah klub olah raga di kabupaten lainnya tidak dapat digambarkan karena keterbatasan data.

2. Jumlah Gedung Olahraga

Indikator gedung olahraga digunakan dalam melihat perkembangan pusat kegiatan olahraga. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi penunjang sarana dan prasarana perkembangan bidang olahraga. Data mengenai jumlah gedung olahraga hanya tersedia informasi di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Nunukan cenderung tetap jumlahnya, yakni hanya terdapat satu unit gedung olah raga hingga tahun 2013. Kota Tarakan memiliki jumlah gedung olahraga dengan kecenderungan menurun, yakni tiga unit gedung pada tahun 2008 menjadi dua unit gedung olahraga pada tahun 2013. Selama tahun 2012-2013 jumlah gedung olah raga di Kabupaten Nunukan sebanyak satu unit. Sementara Kota Tarakan memiliki jumlah gedung olahraga yang cenderung berfluktuatif selama tahun 2008-2013.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

A. Pendidikan

1. Pendidikan Menengah

1.1. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA

Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah yaitu 16-18 tahun yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.3.1
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

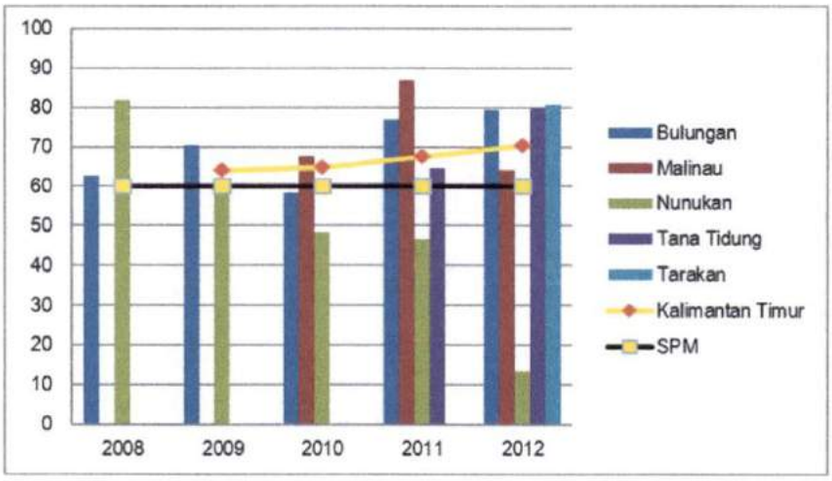
Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan[2]	62,57	70,32	58,25	76,79	79,37
Malinau[2]	na	na	67,72	86,87	64,21
Nunukan[1]	81,82	61,72	48,32	46,55	13,55
Tana Tidung[3]	na	na	na	64,66	80
Tarakan[4]	na	na	na	na	80,60
Prov. Kalimantan Timur[4]	na	64,07	64,76	67,60	70,26
SPM	60	60	60	60	60

Sumber:
1) Profil Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2013
2) Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulungan 2010 dan 2012, Inkesra Malinau, 2011 dan 2012
3) IPM Kabupaten Tana Tidung 2011 dan 2012
4) Lampiran Analisis Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Catatan: Data Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2012, nilai APS tertinggi berada di Kota Tarakan dengan nilai 80,6% dan nilai terendah ada di Kabupaten Nunukan dengan nilai 13,55%. Apabila dibandingkan dengan nilai standar pelayanan dari Kementrian Pendidikan Nasional, maka hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sudah melampaui SPM yaitu 60%, kecuali Kabupaten Nunukan yang hanya dapat mencapai 13,55%. Jika dibandingkan dengan capaian APS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 yaitu sebesar 70,26%, maka hanya 3 kabupaten yang sudah melampauinya, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Apabila melihat kecenderungan perkembangan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2008 hingga tahun 2012, nilai APS cenderung semakin menurun di Kabupaten Nunukan dan nilai APS yang masih naik turun ada di Kabupaten Bulungan. Semakin

turunnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Nunukan mungkin disebabkan oleh rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai penting pendidikan. Jika hal ini berlanjut pada masa-masa mendatang.



Gambar 2.3.1
Grafik Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini jenjang pendidikan yang digunakan adalah jenjang SMA/SMK/MA dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Tabel 2.3.2
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

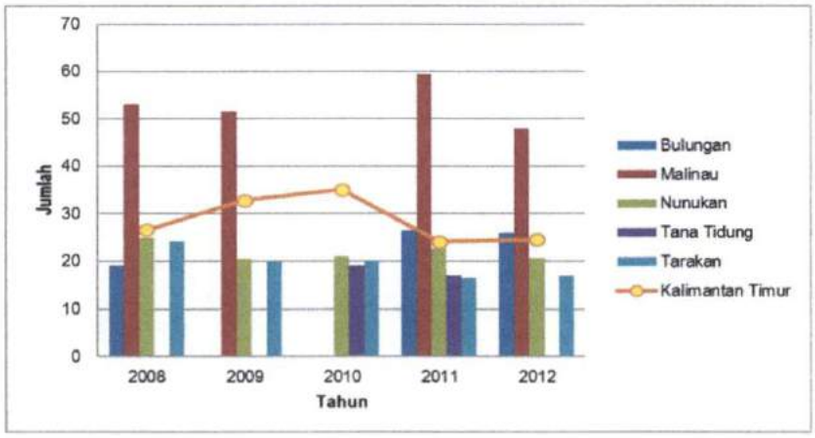
Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan[6]	19,08	na	na	26,55	25,93
Malinau[7]	53,10	51,55	na	59,46	47,90
Nunukan[4]	24,89	20,47	20,96	22,73	20,75
Tana Tidung[8]	na	na	19,18	17,10	na
Tarakan[5]	24,23	20,03	20,11	16,60	17,08
Prov. Kalimantan Timur	26,60	32,85	35,03	24,16	24,52

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2011 dan 2012
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012
3) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011
4) Profil Pendidikan Kabupaten NunukanTahun 2013
5) Profil Pendidikan Kota TarakanTahun 2008-2012
6) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009, 2012 dan 2013
7) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
8) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2012

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008, rasio ketersediaan sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara berada di daerah Kabupaten Malinau yang

mencapai dua kali rasio kabupaten/kota lainnya, yaitu 53,10 dan mengalami fluktuasi angka rasio di setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah mencapai 47,90 dan masih merupakan nilai rasio tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Ini berarti jumlah sekolah di Kabupaten Malinau masih cukup banyak dapat menampung penduduk usia 16-18 tahun, oleh karena penduduk kabupaten ini masih relatif sedikit. Meskipun di tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah menurun menjadi 47,90 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menjadi isyarat bahwa penduduk Kabupaten Malinau mengalami peningkatan.



Gambar 2.3.2
Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Sedangkan kabupaten yang mempunyai nilai rasio ketersediaan sekolah terendah pada tahun 2008 yaitu di Kabupaten Bulungan, namun terus mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya, sehingga pada tahun 2012 kabupaten yang mempunyai rasio ketersediaan sekolah terendah berada di Kota Tarakan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan, sementara jumlah sekolah tidak berkurang. Lain halnya dengan Kota Tarakan, jumlah penduduk usia 16-18 tahun terus meningkat dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah, sehingga rasio ketersediaan sekolah semakin menurun setiap tahunnya.

1.3. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA

Rasio guru dan murid tingkat SMA adalah merupakan perbandingan jumlah guru dibanding jumlah murid untuk jenjang pendidikan SMA sederajat. Pada tahun 2008 nilai capaian rasio guru dan murid untuk jenjang SMA sederajat sebesar 9,11. Dalam Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa rasio guru dan murid untuk jenjang SMA sederajat adalah sebesar 1:15, angka tersebut berarti satu guru mengajar 15 siswa SMA. Jika dibandingkan dengan standar SPM tersebut maka nilai capaian rasio guru dan murid di Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah nilai standar SPM tersebut. Ini berarti rasio guru dan murid SMA/SMK/MA jauh lebih baik jika dibandingkan standar SPM.

Pada tahun 2012 nilai capaian rasio guru dan murid tingkat SMA untuk Provinsi Kalimantan Utara adalah 8,42 yang artinya mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2008.Kecenderungan perkembangan antara tahun 2008 hingga tahun 2012 cenderung fluktuatif. Nilai capaian yang masih di bawah standar SPM sebenarnya menjadi keuntungan yakni beban pekerjaan guru tidak terlalu berat, namun hal ini juga dapat menjadi sebuah tanda bahwa jumlah penduduk yang bersekolah semakin berkurang sehingga hal ini apabila dibiarkan akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Capaian rasio guru murid di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 adalah

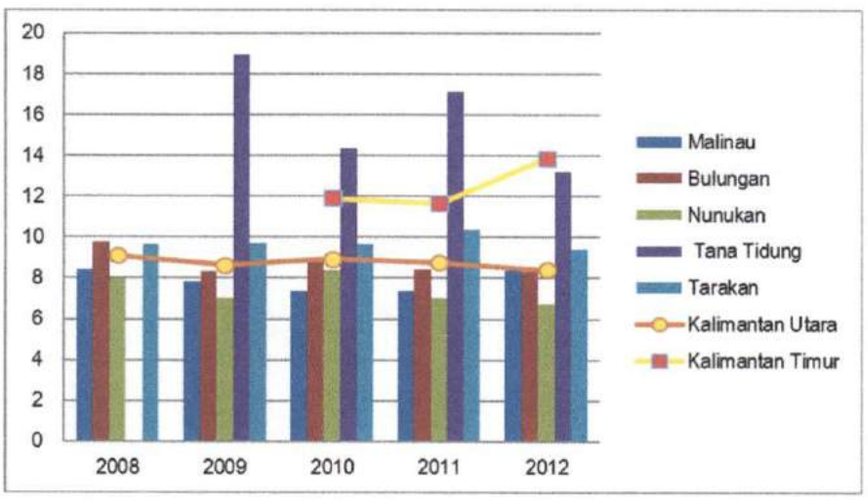
sebesar 10,89. Pada tahun yang sama capaian rasio guru murid di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 8,76. Jika dibandingkan maka capaian rasio guru dan murid di Provinsi Kalimantan Utara lebih baik.

Tabel 2.3.3
Rasio Rasio Guru/Murid SMA/MA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten	Rasio Rasio Guru/Murid SMA/MA				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	9,79	8,31	8,84	8,42	8,34
Malinau	8,41	7,82	7,39	7,39	8,37
Nunukan	7,98	7	8,37	7,04	6,75
Tana Tidung	na	18,97	14,35	17,13	13,23
Tarakan	9,69	9,74	9,65	10,37	9,44
Kalimantan Utara	9,11	8,64	8,93	8,76	8,42
Kalimantan Timur[6]	na	na	**11,89**	**11,65**	**13,88**

Sumber :
1) Profil Pendidikan Kabupaten Nunukan, Tahun 2008-2012
2) Profil Pendidikan Kabupaten Tarakan Tahun 2008-2012
3) Profil Pendidikan Kabupaten Bulungan Tahun 2009-2013
4) Data Dapodik Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2013
5) Data Kabupaten Malinau Dalam Agka 2013
6) Lampiran Analisis Kesejahteraan Rakyat ProvinsiKalimantanTimurTahun 2011-2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena tidak tersedia data mentah untuk menghitung Rasio Guru/Murid SMA/MA berdasarkan rumus dalam Permendagri No 54 Tahun 2010



Gambar 2.3.3
Grafik Rasio Rasio Guru/Murid SMA/MA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

2. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

Angka putus sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayahtertentu.Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Berdasarkan tabel angka putus sekolah jenjang SMA sederajat, pada tahun 2008 kabupaten/kota dengan nilai capaian angka putus sekolah paling rendah adalah di Kabupaten Bulungan dengan nilai capaian 25,92% dan capaian angka putus sekolah yang paling besar adalah di Kabupaten Nunukan dengan nilai 40,15%. Pada tahun 2012, kabupaten/kota dengan capaian nilai angka putus sekolah paling rendah adalah di Kabupaten Bulungan

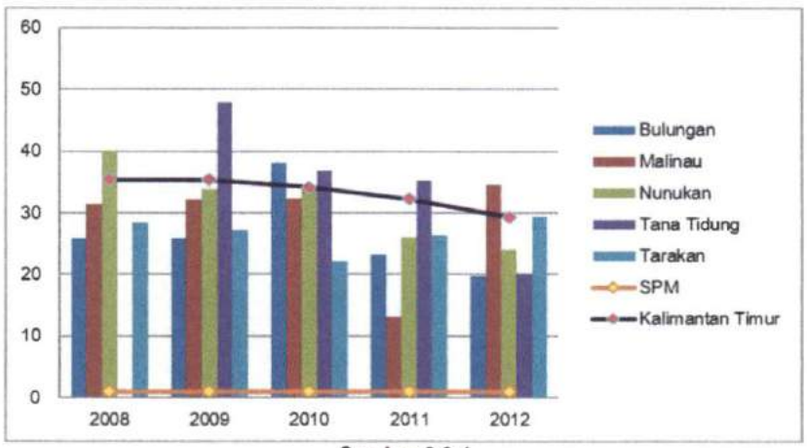
dengan nilai 19,83%, sedangkan kabupaten/kota dengan capaian angka putus sekolah paling tinggi adalah di Kabupaten Malinau dengan nilai 34,5%. Melihat kecenderungan perkembangan angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK dari tahun 2008 hingga tahun 2012, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang mengalami penurunan angka putus sekolah. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingka dengan Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan yang menunjukkan kecenderungan semakin meningkatnya angka putus sekolah pada kurun waktu yang sama.

Tabel 2.3.4
Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMA/MA/SMK				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	25,92	25,91	38,10	23,22	19,83
Malinau	31,46	32,13	32,27	13,14	34,50
Nunukan	40,15	33,83	34,10	25,99	23,99
Tana Tidung	na	47,96	36,84	35,25	20,09
Tarakan	28,38	27,20	22,12	26,36	29,40
SPM	1	1	1	1	1
Prov. Kalimantan Timur	35,33	35,33	34,15	32,23	29,33

Sumber :Data Base Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.3.4
Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Jika dibandingkan dengan capaian angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Timur, maka capaian angka putus sekolah empat kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang tersebut sebagian besar sudah melampaui capaian, hanya Kabupaten Nunukan yang memiliki capaian di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2008 capaian angka putus sekolah untuk jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Timur adalah 35,33%. Pada tahun 2012, capaian angka putus sekolah di Provinsi Kalimantan Timur adalah 29,33% yang artinya ada perkembangan yang cukup baikjika dibandingkan tahun 2008.

Jika dibandingkan dengan capaian angka putus sekolah antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara maka Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki capaian yang masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan tiga kabupaten lain memiliki capaian di atas Provinsi Kalimantan Timur. Kementerian Pendidikan Nasional memiliki standar untuk mengukur keberhasilan pendidikan di suatu wilayah dengan menggunakan SPM. SPM untuk angka putus sekolah jenjang SMA sederajat adalah kurang dari 1%. Melihat kondisi, kecenderungan capaian angka putus sekolah jenjang SMA sederajat yang masih berada jauh di atas SPM tersebut, maka hal ini menjadi persoalan yang perlu diperhatikan di Provinsi Kalimantan Utara. Tingginya angka putus sekolah pada jenjang

yang semakin tinggi khususnya SMA/MA/SMK antara lain disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang mendorong anak-anak untuk bekerja membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup.

3. Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Pada tahun 2008 kabupaten dengan pencapaian angka kelulusan terbaik di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan (98,5%), sedangkan kabupaten dengan pencapaian nilai terendah adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai capaian sebesar 94,96%. Pada tahun 2012 kabupaten dengan pencapaian angka kelulusan tertinggi adalah di Kabupaten Tana Tidung (100%), sedangkan kabupaten dengan nilai capaian terendah adalah Kabupaten Malinau (94,65%). Kecenderungan perkembangan dari tahun 2008 hingga tahun 2012 di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara cenderung fluktuatif, di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan menunjukkan kenaikan, namun di Kabupaten Malianu dan Kota Tarakan justru mengalami penurunan.

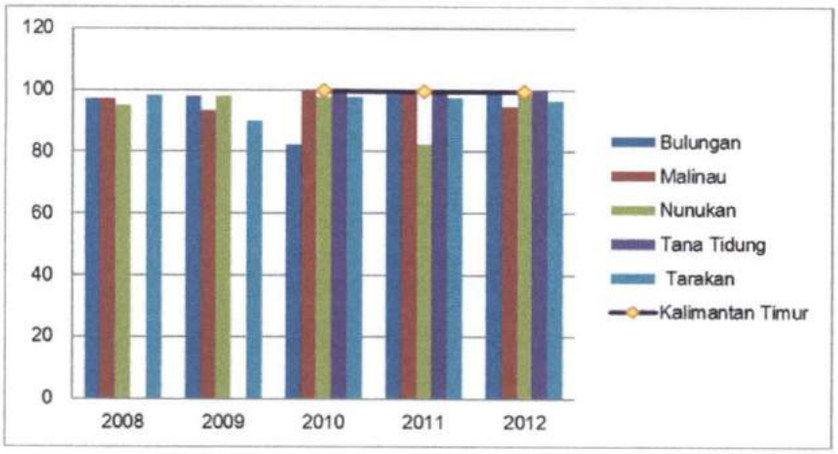
Tabel 2.3.5
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan[5]	97,25	98,05	82,34	98,63	98,67
Malinau[4]	97,12	93,38	100,00	100,00	94,65
Nunukan[1]	94,96	98,08	97,87	82,22	98,73
Tana Tidung	na	na	100,00	100,00	100,00
Tarakan[2]	98,50	90,08	97,65	97,40	96,63
Prov. Kalimantan Timur[6]	na	na	99,89	99,44	99,48

Sumber :
1) Data Profil Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2013
2) Data Profil Pendidikan Kota TarakanTahun 2008-2012
3) Data Base Pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2012
4) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2012 dan 2013
5) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2008-2010
6) Kalimantan Timur Dalam Angka2013

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2010 nilai capaian angka kelulusan jenjang SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 99,89%, sementara pada tahun yang sama hanya Kabupaten Malinau (100%) dan Kabupaten Tana Tidung yang melebihi capaian Provinsi Kalimantan Timur sedangkan dua kabupaten dan satu kota masih berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 capaian angka kelulusan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 99,48%, sementara capaian angka kelulusan jenjang SMA sederajat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar masih berada di bawah capaian tersebut. Hanya capaian angka kelulusan jenjang SMA sederajat di Kabupaten Tana Tidung (100%) yang melebihi capaian di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan justru mengalami perkembangan yang cenderung menurun sejak tahun 2008-2012, meskipun pada tahun 2010-2011 sempat mencapai angka kelulusan sebesar 100%.



Gambar 2.3.5
Grafik Angka Kelulusan SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis, 2014

4. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Angka melanjutkan sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan merupakan cerminan keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan tabel angka melanjutkan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008 hingga 2012, pada tahun 2008 kabupaten/kota dengan nilai capaian angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTS ke SMA/MA/SMK adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai persentase mencapai 137,6%, sedangkan kabupaten dengan nilai paling rendah adalah di Kabupaten Malinau dengan nilai 85,13%. Sedangkan pada tahun 2012, kabupaten dengan nilai capaian paling baik adalah Kabupaten Nunukan dengan nilai 118,9%, dan kabupaten dengan capaian persentase paling rendah adalah di Kabupaten Malinau dengan nilai 98,15%. Jika dilihat dari kecenderungan perkembangan selama beberapa tahun terakhir, maka perkembangan angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara cenderung fluktuatif, namun muncul kecenderungan mengalami penurunan di beberapa kabupaten/kota antara lain di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan sedangkan di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan, dan Kabupaten Tana Tidung relatif stabil.

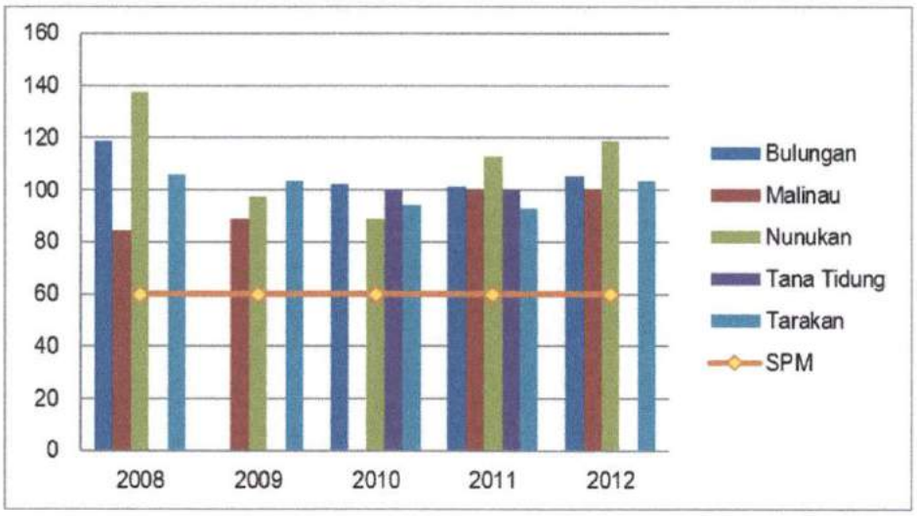
Tabel 2.3.6
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMKdi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	118,88	na	102,31	101,56	105,56
Malinau	85,13	88,92	na	100,00	100,52
Nunukan	137,60	97,22	88,69	113,03	118,90
Tana Tidung	na	na	100	100	na
Tarakan	105,68	103,59	94,46	92,72	103,52
SPM	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2011 dan 2012
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012
3) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011
4) Data ProfilPendidikanKabupatenNunukanTahun 2013
5) Data ProfilPendidikan Kota TarakanTahun 2008-2012

Catatan:: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan standar yang dikeluarkan pemerintah dalam SPM, angka minimal untuk angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK adalah sebesar 60%. Jika dibandingkan dengan target pemerintah dalam SPM tersebut, maka pada tahun 2012 target SPM tersebut sudah terlampaui oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, nilai yang melebihi 100% mungkin terjadi karena adanya murid yang masuk dari luar daerah, menurunnya nilai ini juga dapat menjadi indikator bahwa masyarakat luar daerah mulai tidak lagi tertarik untuk menyekolahkan putra-putri mereka keluar dari Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.3.6
Grafik Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis, 2014

5. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada di kabupaten. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Pemahaman kompetensi dan materi yang dimiliki seorang guru dengan berlatar pendidikan minimal S1/D-IV tentunya akan membuat siswa yang diajar memiliki pemahaman dan lebih mudah untuk menerima materi yang diajar. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan lebih baik.

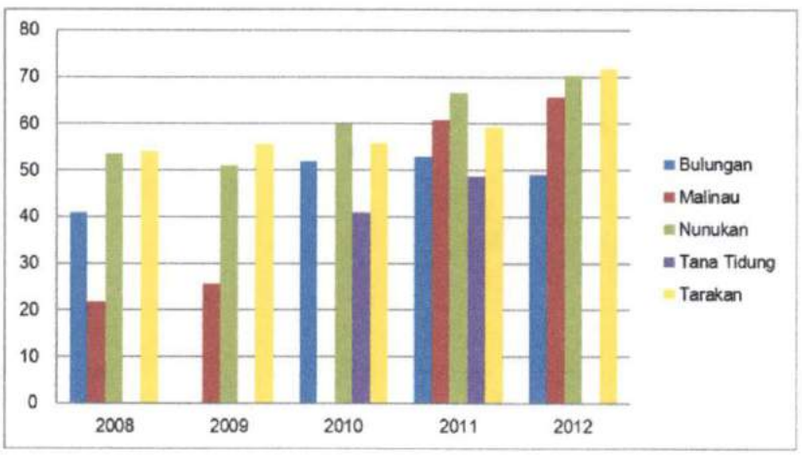
Tabel 2.3.7
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	40,95	na	52,03	52,84	49,01
Malinau	21,82	25,68	na	60,89	65,70
Nunukan	53,59	51,02	59,94	66,65	70,24
Tarakan	54,12	55,61	55,81	59,27	71,68
Tana Tidung	na	na	40,91	48,69	na

Sumber :
(1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2011 dan 2012
(2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012
(3) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011
(4) Data ProfilPendidikanKabupatenNunukanTahun 2013
(5) Data ProfilPendidikan Kota TarakanTahun 2008-2012

Catatan: Data Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data yang tersedia berupa persentase masing-masing kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dijumlahkan untuk total Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan tabel rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008 hingga 2012, pada tahun 2008 kabupaten dengan nilai rasio paling tinggi terdapat di Kota Tarakan dengan nilai 54,12%, sedangkan kabupaten dengan nilai rasio paling rendah adalah di Kabupaten Malinau dengan nilai 21,82%. Pada tahun 2012 kabupaten dengan nilai rasio paling tinggi ada di Kota Tarakan dengan nilai 71,68%, dan kabupaten dengan nilai terendah ada di Kabupaten Bulungan dengan nilai 49,01%. Jika melihat dari kecenderungan perkembangan dari tahun 2008 hingga 2012 maka kabupaten/kota dengan kecenderungan perkembangan paling baik di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Malinau dari 21,82% pada tahun 2008 menjadi 65,7% pada tahun 2012.



Gambar 2.3.7
Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IVdi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kecenderungan perkembangan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan adanya peningkatan atau kenaikan di semua kabupaten/kota. Meningkatnya kecenderungan jumlah guru yang memenuhi standar minimal S1/D-IV membuktikan komitmen pemerintah dan tentunya para guru untuk meningkatkan kompetensi dan juga keahlian dimana para siswa yang akan mendapat keuntungan dari meningkatnya kompetensi tersebut. Meningkatnya kompetensi guru dalam hal ini merujuk pada jenjang pendidikan yang ditamatkan sebenarnya juga merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi para guru, cakrawala pengetahuan semakin bertambah luas selain meningkatnya daya saing dan daya tawar para guru, sehingga akan ada kentungan yang akan diterima oleh para guru tersebut.

6. Jarak Sekolah

Jarak sekolah merupakan jarak terdekat dari desa menuju sekolah (SMA). Data jarak sekolah diolah dari data Potensi Desa tahun 2011 yang diketahui jarak dari tiap desanya, kemudian dihitung menjadi jarak rata-rata tiap kecamatan. Berikut ini merupakan jarak rata-rata ke sekolah terdekat berdasarkan kecamatan dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.8
Jarak Rata-Rata Desa ke SMA Terdekat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011

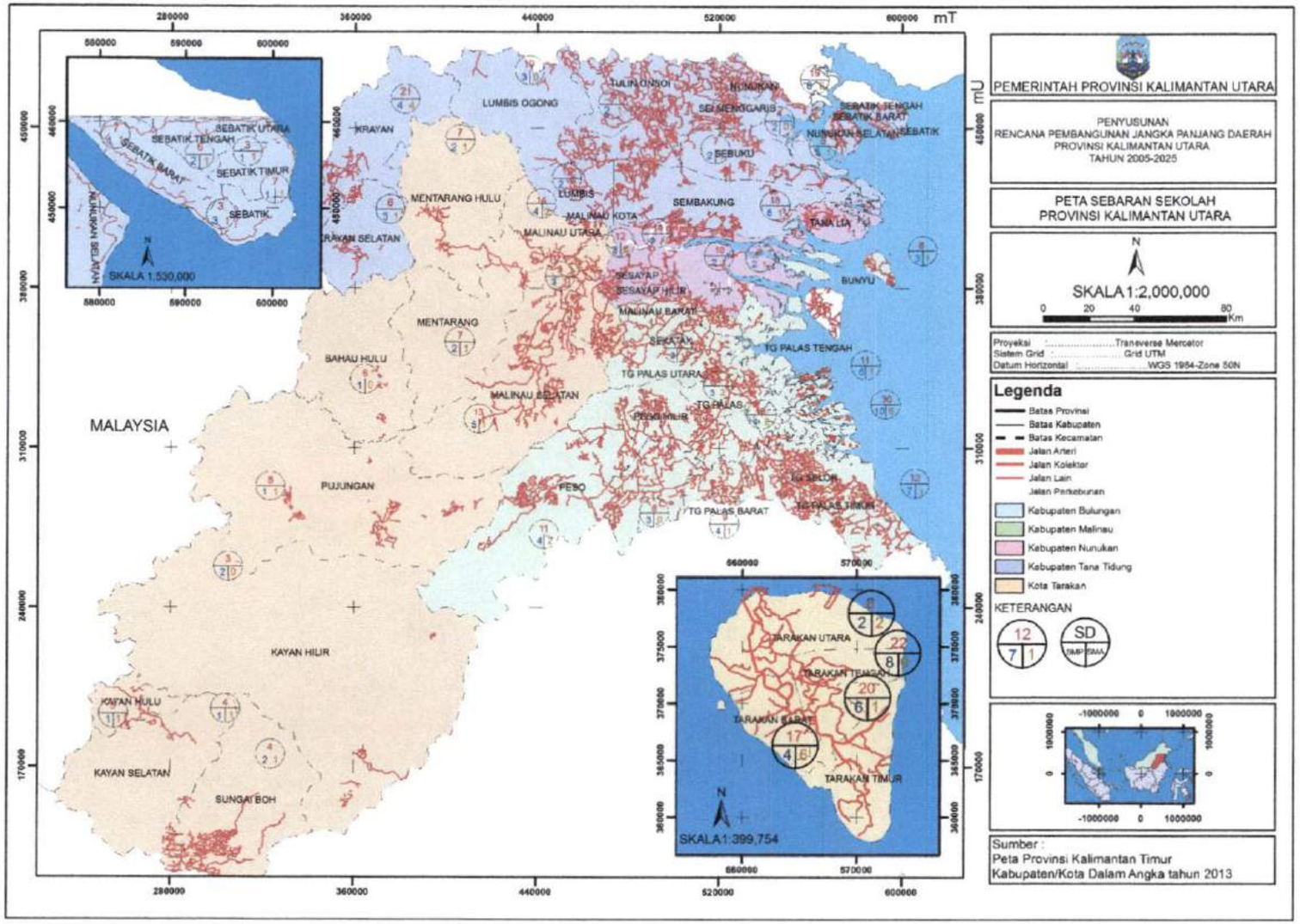
No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jarak Rata-Rata (Km)	Kemudahan Mencapai SMA Terdekat dari Desa				
				Sangat Mudah	Mudah	Sedang	Sulit	Sangat Sulit
1	Bulungan	Peso	62,8	3		1		5

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jarak Rata-Rata (Km)	Kemudahan Mencapai SMA Terdekat dari Desa				
				Sangat Mudah	Mudah	Sedang	Sulit	Sangat Sulit
		Peso Hilir	47,5	2	1		2	1
		Tanjung Palas	3,9	8				
		Tg. Palas Barat	18,6	2	2			
		Tg. Palas Utara	6,4	5				
		Tg. Palas Timur	39,7	1	2	1	3	
		Tanjung Selor	9,4	7	1			
		Tg. Palas Tengah	19,8	1	1			
		Sekatak	7,8	18	2	1		
		Bunyu	2	1				
			21,79	**48**	**9**	**3**	**5**	**6**
				67,61%	**12,68%**	**4,23%**	**7,04%**	**8,45%**
2	Malinau	Kayan Hulu	19,1	3		1		
		Sungai Boh	14,6	3	2			
		Kayan Selatan	25,6	1	3			
		Kayan Hilir	99,8					5
		Pujungan	99,8					8
		Bahau Hulu	81,5			1		4
		Malinau Kota	7	3				
		Malinau Selatan	28,5	7	10	6	1	
		Malinau Barat	9,8	8	1			
		Malinau Utara	6,7	11				
		Mentarang	43,1	6	2			5
		Mentarang Hulu	99,8					7
			44,61	**42**	**18**	**8**	**1**	**29**
				42,86%	**18,37%**	**8,16%**	**1,02%**	**29,59%**
3	Nunukan	Krayan	10,2	57	7			
		Krayan Selatan	23,3	15		6		2
		Lumbis	61,4	23	6	3	5	39
		Lumbis Ogong						
		Sembakung	52,7	4	5	3		7
		Nunukan	56,4	2			2	2
		Sei Menggaris						
		Nunukan Selatan	11,3	2	1			
		Sebuku	27,7	16	11	1		1
		Tulin Onsoi						
		Sebatik	4,3	8				
		Sebatik Timur						
		Sebatik Tengah						
		Sebatik Utara						
		Sebatik Barat	24,2	2	3	1		
			30,17	**129**	**33**	**14**	**7**	**51**
				55,13%	**14,10%**	**5,98%**	**2,99%**	**21,79%**
4	Tana Tidung	Sesayap	20	6	3	2		
		Sesayap Ilir	13,2	4	3			
		Tana Lia	23,6	1		1		
			18,93	**11**	**6**	**3**		
				55%	**30%**	**15%**		
5	Tarakan	Tarakan Timur	2,8	5				
		Tarakan Tengah	2	3				
		Tarakan Barat	3,7	3				
		Tarakan Utara	15	1	1			
			5,88	**12**	**1**			
				92,31%	**7,69%**			
KALIMANTAN UTARA				**242**	**67**	**28**	**13**	**86**
				55,50%	**15,37%**	**6,42%**	**2,98%**	**19,72%**

Sumber : Podes 2011
Catatan: Data sebelum pemekaran di Kabupaten Malinau

Berdasarkan tabel jarak rata-rata desa ke Sekolah Menengah Atas (SMA) terdekat di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2011 diketahui bahwa jarak rata-rata terdekat yaitu 2 km berada di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan yang terjauh mencapai 99,8 km di tiga kecamatan di Kabupaten Malinau yaitu Kecamatan Kayan Hilir, Pujungan dan Mentarang Hulu. Jarak tempuh ke SMA berdasarkan data Potensi Desa 2011 tersebut rata-rata masih masuk kategori sangat mudah (0-19,9km) namun tidak sebanyak jarak tempuh ke SD maupun ke SMP. Persentase untuk kategori sangat mudah hanya mencapai kisaran 55-68% untuk seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk Kota Tarakan mencapai 92,31% dikarenakan luas wilayahnya jauh lebih kecil dibandingkan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase kategori sangat sulit (80-99,9 km) untuk jarak ke SMA terhitung cukup tinggi dibandingkan jarak ke SD maupun SMP yaitu mencapai kisaran 8-30% untuk kabupaten-kabupaten di Kalimantan Utara.

Jarak rata-rata terjauh untuk akses ke SD, SMP dan SMP dengan jarak tempuh di atas 50 km mayoritas terdapat di daerah perbatasan, yaitu beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau (Kecamatan Kayan Hilir, Pujungan, Mentarang Hulu, dan Bahau Hulu) dan Kabupaten Nunukan (Kecamatan Krayan Selatan, Lumbis, Sembakung dan Nunukan).



Gambar 2.3.8
Peta Sebaran Sekolah Provinsi Kalimantan Utara
Sumber : Hasil Analisis, 2014

B. Kesehatan

1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

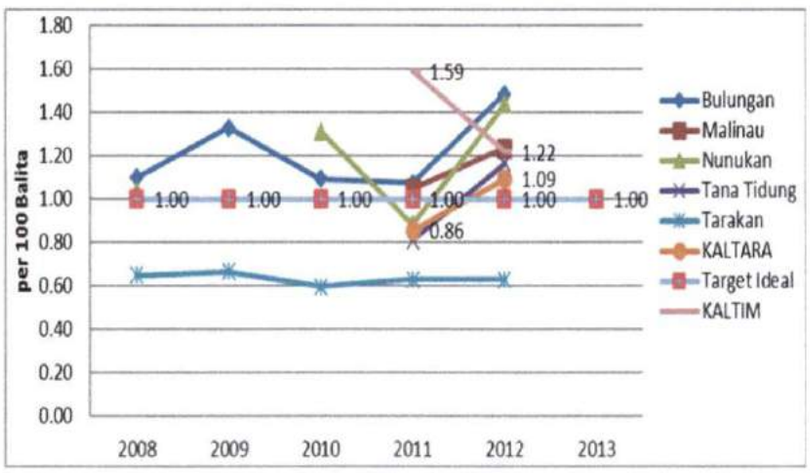
Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Untuk itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.9
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi Kalimantran Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten	Rasio Posyandu Per 100 balita				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	1,10	1,33	1,09	1,07	1,49
Malinau	n/a	n/a	n/a	1,05	1,24
Nunukan	1,04	n/a	1,31	0,88	1,44
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	0,81	1,17
Tarakan	0,65	0,67	0,60	0,63	0,63
Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	**0,86**	**1.09**
Prov. Kalimantan Timur	-	-	-	**1,59**	**1.22**

Sumber:
1) LPPD kabupaten Bulungan tahun 2010-2012, Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2008
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2011-2012
3) LPPD Kabupaten Nunukan tahun 2010, Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2004-2012
4) Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2008, Profil Kesehatan Tarakan 2009-2010
5) Profil Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2011-2012



Gambar 2.3.9
Grafik Rasio Posyandu per 100 Balita di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

Rasio posyandu per satuan balita di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke 2012. Dilihat dari masing-masing kabupaten/kota, memang semua mengalami kenaikan rasio di tahun 2012. Berdasarkan jumlah ideal posyandu yaitu 1 per 100 balita maka di tahun 2012 rasio posyandu balita di Kalimantan Utara telah mencapai target, akan tetapi bila dilihat setiap kabupaten/kota yang ada, rasio posyandu per 100 balita di Kota Tarakan masih di bawah target.

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki fungsi sebagai: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

Tabel 2.3.10
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012

Jumlah	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Puskesmas	37	37	42	45	46	48	48	48
Poliklinik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pustu	116	119	120	129	136	141	160	171
Penduduk	438.941	462.230	475.141	470.364	511.575	524.499	557.977	569.336

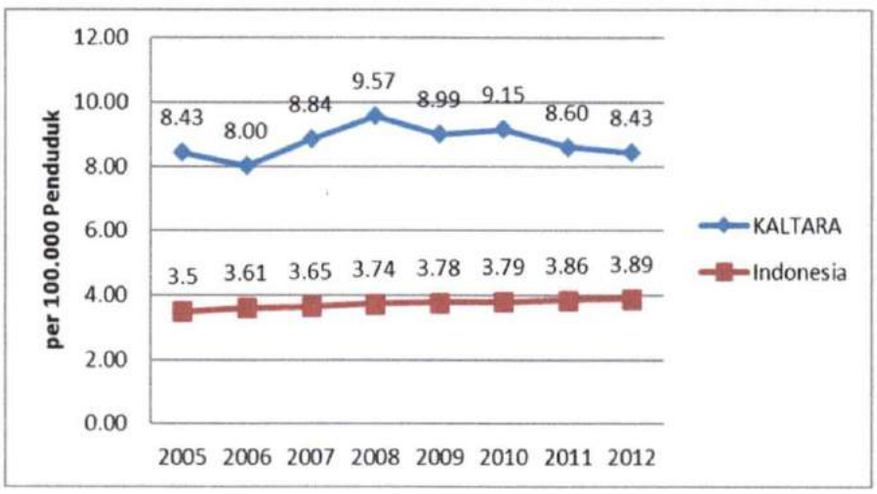
Sumber: Hasil Olahan Data dari Kabupaten Dalam Angka 2005-2012

Tabel 2.3.11
Rasio Puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012

Kabupaten	Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	11,19	10,99	12,82	10,96	10,67	10,65	10,25	9,95
Malinau	17,75	15,20	19,79	21,27	21,83	22,43	21,20	20,94
Nunukan	8,68	8,42	7,96	8,53	8,30	8,52	7,78	7,78
Tana Tidung*				22,66	20,52	19,73	18,34	17,57
Tarakan	3,62	3,43	3,39	4,32	3,64	3,62	3,43	3,33
Kalimantan Utara	**8.43**	**8.00**	**8.84**	**9.57**	**8.99**	**9.15**	**8.60**	**8.43**

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2005-2012
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2005-2012
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2005-2012, Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2007
4) Kota Tarakan Dalam Angka 2005-2012
5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2005-2012
6) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2012

*Keterangan : *) Belum pemekaran sehingga data masih menjadi satu dengan Kabupaten Bulungan.*



Gambar 2.3.10
Grafik Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Tahun 2005-2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara berada di kisaran angka 8. Itu artinya terdapat 8 puskesmas setiap 100.000 penduduk atau 1 puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara melayani 12.500 penduduk. Di Indonesia sendiri rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2009-2013 mengalami trend yang meningkat dari 3,5 - 3.8. Berdasarkan data tersebut, di Indonesia rata-rata 1 puskesmas dapat melayani 25.730 penduduk (Riskesdas, 2013). Berdasarkan jumlah penduduk, rasio Puskesmas di Kalimantan Utara lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Perbandingan rasio puskesmas di Kalimantan Utara dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.

Tingginya nilai rasio puskesmas per satuan penduduk dapat disebabkan oleh jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang tidak terlalu banyak. Meskipun rasio puskesmas di provinsi ini dibandingkan Indonesia jauh lebih tinggi, perlu diperhatikan juga luas wilayah provinsi ini dan akses ke puskesmas karena akses yang sulit ke sarana kesehatan akan membuat keberadaan sarana kesehatan tersebut kurang efektif. Begitu juga cakupan wilayah yang luas per sarana kesehatan membuat masyarakat akan berpikir untuk mengakses layanan kesehatan di tempat tersebut.

Tabel 2.3.12
Jarak Rata-rata Desa ke Puskesmas Terdekat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011

Kabupaten	Kecamatan	Jarak Rata2 (Km)	Kemudahan Mencapai Sarkes Terdekat dari Desa			
			SM	M	S	SS
Bulungan	Bunyu	3.75	1	2		
	Peso	26.91	5	2	3	
	Peso Hilir	26.02	6			
	Sekatak	7.99	2	18	2	
	Tanjung Palas	4.33	3	6		
	Tanjung Palas Barat	17.75	1	4		
	Tanjung Palas Tengah	16.80	1		2	
	Tanjung Palas Timur	40.86	1	6	1	
	Tanjung Palas Utara	6.00		6		
	Tanjung Selor	7.29	7	2		
		15.77	27	46	8	
			33.3%	56.8%	9.9%	
Malinau	Bahau Hulu	77.88		6		
	Kayan Hilir	60.53	1	4		
	Kayan Hulu	19.13	1	2		2
	Kayan Selatan	43.00		2		3
	Malinau Barat	9.88		2	6	1
	Malinau Kota	5.20	1	4	1	
	Malinau Selatan	25.95	2	4	11	6
	Malinau Utara	8.27	2	9	1	
	Mentarang	43.05	2	5	2	5
	Mentarang Hulu	91.50		1	2	4
	Pujungan	87.34	2		2	5
	Sungai Boh	14.62	1	1	3	1
		37.01	**12**	**40**	**28**	**27**
			11.2%	**37.4%**	**26.2%**	**25.2%**
Nunukan	Krayan	11.35	1	14	42	8
	Krayan Selatan	31.06	1	9	5	9
	Lumbis	62.78	2	20	31	24
	Nunukan	39.59	4	1	2	1
	Nunukan Selatan	6.33		3	1	
	Sebatik	6.03		11	1	
	Sebatik Barat	15.80	5	1	1	
	Sebuku	21.04		17	5	
	Sembakung	52.71		17	3	
		35.42	**13**	**93**	**91**	**42**

Kabupaten	Kecamatan	Jarak Rata2 (Km)	Kemudahan Mencapai Sarkes Terdekat dari Desa			
			SM	M	S	SS
			5.44%	38.91%	38.08%	17.57%
Tana Tidung	Sesayap	19.18	3	6	3	
	Sesayap Hilir	13.64	2	6		
	Tana Lia	23.00	2			1
		17.63	7	12	3	1
			30.43%	52.17%	13.04%	4.35%
Tarakan	Tarakan Barat	4.88	4	1		
	Tarakan Tengah	3.13	5			
	Tarakan Timur	5.63	6	1		
	Tarakan Utara	7.00	3			
		4.73	18	2		
			90%	10%		
Prov. Kalimantan Utara			SM	M	S	SS
			77	193	130	70
			16.4%	41%	27.7%	14.9%

Sumber: Podes 2011
Keterangan: SM= Sangat Mudah, M= Mudah, S=Sulit, SS= Sangat Sulit

Berdasarkan data dari Podes 2011, rata-rata desa-desa di Provinsi Kalimantan Utara harus menempuh 3-90 Km untuk mencapai puskesmas terdekat. Desa-desa di Kabupaten Malinau dan Nunukan memiliki jarak yang paling jauh untuk menempuh puskesmas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dilihat dari kemudahan mencapai akses, 37% desa di Kabupaten Malinau dapat mengakses puskesmas dengan mudah dan sekitar 50% mengalami kesulitan bahkan sangat sulit untuk mengakses puskesmas. Sedang di Nunukan 38,08% mengalami kesulitan dan 17,57% sangat sulit untuk mencapai puskesmas. Jarak paling kecil dengan akses yang paling mudah hanya terjadi di Kota Tarakan. Untuk itu keberadaan puskesmas pembantu akan sangat membantu masyarakat yang tidak dapat atau sulit mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas induk

Tabel 2.3.13
Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012

Kabupaten	Rasio Pustu Per 100.000 penduduk							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	37,30	37,30	36,62	35,90	33,79	32,02	31,95	30,76
Malinau	59,18	59,18	50,67	61,18	67,35	67,16	73,69	68,13
Nunukan	34,69	38,19	39,59	33,44	37,21	38,48	34,79	42,78
Tana Tidung*	-	-	-	30,21	30,21	47,88	52,62	67,25
Tarakan	1,90	1,21	1,14	1,13	1,23	1,04	1,03	0,98
Prov. Kalimantan Utara	**26,43**	**26,43**	**25,74**	**25,26**	**27,43**	**26,58**	**26,88**	**28,68**

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2005-2012
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2005-2012
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2005-2012, Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2007-2008
4) Kota Tarakan Dalam Angka 2005-2012
5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2005-2012

*Keterangan : *) Belum pemekaran sehingga data masih menjadi satu dengan Kabupaten Bulungan.*

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustu). Jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 adalah 171 buah yang tersebar di 5 kabupaten dan kota. Jumlah pustu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga 160 buah di tahun 2011. Jumlah pustu terbanyak adalah di Kabupaten Malinau yang mencapai 65 Pustu di tahun 2012, sedangkan pustu paling sedikit adalah di Kota Tarakan. Hal ini terlihat dari rasio pustu per satuan penduduk di Malinau paling tinggi dan di Tarakan paling rendah. Hal ini sesuai dengan fungsi puskesmas pembantu itu sendiri yang meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan

mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kota Tarakan memiliki wilayah yang paling kecil dan akses jalan yang paling baik dibandingkan dengan Kabupaten Malinau yang paling luas dan sebagian wilayahnya masih berupa hutan.

Selain puskesmas pembantu, puskesmas keliling (pusling) juga memiliki peran yang sangat penting bagi kabupaten dengan wilayah administrasi yang luas dan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh wilayah kerja puskesmas. Pada umumnya puskesmas keliling di Provinsi Kalimantan Utara berupa pusling roda dua, roda 4, pusling perairan yang dapat berupa ketinting maupun *speed boat*.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Profil Daerah Nunukan 2012, sebagian besar pusling yang ada mengalami kerusakan karena wilayah geografis yang sulit. Menurut hasil wawancara dengan petugas Bagian Kepegawaian dan Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, salah satu upaya untuk mengatasi sulitnya akses ke sarana kesehatan, Dinkes Provinsi mengadakan program dokter terbang untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang tidak terakses dokter spesialis (anak, dalam, dan jiwa). Program ini telah berjalan di Kabupaten Malinau dan Nunukan.

Tabel 2.3.14
Data Puskesmas Keliling di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2013

Kabupaten	2011	2012	2013
Nunukan	Roda 4 = 15 unit Perairan = 11 unit (sebagian besar kondisi rusak)	15 unit	n/a
Bulungan	15 unit di tahun 2010	n/a	n/a
Malinau	Roda 2 = 97 unit Roda 4 = 14 unit Perahu motor = 23 unit Speed boat = 1 unit (KDA Malinau 2013)	Roda 2 = 97 unit Roda 4 = 17 unit Perahu motor = 29 unit Speed boat = 1 unit (KDA Malinau 2013)	Roda 2 = 39 unit Roda 4 = 7 unit Perairan = 21 unti (Profil kes malinau 2013)
Tana Tidung	Roda 4 (ambulance) = 6 Roda 2 = 26 unit Perairan = 1 unit	Roda 4 (ambulance) = 6 unit Roda 2 = 26 unit Perairan = 1 unit	n/a

Sumber:
1) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2013
2) Profil Kesehatan Malinau 2013
3) Profil Daerah Nunukan 2012
4) Profil Kesehatan Bulungan 2011
5) Profil Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2013

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada Tahun 2012 jumlah seluruh rumah sakit yang ada di provinsi ini adalah 7 Rumah sakit, 1 RSUD tipe C di Bulungan, 1 RSUD di Nunukan, 1 RSUD di Malinau, dan 3 RSUD dan 1 RS Khusus di Tarakan. Sejak 2005 hanya Kota Tarakan yang mengalami perkembangan jumlah rumah sakit yaitu menjadi 3 unit pada tahun 2006 dan bertambah 1 unit RS khusus pada tahun 2011.

Kabupaten Tana Tidung merupakan satu-satunya kabupaten di provinsi ini yang belum memiliki Rumah Sakit sendiri. Untuk pelayanan kesehatan rujukan, Kabupaten Tana Tidung belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tipe D. Saat ini rumah sakit tersebut masih dalam proses pembangunan (*multiyears project*), yang mana pembangunannya direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun 2014 (LPPD Kabupaten Tana Tidung, 2013).

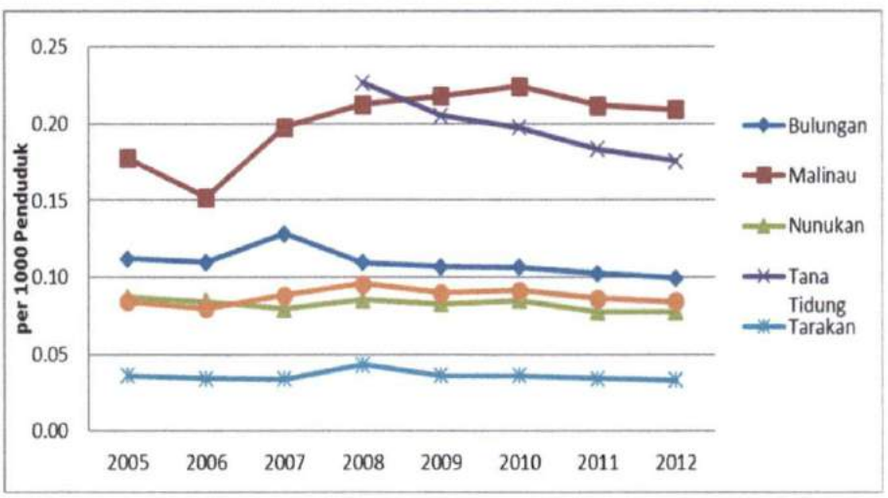
Tabel 2.3.15
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten	Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,008
Malinau	0,020	0,017	0,018	0,018	0,017	0,016	0,015	0,015
Nunukan	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,007	0,006	0,006
Tana Tidung*	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarakan	0,012	0,017	0,017	0,018	0,016	0,016	0,020	0,019
Prov. Kalimantan Utara	0,011	0,013	0,013	0,013	0,012	0,011	0,013	0,012

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2005-2012
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2005-2012
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2005-2012
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2005-2012
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2005-2012

*Keterangan : *) Belum pemekaran sehingga data masih menjadi satu dengan Kabupaten Bulungan*

Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2012 mencapai 0,012. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 1.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0,012 atau 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2005 tidak jauh berbeda. Pada tahun 2009 rasio mengalami penurunan hal ini dapat terjadi karena adanya pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara namun tidak diikuti dengan pertambahan jumlah rumah sakit. Rasio terlihat meningkat kembali pada tahun 2011 karena adanya pembangunan Rumah Sakit di Kota Tarakan.



Gambar 2.3.11
Grafik Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

Perlu diperhatikan juga jarak sarana kesehatan dengan tempat tinggal masyarakat serta kemudahan mencapai sarana kesehatan tersebut. Data ini berguna untuk melihat persebaran rumah sakit di suatu daerah dan aksesnya. Sebaik apapun sarana kesehatan yang ada apabila jarak yang ditempuh masyarakat sangat jauh serta tidak didukung dengan akses yang baik, masyarakat akan berpikir berkali-kali untuk menuju ke sana.

Tabel 2.3.16
Jarak Rata-Rata Desa ke Rumah Sakit Terdekat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jarak Rata2 (Km)	Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat (Jumlah Desa)			
			Sm	M	S	Ss
Bulungan	Bunyu	60.67			3	
	Peso	97.19		2	7	1
	Peso Hilir	69.27	2	3	1	
	Sekatak	95.41		3	18	1
	Tanjung Palas	13.21		8	1	
	Tanjung Palas Barat	61.00			1	4
	Tanjung Palas Tengah	29.00		1	2	
	Tanjung Palas Timur	55.25		6	2	
	Tanjung Palas Utara	63.33			6	
	Tanjung Selor	9.13	7	2		
		63.43	**9**	**25**	**41**	**6**
			11.11%	**30.86%**	**50.62%**	**7.41%**
Malinau	Bahau Hulu	99.80				6
	Kayan Hilir	99.80				5
	Kayan Hulu	99.80				5
	Kayan Selatan	99.80				5
	Malinau Barat	24.22		2	6	1
	Malinau Kota	8.83		5	1	
	Malinau Selatan	43.08		7	7	10
	Malinau Utara	8.58	1	10	1	
	Mentarang	56.50		6	3	5
	Mentarang Hulu	99.80				7
	Pujungan	99.80			1	8
	Sungai Boh	99.80				6
		60.66	**1**	**30**	**19**	**58**
			0.93%	**27.78%**	**17.59%**	**53.70%**
Nunukan	Krayan	99.67			1	64
	Krayan Selatan	99.68			1	23
	Lumbis	79.75	1	3	45	28
	Nunukan	48.14		5	2	1
	Nunukan Selatan	21.25		4		1
	Sebatik	99.80			12	
	Sebatik Barat	47.57		2	5	
	Sebuku	99.80		7	14	1
	Sembakung	64.90		8	12	
		85.80	**1**	**29**	**92**	**118**
			0.42%	**12.08%**	**38.33**	**49.17%**
Tana Tidung	Sesayap	99.8			9	3
	Sesayap Hilir	83.625			8	
	Tana Lia	76.6			2	1
		91.15	**0**	**0**	**19**	**4**
			0%	**0%**	**82.61%**	**17.39%**
Tarakan	Tarakan Barat	3.50	4	1		
	Tarakan Tengah	3.33	5			
	Tarakan Timur	9.50	6	1		
	Tarakan Utara	18.00	1	2		
		8.5	16	4		
			80%	20%		
			Sm	**M**	**S**	**Ss**
Kalimantan Utara			**27**	**88**	**171**	**186**
			5.7%	**18.6%**	**36.2%**	**39.4%**

Sumber: Potensi Desa 2011
SM= sangat mudah, M= mudah, S= Sulit, SS= sangat sulit ; highlight kuning= Lokasi Rumah sakit

Berdasarkan data yang diperoleh dari Podes 2011, rata-rata desa di Provinsi Kalimantan Utara harus menempuh jarak 60 Km bahkan 90 Km untuk menuju Rumah Sakit terdekat. Di Kabupaten Malinau lebih dari separuh desa yang ada harus menempuh jarak 99,8 Km untuk sampai ke rumah sakit terdekat. Hal itu diperparah dengan lebih dari 50% akses menuju rumah sakit tersebut sangat sulit, hanya 27,78% yang aksesnya mudah dan tidak sampai 1% yang sangat mudah. Di Kabupaten Nunukan pun juga seperti itu, bahkan lebih dari 80% akses dari desa ke rumah sakit di kabupaten ini sangat sulit dan sangat sulit. Jauhnya jarak tempuh ditambah dengan sulitnya akses dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk berobat ke rumah sakit. Kabupaten Tana Tidung pun demikian karena harus lintas kabupaten untuk mencapai RS terdekat. Hanya Kota Tarakan yang memiliki akses paling baik dan jarak yang dekat dengan RS setempat.

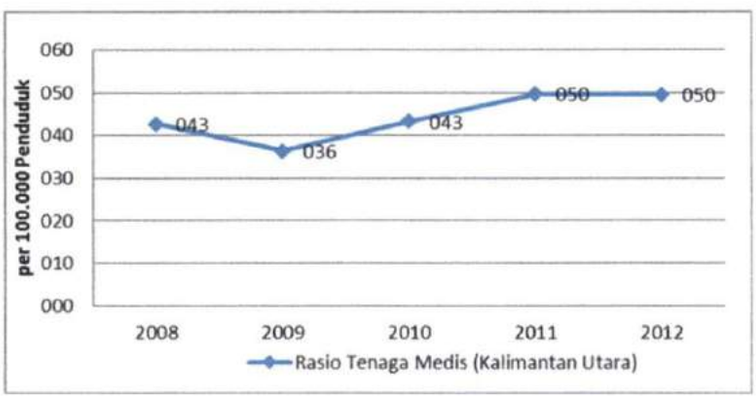
4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang dimaksud adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah baik berstatus PNS maupun bukan.

Tabel 2.3.17
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2012

Jumlah	2008	2009	2010	2011	2012
Dokter umum	144	130	157	189	199
Dokter Spesialis	25	28	29	40	34
Dokter gigi	32	28	41	48	49
Total Dokter	201	186	227	277	282
Penduduk	470.364	511.575	524.499	557.977	569.336
Rasio Dokter (Prov. Kalimantan Utara) per 100.000 penduduk	**42.73**	**36.36**	**43.28**	**49.64**	**49.53**

Sumber: Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.12
Grafik Rasio Tenaga Medis di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

Berdasarkan jenis profesinya, rasio dokter berdasarkan Indikator Indonesia Sehat 2010 dibedakan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Rasio dokter per 100.000 penduduk harus mencapai target 40 di tahun 2010. Sedangkan rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah 6, dan rasio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah 11.

Tabel 2.3.18
Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2012

Kabupaten	Rasio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	26,48	35,58	35,50	34,18	38,14
Malinau	67,35	30,22	28,84	62,07	59,84
Nunukan	16,28	18,86	25,56	16,21	18,15
Tana Tidung	37,76	13,68	13,16	67,25	46,84
Tarakan	31,44	23,39	31,55	35,25	36,58
Prov. Kalimantan Utara	**30,61**	**25,41**	**29,93**	**33,87**	**34,95**
Prov. Kalimantan Timur					

Sumber:
1) Kalimantan Timur Dalam Angka 2008-2012
2) Kabupaten Bulungan Dalam angka 2008-2012; Profil Kesehatan Bulungan 2008
3) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2008-2012;
4) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2008-2012; Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010
5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2008-2012
6) Kota Tarakan Dalam Angka 2008-2012
7) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011

Jumlah dokter umum bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah 34.95 per 100.000 penduduk di tahun 2012. Target yang ditetapkan untuk mencapai Indonesia sehat 2010 adalah 40 dokter per 100.000 penduduk. Berdasarkan rasio di tahun 2012 tersebut, Provinsi Kalimantan Utara masih belum mampu memenuhi target Indonesia sehat 2010 tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan tahun per tahun rasio dokter umum menunjukkan trend yang semakin meningkat.

Tabel 2.3.19
Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	4,57	3,56	3,55	3,42	3,32
Malinau	1,77	1,68	3,20	15,14	11,97
Nunukan	0,00	2,26	2,84	1,94	0,00
Tana Tidung	n/a	n/a	0,00	0,00	0,00
Tarakan	14,80	12,47	11,89	13,22	12,35
Prov. Kalimantan Utara	-	-	**5.53**	**7.17**	**5.97**
Indonesia Sehat 2010			**6.00**		

Sumber:
1) Kalimantan Timur Dalam Angka 2008-2012
2) Kabupaten Bulungan Dalam angka 2008-2012; Profil Kesehatan Bulungan 2008
3) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2008-2012;
4) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2008-2012; Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010
5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2008-2012
6) Kota Tarakan Dalam Angka 2008-2012

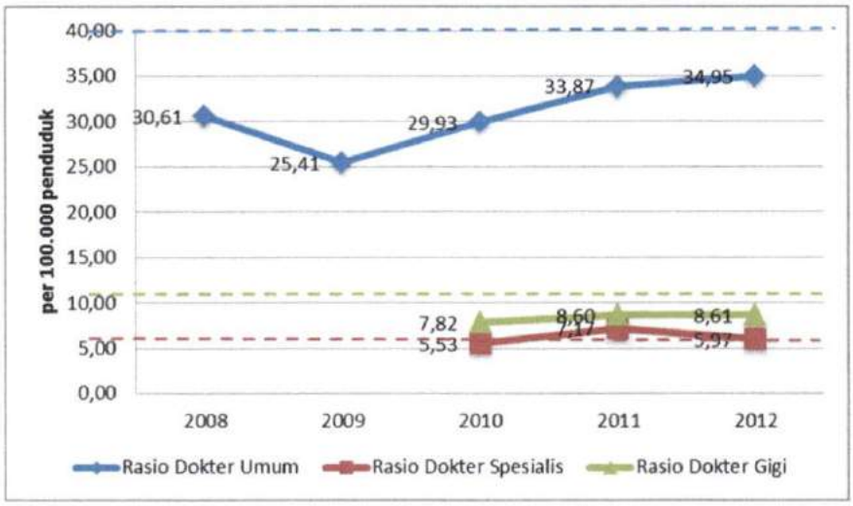
Provinsi Kalimantan Utara hampir mencapai target rasio dokter spesialis yang ditetapkan Indonesia sehat 2010 pada tahun 2011 yaitu sebesar 7 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Akan tetapi di tahun 2012, jumlah dokter spesialis yang tahun sebelumnya berjumlah 40 orang di tahun 2012 menjadi 34 orang sehingga rasio tersebut menurun menjadi 5,97 per 100.000 penduduk.

Apabila mengacu pada target Indonesia Sehat 2010 untuk rasio dokter gigi, pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Utara masih jauh dari target 11 dokter gigi per 100.000 penduduk. Akan tetapi, dilihat dari trend setiap tahunnya, kecenderungan rasio dokter gigi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Tabel 2.3.20
Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2012

Kabupaten	Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	7,31	10,67	10,65	10,25	9,12
Malinau	21,27	3,36	11,21	16,65	16,46
Nunukan	3,88	5,28	7,10	4,54	5,83
Tana Tidung	n/a	n/a	0,00	24,46	17,57
Tarakan	9,25	9,87	12,41	12,73	12,35
Prov. Kalimantan Utara	-	-	**7.82**	**8.60**	**8.61**
Indonesia Sehat 2010			**11.00**		

Sumber:
1) Kalimantan Timur Dalam Angka 2008-2012
2) Kabupaten Bulungan Dalam angka 2008-2012; Profil Kesehatan Bulungan 2008
3) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2008-2012;
4) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2008-2012; Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010
5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2008-2012
6) Kota Tarakan Dalam Angka 2008-2012
7) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011



Gambar 2.3.13
Grafik Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

5. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari:

a. Tenaga medis (dokter dan dokter gigi),
b. Tenaga keperawatan (perawat dan bidan),
c. Tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker),
d. Tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi kesehatan, entomology kesehatan, mikrobiolog kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian),
e. Tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien),
f. Tenaga keterapian fisik (fisioterapi, okupasiterapis, terapis wicara),

g. Tenaga keteknisan medis (radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis).

Berikut merupakan jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2011 hingga 2012.

Tabel 2.3.21
Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20011-2012

Kabupaten	Tahun	Medis	Praawat	Bidan	Farmasi	Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesmas	Fisioterapi	Jumlah
Bulungan	2012	64	328	154	31	16	27	14	16	0	**650**
	2011	47	375	133	26	16	25	14	35	3	**674**
Malinau	2012	59	340	151	12	12	14*	9	12		**609**
	2011	68	243	112	18	12	4	7	26	3	**493**
Nunukan	2012	37	167	50	8	9	3	8	15	0	**297**
	2011	35	147	68	12	12	16	10	20	5	**325**
Tana Tidung	2012	11	101	54	8	7	6	6	6	0	**199**
	2011	15	97	53	7	3	1	6	9	0	**191**
Tarakan	2012	129	442	97	62	26	61	12	81	8	**918**
	2011	125	459	96	61	26	62	14	81	8	**932**

Sumber:
1) Kalimantan Timur Dalam Angka 2011-2013
2) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012
3) Profik Kesehatan Kabupaten Bulungan 2011-2012
4) Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010-2012
5) Renstra Kabupaten Malinau periode 2011-2016
6) Profil Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2012

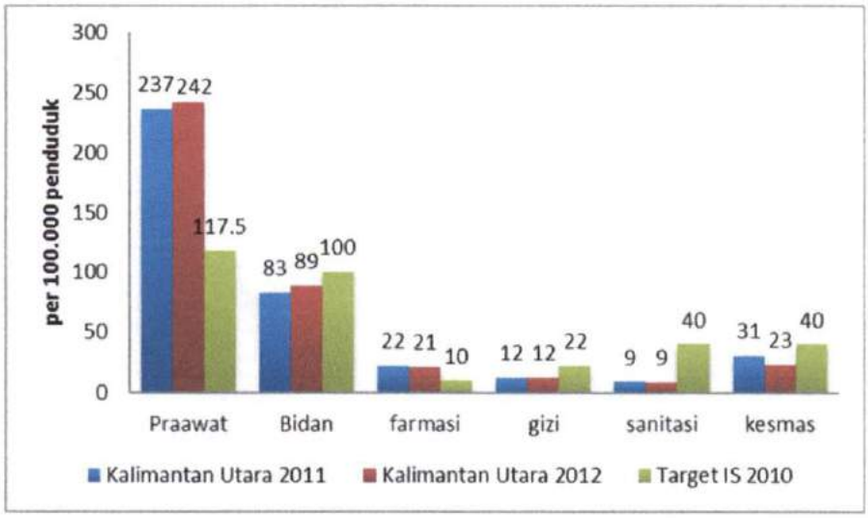
*Keterangan : *) Merupakan angka akumulasi dari tenaga kesehatan lainnya*

Keadaan tenaga kesehatan di sebuah daerah dapat dilihat dengan indikator rasio tenaga kesehatan yang dihitung per 100.000 penduduk. Berdasarkan target Indonesia Sehat 2010, rasio beberapa tenaga kesehatan per 100.000 penduduk adalah sebagai berikut: rasio perawat 117.5; rasio bidan 100; rasio ahli gizi 22; rasio apoteker 10; rasio ahli sanitasi 40; rasio ahli kesehatan masyarakat 40.

Tabel 2.3.22
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012

Kabupaten	Rasio Tenaga Kesehatan/100.000 Penduduk						
	Tahun	Perawat	Bidan	Farmasi	Gizi	Sanitasi	Kesmas
Bulungan	**2012**	272	128	26	13	12	13
	2011	320	114	22	14	12	30
Malinau	**2012**	509	226	18	18	13	18
	2011	368	170	27	18	11	39
Nunukan	**2012**	108	32	5	6	5	10
	2011	95	44	8	8	6	13
Tana tidung	**2012**	591	316	47	41	35	35
	2011	593	324	43	18	37	55
Tarakan	**2012**	210	46	29	12	6	38
	2011	225	47	30	13	7	40
Prov. Kalimantan Utara	**2012**	242	89	21	12	9	23
	2011	237	83	22	12	9	31

Sumber:
1) Kalimantan Timur Dalam Angka 2011-2013
2) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012
3) Profik Kesehatan Kabupaten Bulungan 2011-2012
4) Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2010-2012
5) Renstra Kabupaten Malinau periode 2011-2016
6) Profil Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2012



Gambar 2.3.14
Grafik Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 rasio tenaga bidan, gizi, sanitasi dan kesehatan masyarakat belum memenuhi target Indonesia Sehat 2010. Rasio tenaga farmasi tersebut tidak menggambarkan rasio apoteker yang sesungguhnya karena data tentang tenaga kefarmasian yang ada merupakan gabungan dari apoteker, analis farmasi, asisten apoteker, sehingga wajar jika rasionya jauh melebihi target yang diharapkan dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Jika dilihat trend dari 2011 ke 2012, rasio tenaga kesehatan tersebut mengalami kenaikan kecuali pada tenaga kesehatan masyarakat.

Masih kurangnya jumlah beberapa tenaga kesehatan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan di daerah tersebut. Masih rendahnya rasio tenaga sanitasi di provinsi ini dapat berdampak pada kurangnya kepedulian tentang kesehatan lingkungan di masyarakat serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan lingkungan. Selain itu, rasio tenaga kesehatan masyarakat juga masih belum sesuai target. Tenaga kesehatan masyarakat atau epidemiolog berkaitan dengan manajemen kesehatan masyarakat, bukan taraf individu, sehingga perencanaan, evaluasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan/kebijakan besar diperankan oleh tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat.

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, *hyperemesis gravidarum*, perdarahan per *vaginam*, hipertensi dalam kehamilan (*preeklamsia, eklamsia*), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presesntasi janin, *partus macet/distosia*, hipertensi dalam kehamilan (*preeklamsia, eklamsia*), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (*preeklamsia, eklamsia*), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara professional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.

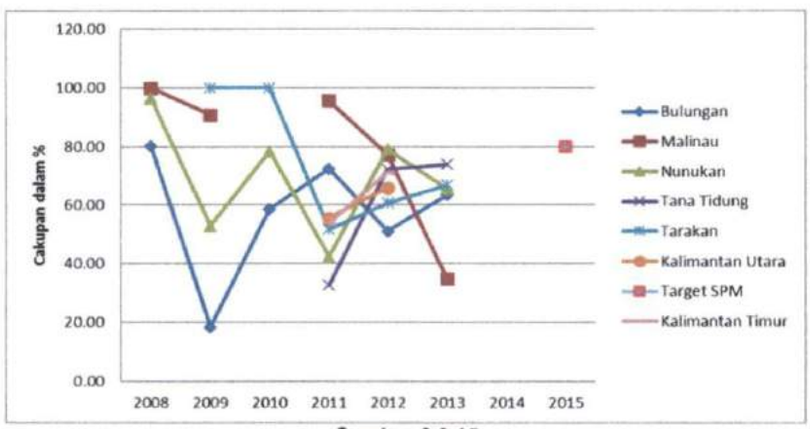
Tabel 2.3.23
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2013

Kabupaten	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	80,08	18,41	58,56	72,41	51,00	63,27
Malinau	100,00	90,76	n/a	95,59	77,27	34,91
Nunukan	96,45	52,82	78,37	42,22	79,04	65,59
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	32,61	72,04	73,91
Tarakan		100,00	100,00	51,63	60,59	66,79
Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	54.21	65.84	-
Prov. Kalimantan Timur				53.61	71.10	

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010-2013; Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2009
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009 dan 2011-2012; Profil Kesehatan Malinau 2013
3) LPPD KabupatenNunukan 2010 dan 2012; Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan 2011, Lakip Kabupaten Nunukan 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2011-2013
5) Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2009-2013

Komplikasi kebidanan yang berhasil ditangani di Provinsi Kalimantan Utara masih sebatas 54,21% di tahun 2011 dan meningkat di tahun 2012 menjadi 65.84%. Apabila dibandingkan dengan provinsi pendahulunya yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara masih berada di bawahnya. Bila mengacu pada target nasional, baik Provinsi Kalimantan Utara maupun Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2012 masih belum memenuhi target. Dalam Permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten dan kota, Menteri Kesehatan RI menargetkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebesar 80% pada tahun 2015. Melihat trend yang meningkat dari tahun 2011 ke 2012 sebesar 11.63%, jika Provinsi Kalimantan Utara mampu mempertahankan kenaikan itu dari tahun ke tahun, di tahun 2015 Kalimantan Utara diperkirakan dapat mencapai target SPM.

Belum tercapainya indikator ini dapat menunjukkan masih banyaknya ibu dengan komplikasi kebidanan yang belum mendapatkan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih. Banyaknya kasus komplikasi kebidanan berdampak pada kesehatan dan keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya. Hal ini dapat menjadi salah satu sebab angka kematian ibu yang masih tinggi di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.3.15
Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pertolongan persalinan merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu di Indonesia. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

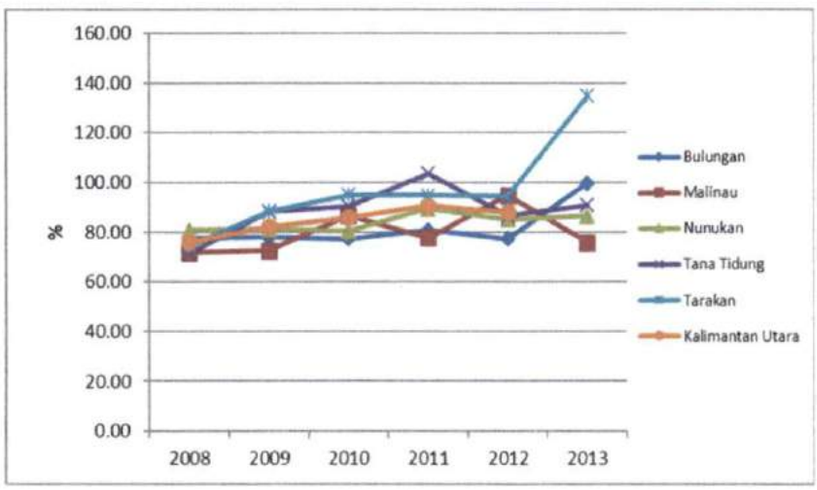
kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional.

Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standard. Tenaga kesehatan yang dimaksud tersebut dapat seorang dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan.

Tabel 2.3.24
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	77,63	77,86	77,16	80,82	77,21	99,64
Malinau	71,61	72,42	86,68	77,60	94,75	75,80
Nunukan	80,79	81,23	80,26	89,37	85,11	86,53
Tana Tidung	71,48	88,20	90,40	103,65	86,46	90,74
Tarakan	74,36	88,42	94,87	94,66	94,39	134,77
Prov. Kalimantan Utara	76.07	82.27	85.98	90.63	88.00	-
Prov. Kalimantan Timur	n/a	n/a	n/a	83.46	80.47	n/a

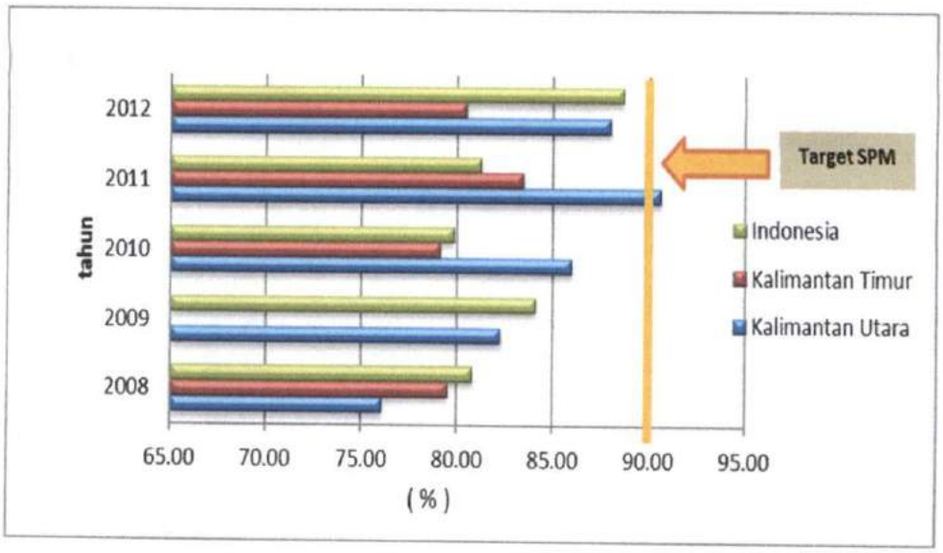
Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010, 2012, 2013; Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2009
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009 dan 2011-2012; Profil Kesehatan Malinau 2013
3) LPPD KabupatenNunukan 2010 dan 2012; Lakip Kabupaten Nunukan 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2011-2013; Web (www.spm.depkes.go.id) untuk data Tana Tidung 2010
5) Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2009-2013
6) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012
7) Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2010



Gambar 2.3.16
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat dari angka yang terus meningkat dari tahun 2008 hingga berhasil menembus angka 90% pada tahun 2011. Mengacu pada target SPM nasional, target untuk indikator ini adalah 90% di tahun 2015. Pada tahun 2011 Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil mencapai target yang diharapkan, akan tetapi di tahun 2012 justru sedikit mengalami penurunan. Capaian indikator ini pada tahun 2013, semua kabupaten mengalami kenaikan kecuali Kabupaten Malinau yang justru menurun 19%. Kabupaten yang belum mencapai target SPM pada tahun 2013 adalah Kabupaten Nunukan dan Malinau.

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa indikator cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kontribusi besar terhadap keselamatan ibu dan bayi. Menurunnya angka cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2012 hingga di bawah target SPM Nasional, menunjukkan bahwa masih banyak ibu bersalin yang proses persalinannya tidak dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Hal ini meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi tersebut. Menurut Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, yang dilansir dari situs Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (http://menkokesra.go.id/), penyebab utama kematian pada ibu melahirkan adalah perdarahan dan infeksi yang tidak tertolong karena banyak yang masih memilih untuk melahirkan di rumah, tidak di rumah sakit atau puskesmas.



Gambar 2.3.17
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan
di Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan IndonesiaTahun 2008-2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

Berdasarkan data dari Podes 2006-2011, jumlah dukun bayi jauh melebihi jumlah bidan dan tenaga medis yang ada. Bahkan, hampir separuh dari jumlah dukun yang ada merupakan dukun yang tidak terlatih. Keberadaan dukun bayi ini berpotensi menurunkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.3.25
Jumlah Tenaga Bidan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006-2011

Kabupaten	2006	2008	2011
Bulungan	59	76	119
Malinau	39	32	41
Nunukan	44	55	49
Tana Tidung*		13	47
Tarakan	40	42	47
Prov. Kalimantan Utara	**182**	**218**	**303**

Sumber: Podes 2006, 2008, 2011

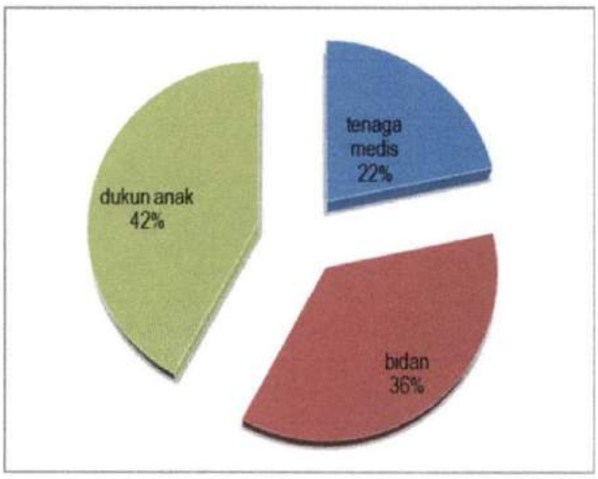
*Keterangan : *) Kabupaten Tana Tidung tahun 2006 belum memisah dari Kabupaten Bulungan*

Tabel 2.3.26
Jumlah Dukun Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006-2011

Kabupaten	2006		2008	2011
	Tidak Terlatih	Terlatih		
Bulungan	67	101	159	139
Malinau	81	74	125	122
Nunukan	155	142	230	201
Tana Tidung*			19	47
Tarakan	25	33	48	28
Prov. Kalimantan Utara	**328**	**350**	**581**	**537**
	678			

Sumber: PODES 2006, 2008, 2011

*Keterangan : *) Kabupaten Tana Tidung tahun 2006 belum memisah dari Kabupaten Bulungan*



Gambar 2.3.18
Diagram Perbandingan Tenaga Medis, Dukun, dan Bidan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011
Sumber: Hasil Analisis 2014

8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

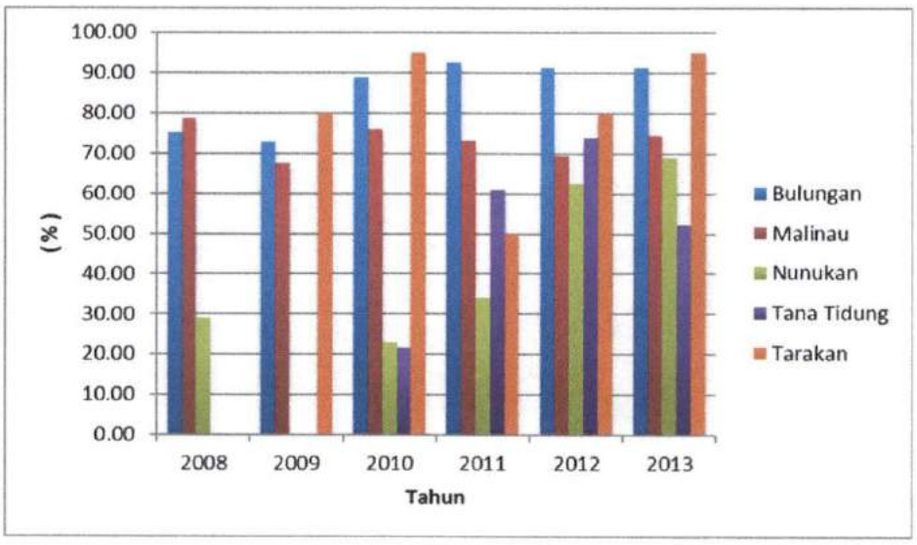
Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten.

Tabel 2.3.27
Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 -2013

Kabupaten/Kota	Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	75,31	72,84	88,89	92,59	91,36	91,36
Malinau	78,70	67,59	76,15	73,15	69,44	74,31
Nunukan	29,02	n/a	22,91	34,05	62,50	69,00
Tana Tidung	n/a	n/a	21,74	60,87	73,91	52,17
Tarakan	n/a	80,00	95,00	50,00	80,00	95,00
Prov. Kalimantan Utara	-	-	**50.22**	**55.39**	**70.47**	-

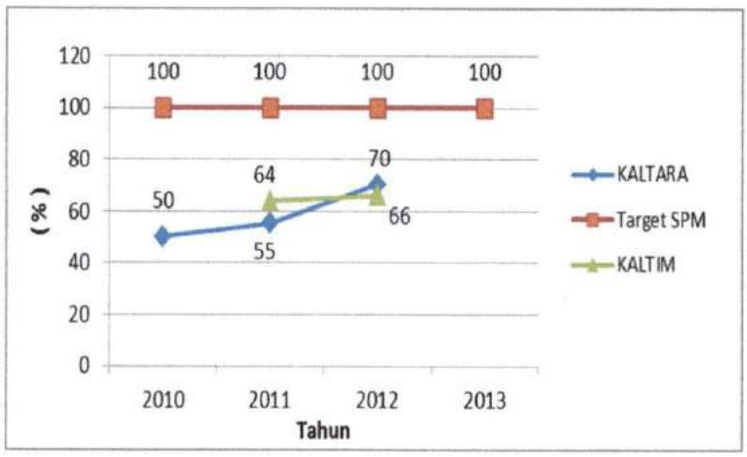
Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010, 2013; Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2009
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009; Renstra (2011-2016); Profil Kesehatan Malinau 2013
3) LPPD KabupatenNunukan 2010 dan 2012; Profik Kesehatan Nunukan 2011-2012;
4) Lakip Kabupaten Nunukan 2013; Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009
5) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2013;
6) Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2009-2013
7) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012

Dari semua kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, belum ada yang dapat mencapai target SPM yaitu 100% baik di tahun 2010 ataupun di tahun-tahun setelahnya. Kabupaten/kota yang di tahun 2013 hampir mencapai target 100% adalah Kota Tarakan dan disusul oleh Kabupaten Bulungan. Kabupaten Tana Tidung menempati posisi terendah untuk indikator ini, dari 23 desa hanya 12 desa yang mampu mencapai UCI, angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 17 dari 23 desa.



Gambar 2.3.19
Grafik Cakupan Desa UCI Tingkat Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

Jika dilihat secara menyeluruh di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012, indikator cakupan desa UCI ini telah mengalami kenaikan sejak tahun 2010 yang hanya 50.22% menjadi 70.47%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pendahulunya, di tahun 2012 Kalimantan Utara masih sedikit di atasnya.



Gambar 2.3.20
Grafik Cakupan Desa UCI di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

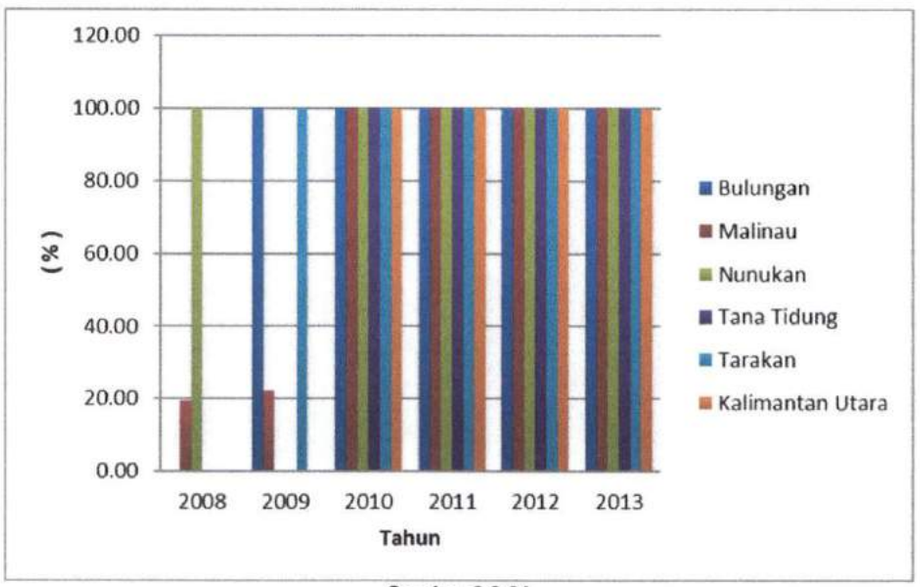
Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score < -3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Balita gizi buruk mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat/ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.3.28
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/Kota	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Malinau	19,44	22,22	100,00	100,00	100,00	100,00
Nunukan	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
Tana Tidung	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
Tarakan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prov. Kalimantan Utara	-	-	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber:
1) *LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010-2013; Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2009*
2) *LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009 dan 2011-2012; Renstra (2011-2016); Profil Kesehatan Malinau 2013*
3) *LPPD Kabupaten Nunukan 2010 dan 2012; Lakip Kabupaten Nunukan 2013*
4) *LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2013;*
5) *Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2009-2013*
6) *Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011*

Di Provinsi Kalimantan Utara, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan telah mencapai target SPM Nasional. Kemenkes menargetkan SPM untuk cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah sebesar 100% di tahun 2010. Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2010 telah berhasil mencapai target tersebut dan mempertahankannya hingga tahun 2013.



Gambar 2.3.21
Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

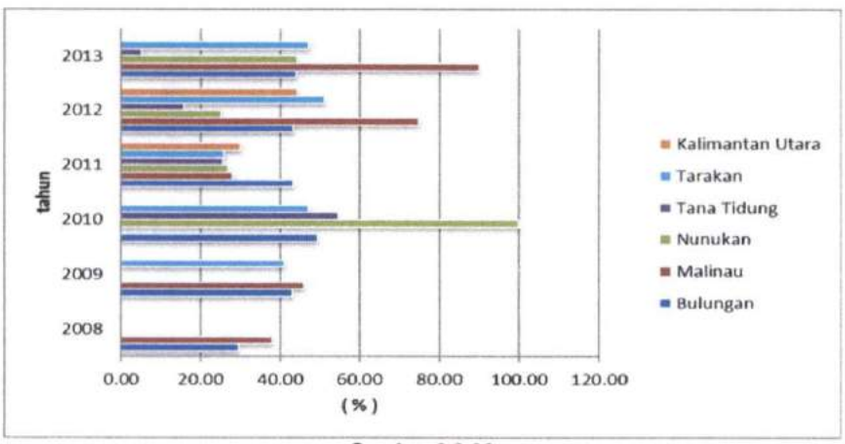
Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) adalah jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama 1 tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA (+) adalah penemuan pasien baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan obat OAT kurang dari satu bulan. Diobati adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA (+) dengan OAT selama 6 bulan. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.29
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (+)
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	29,49	43,14	49,51	43,35	43,22	43,95
Malinau	38,14	45,93	n/a	28,07	74,85	90,00
Nunukan	n/a	n/a	100,00	26,92	25,16	44,29
Tana Tidung	n/a	n/a	54,55	25,58	15,79	5,00
Tarakan	n/a	41,13	47,28	25,93	51,11	47,24
Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	**29.96**	**44.24**	-

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008, 2010, 2013; Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2009
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009 dan 2011-2012; Profil Kesehatan Malinau 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2010; Lakip Kabupaten Nunukan 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010
5) Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2009-2013
6) Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012

Terjadi kenaikan cakupan penemuan dan penanganan TBC BTA (+) di Provinsi Kalimantan Utara dari 2011 ke 2012. Target SPM adalah 100% di tahun 2010. Kabupaten Nunukan berhasil mencapai target tersebut akan tetapi di tahun-tahun sesudahnya realisasi menurun drastis. Pada tahun 2013 belum ada satupun kabupaten/kota yang mencapai target SPM. Kabupaten Malinau satu-satunya kabupaten yang berhasil mendekati target SPM di tahun 2013.



Gambar 2.3.22
Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (+)
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji *Torniquet* positif), disertai/tanpa pembesaran hati (*hepatomegali*), *trombositopenia* (trombosit ≤100.000/µl), peningkatan *hematocrit* ≥20%.

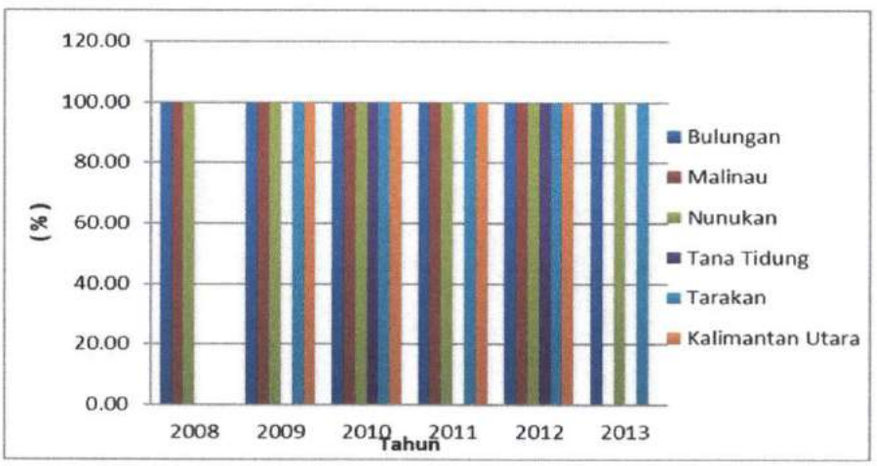
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah presentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

Tabel 2.3.30
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Malinau	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Nunukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tana Tidung	n/a	n/a	100,00	(Tidak ada kasus)	100,00	n/a
Tarakan	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prov. Kalimantan Utara	-	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	-

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010-2013; Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2009
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009 dan 2011-2012; Renstra (2011-2016); Profil Kesehatan Malinau 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2010 dan 2012; Lakip Kabupaten Nunukan 2013; Profil Kesehatan 2008 dan 2011
4) Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2009-2013
5) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2013

Penanganan penyakit DBD di Provinis Kalimantan Utara telah terlaksana 100%. Di seluruh kabupaten dan kota sejak tahun 2008 hingga 2013 cakupannya telah 100%. Target SPM adalah 100% di tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap penyakit DBD di Provinsi Kalimantan Utara telah berjalan dengan baik dan dapat dipertahankan hingga sekarang.



Gambar 2.3.23
Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

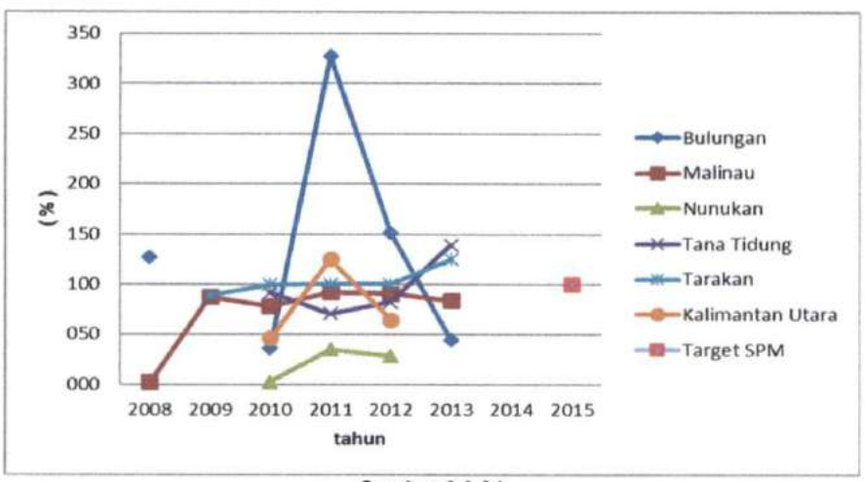
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Tabel 2.3.31
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	126.92	-	36.22	327.26	151.25	44.76
Nunukan	-	-	2.40	35.06	28.23	-
Tarakan	-	88.98	99.69	100.00	100.00	124.78
Malinau	2.05	87.36	78.03	92.21	90.62	83.77
Tana Tidung	-	-	91.77	70.36	82.15	139.42
Prov. Kalimantan Utara	**-**	**-**	**46.06**	**124.88**	**64.28**	**-**

Sumber:
1) *LPPD Kabupaten Bulungan 2008 dan 2010-2013*
2) *LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009 dan 2011-2012; Renstra (2011-2016); Profil Kesehatan Malinau 2013*
3) *LPPD Kabupaten Nunukan 2010*
4) *LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2013;*
5) *Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2009-2013*
6) *Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012*

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, target yang harus dicapai oleh masing-masing kabupaten untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin adalah 100% di tahun 2015. Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi 64,28%, yang berarti masih jauh dari target 100% di tahun 2015. Angka ini turun drastis dari tahun sebelumnya yang bahkan berhasil mencapai 124,88%. Pada tahun 2011 cakupan sempat naik drastis karena dipacu oleh kenaikan yang terjadi di Kabupaten Bulungan hingga mencapai 327,26%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011, jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata pertama di Kabupaten Bulungan berjumlah 110.257 pasien miskin dibanding 33.692 masyarakat miskin, padahal tahun sebelumnya 10.293 pasien miskin dibanding 28.421 masyarakat miskin. Data Bulungan di tahun 2011 tersebut telah dibandingkan dengan data dari profil kesehatan Bulungan 2011 dan website depkes (http://www.spm.depkes.go.id/) hasilnya menunjukkan angka yang sama.



Gambar 2.3.24
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

Tabel 2.3.32
Jumlah Penerima Jaminan Kesehatan dalam Satu Tahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006, 2008, 2011

Kabupaten	Jamkesmas 2006	Akseskin 2008	Jamkesmas/Jamkesda 2010
Bulungan	1.886	9.089	14.998
Malinau	1.922	6.641	22.747
Nunukan	2.185	1.593	9.096
Tana Tidung*	-	809	442
Tarakan	3.321	6.552	54.421
Prov. Kalimantan Utara	**9.314**	**24.684**	**101.704**

Sumber: Potensi Desa 2006, 2008, dan 2011

*Keterangan : *) Tahun 2006 Kabupaten Tana Tidung masih menjadi satu dengan Kabupaten Bulungan*

Tujuan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui Jamkesmas diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran disamping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin pada umumnya.

13. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan kunjungan bayi umur 29 hari - 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas dibanding dengan jumlah kelahiran hidup.

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari - 3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi konseling ASI Ekslusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6-11 bulan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.3.33
Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi di Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2008-2013

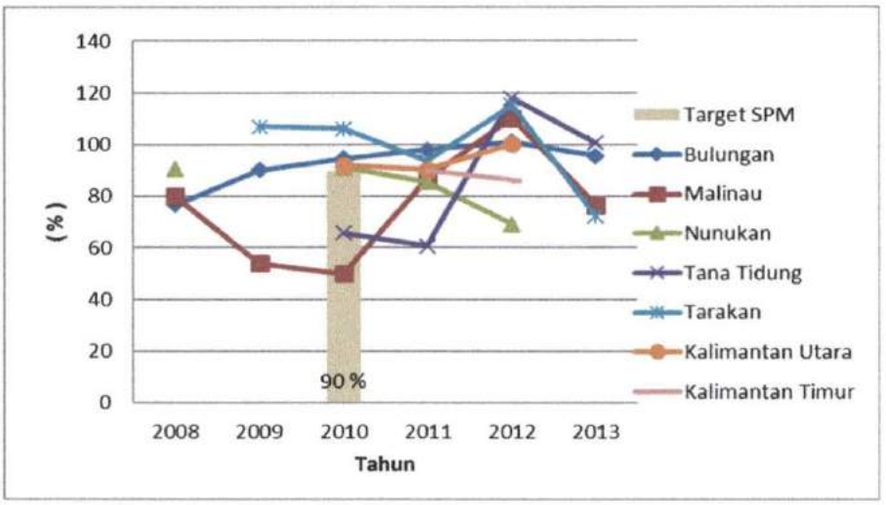
Kabupaten/Kota	Cakupan Kunjungan Bayi					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	76,66	90,08	94,58	98,06	101,00	95,53
Malinau	79,90	54,01	50,00	86,86	110,13	76,59
Nunukan	90,47	n/a	91,23	85,70	69,13	n/a
Tana Tidung	n/a	n/a	65,83	60,72	117,84	100,71
Tarakan	n/a	106,94	106,21	93,52	115,36	72,28
Prov. Kalimantan Utara			**91,85**	**90,37**	**100,20**	**n/a**
Prov. Kalimantan Timur				**89,93**	**86,30**	

Sumber:
1) *LPPD Kabupaten, Profil Kesehatan Kabupaten, Profil Kesehatan Kalimantan Timur*
2) *LPPD Kabupaten Bulungan 2008; Profil Kesehatan Kabupaten Bulungan 2009*
3) *LPPD Kabupaten Malinau 2008-2009; MDG"s Malinau; Profil Kesehatan Malinau 2013*
4) *LPPD Kabupaten Nunukan 2010; Lakip Kabupaten Nunukan 2013; Profil Kesehatan 2008*
5) *LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010 dan 2013*
6) *Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2009-2013*

Data cakupan kunjungan bayi di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari 90.37% di tahun 2011 menjadi 100,20% di tahun 2012. Pada tahun 2011 cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan bila dibandingkan

dengan tahun 2010. Jumlah kunjungan bayi yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2011 sebesar 11.339 bayi, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2010 yang hanya 10.395 bayi, namun cakupan di tahun 2010 mengalami penurunan karena jumlah kelahiran hidupnya meningkat dari 11.317 menjadi 12.547 kelahiran hidup.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota menargetkan cakupan kunjungan bayi mencapai 90% pada tahun 2010. Bila dibandingkan dengan target SPM tersebut, sejak tahun 2010 provinsi ini telah mencapai target, bahkan di tahun 2012 telah melebihi 100%.



Gambar 2.3.25
Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

14. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six)* dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

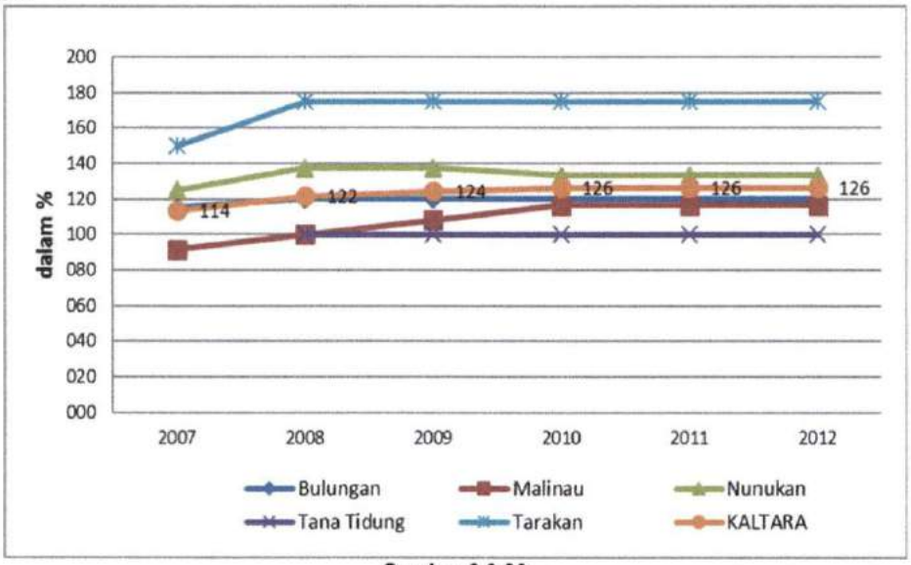
a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
b. Pusat pemberdayaan masyarakat
c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Tabel 2.3.34
Cakupan Puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten /Kota	Cakupan Puskesmas					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	115,38	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Malinau	91,67	100,00	108,33	116,67	116,67	116,67
Nunukan	125,00	137,50	137,50	133,33	133,33	133,33
Tana Tidung	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tarakan	150,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Prov. Kalimantan Utara	**113,51**	**121,62**	**124,32**	**126,32**	**126,32**	**126,32**

Sumber:
1) Kabupaten Dalam Angka 2007-2012
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2007-2012
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2007-2012
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2008-2012
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2007-2012

Indikator cakupan puskesmas digunakan untuk melihat jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada di daerah tersebut. Pada tahun 2012 cakupan puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai lebih dari 100%. Cakupan sebesar 126,32% menunjukkan jumlah puskesmas lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, itu berarti di Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki sedikitnya 1 puskesmas setiap kecamatan.



Gambar 2.3.26
Grafik Cakupan Puskesmas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

15. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

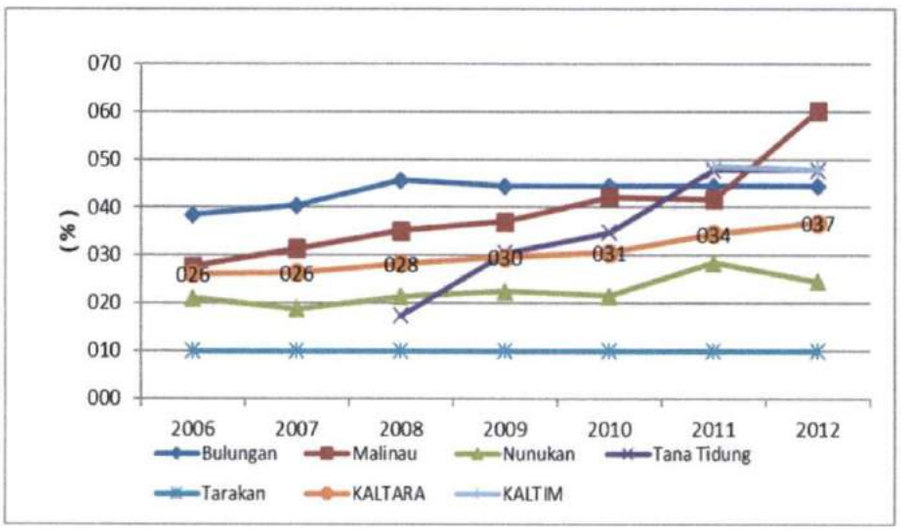
Tabel 2.3.35
Cakupan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006-2012

Kabupaten	Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	38,46	40,38	45,68	44,44	44,44	44,44	44,44
Malinau	27,78	31,48	35,19	37,04	42,20	41,67	60,19
Nunukan	21,08	18,83	21,43	22,47	21,59	28,45	24,57
Tana Tidung			17,39	30,43	34,78	47,83	47,83
Tarakan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Prov. Kalimantan Utara	**26,15**	**26,37**	**28,29**	**29,63**	**30,65**	**34,48**	**36,85**
Prov. Kalimantan Timur	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**48,54**	**47,96**

Sumber:
1) *LPPD Bulungan 2008, 2010,2013; Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2006-2013*
2) *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2006-2013, Rensrta Malinau (2011-2016)*
3) *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2006-2013, Profil Kesehatan Nunukan 2007-2008*
4) *Kabupaten Tana Tidung Dalam angka 2006-2013*
5) *Kota Tarakan Dalam Angka 2006-2013*
6) *Profil Kesehatan Kalimantan Timur 2011-2012*

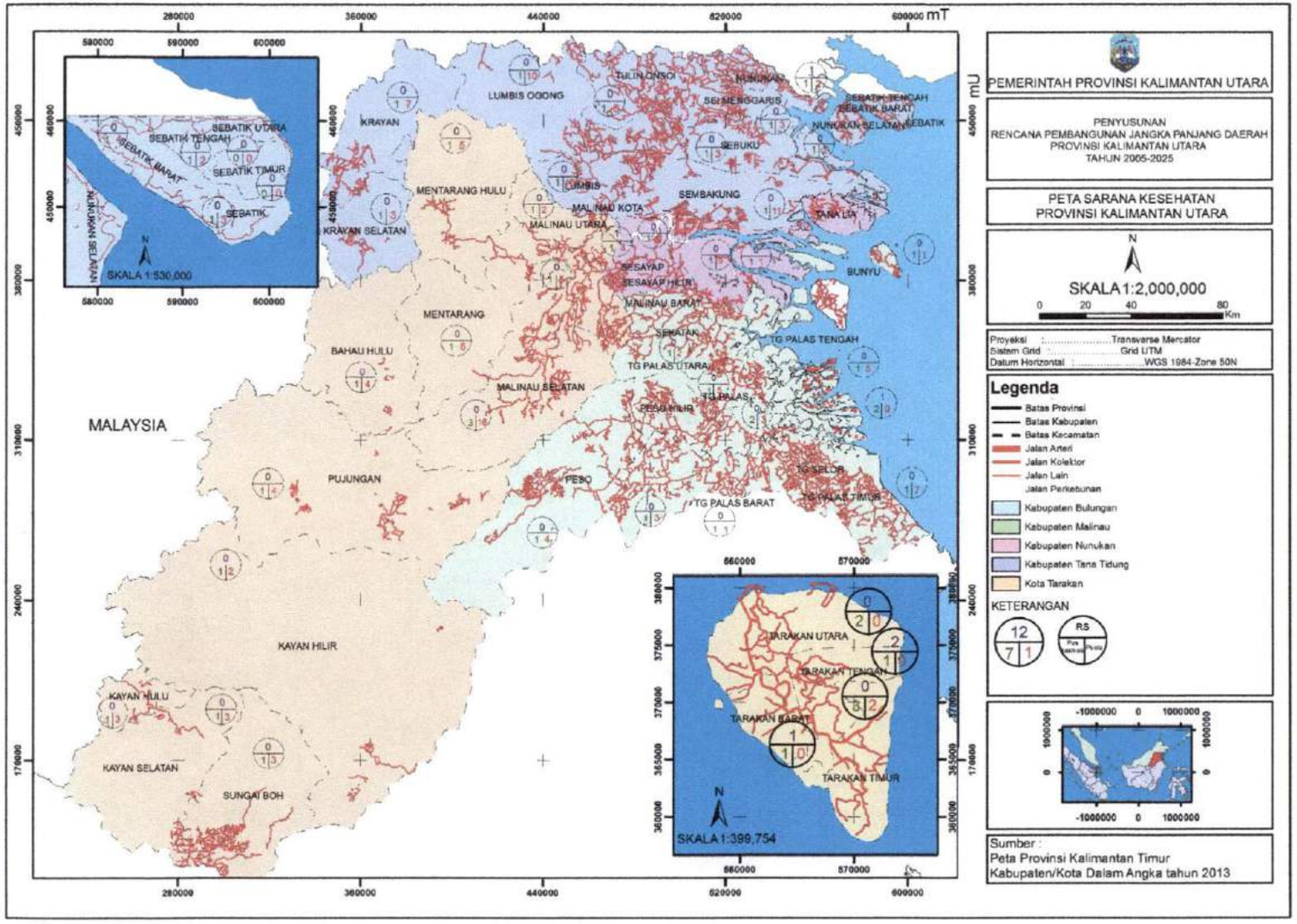
Indikator cakupan puskesmas pembantu menghitung persentase jumlah pustu per desa/kelurahan. Pada tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 171 pustu dan 464 desa sehingga cakupan pustu sebesar 36,85%.

Jika dilihat trend cakupan pustu dari-tahun ke tahun maka dapat disimpulkan bahwa cakupan pustu di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan. Kenaikan cakupan pustu ini menunjukkan adanya pertambahan jumlah pustu di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun-ke tahun.



Gambar 2.3.27
Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan data yang ada jumlah sarana kesehatan per penduduk berada dalam jumlah yang cukup bila dibandingkan dengan Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa rasio per penduduk yang cukup belum tentu ideal apabila tidak tersebar secara merata. Berikut ini merupakan peta persebaran sarana kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas dan pustu yang ada di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012.



Gambar 2.3.28
Peta Persebaran Sarana Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

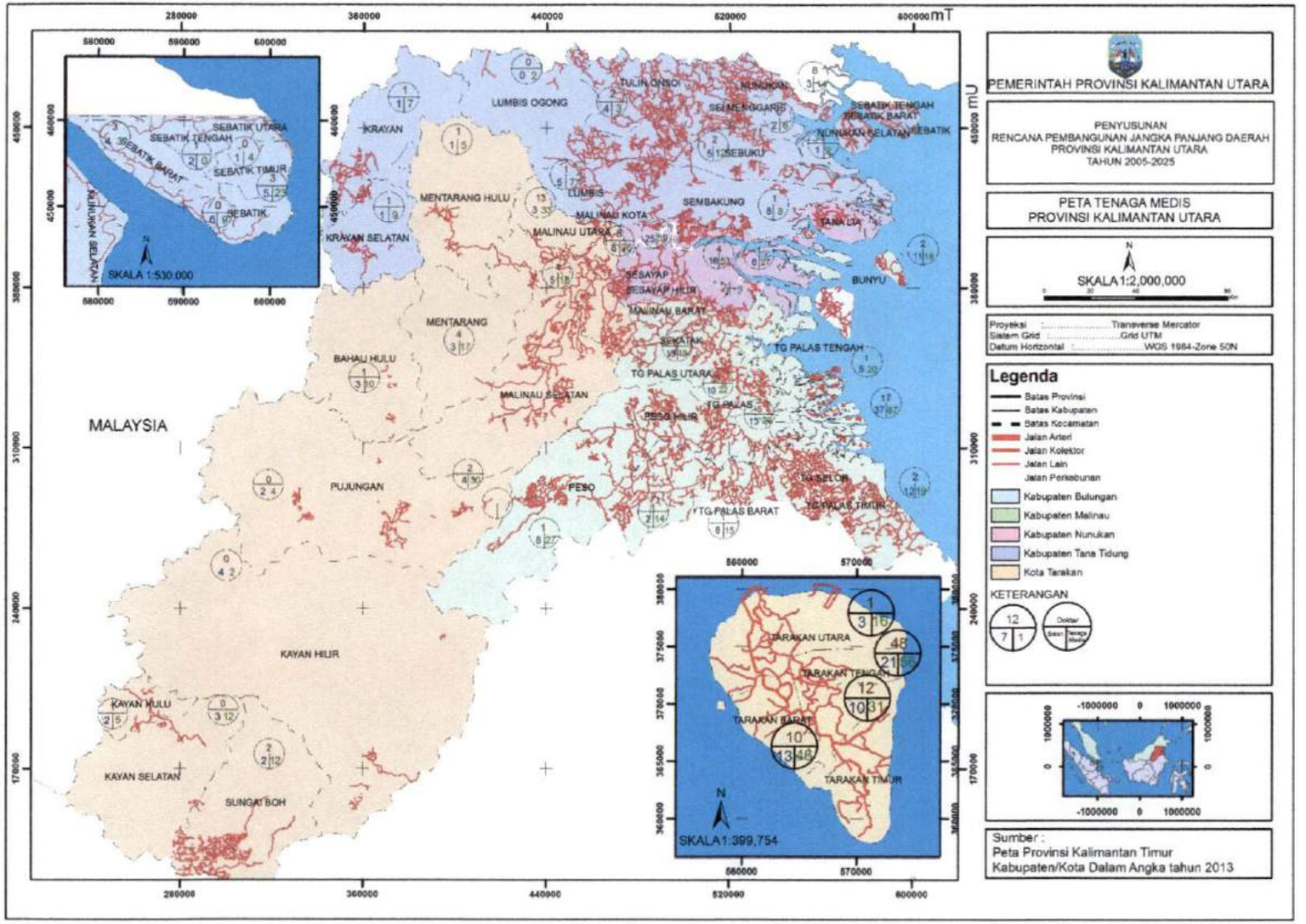
Berdasarkan peta jelas terlihat persebaran rumah sakit sangat tidak merata. Letak rumah sakit hanya berada di bagian utara dan di sekitar jalan arteri atau kolektor saja. Hal tersebut terlihat jelas di Kabupaten Malinau, rumah sakit terletak di Kecamatan Malinau Utara sehingga seluruh kecamatan di belahan selatan tidak tersentuh pelayanan rumah sakit karena rumah sakit di Kabupaten Bulungan juga terletak di Tanjung Selor yang berada di bagian paling timur yang tidak berbatasan dengan Kabupaten Malinau. Kekurangan tersebut telah terbantu dengan adanya puskesmas dan pustu di setiap kecamatan dan desa. Memang rasio puskesmas per penduduk telah jauh di atas rasio Indonesia karena memang jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang tidak terlalu banyak, akan tetapi 1 puskesmas harus melayani 1 kecamatan dengan luas wilayah yang cukup besar juga tidak efektif.

Sehingga meskipun rasio per jumlah penduduk dirasa mencukupi, dilihat dari persebaran di atas sangat belum ideal. Masih perlu pembangunan sarana kesehatan terutama rumah sakit dan puskesmas terpadu di Kabupaten Malinau bagian selatan dan Kabupaten Nunukan bagian barat di mana kedua daerah tersebut adalah daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun, adanya pembangunan harus melihat jumlah penduduk di sekitar, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi geografis di wilayah tersebut. Jika itu tidak terpenuhi maka akan sulit juga juga membangun rumah sakit di tempat itu. Untuk itu peran pustu dan pusling yang harus dikedepankan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga point penting yang ditangkap di sini adalah perbaikan akses ke sarana kesehatan yang ada serta optimalisasi transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.

16. Persebaran Tenaga Kesehatan

Persebaran tenaga kesehatan: dokter (non dokter gigi), bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, belum tersebar secara merata di seluruh kecamatan, berdasarkan data Podes 2011. Dokter hanya terpusat di beberapa kecamatan saja yaitu di Kabupaten Malinau bagian utara, Kecamatan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan, dan Kecamatan Nunukan. Di kecamatan lain rata-rata hanya ada 1-4 dokter. Bahkan ada kecamatan yang tidak ada dokter sama sekali seperti kecamatan di Kabupaten Malinau bagian selatan dan Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan bagian utara di mana kecamatan-kecamatan tersebut langsung berbatasan dengan Malaysia. Seharusnya daerah-darah di perbatasan inilah yang harus menjadi ujung tombak Kalimantan Utara bukan justru yang paling terbelakang.

Begitu juga dengan bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah bidan paling banyak ada di Kabupaten Bulungan yaitu 119 bidan sedangkan di kabupaten lain hanya sekitar 40an bidan. Sementara luas wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Bulungan begitu juga dengan kondisi geografis yang lebih sulit daripada Kabupaten Bulungan. Jadi, tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara masih terpusat di daerah yang bergaris merah (jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lainnya).



Gambar 2.3.29
Peta Persebaran Tenaga Kesehatan Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

17. Keluarga dengan Sumber Air Minum Terlindungi

Keluarga dengan sumber air minum merupakan persentase keluarga yang memanfaatkan sumber air tertentu untuk konsumsi minum sehari-hari dibandingkan dengan jumlah seluruh keluarga yang disurvai. Sedikit berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa yang sudah memanfaatkan PAM atau sumur sendiri, di Pulau Kalimantan sumber air yang digunakan berasal dari banyak sumber baik yang terlindungi maupun tidak terlindungi. Tabel berikut menunjukkan gambaran di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data yang dapat diperoleh.

Tabel 2.3.36
Persentase Keluarga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Disurvai	%									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bulungan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Malinau	7.168	0,35	37,96	n/a	n/a	39,03	n/a	n/a	12,12	6,17	77,34
Nunukan	16.700	0,37	19,50	1,84	1,02	0,29	52,34	4,19	18,51	n/a	31,78
Tana Tidung	6.933	5,51	4,30	n/a	n/a	n/a	56,25	6,99	n/a	13,34	9,81
Tarakan	9.987	50,01	30,50	0,42	7,28	5,28	2,17	n/a	n/a	n/a	95,52

Sumber: Profil Keseahtan Kalimantan Timur 2012

Keterangan : 1 = Air Isi Ulang; 2 = Ledeng Meteran; 3 = Pompa; 4 = Sumur Terlindungi; 5 = Mata Air Terlindungi; 6 = Air Hujan; 7 = Sumur Tak Terlindungi; 8 = Mata Air Tak Terlindungi; 9 = Air Sungai; 10 = Keluarga dengan Sumber Air Terlindungi

Berdasarkan data di atas, Kota Tarakan sudah berada di taraf yang baik yaitu 95% keluarga telah menggunakan sumber air minum terlindungi. Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masih berada di angka yang rendah tidak sampai 50%. Data tersebut sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa masih banyak sekali warga yang mengonsumsi air dari sumber yang tidak terlindungi yang berarti besar kemungkinan ada cemaran mikrobiologi maupun cemaran kimiawi. Berdasarkan Podes 2011 (Tabel 2.3.1.B.29) diperoleh juga data desa yang memanfaatkan sumber air untuk minum dan masak sehari-hari.

Tabel 2.3.37
Sumber Air Untuk Minum/Masak Sebagian Besar Warga di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Sumber Air Untuk Minum/Masak Sebagian Besar Warga							
	Air Kemasan (%)	PAM/PDAM (%)	Pompa Listrik/Tangan (%)	Sumur (%)	Mata Air (%)	Sungai/Danau (%)	Air Hujan (%)	Lainnya (%)
Bulungan	n/a	12,35	n/a	n/a	12,35	33,33	38,27	3,70
Malinau	n/a	9,17	n/a	n/a	39,45	43,12	7,34	0,92
Nunukan	n/a	2,92	n/a	1,25	25,83	36,67	32,92	0,42
Tana Tidung	n/a	4,55	n/a	4,55	4,55	13,64	72,73	n/a
Tarakan	5,00	65,00	n/a	15,00	5,00	0,00	10,00	n/a
Prov. Kalimantan Utara	**0,21**	**8,69**	**n/a**	**1,48**	**24,79**	**34,96**	**28,81**	**1,06**

Sumber Podes 2011

Persentase tersebut menunjukkan banyaknya desa yang mengakses sumber air minum/masak tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada. Sebanyak 65% desa/kelurahan di Kota Tarakan menggunakan sumber air minum/masak berasal dari PAM/PDAM, jumlah ini mendominasi dibandingkan sumber air yang lain. Sedangkan di Kabupaten Malinau, 43% desa di sana menggunakan sungai/danau sebagai sumber air minum/masak, angka itu merupakan presentase paling besar dibandingkan sumber air lainnya di Kabupaten Malinau, begitu juga dengan Kabupaten Nunukan. Sedangkan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan 72,73% dan 38,27% desa di kabupaten tersebut menggunakan air hujan sebagai sumber air minum.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan berkondisi baik dan panjang jalan seluruhnya, di Provinsi Kalimantan Utara. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui tingkat pelayanan

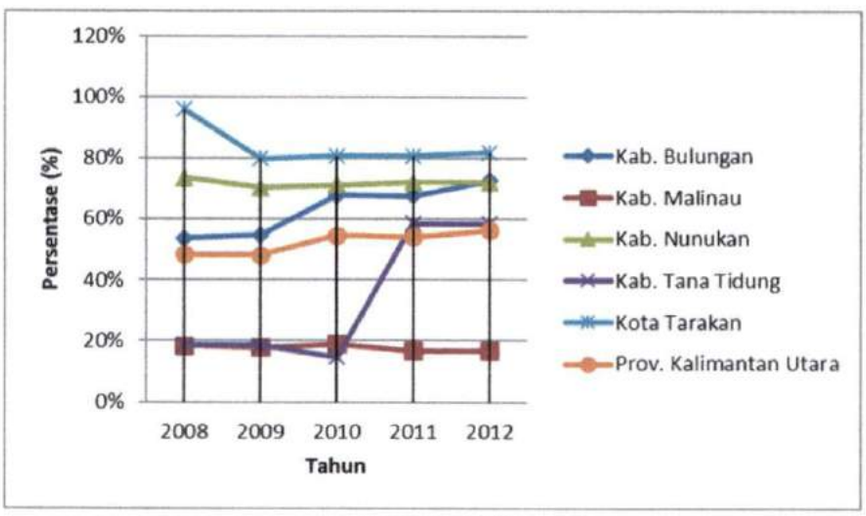
jalan di Provinsi Kalimantan Utara. Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2008-2012 di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.38
Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Per Tahun (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	53,76	54,74	67,80	67,67	72,81
Malinau	18,41	17,91	18,98	16,74	16,74
Nunukan	73,57	70,31	71,27	72,17	72,13
Tana Tidung	18,47	18,47	14,66	58,52	58,52
Tarakan	96,00	80,00	81,00	80,93	82,00
Prov. Kalimantan Utara	**48,49**	**48,16**	**54,76**	**54,28**	**56,42**

Sumber :
1) *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013*
2) *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013*
3) *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013*
5) *Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013*
6) *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013*

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik di Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun tahun 2008-2012 yaitu sebesar 48,49%; 48,16%; 54,76%; 54,28%; 56,42%. Meskipun demikian angka tersebut masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum sebesar 60% (Permen PU No. 14/PRT/M/2010). Peningkatan rasio panjang jalan dalam kondisi baik ini menunjukkan bahwa transportasi darat semakin dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan.



Gambar 2.3.30
Grafik Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

Di beberapa daerah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimum sedangkan di Kabupaten Malinau dan Tana Tidung masih diperlukan peningkatan untuk mencapai standar tersebut. Secara umum kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan raya terus dilakukan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan transportasi darat.

2. Panjang Jalan Dilalui Roda 4

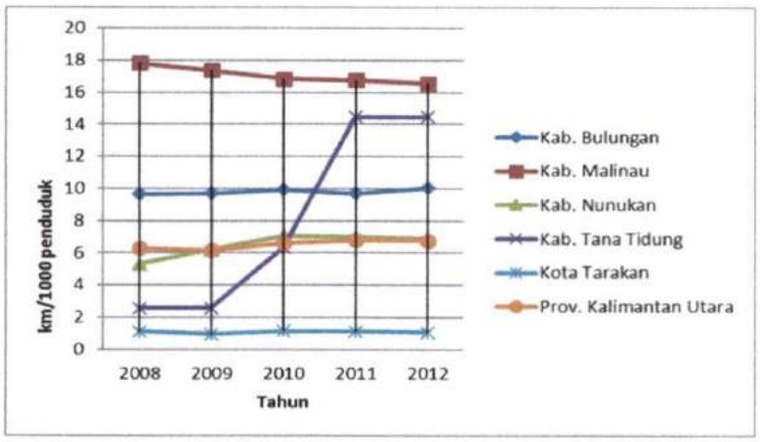
Panjang jalan dilalui roda 4 adalah indikator yang menunjukkan rasio panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melayani per 1.000 penduduk dengan rumus panjang jalan (Km) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Indikator ini dapat menunjukkan tingkat pelayanan jalan per 1.000 penduduk.

Tabel 2.3.39
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (km/1000 penduduk)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	9,64	9,70	9,93	9,70	10,04
Malinau	17,82	17,35	16,84	16,74	16,55
Nunukan	5,30	6,20	7,06	6,98	6,90
Tana Tidung	2,56	2,56	6,34	14,46	14,46
Tarakan	1,13	0,96	1,14	1,10	1,07
Prov. Kalimantan Utara	**6,28**	**6,19**	**6,64**	**6,79**	**6,76**

Sumber :
1) *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013*
2) *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013*
3) *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013*
5) *Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013*
6) *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013*

Dalam kurun tahun 2008-2012 panjang jalan dilalui roda 4 di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 6,28 Km/1.000 penduduk pada tahun 2008 menjadi 6,76 Km/1.000 penduduk pada tahun 2012. Kabupaten/kota terpadat adalah Kota Tarakan dengan 1,07 Km/1.000 penduduk, sedangkan kabupaten/kota terlengang adalah Kabupaten Malinau dengan 16,55 Km/1.000 penduduk. Sama halnya dengan peningkatan rasio jalan dengan kondisi baik, peningkatan indikator ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat semakin membutuhkan transportasi darat untuk mendukung berbagai kegiatan.



Gambar 2.3.31
Grafik Panjang Jalan Dilalui Roda 4 di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalui roda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator panjang jalan dilalui roda 4 di Provinsi Kalimantan Utara masih memenuhi standar pelayanan minimal.

3. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

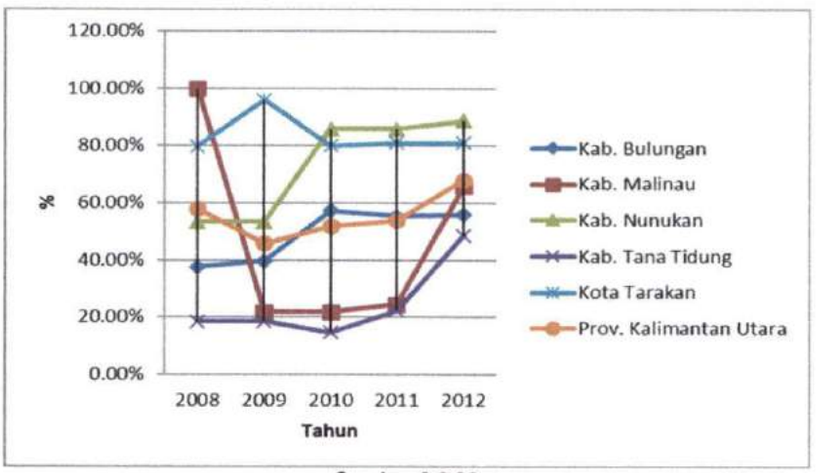
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang menunjukan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedia. Indikator ini dihitung dengan rumus panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.40
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	37,65	39,65	57,14	55,41	55,92
Malinau	99,98	21,77	21,77	24,47	65,95
Nunukan	53,30	53,30	85,86	85,86	88,71
Tana Tidung	18,47	18,47	14,66	22,24	48,69
Tarakan	79,89	96,00	80,00	81,00	81,00
Prov. Kalimantan Utara	**57,86**	**45,84**	**51,89**	**53,80**	**68,05**

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Kabupaten Nunukan adalah kabupaten dengan tingkat pelayanan kondisi jalan kabupaten tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara dengan 88,71% jalan kabupaten berkondisi baik dan sudah mencapai Standar Pelayanan Minimum (60%), sedangkan Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten dengan panjang jalan kabupaten berkondisi baik terendah dan belum mencapai Standar Pelayanan Minimum (60%). Peningkatan indikator ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin membutuhkan transportasi darat untuk mendukung berbagai kegiatan.



Gambar 2.3.32
Grafik Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Mengacu pada Standar Pelayanan Minimum rasio panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 60%, maka kondisi panjang jalan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara sudah menunjukkan kinerja cukup baik (68%) yaitu melampau 60% dan menunjukkan kecenderungan meningkat kinerjanya. Namun demikian kondisi di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan belum menunjukkan kinerja yang baik.

4. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

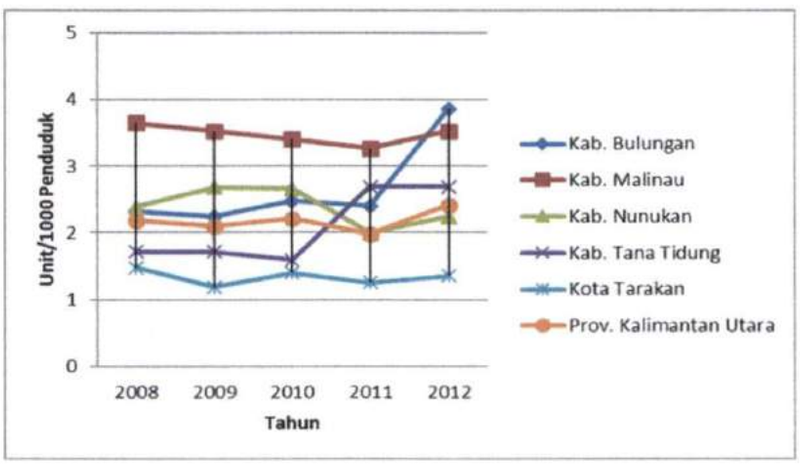
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk menunjukan indikator ketersediaan tempat ibadah bagi penduduk di Provinsi Kalimantan Utara. Rasio tempat ibadah dihitung dari jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000, sehigga dapat menjelaskan rasio ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Jumlah tempat ibadah yang dimaksud adalah jumlah total tempat ibadah yang tersedia, termasuk masjid, langgar, gereja, pura, dan vihara. Rasio tersebut di masing-masing wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.41
Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (unit /1000 penduduk)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	2	2	2	2	4
Malinau	4	4	3	3	4
Nunukan	2	3	3	2	2
Tana Tidung	2	2	2	3	3
Tarakan	1	1	1	1	1
Prov. Kalimantan Utara	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2007-2012
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2007-2012
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2007-2012
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2008-2012
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2007-2012

Masing-masing wilayah kota/kabupaten menunjukkan kecenderungan rasio tempat ibadah meningkat, sementara untuk tingkat provinsi menunjukkan rasio tempat ibadah yang konstan sebesar 2 tempat ibadah per 1000 penduduk. Secara grafis perkembangan rasio tempat ibadah ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.3.33
Grafik Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2010, rasio tempat ibadah di Indonesia adalah 1:812 penduduk, sehingga tempat ibadah di Provinsi Kalimantan Utara lebih dari rata-rata nasional.

5. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber-HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB ini bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari masing-masing

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Keterbatasan data untuk semua kabupaten dan kota menyebabkan perubahan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB selama tahun 2008 hingga tahun 2013 di provinsi ini tidak dapat diketahui. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013 dirinci per kabupaten/kota.

Tabel 2.3.42
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/Kota	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0,02	n/a	0,01	0,22	0,22	0,22
Malinau	n/a	n/a	n/a	0,96	0,96	n/a
Nunukan	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a	n/a
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	n/a	0,25	n/a
Tarakan	n/a	0,27	0,27	0,00	0,00	0,07
Provinsi Kalimantan Utara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2011, 2012
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Catatan : Data Provinsi Kallimantan Utara tidak dapat dijumlahkan, karena data tidak lengkap per kabupaten/kota

Sebagai catatan, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB yang tercantum dalam Lampiran 1 Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan. Sementara sebagian besar luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih berupa kawasan perdesaan.

6. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah dengan membagi jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Berikut adalah data realisasi rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013 dirinci per kabupaten/kota.

Tabel 2.4.43
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	n/a	n/a	0,01	0,01	0,01	0,01
Malinau	0,03	0,06	n/a	0,09	0,13	n/a
Nunukan	n/a	0,10	0,05	n/a	0,03	n/a
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	0,00	0,00	n/a
Tarakan	n/a	0,41	0,94	0,02	0,05	0,07
Provinsi Kalimantan Utara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2011, 2012
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Catatan : Data Provinsi Kallimantan Utara tidak dapat dijumlahkan, karena data tidak lengkap per kabupaten/kota

D. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

RPJPD merupakan dokumen pembangunan yang menggambarkan visi misi daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun. Ketersediaan RPJPD merupakan pedoman bagi SKPD atau pemimpin daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan visi misi yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang. Hampir semua kabupaten/kota

sudah memiliki dokumen RPJPD, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara RPJPD sedang dalam proses penyusunan. Kabupaten Tana Tidung baru memiliki RPJPD di tahun 2011 karena di tahun 2008 baru mengalami pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Tabel di bawah ini menunjukkan ketersediaan dokumen RPJPD yang dirinci kabupaten/kota.

Tabel 2.3.44
Ketersediaan Dokumen RPJPD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen RPJPD				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Malinau	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Nunukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tana Tidung	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Tarakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung2010-2012
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk tahun 2013

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah. Sebagai catatan, Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk tahun 2012, hingga saat ini saat ini belum memiliki dokumen RPJMD karena belum memiliki kepala daerah terpilih. Pemerintahan daerah masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Sementara itu hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki dokumen RPJMD. Kabupaten Tana Tidung baru memiliki RPJMD di tahun 2011 karena di tahun 2008 baru mengalami pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Tabel di bawah ini menunjukkan ketersediaan dokumen RPJMD yang dirinci kabupaten/kota.

Tabel 2.3.45
Ketersediaan Dokumen RPJMD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen RPJMD				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Malinau	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Nunukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tana Tidung	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
Tarakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	-	-

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2012
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk tahun 2013

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) merupakan dokumen pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah tiap tahun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD dan RAPBD. Pembuatan RKPD harus berpedoman kepada RPJPD

dan RPJMD agar program pembangunan berkesinambungan untuk mencapai visi misi daerah. Hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki dokumen RKPD, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara RKPD sedang dalam proses pembuatan. Kabupaten Tana Tidung baru memiliki RKPD di tahun 2011 karena di tahun 2008 baru mengalami pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Tabel di bawah ini menunjukkan ketersediaan dokumen RKPD yang dirinci kabupaten/kota.

Tabel 2.3.46
Ketersediaan Dokumen RKPD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen RKPD				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Malinau	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Nunukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tana Tidung	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
Tarakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	-	-

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2012
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk tahun 2012

4. Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

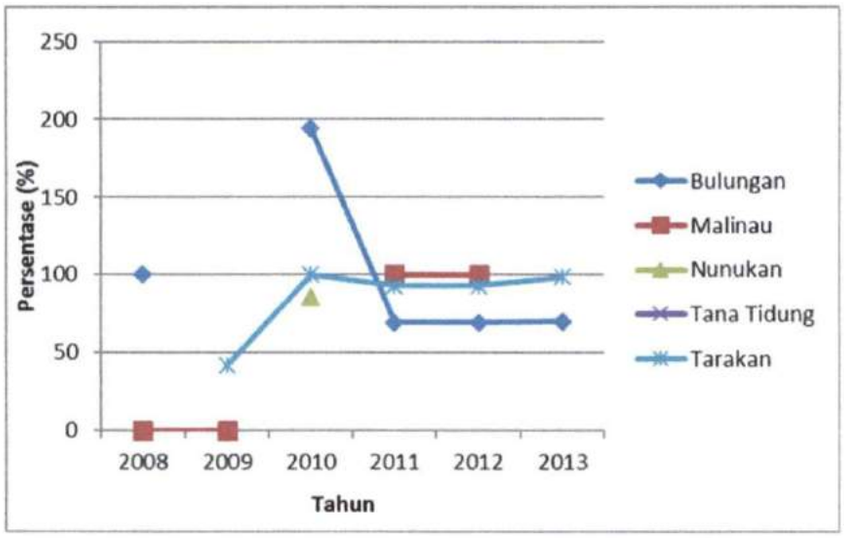
Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail (dalam bentuk program) visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dirinci kabupaten/kota.

Tabel 2.3.47
Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	100,00		194,24	69,23	69,23	69,96
Malinau	0,00	0,00		100,00	100,00	
Nunukan			86,00			
Tana Tidung						
Tarakan		41,44	100	92,82	92,82	98,32

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2012
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

Tabel di atas memperlihatkan bahwa data tentang penjabaran program belum terlalu lengkap, Kabupaten Tana Tidung sebagai DOB belum mempunyai data tentang indikator ini. Kota Tarakan menunjukkan perkembangan kinerja penjabaran program yang relatif fluktuatif, di tahun 2009 persentasenya hanya 41,44% akan tetapi naik menjadi 100 % di tahun 2010 dan menurun kembali di tahun 2011 dan 2012. Sementara penjabaran program di Kabupaten Malinau selama tahun 2011 dan 2012 mencapai 100%. Penurunan persentase dialami oleh Kabupaten Bulungan, di tahun 2010 mencapai di atas 100% akan tetapi selama tahun 2011-2013 menurun di kisaran angka 69%. Hal ini harus menjadi perhatian agar RKPD dapat sejalan dengan tahapan RPJMD sehingga visi misi daerah dapat tercapai. Gambar di bawah ini menunjukkan persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dirinci kabupaten/kota.



Gambar 2.3.34
Grafik Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2008-2012
Sumber :Hasil Analisis, 2014

E. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

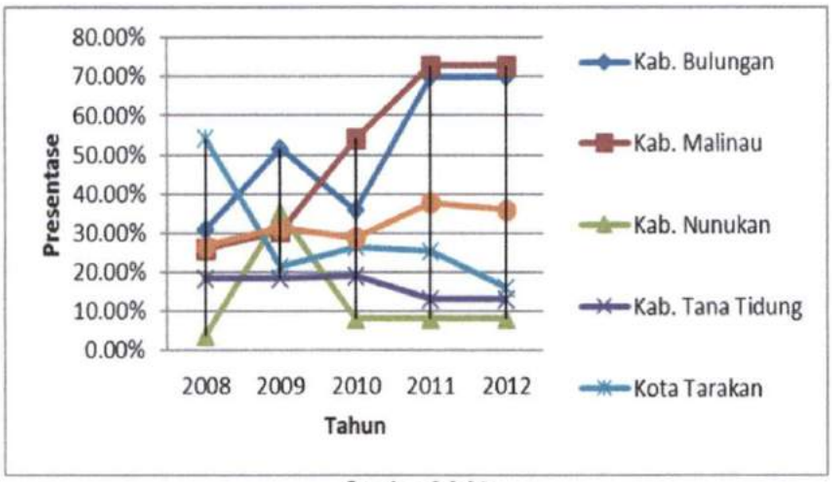
Rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan indikator jumlah rumah tangga penguna air bersih di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.48
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Pengguna air bersih (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	30,88	51,61	35,91	70,00	70,00
Malinau	26,11	30,56	54,14	72,78	72,78
Nunukan	3,70	35,17	8,12	8,12	8,12
Tana Tidung	18,45	18,45	19,14	13,11	13,11
Tarakan	54,18	21,34	26,62	25,42	16,09
Prov. Kalimantan Utara	**26,66**	**31,42**	**28,79**	**37,89**	**36,02**

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau menjadi kabupaten dengan jumlah rumah tangga pengguna air bersih tertinggi, yaitu sebesar 70% dan 72,78% pada tahun 2012 dibandingkan dengan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sedangkan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana tidung dan Kota Tarakan persentase rumah tangga pengguna air bersih masih di bawah 20%.



Gambar 2.3.35
Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal penduduk terlayani akses air bersih adalah 55-75%, dari ke 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau yang memenuhi standar. Sedangkan Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masih belum memenuhi standar sehingga perlu peningkatan.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

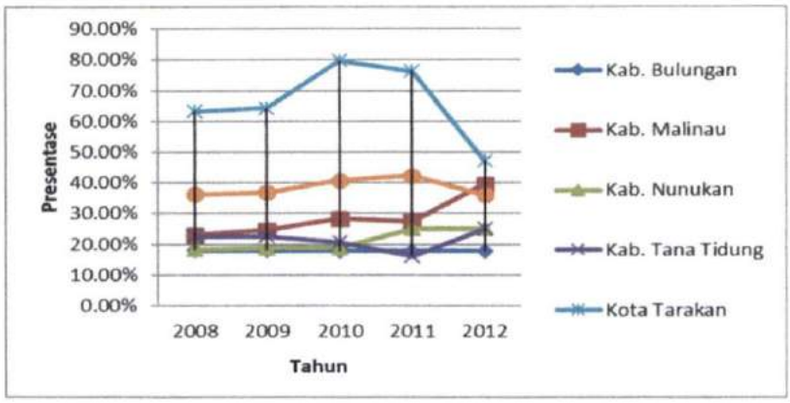
Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga.

Tabel 2.3.49
Rumah Tangga Pengguna Listrik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	17,95	17,95	17,75	17,75	17,75
Malinau	23,08	24,64	28,38	27,39	39,45
Nunukan	18,16	18,63	18,76	25,02	25,02
Tana Tidung	22,54	22,54	20,66	15,99	25,04
Tarakan	63,28	64,31	79,67	76,33	47,10
Prov. Kalimantan Utara	**36,29**	**36,93**	**40,67**	**42,36**	**35,88**

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Pada tahun 2011 persentase rumah tangga pengguna listrik dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 42,36% sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi 35,88%. Kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga pengguna listrik tertinggi adalah Kota Tarakan 47,10%, disusul kemudian Kabupaten Malinau 39,45%. Persentase rumah tangga pengguna listrik dapat dilihat pada Gambar 2.3.1.D.2 berikut.



Gambar 2.3.36
Grafik Rumah Tangga Pengguna Listrik di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini mencapai 80,54% dan ditargetkan pemerintah akan mencapai 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara yang pada tahun 2012 hanya mencapai 35,88% masih perlu peningkatan elektrifikasi atau perluasan jaringan listrik sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah pelosok.

3. Persentase Listrik Terjual

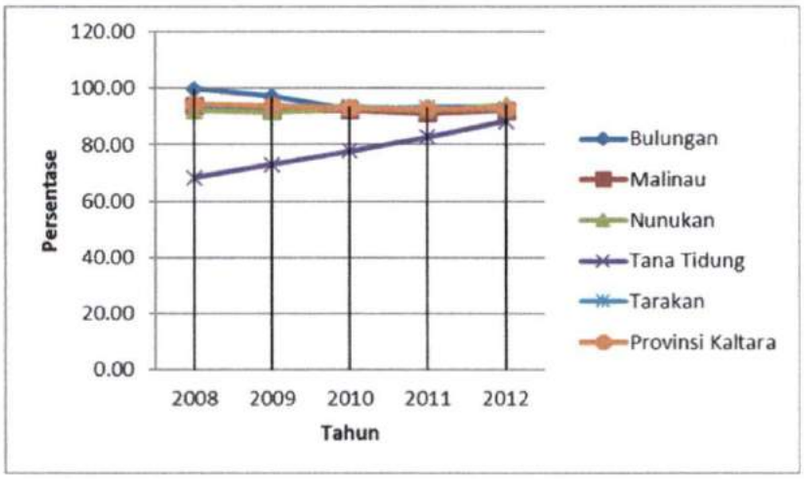
Persentase listrik terjual adalah indikator yang menunjukkan tingkat penjualan listrik di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah listrik terjual dibagi dengan jumlah produksi listrik. Persentase listrik terjual dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.50
Persentase Listrik Terjual di Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Persentase Listrik Terjual (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	99,88	97,11	92,77	93,27	93,32
Malinau	93,99	92,03	92,38	91,25	92,14
Nunukan	92,15	91,49	93,10	92,32	94,31
Tana Tidung	68,42	72,93	77,73	82,85	88,30
Tarakan	93,90	93,90	93,49	93,08	92,68
Prov. Kalimantan Utara	94,46	93,82	93,18	92,78	92,94

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Persentase listrik terjual terhadap produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara relatif menurun. Hal ini justru menunjukkan bahwa produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara naik lebih pesat dibandingkan dengan jumlah penjualannya. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat menggunakan diesel sebagai pembangkit tenaga listrik, karena akses listrik dari penjual listrik sendiri belum mampu menjangkau daerah-daerah tersebut. Meskipun begitu, persentase listrik terjual terhadap produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 92,94%. Hal ini berarti bahwa 92,94% dari listrik yang diproduksi, terjual ke masyarakat.



Gambar 2.3.37
Grafik Persentase Listrik Terjual di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Hasil Analisis 2014

4. Rumah Tangga Bersanitasi

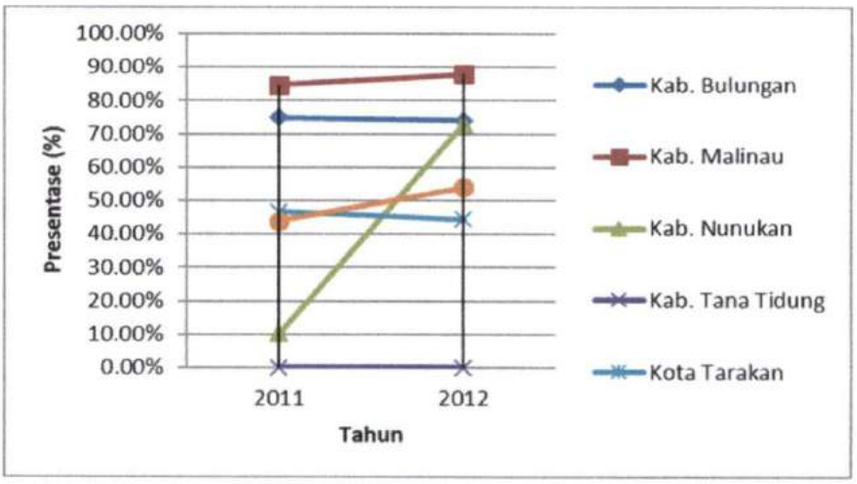
Rumah tangga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur jumlah rumah tangga bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.51
Rumah Tangga Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Bersanitasi (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				75,00	74,06
Malinau	3,36	3,58		84,67	87,92
Nunukan			10,23	10,23	72,97
Tana Tidung			0,00	0,00	0,00
Tarakan			3,16	46,63	44,43
Prov. Kalimantan Utara				**43,85**	**54,09**

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013
2) LPPD Kabupaten Malinau 2009-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013
4) LPPDKabupaten Tana Tidung 2009-2013
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

Pada tahun 2011 dan 2012 persentase rumah tangga bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 43,85% dan naik menjadi 54,09% pada tahun 2012. Kabupaten dengan jumlah rumah tangga bersanitasi tertinggi adalah Kabupaten Malinau 87,92% disusul kemudian Kabupaten Bulungan 74,06%.



Gambar 2.3.38
Grafik Rumah Tangga Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal tingkat penyediaan sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk perkotaan adalah 80% , sehingga di tahun 2012 hanya Kabupaten Malinau yang memenuhi persyaratan yaitu 87,92%, sedangkan untuk empat kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Utara belum memenuhi persyaratan dan diperlukan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah peduli terhadap kebersihan pemukiman tempat tinggal mereka.

5. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

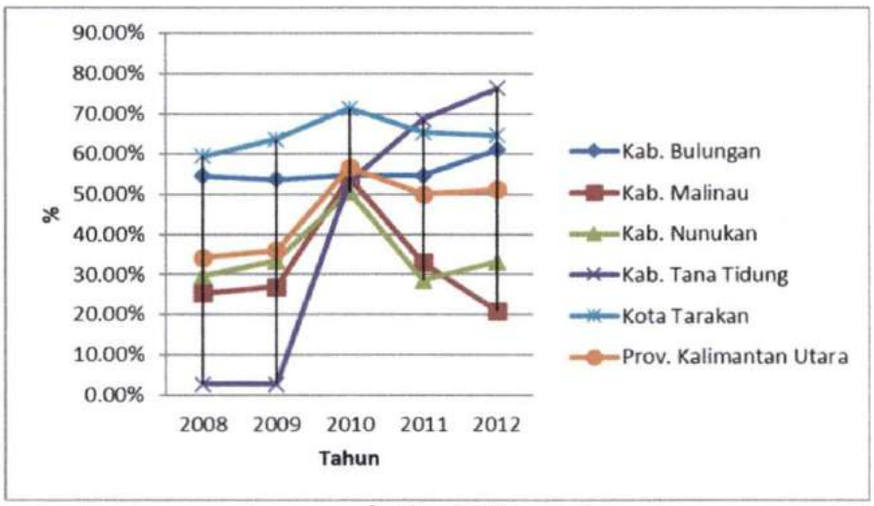
Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah indikator yang menunjukan banyaknya rumah tinggal di Provinsi Kalimantan Utara yang telah menggunakan sanitasi layak. Persentase tersebut dihitung dari jumlah rumah tinggal yang telah bersanitasi layak dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah yang ada di kabupaten, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.52
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	54,55	53,76	54,70	54,72	61,10
Malinau	25,47	26,89	54,18	33,03	20,86
Nunukan	29,58	33,50	50,56	28,50	33,18
Tana Tidung	2,60	2,60	53,15	68,55	76,39
Tarakan	59,42	63,69	71,37	65,31	64,59
Prov. Kalimantan Utara	**34,32**	**36,09**	**56,79**	**50,02**	**51,22**

Sumber: Database Pembangunan Kalimantan Timur 2013

Secara umum, pada tingkatan provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat, demikian juga pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa perlu akan kebutuhan sanitasi. Sedangkan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan memiliki tren yang cenderung turun. Fluktuasi perkembangan persentase rumah tinggal bersanitasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3.39
Grafik Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal tingkat penyediaan sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk perkotaan adalah 80%, sehingga pada tahun 2012 baik tingkat kabupaten maupun Provinsi Kalimantan Utara belum memenuhi persyaratan sehingga perlu diadakan peningkatan penyediaan sarana sanitasi.

6. Lingkungan Pemukiman Kumuh

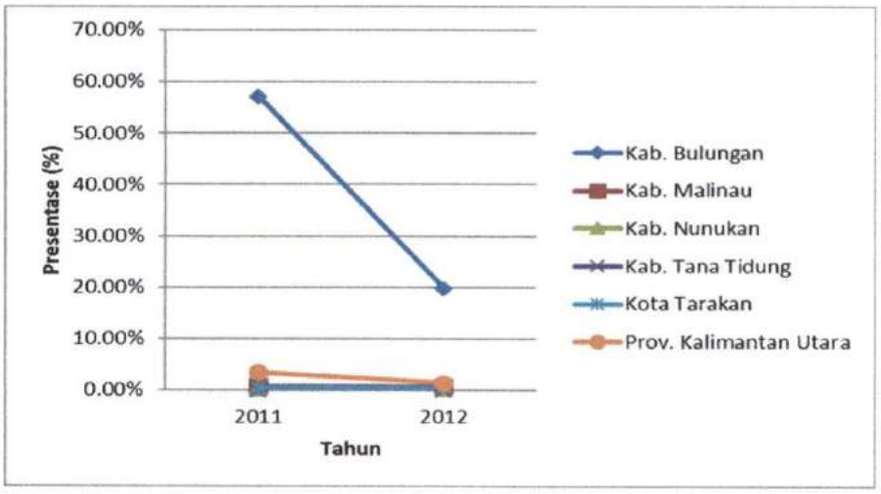
Lingkungan pemukiman kumuh merupakan indikator yang menunjukkan persentase luas wilayah pemukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus luas pemukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.53
Lingkungan Pemukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				57,21	19,82
Malinau	0,00	0,00		0,70	0,70
Nunukan			0,10	0,10	0,10
Tana Tidung			0,00	0,00	0,00
Tarakan		4,74	0,02	0,40	0,40
Provinsi Kalimantan Utara				**3,49**	1,37

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013
4) LPPDKabupaten Tana Tidung 2009-2013
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

Pada tahun 2011 lingkungan pemukiman kumuh Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 3,49% dari seluruh total wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Lingkungan pemukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah peduli terhadap kebersihan dan mulai menjaga lingkungan pemukiman mereka.



Gambar 2.3.40
Grafik Lingkungan Pemukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber : Analisis Data 2014

Berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Standar Penanganan Pemukiman Kumuh adalah 10% pada tahun 2019 sehingga untuk Kabupaten Bulungan perlu peningkatan penanganan pemukiman kumuh, sedangkan untuk 4 kabupaten/kota lain dan Provinsi Kalimantan Utara sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimum.

7. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah indikator yang menunjukkan jumlah rumah layak huni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah rumah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

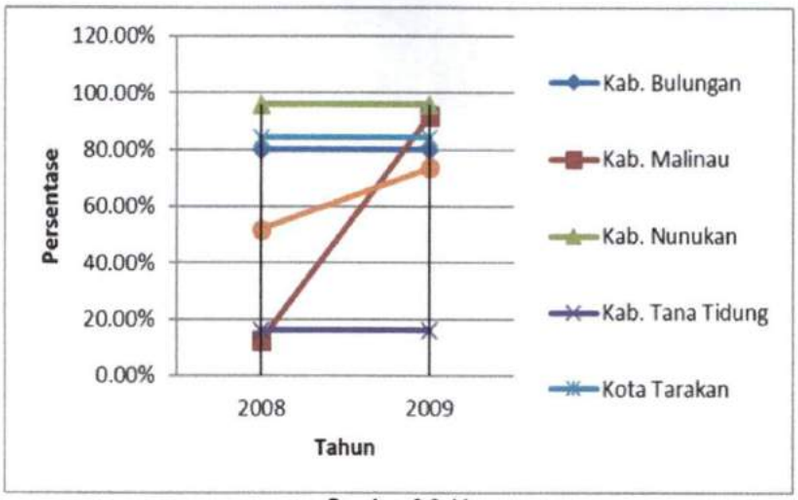
Tabel 2.3.54
Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rumah Layak Huni (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				80,00	80,00
Malinau	44,71	45,18		12,54	92,16
Nunukan			95,96	95,96	95,96
Tana Tidung			0,00	16,09	16,09
Tarakan			79,02	84,43	84,43
Prov. Kalimantan Utara				**51,99**	73,72

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013
4) LPPDKabupaten Tana Tidung 2009-2013
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

*Keterangan : *merupakan angka perkiraan*

Pada tahun 2011 persentase rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 51,99%, persentase rumah layak huni tertinggi berada di Kabupaten Nunukan dengan 95,96%. Sehingga persentase rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren yang relatif meningkat.



Gambar 2.3.41
Grafik Rumah Layak Huni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015. Target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar 80% (Departemen Kesehatan RI, 2003). Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010, persentase rumah sehat secara nasional sekitar 24,9%, sehingga presentase rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara (73,72%) masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase rumah layak huni di Indonesia dan hampir mencapai target MDG's (80%).

8. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah indikator yang menunjukan ketersediaan rumah layak huni di kabupaten. Indikator tersebut dihitung dengan rumus jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000, sehingga dapat diketahui ketersediaan rumah layak huni per 1.000 penduduk.

Tabel 2.3.55
Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rasio Rumah Layak Huni (unit/1000 penduduk)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				183	183
Malinau	91	90		150	152
Nunukan			158	144	145
Tana Tidung			0	24	24
Tarakan			181	183	185
Prov. Kalimantan Utara				**163**	**164**

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013
4) LPPDKabupaten Tana Tidung 2009-2013
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

Pada tahun 2011 rasio rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 163 rumah/1.000 penduduk. Kabupaten dengan ketersediaan rumah layak huni terkecil adalah Kabupaten Tana Tidung dengan 24 rumah layak huni/1.000 penduduk. Apabila rata-rata anggota keluarga lima orang, maka diperlukan 200 rumah layak huni untuk memenuhi 1.000 orang penduduk, sehingga jumlah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara perlu ditingkatkan.

Berdasarkan target *Millenium Development Goals* (MDG's) tahun 2015. Target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar 80% (Departemen Kesehatan RI, 2003) atau sebesar 160 rumah/1.000 penduduk.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010, persentase rumah sehat secara nasional sekitar 24,9% atau 50 rumah/1000 penduduk.

9. Data Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Tidak Mampu

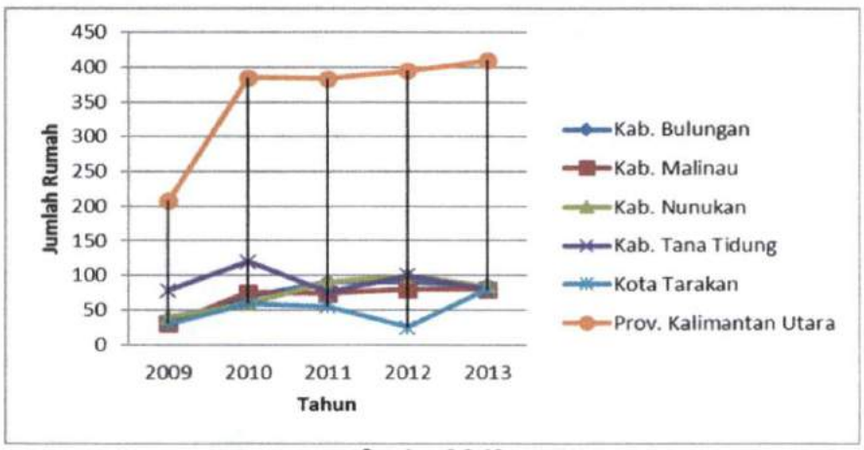
Berikut adalah data bantuan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2009-2013. Indikator ini dapat menginformasikan penambahan jumlah bantuan rumah layak huni per tahun menurut kabupaten.

Tabel 2.3.56
Data Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Data Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Tidak Mampu (unit)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	30	70	90	90	85
Malinau	30	75	74	80	80
Nunukan	40	60	90	100	85
Tana Tidung	78	120	75	100	80
Tarakan	30	60	55	25	80
Prov. Kalimantan Utara	**208**	**385**	**384**	**395**	**410**

Sumber: Database Pembangunan Kalimantan Timur 2013

Jumlah bantuan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah turut mendukung banyaknya masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehingga dapat mendukung berbagai macam kegiatan keluarga.



Gambar 2.3.42
Grafik Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

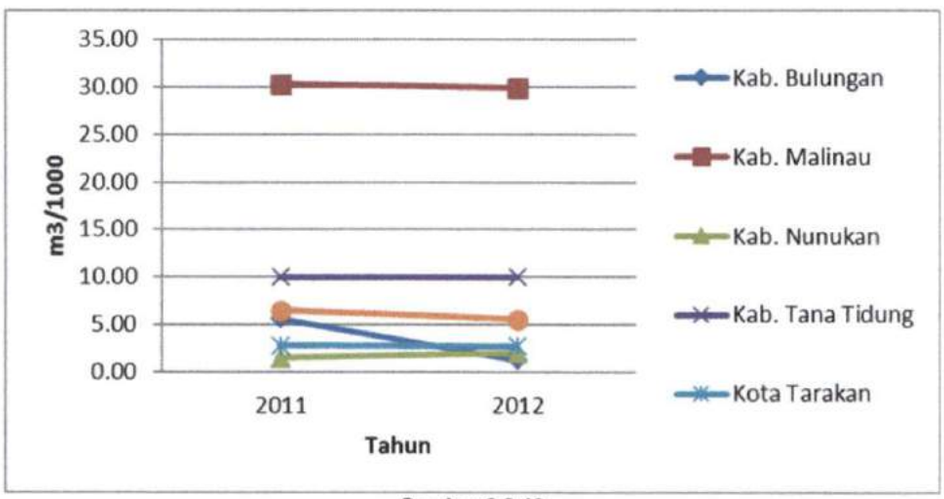
10. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah indikator ketersediaan volume tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Indikator tersebut didapatkan dari rumus volume tempat pembuangan sampah dibagi jumlah penduduk dikali 1.000, sehingga indikator tersebut dapat menunjukkan ketersediaan tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk. Pada tahun 2012 rasio tempat pembuangan sampah di Provinsi Kalimantan Utara adalah 5,55 m^3 per 1.000 penduduk. Kabupaten dengan jumlah tempat pembuangan sampah yang paling memadai jika dibandingkan dengan empat kabupaten yang lainnya adalah Kabupaten Malinau, yang menyediakan 29,92 m^3 tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan tempat tinggal.

Tabel 2.3.57
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk (m^3/1000 penduduk)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				5,64	1,24
Malinau	1,15	1,81		30,28	29,92
Nunukan			1,58	1,45	1,95
Tana Tidung				9,95	9,95
Tarakan		0,02	2,95	2,79	2,71
Prov. Kalimantan Utara				**6,48**	**5,55**

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013
4) LPPDKabupaten Tana Tidung 2009-2013
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013



Gambar 2.3.43
Grafik Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan kajian keandalan pola penanggulangan sampah padat studi kasus pada Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, rata-rata produksi sampah di kota kecil per orang per hari adalah 0,0025 m^3/orang/hari atau sama dengan 2,5 m^3/1000 orang/hari. Terdapat 3 kabupaten yang memiliki tempat penampungan sampah yang memadai yaitu Kabupaten Malinau (29,92 m^3), Kabupaten Tana Tidung (9,95 m^3), dan Kota Tarakan (2,71 m^3). Sedangkan Kabupaten Bulungan dan Nunukan belum memiliki tempat pembuangan yang memadai.

11. Persentase Penanganan Sampah

Persentase penanganan sampah merupakan indikator untuk mengukur rasio volume sampah yang tertangani di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus volume sampah tertangani dibagi dengan volume produksi sampah. Pada tahun 2012 volume sampah yang ditangani sebesar 58,42% dibandingkan dengan volume produksi sampah, kabupaten dengan penanganan sampah terbaik di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Malinau dengan 94,53% produksi sampah tertangani, disusul kemudian Kabupaten Tana Tidung dengan 91,7% produksi sampah tertangani.

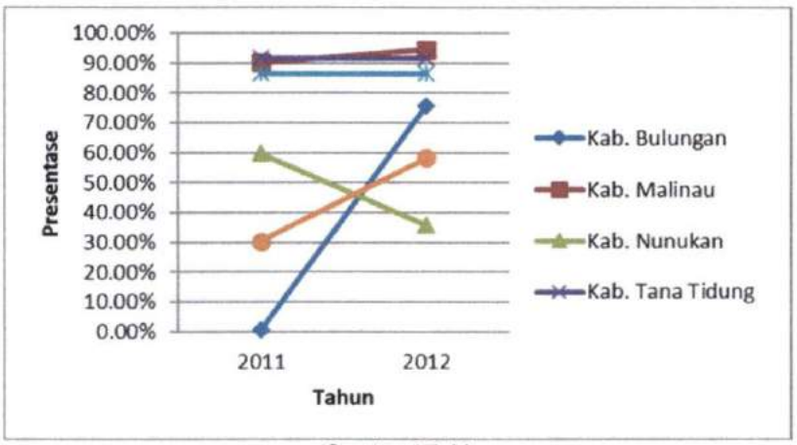
Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal tingkat penanganan sampah adalah 80%, sehingga ada 3 kabupaten/kota di Provinsi

Kalimantan Utara yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal, yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sedangkan untuk Kabupaten Bulungan dan Nunukan serta Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan, masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan perlu peningkatan penanganan sampah.

Tabel 2.3.58
Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sampah Provinsi Kalimantan Utara (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				0,52	75,81
Malinau	50,00	95,24		90,23	94,53
Nunukan			59,77	59,77	35,79
Tana Tidung				91,70	91,70
Tarakan		86,18	83,16	86,49	86,49
Prov. Kalimantan Utara				30,29	**58,42**

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013
4) LPPDKabupaten Tana Tidung 2009-2013
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013



Gambar 2.3.44
Grafik Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

12. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

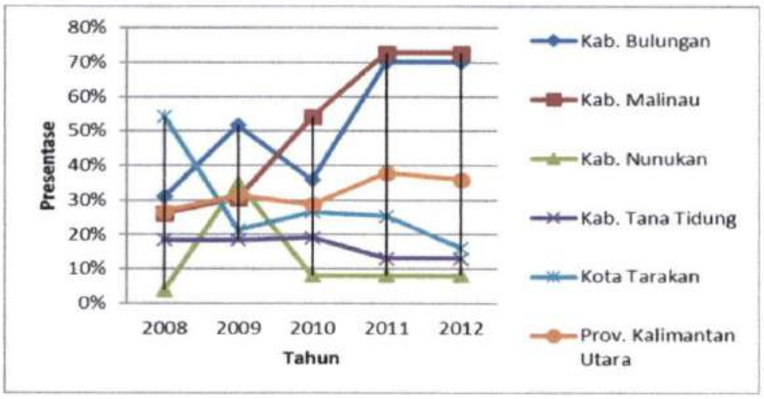
Persentase penduduk berakses air minum merupakan indikator untuk mengukur tingkat penduduk yang berakses air minum. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah penduduk berakses air minum, dibagi dengan jumlah seluruh penduduk di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.59
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Pengguna air bersih (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	30,88	51,61	35,91	70,00	70,00
Malinau	26,11	30,56	54,14	72,78	72,78
Nunukan	3,70	35,17	8,12	8,12	8,12
Tana Tidung	18,45	18,45	19,14	13,11	13,11
Tarakan	54,18	21,34	26,62	25,42	16,09
Prov. Kalimantan Utara	**26,66**	**31,42**	**28,79**	**37,89**	**36,02**

Sumber: Database Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2013

Pada tahun 2012 persentase penduduk berakses air minum tertinggi berada pada Kabupaten Malinau dengan 72,78% disusul kemudian Kabupaten Bulungan dengan 70% penduduk berakses air minum. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren positif dalam kurun 2008-2012 dalam hal akses air minum.



Gambar 2.3.45
Grafik Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Analisis Data 2014

Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal penduduk terlayani akses air minum adalah 55-75%, dari ke 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau yang memenuhi standar. Sedangkan Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masih belum memenuhi standar sehingga perlu peningkatan.

13. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

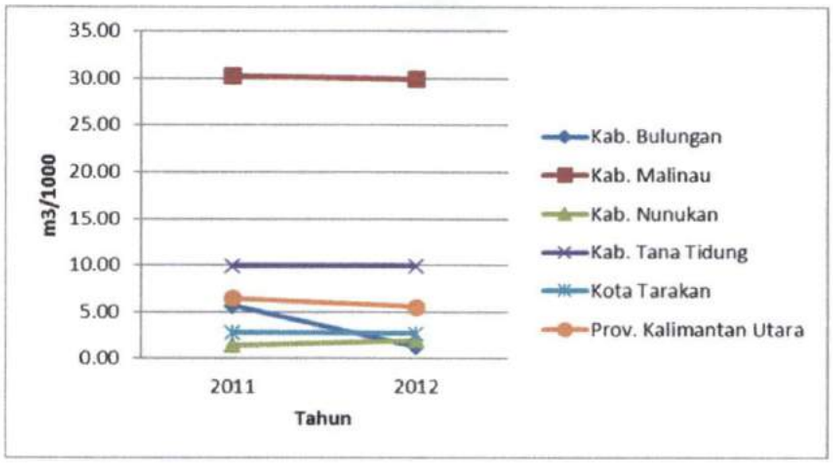
Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan ketersediaan tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah tempat penampungan sampah dibagi jumlah penduduk dikali 1.000.

Tabel 2.3.60
Tempat Pembuangan Sampah Per 1000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk (m^3/1000 penduduk)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				5,64	1,24
Malinau	1,68	2,86		30,28	29,92
Nunukan			2,21	1,45	1,95
Tana Tidung				9,95	9,95
Tarakan		0,02	2,95	2,79	2,71
Prov. Kalimantan Utara				6,48	**5,55**

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013
2) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013
4) LPPDKabupaten Tana Tidung 2009-2013
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

Pada tahun 2012 jumlah tampungan sampah per 1000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 5,55 m^3/1000 penduduk. Kabupaten dengan tingkat penyediaan tempat pembuangan sampah tertinggi adalah Kabupaten Malinau dengan 29,92 m^3/1000 penduduk.



Gambar 2.3.46
Grafik Tempat Pembuangan Sampah Per satuan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan kajian keandalan pola penanggulangan sampah padat studi kasus pada Kota Balikpapan - Kalimantan Timur, rata-rata produksi sampah di kota kecil per orang per hari adalah 0,0025 m^3/orang/hari atau sama dengan 2,5 m^3/1000 orang/hari. Sehingga terdapat 3 kabupaten yang memiliki tempat penampungan sampah yang memadai yaitu Kabupaten Malinau (29,92 m^3), Kabupaten Tana Tidung (9,95 m^3), dan Kota Tarakan (2,71 m^3). Sedangkan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan belum memiliki tempat pembuangan yang memadai.

F. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Pada indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan rasio jumlah polisi pamong praja dibandingkan 10.000 penduduk. Informasi yang tersedia terlihat bahwa ada perkembangan kenaikan jumlah polisi pamong praja di setiap kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan memiliki jumlah polisi pamong praja terbanyak. Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah paling sedikit daripada kabupaten/kota lainnya. Informasi di Kabupaten Bulungan belum dapat digambarkan karena minimnya informasi yang tersedia.

Tabel 2.3.61
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/ Kota	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan						
Malinau	120	120	120	175	175	175
Nunukan			186	186		
Tana Tidung			76	87	88	
Tarakan	78	123	191	185	186	183
Prov. Kalimantan Utara						

Sumber:
1) Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2011
2) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2011, 2012, 2013
3) Rencana strategis Satpol PP Kabupaten Malinau Tahun 2011
4) Lakip Kantor Satpol PP Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
5) Kantor Satpol PP Kota Tarakan Tahun 2014

Keterangan: Jumlah rasio polisi pamong praja di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun.

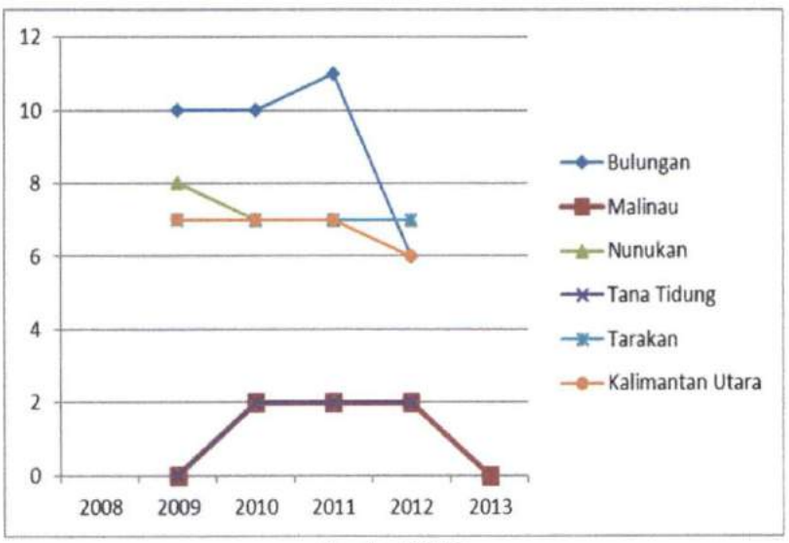
2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk

Indikator jumlah linmas untuk melihat potensi perbandingan penjamin keamanan sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan informasi yang ada menunjukkan bahwa sudah adanya sejumlah linmas pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau memiliki perkembangan angka yang cukup stabil. Kabupaten Bulungan memilikit kecenderungan menurun. Dari informasi yang tersedia menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kalimantan Utara jumlah linmas memiliki kecenderungan yang sama pada rangkaian pertahun.

Tabel 2.3.62
Jumlah Linmas per 1000 Penduduk Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Linmas per 1000 penduduk					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan		10	10	11	6	
Malinau		0	2	2	2	
Nunukan		8	7	7	7	
Tana Tidung		0	2	2	2	
Tarakan		7	7	7	7	
Prov. Kalimantan Utara		7	7	7	6	

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2009, 2012
2) Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2009, 2012
3) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2013
4) Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2013
5) Database Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2012
6) Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun 2014



Gambar 2.3.47
Grafik Jumlah Linmas per 1000 penduduk Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis 2014

3. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling digunakan untuk melihat perkembangan sejumlah pusat pengamanan sosial masyarakat. Pada penjelasan indikator rasio pos siskamling baru tersedia data Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau memiliki kecenderungan kenaikan jumlah pos siskamling, yakni 325 unit pos siskamling pada tahun 2011 meningkat menjadi 425 unit pos siskamling pada tahun 2013. Informasi kabupaten/kota lainnya belum dapat digambarkan karena minimnya informasi yang tersedia.

4. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

Indikator sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah digunakan untuk melihat keadaan ada dan tidak pengunaannya pada tingkat kabupaten/kota. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan telah memiliki sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini menandakan sudah adanya perhatian pemerintah pada dua kabupaten/kota tersebut dalam pengelolaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah. Sedangkan untuk tiga kabupaten yang lain belum dapat digambarkan karena tidak adanya informasi yang tersedia.

5. Penegakan Perda

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat perkembangan penegakan perda yang sudah dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan indikator penegakan perda, data yang tersedia hanya di Kota Tarakan. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa di Kota Tarakan sudah ada upaya perhatian dalam penegakan perda. Berdasarkan kecenderungannya terlihat jumlah penegakan perda mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013, yakni 950 penegakan perda pada tahun 2008 menjadi 455 penegakan perda pada tahun 2013. Informasi kabupaten yang lain belum mampu ditunjukkan karena keterbatasan data yang tersedia.

6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Indikator ini untuk melihat sejumlah aktivitas petugas Satpol PP dalam menjalankan kinerjanya. Berdasarkan indikator cakupan patroli Satpol PP dalam satuan tahun hanya tersedia informasi di Kota Tarakan. Pola yang dapat diamati yakni terlihat kecenderungan kenaikan aktivitas cakupan patroli petugas Satpol PP pada tahun 2008 sampai 2013, yakni 720 patroli petugas Satpol PP pada tahun 2008 meningkat menjadi 1350 patroli Satpol PP pada tahun 2013. Walau mengalami kenaikan namun sempat terjadi juga penurunan pada tahun 2011. Informasi keempat kabupaten lain belum dapat ditunjukkan karena tidak ada informasi yang tersedia.

7. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan kinerja penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan. Berdasarkan indikator ini hanya ada dua kabupaten/kota yang dapat memberikan gambaran penanganan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yakni Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Nunukan cenderung tetap pada tahun 2012 dan 2013 yakni sebanyak 100, sedangkan Kota Tarakan memiliki jumlah yang fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat yakni 426 pada tahun 2010 meningkat menjadi 455 pada tahun 2013. Informasi ketiga kabupaten yang lain belum dapat didiskripsikan karena tidak ada informasi yang tersedia.

8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

Indikator ini untuk melihat perkembangan jumlah linmas di kabupaten/kota. Berdasarkan informasi yang tersedia dapat digambarkan bahwa sudah ada petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Informasi yang tersedia terlihat bahwa jumlah linmas di setiap kabupaten/kota cukup berfluktuatif sejak tahun 2008-2013.. Kabupaten Bulungan memiliki jumlah tertinggi sedangkan Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah linmas paling sedikit.

Tabel 2.3.63
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2008-2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	2.591	2.591	2.815	2.815		
Malinau	1.856	223	273	325	397	
Nunukan	340	340			108	
Tana Tidung	161	175	106	106	116	
Tarakan	1.418					
Prov. Kalimantan Utara	**1.273**					

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011, 2012
2) Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2008, 2010, 2012, 2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2009
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2011, 2012, 2013
5) Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2009, 2013
6) Database Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2012
7) Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun 2014

9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Berdasarkan indikator yang tersedia cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten belum mampu dapat menggambarkan kecenderungan yang terjadi karena tidak ada informasi pendukung yang sesuai. Namun untuk melihat kemampuan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara dapat terlihat dari jumlah mobil pemadam kebakaran pada lintas kabupaten/kota. Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan memiliki jumlah mobil pemadam kebakaran yang sama dari tahun ke tahun. Kota Tarakan memiliki jumlah terbanyak yakni enam dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013. Kabupaten Malinau memiliki jumlah lima pada tahun 2010 dan 2011. Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah terendah yakni hanya ada satu pada tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan informasi Kabupaten Nunukan dan Bulungan belum dapat ditunjukkan karena keterbatasan informasi yang tersedia.

10. Tingkat Waktu Tanggap (*response in time*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan kecepatan pelayanan kebakaran. Informasi yang tersedia hanya ada di Kota Tarakan. Berdasarkan informasi yang tersedia tingkat waktu tanggap daeah layanan wilayah manajemen kebakaran di Kota Tarakan mengalami fluktuasi dan memiliki kualitas penanganan menurun. Keadaan ini terlihat karena semakin bertambah lama upaya dalam merespon kejadian kebakaran dari tahun ke tahun. Informasi kabupaten yang lain tidak dapat ditunjukkan kan karena keterbatasan informasi yang tersedia.

Tabel 2.3.64
Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 Jam Setelah Pengaduan) Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 Jam Setelah Pengaduan)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan						
Malinau						
Nunukan						
Tana Tidung						
Tarakan	10	18	20	23	20	43

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2012
2) Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2008
3) Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2012, 2013
4) BPBD Kabupaten Bulungan Tahun 2014
5) BPBD Kota Tarakan Tahun 2014

11. Sistem Informasi Manajemen Pemda

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan pengelolaan sistem informasi manajemen pemda. Data yang tersedia menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi jumlah sistem informasi manajemen pemda pada setiap kabupaten/kota. Kabupaten Nunukan memiliki jumlah sistem informasi manajemen pemda paling banyak. Kota Tarakan memiliki jumlah masih relatif stabil namun menurun pada tahun 2011 ke 2012. Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah cenderung stabil. Secara umum Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan naik terlihat pada tahun 2011 ke 2012.

Tabel 2.3.65
Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda Tahun 2008-2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda Yang Telah Dibuat Pemda Ybs					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan				1	3	
Malinau	1	1		6	5	
Nunukan			7	2	8	12
Tana Tidung				3	3	
Tarakan		5	5	5	3	3
Prov. Kalimantan Utara				**17**	**22**	

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2012, 201
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011, 2012
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2013,2011,2010
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012, 2013
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010,2011, 2012, 2013

12. Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat (IKLM)

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan ada tidaknya kegiatan survey IKLM yang terjadi di lingkup kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2012 terlihat bahwa telah ada survei IKLM khususnya di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Sedangkan untuk Kota Tarakan masih belum ada sejak tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung pernah ada survey IKLM yakni pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 tidak dapat diketahui karena tidak ada informasi yang tersedia.

Tabel 2.3.66
Ada/Tidaknya Survey IKLM Di Pemda Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Survey IKLM Di Pemda (Ada/ Tidak)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	Tidak			Tidak	Ada	
Malinau	Tidak	Ada		Ada	Ada	
Nunukan			Ada		Ada	Ada
Tana Tidung			Ada			
Tarakan		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2011, 2012
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010,2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
6) Kantor Perpustakaan dan Kerasipan Kota Tarakan Tahun 2014

G. Sosial

1. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)

Indikator sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengindentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud adalah panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah. Berdasarkan informasi yang tersedia terlihat jumlah sarana sosial antar kabupaten/kota bervariasi. Kabupaten Malinau pada tahun 2011 dan 2012 jumlah sarana sosial tertinggi yakni tujuh belas. Data lain yang dapat terlihat yakni Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki sama sekali sarana sosial pada tahun 2010 sampai

2012. Khusus untuk informasi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan jumlah sarana sosial mengalami fluktuasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.67
Jumlah Total Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Total Sarana Sosial					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	4			2		
Malinau		7		17	17	
Nunukan			5	4	7	
Tana Tidung			0	0	0	
Tarakan		6	8	10	2	1
Prov. Kalimantan Utara				33		

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2011
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2011, 2012
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010,2011,2012
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010,2011 2012, 2013
6) Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2007

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk dalam PMKS. Berdasarkan data yang tersedia secara umum terlihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang telah mampu memetakan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sampai 100% pada tahun 2011 dan 2012.

Tabel 2.3.68
Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan				3	71	
Malinau	70	80	80	100	100	
Nunukan			2			
Tana Tidung			30	50	50	
Tarakan		3,77	1,50	1,82	4,09	88,29

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2011, 2012
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2009,2011,2012
3) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011,2011,2013
4) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Keterangan: Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data tersedia berupa prosentase.

3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator ini digunakan dalam menunjukkan capaian penanganan PMKS. Pada indikator penanganan PMKS terdapat beberapa kecenderungan yang terjadi. Informasi yang tersedia terlihat bahwa penanganan PMKS pada Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan mengalami kenaikan. Jumlah angka penanganan PMKS tertinggi yakni Kota Tarakan pada tahun 2013. Sedangkan Kabupaten Nunukan memiliki jumlah angka penanganan terendah. Di Kabupaten Nunukan penanganan PMKS masih cukup rendah terlihat pada tahun 2010 hanya 0,02%. Kabupaten Bulungan memiliki kecenderungan penurunan penanganan PMKS terlihat pergerakan dari tahun 2009 sampai 2011. Secara umum dalam penanganan PMKS setiap kabupaten/kota memiliki kecenderungan berbeda-beda namun jumlahnya masih kurang dari 100%.

Tabel 2.3.69
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0,35	0,35	0,20	0,03		
Malinau	0,1	30,76	10,6	18,8	33,6	0,3
Nunukan			0,02			
Tana Tidung			0,31	0,55	0,55	
Tarakan		3,77	3,70	1,86	4,58	88,29

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2010,2011,2012
2) Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2009
3) Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2008, 2009
4) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2009
5) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011,2012,2013
6) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau Tahun 2014
8) Dinas Sosial Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014

Keterangan: Jumlah penanganan PMKS untuk tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data tersedia berupa prosentase.

2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

A. Tenaga Kerja

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Angkatan kerja *(labour force)* menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angka partisipasi angkatan kerja menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka sumber daya manusia yang tersedia juga semakin banyak. Tabel 2.3.1.N.1 menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013.

Tabel 2.3.70
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Angkatan Kerja				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	68,07	77,03	61,96	72,45	50,85
Malinau	79,67	79,27	74,48	70,50	75,26
Nunukan	96,52	96,67	96,82	97,09	97,27
Tana Tidung			66,87	70,18	62,77
Tarakan	52,43	54,88	65,54	65,46	66,28
Provinsi Kalimantan Utara	**68,10**	**71,57**	**71,69**	**74,21**	**68,93**
Provinsi Kalimantan Timur	**57,16**	**57,44**	**59,7**	**61,76**	**60,76**

Sumber:
1) Kabupaten Malinau dalam Angka 2008-2013
2) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2008-2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka 2008-2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010-2013
5) Kota Tarakan dalam Angka 2008-2013

Angka partisipasi angkatan kerja di semua kabupaten/kota hampir di atas 50%, paling tinggi yaitu Kabupaten Nunukan dengan tingkat mencapai 97,27% di tahun 2012. Angka partisipasi angkatan kerja Provinsi Kalimantan Utara setiap tahun terus meningkat walaupun di tahun 2012 angkanya menurun. Perkembangan angka partisipasi angkatan kerja Kota Tarakan terus meningkat, untuk Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung cenderung fluktuatif. Angka partisipasi angkatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara masih

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kelima kabupaten/ kota di lingkup Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 memiliki nilai yang selalu meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen-komponen pembentuk nilai IPG juga mengalami peningkatan. Nilai IPG di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013 menunjukkan nilai sebesar 64,49.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama peran aktifnya dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut adalah capaian IPG di Provinsi Kalimantan Utara yang dirinci berdasarkan kabupaten/kota tahun 2012 – 2013.

Tabel 2.3.75
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009 – 2013

Kabupaten/Kota	IDG				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	45,80	57,35	58,49	57,68	57,36
Malinau	39,83	56,82	56,97	61,24	58,31
Nunukan	55,73	68,93	72,04	68,93	70,33
Tana Tidung	43,65	53,79	58,83	58,68	56,58
Tarakan	52,04	52,93	58,05	49,79	58,82
Prov. Kalimantan Utara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Prov. Kalimantan Timur	52,05	60,05	61,29	61,84	n/a
Nasional	63,52	68,15	69,14	70,07	n/a

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2010-2012

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Utara belum dapat ditemukan datanya. IDG yang ditunjukkan oleh Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga 2013, sedangkan Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki nilai IPG dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2013.

3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah merupakan wujud keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta sebagai sarana untuk memperjuangkan hak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah dapat menjadi jalan bagi kaum perempuan untuk menyuarakan aspirasinya dalam kegiatan pemerintahan termasuk dalam perencanaan maupun pengambilan kebijakan. Salah satu contohnya adalah keterwakilan perempuan dalam instansi-instansi pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki.

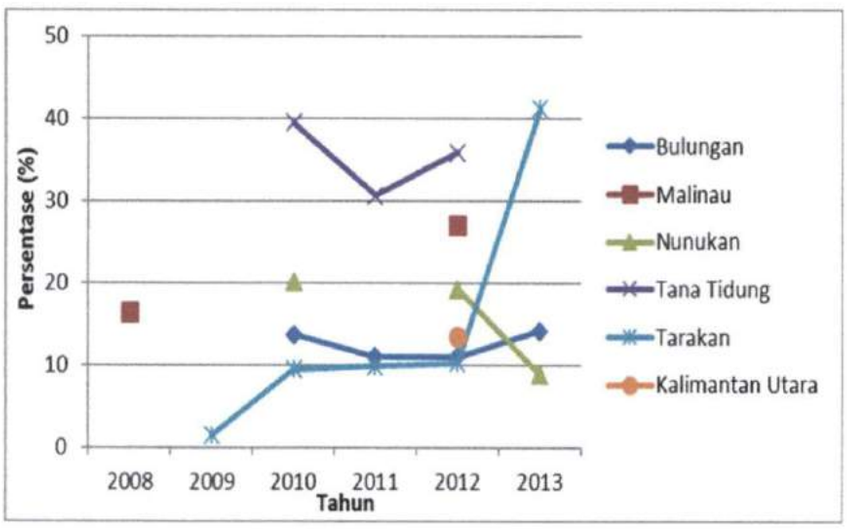
Tabel 2.3.76
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan			13,69	11,00	11,00	14,21
Malinau	16,46				27,01	
Nunukan			20,16		19,24	8,83
Tana Tidung			39,56	30,68	35,89	
Tarakan		1,45	9,50	9,87	10,26	41,20
Provinsi Kalimantan Timur	32,7	35,29	36,35	37,71	38,49	

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012
5) LPPD Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013

Tabel di atas memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah. Di tahun 2013, Kota Tarakan memiliki persentase tertinggi yaitu 41,2%. Kabupaten Bulungan memiliki keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah selama tahun 2010-2013 relatif stagnan yakni berkisar antara 10-14%. Keterwakilan perempuan di Kabupaten Nunukan justru menurun selama tahun 2010-2013 yaitu dari 20,16 % menjadi hanya 8,83 %.

Kinerja partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah sebagian besar kabupaten/kota masih di bawah kinerja Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Tana Tidung memiliki persentase yang relatif mendekati, sementara kabupaten/kota lain masih di bawah kinerja Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan peluang dan kesempatan yang semakin luas bagi perempuan agar dapat berpartisipasi di lembaga pemerintah. Gambar di bawah ini menunjukkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2008-2013.



Gambar 2.3.52
Grafik Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah diProvinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis, 2014

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam tumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali diderita oleh pihak perempuan dan anak-anak.Berbagai macam latar belakang masalah yang dapat menyebabkan KDRT seperti kemiskinan, pihak ketiga dan sebagainya.Data mengenai KDRT kabupaten/kota tidak banyak tersedia yaitu di Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Kota Tarakan.Rasio KDRT di Kabupaten Bulungan relatif fluktuatif, tahun 2008 terdapat 7 kasus, kemudian menurun di tahun 2010 hanya 1 kasus, meningkat kembali di tahun 2011 dengan 5 kasus. Rasio KDRT di Kabupaten Nunukan semakin meningkat selama tahun 2010-2012, tahun 2010 rasionya 0,0001 akan tetapi di tahun 2012 mencapai 0,0005. Kasus KDRT harus segera mendapatkan perhatian pemerintah agar kita semua dapat hidup dengan harmonis.

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

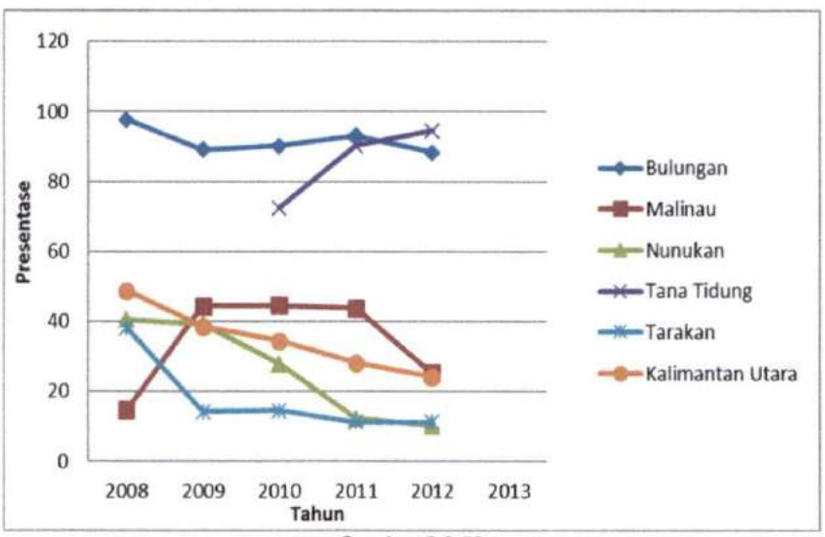
Kesetaraan gender merupakan salah satu isu perempuan dalam era modern, perempuan berhak mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan aktualisasi diri yang

setara dengan laki-laki. Kesetaraan eksternal dicapai ketika perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam akses terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi, berpartisipasi, dan memanfaatkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama agar dapat mengembangkan kemampuan/*skill*. Tabel di bawah ini menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2008-2013.

Tabel 2.3.77
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	97,67	89,06	90,21	93,25	88,35
Malinau	14,60	44,36	44,60	43,86	25,30
Nunukan	40,52	39,28	27,90	12,38	10,12
Tana Tidung			72,47	90,16	94,56
Tarakan	38,18	14,22	14,59	11,18	11,18
Provinsi Kalimantan Utara	**48,84**	**38,55**	**34,51**	**28,19**	**24,11**
Provinsi Kalimantan Timur	**41,82**	**41,38**	**44,65**	**44,22**	**42,01**

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan dalam Angka 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan dalam Angka 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010,2011,2012
5) LPPD Kota Tarakan dalam Angka 2008,2009,2010,2011,2012,2013
6) Profil Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012



Gambar 2.3.53
Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber :Hasil Analisis, 2014

Tabel dan grafiki di atas menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Kalimantan Utara selama 2008-2012 justru menurun. Tahun 2008 persentasenya mencapai 48,84% akan tetapi terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 (24,11%). Penurunan partisipasi perempuan juga dialami oleh Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sementara Kabupaten Tana Tidung partisipasi angkatan kerja perempuan justru meningkat selama tahun 2010-2012. Partisipasi angkatan kerja perempuan paling tinggi di Kabupaten Bulungan, pada tahun 2012 mencapai 88,35%.

Partisipasi angkatan kerja perempuan kabupaten/kota di Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, kecuali Kabupaten Tana Tidung. Perempuan harus diberi peluang, kesempatan dan akses yang semakin terbuka luas untuk berkompetisi di dalam di dunia kerja agar mempunyai kesempatan dan

peluang yang sama dengan laki-laki. Grafik di bawah ini menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2008-2013.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tetap menjadi isu nasional, regional maupun lokal, untuk menganalisa perihal kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Berdasarkan definisi tentang ketahanan pangan dari FAO (1996) yang diadopsi kedalam UU RI No.7 Tahun 1996, ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu, (LIPI,2004):

1. Kecukupan ketersediaan pangan
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun
3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, serta
4. Kualitas/keamanan pangan

Keempat komponen tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan tingkat rumah tangga dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen ketahanan tersebut, untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan.

Untuk menuju ketahanan dan kedaulatan pangan suatu wilayah pemerintahan (daerah), baik kabupaten, provinsi bahkan sampai pada tingkat negara, regulasi ketahanan pangan seharusnya dimiliki oleh setiap daerah sampai tingkat kabupaten, guna mengukur indeks ketahanan pangan daerah tersebut secara tepat sehingga dapat digunakan sebagai acuan dasar kebijakan untuk membangun tingkat ketahanan pangan yang lebih baik melalui program pengembangan sumber daya pangan setempat khususnya untuk kebutuhan pangan utama, yang didukung sumber daya manusia yang professional dan tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian dalam arti luas. Dengan mengetahui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan dan ketergantungan pangan pada komoditas tunggal seperti padi harus diubah paradigmanya. Dengan demikian untuk memenuhi pangan yang berkualitas, jenis tanaman sebagai sumber pangan khususnya karbohidrat jangan hanya menggantungkan pada beras. Dalam rangka menuju kecukupan gizi (karbohidrat) maupun nutrisi lainnya, pengembangan tanaman pangan di luar padi sebagai pangan utama harus mendapat perhatian dalam pengembangan atau budidayanya sebagai sumber karbohidrat alternatif, sehingga seandainya terjadi gangguan pada kecukupan ketersediaan beras dan agar tidak terjadi ketergantungan pada pihak luar untuk impor. Konsep ini dikenal sebagai diversifikasi sumber pangan yang dalam praktek produksi sebagai diversifikasi pertanian. Untuk wilayah atau daerah yang masyarakatnya dengan pola konsumsi beras sebagai bahan pangan utama, maka indikator ketersediaan yang memenuhi kaidah ketahanan dan kedaulatan pangan dapat dari produksi padi sendiri dalam suatu kurun waktu misalnya tahunan dan harus dianalisis dengan cermat dalam hal produksi padi, tingkat rendemen menjadi beras dan tingkat kerusakannya untuk masing-masing wilayah/daerah, sedang bagi wilayah atau bagian wilayah yang bahan pangan utama penduduk bukan beras, maka perlu pendekatan analisis karbohidrat setara beras dari bahan pangan non beras tersebut sebagai pendukung dalam penyediaan pangan yang harus disesuaikan.

Sektor pertanian tidak hanya mempunyai fungsi penyediaan dan pencukupan pangan, tetapi sektor pertanian pada umumnya juga memberikan konstribusi terhadap PDRB tahunan, sehingga sejauh mana konstribusi tersebut harus dianalisa dari tahun ketahun, serta disusun suatu konsep pengembangaan kedepan sebagai bagian dari isu strategis.

1. Kecukupan Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga untuk kurun waktu (hari) tertentu. Kecukupan sendiri akan beras suatu daerah tergantung pada berapa kali daerah tersebut panen padi, yang sangat dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitasnya. Untuk mengetahui daya dukung lahan pertanian di suatu daerah, terutama di daerah

yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, daya dukung dihitung dari produksi bahan makanan. Perhitungannya didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang didasarkan atas kebutuhan kalori per orang per hari yaitu 2.600 kalori per orang per hari atau setara 265 kg beras per orang per tahun. Nilai kebutuhan pokok minimum adalah nilai yang menunjukkan seseorang dapat hidup secara normal, sehingga dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Odumddk *cit.* Moniaga (2011) dikatakan bahwa daerah yang mampu swasembada pangan adalah daerah yang dapat memenuhi KFM penduduk 2.600 kalori/hari yang setara dengan 265 kg beras/orang/tahun. Sedangkan untuk daerah yang diikatakan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk yang bergantung pada tanaman pangan adalah daerah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam taraf yang layak yaitu setara dengan 650 kg beras/orang/tahun atau 2,446 x KFM

Untuk menganalisis tingkat daya dukung lahan pertanian digunakan rumus matematika dari konsep gabungan atas tori Odum, Christeiler, Ebenezer Howard dan issard *dalam* Soehardjo dan Tukiran, 1990 cit. Moniaga, 2011, sebagai berikut:

$\sigma = X/K,$

dimana σ = tingkat daya dukung lahan pertanian

X = Luas panen tanaman pangan per kapita

= Luas panen tanaman pangan di suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut

K = Luas lahan untuk swasembada pangan, dengan

= Kebutuhan Fisik Minimum dibagi produksi tanaman pangan *per ha* per tahun.

Nilai σ menunjukkan kelas tingkat kemampuan swasembada pangan, yang dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu:

1. Kelas I ,nilai $\sigma > 2,47$,
   artinya wilayah ini mampu swa sembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya
2. Kelas II : $1 \leq$ nilai $\sigma \leq 2,7$
   Wilayah ini mampu swa sembada pangan, tetapi belum mampu memberikan kehidupan layak bagi penduduknya
3. Kelas III : nilai $\sigma < 1$
   Wilayah ini belum mampu swa sembada pangan.

Dengan pendekatan analisis tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.3.78
Analisis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2008

Kabupaten/Kota	2008							
	∑ penddk	Luas panen	Produksi		KFM	X	K	σ
			total	Per ha				
Bulungan	109.503	14.024	40.392	2,82	265	0,13	93,97	0,001363
Malinau	56.421	8.835	22.706	2,57	265	0,16	103,11	0,001519
Nunukan	129.011	12.540	39.750	4,17	265	0,10	63,55	0,001530
Tana Tidung	13.240	1.368	5.351	2,83	265	0,10	93,64	0,001103
Tarakan	162.189	28	83	2,82	265	0,00	93,97	0,000002
Provinsi Kalimantan Utara	470.364	36.312	112.205	3,09	265	0,08	85,76	0,000900

Sumber : Analisis data sekunder

Tabel 2.3.79
Analisis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2009

Kabupaten	2009							
	∑ penddk	Luas panen	Produksi		KFM	X	K	σ
			total	Per ha				
Bulungan	112428	15653	49671	3,17	265	0,14	83,60	0,001665
Malinau	59555	10720	26742	2,4	265	0,18	110,42	0,001630
Nunukan	132542	10667	43559	4,08	265	0,08	64,95	0,001239
Tana Tidung	14620	2533	7423	2,94	265	0,17	90,14	0,001922
Tarakan	192430	36	104	2,89	265	0,00	91,70	0,000002
Provinsi Kalimantan Utara	511575	39609	127499	3,21	265	0,08	82,55	0,000938

Sumber : Analisis data sekunder

Tabel 2.3.80
Analisis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2010

Kabupaten	2010							
	∑ penddk	Luas panen	Produksi		KFM	X	K	σ
			total	Per ha				
Bulungan	112660	19238	61112	3,17	265	0,17	83,60	0,002043
Malinau	62580	10402	26950	2,59	265	0,17	102,32	0,001625
Nunukan	140841	9338	38500	4,12	265	0,07	64,32	0,001031
Tana Tidung	15202	734	2728	3,71	265	0,05	71,43	0,000676
Tarakan	193370	31	111	3,58	265	0,00	74,02	0,000002
Provinsi Kalimantan Utara	524653	39743	129401	3,25	265	0,08	81,54	0,000929

Sumber : Analisis data sekunder

Tabel 2.3.81
Analisis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2011

Kabupaten	2011							
	∑ penddk	Luas panen	Produksi		KFM	X	K	σ
			total	Per ha				
Bulungan	117019	20124	61750	3,06	265	0,17	86,60	0,001986
Malinau	66052	8798	22649	2,57	265	0,13	103,11	0,001292
Nunukan	154269	9552	39857	4,17	265	0,06	63,55	0,000974
Tana Tidung	16356	736	2661	3,61	265	0,04	73,41	0,000613
Tarakan	204281	49	194	3,96	265	0,00	66,92	0,000004
Provinsi Kalimantan Utara	557977	39259	127111	3,49	265	0,07	75,93	0,000927

Sumber : Analisis data sekunder

Tabel 2.3.82
Analisis Daya Dukung Lahan Mendukung Kemampuan Swasembada Pangan Tahun 2012

Kabupaten	2012							
	∑ penddk	Luas panen	Produksi		KFM	X	K	σ
			Total	Per ha				
Bulungan	120600	21774	74012	3,49	265	0,18	75,93	0,002378
Malinau	66845	8872	22920	2,58	265	0,13	102,71	0,001292
Nunukan	154308	9003	37249	4,13	265	0,06	64,16	0,000909
Tana Tidung	17079	914	2891	3,16	265	0,05	83,86	0,000638
Tarakan	210504	50	217	4,34	265	0,00	61,06	0,000004
Provinsi Kalimantan Utara	569336	40613	137289	3,38	265	0,07	78,40	0,000910

Sumber : Analisis data sekunder

Melihat data di atas, belum satu wilayah kabupaten/kota pun yang memiliki daya dukung lahan yang mendukung kemampuan swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dikarenakan semua kabupaten/kota memiliki nilai nilai $\sigma < 1$ atau masuk dalam kategori Kelas III. Apabila dilihat dari daya dukung masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan memiliki daya dukung lahan pertanian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

2. Stabilitas Ketersediaan

Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota keluarga dalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan pangan di atas *cutting point* yang ditetapkan di daerah tersebut. *Cutting point* adalah jumlah hari yang menunjukkan rumah tangga memiliki ketersediaan pangan yang cukup dengan asumsi-asumsi tertentu, misalnya 240 hari untuk daerah yang bisa panen padi tiga kali per dua tahun, atau 360 hari untuk daerah yang hanya bisa panen padi sekali setahun.

Indikator stabilitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu stabil, kurang stabil dan tidak stabil. Daerah yang masih memiliki stabilitas ketersediaan pangan rendah, harus berupaya untuk meningkatkan produksi padi melalui berbagai program, namun harus mempertimbangkan kondisi agroklimat dan ketersediaan pelaku produksi atau petani profesional yang tersedia. Dari data yang ada menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara mempunyai stabilitas ketersediaan pangan yang stabil. Tingkat stabilitas ini dapat ditingkatkan dan atau dipertahankan untuk masa mendatang melalui berbagai langkah untuk membangun pertanian di provinsi ini.

3. Aksesibilitas/Keterjangkauan terhadap Pangan

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh bahan pangan, dari hasil panen sendiri atau dari diperoleh luar/membeli, yang diukur dengan luas pemilikan lahan pertanian, tingkat produktivitas dan kualitas, atau pendapatan keluarga serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan cara membeli. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan/ladang dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Akses langsung, jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang
2. Akses tidak langsung, jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang

Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Produksi sendiri, masyarakat memiliki lahan sawah sehingga cara memperoleh pangan dengan cara akses langsung, atau tidak langsung (sawah tidak untuk tanaman pangan)
2. Membeli, masyarakat tidak memiliki sawah, mengakses pangan secara tidak langsung

Dari pengukuran indikator aksesibilitas ini kemudian dapat diukur indikator stabilitas ketersediaan pangan yang merupakan penggabungan dari stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan digunakan untuk menunjukkan status suatu rumah tangga mempunyai persediaan pangan cukup, konsumsi rumah tangga normal dan mempunyai akses langsung terhadap pangan.

Apabila dipadukan antara stabilitas langsung dan kontinyuitas bagi masyarakat yang memiliki lahan sawah untuk pangan (padi), maka indikator yang ada adalah stabil kontinyu, kurang stabil dan kurang kontinyu, atau tidak stabil dan tidak kontinyu. Sedang untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan sawah indikator yang mungkin ada adalah stabil kurang kontinyu, kurang stabil tidak kontinyu, dan tidak stabil tidak kontinyu, yang hal ini sangat ditentukan oleh pasokan bahan pangan dari luar atau produksi petani setempat. Dalam hal ini ketersediaan dan berfungsinya sarana dan prasarana penyimpanan serta transportasi menjadi sangat penting, juga program pengendalian harga. Integrasi antar sektor mulai menunjukkan peran dan fungsinya, artinya aksesibilitas pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pertanian.

Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan memiliki potensi pertanian yang sangat tinggi untuk mendukung pembangunan wilayah untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini didasarkan pada

kenyataan bahwa iklim, dan daya dukung lahan yang sangat baik untuk pertanaman tanaman pangan, sehingga perlu perencanaan pembangunan pertanian yang komprehensif, terarah dan berkelanjutan. Ketersediaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kalimantan harus menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Utara. Bahkan dari data luas lahan non sawah yang memiliki potensi untuk digunakan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, yang mencakup tanaman non-padi dan peternakan sangat potensial.

4. Kualitas/Keamanan Pangan

Kualitas/keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, ada tiga kriteria yang lebih didasarkan pada kecukupan gizi masyarakat, sehingga dimasukkan unsur kebutuhan protein dan nutrisi lainnya, yaitu:

1. Rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja
2. Rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein nabati saja
3. Rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein baik hewani maupun nabati.

Ditinjau dari tingkat kemampuan Provinsi Kalimanta dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan beras bagi warganya cukup tinggi, hal ini akan memberikan kondisi bahwa keamanan kecukupan pangan di provinsi Kalimantan Utara terjamin. Agar keamanan kecukupan pangan ini disertai keamanan kualitasnya, maka penanganan pergudangan dan distribusi merupakan hal yang tidak terpisahkan. Selain itu peningkatan kualitas pangan bagi masyarakatnya untuk mendukung pembangunan kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi perhatian utama.

Dari aspek kualitas pangan secara tidak langsung bahwa konsep penganekaragaman menjadi sangat penting. Artinya kebutuhan pangan bagi manusia tidak hanya terdiri dari karbohidrat, namun diperlukan bahan pangan lain sebagai sumber unsur pelengkap gizi. Bertitik tolak dari poin ini menggambarkan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya terbatas pada produksi padi saja., tetapi termasuk jenis tanaman lainnya yang turut dibudidayakan, yang disebut dengan diversifikasi pertanian.

5. Indeks Ketahanan pangan

Indeks ketahanan pangan dihitung dengan cara mengkombinasikan keempat indikator ketahanan pangan (ketersediaan, stabilitas ketersediaan, keberlanjutan dan kualitas/keamanan pangan). Kombinasi antara kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan memberikan indikator stabilitas ketersediaan pangan. Kombinasi antara stabilitas ketersediaan pangan dengan akses terhadap pangan memberikan indikator kontinyuitas ketersediaan pangan. Indeks ketahanan pangan diukur berdasarkan gabungan antara indikator kontinyuitas ketersediaan pangan dengan kualitas/keamanan pangan. Indeks ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dikategorikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.3.83
Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Kontinyuitas Ketersediaan Pangan	Kualitas/Keamanan Pangan: Konsumsi Protein Hewani dan/atau Nabati		
	Protein Hewani dan Nabati/Protein Hewani Saja	Protein Nabati Saja	Tidak Ada Konsumsi Protein Hewani dan Nabati
Kontinyu	Tahan	Kurang tahan	Tidak tahan
Kurang kontinyu	Kurang tahan	Tidak tahan	Tidak tahan
Tidak kontinyu	Tidak tahan	Tidak tahan	Tidak tahan

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Atas dasar matriks tersebut, maka rumah tangga dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Rumah tangga tahan pangan, adalah rumah tangga yang memiliki persediaan pangan/makanan pokok secara kontinyu (diukur dari persediaan makan selama jangka masa satu panen dengan panen berikutnya dengan frekuensi makan tiga kali atau lebih per hari serta akses langsung) dan memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati atau protein hewani saja.
2. Rumah tangga kurang tahan pangan, adalah rumah tangga yang memiliki:
   a. Kontinyuitas pangan/makanan pokok kontinyu, tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein nabati saja
   b. Kontinyuitas ketersediaan pangan/makanan kurang kontinyu dan mempunyai pengeluaran untuk protein hewani dan nabati.
3. Rumah tangga tidak tahan pangan, adalah rumah tangga yang dicirikan oleh:
   a. Kontinyuitas ketersediaan pangan kontinyu, tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati
   b. Kontinyuitas ketersediaan pangan kurang kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
   c. Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu walaupun memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
   d. Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein nabati saja, atau tidak untuk keduanya.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional tahun 2009 yang dikeluarkan Departemen Pertanian dan World Food Programme, menyebutkan bahwa Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan merupakan dua kabupaten yang termasuk dalam kategori prioritas kerawanan pangan berdasarkan indeks ketahanan pangan komposit. Indeks ketahanan pangan komposit terdiri dari ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan serta pemanfaatan pangan dan gizi. Kabupaten Nunukan termasuk kategori kerawanan pangan prioritas 2 dengan peringkat 60 dari 346 kabupaten terdata, sedangkan Kabupaten Malinau termasuk kategori kerawanan pangan prioritas 3 dengan peringkat 84. Kategori kerawanan pangan prioritas 2 sangat ditentukan oleh: 1) *underweight* pada balita, 2) desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4, 3) tanpa akses terhadap air bersih, 4) kemiskinan, dan 5) tanpa akses terhadap listrik. Sedangkan kategori kerawanan pangan prioritas 3 ditentukan oleh: 1) *underweight* pada balita, 2) kemiskinan, 3) tanpa akses terhadap air bersih, 4) tidak memadainya produksi pangan pokok, dan 5) tanpa akses terhadap listrik.

Dilihat dari indikator ketersediaan pangan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional tersebut, peringkat Kabupaten Nunukan di urutan ke 142, Kabupaten Malinau peringkat ke 153 dan Kabupaten Bulungan peringkat ke 162. Jika dilihat dari indikator-indikator akses terhadap pangan yang terdiri dari penduduk di bawah garis kemiskinan, rumah tangga tanpa akses listrik, dan desa tanpa akses ke jalan, maka penduduk di bawah garis kemiskinan Kabupaten Nunukan berada di peringkat 180, Kabupaten Bulungan peringkat 209, Kabupaten Nunukan peringkat 224. Jika berdasarkan indikator rumah tangga tanpa listrik maka Kabupaten Nunukan di peringkat 289, Kabupaten Bulungan peringkat 177, Kabupaten Malinau peringkat 189. Sedangkan berdasarkan desa tanpa akses ke jalan Kabupaten Nunukan berada di peringkat 335, Kabupaten Bulungan peringkat 200, dan Kabupaten Malinau peringkat 310.

Sektor pertanian berperanan penting sebagai landasan untuk pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan. Dengan peningkatan produksi pangan dan penganekaragaman produk bagi masyarakat, maka penatagunaan lahan di Provinsi Kalimantan Utara perlu pengkajian lebih lanjut dengan arah kebijakan untuk perluasan areal pertanian dalam arti luas. Tujuan strategis dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan menuju kesejahteraan masyarakat berbasis sektor pertanian, dan meningkatkan peran sektor pertanian dalam PDRB daerah. Untuk perluasan areal pertanian

perlu dilakukan pencetakan sawah tersier dengan didukung sarana dan prasaran pengairan yang memadai untuk lahan pertanian basah. Sedang untuk pembanguan areal pertanian lahan kering yang harus diperhatikan adalan pelestarian sumber daya lahan dan sumber daya air yang ada.

6. Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu: (1) setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata dan terjangkau serta (2) setiap rumah tangga, setiap saat mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Jika dua kondisi tersebut terpenuhi, maka kesejahteraan rakyat dapat direalisasikan. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya membangun ketahanan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Utara perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, yang didukung oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi yang kuat yang mampu mengendalikan, mengarahkan dan melindungi semua aspek dan komponen yang vital dalam upaya membangun pertanian melalui berbagai macam pola seperti pengembangan Pola Agropolitan, "*Food's Estate*" maupun pengembangan diversifikasi pertanian baik horizontal maupun vertikal, disertai program penanganan dari hulu sampai hilir dengan orientasi peningkatan pendapatan petani dapat diwujudkan.

Mengenai status ada atau tidak adanya regulasi yang terkait dengan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.84
Ketersediaan Regulasi Ketahan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Ketahanan Pangan				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada
Malinau	ada	ada	ada	ada	ada
Nunukan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tana Tidung	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tarakan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber:
1) *LPPD Kabupaten Bulungan tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*
2) *LPPD Kabupaten Malinau tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*
3) *LPPD Kabupaten Nunukan tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*
4) *LPPD Kabupaten Tana Tidung tahun 2010, 2011, 2012*
5) *LPPD Kota Tarakan tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*

Dari tabel tersebut nampak bahwa sebagian besar kabupaten belum memiliki regulasi, sementara pembangunan pertanian berkelanjutan perlu didukung dengan adanya relugasi ketahanan pangan. Regulasi ini berisi tentang peraturan mengenai kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan sebagainya. Dari semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya dua kabupaten yang sudah memiliki regulasi ketahanan pangan, yaitu Kabupaten Bulungan sejak tahun 2008 dan Kabupaten Malinau sejak tahun 2011. Saat ini Kabupaten Bulungan baru memiliki empat regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu:

1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 685/K-VIII/520/2011 tentang Penetapan Lokasi Pembuatan Jalan Usaha Tani Food Estate di Tanjung Buka Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 663/K-VII/050/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Lapangan Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Buku Rencana Revitalisasi Kawasan Sentra Produksi di Kabupaten Bulungan
3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 664/K-VII/050/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Buku Rencana Revitalisasi Kawasan Sentra Produksi di Kabupaten Bulungan

4. Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 665/K-VII/050/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Panitia Pengarah dan Penyelenggara Seminar Penyusunan Buku Rencana Revitalisasi Kawasan Sentra Produksi di Kabupaten Bulungan

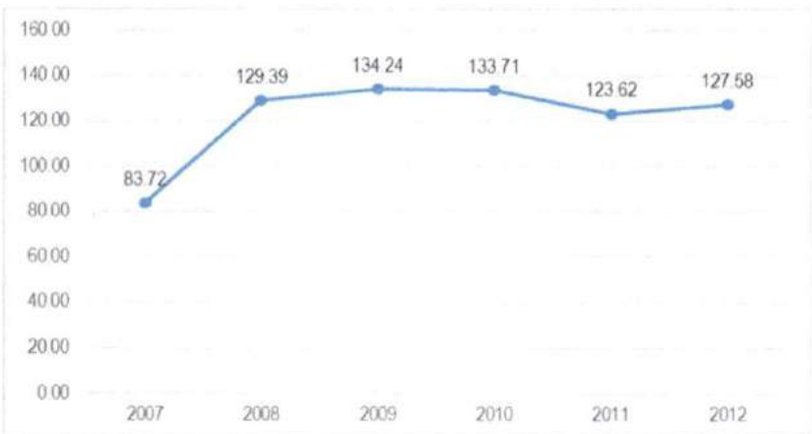
7. Ketersediaan Pangan Utama

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan daerah untuk memiliki dan menyediakan sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan mendapatkan sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk memperoleh bahan pangan bernutrisi dan cukup, secara financial terjangkau. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Organisasi Pangan Dunia (FAO) menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Tabel 2.3.85
Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 (Kg/Kapita/tahun)

Kabupaten	Ketersediaan Pangan Utama					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	109,80	218,20	238,13	292,38	284,43	330,78
Malinau	77,92	228,95	255,47	243,91	195,08	184,81
Nunukan	190,71	166,07	172,58	147,34	139,26	122,87
Tana Tidung	na	217,43	273,67	96,72	87,69	91,24
Tarakan	0,05	0,26	0,29	0,31	0,51	0,55
Provinsi Kalimantan Utara	83,72	129,39	134,24	133,71	123,62	127,58

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
2) *Kabupaten Malinau dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
3) *Kabupaten Nunukan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka tahun 2010, 2011, 2012, 2013*
5) *Kota Tarakan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
6) *Hasil Analisis 2014*



Gambar 2.3.54
Grafik Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Dari data tersebut secara umum kecukupan pangan di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 tercukupi dengan baik dengan kriteria kebutuhan pangan (beras per kapita/tahun 120 kg), namun untuk Kota Tarakan tidak terpenuhi dari produksi sendiri. Perlu diperhatikan bahwa kondisi tersebut sebenarnya belum baik,

karena kebutuhan manusia tidak hanya terpenuhi kebutuhan sumber beras saja tetapi secara keseluruhan dinilai dalam kecukupan kalori per kapita per tahun yang setara dengan 265 kg beras/kapita/tahun.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub-sistem utama dalam sistem ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi pangan di suatu daerah, pemasukan dari luar daerah dan cadangan pangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Produksi pangan di suatu wilayah tergantung pada berbagai faktor luar seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, ketersediaan sarana produksi yang tepat dan alat-alat pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan. Ketersediaan pangan dengan sumber bahan pangan dari luar, faktor yang mempengaruhi lebih komplek dan bersifat lintas sektoral. Di bawah ini ditunjukkan ritme ketersediaan pangan per kapita/tahun di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2007 s/d 2012.

Provinsi Kalimantan Utara saat ini mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Pada tahun 2009-2011 menunjukan penurunan ketersediaan pangan utama walaupun tidak signifikan, tetapi pada akhir tahun 2012 ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Kota Tarakan sepenuhnya belum dapat memenuhi kebutuhan pangan utama secara mandiri, hal ini disebabkan luas wilayah Tarakan yang kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya sehingga luas lahan pertanian sangat sedikit sekali sehingga kecukupan pangan disuplai dari luar Kota Tarakan.

Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan akan selalu muncul, sehingga tantangan terhadap ketahanan pangan akan terus ada. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara guna menyokong ketahanan pangan, faktor produksi berupa lahan pertanian yang sesuai merupakan sumber daya alam pokok dalam usaha pertanian. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, bahkan secara fungsi dapat berkurang, sedangkan kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke arah pemanfaatan non-pertanian merupakan ancaman terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial, khususnya di luar Jawa, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara yang ada kecenderungan peralihan dari padi untuk perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan yang berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan seperti yang diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan ketahanan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara perlu merumuskan kebijakan tentang ketahanan pangan dan menyiapkan regulasinya, khususnya tiga kabupaten yang belum memiliki regulasi ketahanan pangan yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

8. Ketersediaan Luas Lahan Sawah

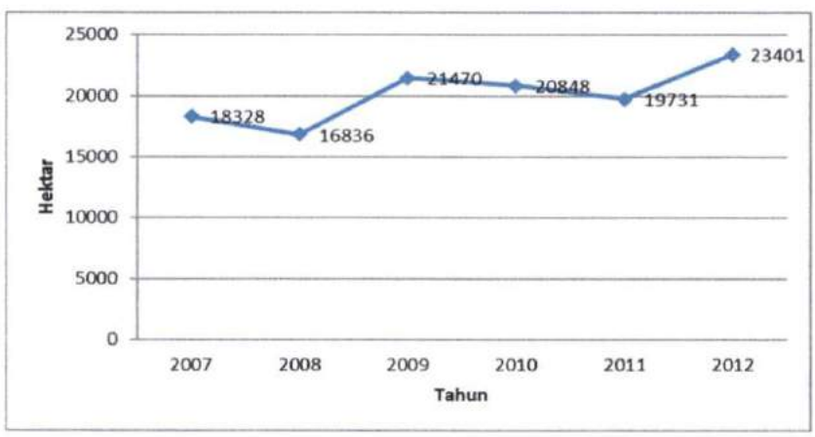
Luas lahan sawah di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini perlu diidentifikasi penyebabnya agar tidak mengganggu ketersediaan lahan untuk produksi tanaman pangan di masa mendatang, mengingat di Provinsi Kalimantan Utara sedang berkembang perkebunan kelapa sawit, yang juga memerlukan lahan yang subur secara fisik dan kimia seperti lahan sawah. Meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dandukungan dinamika serta kebutuhan pembangunan di setiap daerah secara langsung atau tidak langsung memaksaterjadinya perubahan penggunaan lahan-lahan pertanian, khususnya sawah, semakin tinggi.

Tabel 2.3.86
Luas Lahan Sawah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 (Ha)

Kabupaten	Luas Lahan Sawah (Ha)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	6.475	6.601	8.670	9.656	8.786	12.642
Malinau	2.040	2.422	2.354	3.011	2398.	2.479
Nunukan	9.808	7.785	8.486	7.512	7.898	7.692
Tana Tidung	na	na	1.924	638	600	538
Tarakan	5	28	36	31	49	50
Kalimantan Utara	18.328	16.836	21.470	20.848	19.731	23.401

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2008-2013, Hasil Analisis 2014

Pertambahan luas lahan sawah terjadi di Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 30,50% pada tahun 2011-2012. Peningkatan luas lahan sawah pun terjadi di Kota Tarakan secara konsisten selama 6 tahun terakhir, di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Sementara di Kabupaten Tana Tidung terus terjadi penurunan luas lahan sawah dari tahun 2009-2012. Hal ini perlu menjadi catatan yang penting, karena dapat mengganggu ketersediaan pangan di kabupaten tersebut, terlebih lagi jika pertambahan penduduk di wilayah tersebut tidak dapat dikendalikan. Walaupun demikian, Pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan luas lahan sebesar 15,68%. Fluktuasi ketersediaan lahan sawah di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2007-2012 digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3.55
Grafik Luas Lahan Sawah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Ketersediaaan lahan pertanian hanya akan memberikan fungsi produksi apabila didukung dengan ketersediaan air dan jaringannya sampai ke petak produksi, sehingga produksi padi berlangsung mantap. Dari data tersebut lahan sawah yang sudah mendapatkan jaringan irigasi baru sebagian kecil yaitu di Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas di Kabupaten Bulungan. Untuk menyediakan benih padi sampai saat ini produksi benih masih terbatas di Kabupaten Nunukan dengan luas dan produksi benih yang masih perlu ditingkatkan. Lahan sawah di kabupaten lainnya dan yang belum didukung sarana irigasi, pada umumnya merupakan lahan sawah tadah hujan, dan sampai saat ini penanaman padi hanya satu kali dalam satu tahun. Kecukupan air untuk pertumbuhan tanaman padi berasal dari air hujan yang memang relatif merata sepanjang tahun. Atas dasar uraian di atas, maka peningkatan ketersediaan lahan petanian produktif baru melalui pencetakan sawah dan reklamasi lahan bekas tambah yang masih potensi serta pembanguan pertanian lahan kering di berbagai bagian wilayah Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi pertimbangan utama.

9. Total Produksi Padi

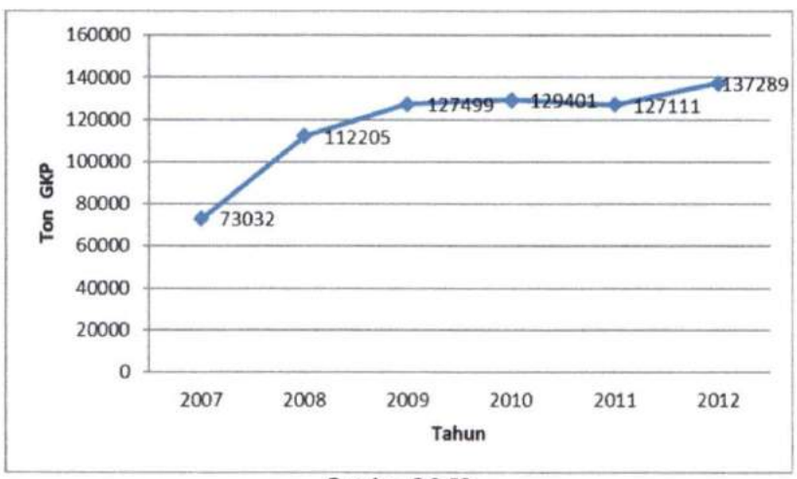
Total produksi padi di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan basis produksi di Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.87
Total Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 (Ton GKP)

Kabupaten	Total Produksi Padi					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	21260	44329	49671	61112	61750	74012
Malinau	7321	22706	26742	26950	22649	22920
Nunukan	44434	39750	43559	38500	39857	37249
Tana Tidung	na	5341	7423	2728	2661	2891
Tarakan	17	79	104	111	194	217
Kalimantan Utara	73032	112205	127499	129401	127111	137289

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
2) *Kabupaten Malinau dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
3) *Kabupaten Nunukan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka tahun 2010, 2011, 2012, 2013*
5) *Kota Tarakan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
6) *Hasil Analisis 2014*

Tren selama enam tahun terakhir, produksi padi di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan. Produksi padi yang terus meningkat akan berdampak positif terhadap ketahanan pangan menjadi kekuatan untuk menuju ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara, meski semua ini harus disinergikan dengan perkembangan penduduk dan kemungkinan gangguan distribusi dan harga beras. Fluktuasi peningkatan produksi padi digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3.56
Grafik Total Produksi Padi per Tahun Selama Periode 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Suatu hal yang mungkin sering terabaikan, yaitu produksi tanaman pangan yang disajiukan adalah produksi padi/gabah kering, seharusnya dikonversi ke beras (bentuk yang diperdagangkan sebagai bahan pangan) dengan tingkat rendemen yang standar dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) dan menjadi beras. Angka konversi GKP-GKG di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 85,91%, sedang angka konversi GKG-Beras sebesar 62,74%.

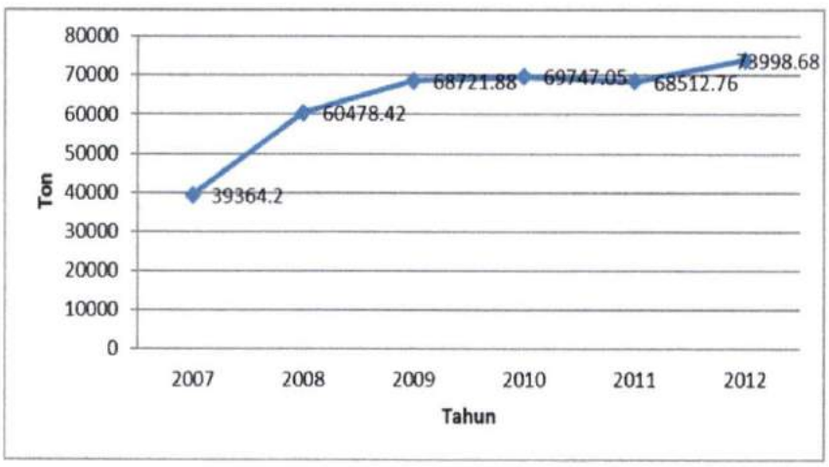
10. Total Produksi Beras

Total produksi beras setelah dikonversi di masing-masing kabupaten dan total Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan fluktuasi perkembangannya ditunjukkan pada tabel di bawah ini dan gambar selanjutnya.

Tabel 2.3.88
Total Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 (Ton)

Kabupaten	Total Produksi Beras					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	11459,13	23893,30	26772,64	32939,33	33283,21	39892,42
Malinau	3946,01	12238,52	14413,92	14526,03	12207,80	12353,86
Nunukan	23949,90	21425,22	23478,27	20751,47	21482,90	20077,19
Tana Tidung	-	2878,80	4000,99	1470,39	1434,28	1558,25
Tarakan	9,16	42,58	56,06	59,83	104,57	116,96
Kalimantan Utara	39364,2	60478,4	68721,9	69747,1	68512,8	73998,7

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
2) *Kabupaten Malinau dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
3) *Kabupaten Nunukan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka tahun 2010, 2011, 2012, 2013*
5) *Kota Tarakan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
6) *Hasil Analisis 2014*



Gambar 2.3.57
Grafik Total Produksi Beras per Tahun Selama Periode 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

11. Total Produksi Komoditas Palawija

Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang potensial, Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya menghasilkan padi akan tetapi juaga palawija dan ubi-ubian, yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan efisiensi lahan dan pendapatan petani, dan menunjang ketahanan pangan. Perkembangan produksi dan fluktuasinya ditunjukkan dalam tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.3.89
Total Produksi Komoditas Palawija di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (Ton)

Komoditas	Total Produksi Komoditas Palawija				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jagung	893,4	740,6	379	228,2	571
Ubi Kayu	7193	8442	7443,6	5063,8	5490
ubi jalar	1770	2760,6	1653,8	1174,8	665
Kacang Tanah	154,8	118,6	109,8	55,6	54,6

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2009-2013, Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.58
Grafik Total Produksi Komoditas Palawija per Tahun Selama Periode 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Ubi jalar mengalami penurunan produksi semenjak tahun 2009-2012, sementara komoditas kacang tanah terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hanya ubi kayu dan jagung yang mengalami kenaikan produksi pada tahun 2012 meskipun tiga tahun sebelumnya mengalami penurunan produksi. Jagung mengalami kenaikan produksi sebesar 60,03% dan ubi kayu mengalami kenaikan sebesar 7,76% pada tahun 2012. Upaya peningkatan produksi palawija ini perlu terus ditingkatkan guna menjamin kecukupan pangan dengan nilai mutu gizi yang tinggi. Komoditas palawija memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Berbagai jenis palawija potensial antara lain jagung, kedele, kacang tanah, dan ubi-ubian yang akan memberikan peran ganda yaitu untuk penganekaragaman sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan, sumber pendapatan tambahan petani dan juga pendapatan daerah. Pengembangan palawija diprioritaskan pada wilayah tadah hujan dengan kecukupan air di musim kemarau dan dapat juga dikembangkan dalam pola pergiliran tanaman di lahan sawah beririgasi tetap.

12. Produksi Komoditas Hortikultura (Sayuran)

Seperti bagian wilayah Negara Indonesia lainnya, Provinsi Kalimantan Utara dalam bidang pertanian juga mengusahakan komoditas sayuran yang terdiri dari banyak jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sebagai kelengkapan dalam menu makan keluarga. Komoditas sayuran merupakan komoditas yang penting setelah komoditas tanaman pangan. Sayuran merupakan sumber protein nabati, vitamin, dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran tidak dapat diabaikan dari kebutuhan hidup masyarakat di provinsi ini terutama sebagai sumber makanan pendamping. Selain itu, beberapa komoditas seperti cabe besar atau rawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi petani.

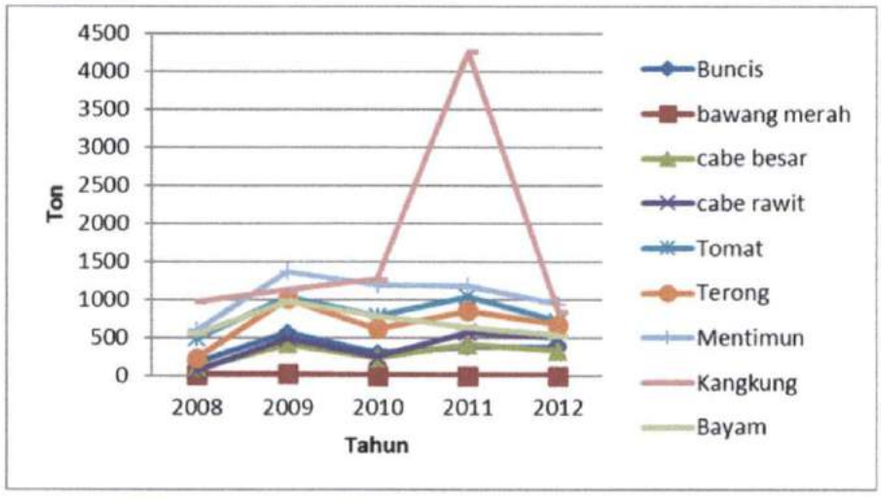
Produksi semua komoditas sayuran rata-rata menunjukkan fluktuasi. Peningkatan dan penurunan produksi tersebut bergantung kepada kondisi lingkungan tempat tumbuh tanaman. Adanya curah hujan yang tinggi pada tahun-tahun tertentu menyebabkan kondisi yang optimum bagi tumbuhnya organisme pengganggu tanaman. Hanya

komoditas bawang merah yang memiliki nilai produksi yang rendah, rata-rata produksi bawang merah di Kalimantan Utara 6,8 ton selama lima tahun terakhir. Nilai tersebut masih jauh di bawah rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur (58,6 ton) dan masih jauh di bawah rata-rata produksi nasional (965,99 ton). Meskipun demikian, hal ini wajar mengingat wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan hutan hujan tropis, dengan curah hujan tinggi sehingga kurang sesuai bagi tempat tumbuh bawang merah. Selain itu, rata-rata produksi cabe besar (296,28 ton), cabe rawit (377,42 ton), dan tomat (813,61 ton) selama lima tahun terakhir masih jauh di bawah rata-rata produksi Kalimantan Timur yaitu cabe besar (6346,20 ton), cabe rawit (7560,60 ton), dan tomat (10752,80 ton). Kondisi yang sama juga berlaku bagi komoditas sayuran lainnya, rata-rata produksi semua komoditas sayuran di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.3.90
Produksi Sayuran di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (Ton)

Komoditas	Produksi Sayuran				
	2008	2009	2010	2011	2012
Buncis	181,50	560,39	297,84	385,40	374,20
bawang merah	11,34	21,28	0,40	1,30	0,00
cabe besar	97,89	414,00	234,92	404,20	330,40
Cabe rawit	62,92	494,86	249,32	569,00	511,00
Tomat	488,80	1039,00	781,88	1041,80	716,60
Terong	230,28	1009,02	620,32	849,60	669,40
Mentimun	605,60	1368,38	1187,10	1182,80	941,80
Kangkung	978,62	1125,22	1270,14	4266,60	843,00
Bayam	552,18	976,18	784,32	630,80	532,80

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
2) *Kabupaten Malinau dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
3) *Kabupaten Nunukan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka tahun 2010, 2011, 2012, 2013*
5) *Kota Tarakan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
6) *Kalimantan Timur dalam Angka 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*



Gambar 2.3.59
Grafik Produksi Sayuran per Tahun Selama Periode 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Walaupun dari segi produksi Provinsi Kalimantan Utara jauh di bawah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi dari segi produktivitas Provinsi Kalimantan Utara jauh lebih unggul. Rata-rata produktivitas sayuran selama dua tahun terakhir jauh di atas rata-rata produktivitas Provinsi Kalimantan Timur. Rata-rata produktivitas buncis (6,45 ton/ha), cabe rawit (4,89 ton/ha), tomat (10,75 ton/ha), terong (9,44 ton/ha), mentimun (11,12 ton/ha), kangkung (7,2 ton/ha,

dan bayam (4,47 ton/ha). Sementara rata-rata produktivitas Provinsi Kalimantan Timur, Buncis (4,85 ton/ha), cabe rawit (4,02 ton/ha), tomat (6,75 ton/ha), terong (6,3 ton/ha), mentimun (7.75 ton/ha), kangkung (5,86 ton/ha, dan bayam (3.35 ton/ha).

Komoditas hortikultura ini mempunyai kesempatan ditingkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan konsumsi keluarga. Pembangunan pertanian berbasis hortikultura I disinergikan dengan pembangunan pertanian lahan kering maupun lahan basah. Pada kawasan dengan kelerengan tertentu (< 30%) dapat dialokasikan sebagai wilayah pembangunan hortikultura, dengan mempertimbangkan konservasi lahan khususnya mencegah kelongsoran lahan.

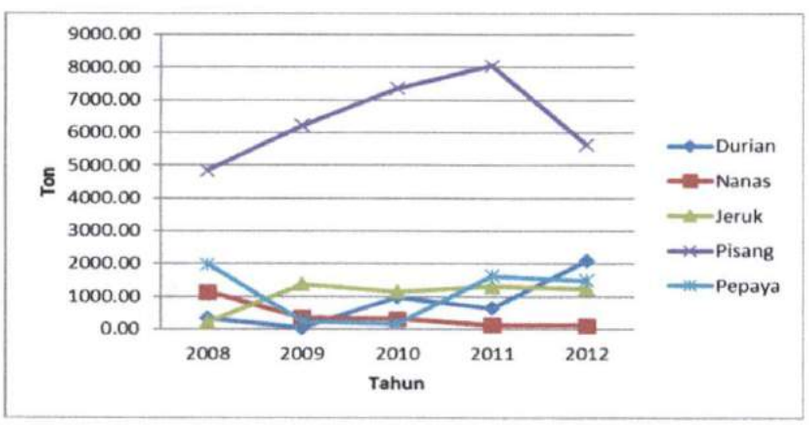
13. Produksi Komoditas Hortikultura (Buah-buahan)

Komoditas buah-buahan merupakan sumber asupan vitamin bagi tubuh. Komoditas buah-buahan merupakan komoditas pertanian lainnya yang penting setelah tanaman pangan dan sayuran, yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat tani di Kalimantan Utara. Komoditas buah-buahan umumnya rata-rata berproduksi setahun sekali. Perkembangan produksi dan fluktuasi produksi komoditas buah-buahan di Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.3.91
Produksi Buah-buah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (Ton)

Komoditas	Produksi Komoditas Hortikultura (Buah-buahan)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Durian	335,47	31,72	976,20	647,80	2088,20
Nanas	1139,30	356,80	318,80	128,00	121,80
Jeruk	220,36	1378,80	1155,20	1305,00	1235,80
Pisang	4852,81	6215,58	7360,10	8047,40	5639,20
Pepaya	1989,79	242,40	159,18	1628,34	1487,24

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
2) *Kabupaten Malinau dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
3) *Kabupaten Nunukan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka tahun 2010, 2011, 2012, 2013*
5) *Kota Tarakan dalam Angka tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*
6) *Kalimantan Timur dalam Angka 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*



Gambar 2.3.60
Grafik Produksi Buah-buahan per Tahun Selama Periode 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Rata-rata produksi empat komoditas buah-buahan yaitu durian, nanas, jeruk dan pepaya mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Sementara produksi pisang mengalami penurunan produksi pada tahun 2012.

Produksi buah-buahan di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah produksi Provinsi Kalimantan Timur. Rata-rata produksi durian provinsi ini (815,88 ton) jauh di bawah rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur (12.066,8 ton), rata-rata produksi nanas di Provinsi Kalimantan Utara 412,94 ton sementara rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur 15.445,4 ton), rata-rata produksi jeruk di Provinsi Kalimantan Utara 1.059,03 ton sementara rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur 1.0731 ton, rata-rata produksi pisang di Provinsi Kalimantan Utara 6.423,02 ton, sementara rata-rata produksi Kalimantan Timur 108.115,2 ton, dan rata-rata produksi pepaya di Provinsi Kalimantan Utara 1.101,39 ton, sementara rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur 32.117,8 ton.

Buah-buahan lokal yang popular seperti durian, cempedak, jeruk Kalimatan, dan buah-buahan eksotik tropis lainnya harus menjadi bagian dari pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Dalam pembangunan hortikultura berbasis tanaman buah-buahan disamping konsep peningkatan produksi, juga harus mempunyai fungsi konservasi atau pelestarian plasma nutfah buah-buahan tropis spsifik Kalimantan Utara. Untuk konservasi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kebun koleksi dan pengembangan buah-buahan.

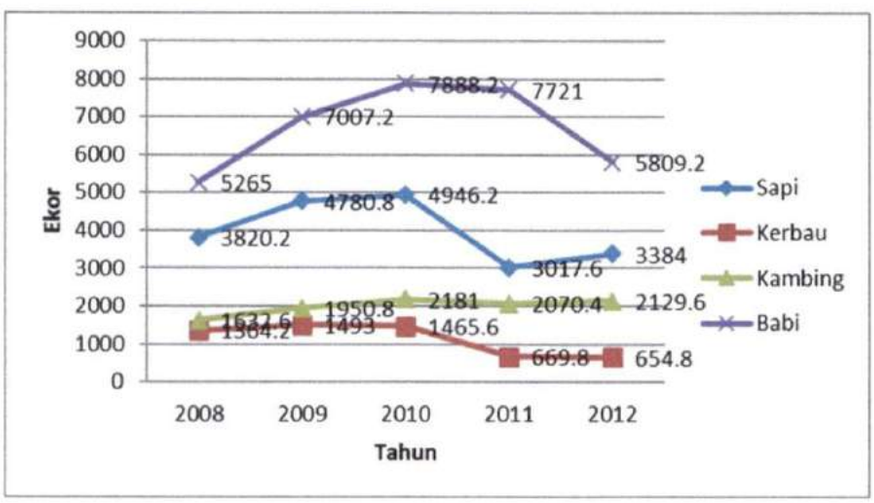
14. Populasi Ternak

Ternak (*livestock*) memiliki peranan penting dalam pertanian baik sebagai tenaga dalam pengolahan lahan, "tabungan" dan peningkatan status petani. Ternak selain berfungsi sebagai sumber protein hewani bagi kebutuhan manusia, ternak juga menghasilkan kotoran yang dapat digunakan sebagai sumber pupuk organik bagi tanaman setelah melalui teknologi fermentasi, juga bermanfaat sebagai alternatif sumber energi (biogas) bagi rumah tangga. Hal ini bermanfaat bagi keberlangsungan pertanian berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara. Perkembangan populasi dan fluktuasi ternak ruminansia di Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.3.92
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (Ekor)

Jenis Ternak	Populasi Ternak				
	2008	2009	2010	2011	2012
Sapi	3820,2	4780,8	4946,2	3017,6	3384
Kerbau	1364,2	1493	1465,6	669,8	654,8
Kambing	1632,6	1950,8	2181	2070,4	2129,6
Babi	5265	7007,2	7888,2	7721	5809,2

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2009-2013, Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.61
Grafik Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Populasi ternak kerbau dan babi mengalami penurunan populasi yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir. Populasi ternak sapi mengalami fluktuasi namun pada tahun terakhir mengalami peningkatan. Demikian juga dengan populasi ternak kambing, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 namun kembali mengalami kenaikan pada akhir tahun. Populasi semua jenis ternak di Provinsi Kalimantan Utara rata-rata masih jauh di bawah Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan lestari, merupakan potensi untuk diikuti pembangunan sektor peternakan baik ruminasia maupun unggas. Pembanguan pertanian tanaman pangan secara tidak langsung dapat mendukung pembangunan sektor peternakan yang dikembangkan melalui intensifikasi dan divesifikasi ternak. Dengan pembanguan sektor peternakan juga akan memberikan *feed-back* pada pembangunan pertanian melalui pengelolaan limbah ternak sebagai pupuk organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Pembangunan sektor peternakan juga dimungkinkan dengan pengelolaan lingkungan marginal untuk pengembangan hijauan makanan ternak (HMT) atau sebagai padang penggembalaan ruminansia.

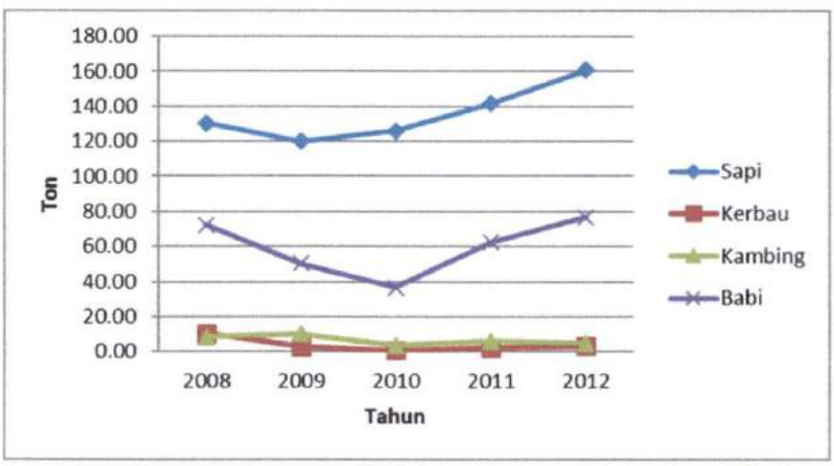
15. Produksi Daging

Daging merupakan sumber protein yang tinggi bagi manusia. Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), merupakan salah satu tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, hal ini erat kaitannya dengan perbaikan gizi masyarakat, kesehatan dan tingkat pendidikan. Salah satu sumber gizi adalah pangan asal hewan berupa protein yang berasal dari daging sapi, kerbau, kambing, dan protein.

Tabel 2.3.93
Produksi Daging di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (Ton)

Jenis Ternak	Produksi Daging				
	2008	2009	2010	2011	2012
Sapi	130,31	120,04	126,01	141,66	160,75
Kerbau	10,40	2,98	0,66	2,16	3,13
Kambing	8,53	10,29	3,33	6,06	4,85
Babi	72,40	50,25	36,58	62,56	77,01

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2009-2013, Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.62
Grafik Produksi Daging di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Produksi daging sapi dan babi menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Sementara produksi daging kambing dan kerbau menunjukkan trend fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan produksi daging di Provinsi Kalimantan Utara masih rendah di bawah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga produksi

daging perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan asupan protein bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

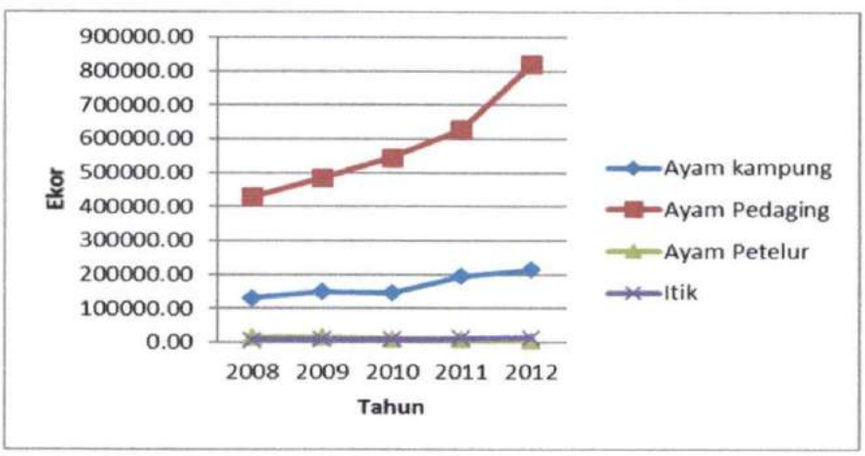
16. Populasi Ternak Unggas

Ternak dan hasil produksinya merupakan sumber bahan pangan protein yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Perkembangan populasi ternak unggas dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein nasional. Tingkat konsumsi akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan daging dan produksi ternak lainnya dan tingkat pendapatan rumahtangga (*purchasing power*). Faktor tingkat pendapatan yang akan menentukan apakah rumahtangga/individu akan lebih banyak mengkonsumsi sumber karbohidrat atau protein, yang akan berpengaruh pada tingkat konsumsi berkualitas dan sesuai dengan persyaratan gizi.

Tabel 2.3.94
Populasi Ternak Unggas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (Ton)

Jenis Ternak	Populasi Ternak Unggas				
	2008	2009	2010	2011	2012
Ayam kampung	131526,80	150169,00	146266,00	195826,20	215220,80
Ayam Pedaging	429937,40	485548,00	546218,60	629610,00	821260,40
Ayam Petelur	15513,20	15556,60	11703,40	9298,80	6629,40
Itik	8602,00	9699,20	9842,00	13186,40	13662,20

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2009-2013, Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.63
Grafik Populasi Ternak Unggas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Asupan protein hewani selain dipenuhi dari konsumsi daging sapi, kerbau, kambing dan babi juga dapat dipenuhi dari konsumsi daging unggas. Populasi ternak unggas menggambarkan ketersediaan daging yang akan menjadi sumber bagi kebutuhan protein masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, kotoran ternak unggas dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang lebih baik dari pada ternak hewan mamalia karena mengandung unsur N yang lebih tinggi. Populasi ternak ayam kampung, ayam pedaging dan itik menunjukkan trend kenaikan. Sementara populasi ayam petelur menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir, hal ini bisa berdampak terhadap ketersediaan telur bagi kebutuhan asupan protein hewani selain daging yang lebih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

17. Produksi Daging Unggas

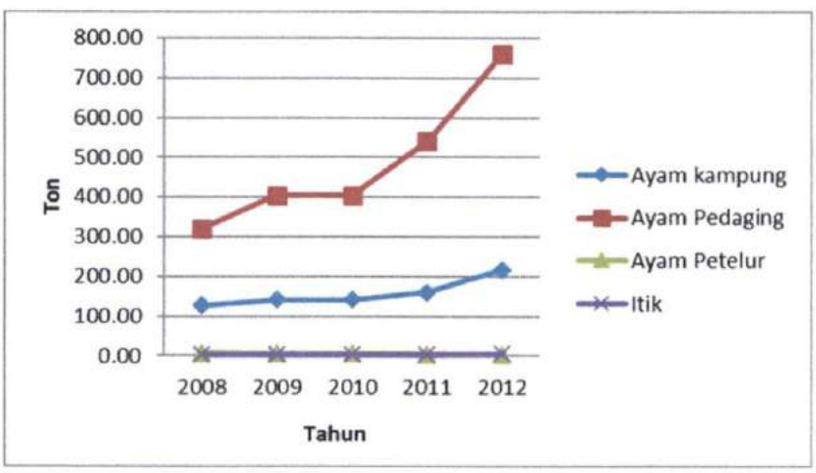
Produksi daging unggas menggambarkan ketersediaan asupan protein hewani yang tersedia di suatu wilayah. Asupan protein hewani selain dari daging sapi dan sejenisnya dapat dipenuhi dari daging unggas. Protein hewani mampu menyediakan kebutuhan asam amino esensial yang tidak dapat dipenuhi dari protein nabati. Selain itu, protein hewani juga merupakan sumber utama mineral Ca, P, Zinc, Fe serta vitamin B_2, B_6,dan B_{12}yang penting bagi tubuh manusia.

Produksi daging ayam kampung, ayam pedaging, dan itik terus menunjukkan peningkatan produksi selama lima tahun terakhir. Sementara produksi daging ayam petelur terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Secara keseluruhan rata-rata produksi daging unggas di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah rata-rata produksi Provinsi Kalimantan Timur, tren kenaikan produksi daging unggas perlu terus ditingkatkan guna memenuhi kecukupan protein hewani dalam rangka pemenuhan ketersediaan pangan untuk meningkatkan nilai gizi dari sumber bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Tabel 2.3.95
Produksi Daging Unggas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (Ton)

Jenis Ternak	Produksi Daging Unggas				
	2008	2009	2010	2011	2012
Ayam kampung	126,58	141,77	141,77	160,16	217,36
Ayam Pedaging	321,16	404,73	404,73	541,52	761,24
Ayam Petelur	7,89	6,98	6,98	5,28	2,98
Itik	2,96	3,56	3,53	4,10	5,64

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2009-2013, Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.64
Grafik Produksi Daging Unggas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

18. Tipe Iklim di Provinsi Kalimantan Utara

Untuk menentukan tipe iklim di Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui dari Sistem klasifikasi Schmidt dan Fergusson, sistem ini didasarkan atas nilai Q. Q adalah rerata jumlah bulan kering dibagi rerata jumlah bulan basah. Bulan kering dan bulan basah ditentukan berdasarkan penggolongan oleh Mohr:

1. Jika jumlah curah hujan dalam satu bulan lebih dari 100 mm maka digolongkan ke dalam bulan basah
2. Jika jumlah curah hujan dalam satu bulan antara 60-100 mm maka digolongkan ke dalam bulan lembab
3. Jika jumlah curah hujan dalam satu bulan kurang dari 60 mm maka digolongkan ke dalam bulan kering

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson, Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai Q < 14,3% sehingga termasuk ke dalam Tipe Iklim A dengan kondisi wilayah sangat basah (Hutan Hujan Tropis). Sistem

klasifikasi Oldeman lebih menekankan pada hubungan iklim dan tanaman yang didasarkan pada kebutuhan curah hujan untuk tanaman padi dan palawija. Oldeman menggolongkan zone iklim dengan bantuan segitiga agroklimat menurut jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering yang berurutan. Melalui sistem ini, dapat ditentukan pola tanam yang cocok di provinsi Kalimantan Utara. Oldeman menggolongan bulan basah dan bulang kering sebagai berikut:

1. Jika rata-rata curah hujan dalam satu bulan > 200 mm maka termasuk ke dalam bulan basah
2. Jika rata-rata curah hujan dalam satu bulan antara 100-200 mm maka termasuk ke dalam bulan lembab
3. Jika rata-rata curah hujan dalam satu bulan < 100 mm maka termasuk ke dalam bulan kering

Hasil analisis menunjukkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah bulan basah antara antara sembilan dengan jumlah bulan kering dua. Maka berdasarkan klasifikasi *system Oldeman*, Provinsi Kalimantan Utara termasuk ke dalam tipe iklim B2. Sistem pertanian dengan daerah yang memiliki tipe iklim B2 cocok untuk ditanami padi sebanyak dua musim tanam dan pada musim kemarau ditanami palawija. Maka pola tanam yang cocok adalah padi-padi-palawija.

D. Pertanahan

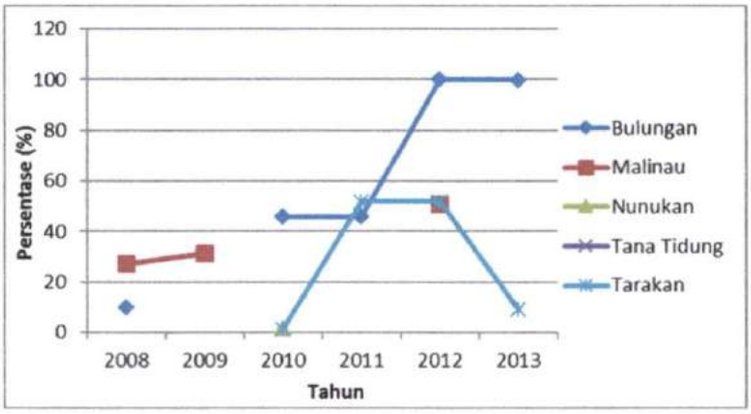
1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Lahan merupakan salah satu aset bagi setiap orang apalagi harga lahan yang terus naik menjadikannya komoditas yang berharga. Hal yang masih menjadi masalah dalam sektor pertanahan negara ini adalah administrasi pertanahan yang belum maksimal seperti sertifikat kepemilikan tanah. Kasus sengketa tanah banyak terjadi karena lemahnya data teknis dan sertifikat. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase lahan bersertifikat di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.96
Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Luas Lahan Bersertifikat (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	10,13		45,81	45,81	100,00	99,83
Malinau	27,31	31,33			50,89	
Nunukan			1,68			
Tana Tidung						
Tarakan			1,46	51,79	51,79	9,09

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2012
5) Kota Tarakan 2009-2013



Gambar 2.3.65
Grafik Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa persentase luas lahan bersertifikat di sebagian besar kabupaten/kota, masih rendah. Kabupaten Bulungan mempunyai kinerja yang baik dalam sertifikasi lahan, selama tahun 2012 dan 2013 persentasenya mencapai 100% dan 99,8%. Kinerja kabupaten/kota lainnya masih belum maksimal seperti Kabupaten Malinau yang persentasenya di tahun 2012 hanya 50,89%; Kota Tarakan persentase sertifikasi lahannya juga masih rendah, yaitu 51,79% (2012) dan hanya 9% di tahun 2013. Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi baru yang memiliki potensi tambang ataupun perkebunan memerlukan administrasi pertanahan yang baik agar tidak timbul sengketa. Investor juga sering melihat sertifikat tanah sebelum mereka menanamkan modal agar aspek legalitas dari kegiatan ekonomi dapat terjamin. Gambar di bawah menunjukkan grafik persentase lahan bersertifikat di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.

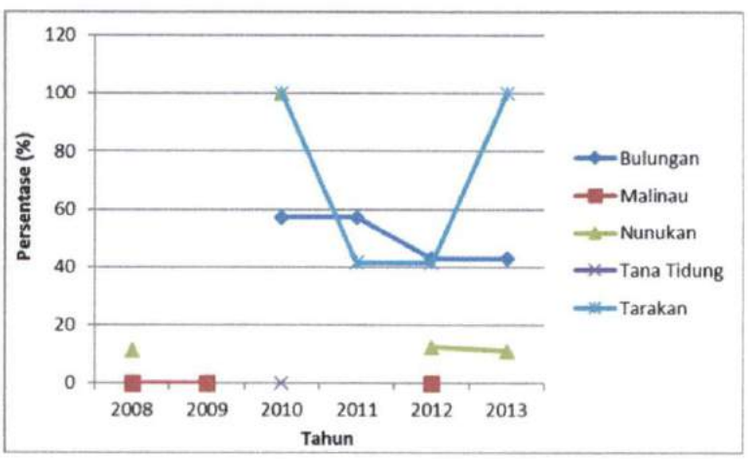
2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Lemahnya data administrasi dan sertifikasi tanah dapat berakibat kasus sengketa. Penyelesaian kasus sengketa sangat penting terutama apabila itu tanah negara. Persentase penyelesaian kasus tanah negara menunjukkan keseriusan *stakeholder* untuk mengamankan fungsi tanah negara. Semakin lama tanah negara terlibat dalam sengketa maka fungsi tanah negara akan terganggu, apalagi akan dibangun fasilitas publik. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase penyelesaian kasus tanah negara di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.

Tabel 2.3.97
Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)				
	2008	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0,00	57,14	57,14	42,86	42,86
Malinau	0,00			0,00	
Nunukan	11,43	100,00		12,50	11,11
Tana Tidung		0,00			
Tarakan		100,00	41,51	41,51	100,00

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008-2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008-2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung2010-2012
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013
6) Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2012



Gambar 2.3.66
Grafik Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Tabel dan grafik di atas menunjukkan beberapa kabupaten telah menuntaskan kasus tanah negara tiap tahunnya seperti Kota Tarakan di tahun 2010 dan 2013, Kabupaten Nunukan di tahun 2010. Kabupaten Bulungan selama tahun 2010-2013 terdapat penurunan persentase yaitu dari 57,14% di tahun 2010 dan 2011 kemudian turun menjadi 42,86% di tahun 2012-2013. Penyelesaian kasus tanah negara memang tidak mudah apalagi melibatkan banyak pihak. Terdapat kasus tanah negara yang hanya hitungan bulan sudah selesai, akan tetapi kasus lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai. Penyelesaian kasus tanah negara penting agar lahan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Gambar di bawah menunjukkan persentase penyelesaian kasus tanah negara di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.

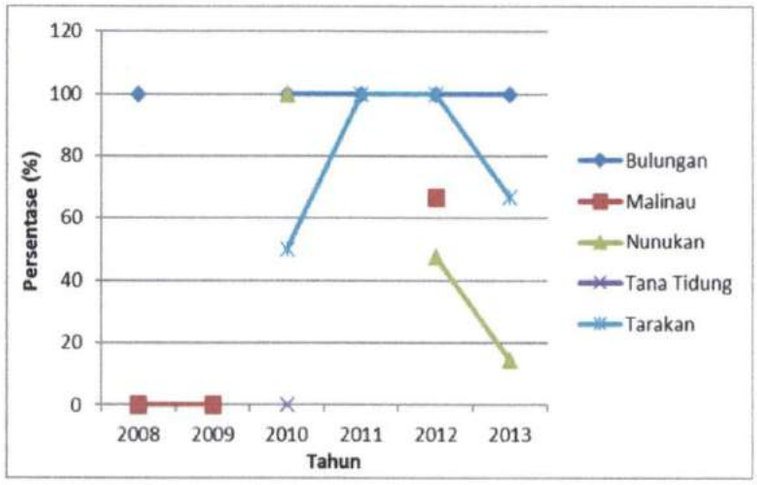
3. Penyelesaian Ijin Lokasi

Masalah yang dihadapi investor dalam mencari ijin lokasi adalah birokrasi. Birokrasi yang panjang dan bahkan pungutan liar membuat penyelesaian ijin menjadi lama. Semakin lama ijin dikeluarkan maka investor akan kehilangan waktu untuk memulai usahanya sehingga ijin lokasi dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketidakpastian dan lamanya waktu keluar izin dapat berakibat investor berpindah untuk menanamkan modalnya di daerah lain. Tabel di bawah menunjukkan persentase penyelesaian ijin lokasi di Provinsi Kalimantan Utara dirinci kabupaten/kota tahun 2008-2013.

Tabel 2.3.98
Penyelesaian Ijin Lokasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Penyelesaian Ijin Lokasi (%)				
	2008	2010	2011	2012	2013
Bulungan	100	100	100	100	100
Malinau	0			66,67	
Nunukan		100,00		47,62	14,29
Tana Tidung		0,00			
Tarakan		50	100	100	66,67

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012
5) LPPD Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
6) Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2012 dan 2013



Gambar 2.3.67
Grafik Penyelesaian Ijin Lokasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis, 2014

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa beberapa daerah sudah menyelesaikan semua ijin lokasi setiap tahunnya seperti Kabupaten Bulungan, yang selama 2010-2013 mencapai 100%. Beberapa kabupaten/kota belum menyelesaikan ijin lokasi, seperti Kabupaten Malinau, di tahun 2012 persentasenya mencapai 66,67%; Kabupaten Nunukan di tahun 2012 dan 2013 hanya menyelesaikan 47,62% dan 14,29% Persentase penyelesaian ijin lokasi yang rendah merupakan indikasi rumitnya birokrasi, banyaknya perizinan yang harus dilewati dan lamanya waktu pembuatan surat izin merupakan masalah dalam perizinan investor. Gambar di bawah menunjukkan grafik persentase penyelesaian ijin lokasi di Provinsi Kalimantan Utara dirinci kabupaten/kota tahun 2008-2013.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

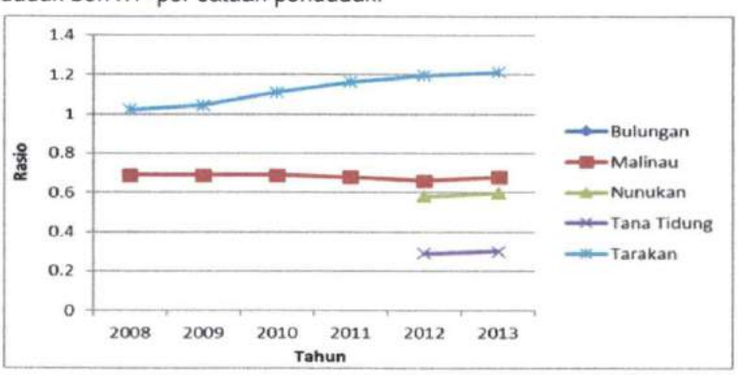
Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan digunakan sebagai syarat untuk surat-surat tertentu seperti SKCK, akte dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia > 17 tahun. Tabel 2.3.1.J.1 menunjukkan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk.

Tabel 2.3.99
Rasio Penduduk Ber-KTP di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Rasio Penduduk Ber-KTP					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan						
Malinau	0,69	0,69	0,69	0,68	0,66	0,68
Nunukan					0,58	0,60
Tana Tidung					0,29	0,30
Tarakan	1,02	1,05	1,11	1,16	1,20	1,21

Sumber:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012,2013
5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013

Kota Tarakan memiliki rasio penduduk ber-KTP yang tinggi bahkan rasionya di atas angka 1 selama tahun 2008-2013. Rasio penduduk ber-KTP di kabupaten/kota lainnya, masih relatif rendah, seperti Kabupaten Malinau yang rasionya stagnan 0,66-0,69 selama 2008-2013. Kabupaten Tana Tidung rasio penduduk berKTP hanya 0,3 di tahun 2013. Pemerintah daerah yang masih memiliki rasio penduduk berKTP rendah diharapkan segera menyelesaikan masalah ini. Data penduduk yang tidak valid akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan, selain itu akan kesulitan dalam mengidentifikasi kondisi masyarakat. Gambar 2.3.1.J.1 menunjukkan rasio penduduk berKTP per satuan penduduk.



Gambar 2.3.68
Grafik Rasio penduduk berKTP di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis, 2014

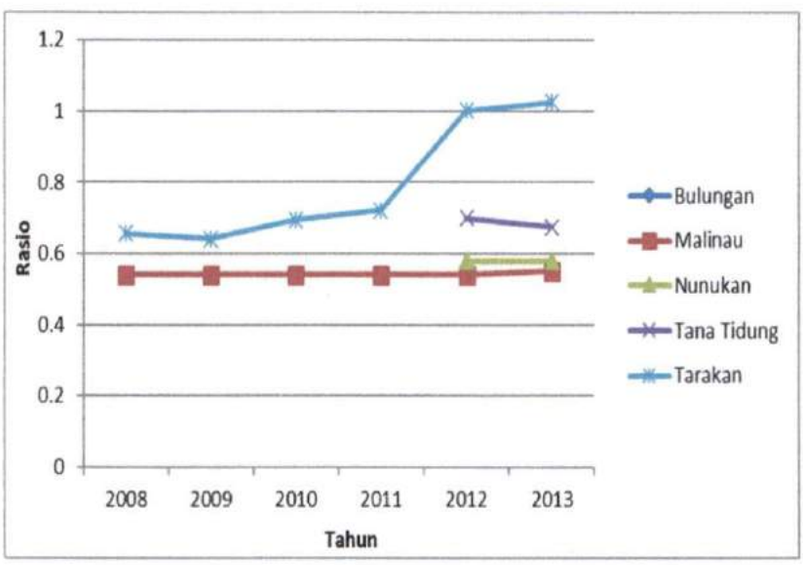
2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Administrasi kependudukan sangat penting untuk dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara, hal ini juga berlaku bagi bayi yang baru lahir. Kepemilikan akte kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akte kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau surat-surat yang lainnya. Akte kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah, data tersebut penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akte kelahiran bayi minim maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak tidak maksimalnya program pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan rasio bayi berakte kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.

Tabel 2.3.100
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Rasio Bayi Berakte Kelahiran					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan						
Malinau	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55
Nunukan					0,58	0,58
Tana Tidung					0,70	0,68
Tarakan	0,66	0,64	0,69	0,72	1,00	1,03

Sumber:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012,2013
5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013



Gambar 2.3.69
Grafik Rasio Bayi Berakte Kelahiran Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belum semua bayi di kabupaten/kota memiliki akte kelahiran. Kota Tarakan selama tahun 2008-2013 mengalami peningkatan rasio bayi berakte, semula di tahun 2008, rasionya hanya 0,66 kemudian menglaami kenaikan yang cukup tajam di tahun 2013 menjadi 1,03. Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung belum semua bayi memiliki akte kelahiran, sedangkan di Kabupaten Bulungan belum tersedia data bayi berakte kelahiran. Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Malinau stagnan selama tahun 2008-2013, begitu juga dengan Kabupaten Nunukan di tahun 2012-2013.

SPM untuk kepemilikan akte lahir adalah 100% atau memiliki rasio 1 (Permendagri No. 62 Tahun 2008), hanya Kota Tarakan yang sudah memenuhi SPM tersebut. Kabupaten/kota lainnya masih jauh di bawah SPM seperti Kabupaten Malinau, yang rasionya hanya 0,55. Gambar di bawah menunjukkan rasio bayi berakte kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.

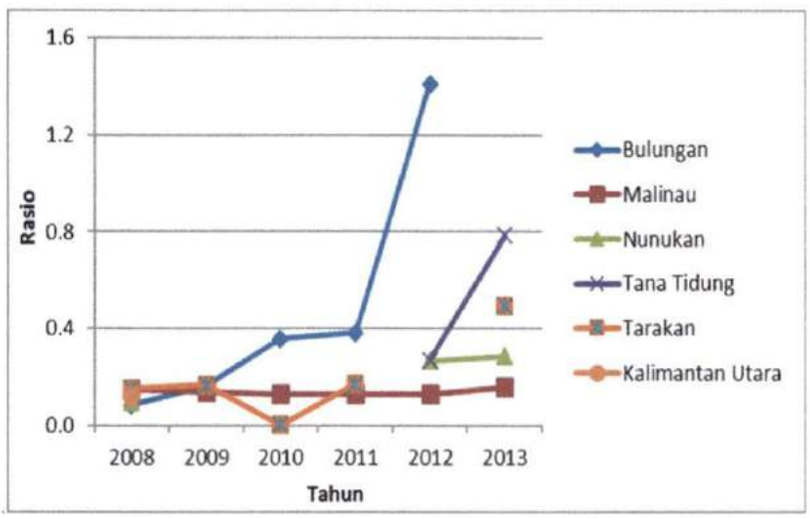
3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri diakui sah oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Tabel dan Grafik di bawah iini menunjukkan rasio bayi berakte kelahiran dirinci kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.Data menunjukkan bahwa kepemilikan akte nikah masih minim, seperti rasio di Kabupaten Malinau di tahun 2016 hanya 0,16. Rasio paling baik dicapai oleh Kabupaten Bulungan, yaitu 1,41 di tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa semua istri di kabupaten tersebut sudah mempunyai akte nikah. Kota Tarakan menunjukkan peningkatan rasio dari tahun 2011 yang hanya 0,17 kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 0,49.

Tabel 2.3.101
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Rasio Pasangan Berakte Nikah					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0,08	0,16	0,36	0,38	1,41	
Malinau	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,16
Nunukan	0,10				0,27	0,29
Tana Tidung					0,27	0,79
Tarakan	0,15	0,17	0,00	0,17		0,49
Provinsi Kalimantan Utara	0,12					

Sumber:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012,2013
5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
6) Tarakan Dalam Angka 2009,2010,2011,2012
7) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009,2010,2011,2012



Gambar 2.3.70
Grafik Rasio Pasangan Berakte Nikah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis, 2014

4. Rasio Kepemilikan KTP Per 1000 penduduk

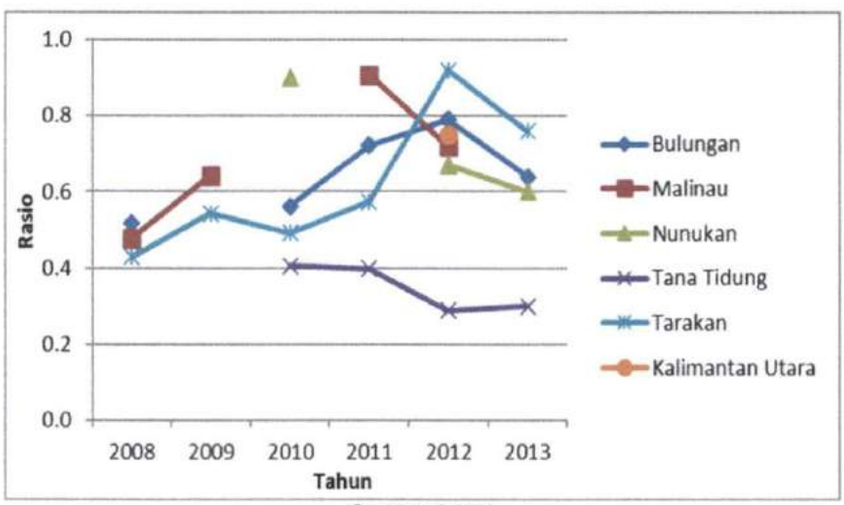
KTP merupakan identitas wajib warga negara Indonesia, kepemilikan KTP menunjukkan bahwa seseorang telah terdaftar dalam database kependudukan. KTP mempunyai beberapa manfaat seperti dapat mengakses program pemerintah seperi Jamkesmas, BOS ataupun bantuan lainnya. KTP juga merupakan syarat utama dalam beberapa pembuatan surat seperti SKCK, kartu kuning dan lainnya. Tabel di bawah menunjukkan rasio kepemilikan KTP per 1000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.

Tabel 2.3.102
Rasio Kepemilikan KTP Per 1000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten /Kota	Rasio Kepemilikan KTP Per 1000 Penduduk					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0,52		0,56	0,72	0,79	0,64
Malinau	0,48	0,64		0,91	0,72	
Nunukan			0,90		0,67	0,60
Tana Tidung			0,41	0,40	0,29	0,30
Tarakan	0,43	0,54	0,49	0,57	0,92	0,76
Provinsi Kalimantan Utara					0,75	

Sumber:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012,2013
5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih ada penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang belum mempunyai KTP. Kota Tarakan di tahun 2012 rasio kepemilikan KTP hanya 0,92. Kinerja rasio kepemilikan KTP di Kota Tarakan relatif fluktuatif, di lain pihak, kinerja Kabupaten Nunukan justru menurun. Rasio tahun 2010 mencapai 0,9 akan tetapi di tahun 2012 dan 2013 rasionya menurun menjadi 0,6 dan 0,67. Rasio kepemilikan KTP di Kabupaten Bulungan selama 2010-2012 semakin meningkat akan tetapi di tahun 2013 turun. Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan permasalahan ini agar masyarakat terdaftar dalam *database* kependudukan serta dapat menikmati apa yang menjadi hak sebagai warga negara. Gambar di bawah menunjukkan rasio kepemilikan KTP per 1000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013.



Gambar 2.3.71
Grafik Rasio Kepemilikan KTP Per 1000 Penduduk
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis, 2014

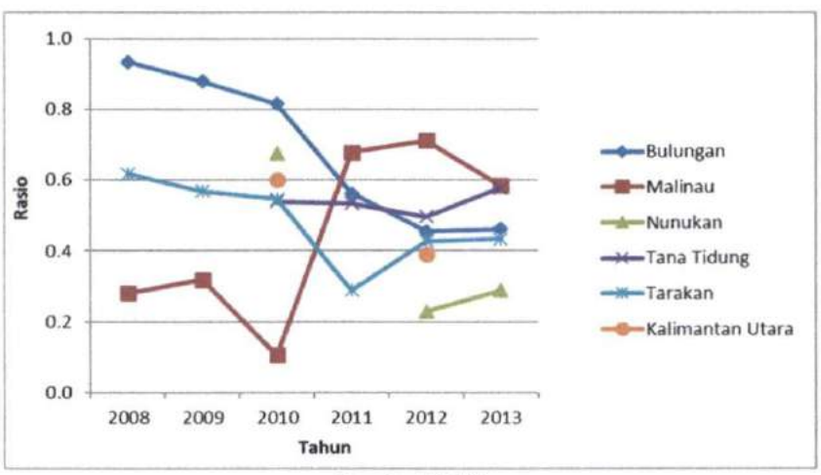
5. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk

Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Tabel dan Grafik di bawah menunjukkan kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk dirinci kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2013. Seluruh kabupaten/kota di provinsi ini belum menunjukkan rasio kepemilikan akte kelahiran yang mencapai angka 1, hal ini menunjukkan masih ada penduduk yang belum mempunyai akte kelahiran. Rasio paling tinggi di tahun 2013 adalah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau dengan 0,58, sedangkan paling rendah di Kabupaten Nunukan. Rasio kepemilikan akte kelahiran di provinsi ini mengalami penurunan, di tahun 2010 rasionya 0,6 akan tetapi kemudian menurun di tahun 2012 menjadi 0,39.

Tabel 2.3.103
Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0,93		0,82	0,56	0,45	0,46
Malinau	0,28	0,32	0,10	0,68	0,71	0,58
Nunukan			0,67		0,23	0,29
Tana Tidung			0,54	0,53	0,50	0,58
Tarakan	0,62	0,57	0,55	0,29	0,43	0,43
Provinsi Kalimantan Utara			0,60		0,39	

Sumber:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012,2013
5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013



Gambar 2.3.72
Grafik Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis, 2014

6. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Database merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan suatu pemerintahan, ketersediaan database akan memudahkan *stakeholder* untuk mengambil, mencari atau menganalisis data kependudukan. Selama ini banyak pemerintah daerah belum mempunyai database kependudukan yang baik sehingga mengalami kesulitan apabila ingin melakukan analisis. Tabel di bawah menunjukkan ketersediaan database kependudukan skala Provinsi

Kalimantan Utara tahun 2008-2013. Kabupaten Malinau dan Bulungan selama 2008-2013 belum mempunyai database kependudukan sedangkan untuk Kota Tarakan sudah tersedia.

Tabel 2.3.104
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Database kependudukan					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Malinau	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Nunukan						
Tana Tidung					Ada	Ada
Tarakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012,2013
5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013

7. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NK), Penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam identifikasi dan menghindari pemalsuan/data ganda. Semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK. Hal ini diharapkan akan memudahkan dalam administrasi kependudukan secara nasional.

Tabel 2.3.105
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Malinau	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Nunukan	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Tana Tidung	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Tarakan	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau 2008,2009,2010,2011,2012,2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2008,2009,2010,2011,2012,2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010,2011,2012
5) LPPD Kota Tarakan 2008,2009,2010,2011,2012,2013

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat. Informasi yang tersedia menunjukkan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota cenderung tidak mengalami perubahan berarti, terlihat tahun 2011 dan 2012. Kabupaten Nunukan memiliki rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat terbanyak. Kota Tarakan memiliki jumlah paling sedikit yakni hanya 20 pada tahun 2011 dan 2012.

Tabel 2.3.106
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Jumlah LPM Tahun 2008-2013

Kabupaten/ Kota	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Jumlah LPM					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	81,43			81	81	
Malinau	108	108	109	109	109	
Nunukan				240	240	
Tana Tidung	27	23	23	23	23	
Tarakan				20	20	
Prov. Kalimantan Utara				**94**	**94**	

Sumber:
1) *Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2010, 2013*
2) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2011, 2012*
3) *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2007, 2009, 2013*
4) *Database Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2012*

2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kelompok binaan PKK pada setiap kabupaten/kota. Pada indikator ini hanya tersedia informasi Kabupaten Nunukan saja. Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan penurunan jumlah kelompok binaan PKK, yakni 3,13 pada tahun 2012 dan 2,84 pada tahun 2013. Sedangkan untuk empat kabupaten/kota lainnya tidak dapat ditunjukkan perkembangannya karena tidak ada informasi yang tersedia.

3. Jumlah LSM

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan jumlah LSM pada setiap kabupaten/kota. Informasi yang tersedia menjelaskan bahwa ada penurunan jumlah LSM di kabupaten/kota. Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau mendominasi jumlah LSM secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Utara. Di Kabupaten Malinau pada tahun 2011-2013 terjadi penurunan terbesar jumlah LSM dari 14 menjadi tidak ada. Sementara perkembangan jumlah LSM di Kabupaten Bulungan cukup berfluktuatif dari 2 (tahun 2007), turun menjadi 12 (tahun 2008), naik menjadi 27 (tahun 2010), kemudian turun menjadi 1 (tahun 2011). Jumlah LSM di Kabupaten Tana Tidung sangat sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya, hal ini dapat dipahami mengingat kabupaten ini merupakan daerah otonom baru yang sedang mulai tumbuh dan bekembang.

Tabel 2.3.107
Jumlah LSM yang Aktif Tahun 2008-2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah LSM yang Aktif					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	2	17	27	1	3	
Malinau	13			14	0	
Nunukan	31	32	33	35	33	3
Tana Tidung			1	0	1	
Tarakan	33			12	4	
Prov. Kalimantan Utara				**62**	**41**	

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2010*
2) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2011*
3) *Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2007, 2009, 2013*
4) *Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2012*
5) *Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2010, 2007*

4. PKK Aktif

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan jumlah PKK aktif pada setiap kabupaten/kota. Berdasarkan indikator jumlah PKK aktif terlihat bahwa Kabupaten Malinau memiliki kecenderungan perkembangan menurun sejak tahun 2009 dan cenderung stabil pada tahun 2011 sampai 2012. Kabupaten Nunukan memiliki

kecenderungan peningkatan jumlah PKK aktif yang cukup tinggi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Sedangkan untuk tiga kabupaten/kota lainnya yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan memiliki kecenderungan jumlah PKK yang stabil.

Tabel 2.3.108
Jumlah PKK Aktif Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK Aktif					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	10			10		
Malinau	400	108		122	122	
Nunukan			18		43	201
Tana Tidung			20	27	27	
Tarakan		25	25	26	25	25
Prov. Kalimantan Utara						

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2010*
2) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2011*
3) *LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012*
4) *LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010,2011, 2012, 2013*
5) *Data Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2012*
6) *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2009, 2013*
7) *Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2010*

Keterangan: Jumlah PKK aktif di tingkat Provinsi Kalimatan Utara tidak dapat dijumlahkan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun.

5. Posyandu Aktif

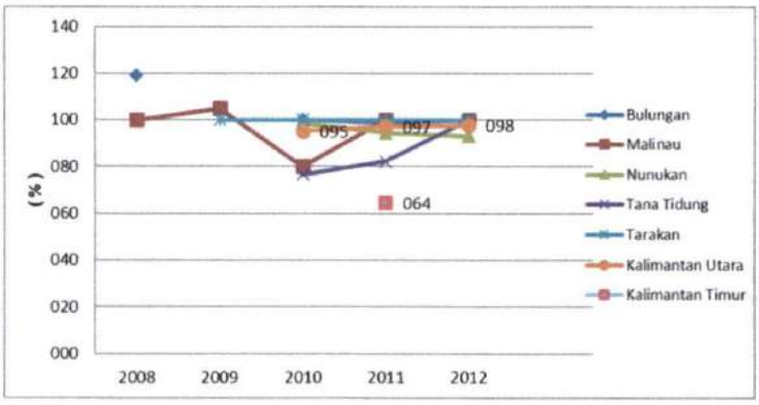
Posyandu adalah salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang merupakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dan diselenggarakan dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Indikator posyandu aktif melihat jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2.3.109
Posyandu Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (%)

Kabupaten	Posyandu Aktif				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	119,11	n/a	100,00	98,82	100,00
Malinau	100,00	104,85	80,00	100,00	100,00
Nunukan	n/a	n/a	98,35	94,47	93,18
Tana Tidung	n/a	n/a	76,67	82,14	100,00
Tarakan	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
Prov.Kalimantan Utara	-	-	**95,15**	**97,22**	**97,77**
Prov. Kalimantan Timur	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**64,44**	**n/a**

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, Profil Kesehatan Kalimantan Timur, Profil Kesehatan Kabupaten

Berdasarkan data dari kabupaten dan kota diperoleh data satu provinsi. Di Provinsi Kalimantan Utara, peesentase posyandu aktif dari tahun 2010-2012 mengalami kenaikan dari 95% hingga 97%. Pada tahun 2012, presentase posyandu aktif di provinsi ini sebesar 97,7% hal ini menunjukkan dari 673 posyandu yang ada hanya 658 posyandu yang masih tetap menjalankan kegiatannya. Angka ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 yang hanya mencapai 64.44% untuk indikator posyandu aktif. Target MDGs yang ditetapkan oleh Kabupaten Malinau untuk indikator Posyandu Aktif adalah sebesar 90% di tahun 2013. Berdasarkan target yang ditetapkan Kabupaten Malinau tersebut, baik Kabupaten Malinau maupun kabupaten yang lainnya telah mencapai target.



Gambar 2.3.73
Grafik Presentase Posyandu Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: *Hasil Analisis 2014*

6. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyrakat

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan perbandingan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Data yang tersedia untuk menggambarkan kinerja indikator swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat cukup terbatas, hanya Kabupaten Nunukan yang memiliki data tersebut, meskipun hanya tahun 2012-2013. Kabupaten Nunukan mengalami kecenderungan kenaikan jumlah swadaya masyarakat dari jumlah 46 pada tahun 2012 menjadi 53 pada tahun 2013.

7. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah aktivitas pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Perkembangan kinerja indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat belum dapat dijelaskan secara keseluruhan dikarenakan minimnya informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia terkait pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat hanya ada di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan memiliki program pemberdayaan masyarakat yang cenderung mengalami penurunan cukup signifikan, yakni 176 program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 turun menjadi 82 program.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program.

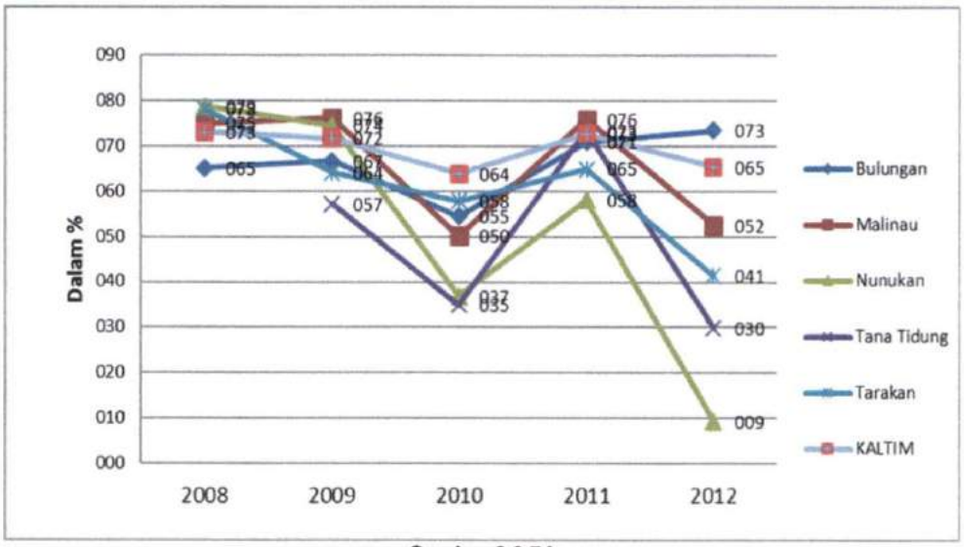
Tabel 2.3.110
Rasio Akseptor KB di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2013

Kabupaten	Rasio Akseptor KB terhadap PUS (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	65,05	66,64	54,50	70,89	73,40
Malinau	74,93	76,13	50,11	75,85	52,47
Nunukan	78,70	74,46	36,83	58,01	9,33
Tana Tidung		57,16	34,96	73,32	29,95
Tarakan	78,08	64,04	57,74	64,88	41,36
Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
Prov. Kalimantan Timur	**73,06**	**71,62**	**63,76**	**72,65**	**65,31**

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2008-2013

Pada tahun 2012 terjadi penurunan rasio akseptor KB dan hampir terjadi di semua kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Bulungan yang persentasenya tetap naik. Jika dibandingkan dengan

Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang hampir mendekati Kalimantan Timur adalah Kabupaten Malinau dan kabupaten Bulungan.



Gambar 2.3.74
Grafik Presentase Akseptor KB di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

2. Cakupan Peserta KB Aktif

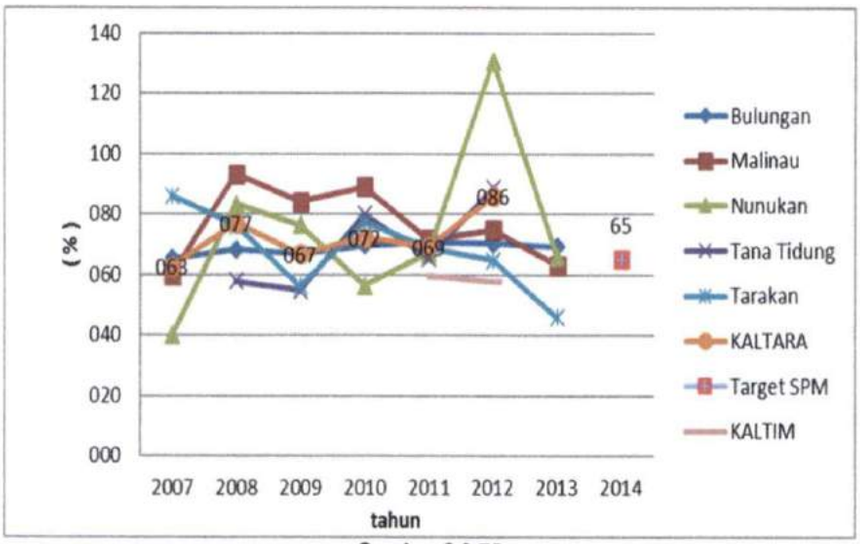
Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014.

Tabel 2.3.111
Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2013

Kabupaten	Peserta KB Aktif (%)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	65,22	68,16	66,64	69,58	70,89	70,14	69,31
Malinau	60,02	93,10	84,01	89,04	71,60	74,77	63,18
Nunukan	40,01	83,34	76,46	56,28	67,10	130,67	65,79
Tana Tidung	-	57,66	54,85	79,92	65,39	88,72	
Tarakan	85,98	76,24	56,08	77,28	68,73	64,61	45,85
Prov. Kalimantan Utara	62,62	76,93	66,85	72,25	69,16	85,92	
Prov. Kalimantan Timur					59,50	57,77	

Sumber: Kabupaten Dalam angka, Profil Kesehatan Kabupaten, Profil Kesehatan Kalimantan Timur

Pada tahun 2012 jumlah peserta KB aktif di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebanyak 83.657 orang dibandingkan dengan 97.368 PUS sehingga cakupannya sebesar 85,92%. Angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 69,16% dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 83.657 dan PUS sebanyak 97.368.



Gambar 2.3.75
Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus.

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Kebutuhan dasar menurut BKKBN yaitu:

a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.
b. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
c. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik.
d. Bila anggota keluarga yang sakit di bawa ke sarana kesehatan
e. Pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana pelayanan kotrasepsi.
f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

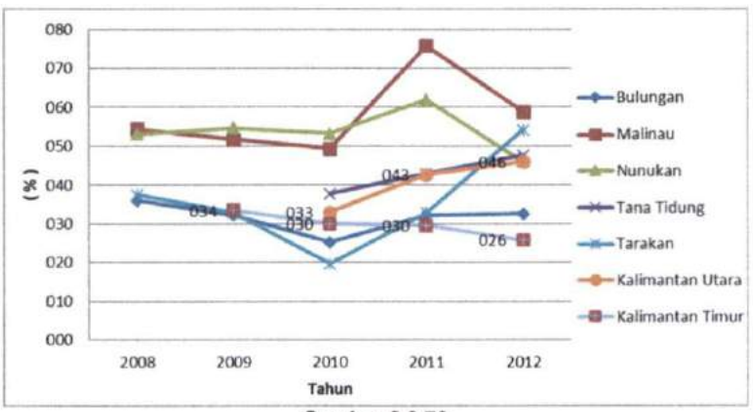
Indikator ini dapat memberikan gambaran perbandingan banyaknya keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I dengan jumlah seluruh keluarga yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi persentasenya maka tingkat kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut semakin rendah.

Berdasarkan kriteria keluarga sejahtera yang diberikan oleh BKKBN, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang semakin meningkat sejak 2010 hingga 2013. Dari lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang kesejahteraan keluarganya paling rendah pada tahun 2012. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami trend menurun sejak tahun 2009-2012 sehingga di tahun 2012 berada pada posisi 25,87%, Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di atasnya yaitu pada posisi 46,03% tahun 2012.

Tabel 2.3.112
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2012

Kabupaten/Kota	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	36,01	32,23	25,26	32,23	32,63
Malinau	54,49	51,75	49,44	75,78	58,88
Nunukan	53,22	54,65	53,25	62,02	46,06
Tana Tidung	n/a	n/a	37,82	42,99	47,62
Tarakan	37,52	32,89	19,66	32,89	54,11
Prov. Kalimantan Utara	-	-	**33,06**	**42,76**	**46,03**
Prov. Kalimantan Timur					

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, Kalimantan Timur Dalam Angka



Gambar 2.3.76
Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

H. Perhubungan

1. Jumlah Terminal, Pelabuhan, dan Bandara

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

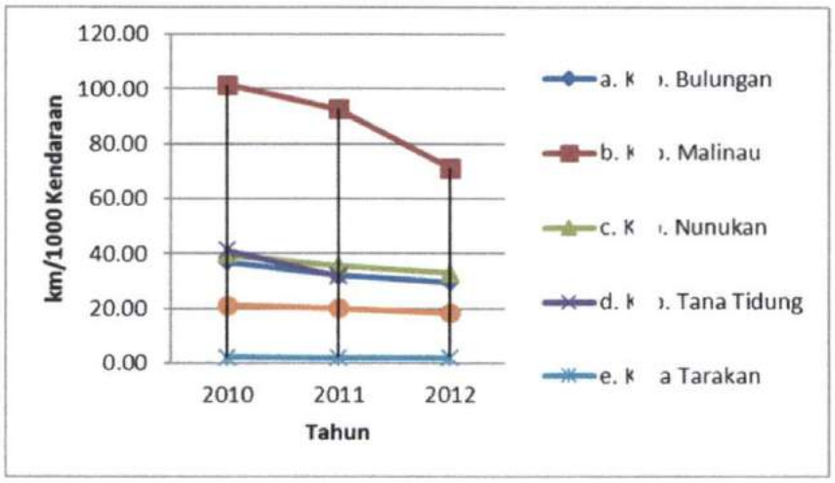
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah indikator yang menunjukkan tingkat pelayanan jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada. Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus panjang total kendaraan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada di kabupaten.

Tabel 2.3.113
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	50,22	44,80	37,11	32,06	29,80
Malinau	147,37	117,10	101,69	92,81	71,35
Nunukan	36,67	38,88	39,61	35,81	33,03
Tana Tidung	n/a	n/a	20,02	41,45	31,86
Tarakan	2,43	2,20	2,37	2,18	2,01
Prov. Kalimantan Utara			21,32	20,29	18,56

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Dalam kurun 2009-2012 panjang jalan per 1000 kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan yang meningkat drastis setiap tahunnya tidak diiringi dengan pembangunan jalan yang memadai. Panjang jalan yang disediakan Provinsi Kalimantan Utara per 1000 kendaraan adalah 18,56 km per 1000 kendaraan.



Gambar 2.3.77
Grafik Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan data BPS, total panjang jalan pada tahun 2012 adalah 501.969 Km, sedangkan jumlah kendaraan di Indonesia pada tahun 2012 adalah 94.373.324 sehingga rasio panjang jalan/jumlah kendaraan di Indonesia adalah 5,31 km per 1000 kendaraan. Rasio panjang jalan/jumlah kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi dari rasio panjang jalan/jumlah kendaraan di Indonesia.

b. Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi air

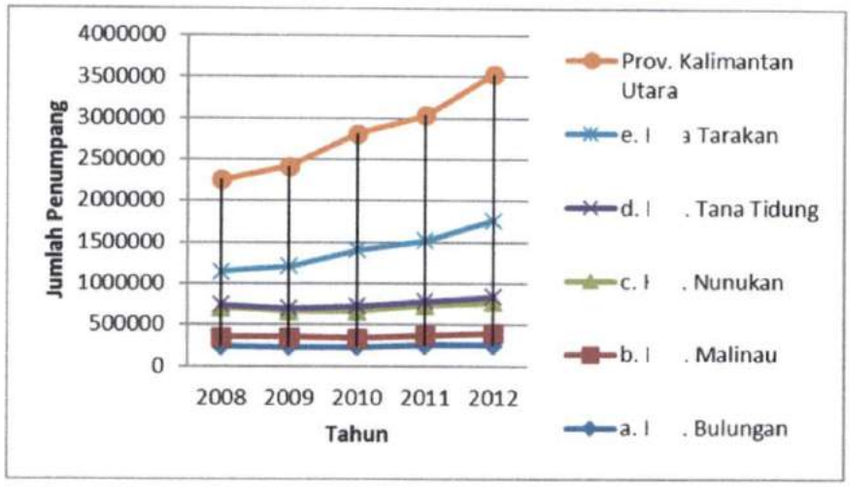
Jumlah arus penumpang sungai adalah jumlah penumpang transportasi air yang dalam satu tahun di kabupaten. Indikator ini sebagai penunjuk peningkatan/penurunan jumlah penumpang transportasi air di Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya.

Tabel 2.3.114
Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Air				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	239.941	231.786	232.324	252.000	252.000
Malinau	110.883	117.485	107.185	121.115	145.286
Nunukan	353.740	314.762	324.322	357.538	367.855
Tana Tidung	34.082	34.082	63.431	50.882	73.316
Tarakan	405.466	512.657	680.148	736.281	930.327
Prov. Kalimantan Utara	**1.110.030**	**1.210.772**	**1.407.410**	**1.517.816**	1.768.784

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Jumlah arus penumpang sungai di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2008-2012, angka terakhir menunjukkan jumlah penumpang angkutan sungai sebanyak 1.766.784 penumpang per tahun.



Gambar 2.3.78
Grafik Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan Statistik Kementerian Perhubungan Tahun 2012, jumlah arus penumpang penyeberangan dan sungai rata-rata di pelabuhan Indonesia adalah 431.425 penumpang pada tahun 2012. Sehingga, pelabuhan di kabupaten/kota dengan arus penumpang transportasi air yang sudah melebihi rata-rata nasional adalah Kota Tarakan dengan 930.327 penumpang pada tahun 2012. Sedangkan 4 kabupaten lain masih di bawah rata-rata nasional.

c. Jumlah Pelabuhan Laut dan Sungai

Jumlah pelabuhan laut merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Hingga tahun 2012 terdapat enam pelabuhan utama yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.115
Jumlah Pelabuhan Laut dan Sungai di Provinsi Kalimantan Utara 2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Pelabuhan	Nama Pelabuhan
Bulungan	2	Bunyu dan Tanjung Selor
Malinau*	1	Kelapis
Nunukan	2	Nunukan dan Sungai Nyamuk
Tana Tidung	1	Tideng Pele
Tarakan	4	Tengkayu I, Tengkayu II. Malundung, dan Juwata Laut
Prov. Kalimantan Utara	**10**	

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan dalam Angka 2013
2) Kabupaten Malinau dalam Angka 2013
3) Kabupaten Nunukan dalam Angka 2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2013
5) http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan

*Keterangan : * Pelabuhan Sungai*

Dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2012, jumlah pelabuhan laut dan sungai di Provinsi Kalimantan Utara tidak mengalami penambahan pelabuhan, sehingga jumlah pelabuhan laut dan sungai di Provinsi Kalimantan Utara jumlahnya tetap 10 pelabuhan.



Gambar 2.3.79
Dermaga Malinau
Sumber : Data Survey Lapangan (Maret, 2014)

d. Transportasi air

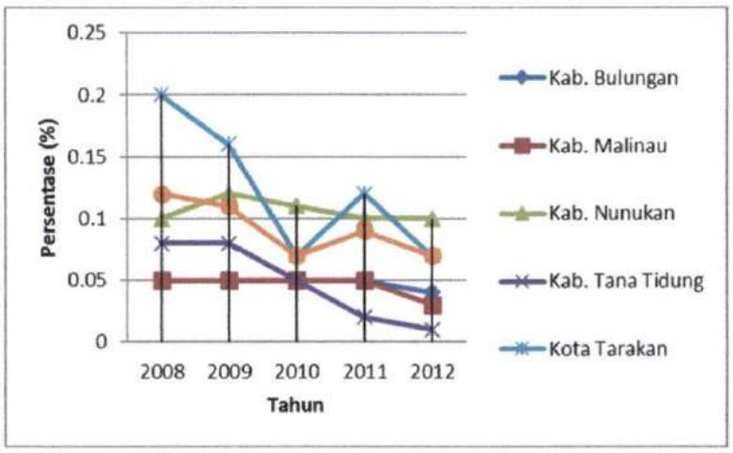
Transportasi air adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan transportasi air terhadap jumlah penumpang transportasi air. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah armada transportasi air dibandingkan dengan jumlah penumpang transportasi air per tahun per kabupaten.

Tabel 2.3.116
Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Transportasi Air Provinsi Kalimantan Utara (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Malinau	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
Nunukan	0,10	0,12	0,11	0,10	0,10
Tana Tidung	0,08	0,08	0,05	0,02	0,01
Tarakan	0,20	0,16	0,07	0,12	0,07
Prov. Kalimantan Utara	**0,12**	**0,11**	**0,07**	**0,09**	**0,07**

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Pada tahun 2012 rasio ketesediaan armada transportasi air di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 0,07%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah armada transportasi air belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang ada. Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten dengan armada transportasi air tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang ada, yaitu sebesar 0,1%.



Gambar 2.3.80
Grafik Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.81
Aktivitas di Pelabuhan Tarakan
Sumber : Data Survey Lapangan (Maret, 2014)

e. Jumlah Pelabuhan Udara

Jumlah pelabuhan udara merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelabuhan udara yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Hingga tahun 2012 jumlah pelabuhan udara yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 28 buah bandara. Bandara di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan hanya melayani penerbangan domestik dan perintis, sedangkan bandara yang terletak di Kota Tarakan yakni Bandara Juwata melayani hingga rute internasional.

Tabel 2.3.117
Jumlah Pelabuhan Udara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Pelabuhan Udara				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	4	4	4	4	4
Malinau	12	12	12	12	12
Nunukan	11	11	11	11	11
Tana Tidung	-	-	-	-	-
Tarakan	1	1	1	1	1
Prov. Kalimantan Utara	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013

3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013



Gambar 2.3.82
Bandara Malinau
Sumber : Data Survey Lapangan (Maret, 2014)

f. Angkutan Darat

Angkutan darat merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan angkutan darat terhadap jumlah penumpang yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat.

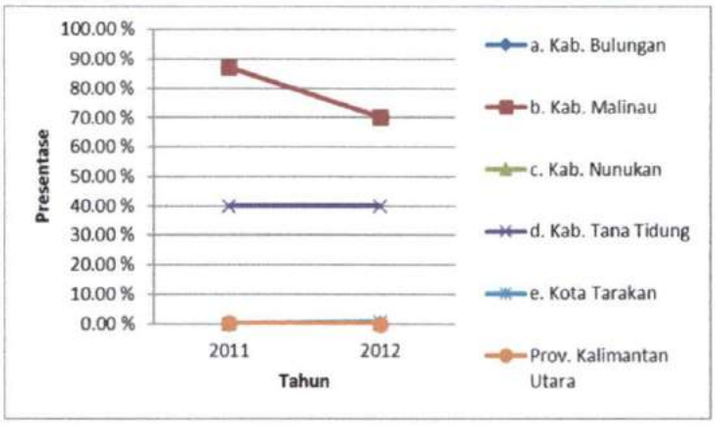
Tabel 2.3.118
Angkutan Darat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Angkutan Darat Provinsi Kalimantan Utara (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				0,00	0,00
Malinau	71	72		87	70
Nunukan			0,33	0,33	0,28
Tana Tidung			18	40	40
Tarakan		2,69	0,13	0,08	53,13
Prov. Kalimantan Utara				**0,2**	**0.10**

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Bulungan 2009-2013
2) LPPD Kabupaten Malinau 2009-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan 2009-2013
4) LPPDKabupaten Tana Tidung 2009-2013
5) LPPD Kota Tarakan 2009-2013

*Keterangan : *merupakan angka perkiraan*

Pada tahun 2012 ketersediaan angkutan darat di Provinsi Kalimantan Utara berada pada angka 0,1%. Rasio ketersediaan angkutan darat tertinggi berada pada Kota Tarakan yang menyediakan 53,13% angkutan darat dibandingkan dengan jumlah seluruh penumpang.



Gambar 2.3.83
Grafik Angkutan Darat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.84
Terminal Boom Panjang Tarakan
Sumber : Data Survey Lapangan (Maret, 2014)

2. Jumlah Kecelakaan

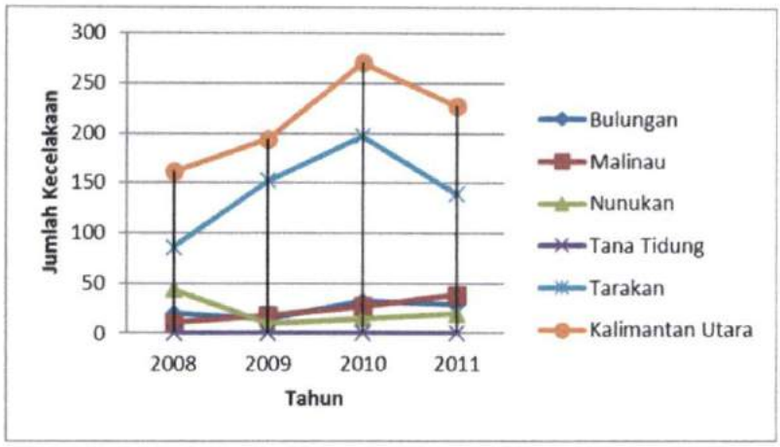
Jumlah kecelakaan merupakan indikator yang menunjukkan berapa jumlah angka kecelakaan yang tercatat setiap tahunnya. Dari ke lima daerah di Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Tana Tidung yang datanya belum tersedia. Jumlah kecelakaan di Provinsi Kalimantan Utara dapat ditunjukkan dengan tabel berikut.

Tabel 2.3.119
Jumlah Kecelakaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecelakaan				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	20	14	32	29	
Malinau	11	18	27	39	
Nunukan	44	10	15	20	
Tana Tidung	-	-	-	-	
Tarakan	86	152	197	139	
Prov. Kalimantan Utara	**161**	**194**	**271**	**227**	

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013
5) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
6) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Jumlah kecelakaan yang terjadi selama kurun waktu 2008-2011 menunjukkan peningkatan. Meskipun data penyebab utama kecelakaan tidak diperoleh, angka-angka tersebut dapat dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dengan infrastruktur transportasi. Permasalahan rancangan (struktur dan geometri) jalan yang terjadi memberi kontribusi terhadap keselamatan jalan.



Gambar 2.3.85
Grafik Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Hasil Analisis 2014

I. Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah Sarana Komunikasi

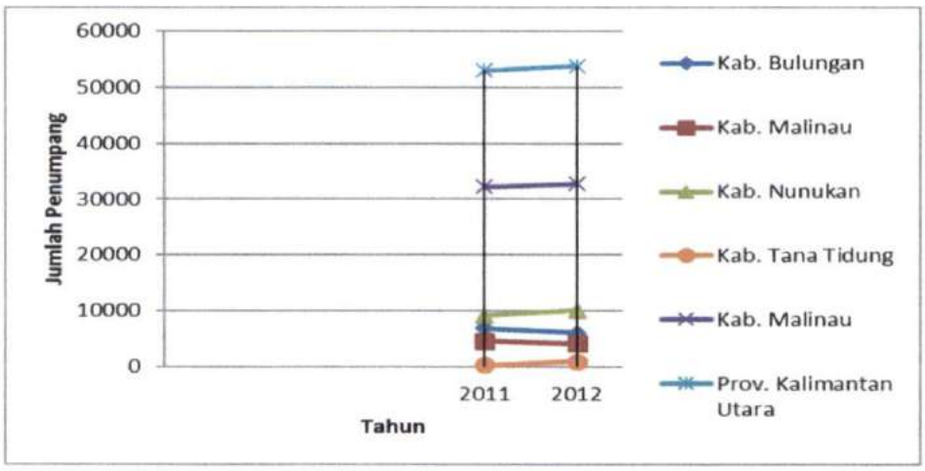
Jumlah sarana komunikasi dan informatika adalah Indikator yang menunjukkan jumlah sarana komunikasi di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator ini menunjukkan jumlah total sarana komunikasi suara satuan langsung, komunikasi data, dan satuan sambungan.

Tabel 2.3.120
Jumlah Sarana Komunikasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Komunikasi Provinsi Kalimantan Utara (Unit)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	3.644	5.546	5.546	6.859	6.038
Malinau	1.603	3.773	3.773	4.577	4.135
Nunukan	n/a	9.333	9.333	9.139	9.989
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	215	938
Tarakan	n/a	32.609	32.607	32.234	32.733
Prov. Kalimantan Utara				53.024	53.833

Sumber :
1) Bulungan dalam angka tahun 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012 dan 2013.
2) Malinau dalam angka 2011, 2013.
3) Nunukan dalam angka 2012, 2013.
4) Tana Tidung dalam angka 2012 dan 2013.
5) Tarakan dalam angka 2013,

Pada tahun 2011 dan 2012 adalah 53.024 dan 53.833 cenderung mengalami kenaikan dalam kurun 2011-2012. Kota Tarakan menjadi daerah dengan ketersediaan sarana komunikasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara dengan 32733 sarana komunikasi pada tahun 2012.



Gambar 2.3.86
Grafik Jumlah Sarana Komunikasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2012
Sumber : Analisis Data 2014

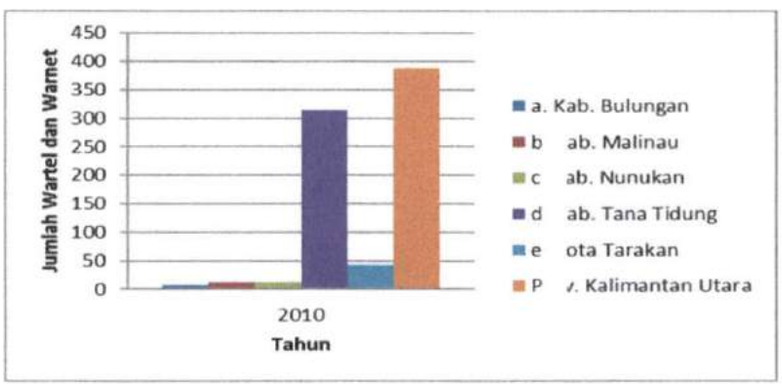
2. Jumlah Wartel/Warnet

Jumlah wartel/warnet adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan warnet di setiap kabupaten. Jumlah wartel/warnet di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2010 adalah 1 wartel dan warnet per seribu penduduk.

Tabel 2.3.121
Jumlah Wartel dan Warnet di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2009

Kabupaten/Kota	Jumlah Wartel dan Warnet Provinsi Kalimantan Utara				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	0,17	0,06	0,06	0,26	0,01
Malinau	0,21	0,20	0,19	0,28	0,16
Nunukan		0,09	0,09	0,19	0,11
Tana Tidung			20,65		
Tarakan		0,62	0,21	0,55	0,40
Prov. Kalimantan Utara			0.73		

Sumber :
1) Bulungan dalam angka tahun 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012 dan 2013.
2) Malinau dalam angka 2011, 2013.
3) Nunukan dalam angka 2012, 2013.
4) Tana Tidung dalam angka 2012 dan 2013.
5) Tarakan dalam angka 2013



Gambar 2.3.87
Grafik Jumlah Wartel dan Warnet di Provinsi Kalimantan Utaran Tahun 2010
Sumber: Hasil Analisis 2014

3. Pameran/Expo

Berikut merupakan data pameran/expo yang diselenggarakan oleh kabupeten di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.122
Pameran/Expo di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Pameran/Expo (Kali)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				1	3
Malinau	1	1		8	1
Nunukan			2	2	4
Tana Tidung			0	1	1
Tarakan		6	5	20	20
Prov. Kalimantan Utara				32	29

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Malinau dalam Angka 2008-2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan dalam Angka 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan dalam Angka 2008-2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010-2012
5) LPPD Kota Tarakan dalam Angka 2009-2013

Jumlah pameran/expo yang diadakan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2011 dan 2012 adalah 32 dan 29 kali pameran/expo per tahun.

4. Penyiaran TV

Berikut adalah tabel jumlah data penyiaran TV di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.123
Penyiaran TV di Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi	Stasiun Televisi
Kalimantan Utara	1.PT Global TV
	2. PT Lativi Medikarya Menado Samarinda
	3. PT RCTI 8
	4. PT Trans Tujuh Pontianak
	5. PT Trans Tujuh Mataram Smarinda
	6. PT SCTV
	7. PT Metro
	8. PT Cakrawala Andalas TV ANTV
	9. PT Indosiar
	10. PT TPI Sembilan / MNC

Sumber : Database Pembangunan Kalimantan Timur 2013

Terdapat 10 Stasiun TV yang telah beroperasi di Kalimantan Utara, diantaranya adalah PT Global TV, PT Lativi Mediakarya Menado Samarinda, PT. RCTI 8, PT Trans Tujuh Pontianak, PT SCTV, PT Metro, PT SCTV, PT. Cakrawala Andalas TV (ANTV), PT Indosiar, PT. TPI Sembilan/MNC. Provinsi Kalimatan Utara juga memiliki penyiaran TV lokal di Kota Tarakan, yakni Tarakan TV.

5. Website Milik Pemerintah

Berikut adalah data ketersediaan website milik pemerintah di kabupaten maupun Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun tahun 2008-2012. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki website, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi melalui media elektronik.

Tabel 2.3.124
Website Milik Pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Website Milik Pemerintah				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan				Ada	Ada

Kabupaten/Kota	Website Milik Pemerintah				
	2008	2009	2010	2011	2012
Malinau	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Nunukan		Ada	Ada	Ada	Ada
Tana Tidung		Ada	Ada	Ada	Ada
Tarakan		Ada	Ada	Ada	Ada
Provinsi Kalimantan Utara				Ada	Ada

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Malinau dalam Angka 2008-2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan dalam Angka 2008-2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan dalam Angka 2008-2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2010-2012
5) LPPD Kota Tarakan dalam Angka 2009-2013

6. Surat Kabar yang Beredar

Berikut adalah data surat kabar yang beredar di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.125
Jumlah Surat Kabar yang Beredar di Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi	Jumlah Surat Kabar yang Beredar
Kalimantan Utara	1. Kaltim Pos
	2. Tribun Kaltim
	3. Koran Kaltim
	4. Pos Kota Kaltim
	5. Swara Kaltim

Sumber: Database Pembangunan Kalimantan Timur 2013

Terdapat 5 jenis surat kabar yang beredar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kaltim Pos, Tribun Kaltim, Koran Kaltim, Pos Kota Kaltim, dan Swara Kaltim. Terdapat pula media lokal (surat kabar lokal) yang beredar di Kota Tarakan yakni Surat Kabar Harian (SKH) Radar Tarakan.

J. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, indikator koperasi aktif menjadi salah satu indikator dalam fokus pelayanan umum yang harus disertakan sebagai bahan analisis kondisi wilayah.

Jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, koperasi yang ada adalah sebanyak 478 unit. Apabila dikaitkan dengan rasio pelayanan per 1000 jiwa, maka rasio pelayanan koperasi pada tahun 2008 adalah sebesar 1,02. Hingga tahun 2012, jumlah koperasi terus bertambah hingga mencapai jumlah sebanyak 717 unit koperasi dengan rasio lingkup layanan sebesar 1,26.

Apabila dilihat secara spasial, kecenderungan perkembangan jumlah koperasi di masing-masing kabupaten sejalan dengan lingkup provinsi, yaitu perkembangan positif terjadi secara stabil. Sementara apabila dilihat dari sebarannya, jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2012, jumlah koperasi di Nunukan mencapai 35,4% dari total koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan jumlah koperasi paling sedikit adalah Kabupaten Malinau dengan persentase jumlah koperasi kurang dari 20% dari total jumlah koperasi yang ada.

Tabel 2.3.126
Jumlah Koperasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi (unit)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	121	125	131	140	137
Malinau	70	73	75	79	92
Nunukan	152	160	168	199	254
Tana Tidung	-	15	18	21	26
Tarakan	135	142	156	182	208
Prov. Kalimantan Utara	478	515	548	621	717

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2010, 2011, dan 2013

Perbedaan jumlah sebenarnya tidak dapat secara langsung menunjukkan kemajuan indikator ini karena kebutuhan koperasi masing-masing daerah memang tidak sama tergantung dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap rasio pelayanan koperasi dari masing-masing kabupaten.

Rasio pelayanan koperasi per 1000 jiwa penduduk dari tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan. Rata-rata kabupaten/kota menunjukkan rasio di atas angka satu, itu artinya jumlah koperasi sudah cukup memadahi di kabupaten/kota ini. Satu-satunya kabupaten/kota yang memiliki nilai rasio di bawah satu adalah Kota Tarakan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dilihat dari standar pelayanan per 1.000 orang, maka dapat dikatakan bahwa koperasi di kota ini masih belum mencukupi dari segi kuantintas. Kondisi ini menjadi ironi mengingat bahwa Kota Tarakan merupakan pusat perokonomian Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya hingga tahun 2012, rasio Kota Tarakan sudah semakin baik dan hampir mencapai angka satu.

Tabel 2.3.127
Rasio Pelayanan Koperasi per 1000 Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rasio Pelayanan				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	1,10	1,11	1,16	1,20	1,14
Malinau	1,24	1,23	1,20	1,20	1,38
Nunukan	1,18	1,21	1,19	1,29	1,65
Tana Tidung	-	1,03	1,18	1,28	1,52
Tarakan	0,83	0,74	0,81	0,89	0,99
Prov Kalimantan Utara	1,02	1,01	1,04	1,11	1,26

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Selanjutnya setelah membahas mengenai rasio pelayanan koperasi, maka perlu dilakukan analisis terhadap data persentase koperasi aktif agar dapat dilihat seperti apa produktivitas koperasi dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun sebelumnya diketahui bahwa jumlah koperasi dari tahun ke tahun terus meningkat, akan tetapi apabila dilihat dari persentase koperasi aktif pada tahun 2013 yang hanya sebesar 58% maka peningkatan jumlah bukanlah representasi dari kemajuan perkoperasian di Provinsi Kalimantan Utara.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, besarnya persentase koperasi aktif Provinsi Kalimantan Utara masih lebih kecil dengan perbedaan sebesar 8%. Hal ini menjadi wajar karena meskipun pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Timur memiliki misi sebagai provinsi penggerak koperasi, akan tetapi lima dari kabupaten/kota yang saat ini tergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara tidak masuk ke dalam kelompok kabupaten/kota yang dijadikan basis penggerak koperasi.

Tabel 2.3.128
Data Perkoperasian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Aktif (unit)	Tidak Aktif (unit)	Total Koperasi	Anggota	Modal Sendiri (Juta rupiah)	Modal Luar (juta rupiah)	Volume Usaha (juta rupiah)	Asset (Juta rupiah)	Persentase Koperasi Aktif (%)
Bulungan	84	57	141	10.529	14.230	10.438	23.056	23.654	60
Malinau	64	33	97	9.593	14.975	3.822	76.172	-	66
Nunukan	153	136	289	11.073	2.153.000	2.090	4.094	2.037	53
Tana Tidung	16	4	20	758	577	-	679	502	80
Tarakan	109	79	188	18.331	45.462	71.294	67.957	115.441	58
Kalimantan Utara	**426**	**309**	**735**	**50.284**	**2.228.244**	**87.644**	**171.958**	**141.634**	**58**
Kalimantan Timur	**4.290**	**2.205**	**6.495**	**426.665**	**4.960.114**	**1.174.995**	**1.735.760**	**1.342.462**	**66**

Sumber: *Dinas Industri, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014*

Keterangan: *Data Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 9 kabupaten/kota (sudah dipisahkan dari data provinsi Kalimantan Timur)*

Apabila dilihat dari lingkup kabupaten/kota secara *time series*, hanya tersedia data persentase koperasi aktif dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Apabila dilihat dari tren perkembangannya, diketahui bahwa ketiga kabupaten tersebut menunjukkan tren positif dalam perkembangan persentase koperasi aktif. Pada tahun 2011, persentase koperasi aktif di ketiga kabupaten ini masih di bawah 50%. Sementara pada tahun 2013, persentase koperasi aktif rata-rata telah mencapai 58%. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang tidak begitu cepat, namun tren positif ini tetap merupakan potensi yang bagus dalam perkoperasian di Provinsi Kalimantan Utara guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

Sementara untuk Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan yang hanya memiliki data tahun 2009, pada tahun tersebut ditunjukkan bahwa persentase koperasi aktif di Kabupaten Tana Tidung jauh melebihi yang lain, yaitu mencapai 80%. Hal ini wajar mengingat kabupaten ini resmi terbentuk pada tahun tersebut sehingga mungkin perkoperasian masih sangat aktif pada masa awal pemerintahan. Sedangkan untuk Kota Tarakan, persentase koperasi aktif pada tahun 2009 terhitung cukup rendah, yaitu masih di bawah 50%.

Tabel 2.3.129
Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota	Status Koperasi	Jumlah Koperasi			
		2009	2010	2011	2012
Bulungan	Aktif	60	55	57	136
	Tidak Aktif	80	96	102	60
	Persentase (%)	42,86	36,4	35,8	69,4
Malinau	Aktif	40	n.a	40	50
	Tidak Aktif	38	n.a	47	40
	Persentase (%)	51,28	n.a	46,0	55,6
Nunukan	**Aktif**	**124**	**117**	**121**	**138**
	Tidak Aktif	100	129	132	138
	Persentase (%)	54,9	47,6	47,8	50,0
Tana Tidung	Aktif	16	n.a	n.a	n.a
	Tidak Aktif	4	n.a	n.a	n.a
	Persentase (%)	80,00	n.a	n.a	n.a
Tarakan	Aktif	87	n.a	n.a	n.a
	Tidak Aktif	120	n.a	n.a	n.a
	Persentase (%)	42,03	n.a	n.a	n.a

Sumber:
1) Database koperasi per desa Kabupaten Nunukan Tahun 2013.
2) Profil Ekonomi Malinau 2011, 2012 dan 2013.
3) Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bulungan, 2013.
4) Database Koperasi Kabupaten Malinau Tahun 2013

Catatan: Indikator persentase koperasi aktif kabupaten/kota tidak dapat diakumulasi menjadi indikator provinsi karena data yang tersedia hanya sebatas keluaran akhir dari formula perhitungan data awal (bukan data mentah yang dapat diolah)

Selanjutnya setelah melakukan analisis terhadap koperasi aktif, analisis berikutnya adalah terhadap jenis-jenis koperasi yang ada serta tren perkembangannya. Terdapat empat kategori koperasi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu (1) Koperasi Unit Desa (KUD), (2) Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, (3) Koperasi Simpan Pinjam dan (4) Koperasi Non KUD Lainnya.

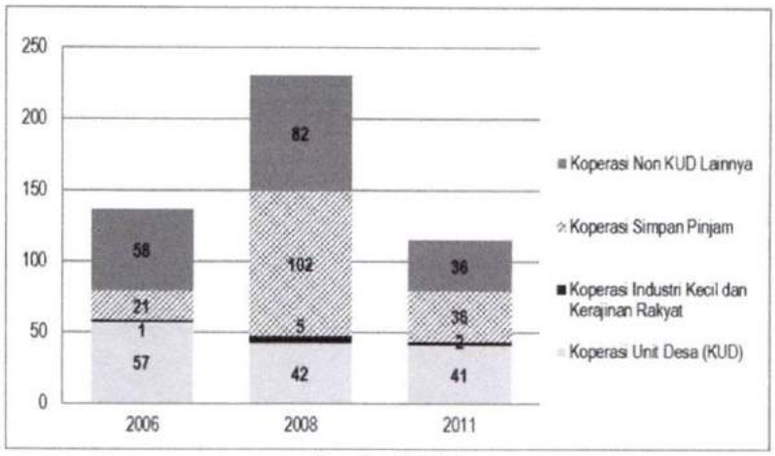
Apabila dilihat secara umum pada perkembangan jumlah masing-masing jenis koperasi, terdapat fluktuasi yang tidak terarah pada tahun 2006, 2008 dan 2011. Tidak ada jenis koperasi yang benar-benar mendominasi akibat fluktuasi ini. Misalnya saja pada tahun 2006, jenis koperasi dengan jumlah terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara adalah adalah koperasi non KUD. Sementara pada tahun 2011, jumlah koperasi KUD lebih dominan dibandingkan dengan koperasi lainnya.

Tabel 2.3.130
Jenis-Jenis Koperasi dan Perkembangannya
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006, 2008 dan 2011

Kabupaten/Kota	Jenis Koperasi	Tahun		
		2006	2008	2011
Bulungan	Koperasi Unit Desa (KUD)	28	10	11
	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	0	4	0
	Koperasi Simpan Pinjam	3	15	14
	Koperasi Non KUD Lainnya	22	51	9
Malinau	Koperasi Unit Desa (KUD)	7	11	18
	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	0	1	0
	Koperasi Simpan Pinjam	2	13	5
	Koperasi Non KUD Lainnya	7	9	5
Nunukan	Koperasi Unit Desa (KUD)	19	10	9
	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	0	0	0
	Koperasi Simpan Pinjam	12	15	7
	Koperasi Non KUD Lainnya	11	9	16
Tana Tidung	Koperasi Unit Desa (KUD)	-	2	1
	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	-	0	0
	Koperasi Simpan Pinjam	-	0	1
	Koperasi Non KUD Lainnya	-	0	1
Tarakan	Koperasi Unit Desa (KUD)	3	9	2
	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	1	0	2
	Koperasi Simpan Pinjam	6	72	14
	Koperasi Non KUD Lainnya	18	13	5
Prov. Kalimantan Utara	Koperasi Unit Desa (KUD)	57	42	41
	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	1	5	2
	Koperasi Simpan Pinjam	21	102	36
	Koperasi Non KUD Lainnya	58	82	36

Sumber: Potensi Desa (Podes) Tahun 2006, 2008 dan 2011

Sedangkan apabila dilihat dari segi komposisi, koperasi dengan persentase yang relatif sangat sedikit dan memiliki perkembangan cukup lambat jika dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya adalah koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat. Apabila dikaitkan dengan permasalahan pada PDRB (sub bab sebelumnya) dimana diketahui bahwa nilai kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kalimantan Utara sangat kecil, maka strategi peningkatan kuantitas maupun kualitas koperasi serta persentase keaktifannya khususnya untuk jenis koperasi ini merupakan salah satu bentuk strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan sektor industri pengolahan.



Gambar 2.3.88
Grafik Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2013
Sumber: Hasil Analisis, 2014

2. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha menengah atau besar (bukan berupa cabang). UKM merupakan sebuah bentuk kegiatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan untuk membentuk sebuah perekonomian rakyat yang mandiri. Oleh karena itu, UKM menjadi salah satu indikator penting yang dimasukkan ke dalam kelompok fokus layanan urusan wajib.

Masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang berbeda dalam konteks perkembangan UKM yang ada. Kabupaten Bulungan pada tahun 2011 memiliki UKM sebanyak 1.882 unit dan berkembang menjadi 2.200 unit usaha pada tahun 2012. Sementara untuk Kabupaten Malinau, pada tahun 2009 UKM yang dimiliki tercatat sebanyak 1.114 unit usaha lalu pada tahun 2011 jumlah ini mengalami kenaikan 56% menjadi 1.741 unit usaha. Kabupaten Nunukan pada tahun 2012 memiliki UKM sebanyak 2.202 unit usaha. Sedangkan Kabupaten Tanan Tidung pada tahun 2011 tercatat memiliki UKM sebanyak 392 unit usaha. Sementara Kota Tarakan menunjukkan tren yang sedikit berbeda dari kabupaten lainnya, di saat terjadi peningkatan jumlah pada Kabupaten Bulungan dan Nunukan, perkembangan UKM pada kota ini malah menunjukkan tren negatif. Pada tahun 2011, jumlah UKM Kota Tarakan mencapai 2.764 unit usaha, namun pada tahun 2013 UKM ini hanya tinggal 713 unit usaha.

Tabel 2.3.131
Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah UKM (unit)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	n.a	n.a	1.882	2.163	2.200
Malinau	1114	1282	1741	n.a	n.a
Nunukan	n.a	76.730	84.821	2.202	n.a
Tana Tidung	n.a	n.a	392	n.a	n.a
Tarakan	351	1.681	2.764	274	713
Prov. Kalimantan Utara	**n.a**	**n.a**	**90.963**	**n.a**	**n.a**

Sumber:
1) Renstra Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2011
3) Rekapilutasi UMKM Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2013
4) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010, 2011 dan 2012
5) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012
6) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

3. Jumlah BPR/LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga perekonomian mikro yang memiliki peranan dalam membantu pendanaan/permodalan kegiatan perekonomian masyarakat. BPR menjadi salah satu indikator kinerja untuk fokus analisis pelayanan wajib karena lembaga keuangan ini memiliki tugas khusus dalam menyokong berjalannya usaha mikro, kecil dan menengah.

Pada tahun 2011, terdapat 41 unit BPR di Provinsi Kalimantan Utara. Unit-unit ini menyebar di lima kabupaten/kota yang ada. Jumlah BPR paling banyak ada di Kota Tarakan, yaitu sebanyak 18 unit atau 44% dari total BPR yang ada di provinsi ini. Terpusatnya jumlah BPR di Kota Tarakan merupakan suatu hal yang wajar karena kota ini merupakan pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara untuk kabupaten dengan unit BPR paling sedikit adalah di Kabupaten Tana Tidung, yaitu hanya sebanyak satu unit. Minimnya jumlah BPR di kabupaten ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung memperlukan perhatian khususnya dari segi pengadaan sarana keuangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.3.132
Jumlah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Jumlah		Rasio Pelayanan (jiwa/unit)
	BPR (unit)	Penduduk (jiwa)	
Bulungan	9	117.019	13.002
Malinau	4	66.052	16.513
Nunukan	9	154.269	17.141
Tana Tidung	1	16.356	16.356
Tarakan	18	204.281	11.349
Prov. Kalimantan Utara	41	557.997	13.610

Sumber:Potensi Desa Tahun 2011

Apabila dibandingkan dengan rasio pelayanan (jumlah penduduk dibagi jumlah BPR), Kota Tarakan tetap menempati urutan teratas sama halnya dalam segi ketersediaan BPR. Pada tahun 2011, tercatat bahwa rasio pelayanan BPR di Kota Tarakan adalah sebesar 11.349 jiwa/unit. Rasio ini lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang rata-rata memiliki rasio pelayanan di atas 13,5 ribu jiwa per unitnya. Sama halnya dengan indikator jumlah BPR, indikator rasio pelayanan BPR ini juga mengindikasikan bahwa rasio pelayanan BPR terendah dimiliki oleh Kabupaten Nunukan. Rasio pelayanan kabupaten ini mencapai 17.141 jiwa/unit dimana itu artinya sedikitnya jumlah BPR di kabupaten ini mengakibatkan masing-masing unit BPR menanggung beban pelayanan yang lebih besar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Melalui indikator jumlah unit maupun rasio pelayanan BPR, diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam segi pengembangan jasa pengkreditan untuk masyarakat.

4. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha menengah atau besar (bukan berupa cabang). Perbedaan usaha mikro dengan usaha kecil dan menengah hanya terletak pada nilai asset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian mikro yang potensial oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bulungan secara umum mengalami peningkatan yang positif. Pada tahun 2011, unit usaha mikro dan kecil adalah sebanyak 1.767 unit usaha. Jumlah ini pada tahun 2013 meningkat sebanyak 20,1% menjadi 2.170 unit usaha. Kabupaten Malinau pada tahun 2012 juga mengalami perkembangan dari segi jumlah yaitu sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, tren perkembangannya belum dapat dianalisis karena ketersediaan data hanya ada pada satu tahun

pendataan. Pada tahun 2012, jumlah usaha mikro dan kecil Kabupaten Nunukan adalah sebanyak 1.982 unit sedangkan untuk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 adalah sebanyak 392 unit.

Tren perkembangan jumlah usaha kecil dan mikro yang ditunjukkan oleh Kota Tarakan sedikit berbeda dengan kabupaten lainnya. Meskipun secara umum pada tahun 2009-2013 kota ini mengalami peningkatan positif, akan tetapi pada rentang waktu tersebut peningkatan yang terjadi sifatnya fluktuatif/labil.

Tabel 2.3.133
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	n.a	n.a	1.767	2.133	2.170
Malinau	1.055	n.a	1.089	1.098	n.a
Nunukan	n.a	n.a	76.730	1.982	n.a
Tana Tidung	n.a	n.a	392	n.a	n.a
Tarakan	327	76	340	103	713
Prov. Kalimantan Utara	n.a	n.a	80.318	n.a	n.a

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2011
3) Rekapilutasi UMKM Provinsi Bulungan Tahun 2012-2013
4) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010, 2011 dan 2012
5) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012
6) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

K. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN

Investasi merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam pembangunan wilayah. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dari dalam negeri dan dari luar negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan dua bentuk investasi skala nasional yang perlu diperhatikan mengingat sumbangan dari dua jenis investasi ini cukup besar dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian wilayah.

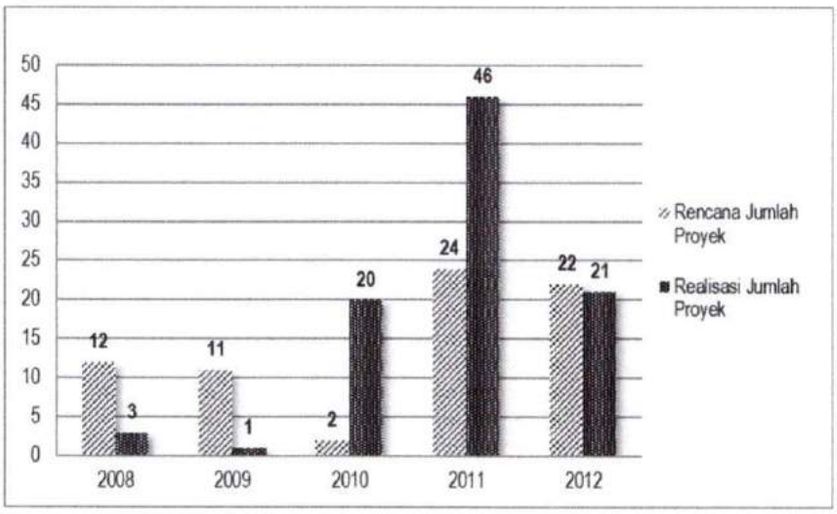
Dalam Indikator Permendagri No. 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa indikator yang diperlukan pada fokus ini adalah jumlah perusahaan penanam modal. Namun karena keterbatasan data, maka indikator tersebut disubtitusi dengan data jumlah proyek PMDN dan PMA.

Jumlah proyek PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Pada tahun 2008, realisasi proyek PMDN dan PMA hanya sebanyak tiga proyek atau 25% dari jumlah proyek yang direncanakan (12 proyek). Sedangkan pada tahun 2012, terdapat 21 jumlah proyek yang terealisasi dari total 22 rencana proyek. Secara umum, rencana jumlah proyek dan realisasi tidak selalu tepat terpenuhi 100% karena bahkan pada tahun 2010 dan 2011, jumlah realisasi proyek jauh melebihi dari target yang diharapkan.

Tabel 2.3.134
Rencana dan Realisasi Jumlah Proyek PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Proyek PMDN		Jumlah Proyek PMA		Jumlah Proyek PMDN + PMA	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2008	2	2	10	1	12	3
2009	2	1	9	0	11	1
2010	0	12	2	8	2	20
2011	10	9	14	37	24	46
2012	6	6	16	15	22	21

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013



Gambar 2.3.89
Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Jumlah Proyek PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN dan PMA

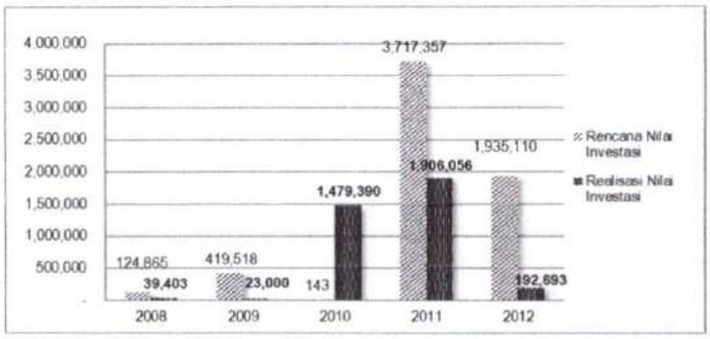
Perkembangan target dan realisasi jumlah proyek belum secara tepat dapat menggambarkan perkembangan spesifik penanaman modal di provinsi ini. Realisasi jumlah proyek yang melampaui target belum tentu berbanding lurus dengan nilai investasinya. Oleh karena itu, selain dilakukan analisis terhadap jumlah proyek, diperlukan analisis lanjutan terhadap target dan realisasi jumlah nilai investasi.

Perbandingan antara rencana dan realisasi proyek PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 dan 2009, realisasi nilai investasi yang ada jauh di bawah target yang telah ditetapkan (realisasi sebesar 31,6% dari target). Namun pada tahun 2010, nilai realisasi sebesar 1,9 triliun rupiah jauh melampaui target yang hanya sebesar 143 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 kembali terjadi penurunan nilai realisasi investasi. Sementara apabila dilihat secara keseluruhan, nilai realisasi investasi dari tahun 2008-2012 menunjukkan kecenderungan untuk mengarah pada perkembangan positif meskipun terus terjadi fluktuasi.

Tabel 2.3.135
Rencana dan Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Tahun	Nilai Investasi (Juta Rupiah)					
	PMDN		PMA		PMDN + PMA	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2008	67.591	39.153	57.273	250	124.865	39.403
2009	110.100	23.000	309.418	0	419.518	23.000
2010	0	1.408.052	143	71.338	143	1.479.390
2011	2.756.400	1.726.612	960.957	179.444	3.717.357	1.906.056
2012	92.449	100.791	1.842.662	91.903	1.935.110	192.693

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013



Gambar 2.3.90
Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Selain menggunakan data dari provinsi induk (Provinsi Kalimantan Timur), data penanaman modal PMDN dan PMA juga diperoleh melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional. Melalui versi data tersebut diperoleh mengenai data terbaru (tahun 2013 dan awal tahun 2014). Penanaman modal pada tahun ini dianggap penting mengingat Provinsi Kalimantan Utara secara resmi berdiri sebagai provinsi baru pada tahun 2013. Oleh karena itu, penanaman modal pada tahun-tahun awal ini dapat melihat posisi Provinsi Kalimantan Utara dalam kompetisi sebagai lokasi sasaran tujuan investasi dalam lingkup PMDN dan PMA.

Pada kuartal ketiga tahun 2013, terdapat empat proyek PMDN senilai 22,4 miliar rupiah yang diinvestasikan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai permulaan, nilai invetasi ini cukup bagus dan membuktikan bahwa meskipun merupakan provinsi baru, Provinsi Kalimantan Utara setidaknya menunjukkan adanya daya tarik investasi meskipun masih relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang lain di Pulau Kalimantan. Apabila dilihat dari segi perkembangannya per kuartal (tiga bulan), perkembangan investasi Provinsi Kalimantan Utara terhitung lambat karena investasi yang terjadi pada quartal 3 tahun 2013 tidak spontan berkembang sebab pada kuartal berikutnya tidak ada lagi investasi PMDN yang ditanamkan sampai dengan awal tahun 2014.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, jumlah proyek maupun nilai investasi yang diperoleh Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah provinsi lainnya. Misalnya saja pada tahun kuartal 3 tahun 2013, nilai kontribusi investasi PMDN Provinsi Kalimantan Utara hanya sebesar 0,009% dari total nilai investasi yang ada di Pulau Kalimantan.

Tabel 2.3.136
Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kalimantan Tahun 2013-2014

No	Provinsi	Q1 2013		Q2 2013		Q3 2013		Q4 2013		Q1 2014	
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
Kalimantan		**79**	**9.145,5**	**79**	**5.688,5**	**69**	**2.575,7**	**78**	**11.303,8**	**39**	**2.437,8**
1	Kalimantan Barat	13	202,7	8	172,3	8	177,2	25	1.970,0	18	1.570,4
2	Kalimantan Tengah	32	676,7	23	548,8	26	357,4	15	252,4	5	115,0
3	Kalimantan Selatan	10	3.420,3	21	1.686,8	14	288,7	24	2.903,5	9	43,0
4	Kalimantan Timur	24	4.845,9	27	3.280,7	17	1.730,0	14	6.177,9	7	709,4
5	**Kalimantan Utara**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**22,4**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, 2014

Keterangan:
1. Diluar investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, investasi yang perijinannya dikeluarkan oleh instani teknis/sektor, investasi porto folio (pasar modal) dan investasi rumah tangga.
2. P = Jumlah Proyek
3. I = Nilai Investasi (miliar rupiah)

Sama seperti perkembangan investasi PMDN, investasi PMA di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013 terpusat di kuartal ke 3 dengan jumlah proyek sebanyak delapan proyek bernilai 45,9 juta US$. Sementara untuk tahun 2014, tercatat sudah satu satu proyek investasi akan tetapi belum ada nominal nilai investasinya. Apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, jumlah investasi yang didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Utara dari segi PMA masih jauh berada di bawah. Misalnya saja pada kuartal ketiga tahun 2013, nilai investasi PMA yang diperoleh provinsi hanya sekitar 0,053% dari total nilai investasi di Pulau Kalimantan pada kuartal tersebut.

Tabel 2.3.137
Perkembangan Nilai Investasi PMA Kalimantan Tahun 2013-2014

No	Lokasi	Q1 2013		Q2 2013		Q3 2013		Q4 2013		Q1 2014	
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
Kalimantan		**216**	**338,3**	**247**	**805,9**	**236**	**872,3**	**150**	**756,9**	**266**	**1.494,1**
1	Kalimantan Barat	33	116,8	44	134,7	43	131,1	57	267,4	70	237,3
2	Kalimantan Tengah	67	48,5	65	124,7	58	93,0	22	215,4	55	309,6
3	Kalimantan Selatan	38	36,6	33	59,4	28	77,3	21	87,3	38	148,6
4	Kalimantan Timur	78	136,3	105	487,2	99	525,0	50	186,9	102	798,6
5	**Kalimantan Utara**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**45,9**	**0**	**0**	**1**	**0**

Sumber:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, 2014

Keterangan:
1. Diluar Investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, investasi yang perijinannya dikeluarkan oleh instani teknis/sektor, investasi porto folio (pasar modal) dan investasi rumah tangga.
2. P = Jumlah Proyek
3. I = Nilai Investasi (juta US$)

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan hasil perhitungan antara jumlah total tenaga kerja pada perusahaan PMDN/PMA dibagi dengan jumlah perusahaan PMDN/PMA. Namun, karena keterbatasan data, maka data jumlah perusahaan disubtitusi dengan jumlah proyek.

Rasio daya serap tenaga kerja PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008, rasio daya serap tenaga kerja mencapai anga 119 namun angka ini terus menurun sampai pad atahun 2011 dengan rasio yang berkurang menjadi 104. Pada tahun 2012, rasio ini kembali meningkat menjadi 186,6 atau meningkat sekitar 80% dari rasio daya serap tenaga kerja tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.138
Rasio Tenaga Kerja Proyek PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

No	Uraian	Rasio Tenaga Kerja				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	PMDN					
	Tenaga Kerja Indonesia	318	100	303	2891	1610
	Tenaga Kerja Asing	0	0	0	10	0
	Jumlah	318	100	303	2901	1610
	Jumlah Proyek PMDN	2	1	12	9	6
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	159,0	100,0	25,3	322,3	268,3
2	PMA					
	Tenaga Kerja Indonesia	40	0	939	1.889	2.271
	Tenaga Kerja Asing	0	0	0	0	38
	Jumlah	40	0	939	1.889	2.309
	Jumlah Proyek PMA	1	0	8	37	15
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	40	0	117	51	154
3	PMDN + PMA					
	Tenaga Kerja Indonesia	358	100	1.242	4.780	3.881
	Tenaga Kerja Asing				10	38
	Jumlah	358	100	1.242	4.790	3.919
	Jumlah Proyek PMDN+PMA	3	1	20	46	21
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	**119,3**	**100,0**	**62,1**	**104,1**	**186,6**

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, diolah

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Perkembangan nilai realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2008, nilai PMA dan PMDN hanya sebesar 39 milyar rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai realisasi ini mengalami penurunan sebesar 41,6% menjadi 23 milyar rupiah. Namun, pada tahun berikutnya nilai realisasai ini meningkat sangat drastis menjadi 1,5 triliun rupiah dan semakin meningkat lagi pada tahun 2011 menjad 1,9 triliun rupiah.

Melalui perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tren yang terarah untuk nilai realisasi PMDN yang ada. Fluktuasi yang dramatis menunjukkan bahwa kemungkinan kenaikan maupun penurunan realiasai PMDN dan PMA tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Namun, apabila ditarik kesimpulan secara umum dari tahun 2008 hingga 2012, nilai realisasi PMA dan PMDN dapat dikatakan meningkat meskipun fluktuasi terus terjadi.

Tabel 2.3.139
Perkembangan Nilai Realisasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Uraian	Nilai Realisasi PMDN dan PMA (juta rupiah)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Realisasi PMDN (juta rupiah)	39.153	23.000	1.408.052	1.726.612	100.791
Perubahan (juta rupiah)	-	-16.153	1.385.052	318.561	-1.625.822
Pertumbuhan (%)	-	-41,3	6022,0	22,6	-94,2
Realisasi PMA (juta rupiah)	250	0	71.338	179.444	91.903
Perubahan (juta rupiah)	-	-250	71.338	108.106	-87.541
Pertumbuhan	-	-100	0	151,5	-48,8
Realisasi PMDN dan PMA (juta rupiah)	39.403	23.000	1.479.390	1.906.056	192.693
Perubahan (juta rupiah)	-	-16.403	1.456.390	426.666	-1.713.363
Pertumbuhan	-	-41,6	6332,1	28,8	-89,9

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, diolah

L. Kepemudaan dan Olah Raga

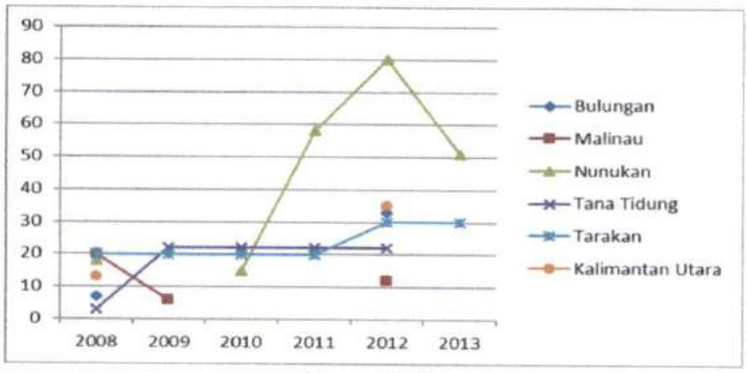
1. Jumlah Organisasi Pemuda

Indikator jumlah organisasi pemuda digunakan untuk memetakan potensi perkembangan kepemudaan kedepan dan penentuan langkah pemberdayaan bidang kepemudaan. Berdasarkan informasi yang tersedia di setiap kabupaten/kota sudah ada organisasi kepemudaan. Jumlah organisasi pemuda paling banyak ada di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Malinau memiliki jumlah organisasi kepemudaan paling sedikit daripada kabupaten lainnya. Berdasarkan informasi yang ada terlihat bahwa telah terjadi kenaikan jumlah organisasi pemuda di setiap kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun.

Tabel 2.3.140
Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	7				33	
Malinau	20	6			12	
Nunukan	18		15	58	80	51
Tana Tidung	3	22	22	22	22	
Tarakan	20	20	20	20	30	30
Prov. Kalimantan Utara	13				35	

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2008*
2) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2009, 2013*
3) *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2009, 2013*
4) *Lakip Kabupaten Nunukan Tahun 2013*
5) *Dinas Budaya dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan Tahun 2014,*
6) *Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014*



Gambar 2.3.91
Grafik Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis 2014

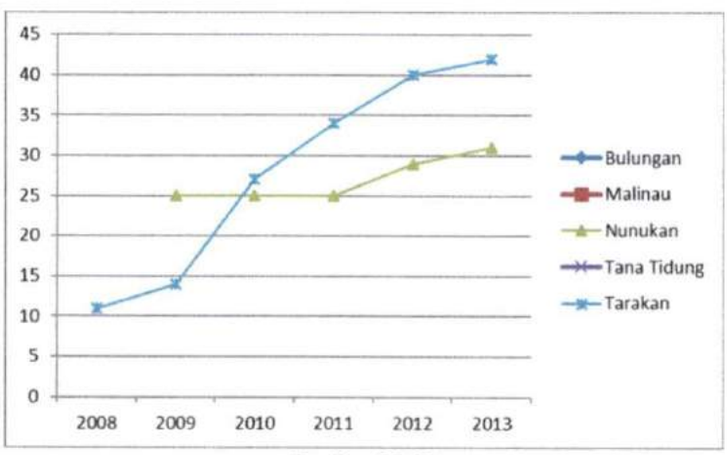
2. Jumlah Organisasi Olahraga

Indikator jumlah organisasi olahraga digunakan untuk melihat potensi perkembangan olahraga di masa depan dan sebagai dasar menentukan langkah pemberdayaan bidang olahraga. Pada indikator ini data yang tersedia hanya Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan saja. Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki kencenderungan kenaikan jumlah organisasi di setiap tahunnya. Informasi yang ada di Kota Tarakan menunjukkan adanya peningkatan jumlah orgasisasi yang cukup tinggi dibandingkan Kabupaten Nunukan. Untuk tiga kabupaten yang lain belum dapat digambarkan karena minimnya informasi yang tersedia.

Tabel 2.3.141
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Olahraga					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan						
Malinau						
Nunukan		25	25	25	29	31
Tana Tidung						
Tarakan	11	14	27	34	40	42

Sumber:
1) Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014
2) Dinas Budaya,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan Tahun 2014
3) Lakip Kabupaten Nunukan Tahun 2013



Gambar 2.3.92
Grafik Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis 2014

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Indikator jumlah kegiatan kepemudaan merupakan tolok ukur untuk melihat tingkat keaktifan organisasi kepemudaan. Pada indikator ini terlihat hanya ada informasi Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Berdasarkan data yang tersedia Nunukan mengalami peningkatan aktifitas kegiatan kepemudaan cukup tinggi dibandingkan Kota Tarakan. Kota Tarakan masih tergolong minim aktifitas kegiatan kepemudaan yakni terlihat dari rangkaian tahun 2008 sampai 2013 hanya dua tahun yang terlihat aktifitas kegiatan kepemudaan pada tahun 2010 dan 2013. Informasi tiga kabupaten lainnya belum dapat digambarkan karena minimnya informasi data yang tersedia.

Tabel 2.3.142
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Kepemudaan					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan						
Malinau						
Nunukan		1	1		4	7
Tana Tidung						
Tarakan	0	0	3	0	0	3

Sumber:
1) *Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan tahun 2014*
2) *Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014*
3) *Lakip Kabupaten Nunukan Tahun 2010,2013*

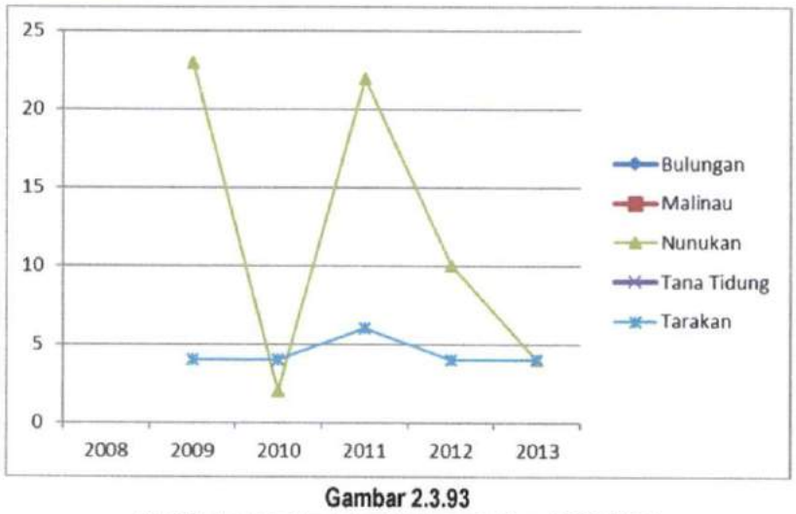
4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Indikator jumlah kegiatan olahraga merupakan tolok ukur untuk melihat aktifitas kegiatan yang terjadi dalam klub atau organisasi olahraga. Informasi yang ada hanya dapat menjelasakan perkembangan jumlah kegiatan olahraga Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Berdasarkan informasi yang tersedia jumlah kegiatan olahraga dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Kabupaten Nunukan memiliki fluktuasi yang cukup tinggi terlihat adanya peningkatan di tahun 2010 ke 2011 kemudian disusul dengan penurunan pada tahun 2012. Sedangkan untuk Kota Tarakan fluktuasi yang terjadi cukup rendah dapat dilihat perbandingan angkanya tidak terpaut jauh. Informasi tiga kabupaten yang lain belum dapat digambarkan karena masih minimnya informasi yang tersedia.

Tabel 2.3.143
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Olahraga					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan						
Malinau						
Nunukan		23	2	22	10	4
Tana Tidung						
Tarakan		4	4	6	4	4

Sumber:
1) *Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan Tahun 2014*
2) *Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014*



Gambar 2.3.93
Grafik Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis 2014

5. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Indikator ini digunakan untuk menjelaskan potensi sejumlah sarana penunjang pusat kegiatan kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan informasi yang tersedia Kabupaten Malinau memiliki jumlah rasio gelanggang/ balai remaja terbanyak. Untuk jumlah rasio terendah yakni Kota Tarakan.

Tabel 2.3.144
Rasio Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta) Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/ Kota	Rasio Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta) per 1000 Penduduk					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan				0,020		
Malinau	0	0,004		0,160	0,150	
Nunukan		0,008	0,007	0,006	0,006	
Tana Tidung				0	0,060	
Tarakan	0	0	0,002	0,001	0,007	0,067
Prov. Kalimantan Utara				0,030		

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2011
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011,2012,
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
4) LPPD Kota Tarakan Tahun 2010, 2011, 2012, 2013
5) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan Tahun 2014
6) Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014

6. Lapangan Olahraga

Indikator ini digunakan untuk melihat adanya sarana penunjang kegiatan olahraga yang berupa lapangan. Berdasarkan data yang tersedia terlihat bahwa rasio jumlah lapangan per 1000 penduduk mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat rasio jumlah lapangan olahraga tertinggi yakni Kabupaten Malinau pada tahun 2010. Sedangkan jumlah rasio terendah di Kota Tarakan.

Tabel 2.3.145
Rasio Jumlah Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/ Kota	Rasio Jumlah Lapangan olahraga per 1000 penduduk					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan			1,40			
Malinau	1,40	0,11	7,40	1,42	1,46	
Nunukan	0,08	0,20	0,20	0,20	0,19	
Tana Tidung		0,30	2,60	2,50		
Tarakan		0,01	0,05	0,03	0,05	0,46
Prov. Kalimantan Utara			2,33			

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2010
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008,2009, 2011,2012,
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011,2012,2013,
5) LPPD Kota Tarakan tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
6) Dinas Budaya dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan Tahun 2014
7) Dinas Budaya dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan Tahun 2014
8) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan Tahun 2014

M. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

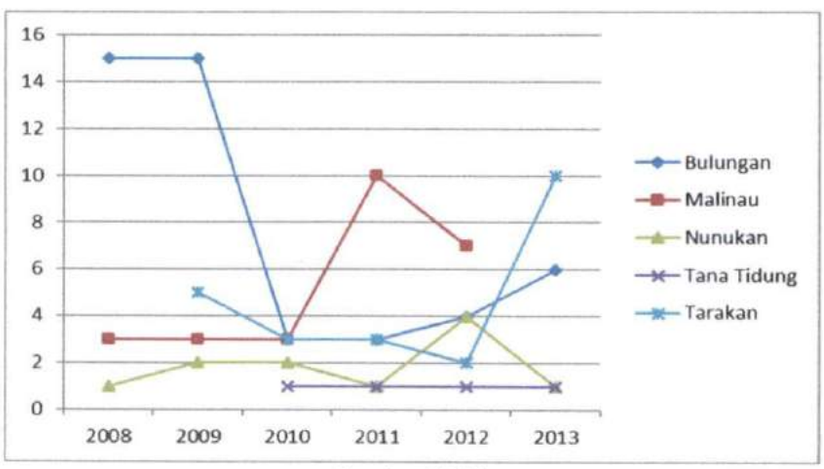
Indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya digunakan untuk mengukur sejumlah aktifitas yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik perkembangan seni dan budaya daerah. Indikator ini sangat penting terutama untuk menjelaskan adanya perhatian daerah dalam menunjang bidang ekonomi pariwisata berbasis seni dan budaya. Berdasarkan informasi yang tersedia jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kalimantan Utara bervariasi pada setiap tahunnya. Data Kabupaten Tana Tidung menunjukkan mulai tahun 2010 jumlah penyelenggaraan festival cenderung tetap dan paling rendah angkanya. Hal ini dapat dipahami mengingat kabupaten

ini pada awalnya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan yang kemudian dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Namun melihat perkembangan yang ada secara umum kabupaten/kota di Kalimantan Utara sudah memiliki ada penyelenggaraan festival seni dan budaya. Ini artinya potensi perkembangan ekonomi pariwisata berbasis festival seni dan budaya dapat diterapkan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.146
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	15	15	3	3	4	6
Malinau	3	3	3	10	7	
Nunukan	1	2	2	1	4	1
Tana Tidung			1	1	1	1
Tarakan		5	3	3	2	10
Prov. Kalimantan Utara			12	18	18	

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2011, 2012
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011, 2012
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011, 2013,2014
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
6) Dinas Budaya dan Pariwisata Bulungan Tahun 2014
7) Dinas Budaya dan Pariwisata Nunukan Tahun 2014
8) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan tahun 2014



Gambar 2.3.94
Grafik Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis 2014

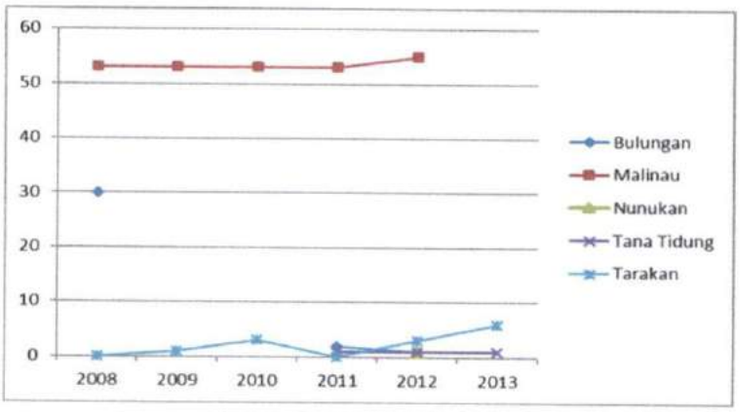
2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya merupakan sejumlah gambaran yang tersedia untuk melihat adanya penunjang aktifitas seni dan budaya. Berdasarkan informasi yang tersedia Kabupaten Malinau memiliki jumlah sarana pendukung seni dan budaya terbanyak. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya jumlahnya sangat sedikit. Hal yang cukup aneh terlihat di Kabupaten Bulungan dikarenakan data angka yang tersedia tidak mencerminkan kondisi rasional. Di Kalimantan Utara selama ini sudah ada sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di setiap kabupaten/kota namun jumlahnya sangat masih minim terutama Kabupaten Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota Tarakan.

Tabel 2.3.147
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	30			2	1	
Malinau	53	53	53	53	55	
Nunukan					1	
Tana Tidung				1	1	1
Tarakan	0	1	3	2	3	6
Prov. Kalimantan Utara					61	

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2011, 2012
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011,2012,
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
4) LPPD KabupatenTana Tidung Tahun 2011,2013, 2014,
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010,2011, 2012, 2013



Gambar 2.3.95
Grafik Jumlah Sarana Festival Seni dan Budaya Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis 2014

3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

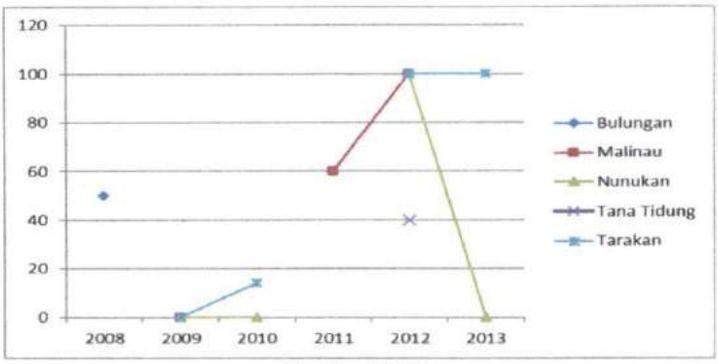
Pada indikator pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya merupakan tolok ukur dalam melihat adanya jaminan perhatian dalam usaha pelestarian benda peninggalan peradaban masa lalu. Berdasarkan informasi yang tersedia terlihat bahwa sudah ada perhatian dalam aspek pelestarian benda peradaban masa lalu di setiap kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 empat kabupaten/kota usaha pelestarian mencapai 100% dari jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada.

Tabel 2.3.148
Rasio Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Rasio Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	50			60	100	
Malinau		0		60	100	
Nunukan		0	0		100	0
Tana Tidung					40	
Tarakan		31,44	14,15	100	100	100

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2012, 2011
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2011,2012
3) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013
4) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
5) Lakip Kabupaten Nunukan Tahun 2010, 2013

Keterangan: Jumlah rasio benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena data tersedia berupa prosentase.



Gambar 2.3.96
Grafik Rasio Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis 2014

N. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan jumlah perpustakaan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Data yang tersedia untuk jumlah perpustakaan 210elative terbatas hanya 2 tahun (2011-2012) yang dapat menunjukkan perkembangan semua kabupaten/kota. Akan tetapi dari data jumlah perpustakaan yang tersedia terlihat bahwa di setiap kabupaten/kota sudah tersedia perpustakaan. Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan memiliki jumlah perpustakaan yang cenderung naik, terlihat pada tahun 2011 ke 2012. Sementara kabupaten yang lain seperti Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau mengalami kecenderungan penurunan jumlah perpustakaan pada tahun yang sama. Keterbatasan informasi yang tersedia mengakibatkan penurunan jumlah perpustakaan tersebut tidak dapat dijelaskan.

Tabel 2.3.149
Jumlah Perpustakaan Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan				18	20	
Malinau				36	12	
Nunukan				44	29	31
Tana Tidung				22	15	
Tarakan		2	12	17	32	
Prov. Kalimantan Utara				**137**	**108**	
Prov. Kalimantan Timur				**274**	**216**	

Sumber:
1) Kalimantan Timur dalam Angka tahun 2007, 2009, 2012
2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan tahun 2014
3) Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014
4) Database Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2014

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perbandingan jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2012 Kabupaten Bulungan memiliki jumlah rasio menurun daripada tahun 2011. Kota Tarakan memiliki rasio jumlah perpustakaan tertinggi daripada kabupaten yang lain. Berdasarkan perkembangannya Kota Tarakan memiliki kecenderungan rasio jumlah perpustakaan naik. Selain Kota Tarakan, Kabupaten Malinau juga memiliki rasio jumlah perpustakaan yang cenderung naik namun jumlahnya di bawah Kota Tarakan. Di Kabupaten Nunukan terjadi kenaikan rasio jumlah perpustakaan jika dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2012. Sedangkan informasi di Kabupaten Tana Tidung belum dapat ditunjukkan rasio jumlah perpustakaan karena tidak ada informasi yang tersedia.

Tabel 2.3.150
Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/ Kota	Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0,33			0,35	0,12	
Malinau	0,23	0,18	0,30	0,26	0,32	0,33
Nunukan		0,21			0,28	
Tana Tidung						
Tarakan	10,70	15,20	13,20	16,3	12,30	15,10
Prov.Kalimantan Utara						

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2011,2012
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2012
3) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014
4) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Tahun 2014
5) Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014

Keterangan: Jumlah rasio perpustakaan terhadap jumlah penduduk di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun.

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Indikator jumlah pengunjung menunjukkan adanya sejumlah aktifitas kunjungan perpustakaan. Berdasarkan informasi yang tersedia terlihat bahwa Kabupaten Bulungan memiliki kecenderungan penurunan kunjungan dari tahun 2008 dibandingkan dengan 2011 kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2012. Kota Tarakan memiliki kecenderungan kenaikan jumlah kunjungan pada tahun 2008 sampai 2010 dan 2012. Kabupaten Nunukan terjadi kecenderungan penurunan, keadaan ini terlihat pada tahun 2011 sampai 2012. Kabupaten Malinau terdapat kecenderungan peningkatan kunjungan pada 2012 dan 2013. Data KabupatenTana Tidung belum dapat ditunjukkan karena tidak ada informasi yang tersedia.

Tabel 2.3.151
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	8.000			3.532	4.332	
Malinau	1.526	1.168	2.080	1.809	2.432	2.468
Nunukan			14.660	15.940	14.430	14.990
Tana Tidung						
Tarakan	2.819	5.163	5.839	5.635	7.364	6.092
Prov. Kalimantan Utara						

Keterangan: Jumlah kunjungan ke perpustakaan dalam satu tahun di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun.
Sumber:
(1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2012,
(2) LPPD Kabupetan Nunukan Tahun 2012
(3) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2011,2012
(4) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2012, 2013
(5) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2014
(6) Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014
(7) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014

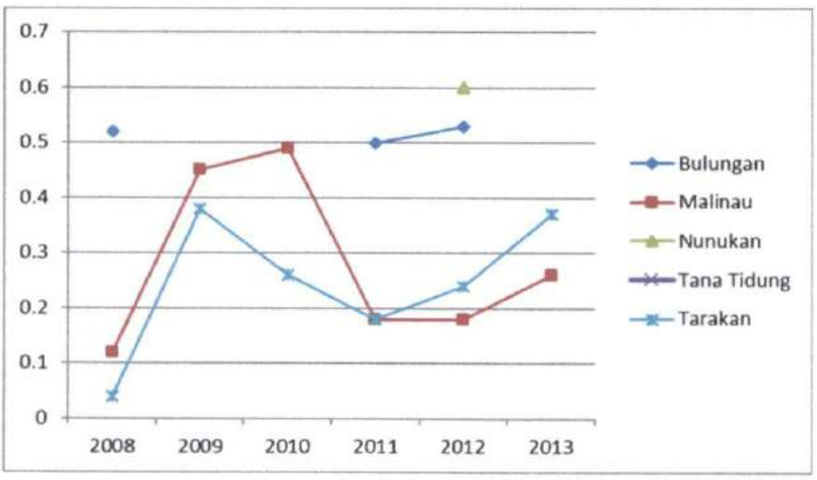
4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan informasi jumlah buku di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data yang tersedia terlihat hanya empat kabupaten/kota yang dapat menjelaskan informasi perkembangan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan mengalami fluktuasi jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sejak tahun 2008 sampai 2013. Kabupaten Bulungan juga mengalami fluktuasi terlihat pada tahun 2008, 2011, dan 2012. Kabupaten Nunukan tidak dapat terlihat kecenderungan yang terjadi karena hanya terdapat informasi pada tahun 2012. Khusus Kabupaten Tana Tidung belum dapat ditunjukkan karena tidak ada sumber data yang tersedia.

Tabel 2.3.152
Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/ Kota	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0,52			0,50	0,53	
Malinau	0,12	0,45	0,49	0,18	0,18	0,26
Nunukan					0,60	
Tana Tidung						
Tarakan	0,04	0,38	0,26	0,18	0,24	0,37
Prov. Kalimantan Utara						

Sumber:
(1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008,2012,2011
(2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2011, 2012
(3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
(4) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
(5) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tarakan Tahun 2014
(6) Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2014
(7) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten MalinauTahun 2014
Keterangan: Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun.



Gambar 2.3.97
Grafik Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2008-2013
Sumber :Hasil Analisis 2014

O. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

1. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Indikator ini menjelaskan adanya sejumlah aktifitas dalam usaha pembinaaan organisasi sosial masyarakat. Berdasarkan informasi yang tersedia Kabupaten Nunukan terdapat peningkatan aktifitas pembinaan di tahun 2013 yakni sejumlah 32. Angka ini merupakan jumlah tertinggi berdasarkan informasi jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum pada setiap kabupaten/kota sudah ada kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP namun jumlahnya masih tergolong minim.

Tabel 2.3.153
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM,ORMAS Dan OKP Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM,ORMAS Dan OKP					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	0			0	1	
Malinau	1	1		6	1	
Nunukan			1		3	32
Tana Tidung			0	1		
Tarakan		1	0	3	1	1
Prov. Kalimantan Utara						

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2011, 2012
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008,2009, 2011,2012
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010,2012, 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011, 2012
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010,2011, 2012, 2013
6) Kantor kesbangpol dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2014

Keterangan: Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun.

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah digunakan sebagai indikator melihat sejumlah aktifitas dalam mengakomodasi perkembangan politik daerah. Informasi yang ada hanya ada di Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kota Tarakan. Kabupaten Malinau memiliki jumlah kegiatan yang fluktuasi namun cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Kota Tarakan memiliki jumlah kegiatan yang cenderung lebih fluktuatif dari pada Kabupaten Malinau. Kabupaten Nunukan belum dapat terlihat karena hanya ada data tahun 2012. Informasi tiga kabupaten lainnya belum dapat digambarkan dengan karena minimnya informasi yang tersedia.

Tabel 2.3.154
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan						
Malinau		1	1	4	1	1
Nunukan					4	
Tana Tidung						
Tarakan		1	0	2	1	2
Prov. Kalimantan Utara						

Sumber:
(1) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
(2) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010,2011, 2012, 2013
(3) Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau Tahun 2014
(4) Kantor Kesbangpol dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2014

Keterangan: Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun.

P. Statistik

1. Ketersediaan Dokumen Daerah dalam Angka

Ketersediaan dokumen daerah dalam angka mengindikasikan bahwa pengelolaan database wilayah berjalan dengan baik. Database dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak data penting yang diperlukan dalam proses pembuatan rencana pengembangan wilayah dari berbagai sektor seperti misalnya kependudukan, geografi dan lain sebagainya.

Dokumen Daerah Dalam Angka (DDA) kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terhitung lengkap dan pada tahun 2012 sudah mulai ada publikasi *online* di website resmi BPS tiap kabupaten. Untuk

4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013,
6) PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Malinau Tahun 2010, dan 2008-2012,
7) PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Nunukan Tahun 2005, 2010, dan 2008-2012.
8) PDRN Menurut Penggunaan Kota Tarakan Tahun 2000-2006, 2000-2008, dan 2009-2012

*Keterangan:*ketersediaaan dokumen didasarkan pada ketersediaan tahun data, bukan tahun publikasi*

Q. Kearsipan

1. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa di Kabupaten Bulungan tidak ada SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan jumlah pengelolaan arsip secara baku (tahun 2012 ke 2013). Kabupaten Malinau memiliki jumlah tertinggi dalam penerapan arsip baku terutama pada tahun 2011 dan 2012. Kota Tarakan memiliki kencenderungan pengelolaan kearsipan yang cenderung naik dari tahun ke tahunnya. Sementara di Kabupaten Tana Tidung tidak dapat diamati perkembangan jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, karena tidak ada data yang tersedia.

Tabel 2.3.157
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2008-2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan				0		
Malinau	0	36		53	53	
Nunukan			6		6	8
Tana Tidung						
Tarakan		2	4	4	4	9
Prov. Kalimantan Utara						

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2011
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2009, 2011, 2012,
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010, 2012, 2013
4) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Keterangan: Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun.

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas peningkatan SDM pengelola kearsipan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan indikator ini terlihat bahwa Kota Tarakan terdapat kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan dengan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2009 dan 2013 terdapat dua kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan, sedangkan tahun 2010-2012 terdapat tiga kegiatan. Kabupaten Nunukan memiliki jumlah yang sama pada tahun 2010 sampai 2012 kemudian naik pada tahun 2013. Kabupaten Bulungan mengalami penurunan dari 1 kegiatan di tahun 2011 menjadi tidak ada kegiatan di tahun 2012. Kabupaten Malinau menunjukkan kenaikan jumlah kegiatan pada tahun 2011 ke 2012, namun pada tahun 2013 menurun hanya ada satu kegiatan saja. Sementara di Kabupaten Tana Tidung belum diperoleh data kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Hal ini dapat dipahami mengingat kabupaten ini merupakan daerah otonom baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan sehingga kegiatan peningkatan SDM mungkin belum dilaksanakan.

Tabel 2.3.158
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan				1	0	
Malinau	0			5	7	1
Nunukan			1	1	1	2
Tana Tidung						
Tarakan		2	3	3	3	2
Prov. Kalimantan Utara						

Sumber:
1) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2012,2011
2) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2011, 2012
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
4) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
5) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Tahun 2014
6) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014

Keterangan: Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat diinformasikan karena tidak lengkapnya data tersedia antar kabupaten/kota dalam satu tahun

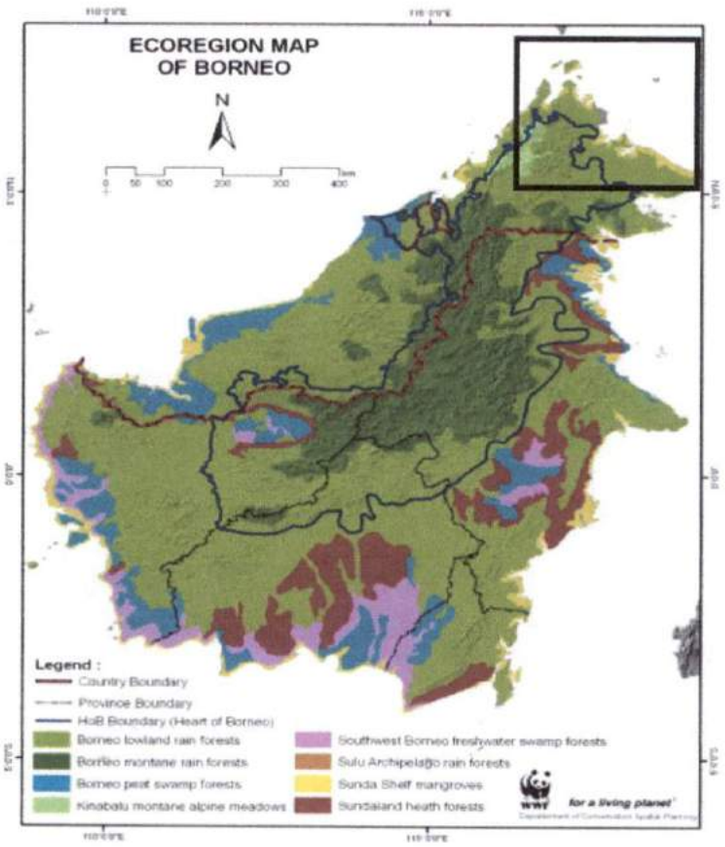
2.3.3. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

A. Kehutanan

1. Kondisi Umum Hutan di Kaimantan Utara

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan, wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kondisi ekologi yang tidak berbeda dengan kondisi Pulau Kalimantan pada umumnya. Secara ekologis maka hutan-hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara juga mewakili beberapa tipe hutan di Pulau Kalimantan. Beberapa tipe hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah:

a. Hutan hujan tropis dataran rendah (*lowland rainforest)*
b. Hutan hujan tropis dataran tinggi (*montane rainforest*)
c. Hutan rawa gambut (*peat swamp forest)*
d. Hutan pantai dan hutan mangrove
e. Hutan kerangas (*heath forest)*

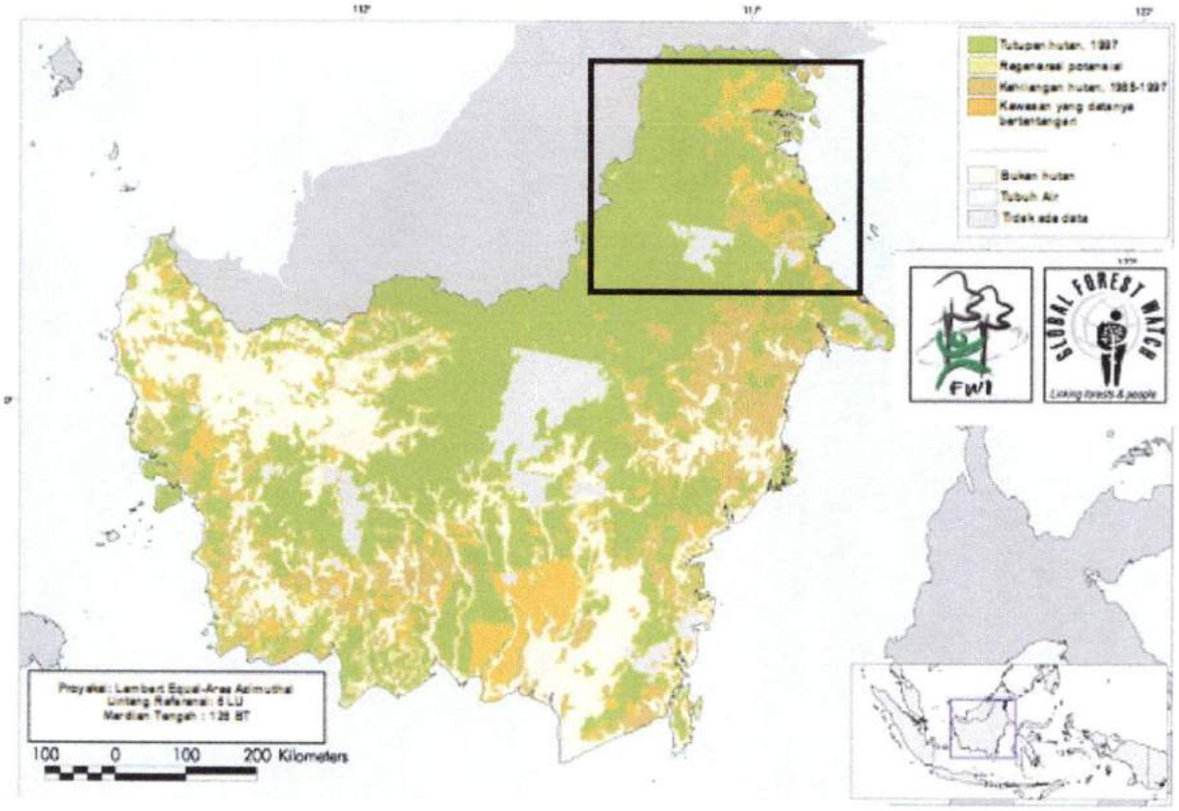


Gambar 2.3.98
Peta *ecoregion* Pulau Kalimantan
Sumber : WWF

Sedangkan beberapa jenis pohon yang umum dijumpai pada hutan hujan di Kalimantan adalah :

a. Meranti (Shorea sp)
b. Keruing (Dipterocarpus sp)
c. Ulin (Eusyderoxylon zwageri)
d. Kapur (Dryobalanops sp)
e. Nyatoh (Madhuca sp)
f. Agathis (Agathis borneensis)

Sebagai salah satu pulau besar di Indonesia bahkan ketiga di dunia, Kalimantan mempunyai dinamika yang sangat pesat sebagai akibat dari proses pembangunan dan eksploitasi sumberdaya alam. Secara alamiah kondisi geomorfologi Pulau Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis. Oleh karena itu hutan di Kalimantan mengalami laju perubahan (degradasi) yang pesat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Berikut ini gambaran tentang perubahan tutupan lahan di Pulau Kalimantan.



Gambar 2.3.99
Peta Perubahan Tutupan Hutan Alam di Kalimantan, 1985-1997
Sumber : Forest Watch Indonesia

Dilihat dari perubahan lahan yang ada di Pulau Kalimantan maka wilayah Kalimantan Utara dapat dikatakan sebagai wilayah yang masih menyisakan kondisi hutan yang relatif lebih baik. Hal ini dapat menjadi salah satu tantangan apakah dengan terbentuknya Kalimantan Utara sebagai provinsi baru akan mampu menjadi benteng pertahanan bagi laju kerusakan hutan di Pulau Kalimantan atau justru sebaliknya akan mempercepat laju degradasi sumberdaya hutan. Pemerintah telah menetapkan bahwa kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara adalah seluas 6.922.536,3 Ha. Sumberdaya hutan di Kalimantan Utara telah dimanfatkan dalam berbagai peruntukan baik untuk kepentingan ekonomi secara langsung maupun sebagai kawasan konservasi dan lindung. Untuk itu pemerintah telah menetapkan berbagai status kawasan hutan untuk mendukung fungsi tersebut baik berupa Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), Hutan Konservasi (HK), dan hutan lainnya. Luas kawasan hutan berdasarkan status pengelolaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.159
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Hutan (Ha)					
	HP	HPT	HL	HK	Hutan lainnya	Jumlah
Bulungan	458.386	432.703	224.746	-	273.607,1	1.389.442,1
Malinau	440.715,71	1.540.197,74	641.467,86	1.025.879,61	270.263,20	3.918.523,62
Nunukan	272.594	135.064	92.447	282.794	453.937,0	1.236.837,0
Tana Tidung			11.030	9.763	345.200	365.993
Tarakan	-	-	6.997	-	4.743,69	11.740,69
Prov. Kalimantan Utara	1.171.695,71	2.107.964,74	976.687,86	1.318.436,61	1.347.750,9	6.922.536,3

Sumber : Master-Plan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2013-2033

Selain itu beberapa kawasan telah ditetapkan sebagai KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Hal ini sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Bentuk status pengelolaan yang lain adalah berupa Hutan Tanaman Rakyat. Karakteristik pengelolaan hutan di tiap kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.160
Karakteristik Pengelolaan Hutan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Keterangan
Bulungan	• Dari kawasan hutan tersebut 487.842 ha diantaranya ditetapkan sebagai KPHP-Model • Dalam kawasan hutan tersebut terdapat 9 ijinpemanfaatan skala besar (IUPHHK-HA) dan 1 ijin skala kecil (hutan tanaman rakyat) dengan luas keseluruhan 670,236.00 ha
Malinau	• Kawasan hutan dengan fungsi konservasi Kehati • Sepertiga diantaranya merupakan kawasan hutan Taman Nasional Kayan Mentarang 1.025.879,61 • Seperti halnya dengan kabupaten Bulungan terdapat 1 unit KPHP-Model dengan luasan 715.512,00 ha • Juga telah terdapat ijin pemanfaatan hutan berupa IUPHHK-HA (13 unit) dengan luasan 1.149.185 ha dan 2 unit IUPHHK-HT seluas 243.871 ha
Nunukan	• Hutan Lindung (fungsi utamanya adalah hidro-orologi) • Terdapat satu unit KPH-L Model, yang merupakan satu-satunya di Kaltim-Kalimantan Utara dengan luas wilayah kelolanya adalah 4.641,25 ha dengan fungsi utamanya menjaga fungsi Hidro-Orologi kawasan hutan bagi sumber air utama dari masyarakat Tarakan
Tana Tidung	• Terdapat kawasan hutan konservasi (Gunung Rian) dengan luas 9.763 ha • Sampai dengan tahun 2008 terdapat 3 unit IUPHHK-HA/HT dengan luas areal kerja 283.000 ha, kemudian pada tahun 2009 hanya tinggal 1 unit IUPHHK dengan luas areal kerja dan 98.188 ha • Pada tahun 2009 telah berkembang usaha pemanfaatan lahan untuk sektor non-kehutanan (antara lain kebun sawit) dengan luas areal 71.000 ha
Tarakan	• Hutan Lindung (fungsi utamanya • adalah hidro-orologi) • Terdapat satu unit KPH-L Model, yang merupakan satu-satunya di Kaltim-Kalimantan Utara dengan luas wilayah kelolanya adalah 4.641,25 ha dengan fungsi utamanya menjaga fungsi Hidro-Orologi kawasan hutan bagi sumber air utama dari masyarakat Tarakan

Sumber : Masterplan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Dari tabel di atas terdapat tiga fenomena keberadaan sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu : a) Hutan difungsikan - berfungsi untuk tujuan konservasi keanekaragaman hayati (kehati) – hidro orologi; b) Hutan difungsikan - berfungsi sebagai sumber daya ekonomi melalui ijin pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK); dan c) Hutan (lahan hutan) telah difungsikan sebagai pendukung pengembangan pembangunan sektor non-kehutanan (terutama pembangunan perkebunan kelapa sawit) atau juga sektor pertambangan (batubara).

1. Produksi Hasil Hutan

Produksi kayu dihasilkan dengan adanya Hak Pengusahaan Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HPH-IUPHHK) kepada beberapa perusahaan swasta. Kayu dihasilkan melalui pengusahaan pada hutan alam ataupun hutan tanaman. Berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK-HA di Bulungan dan Malinau, dari kelompok jenis pohon yang mempunyai nilai ekonomi (komersiil) yang didominasi oleh kelompok *Dipterocarpaceae* memiliki potensi tegakan rata-rata per hektar diameter >50 cm sebesar 46,31-99,66

m3/ha dengan kerapatan rata-rata 11,12-21,67 batang/ha (pada hutan bekas tebangan = LOA). Tabel berikut ini adalah jumlah IUPHHK pada hutan alam yang ada di Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.161
Jumlah IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah IUPHHK Hutan Alam (unit)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	5	6	8	8	8
Malinau	20	9	13	13	13
Nunukan	4	5	5	5	5
Tana Tidung	2	3	3	3	1
Tarakan	0	0	0	0	0
Prov. Kalimantan Utara	31	23	29	29	27

Sumber :
1) *LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*
2) *LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*
3) *LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*
4) *LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*
5) *LPPD Kota Tarakan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*

Meskipun tidak cukup signifikan akan tetapi jumlah perusahaan pemilik IUPHHHK-HA mengalami penurunan. Masing–masing perusahaan pemegang IUPHHK-HA memperoleh luas konsesi kawasan hutan untuk menjalankan usahanya, baik berupa Hutan Produksi Tetap maupun Hutan Produksi Terbatas. Tabel berikut adalah luas kawasan hutan yang terikat IUPHHK-HA di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.162
Luas Kawasan HPH-IUPHHK Hutan Alam Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan HPH-IUPHHK Hutan Alam (Ha)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	474.490	540.330	575.022	665.775	470.665
Malinau	1.191.191	720.100	1.469.895	1.469.895	1.469.895
Nunukan	2.746	3.417	3.417	3.417	275.596
Tana Tidung	283.000	55.492	55.492	55.492	42.050
Tarakan	0	0	0	0	0
Prov. Kalimantan Utara	1.951.427	1.319.339	2.103.826	2.194.579	2.258.206

Sumber :
1) *LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*
2) *LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*
3) *LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*
4) *LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*
5) *LPPD Kota Tarakan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013*

Catatan: Total luas HPH Hutan Alam berbeda dengan data pada masterplan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang menyebutkan bahwa luas HPH Hutan Alam Tahun 2012 2.341.661,71 Ha.

Meskipun dari jumlah perusahaan yang beroperasi mengalami penurunan, namun dari luas lahan konsesi terjadi peningkatan luas pengusahaan Hutan Alam. Sedangkan dari aspek produksi kayu bulat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.163
Produksi Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 - 2012

Kabupaten/Kota	Produksi Kayu Bulat (m^3/tahun)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	444.317	415.141	342.980	409.312	212.680
Malinau	20.277	38.892	143.414	335.091	267.120
Nunukan	149.789	138.404	174.195	188.219	548.965
Tana Tidung	-	7.165	215.763	677.493	211.610
Tarakan	0	0	0	0	0
Prov. Kalimantan Utara	614.383	599.603	876.352	1.610.114	1.240.374

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan produksi kayu bulat. Hal ini mungkin terjadi seiring dengan bertambahnya luasan kawasan konsesi yang ada. Selain dari hutan alam, produksi kayu juga dihasilkan dari Hutan Tanaman Industri. Berikut ini adalah jumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.3.164
Jumlah Perusahaan HTI di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan HTI (unit)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	2	0	2	3	3
Malinau	0	0	0	0	0
Nunukan	0	0	0	0	0
Tana Tidung	2	2	2	2	2
Tarakan	0	0	0	0	0
Prov. Kalimantan Utara	4	2	4	5	5

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Tabel 2.3.165
Luas Kawasan Hutan Tanaman Industri Di Provinsi Kalimantan Utara 2008-2012

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan Tanaman Industri (Ha)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	26.920	0	26.920	246.912	246.912
Malinau	0	0	0	0	0
Nunukan	0	0	0	0	0
Tana Tidung	85.851	85.581	85.851	85.581	85.851
Tarakan	0	0	0	0	0
Prov. Kalimantan Utara	112.771	85.581	112.771	332. 493	332.763

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Catatan: Total luas HTI berbeda dengan data pada masterplan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang menyebutkan bahwa luas HTI tahun 2012 adalah 329.452 ha

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa luas kawasan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami perkembangan positif. Di Provinsi Kalimantan Utara juga terdapat beberapa industri pengolahan kayu. Berikut ini adalah perkembangan industri kayu olahan yang ada di Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2008-2012.

Tabel 2.3.166
Produksi Kayu Olahan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Jenis Industri	Produksi Kayu Olahan (m^3)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Playwood	152.177,72	138 456,25	0	123 879,06	0
Veneer	2.656,64	3 871,77	0	0	0
Sawn Timber	34.926,55	45 753,34	0	25 216,53	0
Block Board	8.808,67	6 971,79	0	0	0
Chip Woods	49.343,62	64 150,00	64 150,00	0	0
Moulding	0	1 276,12	1 276,12	0	0
Lain-lain	2.985,89	0	0	49 594,00	49 594,00
Jumlah	250,899.1	260,479.27	65,426.12	198,689.59	49,594

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Jika dilihat dari tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa industri pengolahan kayu di Provinsi Kalimantan Utara mengalami pasang surut dan penurunan volume usaha sejak tahun 2010. Hal ini berlawanan dengan data tentang produksi kayu bulat dan luasan kawsan Hutan Tanaman Industri yang cenderung meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Bahkan perlu dikaji lebih khusus tentang penyebab hilangnya berbagai produk kayu olahan seperti *Playwood, Veneer, Sawn Timber, Block Board, Chip Wood ataupun Moulding*. Menurunnya angka produksi kayu olahan atau industri kehutanan secara umum tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian lokal, seperti menurunnya serapan tenaga kerja di sektor ini. Salah satu fenomena ataupun realitas yang perlu dikaji adalah harga bahan baku (kayu) yang terus melambung di tingkat global sehingga menyebabkan industri pengolahan di dalam negeri tidak efisien.

Dari lima Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, data tentang industry pengolahan kayu hanya tersedia di Kota Tarakan. Jika dilihat di lapangan pengolahan kayu berupa kayu gergajian (*sawn timber*) sebenarnya juga berkembang di tiap Kabupaten meskipun diusahakan dalam usaha rakyat skala kecil (UMKM). Meskipun diusahakan dalam skala kecil namun penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan usaha ini, apakah terkait dengan perijinan, legalitas bahan baku atau dukungan untuk pengembangan.

Selain hasil berupa kayu bulat ataupun olahan, terdapat hasil hutan non kayu yang mampu diproduksi masyarakat. Beberapa hasil hutan non kayu ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi seperti gaharu, damar, minyak tengkawang dan juga madu hutan. Selain itu kelompok hasil hutan non kayu terdapat beberapa jenis tumbuhan obat di hutan alam dalam wilayah kelola KPHP-Model seperti Pasak Bumi (Malaria), Akar penawar racun (Hampir semua penyakit), Akar kuning (Ginjal dan malaria), Long adak (Penurun panas). Sayangnya hasil hutan non kayu ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, sehingga data produksinya hingga saat ini masih belum tersedia.

3. Kemantapan Kawasan Dan Tata Ruang

Kemantapan kawasan adalah salah satu syarat utama bagi pengelolaan hutan yang baik. Kemantapan status kawasan akan memberikan landasan yang kuat bagi sistem perencanaan maupun tata kelola kawasan hutan. Kawasan yang mantap akan menghindarkan pengelolaan dari resiko konflik lahan baik antar sektor maupun antar kelompok kepentingan, dalam hal ini antara pihak pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Oleh karena itu dalam menetapkan rencana jangka panjang perlu juga dikaji tentang kemantapan kawasan ini. Sebagai provinsi baru hasil pemekaran maka Kalimantan Utara juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hampir sebagian besar mengajukan usulan perubahan dari kawasan hutan menjadi areal peruntukan lain. Hal inilah yang mendasari panjangnya proses pengesahan tersebut, karena perlunya kajian-kajian

ilmiah agar diperoleh hasil sebaik mungkin. Kondisi ini juga dialami oleh Provinsi Kalimantan Utara yang saat pengusulan RTRWP masih tergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur, meskipun sudah diterbitkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : SK 554/Menhut-II/2013 pada bulan Agustus 2013, sampai saat ini hasilnya masih belum tuntas seluruhnya.

Berdasarkan data resmi yang ada, di Provinsi Kalimantan Utara secara kolektif terjadi penurunan intensitas kasus-kasus pengelolaan hutan. Bahkan sejak tahun 2008 tidak tercatat terjadinya kasus perambahan kawasan. Selain itu dari sejumlah kasus yang terjadi, terutama tentang *illegal logging* sebagian besar dapat diselesaikan.

Tabel 2.3.167
Intensitas kasus kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara Tahum 2008-2012

Kabupaten/Kota	Kasus	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	Ilegal Logging (kasus)	0	0	0		16
	kasus yang dapat diselesaikan (kasus)	0	0	0		14
	Perambahan kawasan hutan (kasus)					
Malinau	Ilegal Logging (kasus)					
	kasus yang dapat diselesaikan (kasus)					
	Perambahan kawasan hutan (kasus)					
Nunukan	Ilegal Logging (kasus)	10	14	83	8	4
	kasus yang dapat diselesaikan (kasus)	10	14	83	8	4
	Perambahan kawasan hutan (kasus)					
Tana Tidung	Ilegal Logging (kasus)					
	kasus yang dapat diselesaikan (kasus)					
	Perambahan kawasan hutan (kasus)					
Tarakan	Ilegal Logging (kasus)	13	25	14	0	10
	kasus yang dapat diselesaikan (kasus)	12	18	14	0	9
	Perambahan kawasan hutan (kasus)					

Sumber :
1) LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
2) LPPD Kabupaten Bulungan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
3) LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
4) LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Namun demikian berdasarkan analisa terhadap media massa yang ada, terdapat informasi adanya beberapa kasus perambahan kawasan hutan yang cukup masif. Hal ini terjadi di kawasan Hutan Lindung di Kota Tarakan dan Hutan Lindung di Kabupaten Nunukan. Sejumlah kawasan Hutan Lindung di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan berubah peruntukannya baik untuk lahan persawahan, perkebunan sawit, pemukiman penduduk, jalan, dan bahkan kantor pemerintahan.

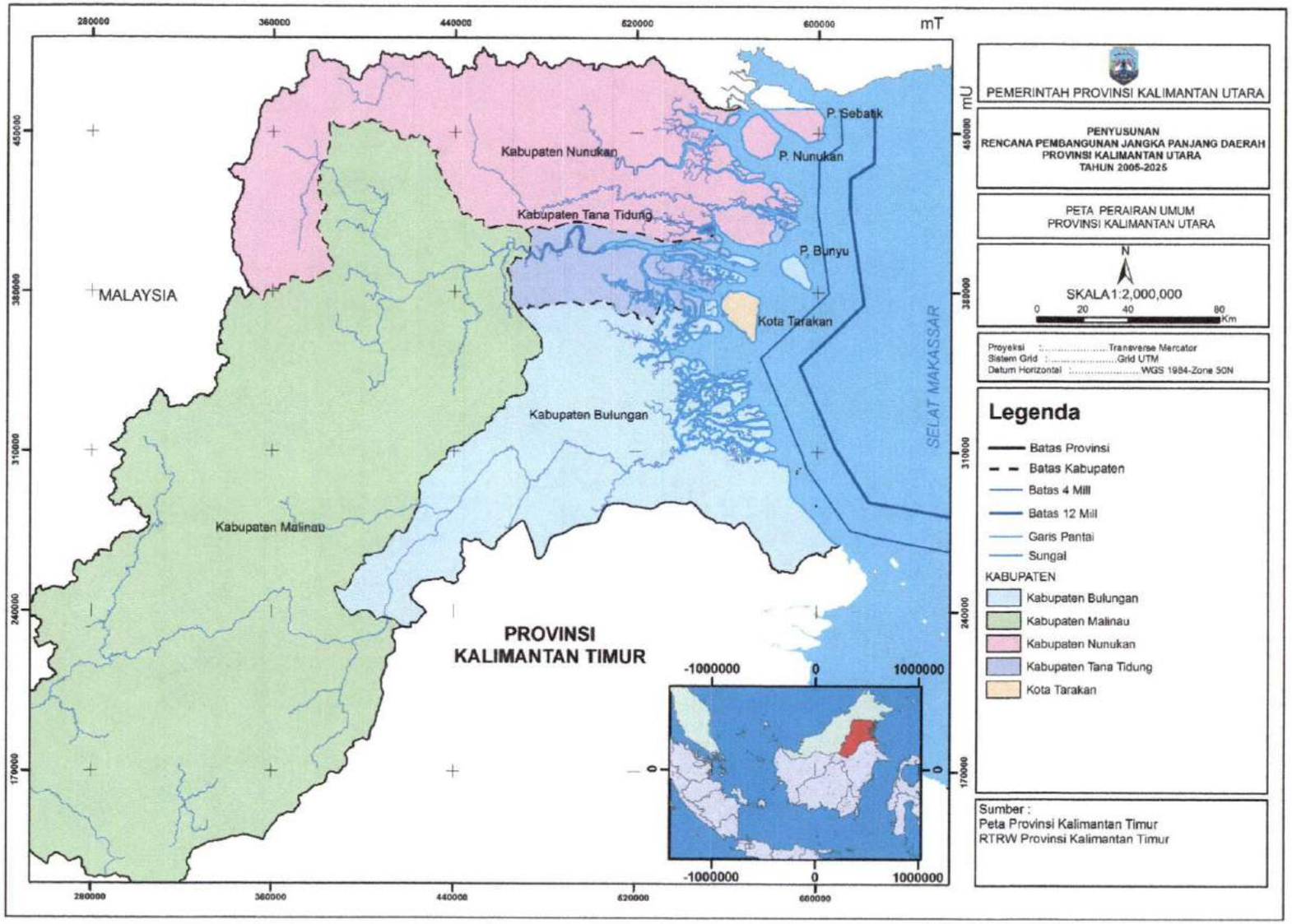
Tabel 2.3.168
Tipologi Kasus Kehutanan Pada Pengelolaan Hutan Lindung

Kabupaten/Kota	Tipologi Kasus Pada Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi
Nunukan	- Pembangunan jalan melintasi kawasan - Adanya kavling tanah - Perkebunan dan pemukiman - Perkantoran (makodim) - Pemukiman sebelum penetapan
Tarakan	- Perambahan sawah Hanya tersisa 20% - Perambahan 250 KK

Sumber: riset media (http://nunukan-penekindi-debaya.blogspot.com/,(**radar tarakan, Jumat, 18 Juni 2010,** liputan6.com)

4. Lahan Kritis dan Rehabilitasi Hutan

Jika diperhatikan dari data yang ada maka kerusakan hutan mengalami penurunan yang sangat drastis sejak kurun waktu 2008-2009. Penurunan kerusakan hutan secara drastis terjadi di Kabupaten Malinau dan Kota



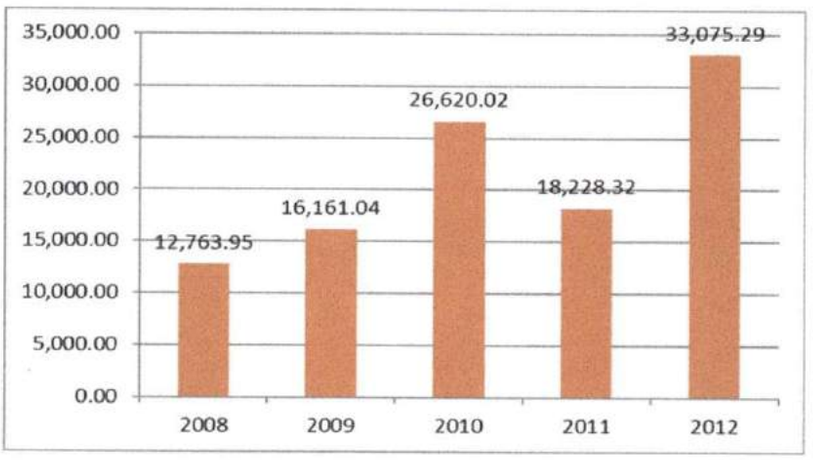
Gambar 2.3.107
Peta Batas Wilayah Perairan dan Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Utara

Data produksi ikan disajikan pada tabel di bawah ini tampak bahwa produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan yang secara konsisten sejak tahun 2008 produksi ikannya lebih tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya. Meskipun pada tahun 2012 terjadi peningkatan produksi ikan secara signifikan di Kabupten Bulungan (meningkat 76,9% dibanding tahun 2011) dan Kabupaten Tana Tidung (meningkat 1.332% dibanding tahun 2011). Secara umum produksi ikan baik dari perikanan laut maupun darat di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008 sampai 2012 cenderung mengalami peningkatan. Total produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008 hanya 12.763,95 ton meningkat menjadi 33.075,29 ton pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 159,42% atau rata-rata 31,8%/tahun. Peningkatan produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara termasuk cukup tinggi dan melampaui rata-rata nasional. Peningkatan produksi ikan yang cukup tinggi tersebut terjadi akibat adanya peningkatan produksi ikan yang signifikan di kabupaten Bulungan dan Tana Tidung.

Tabel 2.3.174
Produksi ikan (ton) dirinci per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Produksi ikan (ton) di Provinsi Kalimantan Utara (2008-2012)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	2.717,00	1.188,70	4.162,00	3.979,46	6.925,48
Malinau	195,97	203,96	327,46	570,57	757,61
Nunukan	5.220,98	7.087,50	9.761,41	7.970,88	7.882,10
Tana Tidung	0,00	2.840,21	7.380,05	881,11	12.618,80
Tarakan	4.630,00	4.840,67	4.989,10	4.826,30	4.891,30
Prov. Kalimantan Utara	12.763,95	16.161,04	26.620,02	18.228,32	33.075,29

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
2) Kabupaten Malinau dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
5) Kota Tarakan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012



Gambar 2.3.108
Grafik Produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

Produksi ikan di Provinsi Kalimantan Utara bersumber dari kegiatan perikanan laut khususnya penangkatan dan perikanan darat dari kegiatan penangkapan di perairan umum dan budidaya. Produksi ikan dari perikanan laut dan darat dari tahun 2008 sampai dengan 2011 cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan. Namun demikian peningkatan yang cukup tinggi terjadi dari kegiatan perikanan darat

(penangkapan di perairan umum dan budidaya). Sedang hasil dari perikanan laut, meskipun mengalami peningkatan tampak tidak terlalu mencolok. Dengan demikian, kegiatan perikanan Provinsi Kalimantan Utara baik kegiatan perikanan darat maupun laut terus tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini yang menyebabkan kontribusi sub-sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara juga terus tumbuh yaitu 4,91% pada tahun 2008 menjadi 5,37% pada tahun 2012.



Gambar 2.3.109
Grafik Produksi ikan (ton) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

2. Penangkapan Ikan

Sarana dan prasarana penangkapan ikan di laut yang sangat diperlukan bagi kegiatan penangkapan ikan di laut adalah seperi pelabuhan perikanan, armada penangkapan ikan (kapal) dan alat tangkap. Provinsi Kalimantan Utara sampai sekarang terdapat dua PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), yaitu PPI Pasar Lingkas yang terletak di Kota Tarakan dan PPI Sebatik yang terletak di Kabupaten Nunukan. Kedua PPI tersebut sementara ini menjadi andalan bagi pendaratan kapal ikan yang beroperasi di laut Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai hak pengelolaan laut sepanjang 12 mil dari garis pantai dan langsung berhadapan dengan laut Sulawesi. Di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan nasional, laut Sulawesi termasuk dalam WPP-716 (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang memanjang hingga utara Provinsi Maluku Utara. .

Tabel 2.3.175
Potensi lestari sumberdaya ikan di Laut Sulawesi (WPP-716)

No	Kelompok Sumberdaya Ikan	WPP-716 (dalam ribu ton)
1	Ikan pelagis besar	70,10
2	Ikan pelagis kecil	230,90
3	Ikan Demersal	24,70
4	Udang Penaeid	1,10
5	Ikan karang konsumsi	6,50
6	Lobster	0,20
7	Cumi-cumi	0,20
	Jumlah	333,60

Sumber : Kepmen Kelautan dan Perikanan, No 45/MEN/2011

Potensi sumberdaya ikan di WPP-716 adalah cukup besar yaitu sekitar 333,6 ribu ton/tahun. Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-716 adalah masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain. Berbagai jenis ikan yang potensial di WPP-716 sementara ini belum banyak dimanfaatkan, kecuali jenis ikan-ikan pelagis besar yang ditengari sudah mengalai *over fishing*. Sedang untuk jenis yang lain, tingkat pemanfaatan masih bersifat moderate artinya masih dapat ditingkatkan lagi pemanfaatannya/penangkapannya. Dalam rangka untuk memanfaatkan potensi perikanan yang melimpah di WPP-716 diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

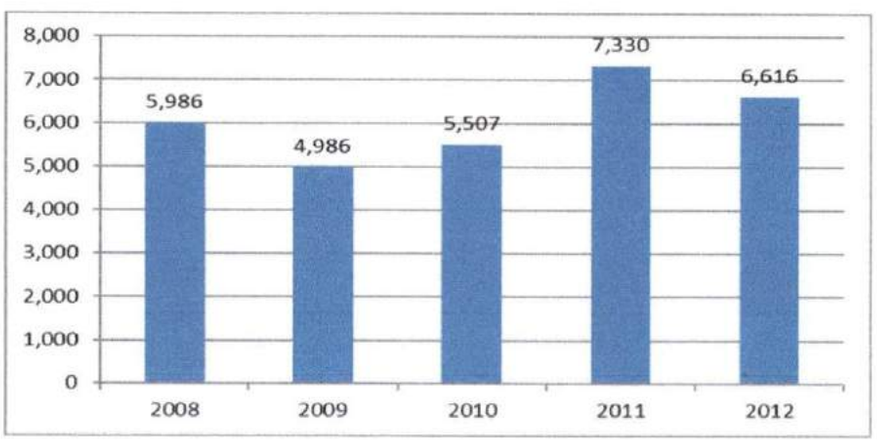
Sepanjang laut di WPP-716 ini, hanya terdapat satu pelabuhan perikanan yang besar yang dapat didarati oleh kapal dengan tonase > 100 GT yaitu pelabuhan Bitung yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikan pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-716 kemungkinan besar banyak didaratkan dipelabuhan tersebut atau langsung keluar negeri. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi wilayah yang berhadapan langsung dengan laut di WPP-716 termasuk Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara dalam bidang perikanan belum dapat memanfaatkan potensi yang ada di laut. Hal ini akibat masih terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ada. Berdasarkan data yang ada, jumlah kapal yang ada di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008 s/d 2012 adalah antara 4.986 - 7.330 buah yang terdiri dari Kapal Motor (KM, ukuran kecil), kapal motor tempel (KMT) dan kapal tanpa motor (KTM). Pada tahun 2012 kabupaten/kota yang mempunyai jumlah kapal terbanyak adalah Kota Tarakan (2.156 buah), Kabupaten Bulungan (1.756 buah) dan kabupaten Nunukan (1.693 buah). Sedang kabupaten yang memiliki jumlah kapal paling sedikit adalah Tana Tidung, yaitu hanya 220 buah (tahun 2012) meskipun pada tahun 2011 jumlah kapal yang tercatat adalah 1.114 buah. Jumlah kapal di Kalimantan Utara dalam lima tahun (2008-2012) berfluktuasi, meskipun secara umum ada kecenderungan peningkatan untuk masa-masa yang akan datang. Perkembangan jumlah kapal di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar di bawah.

Tabel 2.3.176
Jumlah Kapal Motor (KM), Kapal Motor Tempel (KMT) dan Kapal Tanpa Motor (KTM) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

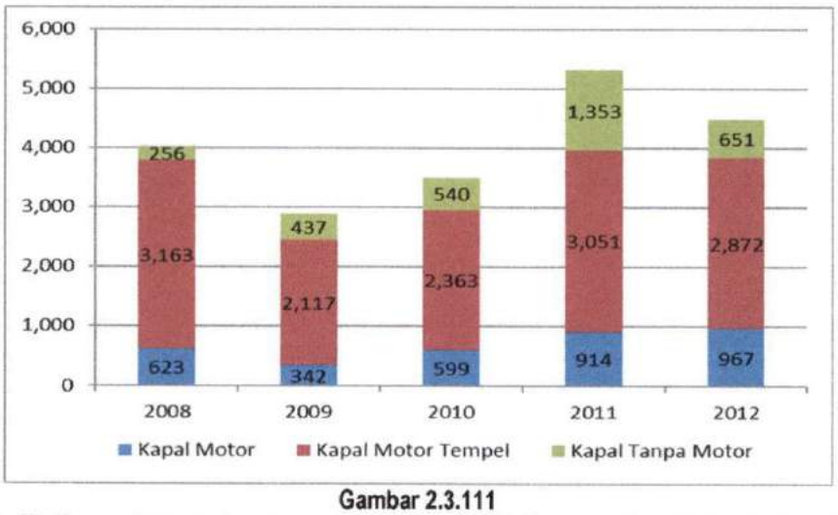
Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Motor (KM) Kapal Motor Tempel (KMT), dan Kapal Tanpa Motor (KTM) per Kabupaten/Kota				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	1.852	1.382	982	1.656	1.756
Malinau	428	454	791	791	791
Nunukan	1.772	1.160	1.729	1.757	1.693
Tana Tidung	-	-	-	1.114	220
Tarakan	1.934	1.990	2.005	2.012	2.156
Prov. Kalimantan Utara	5.986	4.986	5.507	7.330	6.616

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
2) Kabupaten Malinau dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2011 dan 2012
5) Kota Tarakan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012



Gambar 2.3.110
Grafik Jumlah kapal di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

Berdasarkan data yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa jumlah kapal motor tempel (KMT) adalah merupakan jumlah tersbesar (>50%) dan diikuti oleh kapal tanpa motor (KTM). Kapal motor (KM) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mempunyai ukuran yang kecil, seperti 10-15 GT dan hanya sebagian kecil yang mempunyai tonase besar. Dengan melihat struktur komposisi kapal motor untuk penangkapan ikan yang seperti ini, maka sub-sektor perikanan laut di Provinsi Kalimantan Utara belum dapat memanfaatkan potensi sumberdaya ikan yang cukup besar di WPP-716 tersebut.



Gambar 2.3.111
Grafik Komposisi jenis kapal yang ada di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014
(catatan: data kapal Kota Tarakan tidak dimasukkan kerena data tidak dibagi per jenis)

Tidak ada armada penangkapan ikan yang memadai di Provinsi Kalimantan Utara dismaping tidak termanfaatkannya potensi sumberdaya ikan yang ada, juga menyebabkan terjadinya penangkapan ikan oleh nelayan dari wilayah lain di Indonesia dan juga adanya kemungkinan terjadi pencurian ikan oleh nelayan asing seperti nelayan dari Malaisya, Thailand, Filipina atau dari China. Rendahnya pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini menyebabkan sub-sektor perikanan belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terdapat PDRB di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun demikian, sub-sektor perikanan kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2008 cenderung mengalami kenaikan secara terus menerus.

3. Budidaya Perikanan

Budidaya ikan di Provinsi Kalimantan Utara sudah berkembang sejak dekade yang lalu, meskipun tidak terjadi secara merata. Pengembangan budidaya ikan di Provinsi Kalimantan Utara meliputi budidaya udang dan bandeng di tambak (kolam air payau), kolam air tawar maupun karamba/rakit untuk kegiatan budidaya rumput laut.

a. Tambak Air Payau

Tambak air payau yang biasa digunakan untuk budidaya udang atau bandeng di Provinsi Kalimantan Utara sudah berkembang sejak sebelum tahun 2008. Pengembangan tambak tersebut terutama terjadi di Kabupaten Nunukan, Bulungan dan Kota Tarakan. Di Kabupaten Malinau tidak ada pengembangan tambak, karena kabupaten Malinau tidak mempunyai pantai. Di kabupaten Tana Tidung meskipun mempunyai garis pantai yang cukup panjang, tetapi pegembangan tambak tidak terjadi. Menurut data yang ada di BPS, di kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 tercatat mempunyai tambak dengan luas 301,2 ha tetapi pada tahun 2012 data tersebut tidak ada. Apakah tambak-tambak yang ada telah mengalami alih fungsi atau terjadi hal yang lain, penyusun belum tahu. Demikian juga data tambak di Kabupaten Bulungan tahun 2012 juga tidak tercatat adanya tambak, meskipun dalam kenyataannya

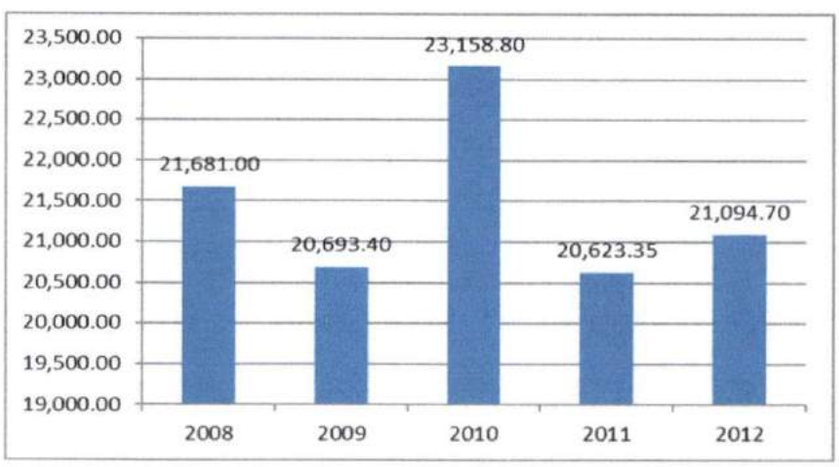
keberadaan tambak dapat disaksikan dai pantai Bulungan. Hanya kemungkinan tambak-tambak tersebut saat ini sudah banyak yang tidak operasional mengingat adanya berbagai gangguan seperti serangan penyakit pada udang dan gangguan keamanan. Luas tambak di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2008-2012 berkisar antara 20.623,35 s/d 23.158,80 ha. Luas tambak tertinggi tercatat pada tahun 2010 yaitu seluas 23.158,80 ha dan terendah tercatat pada tahun 2012 yaitu hanya seluas 20.623,35 ha.

Tabel 2.3.177
Luas Tambak (ha) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Luas Tambak (ha) dirinci per Kabupaten/Kota				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	1.909,00	816,4	3.276,80	349,45	-
Malinau	-	-	-	-	-
Nunukan	18.915,00	19.020,00	19.025,00	19.025,00	20.147,00
Tana Tidung	-	-	-	301,2	-
Tarakan	857	857	857	947,7	947,7
Prov. Kalimantan Utara	21.681,00	20.693,40	23.158,80	20.623,35	21.094,70

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2008, 2009, 2010, dan 2011
2) Kabupaten Malinau dalam angka (tidak disebutkan jumlah datanya)
3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2011
5) Kota Tarakan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012

Berfluktuasinya luas tambak yang ada di Provinsi Kalimantan kemungkinan terjadi akibat kondisi usaha budidaya udang yang kurang kondusif bagi para petambak akibat terjadinya kerusakan lingkungan yang menyebabkan budidaya udang banyak mengalami kendala khususnya penyakit. Hal ini dapat dimengerti, mengingat pengembangan tambak yang ada belum mengikuti kaidah lingkungan yang benar (misal belum ada dokumen Master plan pengembangan kawasan pertambakan) sehingga budidaya udang/ikan dapat bersifat lestari. Di banyak tempat di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Utara pengembangan tambak di pantai kebanyakan dilakukan dengan cara mengkonversi hutan mangrove tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang ditimbulkan pada tahun-tahun berkiutnya. Oleh karena itu, pengembangan pertambakan di pantai sangat diperlukan adanya dokumen akademik yang berupa Masterplan pengembangan pertambakan, sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.



Gambar 2.3.112
Grafik Jumlah luas tambak (ha) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

b. Kolam Air Tawar

Budidaya ikan di perairan tawar (kolam) di Provinsi Kalimantan Utara telah mulai berkembang, khususnya di Kabupaten Nunukan, Malinau dan kota Tarakan. Di Kabupaten Bulungan data luas kolam ikan tercatat sebanyak 3,33 ha pada tahun 2009 dan berkembang menjadi 15,4 ha pada tahun 2011. Namun data di BPS luas kolam ikan pada tahun 2012 tidak tercatat. Ditlihat dari luas kolam yang ada, Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai luasan kolam ikan terbesar. Berdasarkan data tahun 2008 s/d 2012, luas kolam yang ada di Kabupaten Nunukan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008 tercatat luas kolam di Kabupaten Nunukan adalah 11.041 ha dan mengalami penurunan menjadi 8.904 ha di tahun 2012. Secara keseluruhan luas kolam ikan di Provinsi Kalimantan Utara antara tahun 2008 s/d 2012 cenderung mengalami penurunan, meskipun penurunan tersebut tidak terlalu tajam.

Budidaya ikan air tawar di Provinsi Kalimantan Utara sementara ini masih bersifat tradisional dan belum dikembangkan ke arah intensif. Permasalahan utama pengembangan perikanan air tawar di Provinsi Kalimantan Utara masih tertumpu pada masalah tingginya harga pakan ikan,mengingat pabrik pakan ikan umumnya terdapat di pulau Jawa dan belum berkembangnya sarana pembenihan ikan yang dapat diakses pembudidaya secara mudah dan tepat waktu. Di Kabupaten Bulungan misalnya, meskipun sudah terdapat BBI (Balai Pembenihan Ikan) namun belum dapat mencukupi kebutuhan akan benih ikan di Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga pengembangan BBI di beberpa kawasan budidaya ikan air tawar perlu dikembangkan.

Tabel 2.3.178
Luas kolam ikan (ha) per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Luas Kolam (ha) dirinci per Kabupaten/Kota				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	-	3,33	12,10	15,40	-
Malinau	118,30	135,60	147,00	164,00	164,00
Nunukan	11.041,00	9.845,00	9.884,00	9.888,00	8.904,00
Tana Tidung	-	-	-	27,40	-
Tarakan	68,20	76,20	76,20	451,30	451,30
Prov. Kalimantan Utara	11.227,50	10.060,13	10.119,30	10.546,10	9.519,30

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2009, 2010,dan 2011
2) Kabupaten Malinau dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2011
5) Kota Tarakan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012

c. Karamba/Rakit

Budidaya ikan di karambajaring apung (KJA) di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Nunukan meskipun masih sangat kecil (0,005-0,02 ha). Sedang untuk karamba/rakit untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan luasnya terus berkembang dari tahun 2008 yang hanya 31,05 ha tumbuh menjadi 1.287,0 ha di tahun 2012. Menurut informasi yang ada, pertumbuhan karamba/rakit untuk budidaya rumput laut disebabkan banyak nelayan yang beralih profesi dari menangkap ikan menjadi pembudidaya rumput laut. Sedangkan di kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara belum ada catatan tentang pengembangan budidaya ikan di karamba/rakit.

Tabel 2.3.179
Luas karamba/rakit (ha) di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Jenis	Luas Karamba/Rakit (ha)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Karamba (ha)	0,005	-	0,02	0,02	0,01
Pantai/Laut (ha)	31,05	436,9	712,1	1.297,00	1.287,00

Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013

4. Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun

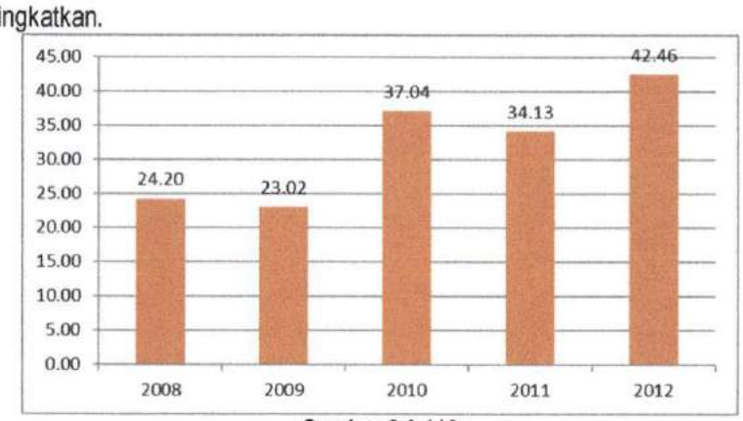
Konsumsi ikan per kapita/tahun di Provinsi Kalimantan Utara secara umum terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 konsumsi ikan per kapita/tahun di Provinsi Kalimantan Utara 24,2 kg/kapita/tahun dan menjadi 42,46 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa konsumsi ikan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara cukup merata kecuali di Kabupaten Malinau. Konsumsi ikan/kapita/tahun penduduk di Kabupaten Malinau masih sangat rendah. Hal ini disebabkan tidak tersedianya data tentang konsumsi ikan tersebut, sehingga dilakukan pendekatan dengan menghitung berdasarkan produksi ikan dibagi dengan jumlah penduduk. Kemungkinan ada ketidak akuratan data yang tersedia di kabupaten tersebut. Konsumsi ikan penduduk Provinsi Kalimantan Utara secara umum sudah melebihi konsumsi ikan secara nasional. Pada tahun 2012 misalnya, konsumsi ikan/kapita/tahun nasional hanya 33,86 kg/kapita/tahun dan 35 kg/kapita/tahun (tahun 2013) padahal di Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapai 42,46 kg/kapita/tahun. Demikian juga jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang pada tahun 2012 hanya 36 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.3.180
Konsumsi Ikan/Kapita/Tahun Penduduk per Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Konsumsi Ikan/Kapita/Tahun per Kabupaten/Kota				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	24,81	10,57	36,94	34,01	57,43
Malinau	2,97	2,88	4,61	7,44	9,54
Nunukan	40,47	53,47	69,31	51,67	48,24
Tana Tidung	-	-	48,55	53,87	73,88
Tarakan	28,55	25,16	25,8	23,66	23,24
Prov. Kalimantan Utara	24,2	23,02	37,04	34,13	42,46

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012
2) Kabupaten Malinau dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2010, 2011, dan 2012
5) Kota Tarakan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012

Tingkat konsumsi ikan penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang cukup tinggi dibanding tingkat konsumsi ikan secara nasional cukup menguntungkan bagi pengembangan perikanan, sebab konsumsi ikan yang tinggi akan menjadi peluang pasar ikan secara domestik. Meskipun ditinjau dari tingkat produksivitas perikanan Provinsi Kalimantan Utara, tampaknya konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Utara belum cukup untuk menyerap semua produksi ikan yang ada. Dengan demikian pemasaran ke luar daerah atau luar negeri masih diperlukan apalagi jika produksi ikan terus ditingkatkan.



Gambar 2.3.113
Grafik Konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

5. RTP (Rumah Tangga Perikanan)

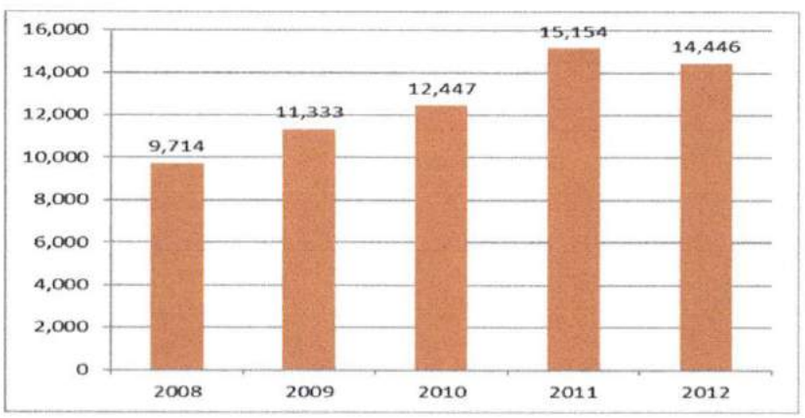
RTP (Rumah Tangga Perikanan) di Provinsi Kalimantan Utara antara tahun 2008 s/d 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.3.2.E.8. Berdasarkan data yang ada, menunjukkan bahwa jumlah RTP (perikanan tangkap dan budidaya) di Provinsi Kalimantan Utara cenderung meningkat meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Jumlah RTP di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008 hanya 9.714 RTP mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2012 menjadi 14.446 RTP. Pada Tabel 2.3.2.E.8 tampak bahwa jumlah RTP terbanyak adalah di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Data jumlah RTP di kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan tidak lengkap, meskipun sebenarnya di lapangan terdapat banyak nelayan maupun pembudidaya ikan.

Tabel 2.3.181
Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

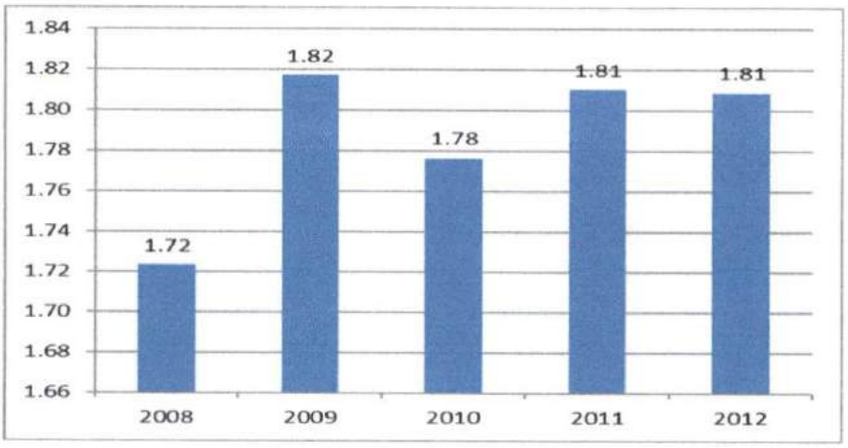
Kabupaten/Kota	Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) per Kabupaten/Kota				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	4.703	5.520	4.098	4.844	5.613
Malinau	2.324	2.374	2.824	2.924	2.904
Nunukan	2.687	2.073	2.785	2.875	2.762
Tana Tidung	-	1.366	2.740	1.726	426
Tarakan	-	-	-	2.785	2.741
Prov. Kalimantan Utara	9.714	11.333	12.447	15.154	14.446

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012
2) Kabupaten Malinau dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2011, dan 2012
5) Kota Tarakan dalam angka 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012

Peningkatan jumlah RTP di Provinsi Kalimantan Utara cukup menggembirakan, mengingat bahwa potensi perikanan di provinsi tersebut sementara ini belum termanfaatkan secara baik. Padahal kegiatan perikanan khususnya penangkapan adalah merupakan kegiatan yang bersifat cepat menghasilkan (*quick yielding*) sehingga dapat sub-sektor ini dapat dijadikan sebagai *prime mover* pengembangan suatu kawasan. Pengembangan penangkapan ikan bagi masyarakat non-maritim sering mengamlami banyak hambatan dan membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu untuk percepatan pengembangan penangkapan ikan maupun budidaya ikan di Provinsi Kalimantan Utara dapat ditempuh dengan program transmigrasi sebagaimana yang telah dilakukan untuk sektor pertanian lainnya.



Gambar 2.3.114
Grafik Perkembangan Jumlah RTP di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014



Gambar 2.3.115
Grafik Rata-Rata hasil produksi ikan/RTP (ton/th) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

Ditinjau dari hasil produksi ikan/RTP di Provinsi Kalimantan Utara tampaknya belum menggembirakan. Rata-rata produksi ikan/RTP pelaku usaha perikanan di Provinsi Kalimantan Utara masih berkisar antara 1,72-1,82 ton/RTP/tahun (Gambar 2.3.2.E.9). Dengan asumsi bahwa harga ikan di tempat adalah Rp 30.000,-/kg maka setiap RTP diperkirakan akan mempunyai penghasilan antara Rp 51.600.000,- s/d Rp 54.600.000,- per tahunnya. Kalau diasumsikan bahwa setiap RTP mempunyai satu orang istri dan 2 orang anak, maka pendapatan pelaku usaha perikanan (tangkap dan budidaya) di Provinsi Kalimantan Utara masih di atas dari garis kemiskinan. Namun demikian, tingkat pendapatan tersebut masih dapat ditingkatkan apabila tingkat produktivitas juga ditingkatkan.

6. Ekspor produk perikanan dari Kalimantan Utara

Komoditas perikanan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu komoditas ekspor dan juga merupakan komoditas yang diperdagangkan antar provinsi di Indonesia. Ekspor komoditas perikanan dari Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 adalah merupakan bagian terbesar dari ekspor komoditas perikanan yang dilakukan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Ekspor komoditas perikanan pada tahun 2012 dari Provinsi Kalimantan Utara mencapai 9.665,08 ton dengan nilai US $ 46.109,00. Sedangkan ekspor komoditas perikanan dari Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Provinsi Kalimantan Utara) adalah hanya 12.718,26 ton dengan nilai US $ 79.785.195,00. Dengan demikian, ekspor komoditas perikanan dari Provinsi Kalimantan Utara adalah mencapai 75,99% dari total ekspor Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dengan adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara ini maka dapat dikatakan bahwa ekspor komoditas perikanan dari Provinsi Kalimantan Utara jauh lebih tinggi jumlah dan nilainya dibanding dengan ekspor yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Komoditas perikanan yang menjadi andalan ekspor dari Provinsi Kalimantan Utara adalah jenis udang (beku dan segar) dan lobster yang besarnya mencapai 5.646,9 ton. Komoditas penting kedua yang diekspor adalah berbagai jenis ikan (ikan campuran) yang jumlahnya mencapai 4.670,74 ton dan yang selanjutnya adalah kepiting yang jumlahnya mencapai 1.192,68 ton. Disamping kedua komoditas utama tersebut, berbagai macam jenis komoditas lain juga diekspor seperti ikan cakalang/tuna, cumu, rumput laut, ikan hias dan sebagainya. Ekspor komoditas tersebut yang utama dilakukan melaui Kota Tarakan, disamping juga dilakukan melalui Nunukan, Tanjung Selor dan Bunyu. Tarakan menjadi tempat/lokasi ekspor utama bagi komoditas perikanan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Utar.

Tabel 2.3.182
Ekspor komoditas perikanan (ton) dari Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012

Jenis Komoditas	Total Ekspor Kalimantan Utara (ton)	Total Kaltim Termasuk Kalimantan Utara (ton)	% Ekspor dari Kalimantan Utara
Udang Dan Lobster	5.646,90	5.686,54	99,30
Ikan Cakalang, Tuna	92,84	92,84	100,00
Rumput Laut Dan Ganggang Lainnya	18,69	18,69	100,00
Ikan Lainnya	4.670,74	5.050,56	92,48
Kepiting	1.192,68	1.732,86	68,83
Mutiara	0,00	0,00	0,00
Cumi-Cumi, Sotong, Gurita	7,00	7,00	100,00
Kekerangan, Invertebrata	25,92	26,06	99,44
Ikan Hias	1,00	1,39	72,10
Produk Ikan Lainnya	32,34	102,31	31,61
Jumlah	9.665,08	12.718,26	75,99

Sumber :
1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2012
2) Kabupaten Malinau dalam angka 2012
3) Kabupaten Nunukan dalam angka 2012
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2012
5) Kota Tarakan dalam angka 2012

Tabel 2.3.183
Nilai ekspor komoditas perikanan (US $) dari Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012

Komoditas	Kalimantan Utara ($)	Kaltim ($)	%
Udang Dan Lobster	66.484.505,00	66.809.067,00	99,51
Ikan Cakalang, Tuna	136.507,00	136.507,00	100,00
Rumput Laut Dan Ganggang Lainnya	59.156,00	59.156,00	100,00
Ikan Lainnya	7.074.296,00	7.874.678,00	89,84
Kepiting	3.212.424,00	4.307.898,00	74,57
Mutiara	0,00	0,00	0,00
Cumi-Cumi, Sotong, Gurita	15.842,00	15.842,00	100,00
Kekerangan, Invertebrata	316.252,00	316.542,00	99,91
Ikan Hias	472,00	12.137,00	3,89
Produk Ikan Lainnya	46.109,00	253.368,00	18,20
Jumlah	58.036.576,00	79.785.195,00	72,74

Sumber : Statistik Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditi, Provinsi dan Pelabuhan Asal Ekspor, 2012

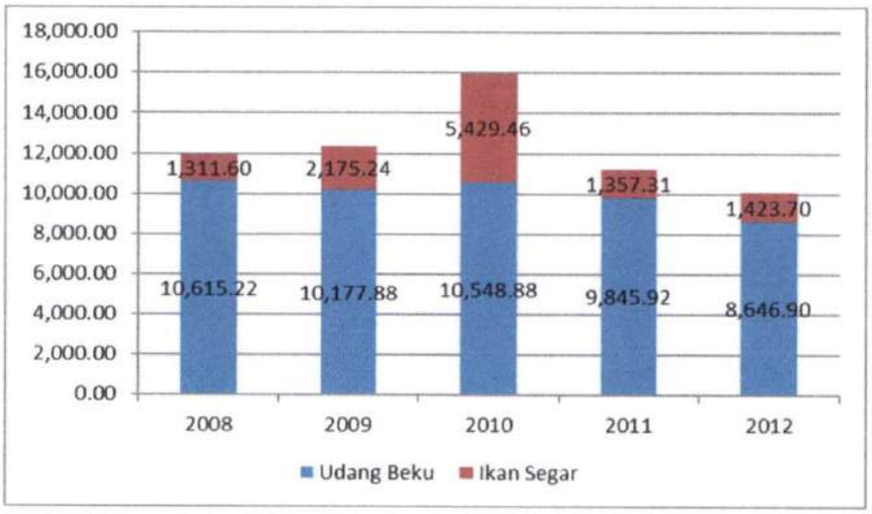
Tabel 2.3.184
Ekspor komoditas perikanan (ton) yang ada di Provinsi Kalimantasn Utara Tahun 2012

Komoditas	Tarakan	Tanjung Selor	Nunukan	Bunyu	Total
Udang Dan Lobster	5.615.079	0	7.720	24.105	5.646.904
Ikan Cakalang, Tuna	91.800	1.043	0	0	92.843
Rumput Laut Dan Ganggang Lainnya	10.287	0	8.407	0	18.694
Ikan Lainnya	4.665.672	0	0	5.065	4.670.737
Kepiting	1.190.722	1.957	0	0	1.192.679
Mutiara	0	0	0	0	0
Cumi-Cumi, Sotong, Gurita	7.000	0	0	0	7.000
Kekerangan, Invertebrata	25.916	0	0	0	25.916
Ikan Hias	1.000	0	0	0	1.000
Produk Ikan Lainnya	27.000	0	5.337	0	32.337
Jumlah	9.611.450	3.000	21.464	29.170	9.665.084

Sumber : Statistik Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditi, Provinsi dan Pelabuhan Asal Ekspor, 2012

Berdasarkan data yang terdapat di karantina ikan di Kota Tarakan menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas perikanan yang diekspor melalui kota Tarakan adalah berupa udang beku. Ekspor udang beku dari Kota Tarakan sejak tahun 2008 s/d 2012 cenderung mengalami penurunan volumenya. Pada tahun 2010 merupakan

puncak ekspor komoditas udang beku dari Kota Tarakan yang jumlahnya mencapai 10.548,88 ton dan terus menurun hingga tinggal 8.646,9 ton pada tahun 2012. Penurunan volume ekspor udang beku ini kemungkinan akibat adanya para pembudidaya udang yang menghentikan operasional tambaknya akibat adanya berbagai macam kendala teknis dan non teknis.



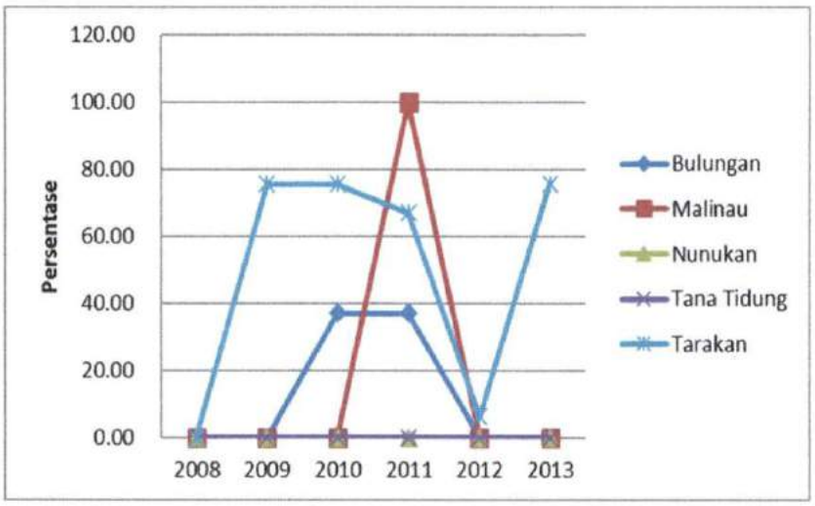
Gambar 2.3.116
Grafik Ekspor produk perikanan (ton) dari Pelabuhan Tarakan Tahun 2008-2012
Sumber : Hasil Analisis 2014

Provinsi Kalimantan Utara disamping banyak melakukan ekspor komoditas perikanan termasuk rumput laut, ternyata juga masih melakukan impor khususnya yang berupa produk olahan rumput laut seperti agar-agar. Nilai impro produk olahan rumput laut tersebut pada tahun 2012 adalah mencapai 2.864 ton dengan nilai hanya US $ 10.277. Impor tersebut khususnya dilakukan dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan.

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertambangan Tanpa Izin

Indikator bidang energi dan sumberdaya mineral menurut Permendagri No. 54 tahun 2010 meliputi:: 1) penambangan tanpa ijin dan 2) kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Indikator penambangan tanpa ijin yang tersedia adalah batubara, dimana data penambangan tanpa ijin diolah dari Kabupaten Bulungan, Malinau dan Kota Tarakan dari tahun 2008 hingga 2013. Indikator penambangan tanpa ijin merupakan perbandingan antara area penambangan tanpa ijin yang dapat ditertibkan dengan seluruh area penambangan tanpa ijin total dikalikan 100%. Dari gambar 2.3.2.C.1 terlihat adanya peningkatan penambangan tanpa ijin terjadi pada tahun 2008, 2010 dan 2011 yang terjadi di tiga kabupaten tersebut dari seluruh areal penambangan batubara, sedangkan pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 terjadi penurunan penambangan tanpa ijin. Hal ini berarti dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) kembali terjadi permasalahan kecenderungan penurunan area penambangan tanpa ijin yang bisa ditertibkan. Peningkatan penambangan tanpa ijin ini diperkirakan: 1) akibat meningkatnya kebutuhan batubara dunia melalui eksport batubara ke negara negara industri; 2) banyak pedagang batubara yang mengambil batubara untuk eksport dari penambang tanpa ijin; 3) kurang efisiensinya pengawasan penambangan batubara tanpa ijin baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; 4) belum ada regulasi mengenai konservasi batubara oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Gambar 2.3.117
Grafik Penambangan Tanpa Ijin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

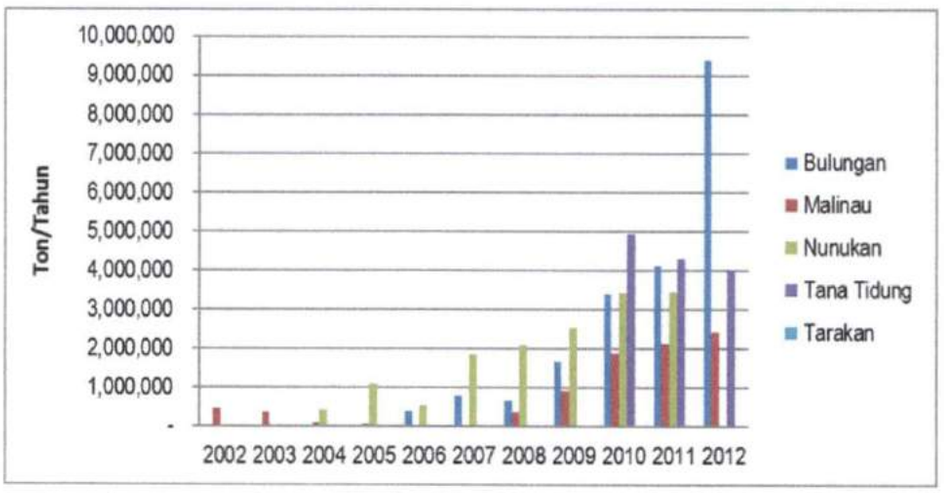
Akibat aktivitas penambangan tanpa ijin tersebut akan meninggalkan permasalahan seperti: 1) meluasnya area penambangan tanpa ijin yang tidak bisa ditertibkan; 2) kerusakan lingkungan akibat pembukaan penutup lahan yang berdampak terhadap kehidupan flora dan fauna; 3) terbentuknya air asam akibat pembuangan limbah sedimen yang banyak mengandung sulfur/H2S yang akan berpengaruh terhadap air tanah dan air permukaan; 4) kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan batubara yang melebihi kapasitas muatan; 5) peningkatan penambangan tanpa ijin akibat permintaan batubara dunia untuk kepentingan industri meningkat, sehingga harus ada regulasi dalam lapangan kerja terkait dengan penambangan batubara tanpa ijin.

Produksi batubara di Provinsi Kalimantan Utara yang diolah dari data BPS tahun 2004-2012 yang meliputi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan (gambar 2.3.2.C.2), terjadi peningkatan produksi pada tahun 2004-2011 untuk Kabupaten Nunukan dan bahkan sampai 2012 untuk Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau terjadi peningkatan produksi pada tahun 2008-2012, selanjutnya terjadi penurunan produksi mulai tahun 2010-2012 untuk Kabupaten Tana Tidung. Peningkatan produksi batubara ini diduga penyebabnya adalah kebutuhan batubara dunia dari negara negara industri meningkat tajam selama kurun tahun 2004-2010, sedangkan penurunan produksi batubara pada kurun 2011-2012 diperkirakan karena: 1) kebutuhan batubara di pasaran menurun; 2) dan akan terus menurun dengan adanya regulasi pemerintah mengenai larangan eksport bahan tambang/batubara mentah pada tahun 2014; 3) kebijakan konservasi batubara dan mengolah batubara sebagai hasil industri seperti industri energi yang memanfaatkan batubara; 4) kontribusi sektor tambang batubara terhadap PDRB harus mempertimbangkan faktor lingkungan (tidak mengulangi kesalahan yang dialami oleh provinsi Kaltim); 5) cara penambangan tertutup disarankan sebagai alternatif untuk menekan kerusakan lingkungan

Peningkatan produksi batubara pada tahun 2007-2010 dan penurunan produksi batubara pada tahun 2011-2012 masih memberi peningkatan kontribusi terhadap PDRB tahun 2007-2012 yang berkisar dari 10,06%-19,02% .

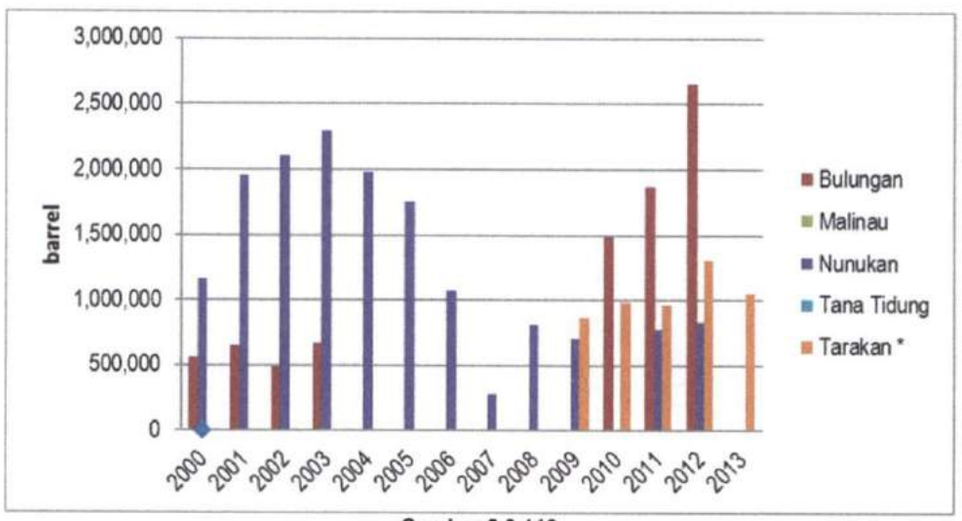
Permasalahan yang akan timbul pada kurun 20 tahun mendatang ialah terjadinya penurunan produksi batubara akibat kebijaksanaan pemerintah yang baru dalam pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara yang melarang eksport batubara dalam bentuk mentah. Penurunan produksi batubara pada kurun 20 tahun mendatang akan berdampak terhadap: 1) penurunan lapangan pekerja tambang batubara; 2) kontribusi sektor pertambangan non migas khususnya batubara tehadap PDRB akan menurun; 3) terdorongnya pertumbuhan industri yang menggunakan batubara, sehingga terjadi konservasi batubara; 4) kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat penambangan batubara dapat dikurangi, terlebih dengan metode penambangan tertutup.

Salah satu usaha untuk meningkatkan produksi batubara di Provinsi Kalimantan Utara, maka dilakukan antara lain meningkatkan penambangan (iup) batubara Provinsi Kalimantan Utara dinaikkan dari 3,5-7% menjadi 10-13% , yang akan dimulai pada awal 2014 (Buku Panduan Rapat Koordinasi Bappeda Se Kalimantan Utara, 2014).



Gambar 2.3.118
Grafik Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2004-2012
Sumber: Hasil Analisi 2014

Produksi minyak bumi di Provinsi Kalimantan Utara yang diolah dari data BPS yang berasal dari Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan dari tahun 2000 hingga 2013. Pada tahun 2000-2003 terjadi peningkatan produksi terutama yang berasal dari Kabupaten Nunukan dan terjadi penurunan produksi pada tahun 2004-2007 dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2007-2012.



Gambar 2.3.119
Grafik Produksi Minyak Bumi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

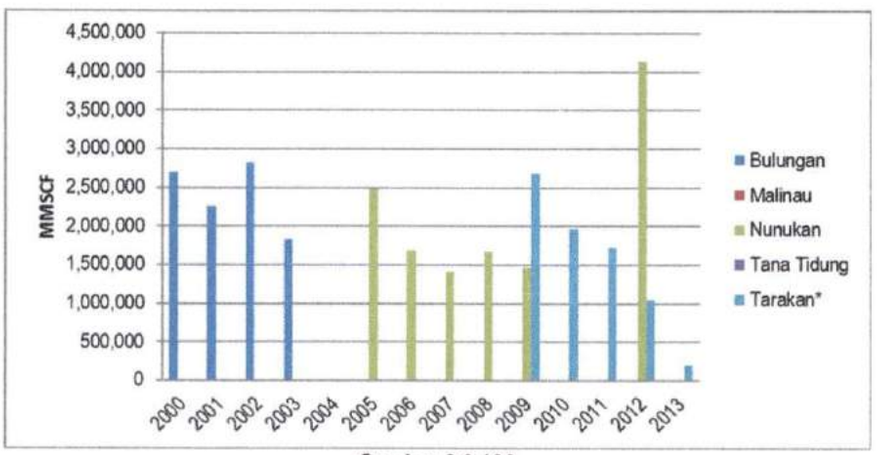
Untuk Kabupaten Bulungan produsi minyak bumi relatif sedikit meningkat pada tahun 2000-2003, tidak ada data selama 2004-2009, selanjutnya terjadi peningkatan produksi pada tahun 2010-2012. Untuk Kota Tarakan terjadi lonjakan produksi pada tahun 2009-2012, tetapi ada kecenderungan menurun pada tahun 2013.

Peningkatan produksi minyakbumi di Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi pada periode 2000 - 2003 dan 2007 -2012 diperkirakan karena: a) kebutuhan minyakbumi di pasaran meningkat; b) iklim investasi minyak bumi dianggap baik; c) penemuan sumur sumur produksi baru, d) suntikan teknologi EOR untuk meningkatkan produksi minyakbumi, sedangkan penurunan produksi minyak bumi yang terjadi tahun 2003-2007, dan 2013 kemungkinan disebabkan menurunnya kemampuan sumur-sumur produksi yang dipengaruhi banyak faktor diantaranya menurunnya cadangan minyak bumi yang dapat diambil dan tidak ada daerah temuan baru.

Untuk meningkatkan kembali produksi minyakbumi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara perlu digalakkan pada tahun 2014 diantaranya: 1) kegiatan penambangan minyak dan gas bumi dimana saat ini banyak terjadi kontrak karya migas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan masih dalam tahap eksplorasi, terutama di wilayah lepas pantai (*offshore*) oleh beberapa investor perminyakan dengan SKK migas; 2) Produksi lapangan Bunyu meningkat 21% (produksi akhir tahun 2012 atau yaitu 7mmscfd menjadi 9 mmscfd atau sampai dengan Mei 2013 telah mencapai 88,89% dari pragnose 2013 adalah 1002,25 MMBTU atau 2.75 ribu MMBTU; dan 3) Kontraktor Manathan K.1 di lapangan Tarakan siap memproduksi minyak bumi dengan pragnose/perkiraan lifting pada tahun 2013 sebesar 36.5 ribu barel atau 0.10 juta barel/hari, namun masih terkendala masalah tanah di BPN (Buku Panduan Rapat Koordinasi Bappeda Se Kalimantan Utara,2014).

Produksi gas bumi yang diolah dari data BPS yang sama terlihat pada gambar 2.3.2.C.4, dimana terjadi penurunan produksi dari tahun 2000-2003 untuk Kabupaten Bulungan, selanjutnya penurunan produksi juga terjadi di Kabupaten Nunukan 2005-2009, dan meningkat drastis pada tahun 2012 ,sedangkan untuk Kota Tarakan juga terjadi penurunan produksi pada tahun 2009-2013. Penurunan dan peningkatan produsi gas bumi terkait dengan kebutuhan gas bumi di pasaran dan harga pasaran gas bumi.

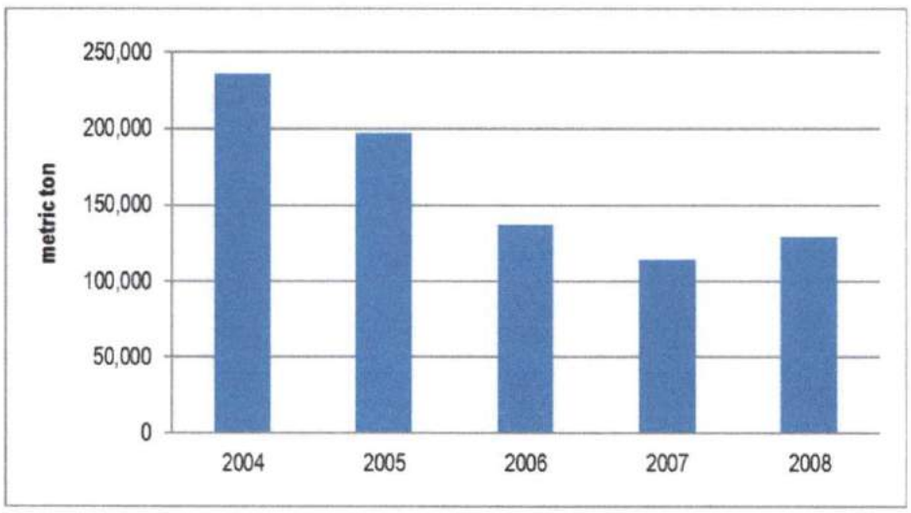
Untuk meningkatkan produksi gas bumi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan usaha antara lain merealisasikan gas bumi JOB PT Medco Simenggaris dan Pertamina EP, EMP Medco Sembakung (TAC) siap memproduksi dengan pragnose lifting th 2013 masing masing 1890,18 ribu mmbtu atau 5.88 ribu mmbtud dan 716,10 ribu MMBTU atau 1,96 mmbtud, namun belum ada ijin dari pemda untuk melakukan lifting (Buku Panduan Rapat Koordinasi Bappeda Se Kalimantan Utara, 2014).



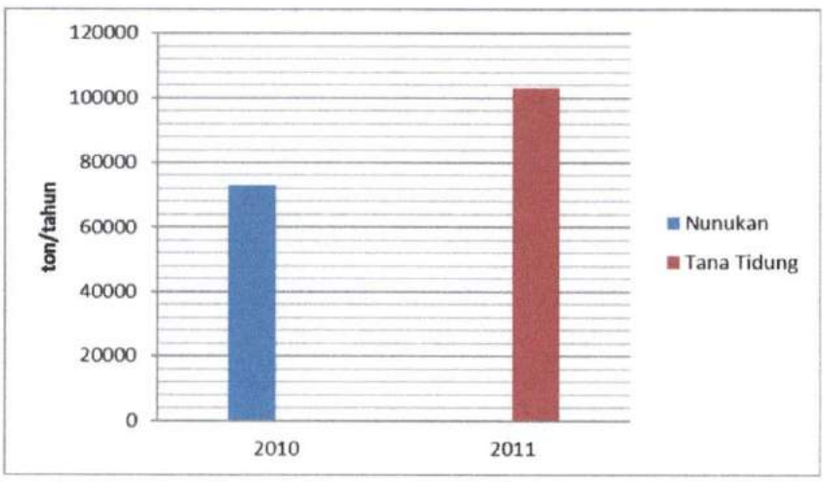
Gambar 2.3.120
Grafik Produksi Gas Bumi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2000-2013
Sumber: Hasil Analisis 2014

Peningkatan produksi minyak bumi tahun 2007-2012 dan penurunan produksi gas bumi pada tahun 2007-2009 dan 2011-2012 justru memberikan dampak kontribusi sektor migas terhadap PDRB menurun yaitu 8,53%-5,15%. Hal ini bisa terjadi jika sektor sektor lain memberi kontribusi terhadap PDRB lebih tinggi setiap tahunnya. Untuk data bagi hasil (dbh) sektor migas tahun 2007-2012 juga tidak diketahui datanya.

Permasalahan yang timbul dari data tersebut terdapat kecenderungan produksi migas pada 20 tahun yang akan datang (2007-2012) terjadi penurunan produksi sehingga akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor ini terhadap PDRB apabila tidak ada usaha peningkatan produksi migas.



Gambar 2.3.121
Grafik Produksi Methanol di Kabupaten Bulungan Tahun 2004-2008
Sumber: *PT. Medco Methanol Bunnyn*



Gambar 2.3.122
Grafik Produksi Bahan Galian Golongan C di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2011
Sumber: Hasil Analisis 2014

Untuk produksi methanol berdasarkan data PT Medco Methano; Bunnyn di Kabupaten Bulungan Tahun 2004-2008, telah terjadi penurunan produsi pada tahun 2004-2007, telah terjadi penurunan produksi pada tahun 2004-2007, sedikit meningkat pada tahun 2008. Kontribusi produk methanol ini tidak diketahui, akan tetapi perlu ditingkatkan dan dikembangkan di masa mendatang untuk meningkatkan nilai tambah produk migas. Selain migas tidak hanya dijual sebagai minyak mentah tetapi harus di olah menjadi bahan energi yang bervariasi sehingga diperlukan industri pengolahan migas di masa mendatang. Untuk produksi bahan galian golongan C hanya didapatkan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, itupun masih sangat terbatas dan ujudnya juga tidak ada informasi., yang diduga kemungkinan sebagai bahan urug berupa tanah,pasir,kerikil dan batu.

Tabel 2.3.185
Simulasi Perhitungan Realisasi Lifting Minyak Bumi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014

Kabuapaten/Kota	Prognosa	Asumsi Realisasi 100%		Asumsi Icp (Us$/Barrel)	Perkiraan Gross Revenue	Bagian Pemerintah dan Kontraktor/Asumsi Tiga Tahun Terakhir (Rp)		Lifting Pemerintah
	(ribu barel)	(ribu barel)	%		(ribu US $)	Pemerintah	Kontraktor	(ribu US $)
Bulungan	2.402,48	2.402,48	100,00%	100	240.248	97.324,46	142.923,54	97.324,46
Nunukan	501,17	501,17	100,00%	100	50.117	20.207,17	29.909,83	20.207,17
Tana Tidung	22,75	22,75	100,00%	100	2.275	930,82	1.344,18	930,82
Tarakan	1.152,14	1.152,14	100,00%	100	115.214	78.529,86	36.684,14	78.529,86
Total Jumlah	**4.078,54**	**4.078,54**	**100,00%**		**407.854,00**	**196.992,32**	**210.861,68**	**196.992,32**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tabel 2.3.186
Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Pemerintah Pusat Dan Daerah

Daerah Penghasil	Bagian Pemerintah (Ribu Us$)	Pusat (84,5%) (Ribu Us$)	Provinsi (Ribu Us$)	Kab/Kota Penghasil (Ribu Us$)	Kab/Kota Non Penghasil (Ribu Us$)
Bulungan	97.324,46	82.239,17	3.017,06	6.034,12	6.034,12
Nunukan	20.207,17	17.075,06	626,42	1.252,84	1.252,84
Tana Tidung	930,82	786,54	28,86	57,71	57,71
Tarakan	78.529,86	66.357,73	2.434,43	4.868,85	4.868,85
Jumlah	**196.992,32**	**166.458,51**	**6.106,76**	**12.213,52**	**12.213,52**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tabel 2.3.187
Perimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota dari Minyak Bumi

Daerah Penghasil	dalam Ribu US $	Asumsi kurs rupiah	dalam Rupiah	Asumsi Pajak dan Fee 10% (dalam Rupiah)	Pendapatan Bersih (dalam Rupiah)
Bulungan	7.578,97	**10.000**	75.789.685.399	7.578.968.540	68.210.716.859
Malinau	3.053,38	**10.000**	30.533.809.267	3.053.380.927	27.480.428.340
Nunukan	3.993,01	**10.000**	39.930.145.363	3.993.014.536	35.937.130.826
Tana Tidung	3.096,66	**10.000**	30.966.638.823	3.096.663.882	27.869.974.941
Tarakan	6.705,02	**10.000**	67.050.195.283	6.705.019.528	60.345.175.754
Provinsi	**6.106,76**	**10.000**	**61.067.618.534**	**6.106.761.853**	**54.960.856.680**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tabel 2.3.188
Simulasi Perhitungan Realisasi Lifting Gas Bumi Provinsi Kalimantan Utara Tw III Tahun 2013

Kabupaten/ Kota	Prognosa	Asumsi Realisasi 100%		Assumsi Harga Gas	Gross Revenue	Asumsi Bagian Pemerintah & Kontraktor		Lifting Pemerintah
	(Ribu MMBTU)	(Ribu MMBTU)	%	(Us$/Mmbtu)	(Ribu US $)	Pemerintah	Kontraktor	(Ribu US $)
Bulungan	1.026,84	1.026,84	100	5,258	5.399,12	721,86	4.677,26	721,86
Nunukan	1.235,76	1.235,76	100	5,000	6.178,80	803,24	5.375,56	803,24
Tarakan	919,29	919,29	100	3,326	3.057,19	425,26	2.631,94	425,26
Jumlah	**3.181,89**	**3.181,89**	**100**		**14.635,12**	**1.950,36**	**12.684,75**	**1.950,36**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tabel 2.3.189
Dana Bagi Hasil Gas Bumi Pemerintah Pusat dan Daerah

Daerah Penghasil	Dana Bagi Hasil (Ribu Us$)	Pusat (Ribu Us$)	Provinsi (Ribu Us$)	Kab/Kota Penghasil (Ribu Us$)	Kab/Kota Non Penghasil
Bulungan	721,86	501,69	44,03	88,07	88,07
Nunukan	803,24	558,25	49,00	98,00	98,00
Tarakan	425,26	295,55	25,94	51,88	51,88
Jumlah	**1.950,36**	**1.355,50**	**118,97**	**237,94**	**237,94**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tabel 2.3.190
Perimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota dari Gas Bumi

Prov/Kab/Kota	dalam Ribu US $	Asumsi kurs rupiah	dalam Rupiah (dalam rupiah)	Asumsi Pajak dan Fee 10%	Pendapatan Bersih (dalam rupiah)
Bulungan	125,54	10.000	1.255.365.098,88	125.536.509,89	1.129.828.588,99
Malinau	59,49	10.000	594.860.476,70	59.486.047,67	535.374.429,03
Nunukan	132,98	10.000	1.329.828.736,70	132.982.873,67	1.196.845.863,03
Tana Tidung	59,49	10.000	594.860.476,70	59.486.047,67	535.374.429,03
Tarakan	98,40	10.000	983.969.024,61	98.396.902,46	885.572.122,15
Provinsi Kalimantan Utara	**118,97**	**10.000**	**1.189.720.953,40**	**118.972.095,34**	**1.070.748.858,06**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tabel 2.3.191
Perkiraan Dana Bagi Hasil Migas di Kalimantan Utara Tahun 2014

	MINYAK BUMI (dalam rupiah)	GAS BUMI (dalam rupiah)	JUMLAH (dalam rupiah)
Provinsi	**54.960.856.680**	**1.070.748.858**	**56.031.605.538**
Bulungan	68.210.716.859	1.129.828.589	69.340.545.448
Malinau	27.480.428.340	535.374.429	28.015.802.769
Nunukan	35.937.130.826	1.196.845.863	37.133.976.690
Tana Tidung	27.869.974.941	535.374.429	28.405.349.370
Tarakan	60.345.175.754	885.572.122	61.230.747.877
TOTAL KALIMANTAN UTARA	**274.804.283.401**	**5.353.744.290,28**	**280.158.027.691,03**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tabel 2.3.192
Perkiraan Dana Bagi Hasil Migas Di Kalimantan Utara Tahun 2014 (Perkiraan Turun 6% dan 10%)

	Minyak Bumi (94%) (dalam rupiah)	Gas Bumi (90%) (dalam rupiah)	Jumlah (dalam rupiah)
Provinsi	**51.663.205.279**	**963.673.972**	**52.626.879.252**
Bulungan	**64.118.073.847**	**1.016.845.730**	65.134.919.577
Malinau	**25.831.602.640**	**481.836.986**	26.313.439.626
Nunukan	**33.780.902.977**	**1.077.161.277**	34.858.064.254
Tana Tidung	**26.197.776.444**	**481.836.986**	26.679.613.430
Tarakan	**56.724.465.209**	**797.014.910**	57.521.480.119
Total Kalimantan Utara	**258.316.026.397**	**4.818.369.861,25**	**263.134.396.257,96**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Tabel 2.3.193
Perkiraan Dana Bagi Hasil Migas di Kalimantan Utara Tahun 2014 (Perkiraan Turun 10% dan 90%)

	MINYAK BUMI (90%) (dalam rupiah)	GAS BUMI (85%) (dalam rupiah)	JUMLAH (dalam rupiah)
Provinsi	**46.496.884.751**	**819.122.876**	**47.316.007.628**
Bulungan	**57.706.266.463**	**864.318.871**	58.570.585.333
Malinau	**23.248.442.376**	**409.561.438**	23.658.003.814
Nunukan	**30.402.812.679**	**915.587.085**	31.318.399.764
Tana Tidung	**23.577.998.800**	**409.561.438**	23.987.560.238
Tarakan	**51.052.018.688**	**677.462.673**	51.729.481.362
Total Kalimantan Utara	**232.484.423.757**	**4.095.614.382,07**	**236.580.038.139,10**

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014

Mengingat harapan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi masing masing kabupaten/kota dan provinsi di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 4.078.540 barel/tahun minyak bumi atau setara 339.878 barel/bulan atau setara 11.329 barel/hari dan 3.181.890 mmbtu/tahun gas bumi atau setara 265.158 mmbtu/bulan atau setara 8.839 mmbtu/hari. Produksi minyak bumi pada tahun 2013 hanya mencapai sekitar 1.000.000 barel/tahun, sedangkan gas bumi pada tahun yang sama hanya mencapai sekitar 100.000 mmscf/bulan, maka diperlukan usaha keras untuk mendorong peningkatan produksi migas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurunnya produksi migas yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara berdampak terhadap perolehan dana bagi hasil (dbh) atau terhadap skenario/keinginan Pemda Kalimantan Utara terhadap perolehan dana bagi hasil. Peningkatan produksi migas yang cenderung turun pada tahun 2013 harus didorong untuk melakukan: 1) regulasi oleh pemerintah pusat atau pemda di bidang migas dalam bentuk undang undang (diusulkan UU *previlage* migas terkait ijin dan pembebasan tanah untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi) untuk meningkatkan produksi migas yang selama ini dianggap menghambat penemuan dan peningkatan sumur sumur produksi. Ijin dan pembebasan tanah selama ini dapat memakan waktu hingga 6 bulan lebih; 2) dorongan dari pemda untuk mempermudah ijin kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas; 3) pembangunan infrastruktur terkait dengan peningkatan produksi migas; 4) mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di kawasan *offshore* Ambalat baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

E. Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dengan nilai kontribusi terbesar dalam PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Sektor ini terbagi menjadi 3 sub sektor utama yaitu sub sektor perdagangan, sub sektor hotel dan restoran. Sub sektor pedagangan merupakan sub sektor dengan persentase kontribusi paling besar dalam kelompok PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2007 hingga tahun 2012, persentase sub sektor perdagangan mencapai 89% dari total PDRB sektor pedagangan, hotel dan restoran. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang berarti dari segi persentase kontribusi, namun sub sektor perdagangan tetap dominan dalam sektor ini.

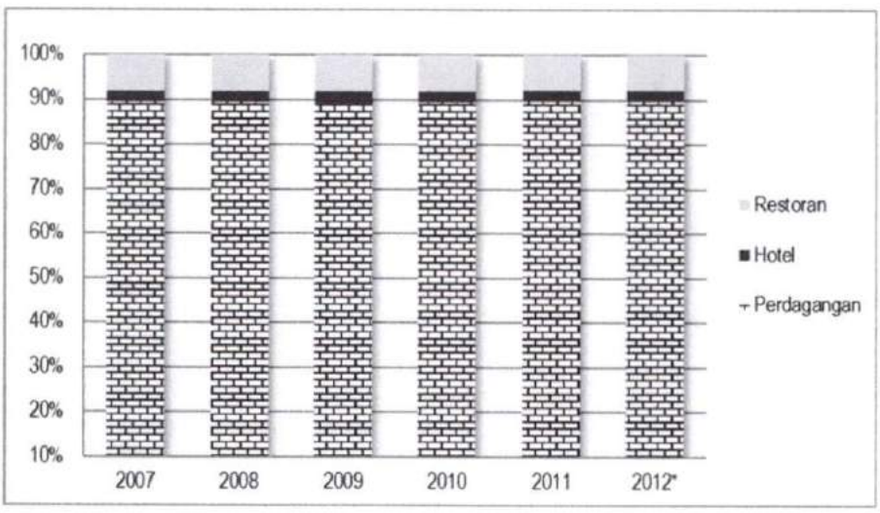
Apabila dilihat dari segi sebaran spasial pada rentang tahun 2007-2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terbesar berasal dari Kota Tarakan dengan capaian sebesar 68% dari total PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara untuk kabupaten yang memiliki kontribusi paling rendah adalah Kabupaten Tana Tidung dengan kontribusi kurang dari 2%.

Tabel 2.3.194
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

No	Uraian	Nilai Kontribusi					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012*
1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (juta rupiah)	1.314.723,52	1.390.215,58	1.450.957,43	1.583.366,19	1.715.921,29	1.867.077,27
	a. Perdagangan	1.175.851,77	1.243.702,65	1.294.677,18	1.416.774,68	1.537.206,71	1.674.684,35
	b. Hotel	31.811,25	34.143,36	36.812,12	39.422,87	41.649,03	43.263,80
	c. restoran	107.060,50	112.369,57	119.468,13	127.168,64	137.065,55	149.129,12
2	NilaiTotal PDRB dengan Migas (juta rupiah)	5.053.112,27	5.370.936,48	5.634.192,16	6.057.764,97	6.514.802,44	7.029.911,27
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)		**26,02**	**25,88**	**25,75**	**26,14**	**26,34**	**26,56**
Kontribusi Sub Sektor Perdagangan (%)		**23,27**	**23,16**	**22,98**	**23,39**	**23,60**	**23,82**

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2008-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah

*Keterangan:*angka sementara*



Gambar 2.3.123
Grafik Struktur Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Tingginya persentase PDRB sub sektor perdagangan memang wajar terjadi pada suatu wilayah mengingat cakupan sub sektor ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sub sektor lainnya dalam kelompok PDRB sektor ini (sub sektor hotel dan restoran). Salah satu cakupan ini dapat dlihat dari fasilitas perdagangan yang ada. Pada tahun 2013, jumlah pasar di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 65 unit dengan pedagang sebanyak 4.763 jiwa. Jumlah pedagang pasar paling banyak terdapat di Kota Tarakan, yaitu sebesar 1.895 (43% dari total pedagang yanga da). Hal ini menjadi penguat hasil kesimpulan bahwa Kota Tarakan merupakan pusat sub sektor perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara seperti yang telah disebutkan pada informasi sebelumnya.

Kabupaten/kota dengan fasilitas perdagangan paling sedikit adalah Kabupaten Tana Tidung dimana hanya terdapat 3 pasar dengan jumlah pedagang sebanyak 39 orang. Hal ini wajar mengingat Kabupaten Tana Tidung merupakan DOB (Daerah Otonomi Baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan pada tahun 2009. Namun, di

sisi lain hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung membutuhkan banyak peningkatan khususnya dari segi sarana dan prasarana daerah.

Tabel 2.3.195
Fasilitas Perdagangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Pasar Modern		Pasar Tradisional	
	Jumlah (unit)	Pedagang (jiwa)	Jumlah (unit)	Pedagang (jiwa)
Bulungan	5	3	7	426
Malinau	1	4	4	1.309
Nunukan	2	3	28	912
Tana Tidung	-	20	3	19
Tarakan	6	172	9	1.895
Prov. Kalimantan Utara	**14**	**202**	**51**	**4.561**
Prov. Kalimantan Timur	**142**	**5.526**	**177**	**25.945**

Sumber : Indagkop.kaltimprov.go.id dikases pada Juli 2014

Keterangan: Jumlah fasilitas perdagangan Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari total 9 kabupaten/kota

Apabila dilihat dari segi kegiatan perdagangan yang ada, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan positif. Hal ini diinterpretasikan melalui data penerbitan SIUP selama tahun 2009-2013. Pada tahun 2013, Jumlah penerbitan SIUP Perdagangan Kecil adalah sebesar 1.210 unit atau mengalami peningkatan sebesar 21% dari tahun 2012. Sedangkan zin untuk perdagangan menengah adalah sebanyak 292 dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2009-2013 sebesar 12%. Jenis perdagangan dengan persentase pertumbuhan adalah perdagangan besar. Hal ini wajar mengingat perdagangan besar memang tidak bisa tumbuh secepat perdagangan kecil dan menengah dan memang pengendalian terhhadap perdagangan besar lebih ketat agar keseimbangan tata ruang dan perekonomian rakyat tetap terjaga.

Tabel 2.3.196
Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009-2013

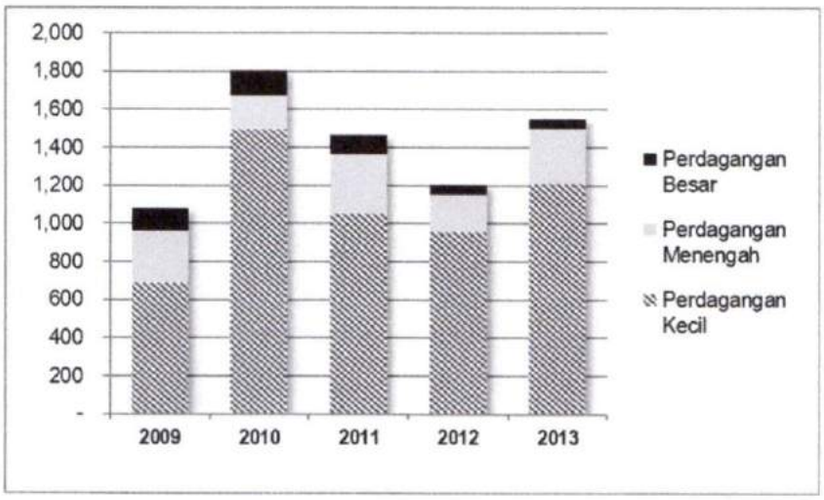
Jenis SIUP	Jumlah Izin yang diterbitkan				
	2009	2010	2011	2012	2013
Perdagangan Mikro	-	-	-	-	-
Perdagangan Kecil	687	1.495	1.050	957	1.210
Perdagangan Menengah	277	182	315	196	292
Perdagangan Besar	116	127	102	51	51

Sumber : Dinas Perindagkop Kalimantan Utara, 2014

Tabel 2.3.197
Rata-Rata Pertumbuhan Penerbitan SIUP
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009-2013

Jenis SIUP	Pertumbuhan Jumlah Penerbitan Izin SIUP (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	
Perdagangan Mikro	-	-	-	-	-
Perdagangan Kecil	118	(30)	(9)	26	26
Perdagangan Menengah	(34)	73	(38)	49	12
Perdagangan Besar	9	(20)	(50)	-	(15)

Sumber : Hasil Analisis, 2014



Gambar 2.3.124
Grafik Perkembangan Penerbitan SIUP Provinsi Kalimantan Utara 2009-2013
Sumber: hasil analisis, 2014

2. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan merupakan hasil bersih nilai ekspor setelah dikurangi nilai impor yang ada. terdapat dua pendekatan untuk melihat perkembangan ekspor-impor di suatu wilayah, yaitu dengan melihat nilai ekspor-impor menurut kabupaten/kota dan ekspor-impor menurut pelabuhan.

Nilai ekspor bersih menurut kabupaten/kota digunakan untuk melihat seberapa besar nilai ekspor maupun impor yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Dari sini, maka akan terlihat kedudukan ekspor dan impor dari wilayah yang bersangkutan.

Secara umum seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai ekspor bersih yang positif. Itu artinya, nilai ekspor di kabupaten/kota tersebut jauh lebih besar dari nilai impor yang dikeluarkan. Kabupaten/kota dengan nilai ekspor bersih paling besar adalah Kota Tarakan. Dari tahun 2007-2011, nilai ekspor bersih kota berada pada kisaran 1,1-1,2 triliun rupiah dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya walaupun dengan peningkatan yang cukup lambat. Sedangkan untuk kabupaten dengan nilai ekspor bersih paling kecil adalah Malinau. Dari tahun 2007-2009 nilai ekspor bersih kabupaten ini adalah negatif lalu mulai menjadi positif pada tahun 2010. Akan tetapi, jumlah ini tidaklah stabil dan kembali menjadi negatif pada tahun 2011.

Kabupaten yang menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik adalah Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2007, nilai ekspor bersih kabupaten ini hanya sebesar 38 milyar rupiah akan tetapi pada tahun 2012 nilai ini telah meningkat menjadi sebesar 1.300 milyar rupiah. Hal ini disebabkan karena nilai ekspor Kabupaten Bulungan meningkat dengan tajam sedangkan nilai impornya stabil dengan angka yang relatif kecil.

Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan nilai ekspor bersih terkecil adalah Kabupaten Malinau dimana pada tahun 2007-2009, nilai ekspor bersihnya masih negatif (nilai impor jauh lebih besar daripada nilai ekspornya). Hal ini dapat disebabkan oleh letak geografik Kabupaten Malinau yang terletak di perbatasan dan sebagian dari permukiman penduduknya yang masih jauh berada di pedalaman dengan infrastruktur penunjang transportasi yang terbatas. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan nilai ekspor kabupaten/kota yang memiliki nilai ekspor bersih cukup rendah, selain perlu dilakukan pemaksimalan pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, hal lain yang tidak boleh ditinggalkan adalah perbaikan infrastruktur transportasi sebagai sarana utama kegiatan perdagangan.

Tabel 2.3.198
Nilai Ekspor-Impor di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor (Juta Rupiah)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	38.667	229.624	257.077	228.154	810.969	1.282.247
Malinau	204.522	270.908	336.119	376.653	492.776	590.872
Nunukan	652.183	713.939	758.002	791.489	884.575	950.876
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tarakan	2.409.388	2.559.577	2.431.365	2.657.386	2.946.322	n/a
Kabupaten/Kota	**Nilai Impor (Juta Rupiah)**					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	484	-	27.833	2.326	5.016	5.349
Malinau	540.888	641.647	412.517	334.440	492.884	573.511
Nunukan	577.898	675.242	748.393	783.849	838.142	890.429
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tarakan	1.267.778	1.311.361	1.469.016	1.575.425	1.741.778	n/a
Kabupaten/Kota	**Nilai Ekspor Bersih (Juta Rupiah)**					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	38.183	229.624	229.244	225.828	805.953	1.276.898
Malinau	-336.366	-370.739-	-76.398	42.213	-108	17.360
Nunukan	74.285	38.697	9.609	7.640	46.433	60.447
Tana Tidung	data tidak tersedia					
Tarakan	1.141.609	1.248.216	962.349	1.081.961	1.204.544	n.a

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2008, 2011 dan 2013
2) PDRB menurut penggunaan Kabupaten Malinau tahun 2010,2008-2012
3) PDRB menurut penggunaan Kabupaten Nunukan Tahun 2005, 2010 dan 2008-2012
4) PDRB menurut penggunaan Kota Tarakan Tahun 2000-2006, 2000-2008 dan 2009-2011

Keterangan:
1) Data Kabupaten Bulungan merupakan hasil pengolahan nilai ekpor impor dengan mengkonversi satuan dari US $ menjadi rupiah disesuaikan nilai rupiah pada tahun yang sama
2) Data Ekspor-Impor Kabupaten Tana Tidung tidak tersedia.
Catatan: Indikator nilai ekspor-impor per kabupaten/kota tidak dapat diakumulasi menjadi indikator nilai ekspor impor provinsi karena data salag satu kabupaten tidak tersedia (Kab. Tana Tidung)

Selain menghitung nilai ekspor-impor menurut kabupaten/kota, analisis terhadap nilai ekspor-impor menurut pelabuhan juga penting untuk dilakukan guna melihat peranan pelabuhan-pelabuhan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat lima pelabuhan dari tiga kabupaten/kota yang melakukan aktivitas ekspor dan impor, yaitu Pelabuhan Bunyu, Tanjung Selor, Nunukan, Lingkas Tarakan dan Juwata Tarakan. Kelima pelabuhan ini merupakan titik simpul untuk kegiatan pengiriman barang yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di sekitarnya. Apabila dilihat dari nilai ekspor-impornya, pelabuhan dengan nilai tertinggi adalah pelabuhan Lingkas Tarakan sementara untuk pelabuhan Juwata Tarakan hanya terjadi aktivitas ekspor tanpa ada aktivitas impor. Melalui informasi ini, dapat diambil kesimpulan awal bahwa Kota Tarakan masih menjadi titik inti dalam kegiatan ekspor-impor di Provinsi Kalimantan Utara.

Sama halnya dengan Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan juga memilki pelabuhan terpisah untuk kegiatan perdagangan luar negeri. Aktivitas ekspor dilakukan di pelabuhan Bunyu sementara impor dilakukan di pelabuhan Tanjung Selor. Apabila dlihat dari perkembangan nilainya, ekspor yang terjadi di Bunyu selalu mengalami peningkatan positif setiap tahunnya dengan perkembangan yang cukup pesat. Sedangkan untuk nilai impor, meskipun sama-sama menunjukkan kecenderungan peningkatan namun apabila dilihar dari segi nilainya culup jauh bila dibandingkan dengan nilai ekspor.

Tabel 2.3.199
Nilai Ekspor-Impor di Provinsi Kalimantan Utara per Pelabuhan Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Nilai Ekspor (000 US $)				
		2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	Bunyu	23.756	29.712	43.956	88.989	126.376
Nunukan	Nunukan	38.431	32.346	68.192	101.195	110.918
Tarakan	Lingkas Tarakan	135.183	125.547	453.764	392.078	738.699
	Juwata Tarakan	81.316	198.345	208.094	318.335	493
Prov. Kalimantan Utara		278.686	385.950	774.006	900.597	976.486
Kabupaten/Kota	**Pelabuhan**	**Nilai Impor (000 US $)**				
		2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Bulungan	Tanjung Selor	-	20	867	137	956
Nunukan	Nunukan	1.245	566	2.956	2.621	4.240
Tarakan	Lingkas Tarakan	30	-	44.881	68.381	70.026
Prov. Kalimantan Utara		1.275	586	48.704	71139	75.222

Sumber: Kalimantan Timur dalam angka 2012 dan 2013

F. Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara hanya ditopang oleh sub sektor industri pengolahan tanpa migas sementara sub sektor industri migas tidak memiliki nilai kontribusi sama sekali. Apabila dilihat dari segi perkembangan, persentase kontribusi sektor industri pengolahan ini dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007, persentase kontribusi sektor ini mencapai 7,11% dan terus menurun menjadi hanya sebesar 4,49% pada tahun 2012.

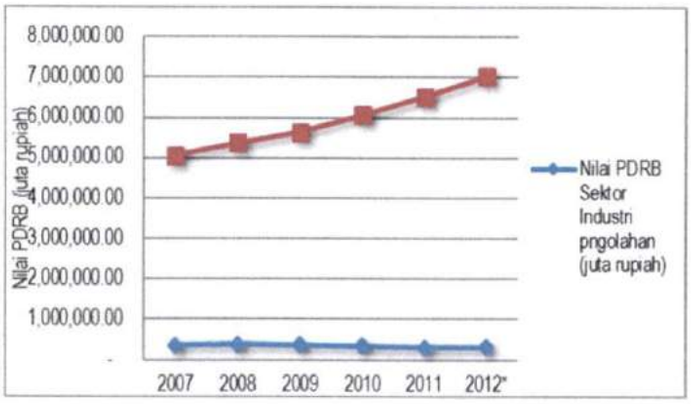
Tabel 2.3.200
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012

No	Uraian	Nilai Kontribusi					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012*
1	Nilai PDRB Sektor Industri pengolahan (juta rupiah)	359.436,44	389.717,24	369.719,79	341.575,63	304.575,49	315.983,66
	a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	359.436,44	389.717,24	369.719,79	341.575,63	304.575,49	315.983,66
2	NilaiTotal PDRB dengan Migas (juta rupiah)	5.053.112,27	5.370.936,48	5.634.192,16	6.057.764,97	6.514.802,44	7.029.911,27
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)		**7,11**	**7,26**	**6,56**	**5,64**	**4,68**	**4,49**

Sumber:
1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2012 dan 2000-2012,
2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012,
3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012,
4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012,
5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, Diolah

*Keterangan:*angka sementara*

Penurunan yang cukup signifikan ini perlu diperhatikan mengingat bahwa migas sebenarnya merupakan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara. Minimnya industri pengolahan migas mengakibatkan nilai tambah sektor ini hanya terhenti pada produk barang mentah semata sementara apabila diolah nilai tambahnya sebenarnya dapat meningkatkan PDRB Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.3.125
Grafik Perbandingan Perkembangan Nilai PDRB Sekor Industri dengan Total PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

2. Pertumbuhan Industri

Selain menunjukkan posisi sektor industri dalam struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara, rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan menimbulkan pertanyaan baru mengenai perkembangan perindustrian di provinsi ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lanjutan untuk melihat dinamika perkembangan sektor ini.

Dari tahun 2008 hingga 2012, jumlah unit usaha industri besar di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebanyak 19 unit tanpa ada penambahan, begitu pula dengan unit industri kecil menengah dengan jumlah sebanyak 7.074 unit. Sedangkan apabila dilihat dari sisi perkembangan nilai investasi, walaupun memang terjadi perkembangan dengan kecenderungan positif akan tetapi kenaikan nilai investasi yang ada relatif cukup kecil.

Tabel 2.3.201
Jumlah dan Jenis Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Jenis Industri	Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi				
	2008	2009	2010	2011	2012
Industri Kecil Menengah					
Unit Usaha	7.074	7.074	7.074	7.074	7.074
Tenaga Kerja	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
Investasi (juta rupiah)	1.034.536	1.034.536	970.836	2.613.871	2.338.470
Industri Besar					
Unit Usaha	19	19	19	19	19
Tenaga Kerja	9.962	9.962	9.962	9.962	9.962
Investasi (juta rupiah)	1.579.543	1.579.543	1.660.663	1.660.663	1.038.126
TOTAL					
Unit Usaha	7.093	7.093	7.093	7.093	7.093
Tenaga Kerja	32.580	32.580	32.580	32.580	32.580
Investasi (juta rupiah)	2.614.079	2.614.079	2.631.499	4.274.534	3.376.596

Sumber: Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Kota Tarakan

Apabila dilihat dari segi sebaran spasial, unit industri besar paling banyak terdapat di Kota Tarakan. 89% dari total unit usaha industri besar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kota Tarakan, sedangkan untuk unit usaha kecil dan menengah adalah sebesar 39%. Sedangkan untuk segi perkembangannya, tidak terdapat perkembangan yang signifikan baik dari segi peningkatan jumlah unit usaha maupun nilai investasi. Bahkan, pada tahun 2012 sempat terjadi penurunan nilai yang cukup besar hingga membuat nilai investasi pada tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2008. Penurunan nilai investasi yang cukup besar ini

disebabkan oleh nilai investasi pada Industri besar pada tahun 2012 mengalami penurunan mencapai 40,9% dari nilai investasi pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.202
Jumlah dan Jenis Industri Kota Tarakan Tahun 2008-2012

Jenis Industri	Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Kota Tarakan				
	2008	2009	2010	2011	2012
Industri Kecil Menengah					
Unit Usaha	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
Tenaga Kerja	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
Investasi (juta rupiah)	428.998	428.998	365.298	744.865	689.785
Industri Besar					
Unit Usaha	17	17	17	17	17
Tenaga Kerja	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
Investasi (juta rupiah)	1.058.280	1.073.393	1.058.280	1.058.280	625.770
TOTAL					
Unit Usaha	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766
Tenaga Kerja	16.295	17.904	16.295	16.295	16.295
Investasi (juta rupiah)	1.487.278	1.502.391	1.423.578	1.803.145	1.315.555

Sumber: Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Kabupaten Bulungan

Hanya terdapat 1 unit usaha industri besar di Kabupaten Bulungan. Menurut hasil wawancara (Maret, 2014) diketahui bahwa industri besar tersebut adalah industri bakmi. Sementara untuk jumlah unit industri kecil dan menengah adalah sebanyak 1.800 unit usaha atau sebesar 25% dari total IKM yang ada. Apabila dilihat dari segi perkembangan investasi, berbeda dengan Kota Tarakan yang mengalami penurunan tajam, Kabupaten Bulungan juga menunjukkan penurunan akan tetapi tidak mempengaruhi kecenderungan perkembangan positif apabila ditarik tren dari tahun 2008. Hal ini dikarenakan meskipun nilai investasi pada industri besar menurun hingga 29%, akan tetapi kenaikan nilai investasi pada IKM yang cukup besar (11,6%) mampu mengcover penurunan yang terjadi.

Tabel 2.3.203
Jumlah dan Jenis Industri Kabupaten Bulungan Tahun 2008-2012

Jenis Industri	Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Kabupaten Bulungan				
	2008	2009	2010	2011	2012
Industri Kecil Menengah					
Unit Usaha	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Tenaga Kerja	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
Investasi (juta rupiah)	158.750	158.750	158.750	474.617	474.617
Industri Besar					
Unit Usaha	1	1	1	1	1
Tenaga Kerja	1.115	785	1.115	1.115	1.115
Investasi (juta rupiah)	246.135	265.331	286.695	286.695	202.350
TOTAL					
Unit Usaha	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
Tenaga Kerja	4.240	3.910	4.240	4.240	4.240
Investasi (juta rupiah)	404.885	424.081	445.445	761.312	621.887

Sumber: Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Kabupaten Nunukan

Sama halnya dengan Kabupaten Bulungan, hanya terapat satu unit usaha industri besar di Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk IKM nya adalah sebanyak 1.205 unit usaha. Apabila dilihat dari perkembangan nilai investasinya, secara umum juga terjadi penurunan pada tahun 2012 akan tetapi tren perkembangan dari tahun 2008 masih terhitung positif. Indikasi penurunan nilai investasi yang terjadi juga sama dengan kedua kabupaten/kota sebelumnya, yaitu penurunan yang cukup signifikan terjadi pada unit usaha besar pada tahun 2012 yang mencapai 33%.

Tabel 2.3.204
Jumlah dan Jenis Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Jenis Industri	Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Kabupaten Nunukan				
	2008	2009	2010	2011	2012
Industri Kecil Menengah					
Unit Usaha	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
Tenaga Kerja	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Investasi (juta rupiah)	122.250	122.250	122.250	438.117	383.037
Industri Besar					
Unit Usaha	1	1	1	1	1
Tenaga Kerja	1.927	648	1.927	1.927	1.927
Investasi (juta rupiah)	275.128	240.819	315.688	315.688	210.006
TOTAL					
Unit Usaha	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
Tenaga Kerja	4.807	3.528	4.807	4.807	4.807
Investasi (juta rupiah)	397.378	363.069	437.938	753.805	593.043

Sumber: Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Kabupaten Malinau

Tidak ada satupun unit usaha industri besar di Kabupaten Malinau. Hanya terdapat industri kecil dan menengah sebanyak 1.062 unit atau sekitar 15% dari total IKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan apabila dilihat dari segi perkembangan nilai investasi, penurunan juga dialami oleh kabupaten ini akan tetapi tren perkembangan yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir masih menunjukkan tren positif.

Tabel 2.3.205
Jumlah dan Jenis Industri Kabupaten Malinau Tahun 2008-2012

Jenis Industri	Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Kabupaten Malinau				
	2008	2009	2010	2011	2012
Industri Kecil Menengah					
Unit Usaha	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
Tenaga Kerja	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
Investasi (juta rupiah)	226.418	226.418	226.418	542.285	487.204
Industri Besar					
Unit Usaha	-	-	-	-	-
Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
Investasi (juta rupiah)	-	-	-	-	-
TOTAL					
Unit Usaha	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
Tenaga Kerja	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
Investasi (juta rupiah)	226.418	226.418	226.418	542.285	487.204

Sumber: Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki unit usaha industri besar. Sedangkan untuk unit industri kecil dan menengah adalah sebanyak 258 unit atau sebesar 4% dari total IKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan apabila dilihat dari segi perkembangan nilai investasi, secara umum tren yang ditunjukkan adalah positif meskipun sempat terjadi penurunan nilai investasi sebesar 13% pda tahun 2012.

Tabel 2.3.206
Jumlah dan Jenis Industri Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008-2012

Jenis Industri	Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Kabupaten Tana Tidung				
	2008	2009	2010	2011	2012
Industri Kecil Menengah					
Unit Usaha	258	258	258	258	258
Tenaga Kerja	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
Investasi (juta rupiah)	98.120	98.120	98.120	413.987	358.907
Industri Besar					
Unit Usaha	-	-	-	-	-
Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
Investasi (juta rupiah)	-	-	-	-	-
TOTAL					
Unit Usaha	258	258	258	258	258
Tenaga Kerja	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
Investasi (juta rupiah)	98.120	98.120	98.120	413.987	358.907

Sumber: Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Tabel 2.3.207
Komoditas Produk Unggulan Industri Menengah Besar Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Komoditas Unggulan
1	Tarakan	a. Kayu lapis (plywood), mdf
		b. Udang Beku
		c. Ind.Pengolahan Kayu/sawmill
		d. Moulding
2	Nunukan	a. Ind. Pengolahan Kayu/sawmill
		b. Udang Beku
		c. Moulding
		d. Minyak Kelapa
3	Bulungan	a. Ind. Pengolahan Kayu/sawmill
		b. Gas Methanol
4	Malinau	-
5	Tana Tidung	-

Sumber: Indagkop.Kaltimprov.go.id diakses pada Juli 2014

Apabila seluruh perkembangan perindustrian di kelima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan komoditas produk ungulan industri menengah dan besar, maka akan ditemukan beberapa penjelasan mengenai perbedaan jumlah unit industri khususnya industri besar yang ada.

Kota Tarakan memiliki komoditas produk unggulan industri menengah besar yang cukup banyak, yaitu produk kayu lapis, udang beku, industri pengolahan kayu dan moulding. Hal ini cukup menjelaskan mengapa sebagian besar industri terpusat di Kota Tarakan. Sementara untuk kabupaten lain yang juga memiliki komoditas produk unggulan industri cukup banyak adalah Kabupaten Nunukan. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan unit usaha besar yang hanya ada satu unit di Kabupaten Nunukan, berarti dapat diasumsikan bahwa unit industri-unit industri yang lain masih skala industri kecil dan menengah.

Sama halnya dengan Kabupaten Bulungan, industri besar di kabupaten ini adalah industri bakmi, ini berarti komoditas ini tidak masuk produk unggulan industri di Kabupaten Bulungan yang berupa industri pengolahan kayu dan gas methanol. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa kedua komoditas produk unggulan ini masih dalam skala industri kecil dan menengah.

Sementara untuk Kabupaten Malinau dan Tana Tidung, keduanya tidak memiliki komoditas unggulan industri menengah dan besar. Selain itu, persentase jumlah industri kecil dan menengah di kedua kabupaten ini juga tergolong rendah apabila dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, kedua wilayah ini perlu mendapat perhatian dari segi pengembangan industri.

Setelah membahas mengenai industri besar dan industri kecil menengah, selanjutnya akan dibahas mengenai kelompok industri mikro dan kecil. Industri mikro dan kecil merupakan industri dengan jumlah tenaga kerja

yang kurang dari 20 orang. Indutri mikro dan kecil dikelompokkan ke dalam 8 kategori sesuai dengan bahan baku yang digunakan.

Kelompok industri mikro dan kecil dengan jumlah paling banyak di Provinsi Kalimantan Utara adalah industri anyaman. Pada tahun 2006 kelompok industri adalah sebanyak 1.313 unit usaha dengan persentase mencapai 76% dari total industri yang ada. Namun, jumlah kelompok industri anyaman ini terus berkurang tiap tahunnya. Pada tahun 2008, kelompok industri ini hanya ada sebanyak 868 unit usaha sedangkan pada tahun 2011 jumlah unit usaha yang ada hanya sebesar 367 unit usaha.

Kelompok industri yang memiliki perkembangan paling pesar adalah industri gerabah/keramik/batu. Pada taun 2006, jumlah unit usaha kelompok industri ini hanya sebanyak 25 unit kemudian pada tahun 2011, jumlah unit usahanya telah mencapai 198 unit.

Sedangkan untuk kelompok industri yang mulai muncul di tahun 2011 adalah industri kain/tenun. Pada tahun 2006 dan 2008, tidak ada kabupaten/kota yang memiliki industri jenis ini, akan tetapi pada tahun 2011 unit industri kain/tenun mencapai jumlah sebanyak 46 unit usaha yang berada di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

Tabel 2.3.208

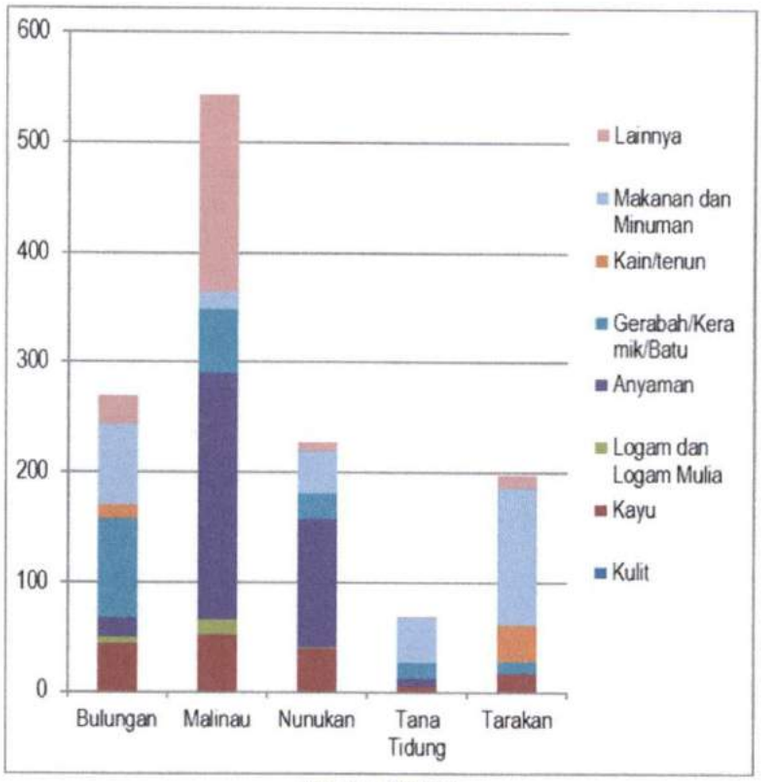
Jumlah Industri Kecil dan Makro dirinci per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2006, 2008 dan 2011

No	Kabupaten/Kota	Jenis Industri Pengolahan								Jumlah
		Kulit	Kayu	Logam dan Logam Mulia	Anyaman	Gerabah Keramik/Batu	Kain/tenun	Makanan dan Minuman	Lainnya	
Tahun 2006										
1	Bulungan	1	45	19	299	20	0	52	11	447
2	Malinau	0	25	0	39	0	0	0	2	66
3	Nunukan	0	9	17	973	5	0	35	3	1.042
4	Tana Tidung	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Tarakan	0	26	3	2	0	0	26	116	172
Prov. Kalimantan Utara		**1**	**105**	**39**	**1313**	**25**	**0**	**113**	**132**	**1.728**
Tahun 2008										
1	Bulungan	0	42	29	183	51	0	76	10	391
2	Malinau	0	37	4	492	0	0	8	55	596
3	Nunukan	0	43	6	188	0	0	26	4	267
4	Tana Tidung	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Tarakan	4	53	3	5	0	0	453	9	527
Prov. Kalimantan Utara		**4**	**175**	**42**	**868**	**51**	**0**	**563**	**78**	**1.781**
Tahun 2011										
1	Bulungan	1	43	6	18	90	13	73	26	270
2	Malinau	0	52	14	224	59	0	15	179	543
3	Nunukan	1	38	2	117	23	0	39	8	228
4	Tana Tidung	0	5	0	7	15	0	41	1	69
5	Tarakan	1	15	0	1	11	33	126	11	198
Prov. Kalimantan Utara		**3**	**153**	**22**	**367**	**198**	**46**	**294**	**225**	**1.308**

Sumber:(1) Dokumen Potensi Desa (PODES) Tahun 2006, 2008 dan 2011

Apabila dilihat dari segi sebaran spasial, pada tahun 2011 industri mikro dan kecil paling banyak terdapat di Kabupaten Malinau. Hal ini terjadi karena kelompok industri anyaman dan industri lain-lain terpusat di kabupaten ini. Dari total kelompok industri anyaman yang ada, 61% kelompok industri ini terdapat di Kabupaten Malinau. Sedangkan untuk kelompok industri lain-lain, 80% nya terdapat di kabupaten ini.

Kabupaten lain yang juga menjadi pusat industri mikro dan kecil adalah Kabupaten Bulungan. Di kabupaten ini, persentase kelompok industri gerabah/keramik/baru mencapai 45,5%. Kabupaten Bulungan memang memiliki industri genteng yang lumayan banyak oleh karena itu memang wajar apabila Kabupaten Bulungan menjadi pusat kelompok industri ini.



Gambar 2.3.126
Grafik Sebaran Konsentrasi Industri Mikro dan Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011
Sumber: Hasil Analisis, 2014

G. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam perekonomian wilayah karena sektor ini berpotensi untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya seperti misalnya sektor perdagangan dan jasa-jasa.Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai produktivitas sektor pariwisata di suatu wilayah adalah melalui kunjungan wisata. Oleh karena itu, kunjungan wisata menjadi salah satu indikator dalam fokus urusan pilihan dalam berbagai analisis pengembangan wilayah.

Kunjungan wisata di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara secara umum menunjukkan penurunan yang cukup serius. Penurunan yang cukup signifikan ditunjukkan oleh Kabupaten Bulungan dari tahun 2012-2013, yaitu sebesar 71% atau sebanyak (-)7.500 pengunjung. Hal yang serupa juga terjadi di Kota Tarakan. Dari tahun 2011, penurunan kunjungan wisata terus terjadi padahal jumlah kunjungan di kota ini merupakan jumlah terbesar bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Penurunan jumlah kunjungan wisata di Kota Tarakan perlu diwaspadai dan diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan angka kunjungan wisata yang ada.

Tabel 2.3.209
Jumlah Kunjungan Wisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	n.a	n.a	9.449	10.459	2.982
Malinau	4.878	4.800	5250	n.a	n.a
Nunukan	n.a	5.581	5.581	7.281	n.a
Tana Tidung	n.a	(tidak ada kunjungan)		n.a	n.a
Tarakan	197.530	204.786	240.308	177.600	146.964

Sumber:
1) LPPD Bulungan tahun 2011, 2012 dan 2013

2) LPPD Malinau Tahun 2011 dan 2012
3) LPPD Nunukan Tahun 2010, 2011 dan 2012
4) LPPD Tana Tidung 2010 dan 2011
5) LPPD Kota Tarakan Tahun 2009,2010, 2011, 2012, 2013

***Catatan**: Indikator jumlah kunjungan wisata per kabupaten/kota tidak dapat diakumulasi menjadi indikator jumlah kunjungan wisata provinsi karena tidak semua kabupaten/kota memiliki data yang bersangkutan*

H. Ketransmigrasian

1. Transmigran Swakarsa

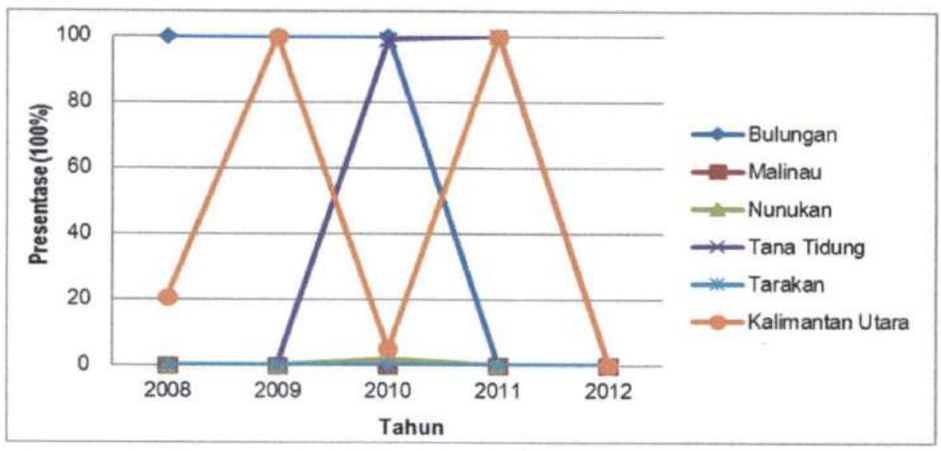
Transmigrasi swakarsa adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang penduduk, yang didorong oleh keinginan sendiri namun tetap mendapatkan bimbingan oleh pemerintah. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan perkembangan yang tinggi dapat menarik transmigran swakarsa. Tabel 2.3.2.H.1 menunjukkan persentase jumlah transmigrasi swakarsa tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2012.

Tabel 2.3.210
Transmigran Swakarsa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Transmigran Swakarsa (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	100	100	100	0	0
Malinau	na	na	na	na	na
Nunukan	0	0	1,95	0	0
Tana Tidung	na	0	99	100	0
Tarakan	na	na	na	na	na
Prov. Kalimantan Utara	20,62	100,00	4,90	100,00	0

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2008-2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara didatangi oleh transmigran, transmigran yang datang dengan keinginan sendiri. Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah yang menjadi kabupaten tujuan transmigran swakarsa dengan persentase 100%. Potensi sumber daya alam dan perkembangan daerah di Kalimantan Utara mungkin dijadikan alasan oleh transmigran untuk menetap dan mencari kerja. Gambar 2.3.2.H.1 menunjukkan persentase jumlah transmigrasi swakarsa tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2008-2012.



Gambar 2.3.127
Grafik Transmigran Swakarsa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

2. Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meratakan persebaran penduduk terutama di wilayah Indonesia. Pemerintah membekali transmigran dengan pelatihan/kursus agar transmigran dapat mengolah dan berkembang di wilayah transmigrasi. Data mengenai kontribusi terhadap PDRB belum tersedia di Provinsi Kalimantan Utara.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian and Persandian

1. Pengeluaran Konsumsi per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat. Indikator ini tersusun atas dua kategori pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan. Analisis terhadap total pengeluaran konsumsi rumah tangga total digunakan untuk menilai kemampuan daya beli masyarakat secara umum dalam tingkat pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pengeluaran konsumsi per kapita Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2008-2012 terus mengalami perkembangan positif. Meskipun angka yang ditunjukkan masih di bawah Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi dengan adanya perkembangan positif yang terhadap nilai pengeluaran maka tetap dapat disimpulkan bahwa perekonomian penduduk di provinsi ini mengalami penguatan dari segi daya beli.

Tabel 2.4.1
Pengeluaran Per Kapita Rata-Rata Sebulan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Per Kapita (rupiah)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	330.422	572.326	629.252	688.206	993.130
Malinau	283.524	276.220	271.225	325.659	345.620
Nunukan	438.187	482.176	516.093	542.885	577.719
Tana Tidung	-	385.447	504.142	728.338	760.946
Tarakan	502.395	779.817	823.705	854.242	880.206
Prov. Kalimantan Utara	**404.352**	**587.206**	**624.214**	**667.074**	**755.800**
Prov. Kalimantan Timur	**585.302**	**622.754**	**749.360**	**871.251**	**986.564**

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2010,2011 dan 2013

Apabila perkembangan dilihat dari segi spasial, Kabupaten Bulungan adalah kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan pengeluaran terbesar yaitu sebesar 34% per tahun. Sementara untuk kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan paling rendah adalah Kabupaten Malinau dengan nilai sebesar 5%. Apabila dilihat pada tren perkembangannya dari tahun ke tahun, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan memang memiliki pertumbuhan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan apabila dilihat pada lingkup provinsi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki rata-rata pertumbuhan yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan indikasi yang bagus untuk Provinsi Kalimantan Utara untuk menyusul tingkat pengeluaran konsumsi dari Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.4.2
Pertumbuhan Nilai Pengeluaran Per Kapita Rata-Rata Sebulan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012 (%)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Pengeluaran (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	
Bulungan	73	10	9	44	34
Malinau	-3	-2	20	6	5
Nunukan	10	7	5	6	7
Tana Tidung	-	31	44	4	27
Tarakan	55	6	4	3	17
Prov. Kalimantan Utara	**45**	**6**	**7**	**13**	**18**
Prov. Kalimantan Timur	**6**	**20**	**16**	**13**	**14**

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2010,2011 dan 2013

2. Pengeluaran Konsumsi per Kapita Kelompok Bukan Makanan

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas 6 kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Melalui analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat dilihat bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

Pengeluaran konsumsi per kapita untuk kelompok bukan makanan di Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2007, nilai pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Utara masih berkisar pada angka 175 ribu rupiah.Hingga pada tahun 2012, pengeluaran ini sudah meningkat menjadi sebesar 370 ribu rupiah. Apabila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Timur, angka yang ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Utara masih cenderung lebih rendah. Namun hal ini bukan masalah karena rata-rata pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara (22% per tahun) jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur (12% per tahun).

Tabel 2.4.3
Pengeluaran Per Kapita Rata-rata Sebulan Kelompok Bukan Makanan
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Kelompok Pengeluaran Non Pangan (rupiah)					Pertumbuhan Pengeluaran (%)				Rata-Rata Pertumbuhan
	2008	2009	2010	2011	2012	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	
Bulungan	124.657	253.913	328.912	323.062	532.292	104	30	-2	65	49
Malinau	121.754	113.881	92.529	144.845	156.410	-6	-19	57	8	10
Nunukan	196.724	223.219	244.261	260.052	275.993	13	9	6	6	9
Tana Tidung	-	141.352	222.842	383.044	399.377	-	58	72	4	45
Tarakan	226.350	367.852	388.758	404.561	419.536	63	6	4	4	19
Prov. Kalimantan Utara	**175.632**	**269.300**	**296.976**	**316.140**	**373.018**	**53**	**10**	**6**	**18**	**22**
Prov. Kalimantan Timur	**346.657**	**314.445**	**385.993**	**467.532**	**535.643**	**-9**	**23**	**21**	**15**	**12**

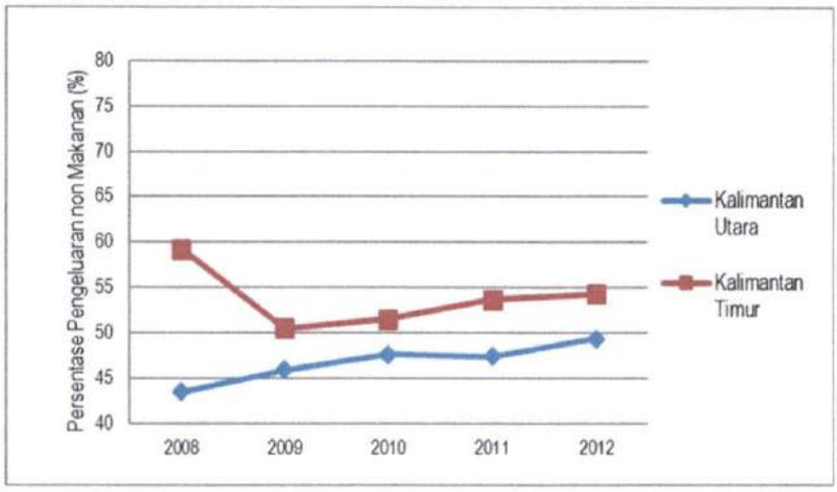
Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2010, 2011 dan 2013

Apabila dilihat dari proporsi antara pengeluaran kelompok makanan dan bukan makanan, penduduk Provinsi Kalimantan Utara secara umum memiliki kecenderungan proporsi pengeluaran yang setara. Sesuai dengan perkembangan tahun 2008-2012, proporsi pengeluaran non pangan berkisar pada angka 40-50%.Arah tren serupa juga terjadi dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kedua provinsi ini sama-sama memiliki arah perkembangan pada proporsi yang setara (50%:50%), perbedaannya adalah tren pada provinsi ini berbentuk negatif sedangkan tren pada Provinsi Kalimantan Utara berbentuk positif.

Tabel 2.4.4
Proporsi Pengeluaran Kelompok Bukan Makanan dalam Pengeluaran Total per Kapita Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Persentase terhadap Total Pengeluaran (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	38	44	52	47	54
Malinau	43	41	34	44	45
Nunukan	45	46	47	48	48
Tana Tidung	-	37	44	53	52
Tarakan	45	47	47	47	48
Prov. Kalimantan Utara	**43**	**46**	**48**	**47**	**49**
Prov. Kalimantan Timur	**59**	**50**	**52**	**54**	**54**

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2010, 2011 dan 2013



Gambar 2.4.1
Grafik Perkembangan Proporsi Pengeluaran Non Makanan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur Tahun 2008-2012
Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2010, 2011 dan 2013

3. Produktivitas Total Daerah

Besarnya jumlah PDRB suatu wilayah tidak semata-mata menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah dengan masyarakat yang 'kaya'. Melalui produktivitas total yang dihitung dengan menggunakan data PDRB dan juga tenaga kerja, maka akan dapat dilihat secara lebih spesifik seperti apa kinerja sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah bila dikaitkan dengan ketenaga kerjaan.

Nilai produktivitas total Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2010-2012 berada di atas rata-rata Pulau Kalimantan dan nasional. Itu artinya terdapat tiga kemungkinan yang ada, yaitu:

(1) Kualitas tenaga kerja yang baik
(2) Modal yang kuat, atau
(3) Sistem manajemen yang efektif

Ketiga faktor ini semuanya memiliki peranan dalam tingginya sebuah nilai produktivitas. Oleh karena itu, apabila nilai produktivitas Provinsi Kalimantan Utara mencapai 30,26 juta rupiah dan menempati rangking ke-2 di Pulau Kalimantan setelah Provinsi Kalimantan Timur maka hal ini bisa saja merupakan indikasi tingkat kesejahteraan tenaga kerja.

Apabila dilihat dari segi spasial per kabupaten/kota, pada tahun 2012 produktivitas di atas 30 juta rupiah dimiliki oleh Kabupaten Nunukan (35,5 juta), Kabupaten Tana Tidung (31,8 juta) dan Kota Tarakan (35,4 juta) sedangkan produktivitas dua kabupaten lainnya masih berada pada kisaran 26-29 juta rupiah.

Tabel 2.4.5
Produktivitas Total Daerah Tahun 2010-2012

No	Lokasi	Tenaga Kerja (orang)			PDRB (Juta rupiah)			Produktivitas Total (juta rupiah)		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Kab. Malinau	29.520	27.561	30.045	693.737	776.252	869.810	23,50	28,16	28,95
2	Kab. Bulungan	47.063	49.667	49.210	1.097.723	1.164.201	1.273.418	23,32	23,44	25,88
3	Kab. Nunukan	37.964	42.999	46.029	1.429.232	1.525.539	1.634.318	37,65	35,48	35,51
4	Kab. Tana Tidung	6.350	7.249	6.590	190.504	200.412	209.717	30,00	27,65	31,82
5	Kota Tarakan	80.915	83.504	86.052	2.646.568	2.848.398	3.042.649	32,71	34,11	35,36
6	**Prov. Kalimantan Utara**	**201.812**	**210.980**	**217.926**	**6.057.765**	**6.514.802**	**7.029.911**	**30,02**	**30,88**	**32,26**
7	Prov. Kalimantan Barat	2.095.705	2.146.572	2.016.514	30.329.000	32.138.000	34.014.000	14,47	14,97	16,87
8	Prov. Kalimantan Tengah	1.022.580	1.105.701	1.070.210	18.806.000	20.078.000	21.420.000	18,39	18,16	20,01
9	Prov. Kalimantan Selatan	1.743.622	1.824.929	1.821.327	30.675.000	32.553.000	34.419.000	17,59	17,84	18,90
10	Prov. Kalimantan Timur	1.280.086	1.380.023	1.426.985	104.895.235	108.961.198	113.037.089	81,94	78,96	79,21
11	Pulau Kalimantan	6.343.805	6.668.205	6.335.036	184.705.235	193.730.198	202.890.089	29,12	29,05	32,03
12	Indonesia	108.207.767	109.670.399	110.803.154	2.222.987.000	2.364.065.000	2.512.992.000	20,54	21,56	22,68

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan dalam angka 2006-2013
2) Kabupaten Nunukan dalam angka 2006-2013
3) Kabupaten Malinau dalam angka 2006-2013
4) Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2010-2013
5) Kota Tarakan dalam angka 2006-2013
6) http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=52&notab=2 diakses pada Juni 2014
7) http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/SI_2013/index3.php?pub=Statistik%20Indonesia%202013 diakses pada Juni 2014

B. Pertanian

Kemampuan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya cukup kuat dengan pengembangan dan pembangunan berbasis pertanian–perkebunan serta perikanan. Sumber kekuatan ekonomi lainnya adalah sektor pertambangan batubara, minyak, dan gas bumi yang harus dikelola secara arif dan bijaksana. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Utara selama sepuluh tahun terakhir menunjukan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan jumlah rumah tangga pertanian dalam arti luas meningkat sampai 14,27 % per tahun. Hal ini ditunjukan bahwa rumah tangga pertanian pada tahun 2003 sebanyak 38.914 rumah tangga menjadi 44.466 rumah tangga pada tahun 2013 (Hasil sensus pertanian BPS Kalimantan Timur, 2013). Permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya peningkatan rumah tangga pertanian tersebut tidak merata di semua kabupaten lebih terpusat di Kabupaten Nunukan (kenaikan terbesar), sedang di Kabupaten Malinau peningkatan sangat rendah. Kenaikan rumah tangga pertanian tersebut juga diikuti kenaikan usaha pertanian selama 10 tahun terakhir.

Disamping itu terdapat 50 unit perusahaan pertanian yang berbadan hukum, tersebar di Kota Tarakan sebanyak 21 perusahaan, di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau masing-masing hanya dua perusahaan pertanian, dan lainnya di Kabupaten Nunukan dan Bulungan. Jenis usaha pertanian di Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami perkembangan cukup besar.

Potensi pertanian di provinsi ini yang sangat menonjol adalah pertanian padi sawah, padi lading, dan jagung. Pada saat ini terdapat perusahaan besar yang berinvestasi di sektor pertanian tanaman padi dan palawija seperti PT Sang Hyang Sri, PT. Nusa Agro Mandiri (PT. Solaria). Di Kabupaten Bulungan terdapat kawasan pertanian terpadu yang dikenal dengan sebutan *Delta Kayan Food Estate* dengan luas lahan 5.000 ha.

Atas dasar kekuatan faktor fisik dan agroklimatologi memberikan gambaran adanya peluang yang besar untuk pengembangan komoditas selain padi, yaitu palawija, sayuran, buah-buahan dan dimungkinkan tanaman industri atau tanaman perkebunan. Hal ini akan memperkuat peran sektor pertanian dalam arti luas untuk mendukung

pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara melalui program diversifikasi baik horizontal maupun vertical. Diversifikasi horizontal dengan menganeka-ragamkan jenis komoditas yang dibudidayakan (industri hulu) yang akan menghasilkan beraneka ragam produk mentah pertanian. Sedang diversifikasi vertikal adalah penanganan produk mentah pertanian menjadi produk baru melalui proses pengolahan yang spesifik (industri hilir), yang akan memberikan nilai tambah produk dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk, baik pada tingkat rumah tangga, kelompok usaha bersama, atau industri pada skala Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam rangka penganeka-ragaman usaha atau budidaya pertanian tidak bisa dilepaskan peran dan fungsi dari sektor peternakan, baik ruminansia (ternak besar) maupun unggas (ternak kecil). Ternak besar mempunyai peran ganda dalam rumah tangga pertanian, yaitu sebagai tenaga kerja dalam pengolahan lahan, sumber pupuk organik, sebagai tabungan, dan juga sebagai bagian siklus energi. Di Provinsi Kalimantan Utara populasi ternak besar seperti sapi dan kerbau mengalami peningkatan yang lamban. Sebagai gambaran pada tahun 2011 populasi sebesar 16.775 ekor menjadi 16.910 ekor pada tahun 2013. Kondisi ini perlu didorong dan mendapat penanganan yang intensif agar pengembangan ternak besar dapat di akselerasi. Kondisi lingkungan atau kawasan yang cukup air dan didukung produksi pertanian khususnya jagung sangat menunjang untuk program pengembangan ternak unggas seperti itik Alabio, ayam kampung, ayam potong atau petelur. Dengan demikian sektor pertanian akan memberikan konstribusi yang lebih besar kepada perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

A. Perhubungan

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

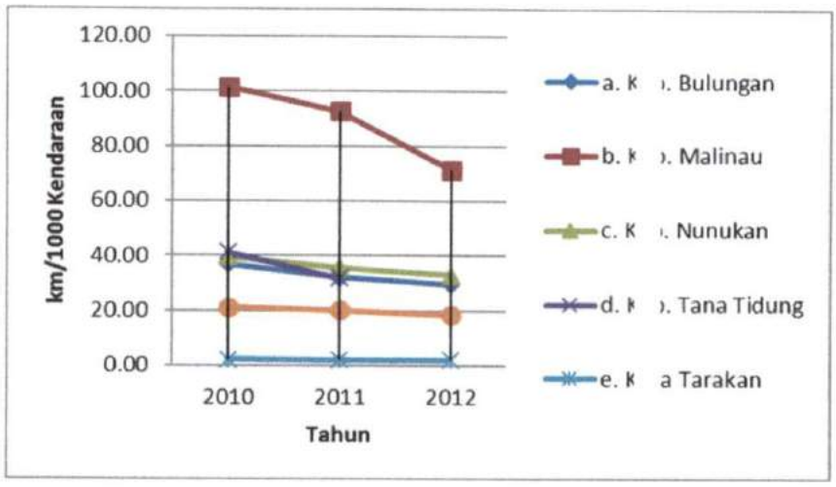
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah indikator yang menunjukkan tingkat pelayanan jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada. Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus panjang total kendaraan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada di kabupaten.

Tabel 2.4.6
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	50,22	44,80	37,11	32,06	29,80
Malinau	147,37	117,10	101,69	92,81	71,35
Nunukan	36,67	38,88	39,61	35,81	33,03
Tana Tidung	n/a	n/a	20,02	41,45	31,86
Tarakan	2,43	2,20	2,37	2,18	2,01
Prov. Kalimantan Utara			21,32	20,29	18,56

Sumber :
1) *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013*
2) *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013*
3) *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013*
5) *Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013*
6) *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013*

Dalam kurun 2009-2012 panjang jalan per 1000 kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan yang meningkat drastis setiap tahunnya tidak diiringi dengan pembangunan jalan yang memadai. Panjang jalan yang disediakan Provinsi Kalimantan Utara per 1000 kendaraan adalah 18,56 km per 1000 kendaraan.



Gambar 2.4.2
Grafik Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan data BPS, total panjang jalan pada tahun 2012 adalah 501.969 Km, sedangkan jumlah kendaraan di Indonesia pada tahun 2012 adalah 94.373.324 sehingga rasio panjang jalan/jumlah kendaraan di Indonesia adalah 5,31 km per 1000 kendaraan. Rasio panjang jalan/jumlah kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi dari rasio panjang jalan/jumlah kendaraan di Indonesia.

2. Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi air

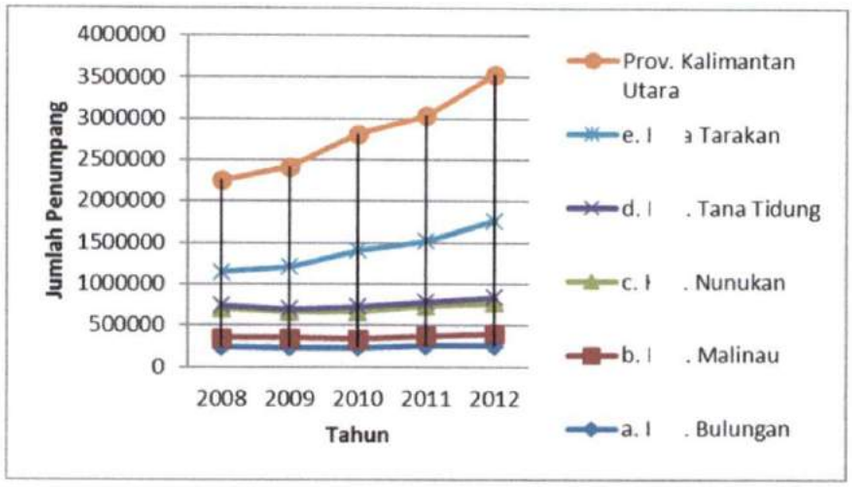
Jumlah arus penumpang sungai adalah jumlah penumpang transportasi air yang dalam satu tahun di kabupaten. Indikator ini sebagai penunjuk peningkatan/penurunan jumlah penumpang transportasi air di Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya.

Tabel 2.4.7
Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Air				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	239.941	231.786	232.324	252.000	252.000
Malinau	110.883	117.485	107.185	121.115	145.286
Nunukan	353.740	314.762	324.322	357.538	367.855
Tana Tidung	34.082	34.082	63.431	50.882	73.316
Tarakan	405.466	512.657	680.148	736.281	930.327
Prov. Kalimantan Utara	**1.110.030**	**1.210.772**	**1.407.410**	**1.517.816**	1.768.784

Sumber :
1) *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013*
2) *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013*
3) *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013*
4) *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2009-2013*
5) *Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013*
6) *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013*

Jumlah arus penumpang sungai di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2008-2012, angka terakhir menunjukkan jumlah penumpang angkutan sungai sebanyak 1.766.784 penumpang per tahun.



Gambar 2.4.3
Grafik Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

Berdasarkan Statistik Kementerian Perhubungan Tahun 2012, jumlah arus penumpang penyeberangan dan sungai rata-rata di pelabuhan Indonesia adalah 431.425 penumpang pada tahun 2012. Sehingga, pelabuhan di kabupaten/kota dengan arus penumpang transportasi air yang sudah melebihi rata-rata nasional adalah Kota Tarakan dengan 930.327 penumpang pada tahun 2012. Sedangkan 4 kabupaten lain masih di bawah rata-rata nasional.

3. Jumlah Bongkar/Muat Barang di Bandara

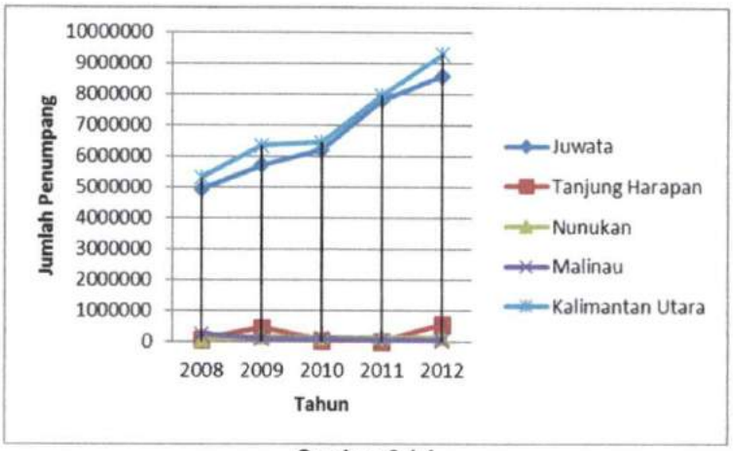
Berikut adalah data jumlah arus bongkar muat barang yang terangkut angkutan udara. Indikator ini menunjukkan perkembangan arus bongkar muat barang di bandara Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.4.8
Jumlah Bongkar/Muat Barang di Bandara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Pelabuhan Udara	Jumlah Bongkar/Muat Barang di Bandara (Kg)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Juwata	4.931.397	5.715.741	6.214.733	7.823.814	8.595.858
Tanjung Harapan	59.215	442.847	33.129	2.969	559.192
Nunukan	72.889	159.787	123.475	121.328	121.328
Malinau	244.727	88.403	88.403	33.222	33.222
Prov. Kalimantan Utara	**5.308.228**	**6.356.911**	**6.459.740**	**7.981.333**	**9.304.600**

Sumber :
1) *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013*
2) *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013*
3) *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013*
4) *Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013*
5) *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013*

Arus bongkar muat barang di bandara Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, barang yang terangkut mencapai 9.304,6 ton. Grafik jumlah bongkar/muat barang di Bandara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut.



Gambar 2.4.4
Grafik Jumlah Bongkar/Muat Barang di Bandara Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

4. Jumlah Penumpang Terangkut Transportasi Udara

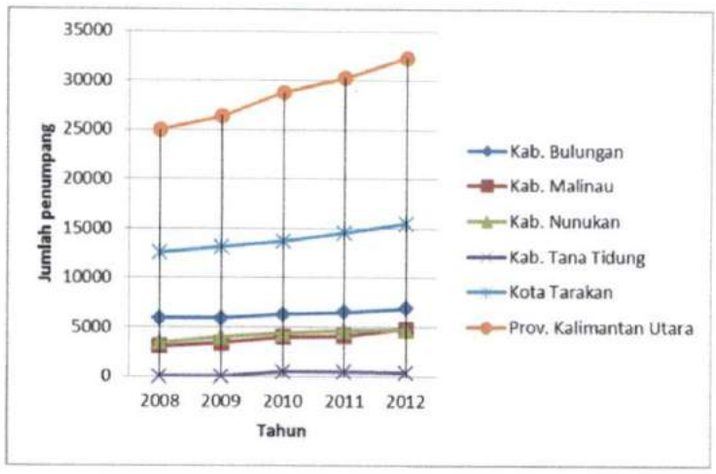
Penumpang transportasi udara selama tahun 2008-2012 menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 4.271.100 orang tahun 2008, menjadi 8.296.545 orang tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan 18,20% per tahun. Peningkatan penumpang transportasi udara di lingkup Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2008-2012 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.9
Jumlah Penumpang Terangkut di Bandara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Angkutan Udara				
	2008	2009	2010	2011	2012
Bulungan	3.136	1.255	2.479	7.913	11.891
Malinau	8.596	36.295	30.557	40.420	35.929
Nunukan	35.793	51.808	51.681	50.527	52.026
Tana Tidung	0	0	0	0	0
Tarakan	4.223.575	5.080.707	6.457.048	7.272.534	8.196.699
Prov. Kalimantan Utara	**4.271.100**	**5.170.065**	**6.541.765**	**7.371.394**	**8.296.545**

Sumber:
1) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2009-2013
2) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2009-2013
3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009-2013
4) Kota Tarakan Dalam Angka 2009-2013
5) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013

Dalam kurun waktu tersebut penumpang transportasi udara terbanyak di Kota Tarakan, yakni 4.223.575 orang tahun 2008, dan meningkat menjadi 8.196.699 orang tahun 2012. Selama periode tersebut rata-rata pertumbuhan penumpang transportasi udara di Kota Tarakan sebesar 18,18% per tahun. Penumpang transportasi udara di Kabupaten Nunukan meningkat dari 35.793 orang tahun 2008, menjadi 52.026 orang tahun 2012. Sedangkan penumpang transportasi udara di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan meningkat cukup tinggi, masing-masing dari 8.596 orang tahun 2008, menjadi 35.929 orang tahun 2012, dan dari 3.136 orang tahun 2008, menjadi 11.891 orang tahun 2012.



Gambar 2.4.5
Grafik Penumpang Terangkat di Bandara Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2012
Sumber: Hasil Analisis 2014

B. Penataan Ruang

Analisis ini menggunakan data luasan lahan pertanian, perkebunan, dan hutan produksi untuk menghitung luas kawasan produktif. Secara agregat, kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan luasan kawasan produktif, terutama sangat signifikan pada tahun 2007-2008, akan tetapi meningkat sejak tahun 2008.

Tabel 2.4.10
Luas Kawasan Lindung dan Budidaya di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)		
	Wilayah	Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
Bulungan	1.801.050	367.853	1.433.197
Malinau	3.976.632	1.683.835	2.292.797
Nunukan	1.449.300	488.657	960.643
Tana Tidung	482.858	26.264,75	456.593,3
Tarakan	25.08	11.742,99	13.337,01
Prov. Kalimantan Utara	**7.734.920**	**2.578.353,1**	**5.156.566,9**

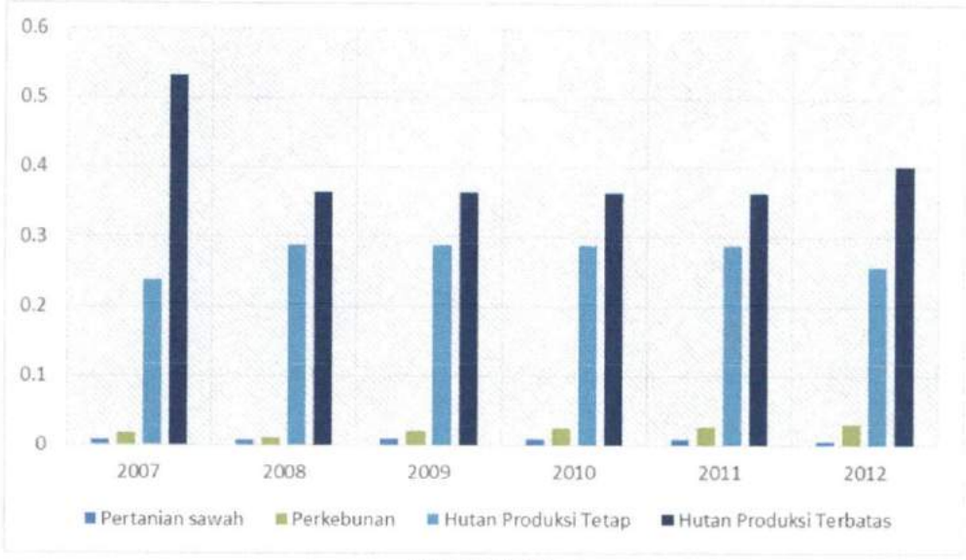
Sumber:
1) RTRW Kab. Malinau Perda No. 19 Tahun 2013
2) RTRW Kab. Nunukan Perda No. 11 Tahun 2012
3) RTRW Kota Tarakan Perda No. 4 Tahun 2012
4) RTRW Kab. Tana Tidung Perda No. 16 Tahun 2012
5) RTRW Kab. Bulungan Perda No. 4 Tahun 2013

Secara rinci, penurunan pada luasan kawasan produktif disebabkan oleh penurunan signifikan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi mengalami penurunan drastis pada tahun 2007-2008. Berkebalikan dengan itu, luasan kawasan perkebunan justru meningkat selama 2008-2012. Sementara itu, kawasan pertanian cukup stabil dan baru mengalami penurunan pada 2011-2012. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian hutan produksi yang terkonversi berubah menjadi perkebunan atau peruntukan lain yang tidak dijelaskan dalam analisis ini. Selain itu, dapat diindikasikan pula adanya peningkatan kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan hingga tahun 2012.

Tabel 2.4.11
Persentase Kawasan Produktif terhadap Kawasan Budidaya

Kabupaten	Kawasan Produktif terhadap Kawasan Budidaya					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Malinau	1.092.225	2.009.018	2.015.296	2.014.788	2.014.203	2.047.473
Bulungan	2.114.252	902.087,5	924.247	947.189	952.954	862.491
Nunukan	883.456	536.327,5	556.563	561.864	560.613	484.732
Tana Tidung	n/a	n/a	n/a	845	5.137	201.414
Tarakan	7.484	3.936	2.904	2.905	2.926	993
Prov. Kalimantan Utara	**4.097.416**	**3.451.369**	**3.499.010**	**3.527.591**	**3.535.833**	**3.597.103**
% Kawasan Produktif	**79,46%**	**66,93%**	**67,86%**	**68,41%**	**68,57%**	**69,76%**

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2008-2013



Gambar 2.4.6
Grafik Perubahan Penggunaan Kawasan Pertanian, Perkebunan, dan Hutan Produksi Relatif Terhadap Kawasan Produktif
Sumber:Hasil Analisis, 2014

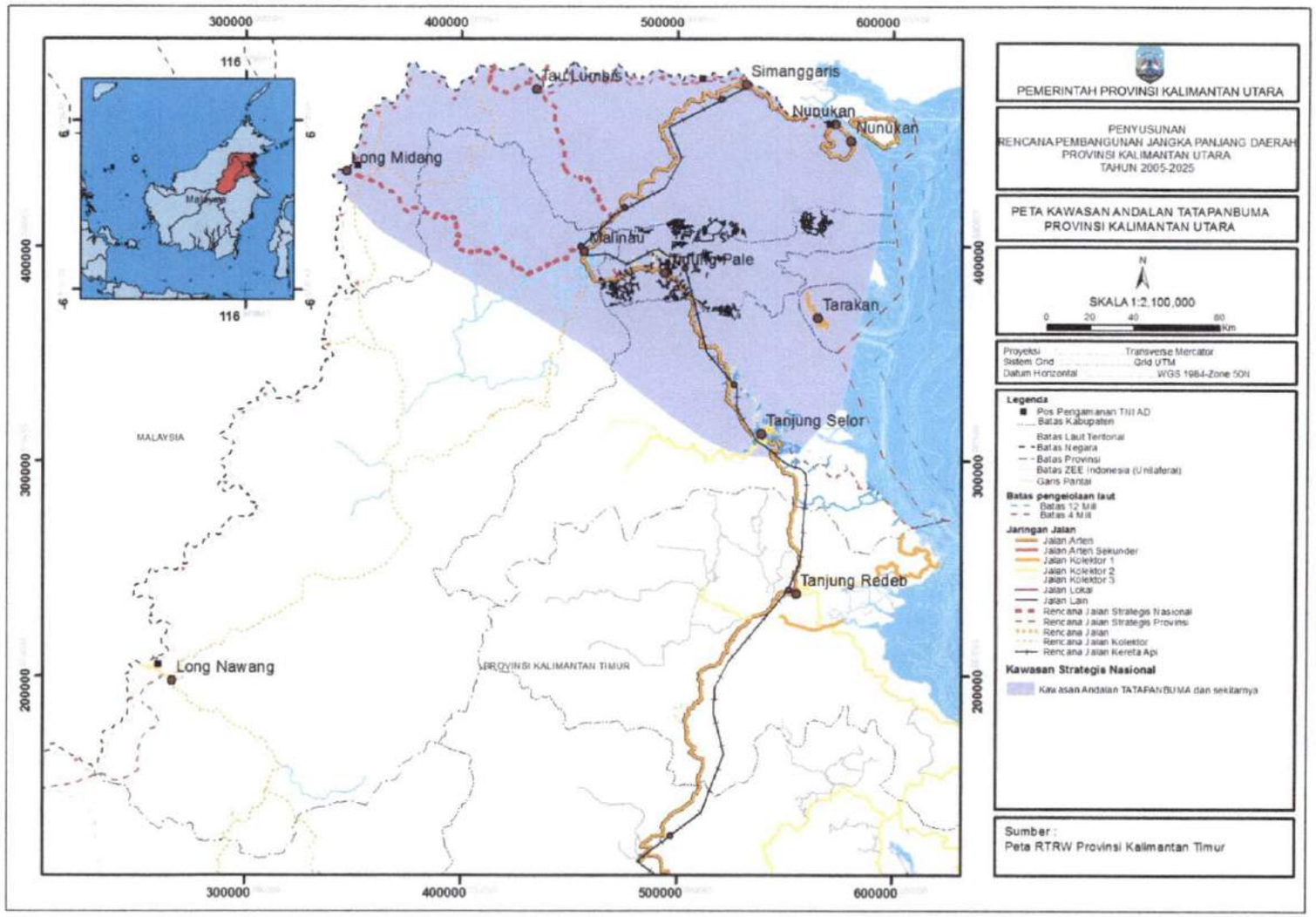
1. Kawasan Industri

Persentase kawasan industri terhadap kawasan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara sangat kecil, yakni 0,22% (lihat Tabel 2.3.1. E. 3.). Hanya Kota Tarakan yang memiliki persentase kawasan industri lebih dari 10%, sementara kabupaten lain tidak mencapai angka 1%. Hal ini dapat dipahami karena Kota Tarakan merupakan kota jasa dan perdagangan sehingga kegiatan industri lebih berkembang di kota ini dibandingkan dengan kabupaten lain yang masih bersifat kawasan pedesaan, dengan kegiatan ekonomi di sektor primer. Begitu juga pada Peta RTRW Provinsi Kalimantan Timur, tidak ditemukan delineasi kawasan industri pada kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut mengindikasikan adanya gap signifikan antara kondisi sekarang dengan rencana untuk mengembangkan industri dalam mendukung Kawasan Andalan Tatapanbuma, termasuk di antaranya adalah industri pengolahan batu bara, kelapa sawit, dan karet serta mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Nunukan. Kawasan Andalan Tatapanbuma dicantumkan dalam RTRW Nasional dan RTR Pulau Kalimantan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan sektor perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, industri pengolahan dan pertanian. Untuk mendukung kegiatan ekstraksi dan industri kawasan ini, tiga pelabuhan direncanakan sebagai hub pemasaran produk industri, yakni Nunukan, Tarakan, dan Tanjung Selor.

Tabel 2.4.12
Persentase Kawasan Industri terhadap Kawasan Budidaya

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Industri (Ha)	Persentase Kawasan Industri (%)
Bulungan	7.786	0,54
Malinau	1.047	0,05
Nunukan	520	0,05
Tana Tidung	206	0,05
Tarakan	1.693,09	12,69
Prov. Kalimantan Utara	**11.252,09**	**0,22**

Sumber: Hasil Analisis, 2014



Gambar 2.4.7
Peta Rencana Kawasan Andalan TATAPANBUMA dan Pusat-pusat Industri Pendukungnya
Sumber: RTRW Kalimantan Timur

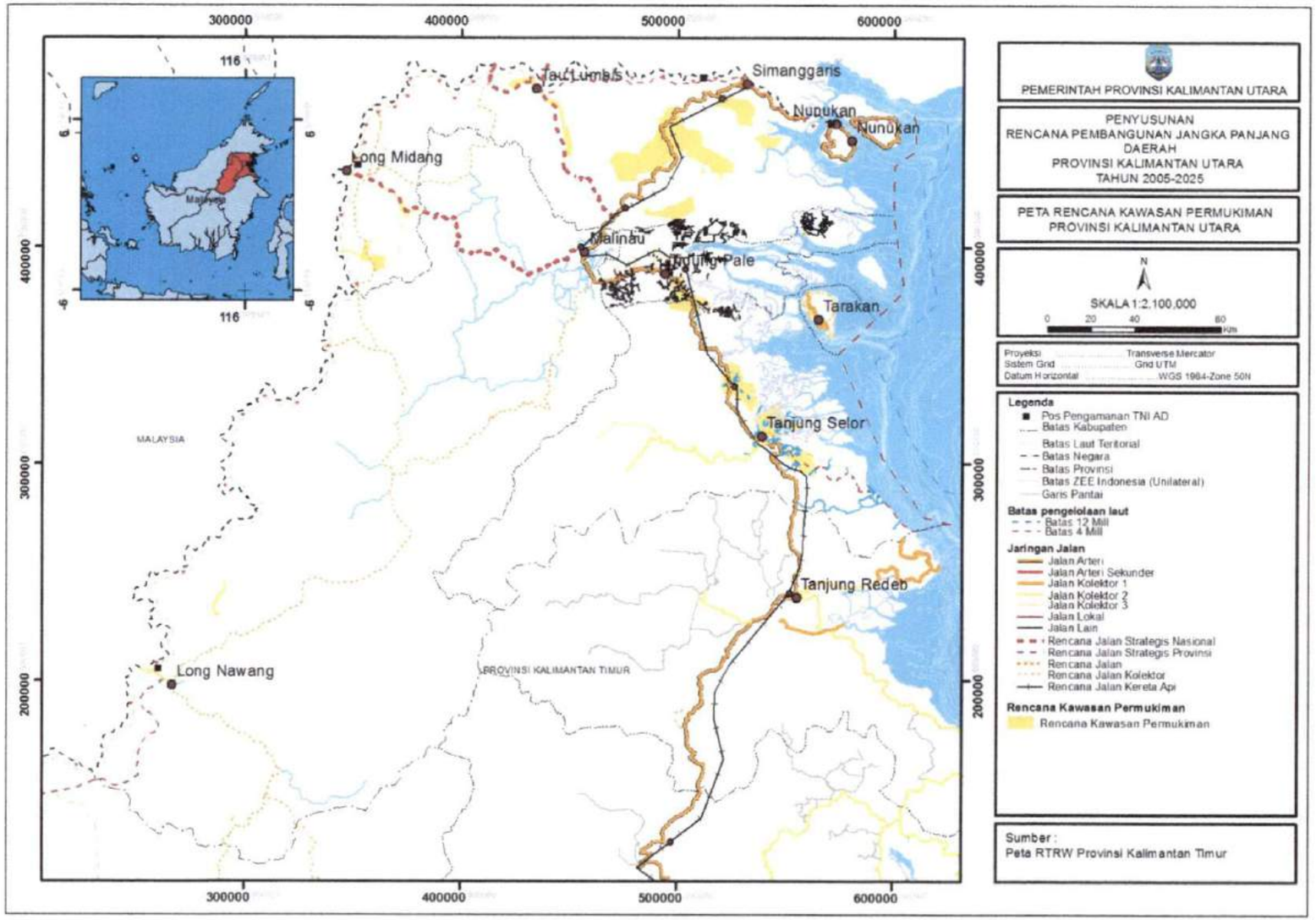
2. Kawasan Perkotaan

Kota Tarakan, yang juga merupakan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman Provinsi Kalimantan Utara, memiliki persentase kawasan perkotaan lebih dari 70% kawasan budidayanya. Angka tersebut menunjukkan perbedaan yang tajam dengan kabupaten lain, seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung yang penggunaan kawasan budidayanya didominasi oleh kawasan hutan non lindung. Menurut RTRW Provinsi Kalimantan Timur, secara spasial, aglomerasi permukiman perkotaan terkonsentrasi di Tanjung Selor dan Tanjung Palas (Kabupaten Bulungan) serta Tarakan. Selain itu terdapat upaya pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kabupaten Nunukan yang dikembangkan dari kawasan transmigrasi. Persentase kawasan perkotaan di Provinsi Tarakan tidak dapat dihitung karena tidak tersedianya data Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.4.13
Persentase Kawasan Perkotaan terhadap Kawasan Budidaya

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Kawasan Perkotaan (%)
Bulungan	8.950	0,62
Malinau	3.002	0,13
Nunukan	n/a	n/a
Tana Tidung	8101	1,77
Tarakan	9.839,00	73,77
Prov. Kalimantan Utara	**n/a**	**n/a**

Sumber: Hasil Analisis, 2014



Gambar 2.4.8
Peta Rencana Konsentrasi Permukiman dalam Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Timur

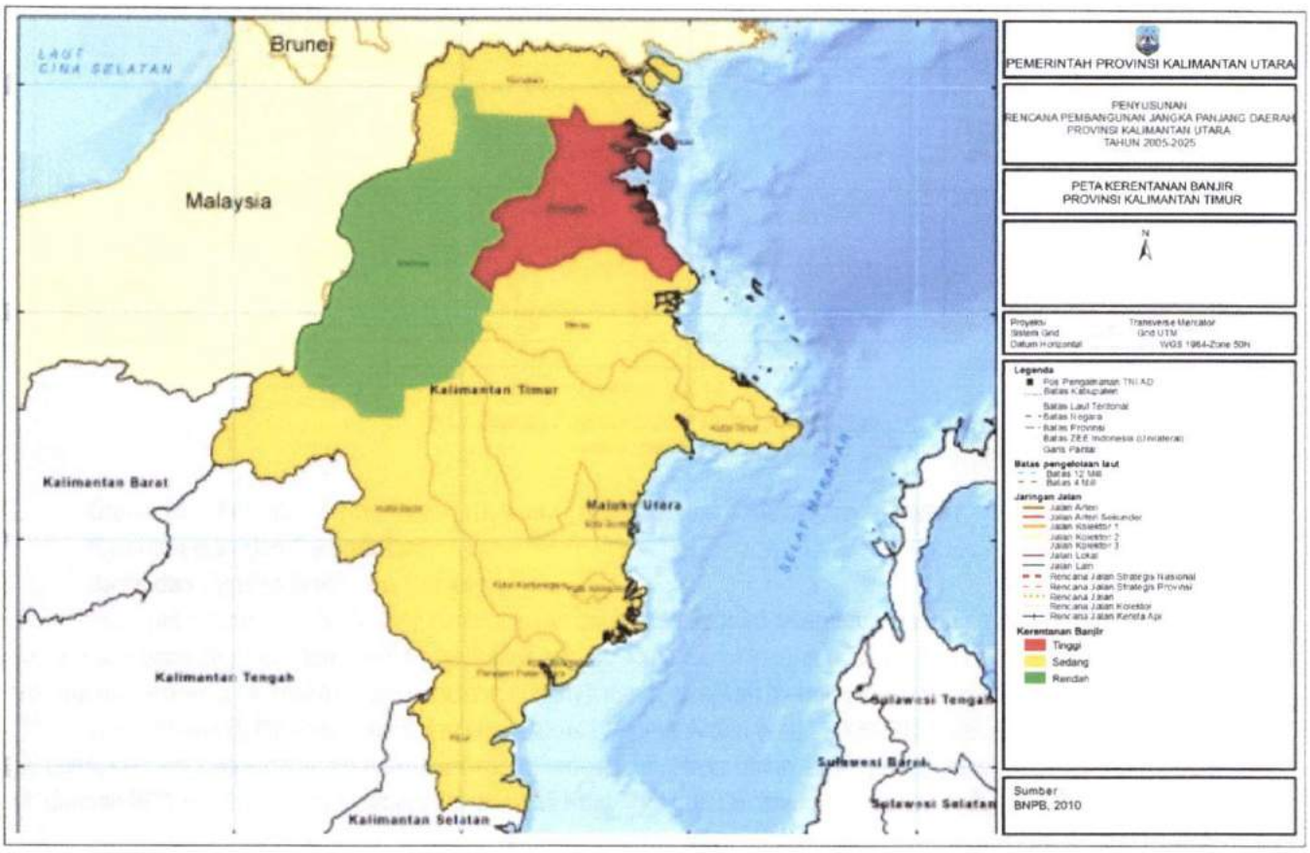
3. Kawasan Terdampak Banjir

Di Kabupaten Nunukan, 2.34% wilayahnya terdampak banjir pada tahun 2012, sementara hanya sedikit wilayah di Kabupaten Tana Tidung yang terdampak banjir. Menurut peta indeks kerawanan banjir Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010, Kabupaten Bulungan merupakan area yang memiliki indeks kerentanan paling tinggi. Titik-titik genangan di Kabupaten Bulungan tersebar di pantai timur. Persentase kawasan terdampak banjir Kalimantan Utara tidak dapat dihitung karena ketidaktersediaan data.

Tabel 2.4.14
Persentase Kawasan Berdampak Banjir terhadap Kawasan Budidaya

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	Kawasan Terdampak Banjir (%)
Bulungan	n/a	n/a
Malinau	n/a	n/a
Nunukan	22.471	2,34
Tana Tidung	291	0,06
Tarakan	n/a	n/a
Prov. Kalimantan Utara	**n/a**	**n/a**

Sumber:Hasil Analisis, 2014



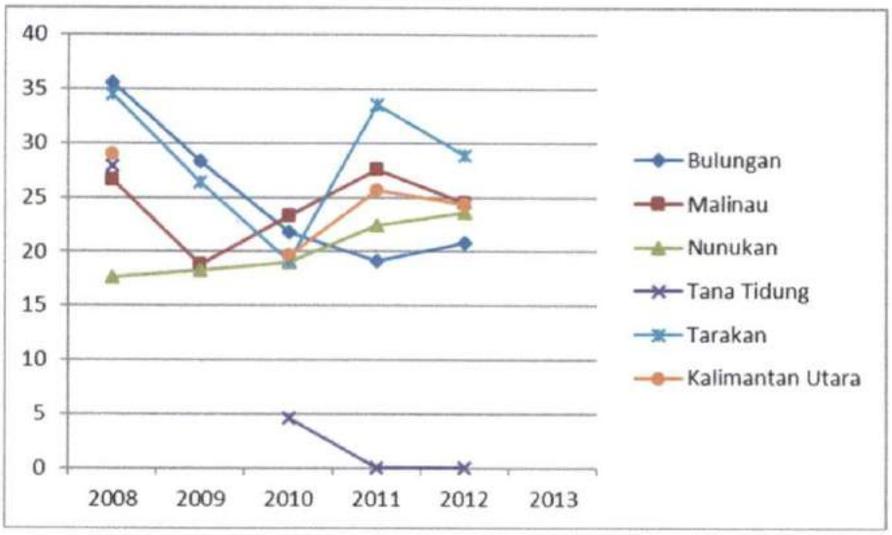
Gambar 2.4.9
Peta Indeks Kerentanan Banjir Kalimantan Timur
Sumber: BNPB, 2010

masih bersifat pedesaan. Angka kriminalitas Kabupaten Bulungan cenderung tinggi namun hanya bersifat sementara yang terlihat ada kecenderungan penurunan pada tahun 2008 sampai 2011. Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan kenaikan jumlah angka kriminalitas telihat pada tahun 2009 sampai 2012. Kabupaten Malinau jumlah angka kriminalitas cenderung fluktuatif namun lebih sedikit dibandingkan Kota Tarakan. Khusus untuk Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah paling rendah bahkan pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada sama sekali angka kriminalitas yang terjadi.

Tabel 2.4.18
Angka Kriminalitas Tahun 2008-2013

Kabupaten/ Kota	Angka Kriminalitas					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan	35,6	28,3	21,8	19,1	20,8	
Malinau	26,6	18,8	23,3	27,6	24,5	
Nunukan	17,6	18,3	19,0	22,4	23,6	
Tana Tidung	27,9		4,6	0,0	0,0	
Tarakan	34,5	26,4	19,1	33,5	28,9	
Prov. Kalimantan Utara	**29,0**		**19,7**	**25,7**	**24,4**	

Sumber:
1) *Kabupaten Bulungan dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011,2012*
2) *Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2013*
3) *Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2009, 2011*
4) *Kabupaten Tana Tidung dalam Angka Tahun 2009, 2011*
5) *Kota Tarakan dalam Angka Tahun 2012, 2013*
6) *Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2009, 2013*



Gambar 2.4.12
Grafik Jumlah Angka Kriminalitas dirinci per Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2013
Sumber : Hasil Analisis 2014

2. Jumlah Demo

Indikator ini digunakan sebagai langkah untuk melihat perkembangan jumlah demo dalam satu tahun yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Informasi yang menjelaskan jumlah demo hanya terlihat di empat kabupaten/kota. Jumlah demo di Kabupaten Nunukan cukup berfluktuasi, terlihat dari data tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012. Kabupaten Malinau mengalami kencenderungan menurun terlihat pada tahun 2011 dan 2012. Sementara Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan tidak dapat diamati kecenderungan perkembangannya karena hanya tersedia data tahun 2012. Khusus Kabupaten Tana Tidung tidak dapat diamati perkembangannya karena tidak ada informasi yang tersedia. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber yang ada, demo yang terjadi selama ini disebabkan oleh isu masalah ekonomi.

Tabel 2.4.19
Jumlah Demo Tahun 2008 - 2013

Kabupaten/ Kota	Jumlah Demo Dalam 1 Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bulungan					7	
Malinau				6	2	
Nunukan	13		10	21	20	
Tana Tidung						
Tarakan					13	

Sumber:
1) Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2013
2) Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2013
3) Profil Kabupaten NunukanTahun 2013

3. Kemudahan Perijinan

Indikator kemudahaan perizinan dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan dalam satuan hari. Karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru saja dibentuk pada tahun 2013, maka belum ada standar pelayanan minimal dalam pelayanan perizinan skala provinsi. Oleh karena itu, kemudahan perizinan dilihat per kabupaten/kota yang ada di dalam provinsi tersebut.

Pada tahun 2013, lama waktu proses pembuatan izin di Kota Tarakan rata-rata membutuhkan waktu 9 (sembilan) hari. Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 12 (dua belas) hari kerja. Sedangkan untuk Kabupaten Bulungan, pada tahun 2012 rata-rata lama perizinan yang dikeluarkan adalah 4 (empat) hari dengan Izin Usaha yang membutuhkan waktu paling lama yaitu selama 9 (sembilan) hari.

Tabel 2.4.20
Jenis-Jenis Perijinan dan Lama Proses Pembuatan Kota Tarakan Tahun 2013

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Resmi
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)			
	a. Izin usaha rekreasi dan hiburan umum	7	10	gratis
	b. Izin rumah makan/restoran	5	7	gratis
	c. Izin Usaha Hotel	7	8	gratis
3	Izin Usaha Industri (IUI)	12	10	gratis
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	12	10	gratis
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12	11	gratis
6	Izin Gangguan (HO)	10	8	gratis
7	Pendaftaran PMDA	3	5	gratis

Sumber:
1) Standar Pelayanan Minimal,
2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tahun 2014

Tabel 2.4.21
Jenis-Jenis Perijinan dan Lama Proses Pembuatan Kabupaten Bulungan Tahun 2012

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Resmi
1	Izin Prinsip	3	3	gratis
2	Izin Usaha	7	7	gratis
3	Izin Prinsip Perluasan	3	9	gratis
4	Izin Usaha Perluasan	3	5	gratis

Sumber:
1) Dokumen dan Peluang Investasi Kabupaten Bulungan,
2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan Tahun 2014

4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak terdiri dari bermacam-macam jenis

tergantung dengan masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan retribusi pada umumnya terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi untuk izin tertentu.

Pada tahun 2012, Kabupaten Tana Tidung memiliki 13 (tiga belas) jenis retribusi dan 10 (sepuluh) jenis pajak daerah. Sedangkan untuk Kota Tarakan, terdapat 24 (dua puluh empat) jenis retribusi dan 11 (sebelas) jenis pajak daerah. Perbedaan jumlah ini biasanya disebabkan oleh kompleksitas dan kemajuan dari wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu lebih banyaknya jumlah dan macam retribusi dan pajak daerah di Kota Tarakan menjadi wajar apabila dibandingkan dengan Kabupaten Tana Tidung karena Kota Tarakan merupakan pusat perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.4.22
Jenis Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2012			
		Pajak	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Izin Tertentu
1	Kabupaten Tana Tidung	a. Pajak Hotel	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	a. Retribusi Terminal	a. Retribusi Izin IMB
		b. Pajak Restoran	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	b. Retribusi Tempat Khusus Parkir	b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
		c. Pajak Hiburan	c. Retribusi Pelayanan Pasar	c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	c. Retribusi Izin Gangguan
		d. Pajak Reklame		d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	d. Retribusi Izin Trayek
		e. Pajak Penerangan Jalan		e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan
		f. Pajak Air Tanah			
		g. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			
		h. Pajak Sarang Burung			
		i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
		j. PBB Perdesaan dan Perkotaan			
2	Kota Tarakan	a. Pajak Hotel	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	a. Retribusi Izin IMB
		b. Pajak Restoran	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	b. Retribusi Tempat Pelelangan	b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
		c. Pajak Hiburan	c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatatan Sipil	c. Retribusi Terminal	c. Retribusi Izin Gangguan
		d. Pajak Reklame	d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	d. Retribusi Tempat Khusus Parkir	d. Retribusi Izin Trayek
		e. Pajak Penerangan Jalan	e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	e. Retribusi Rumah Potong Hewan	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan
		f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	f. Retribusi Pelayanan Pasar	f. Retribusi Pelayanan Pelabuhan	
		g. Pajak Parkir	g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
		h. Pajak Air Tanah	h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
		i. Pajak Sarang Burung Walet	i. Retribusi Penyediaan danatau penyedotan kakus		
		j. PBB Perdesaan dan Perkotaan	j. Retribusi Pelayanan Pendidikan		
		k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		

Sumber:
1. Perda Retribusi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012, (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Tana TidungTahun 2014)
2. Perda Kota Tarakan Tahun 2012, (Sekretariat Daerah Bagian Hukum, Kota Tarakan Tahun 2014)

d. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di perbatasan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara di Lokpri Kayan Selatan, Krayan, dan Lumbis Ogong.
e. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyedian insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir dalam kecamatan Lokpri terutama rumah guru, fasilitas telekomunikasi dan informasi bagi guru.
f. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan.
g. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan.

5. Penguatan regulasi dan insentif, yakni dengan strategi:
   a. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam bukan kayu yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung.
   b. Regulasi pengelolaan lintas batas.
   c. Regulasi perdagangan lintas batas perjanjian kerjasama antara RI Malaysia dalam pengembangan kawasan perbatasan negara.
   d. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan *dryport*.
   e. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir (kecamatan lokpri).
   f. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan.
   g. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabuapaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
   h. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara.
   i. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik.
   j. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan Utara.
   k. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara.

Prioritas program pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah Kalimantan, yaitu:

1. **Perhubungan udara:** Pengembangan bandara Tanjung Harapan, Bulungan; pengembangan bandara Juwata, Tarakan; pembangunan bandara Maratua; peningkatan bandara perintis Binuang, Kecamatan Krayan Selatan; pembangunan bandara Sebatik.
2. **Perhubungan laut:** Pengembangan pelabuhan Nunukan; pengembangan pelabuhan Tarakan; pengembangan pelabuhan bongkar muat barang di Pesawan, Tanjung Selor; pengembangan pelabuhan Tunon Taka; pengembangan pelabuhan Malundung; pengembangan pelabuhan Sebatik; pembangunan pelabuhan internasional di Tanah Kuning; dan pembangunan pelabuhan Bebatu, Kabupaten Tana Tidung.
3. **Jalan:** Pembangunan jalan perbatasan Long Nawang – Long Pujungan – Long Kemuat – Langap – Malinau; pembangunan jalan Mesalong – Sasipu – Tou Lumbis; pembangunan jalan perbatasan Malinau – Punan – Long Bawan – Long Midang; pembangunan jalan Long Nawang – Metulang –

Long Boh – Batas Kaltim; pembangunan jalan penghubung Kabupaten Bulungan – Tarakan; pembangunan jembatan pendukung pengembangan Kota Baru Tarakan.

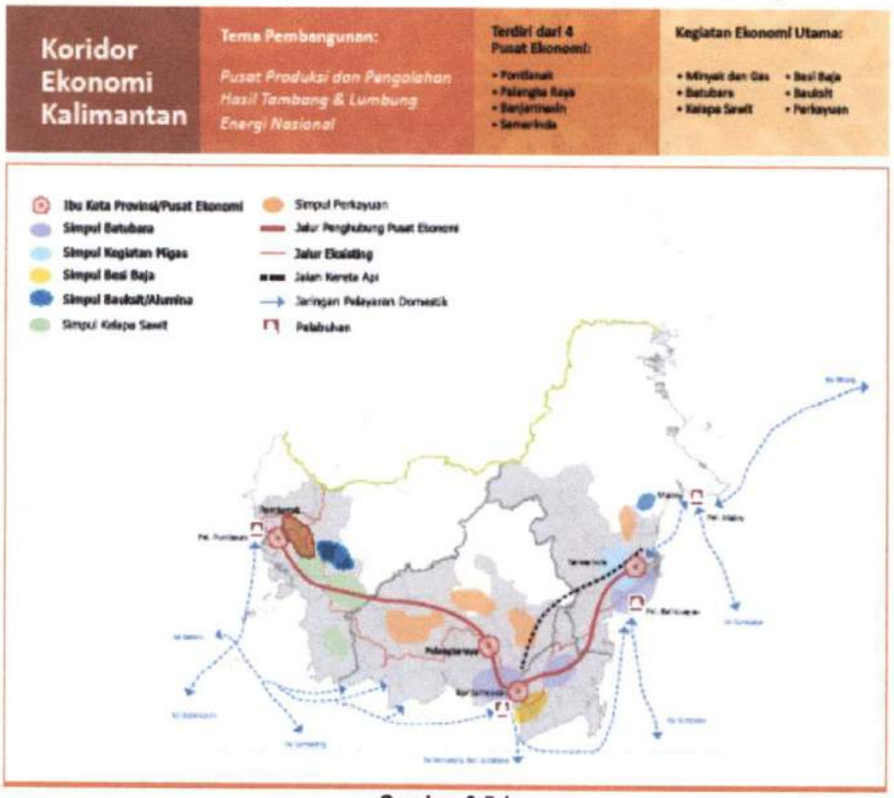
4. **ASDP:** Pengembangan dermaga penyeberangan Nunukan; pengembangan dermaga penyeberangan Sebatik; pengembangan pelabuhan penyeberangan/ferry Tarakan; peningkatan pelabuhan ferry Ancam.
5. **Ketenagalistrikan:** PLTMG Tanjung Selor 15 MW; PLTMG Nunukan 2 10 MW; pengembangan jaringan transmisi dan distribusi; PLTA Besahan (Kayan 3) dan PLTA Long Sempajang total kapasitas 1000 MW.
6. **Telekomunikasi dan Informatika:** Pembangunan tower telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan; pembangunan serat optik antar seluruh kabupaten/kota; pengembangan transmisi penyiaran TVRI.
7. **Sumber daya air:** Pembangunan DR. Sepunggur Kabupaten Bulungan; pembangunan DR. Salim batu Kabupaten Bulungan; pembangunan DR. Teras Baru Kabupaten Bulungan; pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kabupaten Malinau; pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR. Tanjung Buka; pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR. Sepunggur; pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR. Salim Batu; pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR. Teras Baru; pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR. selang ketok; pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR tanah kuning; persiapan pembangunan lima Bendungan di Sungai Kayan (Kabupaten Bulungan) dan tiga bendungan di Sungai Mentarang (Kabupaten Malinau); pembangunan embung di Kota Tarakan; pembangunan waduk PLTA Besahan (Kayan-K3) dan pembangunan waduk PLTA Long Sempajang (Mentarang 3) sebesar 1000 MW.
8. **Pendidikan:** Pembangunan sekolah baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; dan pembangunan asrama sekolah.
9. **Kesehatan:** Pembangunan untuk RS Pratama di Kabupaten Tana Tidung (Tana Lia, Bebatu), Kabupaten Nunukan (Sebayu dan Krayan), Kabupaten Malinau (Long Ampung, RS Langap); penyediaan alkes, jaringan, untuk RS Pratama di Pratama di Kabupaten Tana Tidung (Tana Lia, Bebatu), Kabupaten Nunukan (Sebayu dan Krayan), Kabupaten Malinau (Long Ampung), RSUD Tarakan beserta pembangunan gedung radioterapi; pembangunan RS tipe D di Kota Tana Tidung (pengembangan dari Puskesmas menjadi RS); pengadaan tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau (dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi); pembangunan baru RS Provinsi tipe A di Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan).
10. **Perumahan:** Pembangunan rumah khusus daerah perbatasan 230 KK di Kecamatan Krayan Selatan dan 845 KK di Kecamatan Lumbis Ogong; pembangunan infrastruktur kawasan permukiman untuk rumah khusus di daerah perbatasan; pembangunan konsep persampahan ramah lingkungan untuk ibukota Provinsi Kalimantan Utara).

2.5.4. *MASTER PLAN* PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI (MP3EI) KORIDOR KALIMANTAN

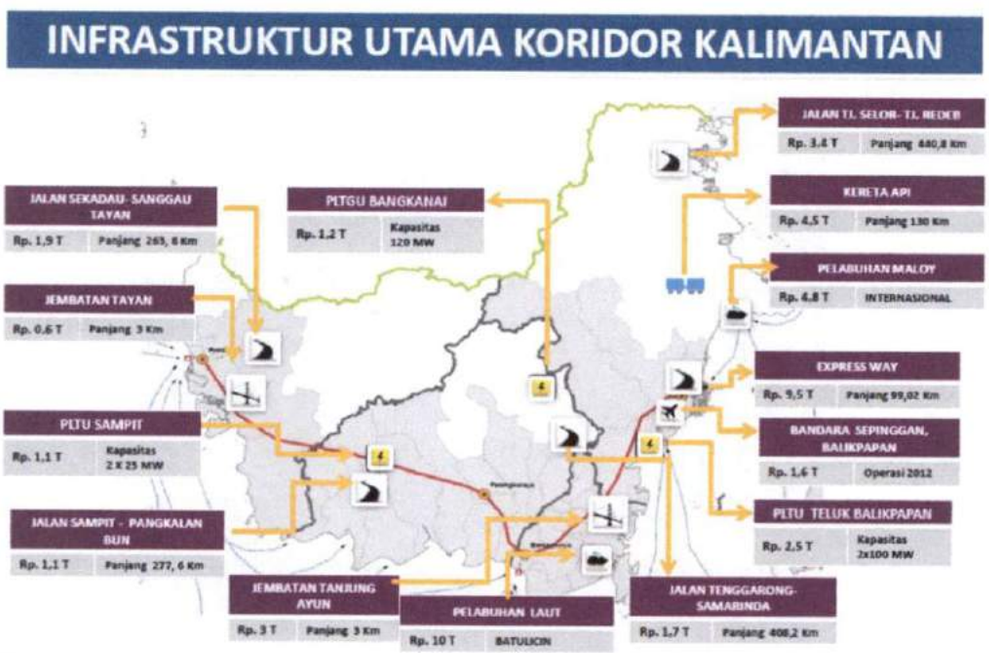
Pada saat MP3EI disusun, Provinsi Kalimantan Utara masih merupakan bagian dari Provinsi Kalimanatan Timur sehingga tidak secara khusus muncul dalam penamaan dan indikasi lokasi pembangunan yang terkait dengan MP3EI Koridor Kalimantan. Walaupun demikian tetap termuat berbagai lokasi pembangunan di kabupaten/kota dan sub wilayah di Provinsi Kalimantan Utara.

Dari dokumen yang ada Koridor Ekonomi Kalimantan diarahkan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasl Tambang dan Lumbung Energi Nasional dengan Pusat Ekonomi Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda. Kegiatan ekonomi utama yang diunggulkan adalah batubara, kegiatan migas, besi baja, bauksit/alumina, kelapa sawit, perkayuan. Kemudian infrastruktur pendukung yang diutamakan akan dibangun antara lain pelabuhan, bandara, kereta api, jalan raya, infrastruktur energi, ICT dan logistik. Dari berbagai rencana yang ada kurang tercermin lokasi yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini Kalimantan Utara tidak secara khusus dimunculkan (ibukota Tanjung Selor atau pelabuhan

Tarakan). Berkenaan dengan pengelolaan pembangunan yang ada sangat bersifat ekstratif sehingga perlu diperhatikan kelestarian lingkungan sebagai upaya menerapkan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.5.1
Koridor Ekonomi Kalimantan (Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional
Sumber: Paparan Implementasi Proyek Berbasis Lahan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi Kalimantan



Gambar 2.5.2
Infrastruktur Utama Koridor Kalimantan
Sumber: Paparan Implementasi Proyek Berbasis Lahan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi Kalimantan

2.5.5. *GRAND DESIGN* PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011-2025

Sesuai arah RPJPN 2004-2025 kebijakan pembangunan untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berorientasi pada *outward looking*, ini menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang akivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan memadukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*). Berdasarkan pendekatan tersebut beberapa kota kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mengakomodasi aspek pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, oleh karena PKSN tersebut memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan PKSN merupakan *entry point* pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. PKSN di Provinsi Kalimantan Utara yakni Long Nawang, Long Midang, Simanggaris dan Nunukan. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah, dengan mengembangkan potensi kawasan dan memecahkan permasalahan strategis perbatasan di wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan secara terpadu.

Sasaran wilayah pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan pada Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dengan fokus lokasi penanganan prioritas (Lokpri). Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 12 Lokpri, yakni: Sebatik, Krayan, Nunukan sebagai Lokpri I, Krayan Selatan (Lokpri II), Sebuku dan Sebatik Barat (Lokpri III) di Kabupaten Nunukan; Kayan Hulu, (Lokpri I), Long Pujungan (Lokpri II), Kayan Hilir, Bahau Hulu dan Kayan Selatan (Lokpri III) di Kabupaten Malinau.

Terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib dan maju merupakan visi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan misi: (1) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut; (2) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas Negara; (3) Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan utama pengelolaan perbatasan, yakni: (1) Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, (2) Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global.

Agenda prioritas pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat adalah: (1) Optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan Sumber daya Alam, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan iklim investasi di perbatasan darat, (3) Penataan ruang di kawasn perbatasan darat, (4) Percepatan pengembangan sarana dan prasarana PKSN di kawasan perbatasan darat, (5) Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat, (6) Perintisan model transmigrasi kawasan perbatasan darat, (7) Pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional. Agenda prioritas yang terkait dengan percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar perbatasan, adalah: (1) Pengembangan sistem pelayanan khusus kawasan perbatasan, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar. Agenda prioritas yang terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan darat, adalah: (1) Pengembangan manajemen berbasis wilayah, (2) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan perbatasan, (3) Pengembangan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan darat, dan (4) Pengembangan sistem pendukung pengelolaan perbatasan dan adopsi teknologi informasi.

2.5.6. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur memiliki enam misi yang terkait dengan Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, merupakan misi pertama dengan sasaran pokok meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan; meningkatnya peran pemuda dan perempuan, meningkatnya karakter masyarakat menuju masyarakat yang berbudi luhur, bertoleransi, dan bergotong-royong. Peningkatan perekonomian daerah merupakan misi kedua, dengan sasaran pokok meningkatnya produksi dan produktivitas berbasis agrobisnis dan agroindustri pada empat kabupaten di lingkup Provinsi Kalimantan Utara yang kompetitif dan berdaya saing; menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; juga dengan berkembangnya iklim investasi yang menarik. Misi ketiga infrastruktur ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan memadai yang dilakukan dengan terbangunnya jaringan infrastruktur yang merata, terpenuhinya pasokan energi listrik dan air bersih.

Selanjutnya, misi keempat lingkungan hidup ditujukan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat baik dalam penanganan masalah lingkungan maupun dalam mitigasi pencegahan kerusakan lingkungan. Sementara tata kelola pemerintahan sebagai misi kelima ditujukan untuk menciptakan *clean goverment* dan *good governance*, dengan cara terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas (baik dan bersih). Misi terakhir, perbatasan, ditujukan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang mandiri dan berdaya saing, dilakukan dengan meningkatnya pemerataan pembangunan daerah berbatasan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pada kawasan perbatasan. Misi perbatasan merupakan misi yang terkait langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara yakni Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

2.5.7. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sementara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2020, yang sedang dalam proses penetapan, yang terkait dengan Provinsi Kalimantan Utara di sektor transportasi khususnya transportasi darat direncanakan pemantapan jaringan lintas tengah Pulau Kalimantan, yakni jalur Trans Kalimantan serta pengembangan jalan strategis nasional di kawasan perbatasan. Transportasi udara, pemantapan dan pengembangan bandara skala pelayanan tersier di perbatasan Kabupaten Malinau, dan pemantapan bandara skala sekunder di Tanjung Selor dan Sajau Kabupaten Bulungan. Transportasi laut, pengembangan pelabuhan di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Sementara di sektor energi direncanakan pengembangan transmisi tenaga listrik sebagai penyuplai energi di Pulau Kalimantan.

Sebagai upaya melestarikan kawasan lindung direncanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai antar negara yakni Wilayah Sungai Sesayap yang meliputi Malaysia dan Indonesia. Selain itu di Kabupaten Nunukan direncanakan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Sebatik dan Simanggaris sebagai pusat permukiman baru yang meliputi kawasan permukiman, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, peningkatan aksesibilitas untuk pertahanan dan keamanan, serta pengembangan kawasan pesisir dan laut.

2.5.8. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2015-2035

Sementara dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2015-2035 yang sedang disusun, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah: "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai *pintu gerbang internasional* dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataa ruang tersebut dengan:

(1) Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
(2) Peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
(3) Penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;
(4) Pembangunan kawasan berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;
(5) Pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;
(6) Pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan

(7) Penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

2.5.8.1. Rencana Struktur Ruang

A. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Utara, terdiri dari rencana pengembangan sistem perkotaan yang meliputi:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), di Kota Tarakan;
b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) di Tanjung Selor.
c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Nunukan dan Tau Lumbis di Kabupaten Nunukan; dan Malinau Kota di Kabupaten Malinau.
d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), meliputi Sebatik dan Long Bawan di Kabupaten Nunukan; Long Nawang di Kabupaten Malinau; dan Tidung Pale di Kabupaten Tana Tidung.
e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: Bunyu, Long Bia, Karang Agung, Sekatak Buji, dan Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan; Long Layu, Mansalong, dan Pembeliangan di Kabupaten Nunukan; Data Dian, Long Berang, Long Loreh, Long Pujungan, dan Mahak Baru di Kabupaten Malinau; dan Tanah Merah di Kabupaten Tana Tidung.
f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), meliputi: Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang (Kabupaten Nunukan); dan Long Nawang (Kabupaten Malinau).

B. Sistem Jaringan Prasarana Utama

a. Sistem Jaringan Transportasi Darat

(1) Sistem jaringan jalan meliputi jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer 1, jaringan jalan kolektor primer 2, jaringan jalan kolektor primer 3, jaringan jalan strategis nasional, jaringan jalan strategis provinsi, dan jembatan.
(2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang tipe A (Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan) dan tipe B di (Long Midang, Mansalong, Simanggaris di Kabupaten Nunukan, Boom Panjang di Kota Tarakan, Sesua di Kabupaten Malinau dan Tidung Pale di Tana Tidung).
(3) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi **pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau** (pelabuhan Tanjung Selor, Ancam, Sekatak dan Bunyu di Kabupaten Bulungan; pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan; pelabuhan Nunukan, Sebuku, Simanggaris, Sembakung, Mansalong, Binter, Tau Lumbis dan Sungai Ular di Kabupaten Nunukan; pelabuhan Malinau Hilir di Kabupaten Malinau; pelabuhan Sesayap dan Sesayap Hilir di Kabupaten Tana Tidung), **pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyeberangan** (pelabuhan Kayan II, Ancam, Bunyu, dan Sungai Ancam Tanjung Palas Utara di Kabupaten Bulungan; Pelabuhan Juwata di Kota Tarakan, dan pelabuhan Nunukan di Pulau Nunukan) **dan pelabuhan dan alur pelayaran khusus** (Pelabuhan khusus di Bandar Juwata Tarakan).

b. Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

(1) Jaringan jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api (KA) umum (jaringan jalur KA nasional dan jaringan jalur KA provinsi) dan jaringan jalur KA khusus.
(2) Stasiun kereta api terdapat di Sekatak, Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan; Kota Tarakan; Mansalong dan Simanggaris di Kabupaten Nunukan; Malinau Kota di Kabupaten Malinau dan Sesayap di Kabupaten Tana Tidung.

c. Sistem Jaringan Transportasi Laut

(1) **Tatanan kepelabuhan terdiri dari pelabuhan utama** (Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan); **pelabuhan pengumpul** (Pelabuhan Tanjung Selor, Bunyu, dan Pidada di Kabupaten Bulungan, serta Pelabuhan Tunon Taka dan Sungai Nyamuk di Kabupaten Nunukan); dan **pelabuhan pengumpan** (Pelabuhan Ancam di Kabupaten Bulungan dan Pelabuhan Tana Lia di Kabupaten Tana Tidung).

(2) Terminal meliputi terminal di Kabupaten Bulungan (7 terminal), Kabupaten Nunukan (3 terminal), Kabupaten Malinau (3 terminal) dan Kabupaten Tana Tidung.

(3) Alur pelayaran meliputi pelayaran kapal barang dan pelayaran kapal penumpang.

d. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Tatanan kebandarudaraan terdiri dari: **bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder** (bandar udara Juwata di Kota Tarakan dan Tanjung Harapan di Kabupaten Bulungan); **bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier** (bandar udara Nunukan di Kabupaten Nunukan); **bandar udara pengumpan** (bandar udara Long Layu, Yuvai Semaring, dan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Long Ampung dan RA. Bessing di Kabupaten Malinau, Sesayap dan Buang Baru di Kabupaten Tana Tidung); **bandar udara khusus** (perbatasan darat dan penanganan bencana); dan **bandar udara perintis.**

C. Sistem Prasarana Lainnya

a. Sistem Jaringan Energi

(1) Pembangkit tenaga listrik meliputi: PLTU (di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan), PLTD (di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan), PLTA (di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau), PLTG di Pulau Bunyu dan PLTS serta PLTMH.

(2) Gardu induk terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas pembangunan jaringan transmisi, transmisi kabel bawah laut (PLTG Sebaung-Sei Lancang dan Sedadap-Liang Bunyu), dan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 KV di Kabupaten Malinau.

(4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas jaringan pipa gas bumi nasional, jaringan distribusi gas kota yang tersebar di seluruh Kota Tarakan serta rencana pengembangan jaringan pipa gas nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan meliputi sumber energi biomassa, tenaga surya dan angina yang terdapat di pantai Tarakan. Selain itu juga terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik berupa PLTS komunal maupun PLTS SHS (unit rumah tangga) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio) di Kabupaten Bulungan.

(6) Rencana pengelolaan sumber daya energi diantaranya membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET dan menetapkan ketentuan radius pengembangan.

b. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil.

c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

(1) Sumber air terdiri atas air permukaan pada sungai dan air tanah mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

(2) Prasarana sumber daya air meliputi sistem pengelolaan banjir, sistem jaringan irigasi dan sistem jaringan air baku. Sistem jaringan irigasi berupa daerah irigasi (DI) terdiri atas DI kewenangan nasional (Sesayap, Tana Lia, Sesayap Hilir) dan DI kewenangan provinsi (Kaliamok, Sajau Hilir dan Selimau).

d. Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan

Sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan sistem pengelolaan persampahan regional. SPAM dilaksanakan melalui pengembangan SPAM regional untuk wilayah kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan

Sistem pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui:

(1) Pengembangan sistem persampahan untuk wilayah kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah melalui sistem pengelolaan sampah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan.

(2) Pengembangan sistem pengelolaan persampahan untuk kabupaten/kota akan dikembangkan pada masing-masing kabupaten dengan lokasi tempat pengelolaan jauh dari permukiman atau dengan melakukan sistem pengelolaan daur ulang.

(3) Pengelolaan persampahan untuk daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, terutama yang ada di pulau-pulau diarahkan penanganannya melalui pengelolaan secara individu atau secara komunal setempat atau pengembangan pengelolaan daur ulang seperti pembuatan pupuk kompos.

2.5.8.2. Rencana Pola Ruang

A. Kawasan Lindung

Rencana kawasan lindung terdiri atas:

a. **Kawasan hutan lindung** (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).

b. **Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya**, yang terbagi menjadi kawasan bergambut (Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung) dan kawasan resapan air (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).

c. **Kawasan perlindungan setempat** meliputi: kawasan sempadan pantai (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan), kawasan sempadan mata air (menyebar di seluruh wilayah provinsi), dan kawasan ruang terbuka hijau (menyebar di kawasan permukiman perkotaan).

d. **Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya** terdiri atas: kawasan suaka alam laut yang ditetapkan di Kabupaten Bulungan (Kawasan suaka alam Pulau Burung, Kawasan suaka alam Pulau Keris, dan Kawasan suaka alam Peso) dan Kabupaten Nunukan (Kawasan suaka alam Pulau Sebatik), kawasan pantai berhutan bakau (meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung), taman nasional yang ditetapkan di Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau), taman hutan raya yang ditetapkan di Taman Hutan Raya Gunung Rian, Kecamatan Sesayap (Kabupaten Tana Tidung), taman wisata alam (Kabupaten Bulungan), serta cagar budaya dan ilmu pengetahuan (ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).

e. **Kawasan bencana alam** terdiri dari: kawasan rawan tanah longsor (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan rawan dampak kebakaran hutan (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), dan kawasan rawan banjir (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).

f. **Kawasan lindung geologi** meliputi:

(1) Kawasan cagar alam geologi yang terdiri atas kawasan keunikan batuan dan fosil (Kabupaten Bulungan), kawasan keunikan bentang alam (Kabupaten Bulungan), kawasan keunikan proses geologi (Kabupaten Bulungan);

(2) Kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri atas: kawasan rawan gempa bumi (terdapat di sepanjang pantai provinsi Kalimantan Utara), kawasan liquifaksi (terdapat di kecamatan yang berada di sepanjang pantai timur Provinsi Kalimantan Utara serta termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai), kawasan yang terletak di zona patahan aktif (terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tindung), kawasan rawan tsunami (terdapat di sepanjang pantai timur termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai), kawasan rawan abrasi (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung).

(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, terdiri dari: kawasan imbuhan air tanah (ditetapkan di CAT Tanjung Selor), dan kawasan sempadan mata air (ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).

g. **Kawasan lindung lainnya**, yang terdiri dari kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut (Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan), dan kawasan konservasi perairan daerah (Kabupaten Nunukan).

B. **Kawasan Budidaya**

Rencana kawasan budidaya terdiri atas:

a. **Kawasan peruntukan hutan produksi** terdiri dari: kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan peruntukan hutan produksi tetap (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan).

b. **Kawasan peruntukan hutan rakyat** (Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau).

c. **Kawasan peruntukan pertanian**, meliputi kawasan pertanian tanaman pangan (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan hortikultura (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan peternakan (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).

d. **Kawasan peruntukan perkebunan** (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).

e. **Kawasan peruntukan perikanan**, terdiri atas: kawasan budidaya perikanan (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan perikanan tangkap (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung), dan kawasan pengolahan ikan (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan).

f. **Kawasan peruntukan pertambangan**, terdiri dari: kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung).

g. **Kawasan peruntukan industri** (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung).

h. **Kawasan peruntukan pariwisata**, terdiri dari: kawasan pariwisata alam (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan pariwisata budaya (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung), kawasan pariwisata buatan (Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung).

i. **Kawasan peruntukan permukiman**, terdiri atas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, dan permukiman pada kawasan khusus.

j. **Kawasan peruntukan lainnya**, terdiri dari kawasan peruntukan instalasi pembangkit tenaga listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

2.5.8.3. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan di Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) dan Kawasan Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Provinsi Kalimantan Utara meliputi Pulau Sebatik dan Gosong Makasar. Selanjutnya, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

(1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, diantaranya kawasan perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi (Long Bawan dan dan Long Layu di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, dan Long Nawang di Kabupaten Malinau), kawasan *Food Estate* dan *Rice Estate* di Kabupaten Bulungan, Kawasan Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan, dan koridor perkotaan Tarakan – Tanjung Selor.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi (warisan budaya Kerajaan Bulungan).

(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi (Koridor Sungai Sesayap dan Delta Tanjung Palas di Kabupaten Bulungan).

(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi (PLTA Peso di Kabupaten Bulungan).

2.5.9. RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

2.5.9.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BULUNGAN

A. Struktur Ruang

1. Perwujudan pusat kegiatan terdiri dari lima indikasi program, yakni:
   a) Revitalisasi kota telah berfungsi (PKW) di Tanjung Selor;
   b) Pengembangan/peningkatan fungsi (PKW) di Tanjung Selor;
   c) Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah (PPK ke PKL) di Gunung Putih, Tanjung Palas, Gunung Sari, Tanah Kuning, Karang Agung, Kota Bunyu;
   d) Revitalisasi dan pengembangan/peningkatan fungsi (PPL ke PPK) di Sekatak Buji, Salimbatu, Long Beluah, Long Tungu, Long Bia; dan
   e) Pengembangan/peningkatan fungsi (PPL) di beberapa desa semua kecamatan.
2. Perwujudan sistem prasarana yang terdiri dari transportasi, sumber daya air, jaringan transmisi tenaga listrik, dan sistem jaringan telekomunikasi.
   a. Program indikasi transportasi terdiri dari:
      1) Transportasi darat : pemantapan jaringan lintas tengah Pulau Kalimantan (Trans Kalimantan); pengambangan jalan kolektor primer menghubungkan antar wilayah di pulau: jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan (Tanjung Redep – Tanjung Selor – Malinau); pengembangan jalur KA antar kota : jaringan jalur KA lintas Pulau Kalimantan bagian timur (Tanjung Redep – Tanjung Selor – Malinau);
      2) Transportasi laut : pengembangan pelabuhan nasional (Mangkupadi/Pidada); pengembangan pelabuhan penyeberangan/ferry (Ancam/Tanjung Palas Utara);
      3) Transportasi udara : pemantapan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder (Tanjung Selor); pengembangan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder (Sajau); serta pengembangan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier (Bunyu, Kabarau, Long Bia).
   b. Program indikasi sumber daya air terdiri dari :
      1) Pembuatan sarana dan prasarana konservasi sumberdaya air baku nasional/SWS Strategi Nasional (Sekatak, Peso, Peso Hilir); dan

2) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau (sungai dan anak sungai).

c. Program indikasi jaringan transmisi tenaga listrik terbagi menjadi jaringan transmisi Pantai Timur Kalimantan dan pengembangan sistem jaringan prasarana energi kabupaten.

d. Sistem jaringan telekomunikasi, yang terdiri atas jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di wilayah Utara dan pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan telekomunikasi kabupaten.

B. Pola Ruang

1. Perwujudan kawasan lindung terdiri atas rehabilitasi hutan lindung, pemantapan kawasan laut/suaka alam laut, rehabilitasi kawasan resapan air nasional, dan rehabilitasi kawasan mangrove.
2. Perwujudan kawasan budidaya terdiri atas :
   a. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor perkebunan (Tatapanbuma);
   b. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor kehutanan (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitarnya);
   c. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor perikanan (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitarnya);
   d. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor pertambangan (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitarnya);
   e. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor pariwisata (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitarnya);
   f. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor industri pengolahan (Tatapanbuma, Tanjung Redep dan sekitarnya);
   g. Pengembangan dan pengendalian kawasan untuk sektor pertanian (dataran rendah dan kawasan pasut).

C. Kawasan Strategis Kabupaten

a. Pengembangan sentra-sentra pertanian (pangan dan hortikultura) yang berlokasi di Sekatak, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur;
b. Pengembangan sentra-sentra perkebunan (Sekatak, Tanjung Palas Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Timur, Peso Hilir, Peso);
c. Pengembangan sentra-sentra perikanan/tambak (Bunyu, Sekatak, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur);
d. Pengembangan kawasan pertambangan (Bunyu, Sekatak, Tanjung Palas Timur, Peso Hilir, Peso);
e. Pengembangan kawasan industri berikat (Tanjung Palas Timur); Jalan Tol (Tanah Kuning – Tanjung Selor); Jembatan penyeberangan (Tarakan – Pulau Payau).
f. Jalan Tol (Tanah Kuning – Tanjung Selor)
g. Jembatan penyeberangan (Tarakan – Pulau Payau)

2.5.9.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MALINAU

A. Struktur Ruang

1. Rencana struktur ruang di Kabupaten Malinau terdiri atas sistem perkotaan, jaringan prasarana utama, dan jaringan prasarana lainnya
   a. **Sistem perkotaan** di Kabupaten Malinau terdiri atas :
      1) Pemanfaatan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Malinau Kota yang berlokasi di Malinau Kota;
      2) Pemanfapan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang yang berlokasi di Kecamatan Kayan Hulu;
      3) Pengembangan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Long Pujungan dan Mahak Baru yang berlokasi di Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Sungai Boh;
      4) Pengembangan fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Long Berang, Pulau Sapi, Tanjung Lapang, Malinau Seberang, Long Loreh, Long Alango, Data Dian dan Long Ampung yang

berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Kayan Hilir dan Kayan Selatan; serta

5) Pengembangan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Semamu, Long Pala, Paking, Long Pada, Sentaban, Sesua, Kaliamok, Sembuak Warod, Setulang, Punan Gong Solok, Metut, Apau Ping, Long Sule, Sungai Anai, Lidung Payau, dan Sungai Barang yang berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Kayan Hilir, dan Kayan Selatan.

b. **Jaringan prasarana utama** terbagi atas:

1) Transportasi darat:

a) Pengembangan jalan strategis nasional, meliputi: ruas jalan Malinau Kota – Paking – Semamu – Binuang yang berlokasi di Kecamatan Malinau Kota, Mentarang Hulu, Mentarang, dan Malinau Barat;

b) Rencana pengoptimalan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor 1 (K-1) yang terdiri dari 2 ruas jalan (Kecamatan Malinau Barat, Malinau Kota, dan Malinau Utara);

c) Rencana pengoptimalkan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor 2 (K-2) yang terdiri dari empat ruas jalan (Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan Pujungan);

d) Pembangunan jaringan jalan kolektor 3 (K-3) yang terdiri dari tiga ruas jalan (Kecamatan Pujungan, Malinau Selatan, Malinau Barat, Sungai Boh, dan Kayan Hilir);

e) Peningkatan status jalan kolektor primer 3 (K-3) menjadi jalan kolektor primer 2 (K2) ruas jalan Long Pujungan – Long Jalan – Metut – Tanjung Nanga – Langap – Long Loreh – Gong Solok – Sesua (Kecamatan Pujungan, Malinau Selatan, dan Malinau Barat);

f) Pengembangan jalan strategis provinsi yang terdiri atas empat ruas jalan (Kecamatan Kaqyan Hulu, Pujungan, Bahau Hulu, Mentarang Hulu);

g) Pengembangan jalan strategis kabupaten yang terdiri atas dua ruas jalan (Kecamatan Malinau Kota dan Kayan Hulu);

h) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan lokal & lingkungan yang terdiri atas 40 ruas jalan di seluruh kecamatan di lingkup Kabupaten Malinau;

i) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan khusus yang terdiri atas dua ruas jalan (Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat dan Malinau Kota);

j) Pengembangan pelabuhan barang dan terminal (pelabuhan khusus) yakni Pelabuhan barang Kelapis, Terminal PLTU Kelapis, Terminal galian C Malinau Hilir (Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota);

k) Pengembangan pelabuhan penumpang Malinau Hilir (Kecamatan Malinau Kota);

l) Peningkatan dan pengembangan dermaga / tambatan perahu / speedboat / longboat / ketinting (Setiap ibukota kecamatan dan desa yang dilalui alur pelayaran sungai);

m) Pembangunan dan peningkatan kelas terminal menjadi Terminal Penumpang Tipe B (Sesua Kecamatan. Malinau Barat dan Long Nawang Kecamatan. Kayan Hulu);

n) Pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C di sepuluh lokasi lingkup Kabupaten Malinau.

2) Sistem jaringan perkeretaapian :

a) Pembangunan jaringan jalur kereta api nasional, meliputi : Tidung Pala – Malinau Kota – Mensalong (Kecamatan Malinau Barat, Malinau Kota dan Malinau Utara);

b) Pembangunan jalur kereta api provinsi, meliputi : Malinau Kota – Sesayap dan Malinau Kota - Tawau (Kecamatan : Malinau Barat, Malinau Kota dan Malinau Utara);

c) Pembangunan stasiun kereta api kelas besar (Malinau Kota).

3) **Sistem transportasi udara :**

a) Peningkatan kapasitas bandar udara RA Bessing dan bandar udara Long Ampung sebagai bandar udara pengumpul skala tersier (Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Kayan Selatan);

b) Pengembangan bandar udara khusus perbatasan darat RI, di Apau Ping Mading Kecamatan Bahau Hulu (Kecamatan Bahau Hulu);
c) Pengembangan/optimalisasi bandar udara lainnya untuk pembuka isolasi daerah, meliputi: Data Dian, Long Metun, Long Sule, Sungai Barang, Mahak Baru, Long Lebusan, Long Pujungan, Long Alango, Long Pala (Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, dan Kecamatan Mentarang Hulu); serta
d) Perencanaan bandar udara baru (relokasi bandara RA Bessing) yang berlokasi di Sesua Kecamatan Malinau Barat.

c. Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:

1) Sistem Jaringan Energi:
a) Pemeliharaan dan optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat dan di Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan (Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan);
b) Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Mentarang Hulu, dan Kecamatan Malinau Selatan;
c) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang berlokasi di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, dan Kecamatan Mentarang Hulu;
d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Malinau 2 x 3 MW, di Kelapis (Kecamatan Malinau Utara); Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malinau 15 MW (Kecamatan Mentarang dan Kecamatan Malinau Selatan);
e) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan SUTR & SUTM, meliputi: Malinau Barat – Malinau Kota – Malinau Utara – Mansalong dan Malinau Barat – Mentarang – Malinau Selatan (Kecamatan. Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Malinau Selatan);
f) Pembangunan jaringan SUTT 150 KV, meliputi: Tanjung Redeb – Kelay – Kayan – Boh I – Boh II, dan Kayan – Sesayap (Kecamatan. Kayan Hulu dan Sungai Boh);
g) Pengembangan depo BBM Malinau (Kecamatan. Malinau Kota); dan
h) Pengembangan sistem penyaluran BBM dan pembangunan SPBU (Kecamatan. Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan dan Mentarang).

2) Sistem Jaringan Telekomunikasi :
a) Pengembangan stasiun telepon otomat (STO) yang berlokasi di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;
b) Pengembangan menara bersama telekomunikasi seluler (*Base Transceiver Station* / BTS), Pengembangan jaringan telematika di daerah terpencil, dan Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi berupa *microdigital* dan serat optik yang tersebar di seluruh ibukota kecamatan, Wilayah Apau Kayan dan Mentarang, dan seluruh wilayah kabupaten; serta
c) Pengembangan sistem jaringan satelit berupa Pusat Pelayanan Telekomunikasi dan Informasi (Pusyantip) yang berlokasi di seluruh wilayah kabupaten.

3) Jaringan Sumber Daya Air:
a) Jaringan sumber daya air lintas negara (Sungai Sesayap) yang meliputi DAS Sesayap, DAS Sembakung, DAS Sebakis, DAS Sebuku, DAS Simanggaris, DAS Malinau yang berlokasi di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;

b) Jaringan sumber daya air lintas kabupeten (Sungai Kayan) yang meliputi DAS Bahau, DAS Kayan Hulu, DAS Kayan Tengah, DAS Kayanak yang berlokasi di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu;
c) Pengembangan wilayah sungai (WS), meliputi WS Sesayap, WS Kayan, WS Mahakam yang berlokasi di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan;
d) Pengembangan jaringan irigasi, meliputi: Jaringan irigasi Kaliamok, Kelapis, Lubak Manis, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Mentarang Baru, Lidung Kemenci, Pulau Sapi, Malinau Hilir dan Kabiran (Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Malinau Kota);
e) Pengembangan jaringan air baku, meliputi: jaringan air baku Sungai Sesayap, jaringan air baku Sungai Mentarang dan jaringan air baku Sungai Malinau (Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Malinau Kota);
f) Pengembangan jaringan air bersih berupa jaringan perpipaan kabupaten (Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, Mentarang, Pujungan).
g) Pengembangan sistem pengendalian banjir meliputi pembangunan kanal di kawasan perkotaan dan pembangunan siring sungai (Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Pujungan)

4) Sistem Pengelolaan Lingkungan

a) Pengembangan jaringan drainase (Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang; Kecamatan Malinau Kota; Desa Malinau Kota, Malinau Hulu, Respen Tubu, Malinau Seberang, Kaliamok, Tanjung Lapang, Kuala Lapang dan Pulau Sapi; dan seluruh kecamatan);
b) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL): Kawasan bandara RA. Bessing, pelabuhan sungai, kawasan industri, kawasan perumahan padat, pasar induk Malinau dan pusat pemerintahan kabupaten (Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat);
c) Pengelolaan persampahan (Kawasan perkotaan Malinau, tersebar di seluruh kecamatan kawasan perkotaan);
d) Pembangunan sarana umum dan sosial yang terdiri dari pembangunan sarana pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan, pembangunan sarana kesehatan, sarana perekonomian, dan pemakaman umum; serta
e) Pembangunan jaringan prasarana air minum yang terbagi atas Jaringan perpipaan air minum (Kecamatan Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Selatan dan Kecamatan Mentarang), Instalasi pengolahan air minum (Kecamatan. Malinau Barat, Malinau Selatan, Mentarang), Pengembangan jaringan air minum IKK (Ibukota Kecamatan) yang berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh.

B. Pola Ruang

1. **Kawasan Lindung** terdiri atas kawasan lindung nasional, kawasan lindung provinsi, dan kawasan lindung kabupaten.
   a. Kawasan lindung nasional di Kabupaten Malinau terdiri atas:
      1) Kawasan hutan lindung yang berlokasi di *Heart of Borneo* perbatasan Malaysia, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Malinau; dan
      2) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa Taman Nasional Kayan Mentarang yang berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Pujungan, dan Kayan Hilir.
   b. Kawasan lindung provinsi di Kabupaten Malinau terdiri atas :
      1) Kawasan hutan lindung yang berlokasi di Kecamatan Mentarang, Pujungan, Kayan Hulu, dan Kayan Hilir; serta

2) Cagar alam yang terdapat di Kecamatan Pujungan.

c. Kawasan lindung kabupaten terdiri dari :

1) Kawasan hutan lindung yang meliputi HL Pasilan Tabah - Hulu S. Sembakung di Kecamatan. Malinau Utara, Mentarang Hulu dan Mentarang; HL Long Ketrok terletak di Kecamatan. Malinau Selatan dan Mentarang; HL G. Laung – G. Belayan di Kecamatan. Mentarang, Bahau Hulu dan Pujungan; HL Hulu S. Kayan - Hilir S. Bahau di Kecamatan. Pujungan dan Kayan Hilir; HL G. Kopol – G. Jamik terletak di Kecamatan. Kayan Hilir; HL Kayaniot di Kecamatan. Kayan Hilir; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Laham di Kecamatan. Kayan Hilir dan Sungai Boh; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Langan di Kecamatan. Kayan Hilir, Kayan Selatan dan Sungai Boh; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Pangean di Kecamatan. Kayan Hulu dan Selatan; serta HL Hulu S. Tekwai di Kecamatan. Kayan Selatan.

2) Kawasan resapan air yang berlokasi di HL Pasilan Tabah - Hulu S. Sembakung di Kecamatan. Malinau Utara, Mentarang Hulu dan Mentarang; HL Long Ketrok terletak di Kecamatan. Malinau Selatan dan Mentarang; HL G. Laung – G. Belayan di Kecamatan. Mentarang, Bahau Hulu dan Pujungan; HL Kayaniot di Kecamatan Kayan Hilir; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Laham di Kecamatan. Kayan Hilir dan Sungai Boh; HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Langan di Kecamatan. Kayan Hilir, Kayan Selatan dan Sungai Boh; serta HL Hulu S. Kayan - Hulu S. Pangean di Kecamatan. Kayan Hulu dan Kayan Selatan.

3) Kawasan perlindungan setempat berlokasi di Kawasan sempadan sungai, yang terdapat pada setiap permukiman yang terletak di sepanjang aliran sungai besar maupun sungai kecil di seluruh kecamatan; serta kawasan mata air yang terdapat di Long Alango, Long Pujungan, Data Dian, Long Ampung, Long Berang, Sempayang, Taras, dan Setulang.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang terdapat di Taman Nasional Kayan Mentarang yang meliputi Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Pujungan, dan Kayan Hilir; sedangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Makam tua/leluhur di Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu; Kuburan batu tua di Long Alango Kecamatan Bahau Hulu dan Data Dian Kecamatan Kayan Hilir; Bangunan rumah adat "Lamin Panjang" di Dumu Mahak Kecamatan Sungai Boh, dan di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu; Kawasan hutan penelitian Lalut Birai di Long Alango Kecamatan Bahau Hulu, Tana Ulen di Setulang Kecamatan Malinau Selatan, dan hutan penelitian KM. 8 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat.

5) Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Malinau terbagi atas rawan bencana tanah longsor (Data Dian Kecamatan Kayan Hilir, Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, Long Berang Kecamatan Mentarang Hulu; Sempayang Kecamatan Malinau Barat); kawasan rawan bencana banjir (sepanjang aliran: S.Sesayap, S.Mentarang, S.Malinau, S.Kayan, S.Bahau dan S.Pujungan dan daerah sekitar aliran sungai lainnya yang potensial terjadi banjir); kawasan rawan bencana kebakaran hutan (Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, dan Kecamatan Sungai Boh).

2. **Kawasan Budidaya** di Kabupaten Malinau terdiri atas delapan kawasan, yakni:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :

1) Hutan produksi tetap (HP) yang berlokasi di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Selatan, Kayan Hilir;

2) Hutan produksi terbatas (HPT) yang berlokasi di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Sungai Boh;

3) Hutan produksi dapat dikonversi (HPK) yang berlokasi di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan Kecamatan Mentarang.

b. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
   1) Kawasan pertanian tanaman pangan (Kaliamok, Kelapis, Lubak Manis, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Mentarang Baru, Lidung Kemenci, Pulau Sapi, Malinau Hilir, dan Kabiran);
   2) Pengembangan kawasan agropolitan (Kecamatan Malinau Utara dan Mentarang);
   3) Kawasan pertanian hortikultura (seluruh wilayah kecamatan);
   4) Kawasan perkebunan (Kecamatan Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Kecamatan Kayan Selatan);
   5) Kawasan peternakan (Ternak sapi di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, dan Kecamatan Mentarang);
   6) Ternak kerbau di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang dan Kecamatan Mentarang Hulu;
   7) Ternak unggas yang meliputi ayam kampung, ayam ras, dan bebek tersebar di semua kecamatan; Ternak babi di semua kecamatan kecuali Kecamatan Malinau Kota).
c. Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari :
   1) Budidaya perikanan (Kaliamok Kecamatan. Malinau Utara; Kecamatan Malinau Utara; Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Selatan, dan Kecamatan Mentarang; Batu Lidung Kecamatan. Malinau Kota); dan
   2) Pengolahan ikan yang tersebar di seluruh kecamatan.
d. Kawasan peruntukan pertambangan yang terbagi atas :
   1) Pertambangan mineral (emas) yang berlokasi di Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir; dan
   2) Pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan.
e. Kawasan peruntukan permukiman yang terbagi atas :
   1) Kawasan permukiman perkotaan (Seluruh Desa di Kecamatan Malinau Kota, Desa Tanjung Lapang dan Desa Kuala Lapang di Kecamatan Malinau Barat; Desa Malinau Seberang dan Desa Respen Tubu di Kecamatan Malinau Utara; Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang);
   2) Kawasan permukiman perdesaan (Seluruh wilayah perdesaan di Kabuaten Malinau);
   3) Kawasan permukiman kawasan khusus (Seluruh kawasan perbatasan dan pedalaman).
f. Kawasan peruntukan industri terbagi atas :
   1) Pengembangan sentra industri sedang (Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Selatan, Kecamatan Sungai Boh); serta
   2) Pengembangan sentra industri rumah tangga (Setiap ibukota kecamatan).
g. Kawasan peruntukan pariwisata dikembangkan menjadi :
   1) Pengembangan pariwisata budaya (Rumah Lamin di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan; Tari-tarian tradisional, ukiran dan anyaman tradisional yang terdapat di Kabupaten Malinau); dan
   2) Pengembangan pariwisata alam (Air terjun Sungai Jempolon, air panas Semolon, air panas Sekelibon, dan arung jeram Giram Kayan di Kecamatan. Mentarang; Padang rumput Long Tua di Apau Ping Mading di Kecamatan. Bahau Hulu; Air terjun Marthin Billa, air terjun Sungai Udang, arung jeram Sungai Semuda dan hutan lindung Tana Ulen Setulang di Kecamatan. Malinau Selatan; Arung jeram Sungai Bahau dan Sungai Pujungan di Kecamatan. Bahau Hulu dan Kecamatan. Pujungan).
h. Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas :
   1) Kawasan perdagangan dan jasa (Kawasan perkotaan Malinau meliputi: Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Kota);
   2) Kawasan pusat pemerintahan (Kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Malinau Kota);
   3) Kawasan pertahanan dan keamanan (Kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km; Markas komando brimob di Kecamatan Malinau Utara; dan Komplek militer yang ada di kawasan

perbatasan meliputi: Data Dian, Long Pujungan, Long Ampung, Long Nawang, dan Apau Ping Mading).

C. **Kawasan Strategis**

1. Kawasan strategis nasional di Kabupaten Malinau meliputi :
   a. Kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km (Kecamatan Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan);
   b. Kawasan Jantung Kalimantan *Heart of Borneo* (Seluruh kecamatan kecuali kecamatan Malinau Kota).
2. Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Malinau meliputi kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal (Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan).
3. Kawasan strategis kabupaten meliputi :
   a. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi, yang terdiri atas :
      1) Kawasan perkotaan Malinau sebagai ibukota Kabupaten Malinau dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa (Kecamatan Malinau Kota);
      2) Kawasan pengembangan ekonomi dan perdagangan lintas batas negara Long Nawang (Kecamatan Kayan Hulu);
      3) Kawasan minapolitan (Kecamatan Malinau Utara);
      4) Kawasan agropolitan (Kecamatan Malinau Utara dan Mentarang).
   b. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya, yang terdiri atas :
      1) Kawasan pusat pemerintahan kabupaten (Kecamatan Malinau Kota);
      2) Kawasan pengembangan warisan budaya (Kecamatan Bahau Hulu dan Kayan Hilir).
   c. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, yang terdiri atas:
      1) Kawasan pertambangan batubara (Kecamatan Malinau Selatan);
      2) Kawasan potensial pertambangan emas (Kecamatan Sungai Boh, Kayan Hilir).
   d. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yakni Taman Nasional Kayan Mentarang (Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Bahau Hulu, Pujungan, dan Kecamatan Kayan Hilir).

2.5.9.3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NUNUKAN

A. **Struktur Ruang**

1. **Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan**
   a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sistem Provinsi (PKSN)
      1) Pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh di PKSN Nunukan dan PKSN Simanggaris
      2) Pengembangan wilayah perbatasan di PKSN Long Midang
   b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
      1) Pembangunan dan peningkatan sarana perkantoran pemerintahan skala kabupaten di Perkotaan Nunukan.
      2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, kesehatan di Perkotaan Nunukan.
   c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
      1) Peningkatan prasarana kesehatan, infrastruktur dasar, pengembangan *agro cluster industry,* pembangunan fasilitas perdagangan, jasa keuangan, dan perkantoran di PKL Binalawan.
      2) Pembangunan puskesmas, sarana pendidikan, dan fasilitas keuangan, perdagangan, perbankan di PKL Long Bawan, PKL Pembeliangan.

3) Pembangunan puskesmas, sarana pendidikan, dan fasilitas keuangan, perdagangan, perbankan, pembangunan, pemecah gelombang dan reklamasi Pantai Tanjung di PKLp Sei Nyamuk.

2. Pengembangan Prasarana Wilayah

a. Pengembangan Jaringan Transportasi (Darat, Laut, Udara)
   1) Transportasi Darat dicapai melalui pembebasan lahan and pembangunan terminal di Kecamatan Sebatik dan Lumbis, subsidi angkutan perintis di wilayah perbasan, pedalaman, dan daerah tertinggal, serta pengadaan dan operasional bus air angkutan perairan pedalaman
   2) Transportasi Laut dicapai melalui pembangunan dolphin dermaga di PLBL Liem Hie Djung, penyusunan raperda kepelabuhan, pembangunan dermaga permanen di Desa Tabur Lestari dan Desa Sinanti serta pembangunan dermaga speed pangkalan II di Desa Tabur Lestari
   3) Transportasi Udara dicapai melalui studi kelayakan (FS), DED, dan AMDAL. Bandara perintis di lapangan terbang Longbawan dan Sebuku.

b. Telekomunikasi
   1) Perencanaan menara bersama di perbatasan (Krayan dan Krayan Selatan)
   2) Pembangunan kantor radio komunitas di Nunukan

c. Sumberdaya Air
   1) Pengeloaan waduk, embung dan situ: pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air; perencanaan dan pemeliharaan embung air baku; pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
   2) Pengembangan sistem jaringan air baku untuk minum air, pertanian dan industri : perencanaan dan pengawasan SPAM.
   3) Sistem pengendalian banjir: pembangunan reklamasi pantai dan penahan gelombang di Tanjung Aru Sebatik, Kabupaten Nunukan.
   4) Sistem drainase: pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan drainase.

d. Persampahan
   1) Perencanaan dan pembangunan transfer Depo di Kabupaten Nunukan
   2) Pembangunan TPA di Tanjung Harapan.

B. Pola Ruang

1. Kawasan Lindung

a. Pengembangan Kawasan Hutan Lindung
   1) Penetapan batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan
   2) Perlindungan kawasan dan peningkatan kualitasnya melalui rehabilitasi, reboisasi, pengembangan hutan dan tanaman tahunan

b. Pengembangan Kawasan yang memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya
   1) Penetapan kawasan resapan air
   2) Perlindungan, pemeliharaan dan penetapan kawasan resapan air
   3) Penetapan kawasan perlindungan setempat
   4) Penataan ruang kawasan sempadan pantai
   5) Penataan ruang kawasan sekitar waduk atau danau
   6) Penataaan ruang kawasan sekitar situ
   7) Pengembangan RTH perkotaan serta penetapn batas wilayah

c. Pengembangan kawasan suaka alam
   1) Penetapan kawasan
   2) Mempertahankan flora dan fauna
   3) Reboisasi kawasan
   4) Pelestarian kawasan pantai berhutan bakau
   5) Pelestarian wisata alam dan wisata alam laut

6) Pelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan

d. Pengembangan kawasan rawan bencana alam
   1) Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana
   2) Penetapan zona evakuasi bencana alam
   3) Pemasangan tanda atau peringatan dini terhadap daerah rawan bencana
   4) Program reboisasi dan menghutankan kawasan rawan bencana alam
   5) Normalisasi sungai di kawasan rawan banjir
   6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan peruntukan hutan produksi
   1) Penetapan tata batas kawasan hutan produksi
   2) Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestasi
   3) Pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat serta peningkatan pemasaran hasil produksi

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat
   1) Identifikasi dan penetapan sebaran kawasan hutan rakyat
   2) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
   3) Pengembangan manajemen pengelolaan

c. Kawasan peruntukan pertanian
   1) Kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, hortikultura, perkebunan
   2) Kawasan peruntukan peternakan

d. Kawasan peruntukan perikanan
   1) Penetapan kawasan pengembangan perikanan
   2) Insentifikasi dan kemitraan dalam kegiatan perikanan
   3) Pengembangan perikanan unggulan
   4) Pengembangan tempat pembenihan ikan
   5) Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan

e. Kawasan peruntukan pertambangan
   1) Penataan dan penelitian potensi zona pertambangan
   2) Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan
   3) Penetapan kawasan pertuntukan pertambangan
   4) Penyusunan peraturan, perizinan, kegiatan pertambangan
   5) Pendataan ulang izin pertambangan; reklamasi kawasan pasca tambang
   6) Reboisasi tanaman di sekitar kawasan pertambangan

f. Kawasan peruntukan industri
   1) Pembangunan kawasan industri Ciambar
   2) Penataan dan pengembangan kawasan industri
   3) Pengembangan kegiatan industri menengah
   4) Penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi wilayah
   5) Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri
   6) Pengembangan aneka produk olahan
   7) Promosi kepada calon investor

g. Kawasan peruntukan pariwisata
   1) Penataan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata
   2) Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata
   3) Promosi ke daerah-daerah potensial wisata
   4) Pengembangan manajemen pengelolaan
   5) Optimalisasi pengelolaan wilayah pengembangan pariwisata

h. Kawasan peruntukan permukiman

1) Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan
2) Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan; pengendalian pertumbuhan pembangunan permukiman
3) Penataan dan rehabilitas kawasan permukiman
4) Peningkatan sanitasi lingkungan
5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman

i. Kawasan peruntukan lainnya
1) Kawasan perdagangan dan jasa,
2) Kawasan pesisir dan laut
3) Kawasan pertahanan dan keamanan
4) Kawasan pemerintahan
5) Pengembangan sosial dan fasilitas umum.

C. Penanganan Kawasan Strategis

1. KSK Coastal Road Nunukan
2. KSP PPN Mansapa
3. KSK KTM Bahari Sebatik
4. KSK KTM Simanggaris

2.5.9.4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA TARAKAN

A. Struktur Ruang

1. Pengembangan Struktur Pelayanan

a. Program pengembangan fasilitas pelayanan regional, terdiri atas :
1) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, serta peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Utara, Tarakan Tengah, Tarakan Timur).
2) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, serta peraturan zonasi kawasan pendidikan (Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan Timur).
3) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, serta peraturan zonasi kawasan industri (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
4) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, serta peraturan zonasi kawasan perkantoran (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

b. Program pengembangan pusat pelayanan kota, terdiri atas :
1) Program pengembangan pusat pelayanan kota (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
2) Penyusunan peraturan zonasi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
3) Penyunan rencana tata bangunan dan lingkungan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
4) Penyusunan panduan rancang kawasan perkotaan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

c. Program pengembangan sub pelayanan kota, terdiri atas :
1) Penyusunan rencana detail tata ruang (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
2) Penyusunan peraturan zonasi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
3) Penyunan rencana tata bangunan dan lingkungan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

4) Penyusunan panduan rancang kawasan perkotaan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

2. Sistem Jaringan Prasarana Kota

a. Sistem jaringan transportasi

1) Program peningkatan dan pengembangan prasarana transportasi darat, terdiri atas :
   a) Rencana peningkatan jalan kolektor sekunder (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
   b) Rencana pembangunan jalan kolektor sekunder (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
   c) Rencana pemeliharaan jalan kolektor sekunder (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
   d) Pembangunan jembatan penyeberangan (Kecamatan Tarakan Utara).
   e) Pembangunan jembatan Pulau Tarakan-Pulau Sadau-Kabupaten Bulungan (Kecamatan Tarakan Utara).
2) Program pembangunan jaringan jalan pejalan kaki, yakni pembuatan jaringan jalan pejalan kaki (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
3) Program pembangunan jalur dan ruang evakuasi bencana, terdiri dari :
   a) Penetapan jalur evakuasi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
   b) Pengembangan ruang evakuasi.
4) Program peningkatan dan pengembangan prasarana sarana transportasi udara, yakni peningkatan Bandara Juwata (Kecamatan Tarakan Barat).
5) Program peningkatan dan pengembangan prasarana transportasi laut, terdiri atas :
   a) Pembangunan Pelabuhan Tanjung Simaya; pembangunan Pelabuhan Tanjung Selayung (Kecamatan Tarakan Utara).
   b) Pembangunan Pelabuhan Pantai Amal; Pembangunan Pelabuhan Tanjung Binalatung; pembangunan Pelabuhan Tanjung Batu; pembangunan Pelabuhan Tanjung Pasir (Kecamatan Tarakan Timur).
   c) Pembangunan Pelabuhan Rakyat Juata Laut (Kecamatan Tarakan Utara).
   d) Pembangunan Dermaga Rakyat Pantai Amal; pembangunan Dermaga Rakyat Mamburungan; pembangunan Dermaga Rakyat Tanjung Pasir; pembangunan Dermaga Rakyat Tanjung Binalatung (Kecamatan Tarakan Timur).
   e) Pengembangan Pelabuhan Malundung dan Tengkayu (Kecamatan Tarakan Barat).
6) Program pembinaan teknis kegiatan penataan bangunan dan lingkungan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
7) Program penataan lahan parkir di koridor jalan se Kota Tarakan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

b. Sistem jaringan sumberdaya air

1) Program pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, terdiri atas :
   a) Pembangunan jaringan air bersih/air minum (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
   b) Pembangunan instalasi pengolahan air.
2) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, yakni pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya (Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan Barat, Tarakan Timur dan Tarakan Utara).
3) Program pembuatan sumur umum dan sumur bor (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

c. Sistem jaringan energi dan listrik

1) Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan listrik, terdiri atas :

a) Pembinaan dan pengawasan perijinan kelistrikan dan SPBU (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
b) Pemantauan dan inventarisasi penyediaan penyaluran BBM (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
c) Sosialisasi kelistrikan dan penyaluran gas kota (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
d) Kajian pembangunan SPBG (Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan Utara).
e) Instalasi Penyaluran Gas Rumah Tangga (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
f) PLTU (Kecamatan Tarakan Utara).

2) Program pembinaan dan pengembangan bidang migas, yakni studi kelayakan pembangunan kilang BBG (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Timur, Tarakan Utara).

d. Sistem jaringan telekomunikasi

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, terdiri atas:

a) Jaringan kabel primer (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
b) Jaringan kabel sekunder.
c) Bangunan pengelolaan jaringan telpon.
d) Jaringan nirkabel.
e) Penataan menara telekomunikasi bersama (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

e. Sistem jaringan sampah, air limbah, drainase

1) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, terdiri atas :
a) Penyusunan program pengelolaan drainase dan sumber daya air (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
b) Perencanaan dan pengawasan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
c) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
d) Perencanaan pembangunan perkuatan tebing sungai dan saluran drainase/gorong-gorong.
e) Pembangunan perkuatan tebing sungai.

2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan drainase, yakni rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase/gorong-gorong (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

3) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, terdiri atas :
a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
b) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.
c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
d) Peningkatan/pemeliharaan Kebersihan kota.
e) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.

4) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, yakni operasional prasarana dan sarana air limbah (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

5) Program pengelolaan data dan informasi geologi sumber daya, yakni studi kelayakan geologi teknik dalam menunjang tempat pembuangan sampah (Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Utara).

3. Sarana Kota

a. Sarana pendidikan: program pembangunan dan penyediaan fasilitas umum dan sosial, yakni pembangunan sarana lingkungan kampus Universitas Borneo (Kecamatan Tarakan Timur).

b. Sarana kesehatan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
c. Sarana peribadatan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
d. Sarana bina sosial
   1) Program pengembangan kapasitas pengelolaan SDA, terdiri atas :
      a) Pelatihan bagi penyuluh kehutanan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      b) Pelatihan kader konservasi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      c) Pelatihan, pendidikan lingkungan ke sekolah (TK,SD,SMP,SMU/SMK).
   2) Program pengendalian pemanfaatan ruang, yakni pembinaan usaha jasa konstruksi (Kota Tarakan).
   3) Program pembinaan dan pengawasan ijin usaha pemanfaatan SDA, terdiri atas:
      a) Pembinaan dan dan pengawasan ijin usaha pertambangan gol C, air bawah tanah dan permukaan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      b) Pembinaan industri dan pedagang kayu.
e. Sarana pelayanan masyarakat (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
f. Sarana perdagangan: program pengendalian pemanfaatan ruang, yakni penertiban dan pengawasan izin mendirikan bangunan, tempat usaha dan reklame (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
g. Sarana rekreasi dan olah raga: program pengembangan destinasi pariwisata, terdiri atas :
   a) Pengembangan daerah tujuan wisata (Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Barat dan Tarakan Tengah).
   b) Pengembangan objek pariwisata unggulan (Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Barat dan Tarakan Tengah).

B. Pola Ruang

1. Kawasan Lindung

a. Ruang Terbuka Hijau
   1) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), terdiri atas :
      a) Pengembangan taman rekreasi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      b) Pengawasan dan pengendalian RTH (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      c) Penataan Persemaian (Kecamatan Tarakan Barat).
   2) Program pengelolaan areal pemakaman, terdiri atas :
      a) Pembuatan tata batas dan pemetaan pemakaman se Kota Tarakan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      b) Pembuatan data base pemakaman se Kota Tarakan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      c) Penataan dan pengelolaan areal pemakaman (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      d) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
      e) Pembangunan tempat pemakaman umum (TPU) 4 (empat) kecamatan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

f) Pembebasan lahan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
g) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
h) Penghijauan pemakaman (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Permukiman
1) Program pengembangan permukiman, terdiri atas :
a) Permukiman kepadatan tinggi (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
b) Permukiman kepadatan sedang.
c) Permukiman kepadatan rendah (Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan Timur).
d) Permukiman yang diatur dan dibatasi pertumbuhannya (Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Tengah).
e) Permukiman yang didukung pertumbuhannya (Kecamatan Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
2) Program pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas :
a) Pemeliharaan dan pemasangan patok garis sempadan bangunan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
b) Pemeliharaan dan pemasangan patok garis sempadan sungai.
c) Pemasangan patok batas mendirikan bangunan di kawasan pantai barat (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah dan Tarakan Utara).

b. Kawasan perdagangan dan jasa
a) Pasar : skala pelayanan, yakni skala lokal dan kota (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
b) Gudang (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

c. Kawasan industri
Program pengembangan industri kecil dan menengah.
Industri menengah, diantaranya pengolahan kayu (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur); industi pengembangan udang (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Utara dan Tarakan Timur); industri kerajinan kayu (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

d. Kawasan peternakan
Program peningkatan hasil produksi peternakan, yakni pengembangan kawasan peternakan (Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Utara).

e. Kawasan perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan, terdiri atas :
a) Kawasan minapolitan Pelabuhan Tengkayu II dan Karang Harapan (Kecamatan Tarakan Barat).
b) Pembibitan udang (Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan Barat dan Tarakan Utara).
c) Pengolahan hasil perikanan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

f. Kawasan pertambangan
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, yakni wilayah kerja pertambangan 1 (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

g. Kawasan perkantoran (Pusat pemerintahan)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yakni pembangunan gedung kantor (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

h. Kawasan pendidikan

1) Program pendidikan usia dini, yakni pengembangan pendidikan usia dini (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
2) Program pendidikan dasar, yakni pengembangan pendidikan sekolah dasar (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
3) Program pendidikan menengah, yakni pengembangan pendidikan menengah atas (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
4) Program pendidikan tinggi, yakni pengembangan pendidikan tinggi (Kecamatan Tarakan Timur).

i. Kawasan olah raga dan kegiatan komersial lainnya
Program pembangunan dan penyediaan fasilitas umum dan sosial, terdiri atas :
a) Pembangunan fasilitas umum dan sosial (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
b) Pembangunan kawasan *sport center* (Kecamatan Tarakan Timur).

j. Kawasan pertahanan keamanan
Program pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas :
a) Pembangunan pangakalan TNI AU (Kecamatan Tarakan Barat).
b) Pembangunan pangkalan TNI AL (Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan Timur).

k. Pembangunan TPA
1) Program pembangunan TPA Juata Kerikil (Kecamatan Tarakan Utara).
2) Program pembangunan TPA Mamburungan (Kecamatan Tarakan Timur).

C. Kawasan Strategis

1. Kawasan strategis *high control*, yakni program perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah dan Tarakan Timur).
2. Kawasan strategis Pantai Amal
Program pembangunan sarana pengaman pantai, terdiri atas :
1) Pembangunan *revetment* Pantai Amal (Kecamatan Tarakan Timur).
2) Pembangunan pencegah abrasi pantai kritis Tarakan Timur (Kecamatan Tarakan Timur).
3) Pendelinesian dan penetapan kawasan berisiko tinggi dampak perubahan iklim (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
4) Pembangunan *seawall* dan *green belt* di seluruh Pantai Tarakan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
3. Kawasan strategis Lantamal (Kecamatan Tarakan Timur).
4. Kawasan strategis hutan lindung
a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, terdiri atas :
1) Manajemen hutan lindung (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
2) Pengembangan hutan tanaman (Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Tengah dan Tarakan Timur).
b. Program rehabilitasi hutan dan lahan, terdiri atas :
1) Operasional pengelolaan persemaian (Kecamatan Tarakan Barat).
2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerhan/GNRHL (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
3) Pemeliharaan kawasan hutan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
4) Penghijauan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
5) Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, terdiri atas :

1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).
2) Pemeliharaan dan pemagaran hutan (Hutan lindung, Hutan Kota, Hutan Mangrove) berlokasi di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur.

d. Program perencanaan dan pengembangan hutan, yakni pengembangan hutan masyarakat (Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Tengah dan Tarakan Timur).
e. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), yakni pengembangan tanaman perkebunan masyarakat (Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Utara dan Tarakan Timur).

2.5.9.5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TANA TIDUNG

A. Struktur Ruang

1. Sistem Pusat Layanan
   a. Perwujudan PKWp di Perkotaan Tideng Pale
      1) Penyusunan rencana rinci tata ruang
      2) Penyusunan peraturan zonasi
      3) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang fungsi PKW
   b. Perwujudan PKL di Perkotaan Sesayap
      1) Penyusunan rencana rinci tata ruang
      2) Penyusunan peraturan zonasi
      3) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang fungsi PKL
   c. Perwujudan PKL di Perkotaan Tana Lia
      1) Penyusunan rencana rinci tata ruang
      2) Penyusunan peraturan zonasi
      3) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang fungsi PKL
2. Sistem Prasarana Utama
   a. Perwujudan sistem jaringan transportasi darat
      1) Pemeliharaan dan pengembangan jalan kolektor primer-1 sebagai bagian jalan nasional di kabupaten (AP-1) di ruas jalan Sekatak Buji-Malinau
      2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kolektor Primer
      3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder
         a) Ruas jalan poros utara kabupaten; ruas jalan Tana Merah – Tanjung Keramat (Sambungan) – Tengku Dacing.
         b) Ruas jalan Tideng Pale Sebawang-Seludau-Dermaga Sesayap
      4) Terminal penumpang Tipe B di Tideng Pale Kecamatan Sesayap
      5) Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
      6) Pengembangan pelabuhan sungai dan danau dan penyeberangan
   b. Perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian
      1) Pengembangan jalur rel kereta api nasional
      2) Pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sesayap
   c. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut
      Tatanan Kepelabuhanan: pengembangan pelabuhan kapal cepat (*speedboat*) di Kecamatan Tana Lia, pembangunan pelabuhan di Kecamatan Tana Lia, dan pembangunan pelabuhan khusus di Kecamatan Tana Lia.
   d. Perwujudan sistem jaringan transportasi udara
      Pengembangan Bandar udara pengumpan di Kecamatan Sesayap Hilir
   e. Perwujudan sistem jaringan prasarana energi
      1) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan pembangunan gardu induk (GI) Sesayap, GI Sesayap Hilit dan GI Tana Lia.

2) Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan GI Tanjung Selor-PLTA Kayan-PLTA Sesayap-PLTA Sebakung, GI Tanjung Selor PLTA Sesayap.

f. Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi
Peningkatan kualitas pelayanan telepon di Kabupaten Tana Tidung

g. Perwujudan sistem jaringan prasarana sumberdaya
   1) Penyediaan sistem air bersih perpipaan di Kawasan perkotaan di Kabupaten Tana Tidung
   2) Pemanfaatan air permukaan *intake* di sungai/mata air yang terdekat; di Kawasan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tana Tidung

h. Perwujudan sistem jaringan drainase
   1) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Kawasan perkotaan di Kabupaten Tana Tidung
   2) Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
   3) Normalisasi saluran sungai;

i. Perwujudan sistem jaringan persampahan
   1) Peningkatan dan pengembangan TPA dengan sistem *sanitary landfill* (TPA di Desa Gunawan Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Tana Lia)
   2) Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST
   3) Program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat;

j. Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana
   1) Identifikasi potensi alur kejadian bencana
   2) Penyusunan jalur evaluasi bencana
   3) Sosialisasi jalur dan ruang evakuasi bencana

B. Pola Ruang

1. Perwujudan **Kawasan Lindung**
   a. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kawasan resapan air, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir.
   b. Perwujudan kawasan perlindungan setempat
      1) Sempadan pantai dengan indikasi program penempatan sempadan pantai, pemanfaatan ruang sempadan pantai, penempatan batas kawasan pasang surut, penghijauan dan sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan sempadan pantai di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Tana Tidung.
      2) Sempadan sungai dengan indikasi program penetapan sempadan sungai dan irigasi, pemanfaatan ruang sempadan sungai & irigasi, penertiban bangunan di atas saluran irigasi, penghijauan, dan program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan.
      3) Kawasn sekitar mata air dengan indikasi program penetapan batas sempadan mata air di Gunung Rian Desa Rian Kecamatan Sesayap, penghijauan dan program pembinaan penyuluhan pelestarian kawasan di Kabupaten Tana Tidung.
      4) RTH kawasan perkotaan dengan indikasi program penetapan batas RTH kawasan, penghijauan, dan program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan.
   c. Perwujudan kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
      1) Penetapan batas kawasan, kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia dan Kecamatan Sesayap.
      2) Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan
      3) Program pembinaan, penyuluhan pelestarian kawasan.
   d. Perwujudan kawasan rawan bencana alam
      1) Penetapan batas kawasan rawan bencana
      2) Pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana
      3) Pengembangan jalur dan ruang evakuasi
      4) Program pembinaan, penyuluhan di kawasan rawan bencana

2. Perwujudan **Kawasan Budidaya**
   a. Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi
      1) Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi tetap (Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir) dan hutan produksi terbatas (Kecamatan Tana Lia)
      2) Sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi
   b. Perwujudan kawasan peruntuhan pertanian
      1) Pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
      2) Peningkatan produksi tanaman perkebunan;
      3) Penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
      4) Pengembangan dan peningkatan saprotan dan pemasaran hasil pertanian;
      5) Sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.
   c. Perwujudan kawasan peruntukan perikanan
      1) Pengembangan agribisnis perikanan
      2) Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia
      3) Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan
   d. Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan
      1) Identifikasi potensi tambang;
      2) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
      3) Rehabilitasi lahan pasca tambang
      4) Pengelolaan kawasan pertambangan secara berkelanjutan;
      5) Sosialisasi dan workshop pengelolaan tambang
   e. Perwujudan kawasan peruntukan industri
      1) Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang
      2) Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan
      3) Pemberian insentif industri non polutif
   f. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata
      1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
      2) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan
      3) Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata
   g. Perwujudan kawasan peruntukan permukiman
      1) Penyusunan masterplan di kawasan permukiman
      2) Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastuktur penunjang permukiman
   h. Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
      1) Penetapan batas kawasan
      2) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sekitar
      3) Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan
      4) Sosialisasi and workshop pengelolaan kawasan

C. **Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten**
   1. Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan di Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia, KSK Minapolitan di Kecamatan Sesayap Hilir dan KSK Pengambangan kawasan di sekitar Jalan Trans Kalimantan.
      a. Deliniasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis
      b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang
      c. Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor unggulan
      d. Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang
      e. Penyediaan fasilitas and prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis
   2. Perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya

a. Delineasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis di KSK Pengembangan Budaya Lokal di Tideng Pale
b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang

3. Perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di KSK Kawasan Lindung Gunung Rian Kecamatan Sesayap dan KSK Suaka Alam, Mangrove dan Sempadan Pantai berada di Kecamatan Sesayap Hilir.
   a. Delineasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis
   b. Pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis ramah lingkungan hidup
   c. Pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis
   d. Program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis.

SALINAN

BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pembahasan pada bab ini meliputi pembahasan permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan pembahasan isu-isu strategis.

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah sebagai "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai di masa datang, merupakan hal penting yang perlu diidentikasi dengan tepat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang dihadapkan pada peluang dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan tantangan di masa depan tersebut akan terkait dengan kekuatan dan kelemahan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Potensi permasalahan pembangunan daerah muncul sebagai akibat dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Pemetaan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui identifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Permasalahan berikut ini merupakan permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, maka permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut.

3.1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah

Sebagian besar wilayah yang didominasi kawasan lindung, yang ditandai dengan kemiringan lereng yang cukup tinggi (> 40%) dan berada di ketinggian 500-1.000 m dpal menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memiliki keterbatasan dalam pengembangan wilayah. Dalam mengembangkan wilayah harus dipilih kawasan non lindung sehingga peluang kejadian kebencanaan dapat diminimalisasi. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan mahalnya penyediaan infrastruktur fisik berupa jaringan jalan ataupun infrastruktur lainnya.

Terkait kependudukan, permasalahan yang muncul adalah persebaran penduduk, konsentrasi penduduk masih terpusat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kondisi ini berimplikasi pada tidak efisiennya pengembangan wilayah, terutama pengembangan simpul-simpul sosial ekonomi. Ketidakmerataan persebaran penduduk juga akan berimplikasi kepada penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik serta penyediaan fasilitas sosial ekonomi. Diharapkan dengan meratanya persebaran penduduk dapat mengurangi peluang ketimpangan wilayah dikarenakan perbedaan jumlah penduduk yang dilayani dalam rangka penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung bagi penduduk untuk melakukan aktivitas.

3.1.2. Ekonomi

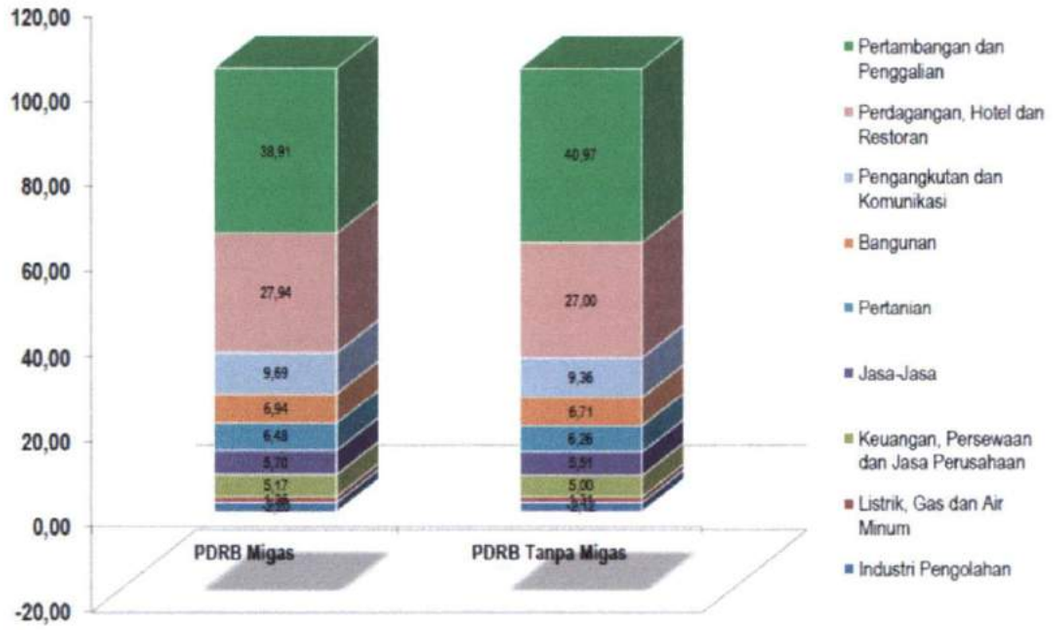
A. Pertumbuhan Ekonomi Bersumber pada Kegiatan Ekonomi yang Rentan terhadap Keberlanjutan Ekonomi dan Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Selama tahun 2007-2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara relatif tinggi yaitu mencapai 6,83% per tahun (dengan migas) dan 7,60% per tahun (tanpa migas). Laju pertumbuhan ekonomi tersebut telah meningkatkan PDRB Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 1,8 trilyun (dengan migas) atau Rp 2,05 trilyun (tanpa Migas). Besarnya peningkatan skala ekonomi daerah (besaran PDRB) tersebut disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 0,77 trilyun atau 38,91% untuk PDRB dengan migas dan Rp 0,84 trilyun atau 40,97% untuk PDRB tanpa migas. Mengingat sektor ekonomi tersebut merupakan sektor yang berbasis pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, mempunyai keterkaitan yang rendah dengan sektor lain, penyerapan tenaga kerja yang terbatas dan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan dan bencana yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan maka sektor pertambangan sebagai sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kerentanan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan daerah.

Tabel 3.1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2012

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan dengan Migas			Pertumbuhan Tanpa Migas		
		%/Tahun	Juta Rp	%	%/Tahun	Juta Rp	%
1	**Pertambangan dan Penggalian**	**12,23**	**769.153,85**	**38,91**	**20,22**	**838.143,07**	**40,97**
2	**Perdagangan, Hotel dan Restoran**	**7,27**	**552.353,75**	**27,94**	**7,27**	**552.353,75**	**27,00**
3	Pengangkutan dan Komunikasi	8,75	191.572,50	9,69	8,75	191.572,50	9,36
4	Bangunan	7,59	137.191,53	6,94	7,59	137.191,53	6,71
5	Pertanian	2,16	128.139,28	6,48	2,16	128.139,28	6,26
6	Jasa-Jasa	6,84	112.681,50	5,70	6,84	112.681,50	5,51
7	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,82	102.276,47	5,17	7,82	102.276,47	5,00
8	Listrik, Gas dan Air Minum	6,65	26.882,90	1,36	6,65	26.882,90	1,31
9	Industri Pengolahan	-2,54	-43.452,78	-2,20	-2,54	(43.452,78)	-2,12
	Produk Domestik Regional Bruto	**6,83**	**1.976.799,00**	**100,00**	**7,60**	**2.045.788,22**	**100,00**

Sumber:
(1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2010 dan 2000-2012, diolah.
(2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012, diolah.
(3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012, diolah.
(4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012, diolah.
(5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, diolah.



Gambar 3.1.1
Komposisi Sektoral Perubahan PDRB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2012 (%)
Sumber: Hasil Analisis, 2014

B. Ketidakmerataan Spasial Distribusi Kegiatan Ekonomi

Secara spasial persebaran kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Kota Tarakan. Selama kurun waktu 2007-2012, kontribusi Kota Tarakan terhadap ekonomi Provinsi Kalimantan Utara tidak mengalami perubahan yang berarti. Berdasarkan PDRB Migas, kontribusi Kota Tarakan terhadap ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mencapai 43,41% tahun 2007 dan sedikit menurun pada tahun 2012 hingga mencapai 43,28%. Pola yang sama juga terjadi pada PDRB tanpa migas, kontribusi Kota Tarakan terhadap ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mencapai 45,3% tahun 2007 dan sedikit menurun pada tahun 2012 hingga mencapai 44,01%.

Tabel 3.1.2
Rangking Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007 dan 2012

Kabupaten/Kota	PDRB dengan Migas		PDRB Tanpa Migas	
	2007	2012	2007	2012
Bulungan	18,60	18,11	18,26	17,65
Malinau	10,21	12,37	11,16	13,04
Nunukan	24,68	23,25	21,46	22,28
Tana Tidung	3,10	2,98	3,39	3,01
Kota Tarakan	43,41	43,28	45,73	44,01

Sumber:
(1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2010 dan 2000-2012, diolah.
(2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012, diolah.
(3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012, diolah.
(4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012, diolah.
(5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, diolah

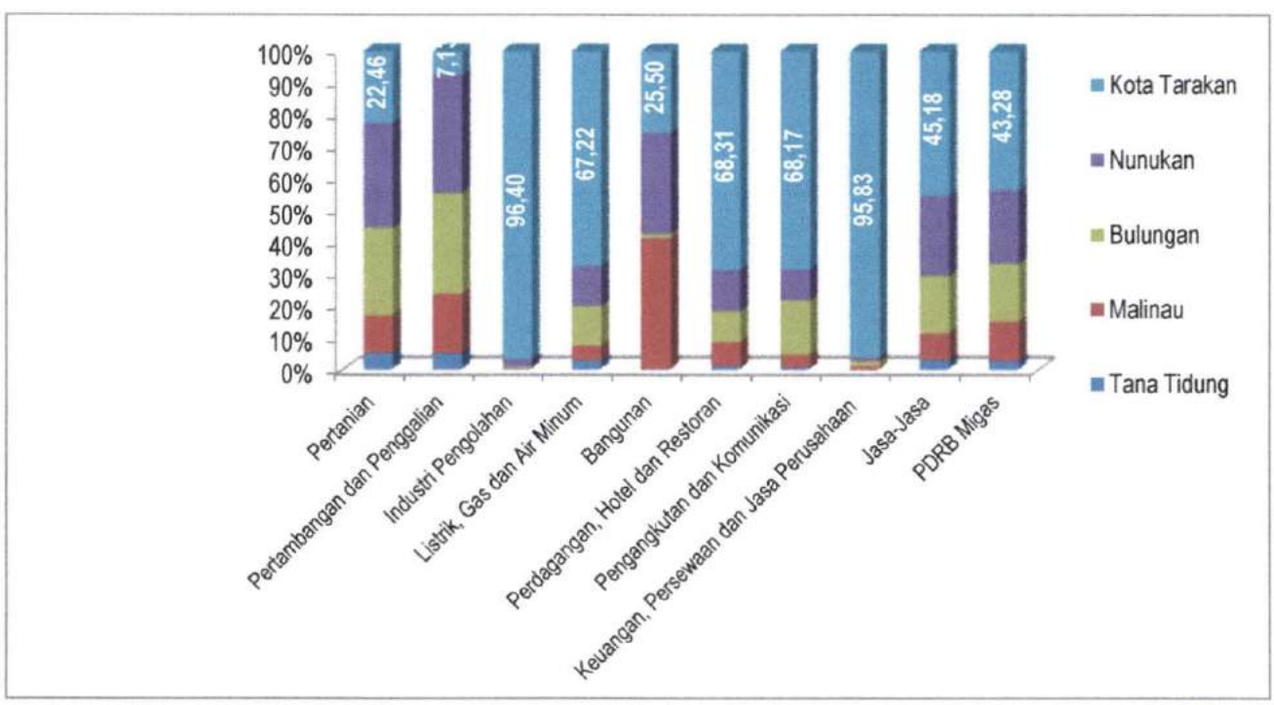
Konsentrasi kegiatan ekonomi di Kota Tarakan dipengaruhi oleh posisi geografis Kota Tarakan sebagai pintu gerbang bagi wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan terkonsentrasinya penduduk di kota ini. Posisi yang relatif strategis ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur transportasi berupa pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang memberikan aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah provinsi ini. Kondisi ini memberikan peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan kabupaten lain. Oleh karena itu Kota Tarakan mempunyai daya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang diwujudkan dengan terkonsentrasinya penduduk di kota ini. Kombinasi posisi yang strategis, ketersediaan prasarana transportasi dan konsentrasi jumlah penduduk menyebabkan distribusi spasial kegiatan ekonomi memusat di Kota Tarakan.

Secara sektoral kontribusi Kota Tarakan terhadap ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mendominasi pada sektor-sektor kelompok sekunder dan tersier yaitu sektor industri, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Kontribusi Kota Tarakan terhadap nilai tambah sektor industri Provinsi Kalimatan Utara mencapai 96,40%, terhadap nilai tambah sektor perdagangan mencapai 68,31%, terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi 68,17%, terhadap sektor keuangan mencapai 95,83% dan terhadap sektor jasa-jasa mencapai 45,18%.

Tabel 3.1.3
Distribusi Spasial Sektor-Sektor Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 (%)

Sektor-Sektor Ekonomi	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Kota Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara
Pertanian	27,52	11,88	32,71	5,43	**22,46**	100,00
Pertambangan dan Penggalian	31,54	18,73	37,22	5,38	**7,13**	100,00
Industri Pengolahan	0,57	0,24	2,68	0,11	**96,40**	100,00
Listrik, Gas dan Air Minum	12,38	4,66	12,72	3,02	**67,22**	100,00
Bangunan	1,33	41,13	31,70	0,35	**25,50**	100,00
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,65	7,59	13,18	1,27	**68,31**	100,00
Pengangkutan dan Komunikasi	17,11	4,05	9,77	0,90	**68,17**	100,00
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,63	1,12	1,27	0,14	**95,83**	100,00
Jasa-Jasa	17,94	8,47	25,23	3,17	**45,18**	100,00
PDRB Migas	18,11	12,37	23,25	2,98	**43,28**	100,00

Sumber:
(1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2010 dan 2000-2012, diolah.
(2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012, diolah.
(3) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012, diolah.
(4) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012, diolah.
(5) PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, diolah.



Gambar 3.1.2
Distribusi Spasial Sektor-Sektor Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 (%)
Sumber: Hasil Analisis, 2014

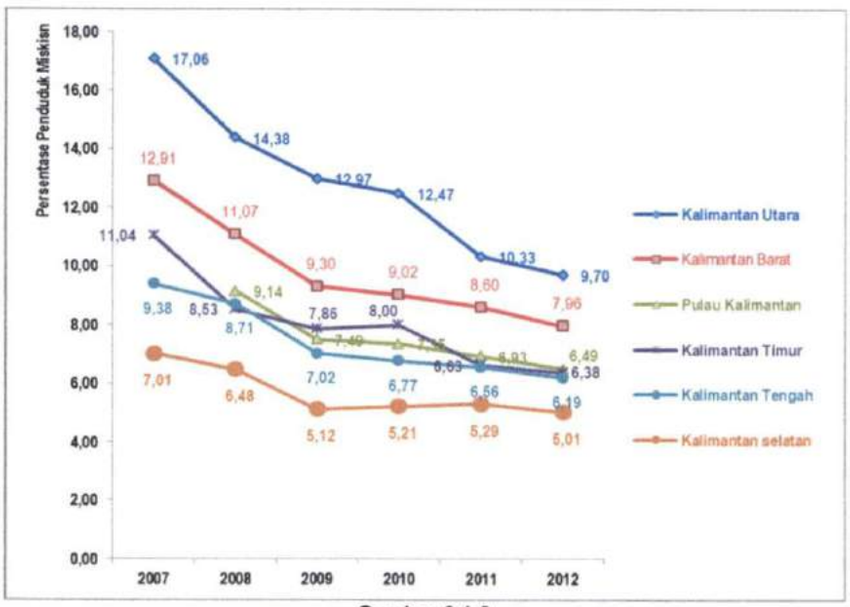
C. Relatif Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Penduduk dalam Lingkup Pulau Kalimantan

Dengan menggunakan data persentase penduduk miskin, tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kalimantan Utara relatif rendah dalam lingkup Pulau Kalimantan. Sampai dengan tahun 2012, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 9,70%, paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Pendekatan yang digunakan dalam penentuan jumlah penduduk miskin adalah kemiskinan absolut maka masalah kemiskinan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan.

Tabel 3.1.4
Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi di Pulau Kalimantan, 2007-2012

No	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kalimantan Selatan	7,01	6,48	5,12	5,21	5,29	5,01
2	Kalimantan Tengah	9,38	8,71	7,02	6,77	6,56	6,19
3	Kalimantan Timur	11,04	8,53	7,86	8,00	6,63	6,38
4	**Pulau Kalimantan**		**9,14**	**7,49**	**7,35**	**6,93**	**6,49**
5	Kalimantan Barat	12,91	11,07	9,30	9,02	8,60	7,96
6	**Kalimantan Utara**	**17,06**	**14,38**	**12,97**	**12,47**	**10,33**	**9,70**

Sumber:
(1) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Menurut Provinsi (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=1)
(2) Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2014



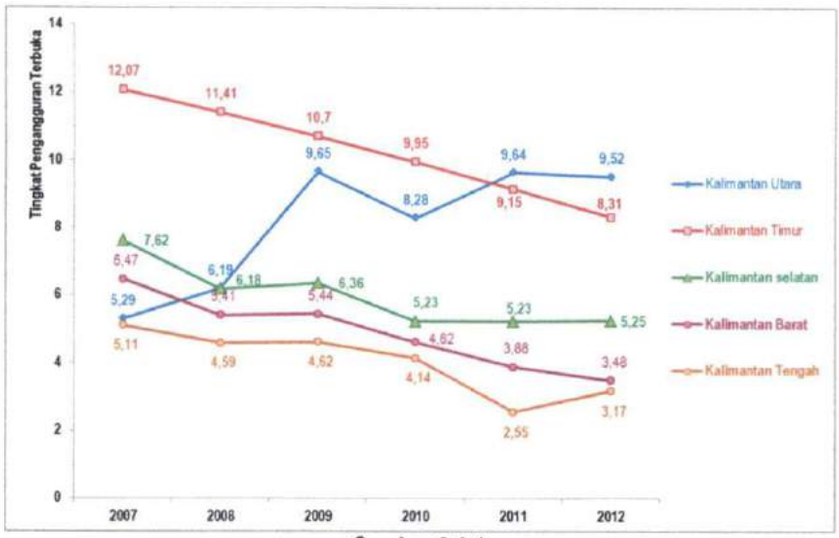
Gambar 3.1.3
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi-provinsi di Kalimantan Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Rendahnya tingkat pendapatan dapat dikaitkan dengan relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 9,52% dan tertinggi di Pulau Kalimantan. Tingginya tingkat pengangguran ini mencerminkan relatif terbatasnya tingkat kesempatan kerja yang dapat membatasi peluang untuk memperoleh pendapatan bagi penduduknya.

Tabel 3.1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi di Pulau Kalimantan, 2007-2012

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	**Kalimantan Utara**	**5,29**	**6,19**	**9,65**	**8,28**	**9,64**	**9,52**
2	Kalimantan Timur	12,07	11,41	10,7	9,95	9,15	8,31
3	Kalimantan selatan	7,62	6,18	6,36	5,23	5,23	5,25
4	Kalimantan Barat	6,47	5,41	5,44	4,62	3,88	3,48
5	Kalimantan Tengah	5,11	4,59	4,62	4,14	2,55	3,17

Sumber:
(1) Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012,
(2) Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2008-2013,
(3) Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2008-2013,
(4) Kabupaten Malinau Dalam Angka 2008-2013,
(5) Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2008-2013,
(6) Kota Tarakan Dalam Angka 2008-2013.



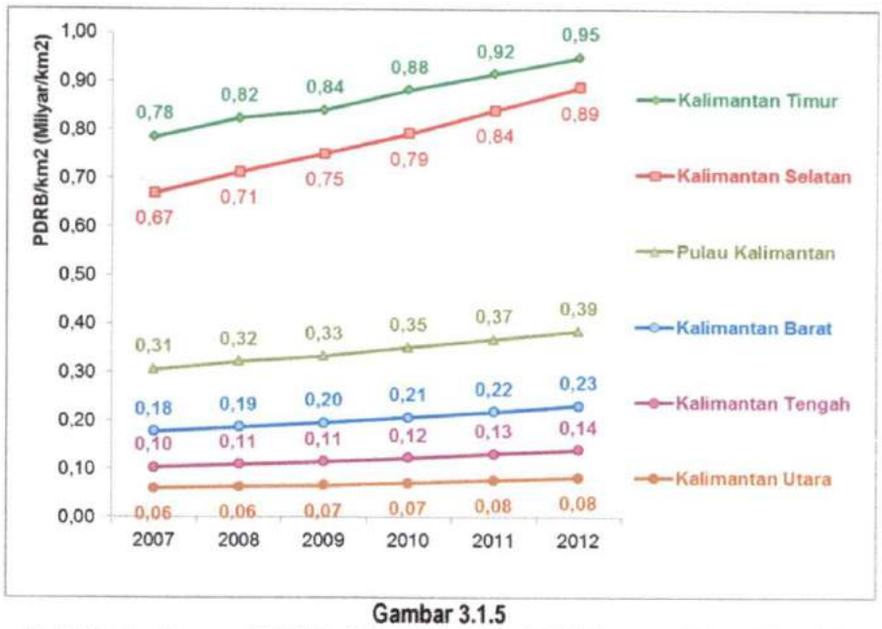
Gambar 3.1.4
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi-provinsi di Kalimantan Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Keterbatasan kesempatan kerja dapat disebabkan oleh kondisi penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja bersumber dari jumlah dan kualitas angkatan kerja. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perkembangan dan besarnya kegiatan ekonomi. Dalam kaitan ini, besarnya kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Besarnya kegiatan ekonomi yang diukur dari produktivitas wilayah yaitu PDRB per km² di Kalimantan Utara mencapai Rp 0,08 milyar/km², paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan. Namun demikian perlu dicatat bahwa sebagian besar (80%) wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan kawasan hutan, sehingga menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Tabel 3.1.6
PDRB Per Km² di Provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, 2007-2012

No	Provinsi	Produktivitas Per Km² (milyar/km²)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kalimantan Timur	0,78	0,82	0,84	0,88	0,92	0,95
2	Kalimantan Selatan	0,67	0,71	0,75	0,79	0,84	0,89
3	Kalimantan Barat	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
4	Kalimantan Tengah	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14
5	**Kalimantan Utara**	**0,06**	**0,06**	**0,07**	**0,07**	**0,08**	**0,08**
	Pulau Kalimantan	**0,31**	**0,32**	**0,33**	**0,35**	**0,37**	**0,39**

Sumber:
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2004-2012, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=52&notab=2, diolah.
2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2010 dan 2000-2012, diolah.
3. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malinau Tahun 2004-2009 dan 2007-2012, diolah.
4. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2008 dan 2008-2012, diolah.
5. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 dan 2008-2012, diolah.
6. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2000-2009, 2009-2011 dan 2013, diolah.



Gambar 3.1.5
Grafik Perkembangan PDRB/Km² Provinsi-provinsi di Kalimantan Tahun 2007-2012
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Rendahnya kesempatan kerja yang tersedia antara lain karena provinsi ini merupakan daerah otonomi baru yang sedang memulai kegiatan pembangunan daerahnya. Sebagai provinsi yang baru terbentuk kegiatan ekonomi sedang tumbuh dan belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif di provinsi ini. Terbatasnya kesempatan kerja juga diindikasikan dari rendahnya pencari kerja yang ditempatkan. Data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa sebagian besar (46%) penduduk di Provinsi Kalimantan Utara memiliki pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan atau pegawai, diikuti dengan berusaha sendiri (25%). Jika dibandingkan dengan penduduk yang berusaha sendiri di Provinsi Kalimantan Timur (27%), penduduk yang berusaha sendiri di Provinsi Kalimantan Utara lebih sedikit. Akan tetapi jika dilihat dari persentase penduduk yang berusaha sendiri ditambah dengan penduduk yang berusaha dibantu buruh baik tetap maupun tidak tetap, kondisi di Provinsi Kalimantan Utara (37%), sedikit lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur (34%).. Ini dapat diartikan kemungkinan berkembangnya kegiatan ekonomi dengan membuka usaha sendiri baik dengan tenaga kerja tetap maupun tidak tetap akan terbuka di masa depan, jika kegiatan ekonomi baru mulai tumbuh.

Permasalahan terbatasnya kesempatan kerja apabila tidak segera ditangani maka akan menyebabkan penambahan beban bagi kelompok usia produktif dan beban pembangunan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara di masa datang, mengingat 20 tahun mendatang daerah ini akan mengalami bonus demografi, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Akibat dari bonus demografi tersebut, penduduk usia produktif akan semakin bertambah. Penduduk usia produktif yang tidak dapat terserap dalam lapangan kerja yang tersedia akan menjadi penghambat pembangunan daerah, selain akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan.

3.1.3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan sosial selama kurun waktu 2007-2012 yang perlu menjadi perhatian khusus dalam pembangunan daerah di masa depan adalah rendahnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang berakibat pada terbatasnya kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan kerja. Permasalahan ini masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi di masa depan dan akan memiliki dampak cukup penting bagi pembangunan daerah jika tidak dipersiapkan sejak awal.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar penduduk (57,12%) masih rendah. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah SD (25,75%, Sensus Penduduk 2010), dan penduduk yang tidak tamat SD (22,43%). Rasio lulusan pendidikan tinggi (S1/S2/S3) yang terdapat di provinsi ini masih rendah yakni 3,40%. Rendahnya pendidikan tinggi yang ditamatkan merupakan cerminan dari rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja berimplikasi terhadap terbatasnya kemampuan dan ketrampilan penduduk untuk menyerap ilmu pengetahuan, mengadopsi teknologi dan informasi baru yang dapat menumbuhkan inovasi untuk menggerakkan pembangunan dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang tersedia. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin luas cakrawala pengetahuan yang didapat, semakin mudah untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka ketrampilan yang dimiliki juga cenderung akan meningkat.

Kualitas pendidikan yang relatif rendah di provinsi ini, terkait erat kondisi sosial ekonomi keluarga, serta tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah akan menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap arti penting pendidikan. Sementara kondisi sosial ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan terbatasnya kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kualitas pendidikan yang rendah, terbatasnya kemampuan sosial ekonomi merupakan lingkaran setan dalam upaya untuk mencapai tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai penanda keberhasilan pembangunan daerah menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2012 rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Utara masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Timur(0,73) maupun IPM nasional (0,74). Angka IPM di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan 76,03, Kabupaten Malinau 73,63, Kabupaten Nunukan 74,84, dan Kota Tarakan 77,76) kecuali Kabupaten Tana Tidung (72,66) berada pada kategori menengah atas, yaitu antara 66-80. IPM tersebut berada di atas angka rata-rata IPM nasional (73,29), meskipun masih di bawah angka IPM Provinsi Kalimantan Timur (76,73) pada tahun 2012. Ini berarti kualitas hidup manusia penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari angka IPM akan mengurangi daya saing penduduk Provinsi Kalimantan Utara di tengah era globalisasi dan tantangan masa depan, khususnya ketika dihadapkan dengan semakin terbukanya pasar tenaga kerja, jasa, perdagangan baik dalam lingkup Asia Tenggara yang akan diberlakukan tahun 2015 maupun Asia dan dunia. Jika tidak diantisipasi sejak dini. Hal ini akan menjadi beban pembangunan daerah karena sumber daya manusia yang rendah tidak mampu menciptakan perkejaan bahkan tidak memiliki pekerjaan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya di masa depan.

Sebaliknya penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki keunggulan kompetitif dan akan lebih siap dalam menghadapi persaingan global. Tingkat pendidikan tinggi yang dimiliki penduduk akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Kesempatan kerja akan terbuka luas untuk tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, pada akhirnya akan mampu memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan yang jauh lebih baik. Pendidikan yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha yang pada akhirnya akan memperluas lapangan pekerjaan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari masalah kemiskinan.

3.1.1. Rendahnya Kualitas Pendidikan Penduduk dan Terbatasnya Pelayanan Pendidikan

Secara umum **kualitas pendidikan penduduk** di provinsi ini masih relatif rendah, selama tahun 2008-2012 data menunjukkan bahwa kinerja indikator pendidikan masih rendah jika dibandingkan dengan standar normatif maupun wilayah sekitar. Hal ini tercermin dari rendahnya angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, rendahnya jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka kelulusan, rasio ketersediaan sekolah, serta relatif tingginya angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah.

Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara masih relatif rendah di hampir semua kabupaten, khususnya Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau, kecuali Kota Tarakan selama kurun waktu 2008-2012 jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Relatif rendahnya angka melek huruf berakibat pada terbatasnya kemampuan untuk menyerap dan menerima informasi dari berbagai media serta rendahnya potensi perkembangan intelektual, yang pada akhirnya akan memperlambat pembangunan daerah.

Angka rata-rata lama sekolah masih relatif rendah di hampir semua kabupaten, demikian pula angka partisipasi kasar (APK) yang masih rendah. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasi kasar. Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tiga dari lima kabupaten/kota menunjukkan APK yang lebih rendah dari APK Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Tarakan untuk jenjang SMA/MA/SMK. Rendahnya angka partisipasi kasar mengisyaratkan rendahnya daya serap penduduk usia sekolah jenjang jenjang SMA/MA/SMK.

Angka partisipasi murni (APM) di SMA/MA/SMK. Sebagai indikator kinerja pembangunan pendidikan APM lebih mencerminkan kondisi nyata partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, dibandingkan dengan APK yang mengabaikan usia siswa sekolah pada masing-masing jenjang. Indikator APM lebih peka untuk memberi gambaran kondisi di lapangan jika dibandingkan dengan indikator kinerja APK, maka melalui indikator kinerja APM terlihat bahwa terdapat kesenjangan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur.

Rendahnya angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni tersebut terkait dengan keterbatasan ekonomi keluarga yang menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendapatan per kapita di semua kabupaten/kota berada di bawah pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di provinsi ini

masih cukup besar (9,70% tahun 2012), lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur (6,78% tahun 2012).

Selain faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya menjadi penyebab lain yang berpengaruh terhadap relatif rendahnya apresiasi penduduk terhadap pendidikan sehingga pendidikan belum menjadi prioritas utama sebagai investasi di masa depan. Hal ini berarti bahwa tingkat kesadaran akan arti penting pendidikan masih rendah. Bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara pendidikan belum menjadi prioritas investasi yang menjanjikan di masa depan. Tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang dipandang sebagai prioritas investasi di masa depan baru muncul di perkotaan yakni Kota Tarakan, diikuti oleh Kabupaten Malinau yang terlihat dari tingginya angka rata-rata lama sekolah.

Rendahnya APK jenjang SMA/MA/SMK di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dapat disebabkan oleh fasilitas pelayanan pendidikan yang relatif terbatas, mengingat kedua kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang terletak di pinggiran dan berbatasan dengan wilayah negara tetangga, Malaysia, dimana ketersediaan dan aksesibilitas jaringan jalan maupun transportasi lain cukup terbatas. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya mobilitas penduduk antar wilayah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang relatif dekat dengan permukiman.

Rendahnya kualitas pendidikan yang diisyaratkan dari rendahnya angka melek huruf, angka partisipasi murni maupun kasar merupakan cerminan dari relatif rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan terkait dengan rendahnya pendapatan masyarakat, dan sebaliknya rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di provinsi ini. Pendidikan yang rendah menyebabkan terbatasnya peluang untuk memanfaatkan kesempatan kerja yang memberikan penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini jika tidak diantisipasi sejak dini akan menjadi persoalan di masa depan.

Pendidikan merupakan salah satu investasi penentu keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Melalui pendidikan yang berkualitas masyarakat akan semakin terbuka cakrawala dan wawasan pengetahuan serta memudahkan kemampuan untuk mengadopsi teknologi. Tantangan tersebut semakin besar ketika era globalisasi mulai berlangsung dan di kawasan ASEAN akan mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Di era tersebut masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang, wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek, kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin cepat, serta kemampuan bekerja secara efisien. Tantangan tersebut harus dihadapi oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, terlebih wilayah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mempersiapkan masyarakat di provinsi ini dengan lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Di era globalisasi dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi tinggi serta memiliki pendidikan tinggi.

Satu hal perlu dicatat bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan mengakibatkan kemampuan untuk menyeleksi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan sosial akibat dari globalisasi yang sangat dengan mudah dipengaruhi sehingga tradisi lokal terancam punah, khususnya di perkotaan. Hal ini ditandai dengan hilangnya nilai-nilai tradisi sebagai pengikat kehidupan sosial yang mulai longgar, seperti budaya gotong royong (*tenguyun*) yang mulai 'hilang' seperti dituturkan seorang tokoh agama di Kabupaten Bulungan. Lunturnya ikatan-ikatan sosial yang dapat dijadikan modal sosial untuk memperkuat dan membangun kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial ke arah peningkatan kesejahteraan perlu menjadi perhatian.

Terbatasnya pelayanan pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK, tingginya angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK, serta rendahnya angka kelulusan jenjang SMA/MA/SMK. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK relatif masih rendah. Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau merupakan dua wilayah yang menunjukkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah yang rendah, di bawah rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Provinsi Kalimantan Timur. Rendahnya rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kota Tarakan tersebut disebabkan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah tidak diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah jenjang SMA/MA/SMK. Demikian halnya Kabupaten Nunukan, bahkan selama tahun 2008-2012 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di kabupaten ini semakin menurun. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk di kabupaten ini selama 2005-2012 yang mencapai 2,50% rata-rata per tahun. Perlu dicatat bahwa Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang terletak di perbatasan dengan Malaysia, sehingga kabupaten ini merupakan pintu keluar dan sekaligus pintu masuk bagi migrasi antar negara, hal ini akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk kabupaten yang cukup tinggi.

Angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK masih relatif tinggi. Sementara angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK tahun 2012 yang tertinggi adalah Kabupaten Malinau 34,50% tahun 2012. Tingginya angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK di Kabupaten Malinau sejalan dengan semakin terbatasnya jumlah SMA/MA/SMK. Terdapat tiga kecamatan di Kabupaten Malinau yang tidak memiliki sekolah jenjang SMA. Luas wilayah Kabupaten Malinau yang cukup luas tidak diimbangi ketersediaan jaringan jalan sebagai penghubung antar wilayah kecamatan

yang memudahkan penduduk melakukan mobilitas untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan jenjang SMA. Seperti telah dijelaskan di Bab II bahwa fasilitas pendidikan di kabupaten-kabupaten yang terletak di perbatasan negara cukup terbatas, seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Fasilitas pendidikan yang relatif terbatas diikuti oleh keterbatasan tenaga pengajar, akan mengakibatkan rendahnya kinerja pelayanan pendidikan.

Angka kelulusan SMA/MA/SMK/ masih rendah, pada jenjang SMA/MA/SMK hanya Kabupaten Tana Tidung (100%) yang memiliki capaian kinerja di atas capaian kinerja Provinsi Kalimantan Timur (99,48%) pada tahun 2012. masih rendahya angka kelulusan jenjang SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar belum sepenuhnya berjalan dengan baik selain karena pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang masih kurang mungkin juga karena standar kelulusan masing-masing jenjang sekolah yang dianggap terlalu tinggi.

Permasalahan tersebut jika tidak diantisipasi sejak saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan yang akan berakibat pada rendahnya sumber daya manusia di provinsi ini. Sebagai akibat lebih lanjut, rendahnya kualitas sumber daya manusia akan mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja provinsi ini, sementara di masa depan, terlebih di tahun 2015 harus menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana sekat-sekat wilayah akan semakin terbuka, tenaga kerja dari negara-negara ASEAN akan masuk ke wilayah Indonesia. Perlu dicatat pula bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, ini akan semakin mempermudah penduduk dari wilayah tetangga yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik untuk masuk dan bekerja di provinsi ini. Sebaliknya penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Utara akan semakin tertinggal secara ekonomi karena tidak memiliki kapasitas, keahlian, ketrampilan yang memadai karena rendahnya kualitas pendidikan untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja dari wilayah negara tetangga.

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Pendidikan

Rendahnya kualitas pendidikan penduduk di provinsi ini dimungkinkan pula oleh rendahnya fasilitas pelayanan pendidikan. Di masa depan kebutuhan fasilitas pelayanan sosial dasar, khususnya fasilitas pendidikan, yang harus disiapkan didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk. Jika proyeksi fasilitas pendidikan menggunakan SNI Nomor 2003-2733 tahun 2004 dari Kementerian Pekerjaan Umum, maka jumlah penduduk minimal sebagai syarat didirikan fasilitas sekolah adalah sebagai berikut: SMA (4.800 jiwa).

Hasil perhitungan proyeksi fasilitas pendidikan menunjukkan fasilitas SMA di Provinsi Kalimantan Utara harus ditambah untuk memenuhi peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SMA di masa yang akan datang. Kebutuhan fasilitas SMA di Kalimantan Utara pada tahun 2015 mencapai 127, 148 di tahun 2020 dan 167 di tahun 2025 sementara ketersediaan sekarang hanya 76 SMA. Penambahan SMA diharapkan tidak hanya secara kuantitas tetapi kualitas dan sebarannya sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata dan berkualitas.

Sementara itu perlu untuk mempertimbangkan fasilitas pendidikan dibandingkan jumlah penduduk menurut umur yang dilayani oleh 1 fasilitas. Hal ini penting agar jumlah penduduk yang dilayani tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Sebagai catatan, penduduk yang dimaksud adalah penduduk menurut kelompok umur, yakni usia sekolah SD (5-10 tahun), usia sekolah SMP (10-15 tahun) dan usia sekolah SMA (15-19 tahun). Pengelompokkan tersebut sesungguhnya kurang tepat, akan tetapi data dasar penduduk kelompok usia sekolah sangat terbatas, sehingga pengelompokkan usia sekolah merupakan data yang paling mendekati pengelompokkan tersebut.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk menurut umur SMA (15-19 tahun) yang dilayani dalam 1 fasilitas sebanyak 353 (2015), 304 (2020), 268 (2025). Menurunnya jumlah penduduk yang harus ditampung oleh setiap fasilitas membuat beban semakin rendah dan berdampak terhadap peningkatan kualitas kegiatan pendidikan.

Perlu dicatat bahwa kondisi wilayah di provinsi ini dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yakni: (1) wilayah yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi dan berupa kepulauan yakni Kota Tarakan dan Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, (2) Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung yang memiliki topografi wilayah datar dengan kepadatan penduduk relatif sedang, (3) Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan (daratan) yang memiliki kepadatan penduduk relatif rendah serta sebagian besar wilayah memiliki topografi dengan kelerengan di atas 40%. Kondisi wilayah tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar seperti pendidikan. Proyeksi fasilitas pelayanan sosial dasar untuk pendidikan tersebut lebih tepat digunakan untuk Kota Tarakan yang relatif mempunyai kepadatan tinggi dan penduduknya mengelompok, sementara itu jika digunakan untuk memprediksi kebutuhan fasilitas pendidikan di kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dengan pola permukiman yang menyebar kurang tepat. Perlu pendekatan khusus untuk proyeksi jumlah fasilitas pendidikan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah, administratif dan jaringan transportasi.

Di wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan mungkin tidak lagi dapat dipenuhi dengan penambahan ruang kelas, tetapi harus menambah jumlah sekolah baru. Sebaliknya di wilayah yang cukup rendah kepadatan penduduk, penambahan jumlah sekolah belum menjadi kebutuhan utama,

tetapi dapat diatasi dengan penambahan ruang kelas baru. Namun demikian untuk wilayah yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dan pedalaman, khususnya Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, diperlukan pertimbangan khusus dalam menyelesaikan persoalan keterbatasan fasilitas pendidikan maupun tenaga guru mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Jika wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga maupun pedalaman tersebut tidak diberikan perhatian secara khusus dan menjadi prioritas, maka wilayah-wilayah tersebut akan semakin tertinggal dalam pendidikan, tidak hanya tertinggal untuk skala provinsi tetapi juga dibandingkan dengan wilayah tetangga, oleh karena saat ini fasilitas pendidikan yang disediakan oleh negara tetangga di wilayah-wilayah perbatasan tersebut jauh lebih baik dibandingkan wilayah-wilayah perbatasan di provinsi ini.

3.1.2. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Terbatasnya Akses dan Sebaran Pelayanan Dasar Kesehatan yang Tidak Merata

Derajat kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara secara makro terlihat cukup baik seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk balita, dan angka harapan hidup. Pada tahun 2012, angka kematian bayi, angka kematian balita, dan presentase balita gizi buruk masih berada jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan MDG's untuk tahun 2015. Angka usia harapan hidup di semua kabupaten sejak tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dan hampir mendekati target RPJM Nasional 2014 yaitu 72 tahun. Akan tetapi, Angka Kematian Ibu (AKI) di provinsi ini masih tinggi melebihi batas maksimal MDG's 2015.

Rata-rata angka kematian ibu di provinsi ini tahun 2011 sebesar 119,55 dan tahun 2012 sebesar 167,74 menunjukkan adanya peningkatan. Jika hal ini tidak segera diatasi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya, dikhawatirkan terdapat peningkatan angka kematian ibu dalam 20 tahun ke depan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain ekonomi, pendidikan, kesadaran akan pentingnya gizi, kualitas tenaga kesehatan, kesehatan lingkungan, serta kondisi geografis yang sulit. Faktor-faktor penyebab tersebut jika tidak dilakukan perbaikan akan menimbulkan permasalahan tidak hanya kematian ibu tetapi juga masalah kesehatan lainnya.

Sementara data wabah penyakit selama setahun terakhir berdasarkan Podes tahun 2011 didominasi karena infeksi, berturut-turut yaitu ISPA (1.972 penderita), muntaber/diare (954 penderita), malaria (412 penderita), TB (246 penderita), campak (241 penderita), dan demam berdarah (128 penderita). Sedangkan kematian tertinggi disebabkan karena malaria (17 penderita). Hal ini menunjukkan penyakit infeksi menular masih mendominasi jenis penyakit terbanyak di provinsi ini. Kemungkinan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya penyakit infeksi adalah imunitas tubuh kurang optimal dikarenakan kebiasaan hidup yang kurang baik atau menderita penyakit kronis. Kebiasaan hidup atau perilaku yang kurang baik misalnya kualitas gizi makanan yang dimakan kurang, kualitas tidur kurang, kurang olah raga, terpapar stres fisik maupun mental, kebersihan individu dan lingkungan kurang baik atau kesadaran akan pentingnya kesehatan kurang disebabkan tingkat pengetahuan yang masih rendah.

Selain penyakit infeksi, berdasarkan Profil Kesehatan di tiga kabupaten (Bulungan, Malinau dan Tarakan) terlihat hipertensi dan gangguan *gastrointestinal* cukup banyak dijumpai. Mengingat semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk dan kemungkinan *healthy life style* yang kurang baik perlu diantisipasi munculnya penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif seperti sindrom metabolik, hipertensi, jantung, diabetes mellitus dan gagal ginjal yang saat ini mendominasi wilayah lain di Indonesia. Kemunduran fungsi organ secara fisiologis pada kelompok lansia akan berisiko terkena penyakit kronis, disamping disebabkan gaya hidup yang kurang sehat. Disamping itu, perubahan pola penyakit dan penyebab kematian dapat dipengaruhi oleh kondisi geografi, sosial ekonomi dan budaya yang terdapat di provinsi ini. Oleh karena itu, peningkatan usia harapan hidup (lansia) harus diantisipasi sejak dini untuk mencegah timbulnya penyakit *degeneratif* di kemudian hari melalui upaya promotif dan preventif.

Sanitasi, kualitas air, dan udara yang kurang baik juga mempermudah terjadinya penularan kuman penyakit. Berkaitan dengan penyebaran demam berdarah dan malaria, terdapat tiga faktor utama yang harus diperhatikan karena saling berhubungan, yaitu *host* (manusia atau nyamuk), *agent* (virus *dengue* atau parasit plasmodium), dan *environment* (lingkungan). Karakteristik nyamuk pembawa penyakit demam berdarah dan malaria berbeda, baik dari cara menginfeksi, perkembangbiakan atau berkaitan dengan lokasi endemik, tetapi terdapat gejala-gejala yang mirip antara kedua penyakit tersebut antara lain demam, sakit kepala, muntah, nyeri otot, perdarahan dan diare, dengan masa inkubasi yang lebih panjang pada malaria. Faktor lingkungan mempengaruhi perkembangabiakan nyamuk. Nyamuk *Anopheles* berkembang biak di air tenang yang kotor, sebailknya nyamuk *Aedes Aegypti* berkembang biak di air tenang yang bersih. Selain itu, kondisi lingkungan seperti bebatuan, banyak cekungan atau daerah pegunungan juga mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk.

Melihat kondisi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang banyak teraliri sungai, perlu diperhatikan kualitas air sungai. Mengingat kandungan mineral cukup tinggi di wilayah provinsi ini, sehingga pengujian kualitas air dan tanah perlu dilakukan, dan jika ditemukan kadar mineral yang cukup tinggi perlu dilakukan antisipasi pengolahan air sebagai sarana air minum dan memasak. Perlu diwaspadai pula olahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang

ditanam di daerah dengan kadar mineral tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, cukup banyak kasus gangguan ginjal (batu ginjal) yang dialami oleh masyarakat provinsi ini dan sekitarnya maupun pendatang dalam jangka waktu cukup lama.

Sebagian wilayah provinsi ini berbatasan dengan negara Malaysia, sehingga kebijakan pembangunan kawasan perbatasan perlu diperhatikan. Mengingat selama ini pembangunan daerah perbatasan kurang diperhatikan dan lebih mengarah ke daerah yang aksesnya mudah dan padat penduduk atau daerah yang dianggap potensial bagi pemerintah pusat, sehingga kebijakan pembangunan bagi daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti daerah perbatasan belum menjadi prioritas. Tidak hanya kualitas pelayanan kesehatan yang ditingkatkan tetapi kuantitas sarana kesehatan perlu dipenuhi sesuai kebutuhan. Kemudahan akses bagi pendatang luar yang memasuki wilayah perbatasan akan berimbas pada perubahan gaya hidup dan penularan penyakit yang dibawa pendatang tersebut, sehingga permasalahan di daerah perbatasan seperti beredarnya obat terlarang dan HIV perlu diwaspadai. Namun, sampai saat ini belum ada data atau informasi secara tertulis mengenai hal tersebut.

Akses pelayanan dasar kesehatan terbatas. Pemerataan sarana kesehatan ke seluruh wilayah dan masih sulitnya akses ke sarana kesehatan terdekat menjadi hal utama dalam pelayanan dasar kesehatan. Jumlah sarana kesehatan (puskesmas, pustu dan rumah sakit) sudah mencukupi sesuai rasio jumlah penduduk, bahkan rasio puskesmas per satuan penduduk jauh di atas rasio Indonesia tahun 2012. Akan tetapi bila dikaitkan dengan faktor eksternal yaitu luas wilayah dan kondisi geografis di Provinsi Kalimantan Utara, capaian indikator yang telah sesuai ini kembali menjadi suatu permasalahan.

Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh hutan dan sungai yang lebar, sehingga transportasi melalui jalur sungai menjadi transportasi utama. Kemudahan akses terhadap sarana kesehatan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu wilayah. Penyebaran sarana kesehatan tidak merata. Jumlah rumah sakit masih sedikit dan berada hanya di wilayah tertentu saja. Sementara jarak rata-rata suatu desa ke rumah sakit terdekat dan akses desa ke rumah sakit terdekat sangat mudah hanya 5,7% desa dan mudah 18,6% desa, sedangkan sulit 36,2% desa, dan sangat sulit 39,4% desa (Podes, 2011). Sedangkan akses jumlah desa ke puskesmas terdekat memenuhi kriteria sangat mudah 16,4% dan mudah 41%, sedangkan sulit 27,7% dan sangat sulit 14,9%. Walaupun sarana prasarana tersedia lengkap tetapi akses masyarakat untuk mencapai sarana kesehatan tersebut sulit akan mengakibatkan tidak tertanganinya masalah kegawatdaruratan kesehatan, serta meningkatkan jumlah komplikasi penyakit dan kematian. Tingginya jumlah dukun bayi dibandingkan tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter menjadi alasan yang sangat wajar bila pilihan masyarakat lebih memilih ke dukun daripada ke sarana kesehatan yang aksesnya sulit dilalui. Berdasarkan informasi yang didapat masih ada beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mengupayakan membuat program dokter terbang agar dapat mengirim dokter spesialis ke daerah terpencil, tetapi saat ini hanya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan saja. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara juga berupaya menyusun sistem rujukan yang efektif dan efisien.

Sementara rasio tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi dan bidan) memperlihatkan kecenderungan meningkat meskipun belum sesuai target yang ditentukan oleh Indonesia Sehat 2010. Jumlah tenaga medis dokter laki-laki dan perempuan serta dokter gigi mengalami penurunan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2008. Sebaliknya jumlah bidan dan mantri mengalami peningkatan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2008 (Podes, 2011). Peningkatan jumlah bidan dan mantri ini mungkin untuk mengantisipasi pemerataan tenaga kesehatan yang belum tercukupi. Tetapi hal ini seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan mengingat kompetensi yang berbeda sehingga dikhawatirkan terdapat kasus-kasus penyakit yang tidak dapat tertangani dengan baik. Begitu pula dengan kompetensi dan kualitas dukun bayi harus diperhatikan, mengingat jumlah dukun bayi yang jauh lebih banyak daripada bidan baik pada data tahun 2008 maupun tahun 2011. Terlebih lagi data tahun 2006 menunjukkan jumlah dukun bayi tidak terlatih hampir sama dengan yang terlatih. Selain dokter dan bidan, jumlah tenaga gizi, sanitarian, dan kesehatan masyarakat masih belum mencapai target Indonesia Sehat 2010. Selain itu permasalahan yang muncul adalah distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum merata. Kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan dapat mempersulit penanganan kesehatan yang memerlukan rujukan ke rumah sakit dan perlunya tenaga medis yang kompeten. Oleh karena itu, jumlah, penempatan tenaga kesehatan yang kompeten, peningkatan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan harus diperhatikan.

Indikator lain seperti cakupan pelayanan kesehatan seperti penemuan dan penanganan penyakit TBC, *Universal Child Immunization*, pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan komplikasi kebidanan yang ditangani, serta cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menunjukan peningkatan meskipun masih belum mencapai target yang diharapkan oleh SPM bidang kesehatan. Masih belum tercapainya target indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, menunjukkan masih banyak kasus ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang belum mendapatkan penanganan secara baik sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih. Hal ini juga terlihat masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Cakupan penanganan

komplikasi dan pertolongan persalinan yang kurang, dapat disebabkan karena kualitas tenaga kesehatan yang masih rendah atau rujukan terlambat disebabkan akses menuju sarana kesehatan sulit. Menurut Menteri Kesehatan RI, penyebab utama kematian ibu melahirkan adalah perdarahan dan infeksi yang tidak tertolong karena banyak masyarakat yang memilih untuk melahirkan di rumah, tidak di rumah sakit maupun puskesmas. Banyaknya kasus komplikasi kebidanan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah akan berdampak pada kesehatan dan keselamatan ibu serta janin yang dikandungnya. Beberapa faktor ini kemungkinan merupakan salah satu penyebab angka kematian ibu masih tinggi di Provinsi Kalimantan Utara.

Terkait masalah kesehatan lingkungan, data menunjukkan bahwa kualitas air masih belum layak. Air adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka seluruh proses metabolisme dalam tubuh manusia dapat berlangsung dengan lancar. Persentase banyaknya desa yang mengakses sumber air minum tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 65% desa atau kelurahan di Kota Tarakan sumber air minum/masak berasal dari PAM/PDAM, jumlah ini mendominasi dibandingkan sumber air yang lain seperti sumur (15%), air hujan (10%), mata air (5%) dan air kemasan (5%). Sedangkan di Kabupaten Malinau, sumber air minum/masak didominasi dari sungai/danau sebesar 43%, sedangkan yang lain berasal dari mata air (39,45%), PAM/PDAM (9,17%) dan air hujan (7,34%). Begitu pula sumber air di Kabupaten Nunukan didominasi dari sungai/danau (36,67%). Sedangkan di Kabupaten Tana Tidung dan di Kabupaten Bulungan 72,73% dan 38,27% desa di kabupaten tersebut menggunakan air hujan sebagai sumber air minum, di tahun 2012 pun keluarga di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung yang menggunakan sumber dari air hujan masih cukup tinggi 52,34% dan 56,25% (Podes, 2011).

Khusus di Kabupaten Malinau, dengan kondisi geografi lingkungan dan geologis yang berada di kelerengan di atas 40%, terjadi permasalahan penanganan air limbah akibat pertambangan yang belum dilakukan secara baik, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap kualitas air di sungai-sungai sekitar. Dampak kegiatan pengelolaan sumber daya alam berupa penurunan kualitas air secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penurunan kualitas air minum (PDAM) sehingga kurang layak digunakan sebagai sumber air minum. Hasil pengamatan secara langsung menunjukkan bahwa kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau ini menunjukkan warna cokelat pekat dan mengkilap yang menunjukkan adanya suspensi sedimen. Kondisi tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat sebagai pengguna air sungai baik dalam mencari ikan dan biota air juga untuk kebutuhan air rumah tangga (KLHS Malinau, 2013-2032). Begitu juga di Kabupaten Nunukan tahun 2011, sumber air terbesar berasal dari sungai/danau, dan air hujan, sedikit sekali yang berasal dari PAM (2,92%). Sementara itu tidak sampai 50% keluarga yang ada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung menggunakan sumber air minum terlindungi (Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 2012).

Kualitas air minum ini berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat sekitar yang mengkonsumsi air dari sumber air tersebut. Beberapa penyakit yang dipengaruhi oleh buruknya kualitas air minum atau air sehari-sehari adalah diare, muntaber, dan penyakit saluran cerna lainnya yang disebabkan oleh cemaran bakteri *E-coli* dan bakteri lainnya. Cemaran kimia ini pun tidak kalah berbahayanya. Cemaran Fe (besi) selain menyebabkan bau amis, pakaian jadi kusam, dapat menimbulkan gangguan hati. Air yang tercemar oleh nitrit dan nitrat dapat menyebabkan penyakit methemoglobin pada bayi. Sedangkan air yang banyak mengandung zat kapur dapat menyebabkan gangguan pada ginjal, dan masih banyak lagi gangguan kesehatan yang disebabkan oleh cemaran zat kimia dalam air tersebut. Menurut hasil wawancara dengan seorang dokter yang bertugas di Kabupaten Bulungan, banyak kasus gagal ginjal terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Di Kabupaten Bulungan, diare (276 kasus) menjadi sepuluh penyakit terbesar rawat inap RSUD Tanjung Selor (Profil Kesehatan Bulungan 2012). Bahkan di Kabupaten Malinau (2.674 kasus), Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan, penyakit diare juga menjadi salah satu dari sepuluh penyakit terbesar di daerah tersebut hingga tahun 2013. Sedangkan untuk kasus ginjal di Kabupaten Bulungan terdapat 2 kematian dari 23 kasus gagal ginjal serta penyakit sistem kemih lainnya menjadi salah satu dari 10 besar penyakit rawat inap RSUD Tanjung Selor tahun 2013. Dengan fakta dan kondisi tersebut maka perhatian terhadap peningkatan kualitas air minum sangatlah penting dan menjadi perhatian yang utama karena air tidak akan lepas dari kehidupan manusia sehari-hari.

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Seperti halnya proyeksi fasilitas pendidikan, proyeksi fasilitas kesehatan menggunakan SNI Nomor 2003-2733 tahun 2004 dari Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut standar tersebut jumlah penduduk minimal sebagai syarat didirikan fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut: puskesmas (30.000 jiwa) dan puskesmas pembantu (120.000 jiwa). Dalam tabel terlihat bahwa proyeksi fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu belum melebihi data eksisting. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan tidak dapat digeneralisasi dengan jumlah penduduk karena konfigurasi wilayah berbeda-beda. Oleh karena kebijakan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan akan sangat berbeda dengan wilayah yang berada di pusat pemerintahan maupun

wilayah lain yang sudah terhubung dengan wilayah lain karena aksesibilitas yang tinggi terhadap jaringan transportasi khususnya darat.

Kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting bagi masyarakat untuk berobat, menyampaikan keluhan kesehatan maupun mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan. Saat ini semua kabupaten/kota di provinsi ini sudah memiliki jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu melebihi dari jumlah puskesmas hasil proyeksi. Perhitungan proyeksi yang hanya terpaku pada jumlah penduduk membuat perhitungan berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya. Jumlah penduduk tiap kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara bahkan banyak yang kurang dari standar penduduk SNI. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa di Kabupaten Tana Tidung belum memenuhi syarat jumlah penduduk untuk pembangunan puskesmas. Hal ini berbeda dengan eksisting karena jumlah puskesmas sudah tersedia di setiap kecamatan.

Jumlah penduduk yang dilayani oleh setiap puskesmas diperkirakan mencapai 114.162 jiwa, dan terus menurun di tahun 2025. Jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap puskesmas pembantu rata-rata 28.000 jiwa di tahun 2015, sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 24.575 jiwa dan di tahun 2030 21.694 jiwa. Jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap fasilitas sebaiknya seminimal mungkin agar kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih maksimal. Proyeksi menurut SNI di bidang kesehatan hanya memperhitungkan jumlah penduduk sehingga tidak tepat diterapkan di Provinsi Kalimantan Utara yang pola penduduknya relatif tersebar dengan wilayah yang cukup luas. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang memiliki wilayah yang luas dengan penduduk yang tersebar karena kondisi topografi wilayah dengan kelerengan sebagian besar di atas 40%, diperlukan kebijakan yang berbeda dengan kabupaten lainnya agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah. Jika hal ini tidak menjadi prioritas maka penduduk yang tinggal di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga akan semakin rendah derajat kesehatannya. Bahkan mungkin penduduk perbatasan tersebut sangat terbantu dengan fasilitas pelayanan kesehatan negara tetangga karena kemudahan akses serta kualitas pelayanan yang lebih baik di negara tetangga. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan merupakan perbatasan negara RI dengan Malaysia sehingga keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut merupakan cerminan pembangunan di Indonesia.

3.1.3. Seni Budaya dan Olah Raga

Selama ini pembangunan dan pelestarian seni budaya masih terbatas. Provinsi ini memiliki keragaman budaya, adat istiadat yang khas, yakni etnis Dayak yang memiliki heterogenitas tinggi dan tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan seni budaya seperti pameran, lomba, festival seni dan budaya masih sangat terbatas, demikian pula dengan kegiatan olah raga. Seni budaya merupakan salah satu identitas daerah yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisatawan. Sementara adat istiadat yang khas merupakan modal sosial yang menjadi perekat antar warga di wilayah provinsi ini. Kegiatan seperti pameran, lomba, festival seni dan budaya merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan karakter masyarakat, khususnya generasi muda sekaligus sebagai wujud upaya melestarikan kebudayaan.

Demikian juga pembangunan olah raga masih cukup rendah ditandai dengan jumlah kegiatan olah raga, organisasi olah raga dan rasio lapangan olah raga per 1.000 penduduk di semua kabupaten/kota. Sarana dan prasarana olah raga yang terbatas akan mengakibatkan rendah kualitas sumber daya olah raga.

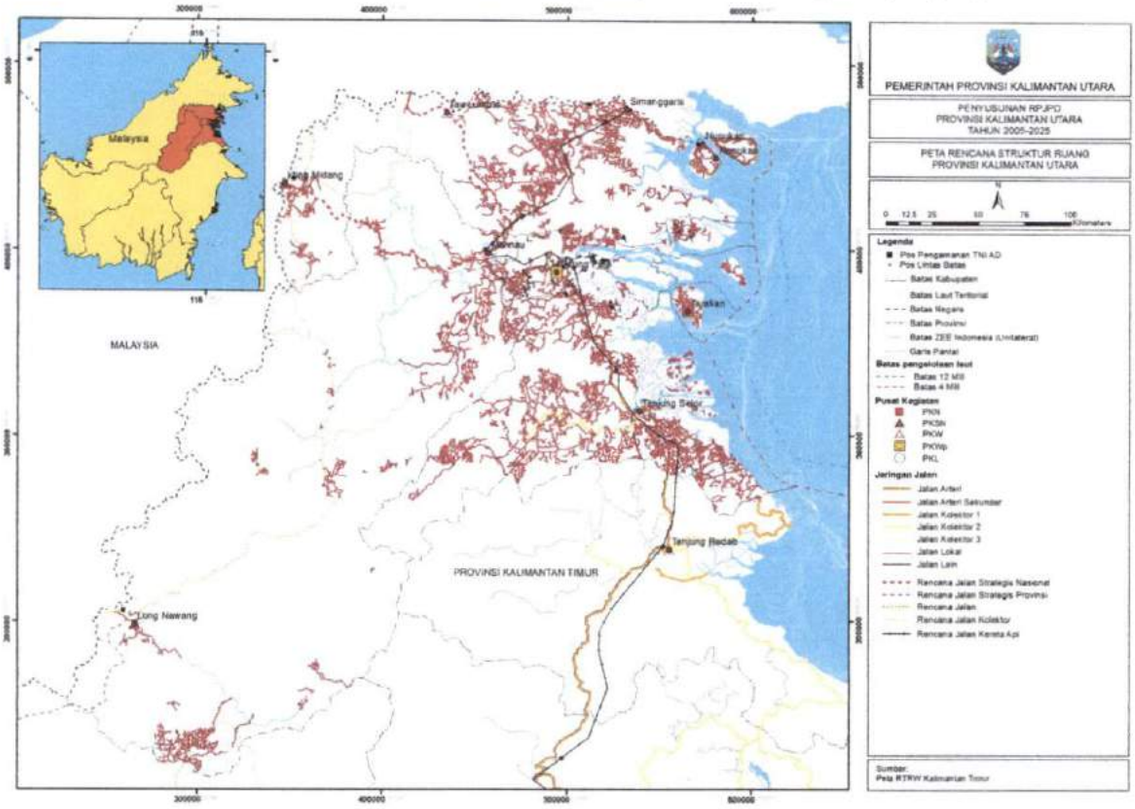
3.1.4. Kurang Memadainya Sistem Jaringan Jalan

Kalimantan Utara sebagai provinsi yang baru terbentuk memerlukan dukungan infrastruktur yang baik untuk mendukung proses pembangunan. Dengan kondisi wilayah yang cukup luas serta berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga Malaysia, provinsi ini memerlukan sistem jaringan jalan yang andal agar mampu menghubungkan seluruh wilayah, kegiatan masyarakat dan layanan umum serta mampu dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Secara umum kondisi jaringan jalan dalam lingkup kabupaten sudah baik, terdapat 68,05% jalan kabupaten dengan kondisi baik (lebih besar dari nilai SPM sebesar 60%). Namun total ruas panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 56,42%, kurang dari nilai SPM sebesar 60%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konstruksi jalan di Provinsi Kalimantan Utara masih bermasalah, antara lain lapis perkerasan yang rusak, kondisi badan jalan yang tidak mantap, maupun permukaan jalan licin dan berlumpur pada saat musim penghujan, seperti ruas jalan Tanjung Selor - Tanjung Palas - Sekatak Buji - Malinau, Mansalong - Simanggaris - Batas Negara.

Permasalahan konstruksi jalan tersebut mengakibatkan peningkatan biaya operasi kendaraan, waktu perjalanan semakin lama, rentan terhadap kecelakaan dan pada akhirnya berdampak pada penurunan aksesibilitas orang maupun barang. Banyak wilayah menjadi tidak terjangkau, distribusi barang terhambat, keamanan wilayah pun akan menjadi terganggu. Kondisi jaringan jalan yang rusak tersebut juga mempersulit keterhubungan antar wilayah baik sebagai akibat jalan yang terputus maupun sulitnya layanan transportasi memanfaatkan jaringan jalan tersebut.

Bagi wilayah perbatasan dengan Malaysia, situasi tersebut akan mempersulit masyarakat mengakses layanan di wilayah Indonesia, masyarakat menjadi lebih bergantung pada layanan di Malaysia serta memunculkan kesulitan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah RI.

Sementara rasio jaringan jalan terhadap jumlah penduduk sudah baik, tercermin dari rasio panjang jalan yang dilalui kendaraan roda empat per 1.000 penduduk sebesar 6,76 (lebih besar dari nilai SPM sebesar 0,6). Namun demikian, indikator ini kurang mencerminkan permasalahan riil yang ada di lapangan. Keberadaan jaringan jalan tersebut masih terfokus pada wilayah yang padat penduduknya atau wilayah yang memiliki hirarki tinggi, sementara masih banyak wilayah kurang padat penduduknya yang belum terhubung oleh jaringan jalan tersebut.



Gambar 3.1.6
Peta Sebaran Jalan Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Peta RTRW Provinsi Kalimantan Timur (Draft Raperda)

Sistem jaringan jalan yang ada terdiri atas jalan kolektor I dan III, tidak dijumpai adanya jaringan jalan arteri maupun provinsi. Hal ini dapat dipahami, karena sebagai provinsi baru yang wilayahnya merupakan gabungan dari beberapa wilayah kabupaten atau kota, sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik. Belum semua wilayah kabupaten atau kota terhubung dengan sistem jaringan jalan yang memadai, seperti di wilayah Kabupaten Nunukan bagian utara dan Kabupaten Malinau. Dengan demikian, sistem pergerakan maupun keterhubungan antar wilayah di dalam provinsi ini masih belum optimal. Pergerakan jarak jauh lewat darat dengan kecepatan tinggi belum dapat diwadahi, keterhubungan antar kabupaten atau kota menjadi terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pusat-pusat kegiatan dengan hirarki lebih rendah kesulitan untuk mengakses jalan-jalan penghubung utama tersebut.

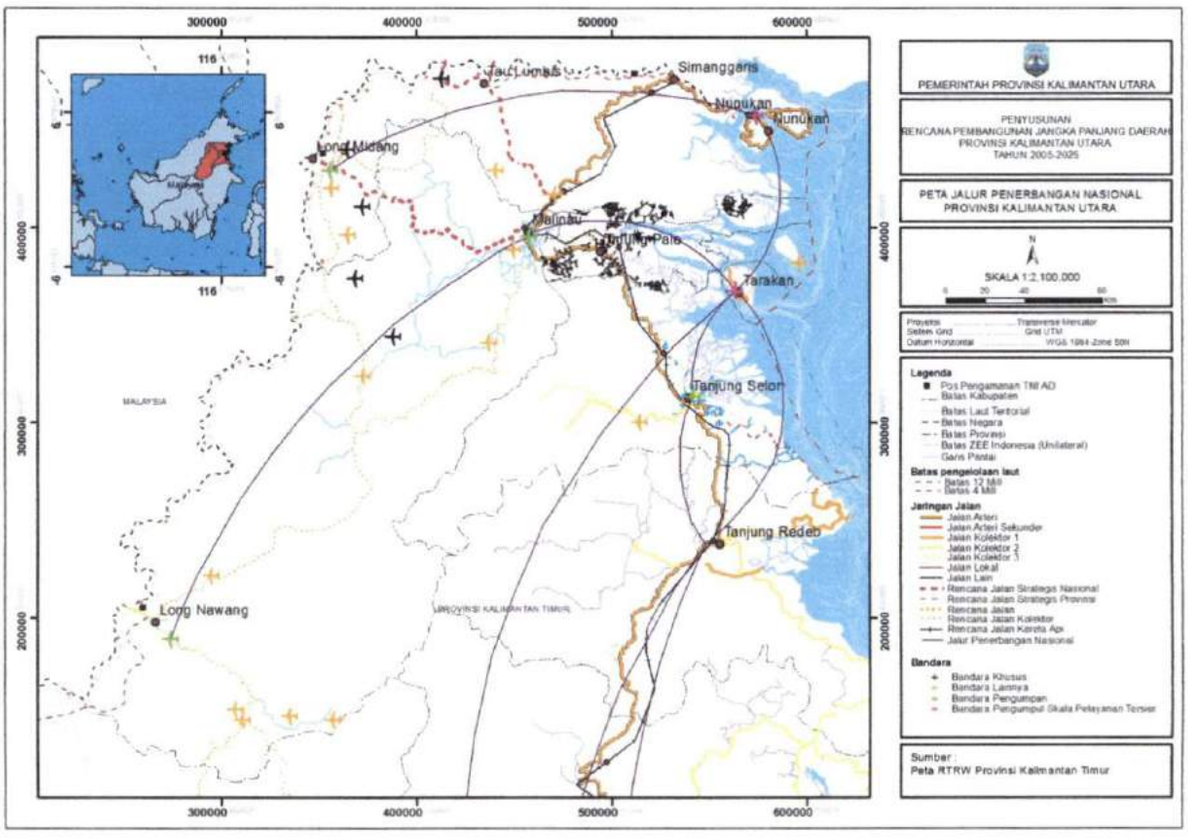
3.1.5. Terbatasnya Layanan Transportasi

Permasalahan keterhubungan antar wilayah diakibatkan oleh ketersediaan layanan transportasi yang masih terbatas, baik transportasi darat, sungai, laut dan udara. Layanan transportasi darat menunjukkan peningkatan jumlah penumpang dan barang berbagai moda transportasi (darat, laut, sungai, udara) pada lima tahun terakhir (2008-2012). Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan permintaan kebutuhan layanan untuk masing-masing moda tersebut. Namun demikian kondisi tersebut belum didukung dengan peningkatan layanan transportasi dalam bentuk jumlah armada yang melayani, terlihat dari penurunan rasio jumlah armada angkutan dengan jumlah penumpang, yakni angkutan darat (0,1) dan angkutan laut (0,07). Sementara itu jumlah fasilitas transportasi berupa pelabuhan udara, pelabuhan laut dan jumlah terminal masih konstan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan armada di Provinsi Kalimantan Utara semakin meningkat. Peningkatan jumlah penumpang selama lima terakhir yang tidak diikuti oleh peningkatan layanan transportasi akan mengakibatkan terhambatnya pergerakan orang, barang dan jasa antarwilayah yang pada akhirnya akan memperlambat pembangunan daerah.

Permasalahan layanan transportasi pada umumnya berupa jumlah armada terbatas yang mengakibatkan frekuensi layanannya rendah atau dapat berupa faktor muat (*load factor*) yang tinggi ditunjukkan oleh jumlah penumpang yang berjejal, tidak semuanya mendapatkan tempat duduk. Selain itu ketersediaan terminal angkutan darat, pelabuhan udara dan pelabuhan laut/sungai merupakan pendukung dari ketersediaan layanan transportasi. Meskipun Provinsi Kalimantan Utara memiliki 28 pelabuhan udara, 6 pelabuhan sungai/laut dan sejumlah terminal angkutan darat namun layanan yang diberikan masih sangat terbatas terkait dengan keterhubungan layanan transportasi tersebut dengan wilayah-wilayah yang ada. Sebaran fasilitas layanan transportasi juga berpengaruh dalam kemudahan pencapaian suatu wilayah. Secara umum sebaran fasilitas layanan transportasi udara di Provinsi Kalimantan Utara belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota secara merata demikian pula sebaran layanan transportasinya. Frekuensi layanan juga menjadi kendala pula dalam konteks keterhubungan wilayah. Semakin tinggi frekuensi layanan transportasi semakin mudah masyarakat mengakses suatu wilayah dan semakin baik keterhubungan antar wilayah.

Keberadaan terminal dan jumlah angkutan darat merupakan salah satu penanda kinerja transportasi darat di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara (2014), Kabupaten Tana Tidung merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki terminal, meskipun demikian semua kabupaten/kota memiliki angkutan umum, dimana angkutan umum tersebut terdiri dari angkutan kota, angkutan desa, dan bahkan di Kabupaten Malinau terdapat angkutan Damri. Permasalahan mendasar terkait dengan sebaran layanan transportasi darat adalah ketersediaan jaringan jalan yang belum merata hingga wilayah terpencil. Kondisi ini akan mempersulit angkutan umum darat dapat masuk hingga ke pedalaman. Disamping itu juga kondisi jalan yang tidak menunjukkan karakter '*all-weather road*' mempersulit ketersediaan kondisi jalan yang baik pada musim penghujan, yang akan berakibat pada keterhubungan wilayah akan menjadi terganggu.

Sementara dari layanan transportasi udara, dari kelima kabupaten/kota yang ada, hanya Kabupaten Tana Tidung yang tidak memiliki bandara, sehingga total keseluruhan bandara yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 28 unit. Perlu dicatat bahwa layanan transportasi udara merupakan layanan transportasi utama khususnya untuk daerah terpencil dan pedalaman yang hingga saat ini tidak terjangkau oleh layanan transportasi darat. Bandara yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara ini selain melayani penerbangan domestik, juga melayani penerbangan internasional (Bandara Juwata, Tarakan). Dari ke-28 bandara tersebut, sebagian besar merupakan bandara dengan layanan penerbangan perintis. Meskipun demikian, bandara-bandara di Provinsi Kalimantan Utara tersebut belum didukung dengan frekuensi layanan penerbangan yang memadai, sehingga menimbulkan permasalahan keterhubungan antar wilayah, baik dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun ke luar wilayah provinsi. Keterhubungan dengan wilayah lain di luar provinsi sudah diwadahi dengan adanya rute penerbangan dari Kota Tarakan, ke berbagai kota di Provinsi Kalimantan Timur maupun kota-kota lain di Pulau Jawa.



Gambar 3.1.7

Rute Penerbangan di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Peta RTRW Provinsi Kalimantan Timur (Draf Raperda)

Perlu dicatat bahwa tranportasi air (sungai dan laut) merupakan transportasi utama selain transportasi udara untuk keterhubungan antar wilayah, mengingat transportasi darat belum menjangkau seluruh wilayah di provinsi ini. Berbagai layanan moda transportasi yang saling bersinergi akan memperkuat sistem transportasi multi moda untuk terciptanya keterhubungan antar wilayah. Peran penting jumlah dan lokasi pelabuhan serta ketersediaan armada angkutan akan meningkatkan kinerja layanan transportasi air dan keterhubungan wilayah. Berbagai permasalahan terkait dengan jumlah dan sebaran fasilitas layanan transportasi serta kinerja layanan berbagai moda transportasi tersebut akan memberikan kendala terhadap keterhubungan wilayah yang pada akhirnya menghambat aksesibilitas layanan sosial maupun ekonomi, mempersulit pengelolaan berbagai potensi yang ada dan pada akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah di provinsi ini.

3.1.6. Rendahnya Akses dan Ketersediaan Utilitas

Permasalahan yang muncul terkait sektor perumahan adalah pemanfaatan energi listrik pada skala rumah tangga yang cukup rendah, bahkan selama tahun 2008-2012 terjadi kecenderungan penurunan jumlah rumah tangga pengguna listrik. Jika dibandingkan dengan SPM sebesar 100%, rumah tangga pengguna listrik di Provinsi Kalimantan Utara jauh lebih rendah yakni sebesar 35,88%, sehingga dapat dikatakan sebagian besar wilayah provinsi ini belum teraliri listrik. Rendahnya akses rumah tangga terhadap kebutuhan energi listrik akan berakibat pada rendahnya produktivitas rumah tangga karena rumah tangga tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Di masa depan jika hal ini tidak diperhatikan sejak saat ini akan menjadi persoalan terkait dengan rendahnya kemampuan wilayah provinsi ini untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah lain karena kegiatan ekonomi rumah tangga terhambat karena keterbatasan energi listrik.

Permasalahan perumahan lainnya adalah rendahnya rumah tangga pengguna air bersih, selama tahun 2008-2012 perkembangan rumah tangga pengguna air bersih cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat (36,02%) pada kondisi tahun 2012. Sementara nilai SPM yang ditetapkan sebesar 55-75%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses air bersih secara merata, diduga hal ini berkaitan pula dengan terbatasnya ketersediaan air permukaan dan air bawah tanah.

Belum tercapainya nilai SPM terdapat pada persentase rumah tinggal bersanitasi perkembangan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Nilai indikator persentase rumah tinggal bersanitasi (51,2%) yang masih terlampau jauh di bawah nilai standar pelayanan minimum yang ditetapkan (80%). Hal ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan oleh *stakeholder* terkait, oleh karena indikator sanitasi berkaitan dengan kualitas kesehatan masyarakat. Jika permasalahan sanitasi tidak diperhatikan, di masa depan akan menjadi salah satu faktor penghambat bagi terciptanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pada akhirnya memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi ini. Rendahnya kualitas kesehatan tersebut akan berpengaruh tehadap rendahnya kualitas sumber daya manusia di provinsi ini, sebagai akibat lebih lanjut sumber daya manusia provinsi ini akan kalah bersaing dalam menghadapi era globalisasi maupun Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan tahun 2015 nanti.

3.1.7. Kurang Meratanya Jaringan Komunikasi dan Informatika

Meski ketersediaan sarana komunikasi dan informasi sudah cukup lengkap terkait jumlah sarana komunikasi, warung telekomunikasi (wartel) atau warung internet (warnet), penyiaran TV, pameran/expo dan surat kabar, namun dengan wilayah yang sangat luas diperlukan jaringan komunikasi dan informasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Permasalahan yang ada lebih banyak terkait dengan belum meratanya jaringan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah ini, tidak semua kabupaten/kota dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi sama baik.

Dalam lima tahun terakhir secara umum jumlah sarana komunikasi terjadi peningkatan dan diikuti dengan penurunan jumlah wartel/warnet serta jumlah pameran/expo. Sedangkan jumlah penyiaran TV, jumlah surat kabar yang beredar serta keberadaan website pemerintah relatif tetap. Meski jumlah sarana komunikasi meningkat, tidak ada informasi yang jelas terkait dengan kemudahan akses ke layanan komunikasi dan informasi. Dari sisi jumlah media informasi tidak terlihat adanya peningkatan. Dengan kondisi wilayah yang sangat luas tersebut tentunya sangat dibutuhkan adanya akses informasi maupun ketersediaan layanan komunikasi yang baik yang mampu menjangkau seluruh wilayah hingga ke wilayah terpencil maupun wilayah perbatasan dengan negara Malaysia.

Keterbatasan akses informasi dan ketersediaan layanan komunikasi jika tidak diatasi sejak saat ini akan menimbulkan persoalan baru di masa depan, oleh karena informasi dan komunikasi yang baik merupakan prasyarat untuk mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah. Rendahnya akses informasi dan terbatasnya layanan komunikasi akan berpengaruh terhadap berkembangnya kegiatan ekonomi wilayah yang menjadi pemacu

perekonomian daerah maupun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pendidikan maupun kesehatan, oleh karena di era globalisasi ini informasi semakin cepat berubah. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, maka kebutuhan akan ketersediaan layanan komunikasi yang memadai serta akses informasi yang semakin mudah menjadi prasyarat utama dalam pembangunan daerah mengingat provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Tanpa sarana prasarana komunikasi dan informasi yang memadai, mudah diakses dan tersebar secara merata hingga wilayah terpencil maka provinsi ini akan selalu tertinggal dengan negara tetangga.

3.1.8. Rendahnya Penanganan dan Pelayanan Sosial

Kesejahteraan sosial terkait dengan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin termasuk anak asuh, anak terlantar, penyandang masalah sosial dan penduduk dengan kemampuan berbeda (cacat). Kondisi pelayanan sosial di provinsi ini dalam penyediaan sarana sosial antar kabupaten/kota masih sangat kurang. Kondisi ini terlihat dari perkembangan sarana sosial yang cukup berfluktuasi selama lima tahun terakhir meskipun menunjukkan kecenderungan menurun, dan belum memenuhi target yang disyaratkan dalam SPM. Sementara penanganan pelayanan sosial seperti pemberian bantuan sosial pada PMKS saat ini sudah cukup baik, dengan tercapainya target SPM, namun perlu terus ditingkatkan baik jangkauan maupun mutu pelayanan. Sementara aspek penanganan PMKS untuk masing-masing kabupaten/kota masih kurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perhatian dalam pengelolaan bidang sosial masih belum optimal.

Perlu dicatat bahwa di provinsi ini terdapat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yakni KAT Dayak Punan dan Dayak Berusu yang tinggal di Kecamatan Sekatak (Kabupaten Bulungan); KAT Lundayeh yang tinggal di Kecamatan Krayan (Kabupaten Nunukan), serta Komunitas Adat Terpencil lainnya yang diperkirakan masih banyak yang mendiami wilayah Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan yang belum terdata. KAT yang belum terdata tersebut dimungkinkan belum mendapatkan penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial, oleh karena KAT tersebut tinggal berpindah-pindah.

Pada tahun 2013, Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya KAT di Desa Ketaban, Kecamatan Sebuku (Kabupaten Nunukan) dengan bantuan sebanyak 137 unit rumah; proyek permukiman di Pulau Keras, Kecamatan Sebakung (Kabupaten Nunukan) untuk 77 KK; serta bantuan 100 unit rumah di Kabupaten Bulungan. Hingga saat ini penanganan dan pelayanan terhadap Komunitas Adat Terpencil tersebut masih kurang.

Sebagai daerah otonomi baru, tantangan di masa depan yang harus dihadapi Provinsi Kalimantan Utara yakni harus mampu membangun dan mengembangkan kebijakan sosial sebagai langkah strategis penanganan masalah kesejahteraan sosial. Keterjangkauan akses untuk mengurangi persoalan kesenjangan sosial masyarakat harus dapat dilaksanakan antar seluruh kabupaten/kota. Selama lima tahun terakhir ini pengelolaan sistem jaminan sosial masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah kabupaten/kota, khususnya di wilayah perbatasan. Selain itu dalam pelaksanaannya aspek kerjasama antar stakeholder masih kurang. Di masa mendatang Provinsi Kalimantan Utara harus mampu menjamin terlaksananya sistem kelola pelayanan dan jaminan sosial masyarakat lintas daerah terutama di wilayah perbatasan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga sistem ketahanan sosial masyarakat dan mendekatkan peran negara dalam usaha menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang.

3.1.9. Rendahnya Ketahanan Pangan

Rendahnya ketahanan pangan provinsi ini terlihat dari rendahnya kecukupan ketersediaan pangan, ketersediaan pangan utama dan indeks ketahanan pangan.

A. Kecukupan Ketersediaan Pangan

Secara fisik daya dukung lahan pertanian di provinsi ini relatif rendah, sehingga secara regional belum memiliki kemampuan untuk mencukupi ketersediaan pangan yang berasal dari hasil produksi sendiri sejak tahun 2008-2012. Selama kurun waktu tersebut daya dukung lahan pertanian provinsi ini masih di bawah 1, yakni 0,000900 (tahun 2008) dan 0,000910 (tahun 2012), artinya sebagai sebuah wilayah Provinsi Kalimantan Utara belum mampu swasembada pangan. Nilai daya dukung lahan pertanian Kabupaten Bulungan relatif lebih baik jika dibandingkan nilai daya dukung lahan pertanian kabupaten/kota lainnya, meskipun tetap berada di bawah 1, yakni 0,001665 (tahun 2009) kemudian meningkat menjadi 0,002378 (tahun 2012). Ketidakmampuan untuk berswasembada pangan akan berakibat pada ketidakmampuan wilayah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Dengan demikian ketersediaan beras di provinsi ini jika dilihat dari kemampuan menyediakan kebutuhan kalori per kapita sebesar setara 265 Kg beras/kapita/tahun belum tercukupi. Pangan, khususnya beras yang belum mampu tersedia untuk mencukupi kebutuhan pangan di provinsi ini menjadi permasalahan yang cukup penting, terlebih ketika di masa datang jumlah penduduk akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan wilayah.

Belum tercukupinya ketersediaan pangan tersebut terkait dengan rendahnya rata-rata produktivitas padi dan luas panen. Rendahnya produktivitas padi tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pertanian maupun infrastruktur pendukung lain yang dapat mendukung peningkatan produktivitas padi. Potensi peningkatan produksi total pertanian khususnya beras masih memilki peluang untuk ditingkatkan 50-100%, sehingga total produksi dapat mencapai 2-3 kali lipat dari kondisi saat ini, baik melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan juga diversifikasi dalam arti luas. Perlu dicatat pula bahwa keterbatasan infrastruktur transportasi sebagai pendukung sistem distribusi hasil pertanian menjadi permasalahan yang dapat mengganggu keterjangkauan dan distribusi ketersediaan pangan dengan baik, mengingat sebagian besar wilayah masih rendah aksesiblitasnya dan belum terjangkau jaringan jalan. Kekurangan produksi saat ini hendaknya menjadi perhatian khusus untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan wilayah.

B. Ketersediaan Pangan Utama

Tiga komponen utama ketahanan pangan menurut WHO, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan kriteria kebutuhan pangan yang diukur denga setara beras per kapita/tahun sebesar 120 Kg), maka kecukupan pangan di provinsi ini mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 sudah tercukupi. Namun demikian kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat kebutuhan manusia tidak hanya terpenuhi oleh kebutuhan yang hanya bersumber dari beras, tetapi secara keseluruhan dinilai dalam kecukupan kalori per kapita yang setara denga 265 Kg beras/kapita/tahun. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketesediaan pangan utama di provinsi ini baru terpenuhi setengahnya. Dengan demikian kebutuhan pangan provinsi ini masih belum mandiri. Kota Tarakan merupakan wilayah yang masih sangat tergantung dari luar wilayah untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan minimum, mengingat ketersediaan pangan utama kota ini sejak tahun 2007 cukup rendah (0,05 Kg/kapita/tahun), sedikit meningkat tahun 2012 menjadi 0,55 Kg/kapita/tahun. Hal ini dapat dipahami karena wilayah ini merupakan pulau kecil yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan lahan pertanian secara ekstensifikasi, selain karena wilayah ini merupakan pusat jasa dan perdagangan, sehingga kecukupan pangan wilayah ini harus disuplai dari luar wilayah

Ketersediaan pangan utama tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan lahan untuk tanaman pangan utama. Selama tahun 2007-2012 luas lahan sawah cenderung mengalami peningkatan meskipun lambat dan perkembangannya cukup fluktuatif seperti telah dikemukakan di Bab II. Peningkatan luas lahan sawah yang cukup tinggi (95,24%) terjadi di Kabupaten Bulungan, dengan rata-rata pertumbuhan 14,32% per tahun. Peningkatan yang cukup pesat di Kabupaten Bulungan tersebut dimungkinkan karena keberadaan *Delta Kayan Food Estate*, yang pada awalnya ditujukan untuk menjamin kemandirian pangan di Provinsi Kalimantan Timur, sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk.

Perkembangan total produksi padi selama tahun 2007-2012 yang cenderung mengalami peningkatan dari akan memiliki dampak positif terhadap ketahanan pangan wilayah. Peningkatan total produksi padi berarti juga terjadi peningkatan total produksi beras. Jika mempertimbangkan proyeksi penduduk hingga tahun 2025 dimana jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan sejumlah 802.102 orang dengan konsumsi beras sebesar 96.252,18 ton maka pada tahun 2025 provinsi ini mengalami defisit beras sejumlah 22.253,50 ton. Hal ini patut menjadi perhatian dalam upaya menjamin ketahanan dan kemandirian pangan bagi provinsi ini.

Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan akan selalu muncul, mengingat jumlah penduduk akan semakin bertambah, sementara pertambahan penduduk tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lahan pertanian, bahkan lahan pertanian cenderung mengalami penurunan luas karena perubahan fungsi. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke arah pemanfaatan non pertanian merupakan ancaman terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang sangat berpengaruh terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahan.

Ketersediaaan lahan pertanian akan memberikan fungsi produksi jika didukung dengan ketersediaan sarana prasana produksi seperti air dan serta jaringan sampai ke petak produksi, sehingga proses produksi padi terjamin. Saat ini luas jaringan irigasi masih sangat terbatas. Lahan sawah yang sudah mendapatkan jaringan irigasi baru sebagian kecamatan yaitu di Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas di Kabupaten Bulungan. Ketersediaan benih padi saat ini sangat terbatas. Hingga sat ini produksi benih masih terbatas di Kabupaten Nunukan dengan luas dan produksi benih yang masih perlu ditingkatkan. Lahan sawah di kabupaten lainnya pada umumnya merupakan lahan sawah tadah hujan, belum didukung sarana irigasi, dengan penanaman padi hanya satu kali dalam satu tahun. Kecukupan air untuk pertumbuhan tanaman padi berasal dari air hujan yang memang relatif merata sepanjang tahun. Ketersediaan air yang melimpah perlu diimbangi dengan pola pengelolaan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung produksi pertanian, mengurangi kerusakan alam dan lingkungan. Selain itu peningkatan ketersediaan lahan pertanian produktif baru melalui pencetakan sawah dan reklamasi lahan bekas

tambang yang masih memiliki potensi serta pembangunan pertanian lahan kering di berbagai bagian wilayah Provinsi Kalimantan Utara harus menjadi pertimbangan utama.

Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju peningkatan kemampuan produksi. Rendahnya peningkatan produktivitas tanaman di tingkat petani relatif stagnan, dimungkinkan karena terbatasnya kemampuan produksi, belum tersedianya kelembagaan petani, serta terbatasnya tenaga penyuluh pertanian. Terbatasnya kapasitas produksi pangan antara lain disebabkan oleh: (1) berlangsungnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) terbatasnya sarana pengairan; (5) kerusakan yang disebabkan oleh banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah berkurang; (6) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan pasca panen, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan dengan proporsi yang cukup tinggi.

Berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan dan ketergantungan pangan pada komoditas tunggal seperti padi harus diubah dengan diversifikasi sumber pangan untuk memenuhi pangan yang berkualitas. Jenis tanaman sebagai sumber pangan khususnya karbohidrat tidak hanya tergantung pada beras. Dalam rangka menuju kecukupan gizi (karbohidrat) maupun nutrisi lainnya, pengembangan tanaman pangan di luar padi sebagai pangan utama harus mendapat perhatian utama dalam pengembangan atau budidaya sebagai sumber karbohidrat alternatif, sehingga tidak terjadi gangguan pada kecukupan ketersediaan beras dan tidak terjadi ketergantungan pada impor.

C. Indeks Ketahanan Pangan

Dilihat dari indeks ketahanan pangan komposit, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dan *World Food Programme* tahun 2009, yang terdiri dari ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan serta pemanfaatan pangan dan gizi, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota termasuk dalam kategori prioritas kerawanan pangan. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan merupakan dua kabupaten yang termasuk dalam kategori prioritas kerawanan pangan berdasarkan indeks ketahanan pangan komposit. Indeks ketahanan pangan komposit terdiri dari ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan serta pemanfaatan pangan dan gizi. Kabupaten Nunukan termasuk kategori kerawanan pangan prioritas 2 dengan peringkat 60 dari 346 kabupaten terdata, sedangkan Kabupaten Malinau termasuk kategori kerawanan pangan prioritas 3 dengan peringkat 84. Kategori kerawanan pangan prioritas 2 sangat ditentukan oleh: (1) *underweight* pada balita, (2) desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4, (3) tanpa akses terhadap air bersih, (4) kemiskinan, dan (5) tanpa akses terhadap listrik. Sedangkan kategori kerawanan pangan prioritas 3 ditentukan oleh: (1) *underweight* pada balita, (2) kemiskinan, (3) tanpa akses terhadap air bersih, (4) tidak memadainya produksi pangan pokok, dan (5) tanpa akses terhadap listrik.

Demikian juga jika dilihat dari indeks ketahanan pangan komposit dan indikator individu yang meliputi rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan serelia, akses penghubung yang memadai, akses terhadap listrik, angka harapan hidup, berat badan balita, perempuan buta huruf, akses terhadap air bersih dan akses terhadap fasilitas kesehatan, Kabupaten Nunukan berada di peringkat 287 dari 346 kabupaten yang terdata, sedangkan Kabupaten Malinau di urutan ke 263 dan Kabupaten Bulungan di urutan ke 205 sebagai kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan pangan.

3.1.10. Degradasi Lingkungan Akibat Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Tidak Berkelanjutan

Sampai dengan tahun 2010, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai lahan kritis yang cukup luas, yaitu sekitar 1,13 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 0,5 juta hektar di luar kawasan hutan. Terjadinya lahan kritis di dalam kawasan hutan disebabkan oleh adanya pemanfaatan kawasan hutan yang tidak memenuhi prinsip kelestarian hutan, seperti *overlogging*, permudaan yang gagal, ataupun kegiatan pemanfaatan di luar kehutanan yang merusak kawasan hutan seperti pembalakan liar dan perambahan kawasan. Kawasan Hutan Lindung juga mengalami degradasi. Kawasan Hutan Lindung di Kota Tarakan dan Pulau Nunukan mengalami tekanan yang berat oleh perluasan lahan pemukiman masyarakat dan perluasan areal perkotaan.

Kasus yang spesifik terkait pemanfaatan kawasan hutan mangrove oleh para petani tambak udang. Kawasan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang dimanfaatkan kurang lebih 2.000 KK petambak udang yang mengelola sekitar 50.000 ha lahan tambak[1]. Kawasan mangrove ini menjadi kawasan yang terbuka akibat pembukaan lahan tambak yang sangat massif. Legalitas kawasan menjadi sangat penting karena sebagian besar produk udang merupakan komoditi ekspor, dimana aspek legalitas adalah sangat penting.

Degradasi lingkungan juga terjadi akibat usaha pertambangan. Usaha pertambangan terutama emas dan batubara yang tidak diikuti oleh pengelolaan lingkungan yang baik akan menyebabkan risiko kerusakan lingkungan pada lokasi dan lingkungan sekitarnya. Selain rusaknya lapisan atas tanah, pertambangan yang tidak dikelola

[1] Informasi diperoleh dari perwakilan Dinas Perikanan pada *Focus Group Discussion* dengan SKPD, pada tanggal 15 Juli 2014.

dengan baik juga dapat menyebabkan tercemarnya air permukaan dan air tanah karena meningkatnya pH air (air asam tambang). Daerah genangan bekas penambangan dapat meningkatkan perkembangan distribusi nyamuk malaria atau demam berdarah. Perkembangan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penambangan tanpa ijin yang dapat ditertibkan menunjukkan kecenderungan menurun, dalam pengertian jumlah yang tidak dapat ditertibkan semakin naik. Hal ini terjadi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan. Jika tidak ditertibkan maka pertambangan tanpa ijin ini akan berpotensi merusak lingkungan karena sulit diawasi dan dikendalikan. Selain berpotensi terhadap kerusakan lingkungan juga merugikan pemerintah daerah karena pertambangan tanpa ijin tidak dapat memberikan kontribusi resmi kepada pendapatan daerah. Hal lain adalah menyangkut tata-kelola ketenagakerjaan yang tidak dapat mengikuti aturan formal karena keberadaan usaha yang *illegal.*

3.1.11. Menurunnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan sejumlah aktivitas pendorong yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan masyarakat dan desa. Program pemberdayaan masyarakat dan desa erat kaitannya dengan tingkat pembangunan perekonomian, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kesehatan, ketahanan pangan, dan akses pelayanan. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan di Bab II, terdapat penurunan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan penurunan program pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota. Penurunan ini terlihat pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Di masa depan keadaan ini akan menjadi permasalahan karena aspek pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sebagai langkah utama mengatasi PMKS tidak berjalan efektif. Bukti lain yang menguatkan adalah adanya kenaikan jumlah masyarakat yang tergolong PMKS. Capaian indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa jika dibandingkan dengan SPM, maka capaian indikator kinerja tersebut tidak tercapai.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa di provinsi ini dihadapkan pada mekanisme baru. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beragam penyesuaian harus segera dilakukan yakni dengan melihat kondisi sistem kelembagaan masyarakat, tingkat pemerintahan lokal setingkat desa, dan mekanisme kebutuhan skema pemberdayaan yang cocok dengan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Dalam waktu dekat provinsi ini membutuhkan sistem tata kelola pemberdayaan baru dan diperkuat dengan regulasi daerah agar mempunyai legitimasi dalam melaksanakan amanat UU No. 6 Tahun 2014.

3.1.12. Rendahnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagian besar Indeks pemberdayaan perempuan (IDG) kabupaten/kota di provinsi ini masih di bawah IDG Provinsi Kalimantan Timur maupun IDG nasional. Rendahnya IDG ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih sangat terbatas. Komponen pembentuk IDG adalah keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi kepemimpinan dan ketatalaksanaan, dan sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2012 partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah semua kabupaten/kota di provinsi ini berada di bawah partisipasi perempuan di Provinsi Kalimantan Timur (38,49).

Demikian juga partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Kalimantan Utara selama 2008-2012 cenderung mengalami penurunan. Jika dibandingkan angka partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur (42,01%), partisipasi angkatan kerja perempuan hampir semua kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012 lebih rendah. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan mengisyaratkan terbatasnya kesempatan kerja perempuan dan peluang kerja yang tersedia bagi perempuan. Kesempatan dan peluang kerja yang terbatas tersebut dimungkinkan karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dimana rata-rata lama sekolah perempuan lebih pendek dan relatif rendahnya angka melek huruf. Kondisi ini selanjutnya akan mengakibatkan rendahnya sumbangan pendapatan perempuan. Meskipun jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka IPG sebagian besar kabupaten/kota di provinsi ini sedikit berada di atas IPG Provinsi Kalimantan Timur (61,86), akan tetapi lebih rendah dari IPG nasional (68,52) pada tahun 2013. Kondisi IPG ini mengisyaratkan bahwa kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan masih relatif rendah, meskipun selama tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan.

Demikian pula perlindungan terhadap anak yang rendah terlihat dari rasio anak yang memiliki akte kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2013 dimana sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan rasio yang masih berada di bawah nilai SPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan hak sebagai warga negara masih rendah. Anak yang tidak memiliki akte kelahiran akan mengakibatkan terbatasnya

hak yang dapat dimiliki anak untuk memperoleh pelayanan secara formal dari negara, seperti pendidikan, kesehatan, maupun hukum.

3.1.13. Belum Tertatanya Pengelolaan dan Revitalisasi Aset Warisan Budaya

Budaya merupakan peninggalan yang tidak ternilai harganya. Budaya merupakan simbol peradaban perkembangan manusia yang harus tetap lestari walaupun telah melalui perkembangan lintas generasi. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, sejarah Kesultanan Bulungan, sejarah kebudayaan masyarakat, sejarah wilayah perbatasan merupakan peninggalan budaya yang harus terjaga kelestariannya. Namun kecenderungan yang terjadi, perlindungan dan pengelolaan terhadap peninggalan cagar budaya fisik maupun non fisik masih sangat sebagai aset budaya belum terkelola dengan baik. Berdasarkan data yang ada baru terlihat Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kota Tarakan sebagai daerah yang sudah berupaya dalam pengelolaan aset kebudayaan, sementara dua kabupaten lainnya seperti Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung masih sangat kurang.

Regulasi khusus mengenai manajemen pengelolaan dan revitalisasi aset warisan budaya belum tersedia. Selain sistem pengelolaan pendataan belum tertata dengan baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan *database* secara komprehensif. Langkah pengamanan aset ini sebenarnya dapat menjadi sebuah karakter budaya yang menandakan ciri khas keunggulan Provinsi Kalimantan Utara. Pelestarian adat ini meliputi berbagai hasil kebudayaan seperti kerajinan, upacara adat, tarian, baju adat, pelembagaan adat, dan sistem mekanisme kehidupan adat. Tidak sekedar membutuhkan perhatian saja tetapi diperlukan juga wujud nyata upaya perlindungan sebagai bagian hak kekayaan intelektual budaya di Indonesia.

Kebudayaan merupakan aset strategis yang dapat dikembangkan menjadi potensi wisata jika dapat dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya. Provinsi Kalimantan Utara sudah memiliki modal dasar yakni sudah ada upaya pelestarian aset fisik, upaya tersebut pada masa mendatang akan berfungsi sebagai pengamanan cagar budaya dan menjadi potensi wisata minat khusus sejarah. Di masa depan, sebagai daerah otonomi baru, perkembangan pengelolaan sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan akan mampu menjadi sumber penerimaan daerah. Adat istiadat yang masih kuat di provinsi ini serta sejarah masa lalu sebagai peninggalan Kerajaan Bulungan menjadi salah satu potensi untuk perkembangan wisata seni sejarah dan budaya. Aset peninggalan fisik juga dapat memperkuat atraksi wisata yang dapat dijadikan simbol rekam jejak perkembangan sejarah. Pengelolaan festival budaya yang diharapkan dapat dikelola secara lebih baik akan menjadi potensi sebagai penambah daya tarik perkembangan kemajuan sektor pariwisata khususnya dalam rangka kegiatan promosi wisata. Maka aspek pengelolaan festival budaya ini akan menjadi sangat penting dalam mendukung promosi wisata di Provinsi Kalimantan Utara. Selain sebagai kegiatan promosi, festival ini juga dapat dijadikan atraksi wisata minat khusus terutama wisata pengembangan adat dan budaya, seperti festival Erau.

3.1.14. Belum Terkelolanya Kepemudaan dan Olah Raga

Olah raga dan kepemudaan selama ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mempersiapkan regenerasi sumber daya manusia di masa depan. Pembangunan kepemudaan merupakan hal penting dalam upaya regenerasi sumber daya manusia Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi ini memiliki potensi yang cukup besar apabila dilihat dari jumlah sumber daya kepemudaan. Ini merupakan aset yang cukup besar bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk mengelola aktivitas kepemudaan dengan lebih baik sehingga pemuda menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Namun hingga lima tahun terakhir keterlibatan pemuda dalam pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal, terlihat dari sistem pelembagaan sektor kepemudaan seperti jumlah kelompok, grup, dan aktivitas kegiatan yang belum optimal, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemuda masih sangat terbatas. Demikian pula dengan keolahragaan yang ditandai dengan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) masih belum dapat mencapai standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Hal ini mengisyaratkan pemberdayaan sektor pemuda dan olahraga masih sangat kurang.

Sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan dengan tantangan membangun aset kepemudaan dan olahraga dalam mendorong segi pengelolaan dan pemberdayaan lebih intensif untuk menjamin kreativitas dan mendukung upaya kaderisasi generasi di masa mendatang. Pembangunan olah raga juga menjadi salah satu sarana pembentuk karakter pemuda yang tangguh, menghargai orang lain, kerjasama, dan bertanggungjawab. Hal ini harus segera dilakukan mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera dilaksanakan pada tahun 2015. Pemahaman bersama pemuda dan olahraga merupakan aset penting dalam menjamin pelaksanaan pembangunan, hal ini harus segera disadari pemerintah daerah. Di masa depan hal ini akan bermanfaat terutama dalam memahami dan menyelesaikan persoalan mekanisme pemberdayaan dan tata kelola bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan karakter masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

3.1.15. Kehutanan

A. Kesenjangan Akses Terhadap Sumber Daya Hutan[2]

Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara adalah seluas 6,9 juta hektar atau lebih dari 90% luas wilayahnya. Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas total sekitar 3,3 juta hektar. Selain itu terdapat sejumlah Hutan Lindung (HL), seluas 976.687,86 ha dan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang (1.025.879,61 ha) yang pengelolaannya merupakan wewenang pemerintah pusat.

Pemanfaatan sumber daya hutan, terutama kawasan Hutan Produksi, dilaksanakan oleh perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) ataupun hutan tanaman (IUPHHK-HT), dari pengusaha swasta dan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemegang izin pemanfaatan kayu di Kalimantan Utara adalah 33 buah IUPHHK-HA dan 3 buah IUPHHK-HT (2012). Jumlah ini, khususnya hutan tanaman, masih akan bertambah lagi di masa depan dikarenakan beberapa perusahaan baru masih dalam taraf persiapan dokumen AMDAL. Hal ini masih ditambah dengan adanya IUP perkebunan sawit mencapai 615.000 hektar dan IUP pertambangan batubara sekitar 960.000 hektar atau total sekitar 4,85 juta hektar, atau sekitar separuh dari wilayah sudah tertanam investasi skala besar hanya tiga komoditas saja yaitu kayu, sawit dan batubara.

Di lain pihak, pemanfaatan hutan skala kecil (seperti Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Desa/HD, dan Hutan Tanaman Rakyat/HTR) baru pada taraf sedang dimulai. Jika dijumlahkan total luas areal yang dibebani hak pemanfaatan hasil hutan sekitar 2,1 juta hektar, artinya menempati tidak kurang dari 64,5% dari keseluruhan areal HP dan HPT. Ini berarti masih ada sekitar 35,5% yang memungkinkan untuk dikelola langsung oleh KPH atau dicadangkan untuk pengelolaan hutan skala kecil (HKm, HD dan HTR). Ke depan, jika tidak didukung oleh arah kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang memberdayakan masyarakat sekitar hutan, maka sumber daya hutan (khususnya hutan produksi) akan dikelola (dikuasai) oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini perlu diperhatikan mengingat dapat memicu munculnya rasa ketidakadilan dalam hal akses ke sumber daya hutan, dan rawan terhadap konflik sosial.

B. Legalitas Produk Kehutanan

Pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan tentang Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu, antara lain: (1) Menekan laju kerusakan hutan akibat dari pencurian kayu (*illegal logging*); (2) Membuka pintu diperolehnya harga yang lebih mahal (*premium price*); (3) Dipertahankannya ekosistem hutan melalui SFM; dan yang tidak kalah pentingnya adalah (4) Mewujudkan tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*). Hal yang menarik bahwa sebagian besar para pemegang izin pemanfaatan kayu mampu lolos dari verifikasi SFM yang diwajibkan oleh Kementrian Kehutanan beberapa tahun yang lalu melalui Lembaga Penilai Independen (LPI). Kondisi ini disebabkan penilaian yang bersifat wajib (*mandatory*) dari Kementrian Kehutanan ini akan berpengaruh terhadap jatah tebang tahunan yang dapat diberikan kepada perusahaan.

Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 33 buah IUPHHK-HA dan 3 buah IUPHHK-HT (2012). Dari jumlah tersebut yang telah (pernah) memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*/SFM) baru 2 (dua) buah perusahaan pemegangan IUPHHK-HA. Ini berarti bahwa sebagian besar dari pemegang izin pemanfaatan kayu di Provinsi Kalimantan Utara belum dapat memenuhi standar sertifikasi legalitas yang sesuai dengan ketentuan baru dari Kementrian Kehutanan yaitu implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Pengusahaan kayu skala kecil juga perlu diperhatikan. Data resmi tentang pengolahan kayu berupa kayu gergajian (*sawn timber*) di luar Kota Tarakan menunjukkan angka nol, namun dari amatan lapangan di tiap kabupaten dapat ditemui keberadaan unit-unit penggergajian kayu dalam skala kecil. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa data resmi menyatakan nol padahal secara aktual terdapat proses produksi yang terus-menerus di tingkat masyarakat. Apakah hal ini hanya persoalan administrasi pendataan saja atau memang ada faktor lain yang menyebabkan perbedaan antara data resmi dan kenyataan di lapangan? Usaha pengolahan kayu skala kecil harus diberi perhatian, termasuk dalam aspek legalitasnya karena akan sangat mendukung berkembangnya ekonomi rakyat. Secara umum legalitas produk hutan memerlukan perhatian yang serius karena selain untuk menjaga kelestarian juga untuk merespons pasar yang semakin membutuhkan produk-produk yang dapat diverifikasi legalitasnya.

C. Melemahnya Industri Kehutanan

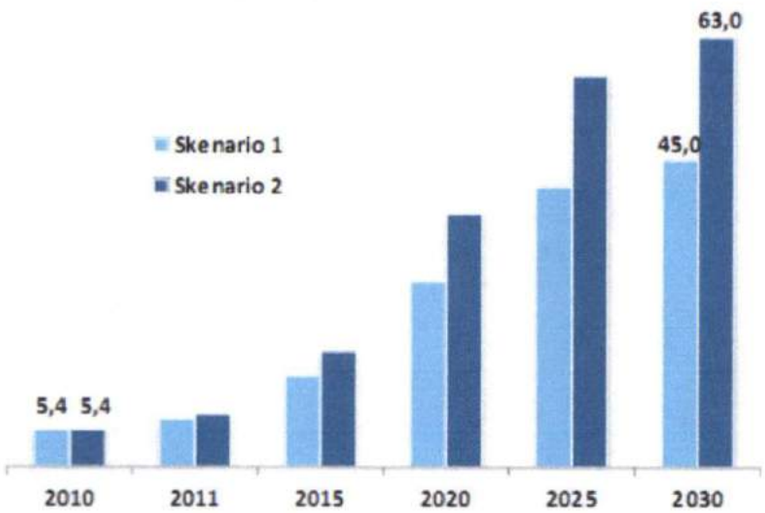
Di banyak daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan adanya kesenjangan antara permintaan bahan baku kayu yang besar dengan pengadaannya, akibat dari semakin berkurangnya potensi hutan (antara lain eksploitasi tidak terkendali dan konversi) dan juga masih dijumpainya bahan baku illegal yang beredar di pasaran. Selama ini industri terlalu mengandalkan kayu dari hutan alam produksi. Sumber bahan baku harus

---

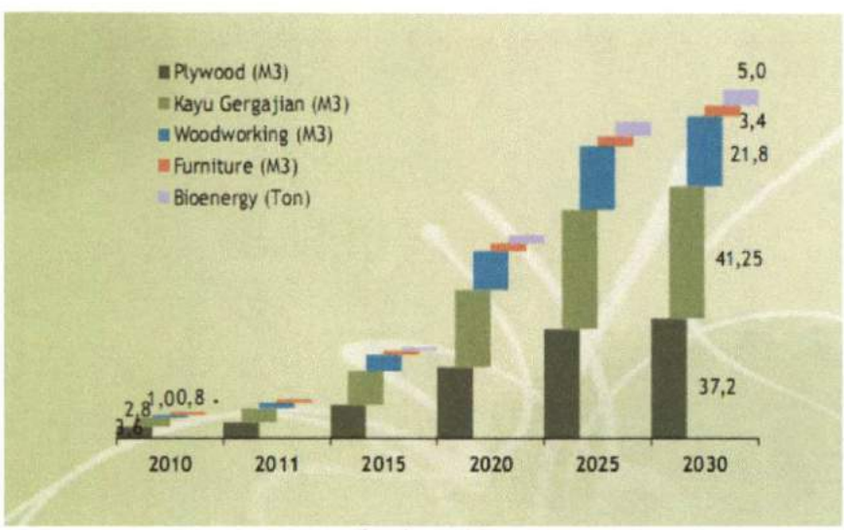
[2] Data pada sub bab ini bersumber dari dokumen Masterplan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

dialihkan dari hutan alam ke hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), dan memanfaatkan kayu hasil peremajaan perkebunan. Akan tetapi untuk Provinsi Kalimantan Utara (dan juga Provinsi Kalimantan Timur) ketiga sumber bahan baku tersebut belum dapat diharapkan mampu memenuhi kapasitas terpasang pabrik yang ada di Provinsi Kalimantan Utara maupun di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2012 industri kehutanan yang berkembang di Kota Tarakan mengalami kemerosotan produksi, bahkan beberapa produk olahan kayu tidak diproduksi lagi, sehingga secara akumulatif industri kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan yang sangat drastis[3]. Hal ini dapat mempengaruhi perekonomian wilayah terutama dalam hal serapan tenaga kerja. Belum ada informasi yang jelas tentang penyebab dari fenomena ini. Namun jika melihat dari perkembangan pada skala nasional, industri kehutanan menghadapi tantangan yang berat terutama terkait dengan harga bahan baku dan efisiensi usaha. Berdasarkan analisa terhadap produk kayu bulat dalam kurun 5 tahun terakhir produksi kayu bulat rata-rata adalah 988.165,2 m3/tahun. Dengan luas hutan produksi sekitar 3,3 juta hektar maka produksi kawasan hutan per satuan luas masih sangat rendah.

Di lain pihak, dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), pemerintah pusat mempunyai target yang cukup tinggi, yaitu kenaikan hingga 12 kali lipat produksi pulp. Target yang cukup tinggi dalam pengusahaan hutan tanaman dan diikuti oleh industri pengolahannya akan diikuti oleh serapan tenaga kerja di sektor kehutanan. Pemerintah pusat telah menetapkan target serapan tenaga kerja pembangunan Hutan Tanaman dan Tenaga Kerja Industri Kehutanan sebanyak 9.314.999 tenaga kerja.



Gambar 3.1.8
Skenario Pengembangan Produksi Pulp Nasional
Sumber: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030



Gambar 3.1.9
Skenario Pengembangan Industri Berbasis Kayu Nasional
Sumber: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030

D. Belum Terkelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

[3] Data statistik (pada BAB II) menunjukkan bahwa banyak produk kayu olahan sejak 2010 menurun drastis dan menghilang pada 2012. Di sisi lain, amatan di lapangan menunjukkan industri kayu olahan sedang berkembang. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan data yang lebih valid.

Hasil hutan bukan kayu sangat beragam di Provinsi Kalimantan Utara, beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun nampaknya hal ini belum menjadi potensi yang dikelola secara serius. Jika dilihat dari kondisi lahan kritis, terdapat tidak kurang dari 1,0 juta hektar dalam kawasan hutan (belum termasuk yang berada di luar kawasan hutan), baik di dalam HP, HL maupun HK. Bagaimana mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan dalam RHL dan atau pengembangan Hasil Hutan Nir-Kayu (*Non-Timber Forest Products*).

Pengembangan hasil hutan non kayu akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pengelolaan sumber daya hutan dan menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hingga saat ini belum ada perhatian yang cukup memadai, sehingga dalam hal data pun pihak pemerintah daerah masih sangat minim. Dengan demikian peran serta pemerintah dalam pengembangan HHBK di Provinsi Kalimantan Utara perlu dirintis sejak awal.

3.1.16. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Menurunnya Produksi Migas

Selama kurun waktu 2007-2012 data produksi migas di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun kondisi ini berbeda sejak tahun 2013 yang mana mulai terjadi penurunan produksi. Penurunan produksi migas dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Faktor teknis umumnya dapat diatasi oleh investor yang bersangkutan, namun yang banyak dikeluhkan justru faktor non teknis seperti perijinan perubahan fungsi lahan untuk menambah sumur produksi, penyelesaian masalah sosial terkait dengan pembebasan tanah, administrasi yang menyangkut aparat birokrasi pemerintahan dan lain-lain yang dapat menjadi kelemahan daerah.

Pemanfaatan potensi migas di Provinsi Kalimantan Utara belum optimal, masih perlu dilakukan eksplorasi dan ekploitasi sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah yang dapat ditingkatkan produksinya maupun nilai tambahnya sehingga kontribusinya terhadap PDRB dapat meningkat. Peluang yang berupa peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah migas sangat bergantung pada usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bekerjasama dengan pihak swasta pelaku bisnis. Ancaman yang timbul adalah munculnya persaingan dengan provinsi lain atau negara lain dalam hal menarik investor untuk menanamkan modalnya. Jika potensi yang ada ini tidak dapat dikelola dengan baik maka tidak akan memberikan manfaat yang memadai bagi perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

B. Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Batubara

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Implikasi dari pemberlakukan kebijakan ini adalah adanya pelarangan ekspor batubara berkalori rendah (bahan mentah). Selain itu sebagai langkah awal pemerintah juga akan menaikkan pajak ekspor. Pelaksanaan kebijakan ini dapat berpotensi menyebabkan penurunan ekspor batubara di tingkat nasional maupun daerah (provinsi). Secara ekonomi daerah penghasil batubara seperti Provinsi Kalimantan Utara akan mengalami penurunan pendapatan dari sektor ini. Jika tidak diantisipasi dengan baik maka larangan ekspor batubara mentah atau berkalori rendah ini dapat berpengaruh cukup besar terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat kontribusi ekonomi pertambangan non migas dari batubara juga cukup besar. Perlu dicatat pula bahwa batubara selama ini masih dipandang sebagai hasil produksi yang memiliki nilai kontribusi tinggi terhadap perekonomian wilayah, meskipun sektor pertambangan merupakan kegiatan yang rentan terhadap kelestarian lingkungan. Selama ini batubara belum dilihat sebagai potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri sebagai energi alternatif yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Pemanfaatan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan energi di provinsi inilah yang harus menjadi perhatian, sehingga batubara tidak lagi menjadi tumpuan utama penggerak perekonomian wilayah, melainkan sebagai pendukung berkembanganya sektor ekonomi lainnya. Menurunnya kontribusi ekonomi pertambangan batubara harus digantikan kegiatan sektor lain yang lebih ramah terhadap kelestarian lingkungan.

3.1.17. Belum Dimanfaatkannya Potensi Kelautan dan Perikanan Secara Optimal

Kelautan dan perikanan selama ini belum menjadi sub-sektor andalan yang dapat memacu perkembangan sektor-sektor lain di provinsi ini. Kontribusi sub-sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah sektor mineral dan pertambangan, meskipun jika dibandingkan sub-sektor lain dalam kelompok pertanian, sub-sektor kelautan dan perikanan ternyata merupakan salah satu sub-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB terus meningkat sejak tahun 2008 bersama-sama dengan sub-sektor tanaman perkebunan. Sedang sub-sektor yang lain dalam kelompok pertanian kontribusi terhadap PDRB semuanya mengalami penurunan. Dengan demikian, sub-sektor kelautan dan perikanan dapat diprediksikan menjadi salah satu sub-sektor yang dapat diandalkan sebagai *prime mover* pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat potensi sumber daya ikan

yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu, potensi perairan baik laut maupun perairan umum (sungai, rawa dan danau) yang besar dan sementara ini belum dimanfaatkan.

Sub-sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara memegang peranan penting dalam produksi perikanan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induknya. Pada tahun 2012 jumlah ikan yang keluar (ekspor dan antar pulau) dari Kota Tarakan mencapai 75,79% dari total Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Sebagian besar komoditas perikanan yang diekspor adalah berupa udang beku (82,05%). Dengan demikian Kota Tarakan telah menjadi pusat distribusi (pintu gerbang) produk perikanan dari Provinsi Kalimantan Utara maupun Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun perdagangan produk perikanan dari Provinsi Kalimantan Utara mendominasi di kawasan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, tetapi ditinjau dari pelaku usaha perikanan masih rendah, yaitu hanya 14.446 RTP pada tahun 2012 (tangkap dan budidaya). Dengan asumsi masing-masing RTP terdiri dari 5 orang (2 orang tua dan 3 anak), maka jumlah penduduk yang menggantungkan diri pada kegiatan kelautan dan perikanan secara langsung adalah sebanyak 72.230 jiwa (12,45%) dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara. Namun demikian, rata-rata hasil ikan yang diperoleh oleh pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudaya) di Provinsi Kalimantan Utara hanya 1,8 ton/tahun/RTP.

Bagi nelayan hasil ikan yang ditangkap masih sangat rendah dan hal ini disebabkan karena rata-rata kepemilikan kapal ikan masih merupakan kapal motor tempel (KMT). Populasi KMT sebesar 63,96%, sedang kapal motor (KM) hanya 21,53%. Dengan KMT dan KM ukuran kecil, maka jangkauan nelayan dalam usaha penangkapan menjadi sangat terbatas areanya, sehingga potensi besar yang ada di laut Provinsi Kalimantan Utara atau WPP-716 yang mencapai 333,60 ribu ton per tahun belum dapat dimanfaatkan. Disamping masih terbatasnya armada penangkapan ikan yang ada, sarana pelabuhan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara juga baru hanya terdapat di Kota Tarakan dan Pulau Nunukan. Dengan demikian tidak berkembangnya usaha penangkapan ikan dapat disimpulkan adalah akibat terbatasnya sarana pelabuhan perikanan, armada penangkapan ikan yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Meskipun sesungguhnya di Provinsi Kalimantan Utara penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau sudah dijinkan pemerintah.

Potensi budidaya yang ada baik untuk perairan umum (sungai, rawa dan danau) maupun laut cukup luas dan tersebar di semua kabupaten/kota. Namun demikian kegiatan budidaya perikanan yang berkembang (>90%) ada di Kabupaten Nunukan. Produksi perikanan budidaya lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan dalam provinsi, kecuali untuk produk udang. Penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana penduduk Kalimantan pada umumnya mempunyai konsumsi ikan yang cukup tinggi dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dengan demikian prospek pengembangan sub-sektor kelautan dan perikanan ke depan cukup baik, mengingat tingkat konsumsi penduduk akan ikan yang tinggi, pemasaran keluar daerah maupun ekspor terbuka lebar melalui pintu gerbang utama Kota Tarakan dan Pulau Nunukan serta potensi yang sangat besar. Sehingga sub-sektor kelautan dan perikanan diperkirakan akan dapat menjadi sub-sektor unggulan dimasa yang akan dapat sepanjang sarana dan prasarana serta SDM tersedia baik kuantitas maupun kualitasnya.

3.1.18. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Pertanian

Provinsi Kalimantan Utara sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, yang meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman industri, peternakan dan perikanan. Kondisi lahan yang luas dan subur, sebaran curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun merupakan potensi dasar yang mendukung berkembangnya sektor pertanian. Sebagian besar wilayah yang berupa dataran (flat) merupakan lahan kering, namun dengan curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun akan mampu memberikan peran dalam upaya peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan pertanian lahan kering secara intensif dan beragam. Pengembangan pertanian lahan kering ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani lahan kering dan pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan mendukung ketahanan pangan wilayah. Namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perkebunan. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya nilai tambah sektor pertanian.

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian ini antara lain karena: (1) Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan khususnya padi; 2) Masih adanya suplai produk-produk pertanian dari luar wilayah; (3) Belum berkembangnya industri-industri pengolahan berbasis produk pertanian. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan kondisi infrastruktur khususnya berupa jaringan jalan maupun irigasi yang mempengaruhi kelancaran distribusi sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan peralatan masih perlu mendatangkan dari luar. Kondisi sarana transportasi yang kurang memadai membuat distribusi sarana produksi pertanian menjadi mahal, di lain pihak biaya angkut hasil pertanian untuk pemasaran juga mahal. Bahkan terdapat beberapa area pertanian menjadi terisolir disebabkan keterbatasan infrastruktur transportasi, seperti di Krayan hasil produksi pertanian tidak dapat dipasarkan ke luar daerah karena sangat tergantung pada transportasi udara yang sangat tergantung pada cuaca, selain karena mahalnya biaya angkut. Oleh karena itu pembangunan sektor pertanian

harus ditopang oleh pengembangan infrastruktur pertanian yang berpihak pada sektor pertanian. Sementara itu tantangan pengembangan sektor pertanian adalah kurangnya keterpaduan antar sub sektor dalam sektor pertanian serta keterkaitan dengan sektor lain sebagai pendukung, khususnya terkait dengan pemasaran produk hasil pertanian maupun infrastruktur pendukung. Kurangnya keterpaduan dalam pengembangan sektor pertanian mengakibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian menjadi tidak optimal dan inefisien.

Selain itu perlu dicatat bahwa sebagian besar penduduk provinsi ini memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Jika sumber daya lahan yang cukup potensial dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal, yang didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas dan memadai di sektor pertanian serta kebijakan sektor pertanian yang mendukung hal ini maka nilai tambah sektor pertanian akan semakin meningkat. Sumber daya pertanian yang berkualitas, terampil dan tangguh akan mampu menguasai teknologi tepat guna sehingga produktivitas pertanian dapat ditingkatkan. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian akan memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuhnya lapangan kerja baru dan terbukanya kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini sedang diupayakan pengembangan kawasan *food estate* di Kawasan Delta Kayan Kabupaten Bulungan, sebagai upaya untuk menjamin ketahanan pangan. Pada awalnya pengembangan kawasan *food estate* ini merupakan kebijakan pembangunan pertanian Provinsi Kalimantan Timur, ketika Provinsi Kalimantan Utara belum terbentuk. Tujuan awal pembangunan kawasan *food estate* adalah upaya mewujudkan salah satu lumbung pangan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah yang saat ini masih mengalami defisit pangan, dengan mengembangkan kegiatan pertanian terintegrasi, baik tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun perikanan, sebagai upaya merubah struktur ekonomi yang bertumpu pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui manjadi sumber daya berbasis kegiatan yang dapat diperbarui.

Sementara sub sektor perkebunan yang saat ini sedang berkembang adalah perkebunan kelapa sawit. Selama tahun 2008-2012 luas lahan perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 119,44% dari 62.609,50 Ha (tahun 2008) menjadi 137.389,00 Ha (tahun 2012). Peningkatan yang cukup tinggi terjadi di Kabupaten Bulungan dari 9.022,50 Ha menjadi 47.363,00 Ha, demikian juga di Kabupaten Nunukan dari 53.587,00 Ha menjadi 84.705,00 Ha. Dalam kurun waktu tersebut produksi kelapa sawit meningkat dari 21.754 ton menjadi 513.448 ton. Namun patut dicatat bahwa pada satu sisi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu alternatif untuk penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain pengembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali akan mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan bagi pembangunan pertanian non perkebunan. Siklus daur kelapa sawit yang cukup lama antara 25-30 tahun mengakibatkan terjadi kecenderungan untuk memperluas areal dalam bentuk kebun baru yang akan mengokupasi lahan pertanian produktif, sehingga terjadi gangguan pada produksi tanaman pangan. Pengembangan sektor perkebunan non kelapa sawit merupakan salah satu peluang yang dapat didorong sebagai perkebunan rakyat baik besar maupun kecil dengan komoditas yang prospektif dan produktif misalnya karet, kakao, kelapa, dalam bentuk monokultur maupun tumpang sari dengan konsep produktif dan konservasif.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat diintegrasikan dengan pengembangan ternak, seperti sapi. Sub sektor peternakan sudah mulai berkembang dengan ternak besar (kerbau, sapi, kambing), meskipun dengan tingkat populasi yang masih rendah dan belum dikelola secara intensif. Sementara ternak unggas (itik, ayam dan angsa) sudah mulai berkembang tetapi masih dalam skala kecil pada tingkat rumah tangga. Pengembangan peternakan yang dilakukan secara intensif masih sangat terbatas sehingga kebutuhan protein hewani masih harus didatangkan dari luar wilayah.

Perkembangan sektor pertanian memberikan peluang dikembangkan agroindustri dan atau agropolitan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa produk pertanian khususnya sayuran dan buah-buahan pada umumnya bersifat mudah atau cepat mengalami kemunduran fisik yang menurunkan kualitas dan harga, sehingga sangat merugikan produsen. Pembangunan infrastrukur transportasi (jalan dan angkutan) dan unit penanganan paska panen produk pertanian, misalnya unit produksi hulu berbasis hasil pertanian dan membangun jaringan pasar menjadi prioritas dan sangat penting.

3.1.19. Kesiapan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang perekonomian. MEA dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan membuka peluang baru melalui pemberlakuan sistem pasar terbuka dimana terdapat kekebasan mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja antar negara-negara anggota.

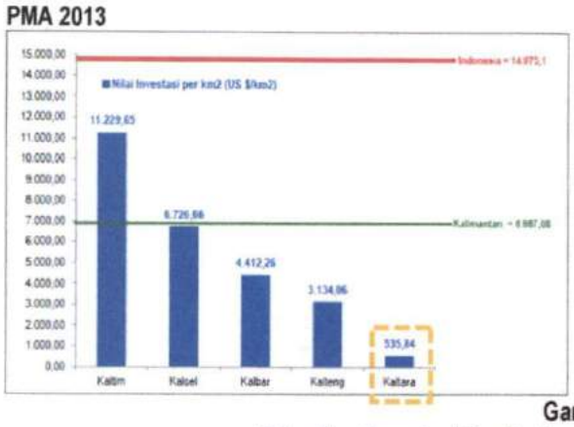
MEA yang secara resmi akan diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2015 menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia, terutama untuk wilayah perbatasan seperti Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan 'beranda' terdepan yang berhadapan langsung dengan negara lain. Melalui pemberlakuan

sistem pasar dan basis produksi tunggal, Provinsi Kalimantan Utara harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak tersingkir dalam persaingan yang sudah semakin bebas dan dinamis.

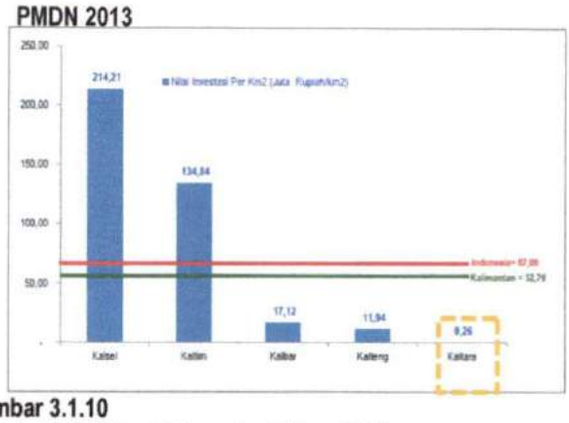
Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ada empat pilar utama yang harus disiapkan, yakni: (1) Terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal, (2) Kawasan berdaya saing tinggi, (3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, (4) Integrasi dengan perekonomian dunia (KTT ASEAN ke 21, Nopember 2012). Melalui empat pilar utama tersebut maka penerapan kesepakatan MEA akan menjadikan investasi dan modal sebagai faktor perekonomian yang dapat dengan lebih bebas memasuki Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini menjadi peluang tersendiri bagi provinsi ini mengingat selama ini diketahui bahwa intensitas investasi di Provinsi Kalimantan Utara masih berada di posisi yang paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Sampai dengan tahun 2013, nilai investasi per km² Provinsi Kalimantan Utara melalui Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US $ 535,84 dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 0,26 juta rupiah. Angka ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan seperti misalnya Provinsi Kalimantan Timur (provinsi induk) yang memiliki nilai investasi PMA per km² mencapai US $ 11.229,65 dan nilai investasi PMDN per km² sebesar 134,84 juta rupiah.

PMA 2013



PMDN 2013



Gambar 3.1.10
Intensitas Investasi Provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2013
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, 2014. diolah

Sebagai persiapan dalam menghadapi penerapan MEA tahun 2015, harus dilakukan pembenahan demi meningkatkan daya tarik investasi yang dimilikinya dan menjadikannya salah satu provinsi yang berdaya saing baik secara nasional maupun internasional. Seperti yang telah disampaikan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) dalam *Seminar Persiapan Daerah dalam Menghadapi MEA 2015*, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong investasi daerah yaitu meliputi:

1. Penyederhanaan prosedur dan waktu pemprosesan kegiatan investasi yang masuk serta transparansi proses perijinan investasi.
2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perijinan.
3. Pengoptimalan kinerja dan efektivitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
4. Peningkatan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

Sementara itu dalam rentang tahun 2007-2012, laju pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi yaitu mencapai 6,83%. Angka ini melebihi laju pertumbuhan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan bahkan melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 5,86%. Dengan laju pertumbuhan ini, menunjukkan bahwa meskipun merupakan provinsi baru, namun kegiatan perekonomian yang ada di dalamnya memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang.

Tabel 3.1.7
Rangking Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2000 Pulau Kalimantan Tahun 2007-2012

Provinsi	PDRB (milyar rupiah)						Laju Pertumbuhan (%)
	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**	
Kalimantan Utara	**5.053**	**5.371**	**5.634**	**6.058**	**6.515**	**7.030**	**6,83**
Kalimantan Tengah	15.755	16.726	17.658	18.806	20.078	21.420	6,34
Kalimantan Selatan	25.922	27.593	29.052	30.675	32.553	34.419	5,83
Kalimantan Barat	26.020	27.439	28.757	30.329	32.138	34.014	5,50
Kalimantan Timur	98.386	103.207	105.565	110.953	115.476	120.067	4,06
Nasional	**1.890.607**	**1.999.047**	**2.094.358**	**2.222.987**	**2.364.065**	**2.512.992**	**5,86**

Keterangan: (*) angka sementara, (**) angka sangat sementara
Sumber: bps.go.id diakses pada Agustus 2014

Laju pertumbuhan yang tinggi di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh perkembangan sektor pertambangan-penggalian serta sektor pertanian. Pada tahun 2012, kedua sektor primer tersebut memiliki kontribusi sebesar 42,91% dalam struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Tingginya kontribusi sektor primer tidak hanya menjadi kekuatan bagi suatu wilayah namun juga dapat menjadi kelemahan apabila kontribusi sektor-sektor tersebut tidak dimanfaatkan lebih lanjut.

Tabel 3.1.8
Struktur Perekonomian Pulau Kalimantan Tahun 2012

Sektor	Kontribusi Sektor (%)				
	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan
Pertanian	9,46	**17,95**	24,1	27,93	19,32
Pertambangan dan Penggalian	47,91	**24,96**	2,00	9,94	23,61
Industri Pengolahan	7,43	4,49	17,02	6,98	9,05
Listrik. Gas dan Air Bersih	0,41	1,39	0,47	0,68	0,57
Konstruksi	4,58	6,37	10,79	5,53	6,00
Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,25	26,56	22,71	21,23	16,33
Transportasi dan Komunikasi	6,11	7,95	7,33	8,2	8,82
Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	4,45	4,64	4,83	6,07	5,17
Jasa-Jasa	6,4	5,69	10,75	13,44	11,12
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: bps.go.id diakses pada Agustus 2014

Meskipun kontribusi sektor primer Provinsi Kalimantan Utara cukup besar, akan tetapi kontribusi sektor industri pengolahan relatif sangat kecil (di bawah 5%). Bahkan apabila dilihat tren perkembangan kontribusinya pada tahun 2007-2012, sektor ini terus mengalami penurunan dengan pergeseran kontribusi mencapai -2,62%. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh sektor primer belum diolah secara maksimal oleh wilayah itu sendiri dan lebih banyak dijual ke luar daerah. Tren perkembangan ini merupakan sebuah fenomena yang perlu diantisipasi terutama menjelang penerapan MEA 2015. Dalam *Rapat Kerja Teknis Indagkop tahun 2014* Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, disampaikan bahwa implementasi MEA berpotensi menjadikan daerah-daerah di Indonesia sekedar sebagai pemasok energi dan bahan baku bagi industrialisasi di kawasan ASEAN. Ancaman ini juga berlaku untuk Provinsi Kalimantan Utara yang secara eksisting belum secara optimal mengolah produk bahan baku yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya dorongan pada kegiatan Industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah sektor primer yang menjadi produk unggulan daerah.

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah juga menjadi salah satu strategi yang diusulkan oleh BAPPENAS dalam rangka menghadapi MEA 2015. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi: (1) peningkatan kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah, serta (2) dorongan terhadap ekspansi dan promosi produk unggulan barang dan jasa. Kedua langkah ini diharapkan akan mampu menjadikan produk-produk lokal memiliki daya tarik yang setara dengan produk dari negara-negara anggota ASEAN lainnya dan menangkal impor yang berlebihan.

Strategi lain yang diusulkan oleh Bank Indonesia adalah pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di Indonesia, dari keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha tercatat masing-masing sebesar 96,95% (tahun 2007) dan 97,04% (tahun 2008) bekerja di sektor UMKM (Bank Indonesia, 2009). Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa entitas usaha mikro dalam kesatuan UMKM menjadi dominan mengingat usaha mikro mencakup baik sektor formal dan informal dengan karakteristik *barrier to entry and exit* yang rendah. Entitas skala usaha mikro ini juga yang berperan strategis sebagai jaring pengaman rakyat dalam menghadapi krisis dan turbulensi ekonomi.

3.1.20. Rendahnya Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang dapat menjadi petunjuk untuk melihat potensi perkembangan investasi daerah. Angka kriminalitas yang rendah merupakan potensi utama bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif yang diharapkan dapat mendorong perkembangan investasi daerah. Angka kriminalitas jika ditinjau dari akar permasalahannya memiliki beragam persoalan yakni latar belakang permasalahan sosial kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi kesenjangannya, penegakan hukum, dan jaminan sistem pengelolaan keamanan daerah.

Kondisi angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara tergolong cukup tinggi. Angka kriminalitas paling tinggi terjadi di Kota Tarakan. Hal ini dapat dipahami mengingat Kota Tarakan merupakan kawasan perkotaan dan sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pelayanan publik yang cukup lengkap yang mengundang orang untuk melakukan migrasi masuk. Akan tetapi pada umumnya tidak semua tenaga kerja yang masuk dapat terserap selain karena lapangan kerja yang terbatas selain karena rendahnya ketrampilan sehingga tidak dapat bersaing di pasar kerja. Kesenjangan sosial ekonomi di antara penduduk perkotaan seringkali menjadi penyebab meningkatnya angka kriminalitas. Seperti halnya kawasan perkotaan lainnya, pada umumnya tingkat kriminalitas cenderung tinggi dibandingkan kawasan yang masih bersifat pedesaan.

Di masa depan Provinsi Kalimantan Utara harus mampu menjamin sistem keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah. Selain itu tantangan di masa depan yakni dihadapkan dengan AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang harus dapat bersaing menjadi daerah yang ramah terhadap perkembangan investasi. Angka kriminalitas harus dapat ditekan tidak hanya dari sektor penegakan hukum saja melainkan juga dengan adanya menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat yang tergolong marginal sehingga timbul tindakan positif.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yakni adanya jaminan keamanan di suatu wilayah, sementara aspek penanganan angka kriminalitas masih sangat rendah. Penanganan angka kriminalitas selama ini masih terfokus pada Kota Tarakan. Kabupaten Nunukan menempati urutan kedua diikuti Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Posisi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memberikan potensi rawan terhadap kejahatan internasional. Beberapa kasus yang seringkali terjadi yakni persoalan penyelundupan kayu, pergeseran batas wilayah, narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya. Selain itu aspek kesenjangan pembangunan antar daerah terjadi karena wilayah yang sangat luas, dan akses jalan yang belum optimal. Kondisi ini menjadi pemicu berbagai persoalan sosial, antara lain seringkali terjadi berupa tindak kriminal. Selain itu sebagai daerah pemekaran baru, provinsi ini masih memiliki permasalahan dasar berkaitan dengan sistem kelembagaan keamanan yang belum mampu tertata dengan baik, sumber daya manusia yang cukup, dan sarana prasarana belum memadai.

Di masa depan akan mulai berkembang pusat-pusat pertumbuhan daerah yang baru. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk beraktivitas di sekitarnya. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan semua aktivtas yang akan tumbuh menjadi potensi munculnya tindakan kriminalitas. Posisi provinsi ini yang terletak di wilayah perbatasan antarnegara juga sangat rawan menjadi pusat kegiatan kriminalitas lintas negara. Penanganan tindak kriminal merupakan tantangan aparat keamanan. Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang cukup luas dan akses yang masih sangat kurang merupakan salah satu hambatan eksternal yang sering ditemukan dalam proses penegakan tindakan kriminal. Selain itu jumlah sumber daya aparatur keamanan yang ada pada lintas daerah atau negara selama ini masih sangat minim. Kerjasama antar sektor baik keamanan tingkat nasional dan keamanan antara dua negara harus segera dilakukan untuk membuka peluang penanganan tindak kriminalitas yang terjadi di lintas perbatasan. Selain itu pada tingkat daerah kerjasama antar sektor pelaku keamanan harus segera dilakukan yakni dengan membuka akses kerjasama lembaga penegak keamanan hingga tingkat masyarakat yakni seperti polisi masyarakat, linmas, dan lembaga adat. Sebagai daerah pemekaran baru kondisi ini merupakan peluang sangat besar untuk menata kondisi yang ada dengan baik, sehingga di masa depan Provinsi Kalimantan Utara mampu memberikan jaminan tingkat keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bagi masyarakat.

B. Konflik Sosial

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi tingkat kerawanan sosial yang dapat memicu konflik antar masyarakat. Konflik yang terjadi karena persoalan sosial masyarakat akibat dari kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi antar masyarakat. Data terakhir terdapat dua bencana yang tercatat BNPB disebabkan kerusuhan sosial. Tingkat heterogenitas masyarakat di provinsi ini cukup tinggi, terlihat dari keragaman suku dan agama. Persoalan tingkat ketimpangan sosial ekonomi serta lambatnya proses asimilasi di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik sosial secara horisontal. Hal ini jika tidak diselesaikan sejak saat ini akan berpotensi muncul di kemudian hari. Konflik sosial yang sering terjadi akan menyebabkan kondisi daerah yang tidak aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas baik kegiatan ekonomi, sosial maupun kegiatan lainnya. Pendekatan rekonsiliasi merupakan langkah awal yang penting dilakukan untuk mencegah potensi konflik antar golongan mayarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar lembaga adat, pemuka agama, dan organisasi sosial masyarakat.

Tabel 3.1.9
Kerusuhan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Tanggal	Kerugian yang ditimbulkan		
			Meninggal	Luka-luka	Mengungsi
Nunukan	Konflik/Kerusuhan Sosial	1 Agustus 2002	41	2000	
Tarakan	Konflik/Kerusuhan Sosial	27 September 2010	5	17	44

Sumber: http://dibi.bnpb.go.id/ (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) data dan informasi bencana Kalimantan Timur sejak 1815-2014

Sementara itu berdasarkan data pemetaan sosial daerah-daerah penghasil minyak dan gas Satuan Kerja Sementara Kegiatan Hulu Migas 2012 tercatat bahwa ada beberapa konflik yang selama ini terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.1.10
Konflik Pemetaan Sosial Daerah Penghasil Minyak dan Satuan Kerja Sementara Hulu Migas-2012 di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Konflik	Jumlah	Waktu
1	Bulungan	Konflik Aliran Beragama	1	Bulan Ramadhan 2012
		Konflik Etnis	1	Desember 2011
		Konflik Lahan	1	Tahun 2008
		Pelepasan Wilayah Bunyu bergabung Tarakan	1	Maret 2010
		Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur	1	1999-2012
2	Tarakan	Konflik Etnis	2	September 2010 dan Agustus 2012
		Konflik Lahan	7	2012
	Jumlah		**14**	

Sumber: Pemetaan Sosial Daerah-daerah Penghasil Minyak dan Gas Satuan Kerja Sementara Kegiatan Hulu Migas, 2012 (Diakses dari http://www.migas.bisbak.com)

Sebagai catatan, konflik etnis cukup dominan terjadi di Kota Tarakan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi dan para *stakeholder*. Sebagian besar konflik bersumber dari kesenjangan sosial eokonomi, di mana penduduk setempat merasa tersingkir oleh para pendatang yang secara sosial ekonomi lebih maju dibanding penduduk setempat. Selain itu konflik di Kota Tarakan juga dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pengelolaan dan kepemilikan lahan. Konflik lahan ini melibatkan antara penduduk dan pihak perusahaan, atau antara pemerintah daerah setempat dan pihak perusahaan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di masa depan dihadapkan pada tantangan untuk dapat menjamin kondisi sosial masyarakat yang lebih aman, nyaman, tentram dan mampu mendukung keselarasan kehidupan. Hal ini harus segera dilakukan agar mampu memicu aspek kehidupan selaras dan seimbang antar golongan masyarakat dengan menerima heterogenitas masyarakat sebagai bagian kehidupan sosial, saling menghormati dan dapat hidup secara selaras dan berdampingan. Situasi dan kondisi yang aman akan menjadi salah satu faktor penarik bagi suatu daerah sehingga diharapkan memiliki daya saing yang cukup memadai di era globalisasi.

3.1.21. Kawasan Perbatasan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki letak yang cukup strategis. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Negara Bagian Sabah dan Serawak). Letak perbatasan tersebut yakni berada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Selain itu memiliki wilayah perairan laut yang berada di sebelah timur wilayah darat. Wilayah tersebut merupakan jalur lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI 2 dan ALKI 3 yang dilewati oleh pelayaran internasional.

Berdasarkan Rencana Buku Induk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini penting karena di Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memiliki berbagai sumber daya alam yang berlimpah. Terdapat dua wilayah kawasan strategis nasional baik darat maupun wilayah laut. Kawasan strategis darat menurut RTRWN (PP No 26 Tahun 2008) terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Di wilayah tersebut telah ditetapkan dua kawasan strategis nasional yakni kawasan perbatasan darat dan jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). Selain itu Pulau Sebatik yang terletak di Kabupaten Nunukan ditetapkan juga sebagai kawasan strategis nasional untuk kawasan perbatasan laut RI karena termasuk pulau terluar. Pulau Sebatik merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang perlu mendapat perhatian khusus, mengingat Pulau Sebatik selain menjadi wilayah perbatasan darat juga wilayah perbatasan laut.

Potensi sumber daya di kawasan perbatasan Kalimantan yang sangat dominan yakni potensi kehutanan. Pulau Kalimantan telah mendapat pengakuan secara internasional memiliki area hutan terluas di dunia. Kekayaan hutan yang dimaksud tidak hanya memberikan hasil kayu saja melainkan juga hasil hutan non-kayu dan berbagai keragaman hayati. Provinsi ini juga memiliki sumber daya alam lain yang melimpah baik dalam sumber daya mineral, perikanan dan kelautan.

Di sisi lain kondisi pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Utara masih sangat lemah. Masih ada kegiatan ilegal terutama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Beberapa kasus yang selama ini sering terjadi yakni kasus perdagangan ilegal, penyelundupan kayu, TKI ilegal, dan perdagangan manusia *(Sumber Buku Induk BNPP, 2011)*. Permasalahan sebenarnya bermula karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, tingkat ketimpangan kegiatan perekonomian, tingkat aksesibilitas, pelayanan masyarakat, pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan, banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan dua wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi terjadinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai dan imigrasi, tingkat sumber daya pertahanan dan keamanan jauh dari

harapan karena lemahnya sistem penegakan hukum di daerah baik kewenangan pusat maupun daerah (*Sumber: Buku Induk BNPP, 2011).*

Tabel 3.1.11
Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Nama Pos Pamtas	
1	Malinau	1. Apauping 2. Long Pujungan 3. Long Ampung	4. Long Nawang 5. Long Betaoh
2	Nunukan	3.1.1. Nunukan 3.1.2. Lumbis 3.1.3. Sei Ular 3.1.4. Sei Kaca 3.1.5. Bambangan Besar 3.1.6. Aji Kuning 3.1.7. Bukit Kramat 3.1.8. Tanjung Aru 3.1.9. Kanduangan 3.1.10. Simanggaris Gab	3.1.11. Simanggaris Lama 3.1.12. Tembalang 3.1.13. Sebuku 3.1.14. Sei Agison 3.1.15. Simantobol 3.1.16. Simantipal 3.1.17. Labang 3.1.18. Long Bawan 3.1.19. Krayan 3.1.20. Gabma Seliku

Sumber: Buku Induk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman, 2011

Sementara itu kondisi kesejahteraan sosial masyarakat belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan yang relatif rendah terutama masyarakat di kawasan perbatasan. Persebaran sarana dan prasarana pelayanan dasar yang belum mampu menjangkau desa-desa karena masalah letak, jarak yang saling berjauhan dan kondisi topografi wilayah yang sebagian besar berada di kelerengan di atas 40%, khsususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dengan negara tetangga. Jumlah PMKS masih cukup tinggi dan kurang mendapat penanganan. Kondisi ini mencerminkan pembangunan di wilayah ini masih belum seimbang, khususnya di wilayah yang berada di perbatasan antar negara. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota bahkan ketimpangan dengan negara tetangga Serawak-Malaysia. Hal ini membuat orientasi kehidupan masyarakat terutama di wilayah perbatasan mengacu pada kehidupan di Serawak-Malaysia.

Jika hal ini tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah maka persoalan ini akan menjadi faktor pemicu ketertinggalan dan keterbelakangan daerah perbatasan, untuk berbagai aspek kehidupan. Di masa depan pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi perhatian utama. Kondisi ini dilakukan dalam rangka mendukung proses skema perencanaan pemerintah pusat untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan NKRI. Pembangunan dilakukan di berbagai bidang terutama dengan menyediakan kemudahan akses pelayanan dasar masyarakat yang berkaitan pada hak atas jaminan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak. Pembangunan wilayah perbatasan dilakukan dengan memperjelas sistem tata kelola perbatasan melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Hal ini harus segera dilakukan agar mampu menjaga keselarasan dan penanganan masalah yang terkait di wilayah perbatasan.

3.1.22. Tata Kelola Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Utara menjadi daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai provinsi baru yang ke 34 di Indonesia secara resmi mulai aktif sejak tanggal 22 April 2013. Dalam membangun tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan banyak penyesuaian yang harus segera terpenuhi. Masih banyak beragam sumber daya penunjang yang harus dipersiapkan agar ke depan provinsi ini mampu menjadi lebih baik di masa depan. Tidak hanya dibutuhkan sumber daya aparatur negara yang berkualitas namun juga membutuhkan sistem tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan yang mampu dan sesuai dengan kondisi daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil penilaian, capaian indikator otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang ada Provinsi Kalimantan Utara masih sangat lemah. Masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai nilai standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan, diantaranya adalah indikator penegakan perda, indikator petugas perlindungan masyarakat (linmas), serta cakupan pelayanan bencana kebakaran.

Tantangan utama yang harus dihadapi provinsi ini di masa depan adalah kesiapan untuk membangun tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan UNESCAP setidaknya ada delapan landasan dasar penerapan *good governance*, yakni akuntabilitas, transparansi, rensponsif, pemerintahan efektif dan efisien, penegakan hukum, dan partisiipasi antar stakeholder berkepentingan. Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah baru harus segera sadar akan posisi tata kelola pemerintahan dan adminstrasi pemerintah saat ini. Kondisi ini merupakan tahap awal pemerintahan sebagai langkah untuk menentukan skema pengelolaan di masa mendatang. Dua prasyarat pokok yang harus dipersiapkan provinsi ini yakni membangun

Kerjasama ekonomi sub regional Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) terbentuk untuk mengembangkan kerjasama di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Salah satu bidang kerjasama adalah sektor perhubungan dan komunikasi yang bertujuan untuk: (a) Mengembangkan fasilitas infrastruktur transportasi yang penting dan pelayanan logistik untuk memfasilitasi barang dan orang lintas negara, dari dan ke EAGA; (b) Memudahkan dan mendukung masyarakat, sektor persekutuan antar perorangan atau lembaga-perorangan yang memprakarsai pembuatan fasilitas transportasi udara, laut, dan darat dan menyediakan rute perhubungan di daerah-daerah; (c) Menyediakan lingkungan politik dan mendukung inisiatif untuk mendirikan susunan transportasi liberal di EAGA, termasuk hak kebebasan berlalu lintas diantara tujuan EAGA didasari oleh ASEAN plus; (d) Memajukan dan memudahkan masyarakat dan pribadi untuk bekerjasama memulai penyediaan efisiensi biaya berdasar fasilitas infrastruktur.

Realisasi dari kerjasama tersebut ditunjukkan dengan: (a) Pengembangan jalur layanan transportasi laut Pare-Pare (Indonesia) – Tarakan (Indonesia) – Nunukan (Indonesia) – Tawau (Malaysia) – Sandakan (Malaysia); (b) Mengatur mengenai perpindahan bus diantara negara anggota dan dapat melintas melewati wilayah negara anggota yang lain; (c) Dua proyek infrastruktur prioritas berupa jalan batas Tanjung Selor di Kalimantan Timur (Indonesia) dan *Lahad Datu Palm Oil Integrated Cluster* di Sabah (Malaysia). Jalan batas Tanjung Selor di koridor Borneo Timur.

Dari sisi kebijakan nasional, isu-isu terkait dengan jaringan transportasi ditegaskan dalam visi-misi transportasi Bappenas, yaitu terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana transportasi sehingga berdampak pada belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana transportasi perkotaan serta aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan yang masih rendah. Disamping itu, wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain merupakan pintu gerbang negara yang memberikan gambaran kondisi sosial-ekonomi-budaya bangsa Indonesia sehingga diperlukan aksesibilitas yang baik untuk menjamin keamanan, kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut

Dalam Rencana Jangka Panjang Departemen Perhubungan tahun 2005-2025, dinyatakan perlunya peningkatan aksesibilitas dan keselamatan menuju kawasan perbatasan antar negara dan kawasan tertinggal. Rencana tersebut sejalan dengan kondisi jaringan transportasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara saat ini yang masih menunjukkan rendahnya aksesibilitas ke wilayah terpencil maupun perbatasan dengan negara Malaysia. Kondisi tersebut dipicu oleh jaringan jalan yang belum merata ke seluruh wilayah pedalaman Provinsi Kalimantan Utara, kondisi perkerasan jalan yang belum mantap khususnya pada saat musim hujan serta kurang tersedianya layanan transportasi. Berbagai isu terkait dengan ketersediaan jaringan transportasi ini tentunya dapat mengakibatkan kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan sosial di Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan jaringan transportasi berupa jalan, jembatan, terminal (terminal angkutan darat, stasiun, bandara dan pelabuhan) dan layanan transportasi akan memberikan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dan mendukung pergerakan barang.

2. Belum Tersedianya Jaringan Listrik Secara Memadai

Jaringan listrik yang handal mampu mendorong kegiatan bisnis maupun industri serta memberikan kenyamanan dan kemudahan masyarakat serta mendukung produktivitas berbagai industri, kegiatan ekonomi maupun layanan yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Maju atau tidaknya suatu wilayah, sejahtera atau tidaknya masyarakat dapat dilihat dari penggunaan listrik sehari-hari. Peran penting jaringan listrik ditunjukkan oleh World Bank (2008) dari adanya satu proyek elektrifikasi perdesaan di Costa Rica mampu meningkatkan jumlah kegiatan bisnis dari 15 menjadi 86. Elektrifikasi mampu meningkatkan jumlah kegiatan bisnis lebih dari lima kali lipat. Namun demikian, masih menurut World Bank, masih ada sekitar 2 milyar penduduk bumi yang belum mendapat akses listrik, jaringan listrik belum dapat dinikmati oleh hampir 29% penduduk dunia.

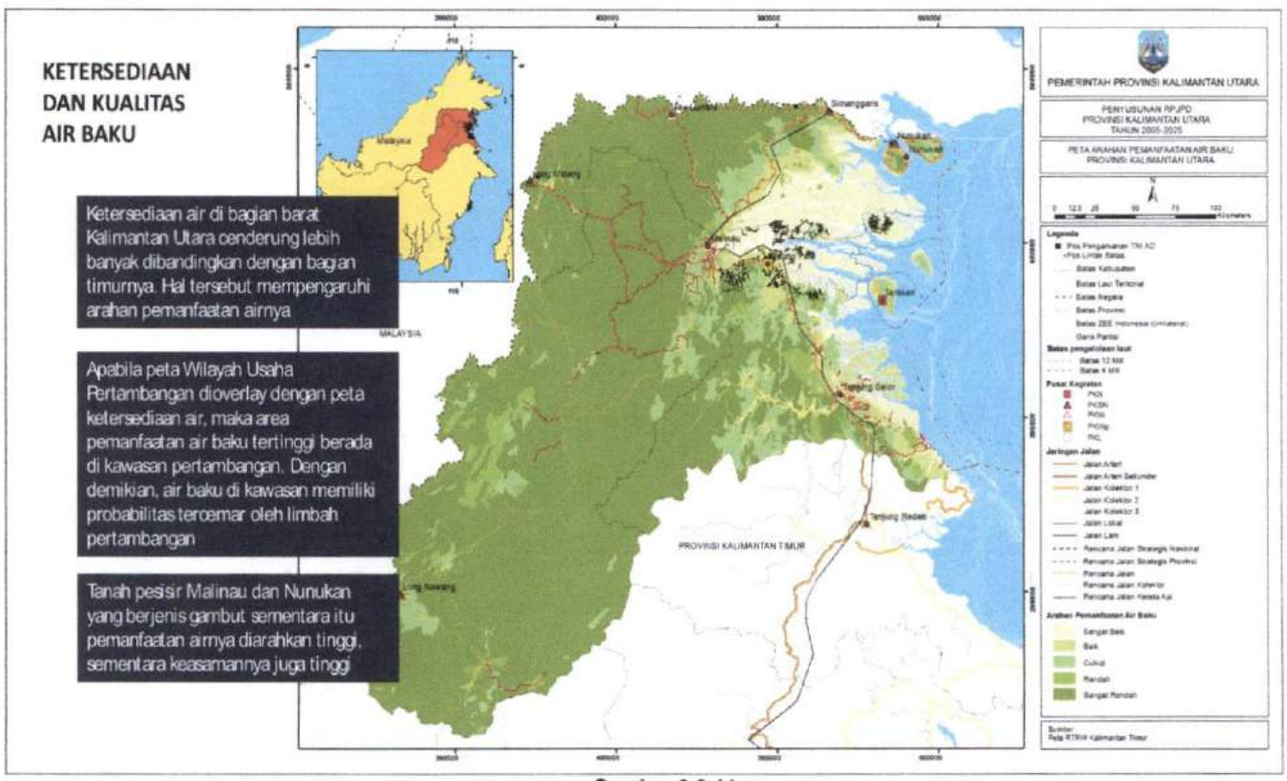
Kondisi perlistrikan nasional belum seluruhnya menunjukkan kinerja yang baik, jaringan listrik yang ada belum dapat dinikmati seluruh masyarakat, rasio elektrifikasi belum mencapai 100%. Menurut Kementrian ESDM, konsumsi listrik nasional tahun 2013 mencapai 188 TWh, terdiri atas rumah tangga 41%, industri 34%, komersial 19%, dan publik 6%. Konsumsi listrik akan terus meningkat rata 7,8-8% per tahun. Rasio elektrifikasi yang saat ini baru mencapai 80,54% ditargetkan pemerintah akan mencapai 100% pada tahun 2020. Total kapasitas terpasang pembangkit listrik tahun 2013 sebesar 7,128 MW sedangkan realisasi pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 7,8%.

Permasalahan nasional di bidang kelistrikan juga terjadi di Provinsi Kalimantan Utara yang diindikasikan dengan persentase rumah tangga pengguna listrik baru mencapai sekitar 55%. Target rasio elektrifikasi secara nasional sebesar 100% masih jauh dari kondisi riil saat ini. Meskipun produksi listrik serta jumlah listrik yang terjual mengalami peningkatan, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada.

3. Terbatasnya Ketersediaan Air Baku

Air bersih dan sanitasi sangat diperlukan dalam upaya mewujutkan kehidupan dan kesehatan yang baik. Namun demikian masih banyak masyarakat dunia yang menghadapi permasalahan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Seperti yang dicatat oleh World Bank (2008), 1,1 milyar penduduk dunia (atau 1/6 bagian) tidak mendapat akses air bersih, sementara 2,4 milyar (40%) penduduk dunia kekurangan layanan sanitasi yang memadai. Situasi tersebut mengakibatkan 1,6 juta anak-anak meninggal karena penyakit diare yang ditimbulkan oleh keterbatasan air bersih dan sanitasi. Data UNICEF menunjukkan, secara global, 2,5 miliar orang (36 persen dari populasi global) tidak menggunakan fasilitas sanitasi yang baik (toilet bersih dan aman) dan 1 miliar orang masih buang air besar di tempat terbuka (15 persen dari populasi global) - mayoritas ini (934 juta) tinggal di daerah perdesaan. Dampak yang sama dari permasalahan tersebut adalah diare masih menjadi penyebab terbesar kedua kematian balita dan bertanggung jawab terhadap 9 persen dari semua kematian balita. Hampir 600.000 anak di bawah lima tahun meninggal setiap tahun -lebih dari 1.600 per hari- sebagai akibat diare. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak masyarakat dunia yang belum mendapatkan layanan air bersih dan sanitasi yang baik sehingga berdampak pada tingginya kematian balita.

Lemahnya pengelolaan lingkungan di Indonesia, memberikan dampak negatif terhadap sektor air bersih dan sanitasi. Terbatasnya ketersediaan air baku menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam penyediaan layanan air bersih di Indonesia. Berdasarkan laporan MDGs 2010 yang diterbitkan oleh Bappenas, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak sebanyak 47,71% dan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sebanyak 51,19%. Target yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2015 sebesar 68,87% untuk air bersih dan 62,41% untuk sanitasi. Setiap tahun, Indonesia menderita kerugian sebesar USD 6,3 miliar dikarenakan oleh sanitasi buruk, termasuk biaya perawatan kesehatan, kerugian produktivitas, kematian prematur, kerugian sumber daya air dan perikanan, penurunan nilai tanah, dan kerugian pariwisata. Disamping itu, akses masyarakat Indonesia terhadap air perpipaan masih rendah, padahal air perpipaan dipandang sebagai air yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan lebih sehat dibandingkan dengan sumber air lainnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal, kecuali jika dibandingkan dengan Kamboja atau Malaysia misalnya, akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 100%, dimana 97% berasal dari air perpipaan. Demikian pula dengan Thailand yang akses air bersihnya telah mencapai 98%.



Gambar 3.3.11
Ketersediaan dan Sebaran Air Baku di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Timur (draft Raperda RTRW)

Dalam tataran regional, ketersediaan air bersih di Provinsi Kalimantan Utara masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, baru sekitar 36% rumah tangga yang menggunakan air bersih, sedangkan rumah tangga yang bersanitasi baru mencapai 54%. Kedua kondisi tersebut masih di bawah SPM penduduk terlayani akses air

bersih adalah 55-75%. Ditinjau dari ketersediaan air bersih di wilayah ini, air bersih tersedia cukup baik hanya di wilayah bagian barat saja, sementara wilayah lainnya belum tersedia air dengan kualitas yang baik. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik masih rendah. Ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi yang baik akan mendorong dan meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat serta lingkungan.

4. Terbatasnya Ketersediaan dan Aksesibilitas Layanan Komunikasi dan Informatika

Jaringan komunikasi dan informatika di negara-negara berkembang menunjukkan pertumbuhan yang pesat namun tidak tersebar secara merata dalam hal akses dan penggunaannya (World Bank, 2011). Penggunaan telepon selular berkembang lebih dahulu digerakkan oleh sektor swasta serta didukung oleh reformasi yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga mampu menembus wilayah-wilayah perdesaan hingga pelosok terpencil. Namun demikian perkembangan telepon selular ini belum diikuti dengan perkembangan internet. Masih ada gap yang besar antara akses internet berkecepatan tinggi dengan konektivitas '*broadband*' dan penyebaran dengan penggunaan di bidang bisnis, layanan dan pemerintahan yang dapat memberikan dampak pembangunan yang besar

Dari kajian Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika 2010-2014, mengindikasikan adanya permasalahan bidang komunikasi dan informatika di Indonesia yaitu terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan pos dan telematika. Disamping itu, tingkat pemanfaatan informasi belum optimal yang diantaranya terlihat dari masih terbatasnya penggunaan TIK dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan '*real economic value*' dan meningkatnya penyalahgunaan pengguna TIK. Kondisi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dengan topografi sangat bervariasi berupa dataran tinggi dan rendah yang sangat banyak, memunculkan banyak daerah '*blank spot*' terhadap komunikasi dan informatika. Bila area-area '*blank spot*' ini tidak ditangani akan menimbulkan kesenjangan antara wilayah yang sulit dijangkau dengan wilayah yang sudah terlayani infrastruktur komunikasi dan informatika

Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan wilayah negara tetangga, komunikasi dan informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang tinggal di perbatasan. Keterhubungan dengan sanak, saudara dan handai taulan di wilayah lain Indonesia di luar perbatasan akan mampu mengurangi perasaan terisolasi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ketersediaan informasi akan memberikan kemudahan masyarakat mengembangkan potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan yang ada. Jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunikasi dan informasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

3.2.5. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kondisi pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara saat ini dihadapkan pada beragam tantangan global seperti MEA tahun 2015 *(Masyarakat Ekonomi ASEAN)*, masalah pemanasan global, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, dan AFTA *(Asean Free Trade Area)*. Kondisi ini harus menjadi perhatian utama dan memerlukan kebijakan yang tepat agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan dalam melaksanakan pembangunan mengingat kondisi saat ini masih jauh tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Tantangan yang ada saat ini tidak hanya sebatas pembangunan fisik saja namun juga terkait beragam aspek baik dalam bidang pelayanan, pembangunan sumber daya manusia, kelembagaan, tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan. Sebagai daerah pemekaran baru pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus segera dipersiapkan dengan baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya. Tugas dan tanggung jawab yang dimaksud adalah melalui pembangunan lingkup internal dan eksternal pemerintahan daerah dengan menyusun berbagai kebijakan pembangunan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada.

Permasalahan klasik yang menjadi tantangan Provinsi Kalimantan Utara dalam persoalan pembangunan daerah ada empat, yakni membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kondisi wilayah provinsi ini, pengelolaan SDM baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, membangun konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan mensinergikan semua aspek pembangunan terutama peran antar *stakeholder*. Permasalahan ini harus segera dipersiapkan sebagai prasyarat awal pembangunan daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan pembangunan. Pembangunan non fisik dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan agar sumber daya manusia provinsi ini akan siap untuk menjadi pelaku pembangunan yang lebih mandiri di masa depan. Selain itu perlu adanya pengembangan kerjasama antar *stakeholder* dan menyiapkan mekanisme pengelolaan kelembagaan yang mampu disesuaikan dengan kondisi provinsi ini.

Sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan besar secara eksternal dalam melaksanakan pembangunan. Tantangan besar provinsi ini yakni langkah mengintegrasikan pembangunan wilayah sehingga mampu setara dengan pembangunan di daerah sekitarnya. Setara dengan pembangunan wilayah dengan provinsi lain di Indonesia dan setara dengan pembangunan wilayah dengan Negara Bagian Serawak-Malaysia. Kondisi ini harus dilakukan agar kesenjangan pembangunan wilayah terutama di kawasan perbatasan dapat segera teratasi. Hal ini dilandaskan pada konsep kesatuan wilayah dan negara sebagai penjamin tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikaji, maka isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan, yakni:

1. Belum Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Daerah

Membangun tata kelola pemerintahan daerah sangat penting dilakukan oleh pemerintahan baru seperti Provinsi Kalimantan Utara. Tata kelola pemerintahan daerah selain menjadi prasyarat berdirinya pemerintah yang berdaulat juga sebagai jaminan kualitas kemampuan pemerintah dalam membangun pemerintahannya. Rangkaian langkah pembangunan dapat dilakukan dengan menyediakan prasyarat awal melalui pembangunan sumber daya manusia pemerintah yang berkualitas, kelembagaan yang terintegrasi, dan kerjasama antar *stakeholder* yang mendukung *colaborative governance*. Sumber daya manusia berkualitas dimaksudkan memiliki kecakapan, kemampuan, dan semangat yang tinggi untuk membangun daerah. Orientasi pembangunan tidak hanya sekedar kekuasaan politik daerah namun lebih pada langkah pengelolaan untuk menjamin terlaksananya kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Kelembagaan terintegrasi dimaksudkan memiliki struktur yang memiliki pola dan kewenangan yang jelas dan memiliki kemampuan menyelesaikan secara mendasar permasalahan pembangunan daerah.

Pembangunan tata kelola pemerintahan harus dilakukan juga dengan membangun kerjasama antar *stakeholder,* yang tidak hanya terbatas di daerah saja melainkan juga pusat dan lintas negara hingga Malaysia. Kerjasama antar daerah sangat erat kaitannya dengan timbulnya permasalahan pembangunan yang melibatkan lintas sektor. Kerjasama antar daerah merupakan aspek penting dalam mensinergikan seluruh rangkaian perencanaan dan langkah awal membangun strategi pembangunan. Kerjasama antar daerah dapat dilakukan dengan mengedepankan aspek kelembagaan lintas sektoral melalui *colaborative governance*. Selama ini mekanisme ini belum mampu diterapkan maksimal di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam melibatkan kerjasama antar *stakeholder* pembangunan tata kelola pemerintahan harus memperhatikan tingkat kepentingan pranata adat dan kelembagaan pada tingkat lokal yang sudah ada dan berkembang di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pranata adat merupakan nilai yang selama ini melekat dengan kehidupan masyarakat. Pranata adat merupakan simbol kepatuhan, keyakinan, dan kepercayaan yang melekat dalam masyarakat. Pembangunan pranata adat harus mendapat perhatian terutama sebagai langkah pembangun kepercayaan publik pada pemerintah daerah. Kondisi masyarakat yang masih meyakini keberadaan tradisi dan budaya memberikan potensi besar bahwa fungsi dewan adat atau kelembagaan lokal masih berpengaruh dalam pembangunan kehidupan masyarakat. Aspek peran adat sangat besar termasuk dalam penanganan masalah yang terkait persoalan yang muncul di masyarakat yang tidak dapat terangkum sistem tata hukum pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut penting untuk memperjelas fungsi dan kewenangan dewan adat dalam sistem hukum pemerintahan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki pengaruh dalam menentukan arah pembangunan wilayah khususnya pada tingkat desa. Kondisi ini tidak hanya mampu mengatasi masalah yang berkembang namun juga dapat menjaga keselarasan dan kelestarian identitas kehidupan lokal masyarakat dan menjamin hak asal usul.

2. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Provinsi Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sebagai beranda wilayah Indonesia, yang merupakan gerbang serta benteng pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Seluruh wilayah perbatasan di provinsi ini harus dapat memberi gambaran yang baik bagi bangsa lain terkait kondisi sosial, ekonomi dan keamanan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan harus memiliki kesejahteraan yang baik, merepresentasikan kemakmuran bangsa Indonesia secara keseluruhan. Aksesibilitas ke berbagai fasilitas dan layanan umum murah dan mudah, sehingga memungkinkan untuk beraktivitas sosial-ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejehteraannya. Dari aspek pertahanan dan keamanan, wilayah perbatasan harus dapat memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat setempat dari berbagai gangguan maupun tekanan dari pihak negara lain. Sebagai bagian wilayah NKRI, perbatasan merupakan wilayah yang harus mampu menunjukkan kedaulatan negara RI di mata negara lain, tidak mudah dilanggar dan diganggu oleh pihak negara lain yang akan menurunkan martabat maupun kedaulatan bangsa. Peran wilayah perbatasan menjadi sangat

penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut maupun bagi kehoratan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.

Permasalahan wilayah perbatasan dan kapasitas masyarakat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Kondisi di wilayah perbatasan cukup timpang jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten yang terletak di perbatasan negara memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dilihat dari persentase penduduk di bawha garis kemiskinan, dibandingkan dengan tingkat kemiskinan rata-rata provinsi. Pada tahun 2007 penduduk di bawah garis kemiskinan rata-rata provinsi sebesar 17,06% sementara Kabupaten Malinau sebesar 23,60% dan Kabupaten Nunukan sebesar 20,02%. Pada tahun 2012 penduduk di bawah garis kemiskinan rata-rata provinsi sebesar 9,70%, sedangkan Kabupaten Malinau sebesar 11,68% dan Kabupaten Nunukan sebesar 9,60% sedikit di atas angka rata-rata nasional. Terbatasnya akses pelayanan karena belum ada sistem jaringan transportasi yang terkoneksi antar wilayah, sementara hal ini diperburuk oleh fasilitas pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan serta ekonomi yang relatif terbatas.

Saat ini, wilayah tersebut merupakan wilayah yang terisolir, dengan jaringan jalan yang terbatas. Jalan nasional yang menghubungkan empat kabupaten di wilayah daratan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan hampir sebagian besar rusak. Hampir separuh jalan nasional sepanjang 396 km yang membentang dari Tanjung Selor, ibukota Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan hingga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Simanggaris, Kabupaten Nunukan rusak berat (Kompas, 28 Desember 2014). Kerusakan jalan tersebut diduga sebagai akibat beban berlebih (*overloading*) truk-truk pengangkut kelapa sawit yang bergerak di jalan dengan konstruksi perkerasan jalan yang kurang kuat. Kendala tersebut diperparah dengan topografi jalur yang naik-turun dan berkelok-kelok serta rentan bahaya tanah longsor. Kondisi tersebut telah mempersulit pergerakan orang maupun barang.

Sulitnya distribusi barang di wilayah perbatasan tersebut berdampak pada mahalnya harga bahan kebutuhan pokok. Pasokan barang sering terhambat karena kerusakan jalan yang dialui. Bahkan bagi masyarakat Kecamatan Simanggaris, Kabupaten Nunukan, sebagian barang kebutuhan terpaksa didatangkan dari Tawau, Malaysia karena harga yang murah serta mudah diperoleh dibandingkan lewat Pulau Nunukan. Dikhawatirkan masyarakat Indonesia di perbatasan akan semakin tergantung kepada fasilitas dan layanan umum yang ada di Malaysia. Tanpa perhatian yang memadai dari pemerintah, masyarakat Indonesia akan semakin terpinggirkan secara fisik dan kejiwaan dari bumi pertiwi. Nasionalisme mereka akan tergerus dalam jangka panjang dan dikhawatirkan akan terjadi perpindahan kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Malaysia. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan, pemerintah harus mencukupi semua kebutuhan masyarakat Indonesia di perbatasan dan menjaga kedaulatan negara sebagai negara besar yang bermartabat. Selain itu, kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*) yang semakin meningkat di wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing, termasuk di wilayah perairan provinsi ini yang sangat merugikan para nelayan lokal.

Kondisi ini mengakibatkan wilayah perbatasan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi ini, terlihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, harga bahan kebutuhan pokok yang cukup mahal, dan terbatasnya peluang pasar bagi kegiatan produksi untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih agar ke depan persoalan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan segera teratasi. Kondisi kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan, ancaman potensi konflik karena masalah penguasaan sumber daya alam, serta tantangan ke depan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 merupakan permasalahan penting terkait dengan permasalahan di wilayah perbatasan. Langkah ini dilakukan sebagai wujud pemberian kepastian pemerintah daerah dalam menjamin nilai kemakmuran wilayah perbatasan juga dalam rangka menjaga nilai keutuhan NKRI sesuai dengan amanat Undang-Undang.

3. Belum Berkembangnya Sistem Jaminan Sosial Masyarakat

Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara dihadapkan pada tantangan dalam melaksanakan kebijakan yang mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena tujuan utama dari pemekaran yakni agar aspek pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin. Kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Utara harus dapat menjadi pendorong bagi pengembangan sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan, peningkatan mutu pelayanan sosial dari segi penanganan anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan dengan peningkatan profesionalisme pekerja sosial, membuka ruang kerjasama antar *stakeholder*, dan mekanisme pemberdayaan yang terintegrasi. Langkah tersebut dapat diaktualisasi dengan menyusun *Grand Design* Sistem Kesejahteran Sosial Masyarakat Kalimantan Utara.

4. Lemahnya Pengelolaan Aset Budaya Daerah

Berdasarkan pengalaman daerah lain di Indonesia terlihat bahwa kasus lemahnya pengamanan aset dan hak kekayaan intelektual dikarenakan masih sangat minim perhatian khususnya pada aspek perlindungan hukum. Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia merupakan wilayah rawan terutama terkait pengakuan sumber kekayaan intelektual dan hasil kebudayaan oleh negara lain. Berdasarkan sejarah masa lalu menyatakan suku bangsa yang mendiami Kalimantan Utara, Malaysia, dan Brunei Darussalam dikategorikan dalam satu rumpun. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada perkembangan budaya yang relatif sama. Hal ini menjadi potensi adanya pengakuan sumber daya aset daerah karena atas budaya asli hasil karya masyarakat Kalimantan Utara diklaim negara lain. Sebagai langkah pengamanan aset kebudayaan dan sumber kekayaan intelektual aspek perlindungan hukum harus dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kekayaan sumber daya kebudayaan dan hasil kreativitas masyarakat Kalimantan Utara dapat dimanfaatkan demi perkembangan pembangunan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual ini juga diharapkan sebagai tahapan dalam memperkuat dan menjaga identitas budaya masyarakat Kalimantan Utara.

SALINAN

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Visi merupakan kondisi yang menjadi cita-cita untuk diwujudkan melalui pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang. Visi merupakan harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD. Tahap perumusan ini merupakan upaya pengerucutan isi dari aspirasi unsur-unsur masyarakat dan upaya pelibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi **cita-cita** bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang mencerminkan **kekuatan dan potensi** khas daerah sekaligus menjawab **permasalahan dan isu-isu strategis** daerah. Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholder* untuk berperan aktif dalam pembangunan dan menjadi inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholder* secara bersama dan sinergi membangun daerah.

Berdasarkan kondisi Provinsi Kalimantan Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi modal dasar serta mempertimbangkan faktor eksternal berupa perkembangan global yang pesat, perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, maka visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005-2025 adalah:

"Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Wilayah Perbatasan Menjadi Beranda Terdepan NKRI yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Adil dan Beradab"

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan yang maju, merupakan dambaan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang perlu diperjuangkan oleh semua pelaku kepentingan pembangunan. Sebagai wilayah perbatasan yang selayaknya menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pintu gerbang interaksi dengan negara tetangga, yang bernuansa aman, berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan; memiliki syarat Provinsi Kalimantan Utara ditandai dengan warga masyarakat dan daerah yang maju secara fisik dan non fisik. Upaya percepatan kemajuan masyarakat dan daerah ini sewajarnya ditangani oleh lembaga-lembaga yang dipercaya, diunggulkan, dan tangguh untuk mengejar keterbelakangan selama ini, baik diperjuangkan oleh kelembagaan sektor pemerintah, kelembagaan sektor swasta yang didukung oleh kelembagaan di tingkat masyarakat pada umumnya; untuk bangkit meningkatkan harkat hidup wilayah dan daerah menjadi maju di segala bidang.

Sebagai wujud wilayah perbatasan sebagai garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, diupayakan memandirikan kebudayaan manusianya, membuat produktif wilayahnya dan menjadikan

produktif pengelolaan lembaga pelaku pembangunan, mengubah nasib masyarakat dan daerah provinsi, mewujudkan maju di segala bidang kehidupan dan penghidupan.

Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Provinsi Kalimantan Utara yang berbudaya dimaksudkan dengan masyarakat yang memiliki kekuatan dan ketahanan sosial yang ditandai oleh tertanamnya nilai-nilai budaya, dimana nilai-nilai tersebut mencerminkan ketaqwaan, kedisiplinan, ketaatan pada norma-norma hukum, kesetiakawanan dan tenggang rasa, serta demokratis. Berbudaya juga diartikan sebagai kehidupan masyarakat yang santun bertutur kata, sopan, dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, menghargai adat istiadat dan budaya yang ada, megeskpresikan nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas, yang ditujukan agar masyarakat Provinsi Kalimantan Utara menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna untuk diterapka di masa kini dan masa yang akan datang.

Provinsi Kalimantan Utara yang sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan hak dasar hidup untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan mencapai kesempurnaan hidup secara spiritual dan material. Kebutuhan dasar tersebut antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, tempat tinggal, ar bersih, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Provinsi Kalimantan Utara yang sejahtera berarti juga perwujudan pemerataan kesejahteraan baik dari segi kelompok sosial maupun dari segi kewilayahan dengan aksesibilitas yang memadai. Pemerataan kesejahteraan sangat tergantung pada pemerataan aksesibilitas, fasilitas dan sarana pembangunan, serta alokasi pembangunan di berbagai sektor kehidupan terutama yang bersifat pelayanan dasar. Provinsi Kalimantan Utara di masa depan harus dapat meningkatkan kesejahteraan dalam menghadap era globalisasi.

Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari indikator ekonomi yakni tingkat perkembangan ekonomi, tingkat kemakmuran ekonomi yang tercemin dari tingkat pendapatan dan distribusi yang merata. Tingkat kesejahteraan juga dapat dicerminkan dari kualitas sumber daya manusia. Sementara dari indikator sosial suatu wilayah dikatakan makin sejahtera jika makin tinggi tingkat pendidikan penduduk, tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, angka harapan hidup yang lebih tinggi, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia yang makin baik tercermin dari produktivitas masyarakat yang makin tinggi.

Provinsi Kalimantan Utara yang adil diartikan dengan semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah provinsi mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Provinsi Kalimantan Utara yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antarindividu, gender maupun wilayah. Provinsi Kalimantan Utara yang adil juga menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam yang hendaknya mempertimbangkan azas keadilan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, mengingat provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan salah stau pihak saja. Dalam pengelolaan sumber daya alam masyarakat diberdayakan untuk memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupa yang optimal sehingga terwujud pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya keadilan antargenerasi, antardunia usaha dan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Utara yang beradab diartikan sebagai perwujudan keadaan masyarakat yang berahlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia

dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menghayati dan menjalan nilai-nilai keagamaan dengan baik, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, berbudi luhur, bergotong royong, berjiwa patriotik dan berkembang dinamis.

4.2. MISI

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral dan Berahlak Mulia** adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan yang bertujuan membentuk individu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi norma dan etika, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keahlian, produktif dan mampu secara mandiri bersaing dengan sehat di dunia kerja, memiliki wawasan lingkungan. Pembentukan ahlak mulia melalui peningkatan kualitas pemahaman nilai moral, agama dan kehidupan beragama yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ahlak mulia akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup internal dan antarumat beragama, memiliki tanggung jawab sosial, menghargai keragaman dan toleransi sehingga tercipta harmoni sosial. Misi ini menekankan pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tangguh, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan, berdaya saing dengan berlandaskan nilai moral dan etika pembangunan daerah serta memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.
2. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan** adalah meningkatkan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan daerah.
3. **Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing** adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada potensi sumber daya alam terbarukan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan yang ramah terhadap lingkungan, berorientasi kerakyatan, mengutamakan aspek keadilan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan daerah serta mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi yang mampu bersaing dengan produk daerah dan negara lain. Proses kegiatan ekonomi yang produktif, efisien dan berkelajutan serta menghasilkan produk yang berkualitas tinggi merupakan syarat utama agar mampu bersaing dengan era globalisasi ekonomi baik dalam lingkup ASEAN maupun dunia. Pengembangan perekonomian yang berdaya saing perlu didukung upaya peningkatan kualitas SDM dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemanfataan teknologi tepat guna untuk UMKM, perluasan jejaring pasar dan berbagai dukungan kebijakan yang memadai perlu dilaksanakan untuk menciptakan daya saing ekonomi daerah. Keterpaduan/integrasi dan sinergi semua pihak (masyarakat, pemerintah dan swasta) sangat diperlukan untuk membangun perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.
4. **Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah, menyediakan akses yang sama bagi seluruh masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar serta sarana dan prasarana (infrastuktur), menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, serta keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih tertinggal seperti di wilayah perbatasan. Keberpihakan untuk mengembangkan wilayah tertinggal dan terpencil lebih ditingkatkan sehingga wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain. Ketersediaan infrastruktur berperan sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Peningkatan pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh infrastruktur yang maju untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat secara meerata terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar.

5. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik** adalah mengembangkan tata pemerintahan yang terintegrasi melalui kerjasama antar stakeholder pembangunan dengan memperhatikan aspek akutabilitas, transparansi, partisipatif dan mengedepankan inklusivitas, efektivitas, efisiensi, penegakan aturan dan hukum, adil, berorientasi konsensus, dan visioner terhadap masa depan, yang didukung yang didukung oleh aparatur yang berkualitas dan memiliki profesionalisme tinggi, mampu memberikan pelayanan prima dan menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat. Aspek kualitas dan profesionalitas dalam melakukan kinerja baik dalam aspek tata kelola pemerintahan maupun aspek pelayanan merupakan hal utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

6. **Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara**
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan demikian untuk mengantisipasi perkembangan Kota sebagai akibat dari dampak pembangunan di segala bidang perlu direncanakan sedini mungkin perwujudan Tanjung Selor sebagai kota menengah yang modern, layak huni dalam wujud pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, yang di dalamnya terdapat pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Perwujudan KBM ini akan dilakukan secara bertahap dan bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bulungan.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

4.3.1. Misi Pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia

a) **Tujuan**
Membentuk manusia masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang siap mewujudkan visi 20 tahun ke depan Provinsi Kalimantan Utara Terdepan, dengan demikian manusia masyarakatnya perlu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral, dan berakhlak mulia untuk bisa unggul, tangguh, produktif berkarya membangun daerah.

b) **Sasaran**
Anggota seluruh penduduk Provinsi Kalimantan Utara, baik anggota masyarakat pada umumnya, maupun khususnya yang sebagai usahawan/pengusaha, disamping yang bekerja di sektor pemerintahan[1] untuk dijadikan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral dan berakhlak mulia.

4.3.2. Misi Kedua: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan

a) **Tujuan**
Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis pada sumber daya alam yang mudah terbarukan guna mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan, agar Provinsi Kalimantan Utara tetap terjaga kehijauannya selama periode 20 tahun ke depan untuk dapat memberikan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

b) **Sasaran**
Para pemangku kepentingan (masyarakat umum, pengusaha, dan pemerintah)[2] yang mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Utara agar memegang prinsip keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di samping itu sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dapat dijaga tetap berfungsi dalam nuansa yang ramah dan berkelanjutan.

---

[1] Baik lelaki maupun perempuan
[2] Baik penduduk asli maupun pendatang

4.3.3. Misi Ketiga: Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing

a) **Tujuan**

Dalam konteks menjadikan wilayah perbatasan yang terdepan dalam masa 20 tahun ke depan, sangat perlu menyelenggarakan kegiatan perekonomian daerah yang produktif dan mampu menjadikan produk ekonomi unggulannya memenuhi sebagian kebutuhan daerah di kuar wilayah Kalimantan Utara, menjadikannya berdaya saing tinggi.

b) **Sasaran**

Kegiatan perekonomian daerah bertumpu pada pertanian pada umumnya yang dapat ditangani dengan upaya sumber daya terbarukan. Dengan menumbuhkembangkan pengolahan hasil produksi yang ramah lingkungan. Kegiatan ekonomi lokal menjadi garapan utama sebagai tumpuan menunjang perwujudan perekonomian yang berdaya saing tinggi

4.3.4. Misi Keempat: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

a) **Tujuan**

Dalam posisi wilayah yang memiliki kesenjangan kemajuan, sangat perlu mengupayakan pembangunan kawasan perbatasan, tertinggal, guna mewujudkan pembangunan daerah dan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan, dengan menyebarkan pembangunan lebih ke pedalaman, baik memajukan kawasan barat, tengah dan pesisir

b) **Sasaran**

Pusat-pusat kegiatan di pedalaman ditumbuhkan guna membentuk simpul-simpul pelayanan kebutuhan kehidupan masyarakat yang lebih memajukan kawasan pinggiran. Perlu ditumbuhkembangkan infrastruktur terpadu, agar lebih dapat mewujudkan jejaring jangkauan wilayah lebih merata ke arah pedalaman, perbatasan dan yang tertinggalkan.

4.3.5. Misi Kelima: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

a) **Tujuan**

Untuk menopang penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan terdepan, adalah mutlak dibangunnya tata kelola pembangunan yang rasional, akuntabel dan bertanggung jawab; menciptakan pemerintahan daerah yang berpola tata kelola pemerintahan yang baik, dengan didukung kerjasama baik dengan sektor swasta dan masyarakat umum

b) **Sasaran**

Sebagai pelaku utama bidang pelayanan publik, para pelaku kepentingan sektor pemerintahan perlu dibangun untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang baik yang pada gilirannya akan menjdikan pemerintahan dan wilayahnya menjadi daerah yang dapat dipercaya, diunggulkan, dan didambakan, dengan dilengkapi kerjasama yang konsisten dan berdayasaing dengan sektor swasta disamping masyarakat umum secara bersinergi berkelanjutan.

4.3.6. Misi Keenam: Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

a) **Tujuan**

Menyiapkan ibukota Kalimanatan Utara yang dapat mendukung secara optimal jalannya kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan permukiman beserta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar lainnya. Tujuan ini secara rinci dapat diurai menjadi membangun pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dalam arti luas (eksekutif, legislatif, dan instansi terkait lainnya), membangun pusat perkonomian yang dapat melayani kebutuhan perekonomian masyarakat baik dalam arti bisnis berupa pusat perdagangan (*Central Business District*) maupun kebutuhan sehari-hari dalam bentuk perpasaran (pusat maupun lingkungan permukiman), membangun infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diselaraskan dengan proyeksi penduduk (penyumbang tertinggi adalah unsur migrasi, disamping pertumbuhan penduduk secara alami), dan membangun lingkungan permukiman yang seperti berbagai kota besar lainnya, merupakan bagian terbesar porsinya dalam penggunaan lahan perkotaan yang lebih banyak dibangun oleh

masyarakat dibandingkan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus lebih antisipatif dengan mengarahkan perkembanagannya melalui pembangunan infrastruktur termasuk utilitas publik.

b) **Sasaran**

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa sasaran penting jangka panjang harus diwujudkan sebagai berikut adalah **Terbangunnya pusat pemerintahan** yang dapat mendukung secara optimal jalannya kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. **Terbangunnya pusat perekonomian** yang dapat mendukung secara optimal perekonomian ibukota Propinsi Kalimantan Utara dan berimbas pada wilayah lainnya bersama berbagai pusat perekonomian wilayah lainnya. **Terbangunnya lingkungan permukiman ibukota pemerintahan** yang dapat mendukung secara optimal Kota Tanjungselor sebgai wilayah permukiman ibukota Provinsi Kalimantan Utara. **Terbangunnya infrastruktur pendukung kota pusat pemerintahan** yang dapat mendukung secara optimal pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat dan kegiatannya di ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

SALINAN

BAB V
SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1 SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan. Sasaran 20 (duapuluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok 5 (lima) kemudian diterjemahkan dalam arah kebijakan pembangunan yang merupakan dasar dalam melihat keadaan sesungguhnya berdasarkan kesesuaian indikator kinerja sasaran harus dicapai. Pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap. Berikut ini adalah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025.

1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya bermakna ganda: pertama meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia sebagai unsur pokok masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan subyek dan obyek pembangunan, yang kedua, sekaligus mendukung percepatan proses pembangunan yang harus dipercepat karena ketertinggalan. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengendalian kependudukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan pendidikan, kesehatan, kesiapan dalam ketenagakerjaan, peran perempuan dan pemuda serta kaulitas spiritual di tengah masyarakat yang beragam merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan motor penggerak perubahan dalam pembangunan.

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang selain memiliki pendidikan yang baik, sehat secara jasmani dan rohani, bermartabat, berahlak mulia, menghargai orang lain dan keragaman, menjunjung tinggi norma, memiliki tanggung jawab sosial, menguasai iptek, memiliki keahlian, profesionalitas, produktif dan mampu secara mandiri bersaing dengan sehat di dunia kerja, serta berwawasan lingkungan. Pendidikan sepanjang hayat yang disesuaikan dengan perkembangan iptek hendaknya perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk dengan memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin meningkat.

Pembangunan pendidikan dan kesehatan didukung oleh ketersediaan tenaga kependidikan maupun tenaga kesehatan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang memadai, serta ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang adil, merata, terjangkau di seluruh wilayah, terutama di wilayah perbatasan. Tanpa dukungan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan yang cukup andal dan kompeten, serta tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai maka sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan pernah terwujud.

Pembangunan yang mengarahkan terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki moral yang baik dan berakhlak mulia akan sangat mendukung kinerja pembangunan. Kearifan lokal yang mencerminkan ketinggian moral dan akhlak mulia sudah berkembang di provinsi ini. Terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya dan berahlak mulia sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Pembangunan pendidikan juga bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya, dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan daerah. Selain itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespons modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai budaya daerah.

Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika pembangunan, membina ahlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat yang beragam sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah terdepan perbatasan yang berbudaya, sejahtera, adil dan beradab. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012 (akhir tahun RPJMD II).

Sasaran Pokok:

Sasaran pokok dalam mewujudkan misi pertama yaitu:

a. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat pendidikan akan berpengaruh pada semain tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja. Sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh melalui pendidikan yang didapatkan selama mengenyam pendidikan di sekolah. Semakin tinggi jenjang sekolah yang dialami penduduk maka akan semakin baik pengetahuan maupun ketrampilan untuk berinovasi dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan meningkatkan daya saing daerah. Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Daya saing daerah yang tinggi akan menjadikan Provinsi Kalimantan Utara siap untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, pembangunan daerah harus mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai dengan upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat akan berakibat pada semakin kuatnya daya saing daerah. Pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan daerah yang komprehensif.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah :

1) **Meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan**

Meningkatkan kualitas pendidikan dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional dan jika memungkinkan pencapaiannya melebihi standar pelayanan minimal tersebut. Pendidikan yang berkualitas memberikan bekal watak yang baik dan ketrampilan dasar yang memadai yang memungkinkan lulusan bekerja dan berkembang secara lebih leluasa dan lentur sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang berkembang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Ketrampilan dasar yang dimaksud meliputi kemampuan berpikir secara analitis atau kemampuan kognitif dan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan bekerja dalam tim dan kemampuan berkomunikasi sesuai jenjang pendidikan.

2) **Meningkatkan akses, pemerataan, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan**

Kesempatan untuk mendapat pelayanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan masih rendah. Arah kebijakan meningkatkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan merupakan upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dan berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

3) **Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan**

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata selama ini menjadikan sumber daya manusia di wilayah provinsi ini menjadi rendah. Terlebih sumber daya

manusia yang tinggal di daeah terpencil dan perbatasan mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang jauh lebih kurang memadai dibandingkan dengan wilayah lainnya. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk dapat menunjang upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

4) **Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan**

Dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan diperlukan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Kompetensi tenaga pendidik yang rendah akan mengakibatkan daya saing anak didik yang rendah pula. Kualitas kemampuan profesional dan kinerja guru akan memberikan pengaruh terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan serta kualitas kinerja dan jasa para lulusan dalam pembangunan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas peradaban dan martabat hidup masyarakat, bangsa, serta umat manusia pada umumnya.

Dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah dibedakan dalam tiga karakteristik yakni: (1) Wilayah perbatasan dan pedalaman diproritaskan pada peningkatan kemudahan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dengan keterpaduan ketrampilan, keterpaduan infrastruktur fisik dan non fisik serta serta peningkatan budaya; (2) Wilayah bagian tengah dan pantai timur diprioritaskan pada peningkatan kualitas, pemerataan dengan keterpaduan infrastruktur fisik dan non fisik; (4) Wilayah perkotaan diprioritaskan pada peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dengan keterpaduan ketrampilan dan keterpaduan budaya.

b. **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Derajat kesehatan masyarakat menyatakan tingkat/derajat status kesehatan yang dicapai di masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dapat digambarkan dengan angka kematian (mortalitas), angka kesakitan (morbiditas), status gizi masyarakat, dan usia harapan hidup. Derajat kesehatan yang semakin tinggi merupakan investasi strategis untuk pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia agar semakin berkualitas dan produktif sehingga dapat berdaya saing. Sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualitas merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan pengetahuan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yang membutuhkan peran serta aktif masyarakat yang didukung oleh pemerintah.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah :

1) **Meningkatkan pelayanan kesehatan seluruh masyarakat secara prima terlebih di daerah perbatasan**

Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga berdekatan dengan Brunei Darussalam yang secara kualitas pelayanan dan fasilitas lebih baik dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh provinsi yang terletak di perbatasan negara. Kenyataan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan Indonesia. Sehingga pelayanan prima di bidang kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah, jauh lebih baik kualitasnya dan tidak dapat disamakan dengan daerah lain di Indonesia untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

2) **Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah khususnya di daerah terpencil dan perbatasan**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah yang sangat luas sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah harus dapat dijangkau oleh seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. Pemerataan sarana pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar

wilayah, sehingga perlu adanya upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3) **Meningkatkan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi**
Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dari pembangunan kesehatan. Dalam mencapai pembangunan kesehatan yang optimal diperlukan pemerataan tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pemerataan tenaga kesehatan merupakan upaya penyediaan tenaga kesehatan secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitas serta termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah. Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah secara lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan swasta, serta mengantisipasi keadaan darurat kesehatan, dan pasar bebas di era globalisasi. Dengan demikian, angka kematian dan kesakitan diharapkan dapat menurun seiring dengan peningkatan pelayanan dan penanganan kasus oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

4) **Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui media komunikasi, penyuluhan, maupun kurikulum pendidikan formal maupun inforrmal**
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci pembangunan. Sebagai upaya preventif, peningkatan pengetahuan kesehatan oleh masyarakat merupakan investasi penting dalam pembangunan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

5) **Meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan**
Meningkatnya akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan akan berpengaruh terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, oleh karena berbagai keluhan kesehatan masyarakat diharapkan dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan yang mudah untuk diakses.

c. **Meningkatnya Kesiapan Masyarakat dalam Ketenagakerjaan**
Tenaga kerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar tenaga kerja, termasuk tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, akan dibekali dengan pengakuan kompetensi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global. Dalam waktu dekat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh provinsi ini terlebih letak dan posisi strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Masyarakat harus dipersiapkan dengan bekal ketrampilan maupun ilmu pengetahuan yang cukup memadai.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

1) **Mengembangkan pendidikan kejuruan**
Pengembangan pendidikan kejuruan merupakan satu hal penting dalam upaya untuk meningkatkan kesiapan masyarakat untuk memasuki lapangan kerja. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan sangat diperlukan.

2) **Membangun tata kelola sektor ketenagakerjaan**
Tata kelola sektor ketenagakerjaan perlu dibangun untuk mendukung upaya peningkatan kesiapan masyarakat dalam memasuki lapangan kerja. Tata kelola ketenagakerjaan yang dimaksud adalah membangun harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; serta peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja.

d. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kesetaraan gender merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan meningkatnya kesetaraan gender, perempuan maupun laki-laki diharapkan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan secara adil, efektif, dan akuntabel, sebagai faktor pendukung untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu perlu didorong upaya untuk menciptakan kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki untuk mencapai hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar tersebut akan meningkatkan kualitas dan martabat perempuan dan laki-laki secara adil, oleh karena selama ini perempuan masih terbatas dalam memperoleh akses terhadap hak-hak dasar tersebut yang diakibatkan oleh struktur sosial dan budaya masyarakat. Akses, partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran sosial dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun dalam pembangunan masih rendah. Kontrol dan penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan masih cukup rendah. Demikian pula manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil pembangunan masih cukup rendah. Di sisi lain perempuan merupakan tokoh utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam keluarga. Keterbatasan yang dialami perempuan tersebut tentu akan berakibat pada melambatnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari IPG (Indeks Pembangunan Gender), kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *gender empowerment measurement* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

1) **Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender (PUG)**

Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender diperlukan untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama pada semua tahapa proses pembangunan daerah dan pengambilan kebijakan. Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; serta belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan. Hal ini mengakibatkan kesetaraan gender belum dapat tercapai.

2) **Meningkatkan pemberdayaan perempuan**

Kualitas hidup dan peran perempuan yang belum optimal menjadi salah satu hal penting yang mendasari upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan. Rendahnya peran peran dan partisipasi perempuan dapat diamati di bidang politik, jabatan publik dan bidang ekonomi serta rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit. Selain itu didasari oleh masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

3) **Meningkatkan perlindungan anak**

Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di pihak negara dan pemerintah, namun masyarakat, keluarga, dan orangtua, memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Anak merupakan aset dari komunitas sosial sehingga investasi dalam bentuk perlindungan, pengakuan dan pemajuan akan hak-haknya akan memperkuat struktur produktivitas dan integrasi sosial di masa yang akan datang. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera, seperti tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak dasar anak tersebut antara lain hak identitas diri sebagai warganegara, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggula berhak mendapatkan pendidikan khusus. Hak anak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental sehingga keberadaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat dan arti penting pendidikan bagi anak sebagai mahkluk individu dan sosial.

Sementara itu perlindungan anak yang perlu diperhatikan untuk provinsi ini adalah hak anak atas identitas, pendidikan dan pengajaran serta pelayanan kesehatan. Hak anak atas pendidikan dan pengajaran serta pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan menjadi prioritas. Akte kelahiran merupakan hak anak yang mendasar sebagai bentuk identitas setiap anak. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, anak akan kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Seorang anak yang tidak memiliki identitas yang jelas akan semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja maupun kekerasan.

Rendahnya kepemilikan akte atas anak menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan. Kepemilikan akte kelahiran anak seringkali terhambat oleh birokrasi, serta kondisi geografis wilayah provinsi ini yang cukup luas serta aksesibilitas di daerah terpencil dan perbatasan sangat terbatas. Peran aktif pemerintah sebagai penyedia akte kelahiran untuk memenuhi hak dasar atas anak harus ditingkatkan.

e. Meningkatnya Kualitas dan Peranan Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan pemuda memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya terkait dengan upaya untuk memanfatkan bonus demografi yang akan dialami oleh Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2020-2025. Pada masa tersebut diperkirakan akan mengalami rasio ketergantungan penduduk terendah. Periode tersebut merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan daerah sehingga kelompok usia produktif tersebut dapat menjadi tenaga kerja dengan produktivitas tinggi dan berpotensi mendorong ekonomi daerah tumbuh dengan sangat cepat di kemudian hari.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda

Pemuda sebagai generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan menjadi potensi utama untuk menopang produktivitas nasional, terutama terkait dengan pemanfaatan peluang bonus demografi dan *ASEAN Economic Community* 2015. Kapasitas dan kualitas pemuda ditingkatkan dengan memperluas kesempatan memperoleh peningkatan wawasan dan sikap mental, peningkatan potensi dan ketrampilan dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.

2) Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan

Pemuda memiliki potensi kekuatan besar dalam pembangunan perekonomian daerah. Pemuda tidak hanya sebagai sumber daya produksi bagi kegiatan perekonomian sebagai tenaga kerja, tetapi juga merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian daerah. Pemuda juga memiliki sifat sebagai pembawa pembaharuan dan perubahan, seperti gerakan sosial-keswadayaan sebagai *social workers*, penumbuhan modal sosial, pengembangan seni dan budaya, kegiatan ekonomi kreatif, serta kegiatan olahraga. Pemuda menjadi pelopor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penemuan dan pemanfaatan iptek. Potensi pemuda tersebut menjadikan pemuda memiliki peran penting sebagai pembaharu dan pelopor kemajuan peradaban manusia.

Peran pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ditingkatkan melalui peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat,

peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS, serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.

3) **Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga**

Meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga dilakukan dengan pengembangan kebijakan dan manajeman olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan akses, partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk karakter, peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan olahraga, peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan bakat prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, peningkatan kerjasama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

f. Meningkatnya Kualitas Spiritualitas Masyarakat yang Beragam

Tata kehidupan masyarakat plural (heterogen) yang harmoni dan damai yang didasarkan pada nilai-nilai religiusitas yang ditandai dengan adanya kerjasama dan saling hormat menghormati antar kelompok masyarakat.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

1) **Meningkatkan peran institusi keagamaan dan lembaga keormasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat madani**

Kualitas spiritual masyarakat yang dimaksud merangkum kualitas masyarakat dalam menerapkan berbagai tuntunan yang baik berupa keagamaan yang resmi diatur dalam ketentuan perundangan mapun di luar ketentuan namun hidup dan berkembang nyata di masyarakat. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk meyakini nilai-nilai yang diyakini dan akan dilaksanakannya. Namun sesuai konstitusi dan perundangan, pemerintah mempunyai legitimasi untuk mengatur hal-hal yang bersifat publik, dalam bentuk kebijakan publik. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk menjadi katalisator dan memberi kemudahan untuk berkembangnya nilai keagamaan dan spiritualitas yang baik di masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peran tersebut karena disamping azas otonomi yang diterapkan, azas lain yakni dekonsentrasi juga harus diberlakukan. Oleh karena itu urusan yang berkaitan dengan keagamaan bagian tertentu (terutama pembinaan kewilayahan) jadi kewenangan yang harus dilaksanakan.

Untuk melaksanakan peran ini prinsip partisipasi merupakan salah satu prinsip yang cukup relevan dan tepat untuk diterapkan sejalan dengan proses demokratisasi yang semakin kuat berjalan dewasa ini. Secara nyata, hal ini berupa upaya memberi peran yang besar pada berbagai institusi keagamaan yang ada untuk ikut membina kehidupan masyarakat yang baik dalam perspektif keagamaan yang diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kondisi masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat madani. Disamping lembaga keagamaan, lembaga lain yang mempunyai pengaruh terhadap pembinaan masyarakat yang baik perlu juga diperankan seperti lembaga keormasan (dengan asumsi lembaga keormasan yang mempunyai rekam jejak dalam menerapkan nilai-nilai yang baik). Lembaga lain yang bersifat non formal tetapi ada tumbuh berkembang di masyarakat dan berpengaruh terhadap nilai-nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat juga diberikan peran.

2) **Meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama**

Kondisi masyarakat Kalimantan Utara yang ada saat ini secara umum mempunyai karakteristik yang dapat dipilahkan menjadi tiga kelompok keruangan. Pertama adalah kelompok yang disebut pedalaman atau bagian barat dari Provinsi Kalimantan Utara, mempunyai ciri masyarakat yang kurang lebih bersifat homogen. Kemudian kedua dan ketiga adalah Kalimantan Utara di bagian tengah dan bagian timur (pantai/pulau2) berciri masyarakat yang sangat heterogen baik secara etnis maupun sosial ekonomi antara penduduk asli, dan pemukim pendatang baik yang sudah sangat lama maupun yang belum lama.

Berkenaan dengan karakteristik ini, pada satu sisi masayarakat yang berbeda dan majemuk ini merupakan satu karakteristik yang sangat baik dikaitkan dengan persatuan dan masalah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini akan merupakan unsur yang pada saatnya nanti merupakan butir kuat untuk lebur menjadi warga Indonesia disamping sebagai

warga suku tertentu. Namun pada sisi yang lain, keragaman ini akan menjadi potensi konflik yang merupakan masalah jika tidak dikembangkan suasana kerukunan antar kelompok masyarakat tersebut.

Dari berbagai unsur yang harus diupayakan peningkatan nilainya, kerukunan antar umat beragama diperkirakan dapat menjadi pemicu kuat untuk menyuburkan suasana kerukunan antar kelompok. Jika dapat diwujudkan suasana kerukunan antar umat beragama diperkirakan akan lebih mudah mewujudkan kerukunan antar kelompok masyarakat. Agama sebagai sumber tuntunan untuk berperilaku baik dan mulia harus muncul mengambil peran atau diperankan. Dengan demikian arah kebijakan untuk meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama sangat perlu dijadikan sebagai unsur pencerahan dalam berbagai dimensi pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk merumuskan tindak lanjut kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara penelaahan lebih mendalam tentang kondisi riil yang ada disamping mencari praktek-praktek yang berhasil (*best practices*) di tempat lain terutama dengan lingkungan komunitas yang mirip atau hampir bersamaan dengan Provinsi Kalimantan Utara.

3) **Meningkatkan implementasi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan dan perilaku masyarakat**

Dari berbagai telaah, dapat dipilahkan dua lingkungan yang bersifat internal atau pribadi anggota masyarakat tentang nilai-nilai agama dan spiritualitas yakni: lingkungan untuk mendalami pemahaman nilai-nilai dan lingkungan tempat pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Untuk mendasari kebijakan meningkatkan implementasi nilai-nilai agama dan spiritualitas yang ada dalam setiap tindakan dan perilaku masyarakat, dua lingkungan tersebut harus menjadi sasaran arah kebijakan.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman nilai perlu ditingkatkan. Implementasi nilai hanya akan berjalan baik jika pemahaman atas nilai yang baik juga tinggi tingkatnya. Artinya dengan pemahaman yang tinggi tentang nilai-nilai yang baik akan lebih mudah untuk mengharapkan hasil implementasi yang juga bersifat baik.

Penerapan nilai keagamaan di dalam masyarakat akan menjadi modal yang kuat dalam membentuk masyarakat yang baik dan berakhlak mulia. Ini penting karena implementasi nilai dalam tindakan yang terlihat dan akan menjadi kenampakan yang selanjutnya akan menjadi citra dan ciri masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mempunyai ciri yang baik maka diupayakan masyarakat melaksanakan nilai-nilai yang baik dari tuntunan yang diyakininya.

Dalam tindak lanjut kebijakan ini, diperlukan perwujudan lingkungan yang mendorong implementasi nilai-nilai tersebut. Beberapa lingkungan yang strategis untuk disasar antara lain: tingkat keluarga, tingkat lingkungan pendidikan luar keluarga (sekolah mulai dari jenjang pendidikan tingkat dasar, menengah bahkan tinggi), dan pada tingkat kelompok masyarakat lainnya (organisasi masyarakat).

2. Misi 2: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah di Pulau Kalimantan yang masih mempunyai kondisi lingkungan hidup yang baik. Jika dilihat secara spasial maka wilayahnya sebagian besar masih tertutupi oleh keberadaan hutan hujan tropis baik dataran rendah maupun pegunungan. Hal ini menjadikan provinsi ini sebagai "paru-paru" Kalimantan dan bahkan menjadi salah satu kawasan "paru-paru" dunia dengan keberadaan hutan hujan tropis yang masih luas. Secara keruangan, sebagian sumber daya telah dipertahankan sebagai kawasan konservasi yang harus dilindungi. Di provinsi ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan salah satu kawasan konservasi yang sangat luas dan kondisinya masih baik. Selain itu juga terdapat beberapa kawasan hutan lindung. Namun beberapa kawasan lindung ini mengalami tekanan terutama yang berada di Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan. Pemerintah daerah, masyarakat dan swasta harus dapat mempertahankan dan menjaga kondisi kawasan konservasi dan lindung ini, bahkan meningkatkannya dengan jalan menanggulangi berbagai kerusakan dan gangguan yang terjadi.

Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi yang mempunyai beragam sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sumber daya alam yang bernilai ekonomis ini dapat berupa komponen-komponen biotis di alam yang seperti hutan hujan tropis beserta beragam kekayaan hayati, dan juga potensi perikanan di laut dan sungai. Selain itu provinsi ini juga kaya akan potensi bahan tambang baik bahan mineral,

minyak dan gas bumi. Golongan pertama merupakan sumber daya alam yang dapat terpulihkan (*renewable resources*) dan golongan kedua merupakan sumber daya yang tidak terpulihkan (*unrenewable resources*).

Sumber daya alam yang tidak terpulihkan dapat secara cepat menjadi langka jika dieksploitasi secara masif dan terus menerus, bahkan dapat menghilang atau habis. Selain resiko kelangkaan dan kepunahan, dalam proses pengelolaannya pun berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu penggunaan istilah berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam ini mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Adanya potensi kelangkaan dan kepunahan maka pemanfaatannya harus mengandung prinsip-prinsip penghematan sehingga sumber daya yang ada ini mampu dimanfaatkan selama mungkin dari generasi ke generasi. Dengan demikian hal ini berbeda dengan prinsip sebanyak-banyaknya selama hal tersebut mungkin untuk dilakukan.
2. Adanya risiko kerusakan lingkungan dalam proses pengelolaannya maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasif, sehingga kerusakan yang terjadi dapat diminimalkan. Hal ini perlu dilengkapi dengan adanya sebuah proses pemulihan lingkungan (reklamasi) paska kegiatan eksploitasi sehingga dapat mengembalikan sebagian bahkan keseluruhan dari kerusakan yang terjadi.

Di lain pihak sumber daya alam yang terbarukan tidak lepas dari resiko kerusakan dan kepunahan seperti hilangnya sebuah spesies hewan atau tumbuhan tertentu karena lingkungan atau ekosistem tempat hidupnya yang telah rusak. Sumber daya alam yang terbarukan jika dikelola secara tidak ramah lingkungan maka sifat terbaharukannya tidak mampu menyelamatkannya dari kelangkaan bahkan kepunahan. Ramah mempunyai arti yang sangat penting terkait sikap kehati-hatian dalam memanfaatkan sumber daya alam sekalipun mempunyai sifat yang terbaharukan. Ikan di sungai dan di laut dapat berkurang potensinya, kayu-kayu besar dan beragam dapat menghilang, dan bencana alam melanda jika alam tidak dikelola dengan ramah. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam ini selain untuk meningkatkan perekonomian juga harus dikelola dengan sikap ramah sekaligus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Lingkungan hidup yang baik tidak hanya diwujudkan dalam pengelolaan kawasan konservasi, kawasan lindung dan dalam pengelolaan sumber daya alam saja. Kawasan budidaya sebagai tempat tinggal dan sebagai area melakukan kegiatan budidaya dengan semua aktivitasnya harus dijaga kualitasnya. Pemukiman, areal industri, terminal, pasar, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya perlu dikelola dengan prinsip keberlanjutan demi menciptakan lingkungan hidup yang ramah bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hal ini terkait dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang layak tinggal sekaligus harmonis dengan alam.

Meskipun Provinsi Kalimantan Utara masih berusia muda, namun kegiatan eksploitasi sumber daya alam telah berlangsung sejak lama, bahkan untuk pemanfaatan sumber daya migas telah dilakukan sejak masa kolonial. Praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam di masa lalu sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini. Pemanfaatan sumber daya alam terutama pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan hutan dan pengembangan perkebunan selain telah mampu memberikan kontribusi ekonomi juga menyebabkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih dijumpai sejumlah kondisi berupa lahan kritis, bekas tambang yang tidak tereklamasi dan kawasan hutan lindung yang mendapatkan gangguan dari peruntukan yang lainnya. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk memulihkan kondisi ini agar lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Sasaran Pokok:

1. **Peningkatan Kelestarian Kawasan Lindung**

   Sasaran pokok dari misi pertama ditujukan pada kawasan konservasi dan kawasan lindung. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai beberapa kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung, taman nasional, resapan air dan pantai berhutan bakau. Kawasan lindung merupakan wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaannya namun demikian peran pemerintah daerah masih diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan lindung ini.

   Kawasan lindung merupakan suatu kesatuan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Kelestariannya merupakan tugas dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun program-program kolaboratif dengan pihak pengelola kebutuhan masyarakat provinsi ini, nasional bahkan global. Hutan lindung berfungsi untuk memberikan perlindungan dari berbagai kemungkinan bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan juga kekeringan. Oleh karena itu melestarikan kawasan lindung merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara bersama-sama dan bersinergi dengan pemerintah pusat.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

a. **Mengembangkan pola *collaborative management* dalam pengelolaan kawasan lindung**
Pemerintah daerah akan mendorong terjadinya pengelolaan yang bersifat kolaboratif dalam pengelolan kawasan konservasi dan lindung. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengelolaan kawasan tersebut menjadi kepentingan/perhatian banyak pihak. Akan sangat baik jika melalui pendekatan kolaboratif ini semua pihak akan meningkat partisipasinya dan mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi pengelolaan kawasan konservasi dan lindung di Provinsi Kalimantan Utara.

b. **Mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kelestarian hutan lindung**
Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi di tingkat daerah (perda) yang memperkuat penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan/hutan lindung. Dengan adanya peraturan daerah ini maka aparatur daerah akan semakin kuat dalam melakukan penegakan hukum. Untuk kabupaten/kota yang telah mempunyai perda maka pihak provinsi dapat memberikan dukungan yang lain dalam rangka penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan lindung ini.

2. **Terwujudnya Tata kelola Sumber Daya Alam yang Baik (*Good Natural Resources Governance*)**
Ketersediaan berbagai sumber daya alam baik di darat maupun di laut yang melimpah jangan sampai diikuti oleh sistem atau rezim pengelolaan yang hanya memperhatikan kepentingan sesaat. Pemerintah daerah beserta semua komponen yang ada akan berusaha keras mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang ramah dan berkelanjutan ini atau mewujudkan tata kelola yang baik. Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan pada azas legalitas yang mantap, keruangan yang jelas dan kuantitas terukur yang mampu menjamin keberadaan dan keberlangsungan sumber daya itu sendiri. Kegiatan penambangan ilegal, *illegal logging*, perkebunan yang menyalahi aturan tata ruang dan tata guna lahan akan disikapi dengan tegas dengan penegakan hukum. Disamping itu pengelolaan sumber daya alam juga harus peka dan sensitif terhadap risiko degradasi lingkungan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tindakan pemulihan lingkungan yang mengalami degradasi sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam. Mengingat bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan kawasan hutan maka penerapan *good forest governance* sangat penting untuk dilakukan di wilayah ini.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

a. **Mengembangkan regulasi daerah yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan**
Berbagai kebijakan di tingkat pusat yang telah mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam akan semakin kuat jika didukung oleh terbitnya regulasi daerah yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakter khas daerah. Aparatur pemerintah daerah akan dapat melakukan penegakan hukum secara lebih tegas jika didukung oleh regulasi daerah, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini. Pemerintah daerah akan mengembangkan berbagai regulasi yang menjamin pengelolaan sumber daya alam di darat maupun di perairan akan diselenggarakan dengan prinsip yang menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pemerintah dapat mengembangkan regulasi tentang sistem legalitas berbagai produk yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam. Sistem ini akan menjadi suatu cara untuk melakukan verifikasi terhadap proses yang dilalui sebuah sumber daya sebelum nantinya menjadi suatu komoditi. Sistem ini dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian proses di hulu tersebut dengan regulasi yang ditetapkan.

b. **Meningkatkan upaya penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan**
Hal ini merupakan kelanjutan dan konsekuensi logis dari diterapkannya berbagai regulasi daerah yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini terutama terkait dengan tata guna lahan yang harus sesuai dengan peruntukannya. Penegakan hukum ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah karena berhadapan dengan berbagai pihak yang bertentangan dalam hal ini. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat bagi pemerintah daerah dan kemampuan untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam.

3. **Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Lingkungan pada Kawasan Budidaya**

Kualitas kehidupan masyarakat di provinsi ini tergantung pada lingkungan tempat tinggal dan bekerja. Lingkungan hidup yang nyaman, aman dan terbebas dari berbagai resiko bencana alam, wabah penyakit dan gangguan-gangguan lain merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Hal ini terutama penting diperhatikan pada kawasan-kawasan perkotaan yang telah tumbuh dan berkembang. Jika tidak diikuti oleh tata kelola lingkungan yang memadai maka pertumbuhan di perkotaan akan diikuti oleh meningkatnya resiko munculnya lingkungan hidup yang tidak sehat. Maka diperlukan arah kebijakan yang mampu menghindarkan masyarakat dari lingkungan hidup yang tidak sehat ini. Perencanaan dan penerapan tata ruang yang baik dan ramah lingkungan merupakan hal mendasar untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu fasilitas dan sarana seperti tersedianya sistem sanitasi yang baik, sistem dan infrastruktur pembuangan sampah dan limbah dari rumah tangga dan industri akan mendapatkan perhatian yang serius ke depan. Penerapan AMDAL dan pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan industri dapat menjamin terwujudnya lingkungan yang layak dan sehat di kawasan budidaya.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

a. **Mengembangkan regulasi daerah tentang kualitas lingkungan hidup dan membangun budaya hidup sehat pada kawasan budidaya**

   Pemerintah daerah akan mengembangkan berbagai regulasi yang mengatur tentang tingkat kenyamanan hidup dan hak mendapatkan lingkungan yang layak bagi masyarakat di kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari baik antara lain berupa area pemukiman, industri, perkantoran, ruang dan sarana publik. Budaya hidup bersih dan selaras dengan lingkungan akan terus dikembangkan. Kesadaran yang mengarah pada budaya untuk peduli lingkungan hidup harus ditanamkan dan dibangun terutama pada kalangan generasi muda. Di masa depan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi masyarakat yang sangat peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.

b. **Meningkatkan upaya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat umum dan pengusaha tentang pentingnya *Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan***

   Pemerintah provinsi akan berupaya secara simultan dan terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan berbagai pihak tentang pentingnya *Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan.* Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan intensitas kampanye peduli lingkungan ataupun penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tentang pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya persuasif akan ditempuh melalui pendidikan formal maupun informal serta bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh adat.

4. **Terpulihkannya Lingkungan Hidup yang Telah Mengalami Degradasi**

Kegiatan pemanfaatan dan eksploitasi alam yang telah terjadi sekian puluh tahun di wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini menyebabkan sebagian kondisi lingkungan hidup mengalami degradasi. Lahan kritis, lahan mangrove yang terbuka, terumbu karang yang rusak, lingkungan kumuh perkotaan, perambahan kawasan lindung. Oleh karena itu diperlukan upaya yang kuat dan terukur dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang telah terdegradasi ini khususnya lahan kritis yang saat ini masih luas di Provinsi Kalimantan Utara.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

a. **Mengembangkan pola partisipatif dan berkelanjutan dalam pemulihan lahan kritis atau lingkungan yang telah terdegradasi**

   Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani dan memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak. Pemulihan kondisi lingkungan yang terdegradasi ini harus didukung oleh pihak lain terutama masyarakat di sekitar lokasi. Pemulihan ini idak dapat dijalankan dengan prinsip "lingkungan untuk lingkungan" artinya pendekatan bahwa pemulihan hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik lingkungan akan menyebabkan minimnya dukungan dan peran serta masyarakat. Pemerintah akan mengutamakan prinsip atau azas "lingkungan untuk dan oleh masyarakat" dalam melaksanakan program-program pemulihan kondisi lingkungan yang telah rusak.

b. **Mengembangkan sistem mitigasi bencana lokal dan regional secara alami maupun pemanfaatan teknologi**

Sistem mitigasi bencana lokal dan regional secara alami maupun pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan mengingat provinsi ini memiliki potensi rawan bencana alam berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan maupun bencana alam geologi berupa gempa bumi, liquifaksi, patahan aktif maupun tsunami. Sistem mitigasi bencana merupakan pengaturan secara menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam mitigasi bencana yang ditetapkan dalam pedoman dalam mengurangi risiko bencana lokal dan regional yang dilakukan secara alami maupun dengan memanfaatkan teknologi atau rekayasa. Sistem mitigasi bencana ini memuat aturan hukum, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan, pengelolaan sumber daya dan pendanaan. Sistem mitigasi bencana akan menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dan mengantisipasi perilaku alam yang berpotensi menimbulkan bencana dengan lebih baik.

Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko kematian, cedera terhadap penduduk dan mengurangi kerugian harta benda, serta mengurangi konsekuensi yang saling merugikan dari bahaya alam terhadap aktivitas ekonomi dan institusi sosial di saat terjadi bahaya atau bencana di masa mendatang. Mitigasi bencana juga merupakan upaya untuk mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik dan sektor swasta yang akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu melalui mitigasi bencana, penduduk didorong untuk melindungi diri dari bahaya bencana sejauh mungkin. Dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan ketangguhan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Diperlukan juga upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap kerusakan fisik dan kerusakan ekonomi dan berkurangnya sumber daya untuk pemulihan dalam waktu cepat terhadap bencana dengan memperkuat institusi sosial dan aktivitas ekonomi. Pelestarian pengetahuan lokal diperlukan dengan mengkombinasikan aplikasi pengetahuan terbaru dalam mengantisipasi bencana.

Dalam upaya mengembangkan sistem mitigasi bencana diperlukan kebijakan pembangunan yang memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialissi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan wilayah rawan bencana. Pemerintah melalui lembaga terkait seperti BNPB, BPBD, dan lembaga lembaga lain seperti BMKG, Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BPPT, TNI-Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Perguruan Tinggi berkolaborasi untuk menyiapkan peta risiko bencana baik banjir, tanah longsor, air pasang/rob, abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan. Peta risiko bencana ini dapat dimanfaatkan dan disosialisasikan kepada pihak terkait dan masyarakat agar melakukan usaha mitigasi bencana lokal maupun regional secara alami maupun dengan memanfaatkan teknologi dengan dana pembiayaan dari pemerintah, swasta, maupun partisipasi masyarakat. Usaha mitigasi bencana dapat ditingkatkan koordinasinya dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam upaya pengembangan sistem mitigasi bencana perlu dikembangkan kebijakan mitigasi yang berbasis masyarakat, dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, tenaga kerja dan manajemen. Mitigasi berbasis masyarakat akan memperkuat kemampuan masyarakat untuk menghindari atau melindungi diri sendiri, harta benda dan sarana kehidupan lain dari bahaya alam.

3. Misi 3: Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada potensi sumber daya alam terbarukan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan yang ramah terhadap lingkungan, berorientasi kerakyatan, mengutamakan aspek keadilan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan daerah serta mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi yang mampu bersaing dengan produk daerah dan negara lain. Proses kegiatan ekonomi yang produktif, efisien dan berkelanjutan serta menghasilkan produk yang berkualitas tinggi merupakan syarat utama agar mampu bersaing dengan era globalisasi ekonomi baik dalam lingkup ASEAN maupun dunia.

Sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di provinsi ini. Sebagai sektor unggulan, ketiga sektor tersebut harus mampu menjadi penggerak utama ekonomi melalui keterkaitan produksi dan keterkaitan konsumsi, mampu menciptakan lapangan kerja,

mempunyai daya dukung lingkungan yang tinggi sehingga terjadi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan serta membuka peluang usaha bagi semua pelaku usaha secara berkeadilan.

Sektor pertanian dalam arti luas yang terdiri dari sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, peternakan dan kehutanan merupakan sektor yang memanfaatkan sumber daya terbarukan dan tumpuan utama mata pencaharian penduduk Provinsi Kalimantan Utara serta sebagai penyumbang terbesar ketiga dalam ekonomi Provinsi Kalimantan Utara setelah sektor pertambangan dan sektor perdagangan yang perlu terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan habisnya sumber daya tak terbarukan. Peran strategis tersebut tidak sebanding dengan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor lain. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian diarahkan pada peningkatan nilai tambah yang terwujud dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas produk dan diversifikasi produk pertanian melalui pengembangan pertanian terpadu dan teknologi budidaya pertanian yang modern dan tepat guna.

Dengan tersedianya berbagai produk pertanian yang berkualitas, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan bahkan mampu menjangkau pasar nasional dan internasional. Peningkatan nilai tambah pertanian juga terwujud dengan meningkatnya nilai tukar petani yang berarti terjadi peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan petani. Pengembangan sektor pertanian juga diarahkan untuk memberikan peluang secara adil bagi semua petani.

Pengembangan nilai tambah sektor pertanian yang lebih tinggi mensyaratkan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Hingga saat ini kinerja industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan belum ada keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri. Oleh karena itu pengembangan sektor industri akan diarahkan pembangunan dan pengembangan industri terutama industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini sejalan dengan salah satu arah kebijakan industri 2005-2025 dalam RPJPN yaitu struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan, serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktek terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Berkaitan dengan arah kebijakan industri tersebut, pengembangan industri di Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya diarahkan untuk pengolahan hasil pertanian tetapi juga diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan secara berkelanjutan. Pembangunan industri juga diarahkan untuk selalu menjaga keseimbangan struktur industri dalam skala usaha yang menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah.

Posisi geografis sebagai salah wilayah terdepan Indonesia di bagian Utara dan keberadaan Pelabuhan Tarakan serta besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki terutama sumber daya pertambangan menjadikan sektor perdagangan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pembantukan ekonomi daerah dan sektor ketiga terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menjadi modal dasar bagi pengembangan sektor perdagagan di masa depan. Sejalan dengan arah kebijakan perdagangan nasional, pengembangan perdagangan diarahkan pada untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha dan peningkatan ekspor melalui peningkatan akses dan kerjasama internasional serta pengembangan citra dan standar produk yang berkualitas internasional.

Pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan tidak berarti mengabaikan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lain termasuk sektor yang memanfaatkan sumber daya alam tidak terbarukan. Pengembangan sektor-sektor ekonomi lain tersebut akan diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan. Sektor pertambangan yang saat ini merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk ditingkatkan nilai tambahnya sebagai sumber energi bagi pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian dan bahan baku bagi industri pengolahan hasil pertambangan. Selain itu, pengembangan ekonomi juga diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis sumber daya lokal.

Pengembangan perekonomian yang berdaya saing tersebut di atas perlu didukung oleh upaya peningkatan kualitas SDM dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk UMKM, perluasan jejaring pasar dan berbagai dukungan kebijakan yang memadai perlu dilaksanakan untuk menciptakan daya saing ekonomi daerah. Keterpaduan/integrasi dan sinergi semua pihak (masyarakat, pemerintah dan swasta) sangat diperlukan untuk membangun perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.

Sasaran Pokok

Sasaran pokok dalam mewujudkan misi ketiga yaitu:

a. Meningkatnya Nilai Tambah Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan

Sektor unggulan Provinsi Kalimantan Utara adalah sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta memanfaatkan sumber daya terbarukan sebagai bahan baku. Dengan kata lain sektor unggulan adalah sektor yang mampu menggerakan ekonomi wilayah melalui keterkaitan produksi dan konsumsi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sektor-sektor unggulan tersebut adalah sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri pengolahan hasil pertanian dan sektor perdagangan.

Peningkatan nilai tambah sektor unggulan akan tercermin dalam peningkatan produksi dan produktivitas yang disertai dengan penggunaan biaya produksi yang efisien dan harga produk yang bersaing. Harga yang bersaing tercermin pada kualitas produk yang dihasilkan mampu berkompetisi dengan produk yang sama dari wilayah lain dan negara lain. Dengan kualitas yang tinggi, produk-sektor sektor unggulan terutama pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian akan mempunyai jangkauan pasar yang luas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga nasional dan internasional. Posisi geografis Provinsi Kalimantan Utara memberikan keuntungan lokasi untuk memasarkan produk sektor unggulan pada pasar nasional dan internasional. Dengan peningkatan permintaan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian akan meningkatkan aktivitas di sektor perdagangan. Peningkatan nilai tambah juga tercermin pada diversifikasi produk-produk sektor unggulan baik secara horisontal maupun secara vertikal. Pada akhirnya peningkatan nilai tambah sektor unggulan bermuara pada peningkatan laju pertumbuhan sektor ungggulan dalam PDRB dan kontribusinya terhadap pembentukan ekonomi (PDRB) Provinsi Kalimantan Utara.

Peningkatan nilai tambah sektor unggulan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan sektor-sektor ekonomi lain dan membangkitkan kegiatan ekonomi baru melalui keterkaitan produksi dan keterkaitan konsumsi. Kalau hal ini terjadi, pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan skala ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah :

1) **Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat**

Dalam meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil berarti memberikan kesempatan kepada semua pelaku ekonomi pada berbagai skala usaha untuk berpartipasi dalam pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peluang peningkatan produksi pertanian diprioritaskan kepada masayakat lokal dengan dukungan regulasi pemerintah yang jelas dan tegas. Selain itu, untuk mencapai produksi yang diinginkan dan menghasilkan produk yang berdaya saing diperlukan pengembangkan teknologi tepat guna, dukungan permodalan, bantuan saprodi dan jaminan kepastian pasar dan harga pasar.

Dalam kaitan pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan perlu dikembangkan pertanian terpadu yang seminimal mungkin penggunaan input kimiawi. Pertanian terpadu tidak saja meningkatkan produksi tetapi efisisen dalam penggunaan input-input yang dibutuhkan dan berdampak minimal terhadap kerusakan lingkungan sehingga terjadi peningkatan nilai tambah produk pertanian.

2) **Meningkatkan pembangunan infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mencapai peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor lain yang terkait. Infrastruktur yang strategis untuk pengembangan sektor-sektor unggulan adalah infrastruktur sumber daya air, infrastruktur energi, infrastruktur transportasi dan infrastruktur telekomunikasi. Pengembangan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi pengembangan sekto unggulan melalui peningkatan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur penampung air, infrastruktur irigasi dan infrastruktur air bersih. Pengembangan infrastruktur energi diarahkan untuk pengembangan kemampuan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara memadai, pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang memiliki sistem tata kelembagaan yang terstruktur dan pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru terutama pada pembangkit listrik yang berbasis batubara dan gas secara terbatas

dan bersifat jangka menengah. Pengembangan infrastruktur transportasi diarahkan pengembangan jaringan pelayanan antar moda dan intra moda yang dapat yang dapat menjamin distribusi input dan output sektor unggulan secara efisisen sehingga mampu menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan harga jual produk-produk sektor unggulan. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi diarahkan untuk mendorong terciptanya pelaku usahayang berbasis informasi.

3) **Memperkuat perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan**

Sesuai dengan visi RPJMN 2015-2019, kedaulatan pangan nasional merupakan hal yang ingin diwujudkan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diatur bahwa *Kedaulatan Pangan* adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan dalam undang-undang ini juga diatur bahwa *Ketahanan Pangan* adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan perlu diwujudkan dengan cara yang sifatnya berkedaulatan pangan.

Dalam agenda pengembangan wilayah RPJMN 2015-2019 Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan sebagai sebagai salah satu daerah pendukung penghasil pangan. Namun memperhatikan kondisi kegiatan produksi pangan pada saat ini perlu dilakukan loncatan yang besar sebagai pemasok pangan nasional, khususnya terkait SDM yang melakukan kegiatan pertanian dan lahan yang dipergunakan untuk mendukung produksi pertanian. Salah satu cara untuk mempercepat terwujudnya kegiatan pertanian secara intensif dan berskala besar secara konsepsual adalah dengan mengembangkan agropolitan. Sedangkan secara praktis adalah dengan mengembangkan *food estate*. *Food estate* merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (lebih besar dari 25 hektar) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dan manajemen modern[1]. Upaya ini diyakini akan mampu meningkatkan produksi pangan dalam waktu yang relatif singkat, namun dari aspek sosial ekonomi diragukan manfaatnya bagi masyarakat lokal. Olah karena itu arah kebijakan pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara secara gradual lebih bersifat pengembangan agropolitan sedangkan dalam jangka pendek (sudah dimulai di beberapa tempat) dapat menerapkan konsep *food estate* dengan berbagai arahan yang sebaiknya cukup ketat berkaitan dengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

4) **Memperkuat kelembagaan petani**

Kelembagaan petani mempunyai peranan besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani berkontribusi dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani melalui aksesibilitas terhadap nformasi pertanian, aksesibilitas terhadap modal, infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi-inovasi pertanian. Selain itu kelembagaan petani mempermudah bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan fasilitas dan penguatan terhadap petani. Berkaitan dengan peran strategis tersebut, kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensiusahatani, dan daya saing petani.

5) **Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perkebunan dan perikanan**

Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas ditujukan untuk peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Searah dengan RPJPN 2005-2025, industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan. Proses produksi tersbut akan menghasilkan produk yang berdaya saing pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

[1] http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/819/file/Bagian-1.pdf diakses 30 Januari 2015

2) **Meningkatkan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha**

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya diversifikasi kesempatan kerja dan berusaha sebagai sasaran dari misi Provinsi Kalimantan Utara yakni mengembangkan perekonomian yang berdaya saing maka harus diupayakan adanya pengembangan yang membuka peluang kesempatan berusaha. Kebijakan yang diberlakukan untuk mewujudkan sasaran ini adalah dengan meningkatkan kesempatan berusaha. Disadari bahwa karena keterbatasan pendanaan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian keseluruhan wilayah dan kegiatan yang akan ditumbuhkan maka perlu dilakukan penggalangan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan perekonomian wilayah. Secara lebih nyata, perlu kebijakan untuk mengikutsertakan dan melibatkan pengusaha lokal maupun pengusaha sekitar, bahkan pada tingkat nasional dan internasional. Keikutsertaan dan keterlibatan para pengusaha untuk berpartipasi bukan sesuatu yang mudah dan merupakan proses searah melainkan sebuah proses timbal balik. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan citra bahwa berbagai hal yang ada di Provinsi Kalimantan Utara akan mendukung usaha para pengusaha dengan aman dan baik. Dengan kata lain menciptakan Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai daya saing tinggi.

Kebijakan untuk mencapai keadaan tersebut memberi arahan untuk menyiapkan kelembagaan di dalam pemerintahan, sebagai provinsi yang baru terbentuk. Butir ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah yang mencitrakan keterbukaan dalam berusaha. Disamping itu juga harus diperkuat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan perekonomian wilayah seperti jalan raya, pelabuhan udara, pelabuhan air/laut, transportasi air/laut, serta utilitas publik yang diperlukan seperti air bersih, listrik, jaringan telepon dan kebutuhan lainnya. Upaya lain yang harus menjadi penjabaran dari arah kebijakan adalah peningkatan kualitas SDM calon tenaga kerja dalam perekonomian wilayah. Hal ini perlu ditambah dengan hal-hal lain yang diperlukan dengan menginventarisasi secara lebih spesifik dan cermat.

Jika kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan dampak pada perekonomian daerah, diharapkan hasilnya akan mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat membesarkan kegiatan perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Secara makro laju pertumbuhan kesempatan kerja sering dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang tinggi memberikan arti bahwa setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Dengan pendekatan tersebut maka pengembangan kesempatan berusaha akan meningkatkan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan perekonomian atau kegiatan berusaha ini disamping dari sisi bisnis juga dapat ditelaah dari sisi yang lain yakni sebagai bentuk lain dari investasi. Pada bagian akhir upaya ini, yang diharapkan dari penerapan kebijakan investasi adalah bahwa kesempatan kerja diharapkan juga akan meningkat. Ini sesuai pemahaman pendekatan elastisitas kesempatan kerja bahwa setiap investasi untuk menumbuhkan perekonomian berdampak pada peningkatan kesempatan kerja.

3) **Meningkatkan peran UMKM dalam ekonomi wilayah**

Pada dasarnya Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan semua pihak untuk terlibat dalam pembangunan terutama dalam pengembangan perekonomian wilayah. Sesuai dengan semangat yang menyadari saat ini masih berada di belakang tetapi pada saatnya harus menjadi yang terdepan, maka tidak boleh dilakukan dengan berjalan semata tetapi harus dengan berlari. Oleh karena itu sebagian pemangku kepentingan saja yang terlibat tidak cukup, semua harus ikut berperan serta. Pelaku ekonomi besar, kelas menengah, maupun yang bersifat kecil dan mikro harus diperankan pada berbagai lini pembangunan.

Pandangan umum memberikan pemahaman bahwa para pengusaha besar dan telah mapan sudah terbiasa dengan berbagai ketentuan dan cara untuk memburu kesempatan ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan. Demikian pula diperkirakan yang akan terjadi di Provinsi Kalimanta Utara pada masa kini dan mendatang. Mereka sudah mempunyai kemampuan cukup untuk masuk ke kompetisi kegiatan pembangunan perekonomian yang akan terjadi. Untuk merespon kelompok ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara cukup menerapkan berbagai upaya yang dapat menarik mereka dengan meningkatkan daya saing daerah. Antara

lain dengan menguatkan kelembagaan pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas publik, peningkatan kualitas SDM, iklim usaha yang bersaing, dan berbagai pendukung lainnya.

Pada kelompok pelaku yang lain, menengah, kecil dan mikro, atau UMKM, tidak seperti pengusaha besar tingkat kesiapannya untuk ikut berperan dalam pengembangan perekonomian. Padahal kelompok inilah yang lebih dekat dengan kegiatan yang menyerap ketenagakerjaan dan pemerataan nilai tambah bagi masayarakat. Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing dengan sasaran meningkatnya diversifikasi kesempatan kerja dan berusaha maka perlu secara khusus diperhatikan kebijakan bagi UMKM. Dalam hal ini kebijakan yang perlu diambil adalah: Meningkatkan peran UMKM dalam pengembangan perekonomian ekonomi wilayah. Kebijakan ini memberi arahan untuk memberikan perhatian khusus bagi UMKM, berupa berbagai hal yang mendorong dan memperkuat UMKM seperti: permodalan, berbagai persyaratan berusaha, pemanfaatan teknologi dan informasi, penguatan SDM (berbagai level), penguatan jaringan (antar UMKM maupun dengan pelaku yang lebih besar), pemasaran, dan hal lain yang diperlukan.

4. Misi 4: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta meminimalkan potensi konflik sosial untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Wilayah Terdepan Perbatasan yang Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Beradab. Terbatasnya pengembangan infrastruktur, utilitas dan fasilitas di seluruh wilayah terlebih wilayah perbatasan serta wilayah terpencil, berpotensi menciptakan disparitas antar wilayah. Upaya pembangunan dilakukan secara berkeadilan dengan memperhatikan kelemahan, potensi dan kekuatan masing-masing wilayah.

Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan dan berkeadilan. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Keberpihakan untuk mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan lebih ditingkatkan sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.

Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus juga diarahkan bagi pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing seperti yang diarahkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW Provinsi Kalimantan Utara).

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (2) penyelenggaraan pelayanan

air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (3) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Dalam rangka pembangunan yang merata dan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar masyarakat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Sasaran Pokok

Sasaran pokok dalam mewujudkan misi keempat yaitu:

a. **Terstrukturnya Wilayah Pengembangan dan Pusat Pelayanan Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pemantapan Otonomi Daerah**

   Wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat berkembang sesuai dengan arahan struktur ruang dan pola ruang yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui penataan ruang wilayah tersebut diharapkan misi pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat tercapai dengan tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan baru, oleh karena dengan penataan ruang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang selama ini masih terbatas khususnya di wilayah perbatasan dan terpencil.

   Arah kebijakan sebagai berikut:

   1) **Meningkatkan peran kota sebagai pusat pelayanan wilayah sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang**

      Dalam hal ini kota-kota di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan meningkat peran dan fungsinya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yakni Nunukan, Simanggaris dan Long Midang di Kabupaten Nunukan dan Long Nawang di Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sementara Kota Tanjung Selor ditetapkan berperan dan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebatik dan Long Bawan di Kabupaten Nunukan, Long Nawang di Kabupaten Malinau dan Tidung Pale di Kabupaten Tana Tidung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp). Long Layu, Mensalong dan Pembeliangan di Kabupaten Nunukan, Tanah Merah di Kabupaten Tana Tidung, Long Pujungan, Mahak Baru, Data Dian, Long Berang dan Long Loreh di Kabupaten Malinau dan Tanha Kuning, Karang Agung, Bunyu Tengah, Sekatak Buji dan Long Bia di Kabupaten Bulungan ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota-kota tersebut diharapkan dapat berkembang sebagai pusat kegiatan pelayanan wilayah atau pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi baru.

   2) **Mengendalikan wilayah pengembangan bagian timur (pulau kecil)**

      Dalam hal ini Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan merupakan dua wilayah pengembangan yang sudah mendekati ambang batas untuk daya dukung wilayah. Sebagai pulau kecil, kedua wilayah tersebut memiliki keterbatasan sumber daya alam khususnya air sebagai pendukung kehidupan masyarakat. Pengembangan wilayah kedua pulau tersebut perlu dikendalikan supaya kedua wilayah dapat tetap menjadi wilayah yang layak untuk dihuni yang diperkirakan jumlah penduduknya akan terus meningkat.

3) **Memantapkan wilayah pengembangan bagian tengah dan pantai timur**
Wilayah bagian tengah dalam hal ini Tanjung Selor dan Tideng Pale dimantapkan sebagai wilayah pengembangan yang memiliki karakteristik wilayah yang hampir serupa di bagian pantai timur provinsi ini. Wilayah bagian tengah dikembangkan sebagai wilayah yang mendukung kegiatan yang berperan dan berfungsi sebagai ibukota provinsi.

4) **Mengembangkan wilayah pengembangan yang berada di perbatasan**
Sementara wilayah perbatasan yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dikembangkan dengan kebijakan yang tepat dan sesuai kondisi fisik wilayah mengingat selama ini wilayah tersebut memiliki keterbatasan infrastruktur, utilitas dan fasilitas yang mengakibatkan menjadi wilayah terbelakang, tertinggal. Akan tetapi pengembangan kawasan perbatasan tersebut tetap memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan perbatasan.

5) **Mempersiapkan daerah otonomi baru yang memungkinkan**
Luasnya jangkauan wilayah provinsi ini membuka kemungkinan peluang untuk terbentuknya daerah otonomi baru. Sesuai peraturan perundangan daerah otonomi baru dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, perlu diciptakan pusat pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani dengan cara pembentukan daerah otonomi baru. Selain itu kebutuhan akan kehadiran negara dalam bentuk daerah otonomi baru di wilayah perbatasan juga sangat penting untuk menegasikan absennya negara dalam kehidupan masyarakat perbatasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan arah kebijakan untuk mempersiapkan daerah otonomi baru. Hal ini mengingat kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara pada umumnya masih rendah.

b. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Utilitas dan Fasilitas yang Merata
Infrastruktur, utilitas dan fasilitas yang ada maupun yang akan dibangun harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah. Aksesibilitas dapat ditingkatkan dengan mengembangkan jaringan jalan dan jaringan layanan transportasi yang menghubungkan berbagai fasilitas layanan umum serta menjamin ketersediaan jaringan utilitas seperti listrik, air, sistem sanitasi serta sistem komunikasi dan informasi. Aksesibilitas dikatakan meningkat jika berbagai utilitas maupun fasilitas dapat mudah dijangkau dan dapat diperoleh dengan murah. Bagi wilayah-wilayah terpencil, aksesibilitas tersebut juga dapat disediakan dengan mendekatkan layanan ke masyarakat dalam bentuk '*mobile service*'. Disamping itu, mobilitas orang, barang dan jasa ikut berperan pula dalam meningkatkan aksesibilitas.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

1) **Mengutamakan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara)**
Meningkatkan kondisi jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan ibukota kabupaten/kota dengan memperbaiki dan memelihara perkerasan jalan sehingga dapat dilewati dengan aman dan nyaman pada berbagai kondisi cuaca. Keterhubungan wilayah perbatasan dengan ibukota kabupaten menjadi prioritas utama dengan meningkatkan kualitas perkerasan jalan yang mampu dilewati dalam berbagai cuaca. Dengan demikian aksesibilitas wilayah perbatasan dari dan ke ibukota kabupaten/kota akan semakin membaik dan memungkinkan perjalanan orang dan distribusi barang semakin mudah dan murah. Berbagai hasil pertanian, perkebunan maupun industri dapat dikumpulkan pada lokasi-lokasi tertentu di sepanjang jalan tersebut untuk dijual ke tempat lain dengan jalur jalan yang lebih baik. Kondisi ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi yang saat ini masih tinggi. Dengan demikian, keterhubungan wilayah perbatasan tersebut akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi, seperti pasar, sekolah dan layanan kesehatan. Kekuatan konstruksi jalan harus menjadi pertimbangan utama pada saat meningkatkan jaringan jalan tersebut.

Mengembangkan jaringan jalan yang membentang sepanjang wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, sesuai dengan rencana jaringan jalan yang tercantum dalam draft RTRW Provinsi Kalimantan Utara:

a. Jaringan jalan strategis nasional terbagi menjadi dua yaitu:
   1) Menghubungkan Kabupaten Malinau (Kecamatan Malinau Barat - Kecamatan Mentarang - Kecamatan Mentarang Hulu) dengan Kabupaten Nunukan (Kecamatan Krayan Selatan - Kecamatan Krayan).
   2) Menghubungkan Kecamatan Lumbis - Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan.
b. Jaringan jalan strategis provinsi terbagi menjadi dua yaitu:
   1) Menghubungkan Kecamatan Sei Menggaris - Kecamatan Tulin Onsoi - Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan.
   2) Menghubungkan Kecamatan Kayan Selatan - Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau.
c. Jaringan jalan kolektor primer yang membentang di tengah Provinsi Kalimantan Utara, melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau (Kecamatan Sungai Boh - Kecamatan Kayan Selatan - Kecamatan Kayan Hulu - Kecamatan Kayan Hilir - Kecamatan Pujungan - Kecamatan Bahau Hulu - Kecamatan Malinau Selatan - Kecamatan Malinau Barat - Kecamatan Malinau Kota - Kecamatan Malinau Utara) dan Kabupaten Nunukan (Kecamatan Lumbis - Kecamatan Sebakung Atulai - Kecamatan Sebakung - Kecamatan Sebuku - Kecamatan Tulin Onsoi - Kecamatan Sei Menggaris).

   Pembangunan jalan sepanjang wilayah perbatasan tersebut akan memudahkan konektivitas antar pos-pos pengamanan perbatasan untuk melakukan patroli keamanan wilayah perbatasan. Patroli secara luas dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*). Permintaan perjalanan di wilayah perbatasan untuk angkutan orang dan barang masih sangat kecil, sehingga pembangunan jalan di sepanjang wilayah perbatasan pada tahap awal difokuskan untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan dan mencegah kemungkinan terjadi perusakan lingkungan di kawasan hutan lindung. Perlu ada kebijakan khusus dari sektor kehutanan dalam pemberian ijin pembukaan hutan untuk membangun jalan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan. Kontrol yang ketat terhadap kegiatan di kiri-kanan jalan harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah pembukaan hutan yang lebih luas. Oleh karena itu orientasi pembangunan jalan tersebut diarahkan pada upaya menjaga pertahanan dan keamanan wilayah NKRI, konstruksi jalan dirancang cukup untuk melayani kebutuhan pergerakan alat-alat pertahanan.

   Pelabuhan perikanan yang besar harus dimiliki Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat menampung kapal besar yang memiliki kemampuan beroperasi di perairan yang luas. Keberadaan kapal besar tersebut diharapkan mampu berperan menghalau kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dan memiliki kapasitas tangkap yang besar. Minimal pelabuhan perikanan tipe B ada di Provinsi Kalimantan Utara. Pelabuhan Perikanan Tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara) adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang ke perairan ZEEI, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan/atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 ton/tahun untuk pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk dapat menampung kapal berukuran sampai dengan 60 GT (*Gross Tonage*) sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha.

   Membangun bandara perintis di wilayah perbatasan baik untuk kepentingan angkutan orang maupun untuk layanan kesehatan yang masih sangat terbatas. Keberadaan bandara perintis akan meningkatkan aksesibilitas orang maupun barang serta jasa. Khusus untuk layanan kesehatan, keberadaan 'dokter terbang' akan memberikan layanan kepada masyarakat dengan kualitas (keahlian dokter) yang lebih baik dan layanan yang lebih teratur. Semakin banyak moda transportasi tersedia akan semakin baik mobilitas dan aksesibilitas masyarakat

   Peningkatan mobilitas masyarakat dapat dilihat dari peningkatan frekuensi atau jumlah perjalanan dan kemudahan mendapatkan layanan transportasi yang diwujudkan dalam

yang dibentuk pemerintah secara formal juga kelembagaan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dilakukan dengan penguatan lembaga masyarakat yang bertumpu pada kelompok, dimana masyarakat membangun dan mengorganisir diri atas dasar ikatan pemersatu karena kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kegiatan yang menuju pada upaya untuk mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial sehingga kesejahteraan sosial dapat meningkat. Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi masyarakat diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui usaha produktif yang berkelanjutan.

7) **Mengembangkan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan komunitas adat terpencil (KAT)**

Masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan komunitas adat terpencil belum sepenuhnya terjangkau proses pelayanan pembangunan, belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar karena terisolasi secara fisik maupun sosial budaya. KAT pada umumnya merupakan kelompok masyarakat termajinalisasi dan belum terpenuhinya hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Akibat konflik kepentingan ekonomi wilayah, dimana eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang di wilayah pedalaman menjadikan KAT kehilangan hak-hak ulayat masyarakat atas tanahnya, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT maupun daerah perbatasan negara dan daerah terpencil menyebabkan masyarakat tersebut mengalami kesulitan menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di perbatasan negara, daerah terpencil dan KAT. Rendahnya aksesibilitas serta pelayanan sosial dasar menjadi penghambat proses pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju ke arah tercapainya kesejahteraan sosial. Keterpencilan dan ketertinggalan terkait dengan kemiskinan serta berbagai kerentanan dalam menghadapi arus perubahan yang cepat.

Pengembangan pemberdayaan bagi masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan komunitas adat terpencil sangat diperlukan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan serta ketrampilan bagi masyarakat daerah perbatasan, terpencil dan KAT agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dalam pemberdayaan terkandung makna adanya partisipasi seluruh masyarakat, kerjasama serta adanya peningkatan kemampuan dan penguatan kemampuan manajemen pengelolaan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya sosial di daerah perbatasan, terpencil dan KAT. Khususnya bagi KAT diperlukan partisipasi dan pemantapan lingkungan sosial sekitar, perlindungan serta pengembangan kerjasama. Pemberdayaan dilakukan dengan: (a) memberikan motivasi yakni adanya suatu proses penciptaan kondisi yang membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dan ada usaha untuk mengembangkannya, (b) penguatan kelembagaan masyarakat yakni memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat dengan memberikan input dan membuka peluang untuk berkembang, dengan mengembangkan kemitraan dan penggalangan dana, dan atau pemberian stimulan. Masyarakat di daerah perbatasan, tepencil dan KAT akan makin berdaya jika ada perkuatan yang meliputi langkah nyata yang terkait dengan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang memungkinkan untuk berkembang.

5. Misi 5: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan kebijakan publik yang terintegrasi melalui kerjasama antar stakeholder pembangunan dengan memperhatikan aspek akutabilitas, transparansi, partisipatif dan mengedepankan inklusivitas, efektivitas, efisiensi, penegakan aturan dan hukum, adil, berorientasi konsensus, dan visioner terhadap masa depan, yang didukung yang didukung oleh aparatur yang berkualitas dan memiliki profesionalisme tinggi, mampu memberikan pelayanan prima dan menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat. Aspek kualitas dan profesionalitas dalam melakukan kinerja baik dalam aspek tata kelola pemerintahan maupun aspek pelayanan merupakan hal utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Tata pemerintahan yang baik meliputi: berwawasan ke depan (visi strategis), bersifat terbuka (transparan), mendorong partisipai masyarakat, bertanggung jawab/bertanggung gugat (akuntabel), menjunjung supremasi hukum, demokratis dan berorientasi pada konsensus, berdasarkan profesionalitas dan kompetensi,

cepat tanggap (responsif), menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, terdesentralisasi, memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, lingkungan hidup, dan perkembangan perekonomian.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mampu mengutamakan aspek kualitas dan profesionalitas dalam melakukan kinerjanya baik dalam aspek tata kelola pemerintahan maupun aspek pelayanan. Keduanya dapat dilakukan dengan cara memperbaiki secara sistematik melalui perbaikan sumber daya manusia, sistem tata kelola pemerintahan, dan hubungan kerja dalam melaksanakan pembangunan. Perbaikan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan sistem rekruitment yang menjamin kualitas sumber daya manusia yang handal, paham konteks kekinian dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang sudah ada. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yakni dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perbaikan hubungan kerja dalam melaksanakan pembangunan yakni dengan membuka peluang kerjasama pada lintas sektor dan *stakeholder* yang berkepentingan tanpa meninggalkan aspek kesejahteraan masyarakat, adil, dan bertanggung jawab.

Sasaran Pokok:

Sasaran pokok dalam mewujudkan misi kelima yaitu:

a. **Meningkatnya Penerapan Pemerintahan yang Baik (Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel) dan Kepuasan Masyarakat**

Penerapan pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai wujud usaha pembangunan bidang tata kelola pemerintahan. Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mampu secara bertahap menjadi daerah yang melaksanakan *Good Governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat berkaitan dengan pencapaian visioner pembangunan, transparansi, akuntabel, partisipasi, dan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat. Dalam arti, pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di masa depan mampu menjalankan wawasan pembangunan secara berkelanjutan, tepat, terukur, dan memiliki manfaat seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mampu bersifat terbuka dalam melaksanakan dan mengelola segala bentuk data, informasi, program, kebijakan dan kegiatan aparatur pemerintah secara konsekuen. Ketiga, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu menjamin tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup instansi dan aparatur guna mendukung proses kebijakan yang terselenggara di daerah. Keempat, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu untuk mendorong pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan keputusan atas kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Sehingga mampu mendukung unsur legalitas dan menjamin terselenggaranya proses demokrasi. Kelima, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu menjamin adanya proses pelayanan publik yang berorientasi kepada unsur pengembangan kepuasan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

1) **Meningkatkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya**

Pembangunan sistem dan standar pelayanan publik dilakukan melalui adanya sejumlah interversi dan pengembangan dalam melaksanakan reformasi pelayanan publik yang berkaitan dengan perkembangan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan sistem dan standar pelayanan publik diarahkan untuk mencapai kebijakan pelayanan yang mampu menjamin ketersediaan akses setiap daerah di Provinsi Kalimantan Utara, sistem birokrasi pelayanan yang pendek, kemudahan akses baik waktu mapun wujud pelayanan strategis dan dekat dengan masyarakat membutuhkan, memiliki badan penyedia layanan yang penyelenggaraannya akuntabel dan transparan, dan kondisi kualitas aparatur pelayanan yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.

2) **Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif**

Perkembangan pembangunan partisipatif diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, sehingga mampu mendukung tingkat kepercayaan publik. Salah satu syarat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik yakni memerlukan keterlibatan masyarakat dalam menentukan masa depan pembangunan. Aspek partisipasi menjadi sangat penting karena alasan adanya pelaksanaan demokrasi dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan keinginan masyakarat yang dilakukan seluas-luasnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kalimantan Utara sebagai provinsi

baru harus mampu untuk mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah.

3) **Meningkatkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat**

Pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat dimaksudkan untuk menjamin adanya aktivitas proses tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan yang mampu mengedepankan sistem informasi manajemen pemerintahan, transparansi publik, dan edukasi publik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arus globalisasi begitu besar merupakan tantangan besar pembangunan daerah saat ini terutama tentang membangun langkah strategis dalam pengelolaan pembangunan melalui perbaikan sistem informasi manajemen dan transparansi publik. Sistem informasi manajemen merupakan bagian terpenting sebagai sumber informasi pembangunan daerah. Dengan adanya langkah mengedepankan sistem informasi manajemen dan transparansi publik Provinsi Kalimantan Utara akan memiliki sensitivitas tinggi dalam mengenali beragam persoalan yang ada di daerah berpedoman pada informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan publik.

4) **Meningkatkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses hingga tingkat pemerintahan desa**

Langkah mendekatkan pengeloalan unit pelayanan publik daerah dan kemudahan akses hingga tingkat pemerintahan desa dilaksanakan dengan mendekatkan dan menjamin unit teknis pelayanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat kondisi pembangunan infratruktur terutama akses transportasi yang belum terkoneksi dengan baik. Langkah mendekatkan unit pelayanan ini agar jaminan atas kemudahan akses pelayanan, tingkat efisiensi waktu pelayanan merupakan tujuan besar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. **Terwujudnya penguatan *collaborative governance* antara sektor pemerintah, swasta, civitas akademika dan NGO mengenai pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan**

Penguatan *collaborative governance* dalam pembangunan tata kelola pemerintahan sebagai wujud pembangunan terintegrasi yang dapat dilakukan oleh multi aktor dalam proses kebijakan yang ada. Dengan adanya perkembangan kesatuan ini maka proses penyusunan program, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan diharapkan mampu berjalan dengan efektif dan efisien. Perkembangan dan tantangan globalisasi yang semakin kuat memberikan pengaruh kuat dalam pengelolaan pemerintahaan. Saat ini pemerintah dihadapkan dengan dinamika politik, ekonomi, budaya, dan perkembangan masyarakat yang dinamis. Keterbatasan pemerintah dalam hal kemampuan, keuangan, dan mekanisme pengelolaan memberikan pilihan yang sangat menyulitkan pemerintah daerah apabila bekerja sendiri. Keterbatasan ini harus diatasi pemerintah dengan melakukan beberapa perubahan salah satunya melalui membuka akses pada *stakeholder* lain dalam berpartisipasi proses pembangunan. *Collaborative governance* diarahkan sebagai capaian tentang langkah proses pengelolaan simpul-simpul partisipasi untuk secara sadar dan mengerti posisi masing-masing yang saling melengkapi dalam proses penyelenggaran pembangunan. Simpul-simpul partisipasi yang dimaksud dengan mengembangkan penyelenggaraan pembangunan menyeluruh melalui adanya kebebasan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Sehingga perkembangan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dan menjamin langkah kritis pelaksanaan *collaboratif governance*. Penguatan *collaboratif governance* dilakukan dengan membuka peluang melalui kerjasama-kerjasama antar setiap pelaku pembangunan baik dalam sistem kemitraan maupun hubungan kerja lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:

1) **Membangun penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah**

Penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa dilakukan untuk memperjelas dan menjamin segala bentuk hubungan dan langkah tahapan pembangunan yang dilakukan. Proses kelembagaan ini secara sadar membentuk rangkaian dasar dalam memperjelas sistem pembagian peran dan kewenangan yang nantinya mampu memperkuat adanya sistem

pembangunan yang terintegrasi dan mencapai kesesuaian dan keselarasan pembangunan baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.

2) **Meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait**

Peningkatan keperpaduan antar instansi terkait dilakukan untuk menjamin adanya aspek pelaksanaan keselarasan pengelolaan pembangunan yang melibatkan antar instansi pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian sistem kewenangan, tugas pokok, dan fungsi instansi yang terlibat dan meminimalisir tumpang tindih kebijakan yang dikeluarkan pada setiap instansi.

3) **Meningkatkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan**

Penegakan hukum merupakan langkah strtegis dalam menjaga kesatuan wilayah dan menciptakan rasa aman, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan dilakukan dengan menjamin pelaksanaan sistem kepatuhan hukum yang selama ini telah di atur dan mengikat pelaksanaannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat. Aspek penegakan hukum khusus Provinsi Kalimantan Utara sangat penting dilaksanakan mengingat kondisi daerah yang berbeda dan unsur demografi masyarakat yang beragam. Aspek penegakan hukum dilakukan sebagai usaha menjamin keselarasan tinggal, keamanan, dan meminimalisir segala unsur kegiatan yang merugikan selama proses pembangunan. Beberapa prasyarat penting dalam proses penegakan hukum dilaksanakan dengan adanya sumber aturan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dalam pelaksanaannya dan tersedianya aparatur hukum yang profesional, berkompeten, mengedepankan upaya proses penegakan secara adil serta patuh terhadap mekanisme tata hukum.

4) **Membuka ruang konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom**

Sikap keterbukaan menjadi elemen penting dalam proses pembangunan terutama dalam membentuk dan mengakomodasi ruang konsolidasi antar *stakeholder*. Sebagai daerah otonom baru keselarasan pembangunan sangat penting terutama dengan adanya ruang konsolidasi agar di masa depan dapat menjamin keselarasan komunikasi dan koordinasi antar *stakehoder* dalam proses pembangunan. Ruang konsolidasi dibentuk dengan membangun mekanisme partisipatif selama proses pembangunan.

c. Menguatnya Kelembagaan Pranata Adat

Penguatan kelembagaan adat dimaksudkan untuk memperkuat karakter dasar realitas sosial yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara yang tidak dapat lepas dari sistem adat. Sistem adat merupakan ciri khas yang diangkat dalam pembangunan Kalimantan Utara. Langkah ini dilakukan untuk menperjelas kembali hak asal usul setiap unsur sosial masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan kelembagaan merupakan kunci mengefektifkan kembali sumber daya yang ada untuk mencapai optimalimalisasi kinerja. Kelembagaan menyangkut beragam persoalan dalam membangun sistem, menjelaskan hubungan antar faktor yang bepengaruh pada satu lembaga dengan lainnya, dan keterkaitan manfaat yang dicapai di masa depan. Sebagai provinsi baru aspek penataan kelembagaan menjadi agenda pokok yang harus dijalankan. Langkah ini merupakan jalan keluar dalam menentukan keterkaitan antara salah satu sektor pembangunan dapat berpengaruh dengan yang lainnya. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk mengurangi segala bentuk inefisiensi yang mungkin saja dapat terjadi. Dengan adanya pembangunan kelembagaan setiap tugas dan fungsi pembangunan dapat didelegasikan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tidak hanya itu aspek pengelolaan kelembagaan yang akan ditata harus mampu disesuaikan dengan kondisi karakter masyarakat dan membuka peluang kerjasama antar *stakeholder*. Pembangunan kelembagaan pranata adat dilaksanakan untuk memperjelas kembali adanya sistem pembagian kewenangan dan hak adat yang melekat dalam mengakomodasi dan mengatur tata kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Kelembagaan pranata adat memiliki beragam fungsi efektif. Penguatan peran kelembagaan pranata adat menjadi penting. Pelaksanaan akomodasi dan tata adat menjadi salah satu sumber referensi yang baru dan dikembangkan menjadi tata aturan dasar masyarakat, budaya, dan kearifan lokal yang bermanfat bagi kelanjutan pembangunan.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah :

1) **Membangun kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah**
Kelembagaan pranata adat daerah merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan bidang kebudayaan daerah. Sistem adat tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan kebudayaan. Dengan adanya kelembagaan pranata adat proses pengelolaan kebudayaan dapat dengan mudah terlaksana. Langkah ini dilakukan untuk mengembangkan proses terjaminnya aset kebudayaan dapat dikelola dan dikembangkan melalui pendekatan unsur lokal masyarakat berupa pranata adat.

2) **Meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik**
Peningkatan peran lembaga adat dalam proses pengelolaan lahan dilakukan sebagai langkah dalam menjamin fungsi dan sistem kewenangan adat dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di atas tanah adat. Kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang dipengaruhi tata hukum adat memiliki kekuatan besar dalam mengatur sistem kehidupan. Lembaga adat memiliki fungsi yang melekat dan dipatuhi masyarakat. Adanya pengembangan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan lahan yang berpotensi konflik dapat memberikan kemudahan menjamin sistem penyelesaian kasus dan masalah yang timbul dapat secara efektif sesuai dengan perkembangan tata adat yang berlaku. Langkan ini tidak hanya dapat bermanfaat dalam proses menjaga kelestarian sistem adat berkembang namun juga sebagai langkah antisipatif pembangunan berdasarkan unsur lokal yang berkembang di daerah.

3) **Meningkatkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya lokal melestari**
Peningkatan peran lembaga adat dalam proses menjamin kelestarian kebudayaan lokal sebagai wujud akomodasi hak atas asal dan usul yang selama ini melekat dalam mengatur kegiatan sosial masyakat dan keterikatan proses kebudayaan. Budaya memiliki beragam unsur dan aset penting dalam menjamin pergerakan pengembangan kualitas karakter pembangunan daerah. Dalam mengelola setiap unsur kebudayaan dapat dilakukan dengan membangun mekanisme fungsi dan kewenangan lembaga adat dalam perkembangan kebudayaan daerah dan tata kehidupan masyakat.

6. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara diwujudkan dengan rencana pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan demikian untuk mengantisipasi perkembangan kota sebagai akibat dari dampak pembangunan di segala bidang perlu direncanakan sedini mungkin perwujudan Tanjung Selor sebagai kota menengah yang modern, layak huni dalam wujud pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, yang di dalamnya terdapat pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Perwujudan KBM ini akan dilakukan secara bertahap dan bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kota mandiri tersebut dilakukan dengan tiga tahapan, yakni tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, yang mana tahapan demi tahapan pembangunan kota baru mandiri ini bertujuan untuk dapat mengembangkan ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahapan perencanaan telah dihasilkan dokumen perencanaan yang mengakomodasi kepentingan penyelenggaraan, menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah. Pada tahapan kedua atau tahapan persiapan pembangunan kota baru mandiri, salah satunya dengan terus berkonsentrasi untuk memikirkan bagaimana mewujudkan sarana dan prasarana pemerintahan, dalam bentuk membangun kota mandiri sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di atas lahan kurang lebih 2.400 hektar. Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan akan dikembalikan kepada teknis yang akan bekerja sama dengan instansi-instansi pendukung.

Sasaran Pokok:

Sasaran pokok dalam mewujudkan misi keenam yaitu:

a. Terbangunnya pusat pemerintahan dengan menyiapkan perencanaan dan implementasi pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai RTRW dengan sumber dana sesuai ketentuan
Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah :

1) Menyiapkan perencanaan RDTR ibukota provinsi
2) Mengimplementasikan rencana pusat perkantoran eksekutif
3) Mengimplementasikan rencana pusat perkantoran legislatif
4) Mengimplementasikan rencana perkantoran instansi lainnya
5) Mengimplementasikan rencana kelengkapan infrastruktur dan utilitas perkantoran pemerintah

b. Terbangunnya pusat perekonomian dengan menyiapkan perencanaan dan implementasi pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyarakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat.

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah:
1) Menyiapkan perencanaan detail pusat perekonomian
2) Mengimplementasaikan rencana pusat perekonomian/CBD
3) Mengimplementasaikan rencana perpasaran masyarakat di pusat dan lingkungan wilayah

c. Terbangunnya lingkungan permukiman ibukota pemerintahan dengan mereview dan merencanakan kembali serta melaksanakan pembangunan permukiman berbagai tipe dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah :
1) Menyiapkan rencana detail kawasan permukiman
2) Mengimplementasikan rencana pembangunan lingkungan permukiman perkotaan berbagai tipe dan jenis di ibukota perkotaan (mengikuti pentahapan RTRW/RDTRK sesuai dengan indikasi program yang disusun dalam RTRW dan RDTR ibukota provinsi)

d. Terbangunnya infrastruktur pendukung kota pusat pemerintahan dengan mereview dan merencanakan kembali serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku

Arah kebijakan dari sasaran pokok ini adalah
1) Mereview dan menyusun rencana detail infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku
2) Mengimplementasikan pembangunan infrastruktur pendukung ibukota provinsi sesuai dengan indikasi program yang aka disusun dalam RTRW dan RDTR ibukota provinsi

Tabel 5.1.1.
Matriks Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Wilayah Perbatasan Menjadi Beranda Terdepan NKRI yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Adil dan Beradab	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia**	1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf *)	Meningkat sebesar 1,5% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 1,5% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	1. Meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan. 2. Meningkatkan akses, pemerataan, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. 4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah,terlebih di daerah terpencil dan perbatasan.	a. Meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan. b. Meningkatkan akses, pemerataan, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah,terlebih di daerah terpencil dan perbatasan.
			Angka rata-rata lama sekolah *)	Meningkat sebesar 0,7% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
			Pendidikan tertinggi ditamatkan *)	Menurun sebesar -10% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar -10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Menurun sebesar -4%	Menurun sebesar -4%		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
				dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
			Angka partisipasi kasar *)	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Meningkat sebesar 3% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 3% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
			Angka partisipasi murni *)	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
			Angka putus sekolah *)	Menurun sebesar 0,5% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar 0,25% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Menurun sebesar -2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar -2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
				Menurun sebesar 3% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		
			Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah *)	Meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
				(Target MDG's 2015 = 3,15%)			
			Usia harapan hidup	72 tahun (Target RPJMN 2014 = 72 tahun)	73 tahun		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93% (Target SPM 2015 = 90%)	98%		
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	80% (Target SPM 2015 = 80%)	90 %		
			Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	38 (Target Indonesia Sehat 2010 = 40)	41		
			Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	7 (Target Indonesia Sehat 2010 = 7)	8		
			Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11 (Target Indonesia Sehat 2010 = 11)	12		
			Rasio bidan per 100.000 penduduk	95 (Target Indonesia Sehat 2010 = 100)	100		
			Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk	17 (Ttarget Indonesia Sehat 2010 = 22)	22		
			Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk	15 (Target Indonesia Sehat 2010 = 40)	21		
			Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	28 (Target Indonesia Sehat 2010 = 40)	33		
			Jumlah tenaga medis dan kesehatan yang bersertifikasi	100%	100%		
			Rumah sakit	9 unit (pembangunan RS di Kabupaten Tana Tidung dan Malinau selatan (Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Pujungan)	11 buah (pembangunan RS di wilayah Nunukan bagian perbatasan, Bulungan)		
			Puskesmas	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi.	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
			Puskesmas pembantu	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi.	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi		
			Puskesmas keliling	Memperbaiki kualitas dan kuantitas pusling sesuai topografi.	Memperbaiki kualitas dan kuantitas pusling sesuai topografi		
			Pola Rujukan	Terwujudnya kebijakan pola rujukan khusus bagi daerah terpencil yang kesulitan menjangkau sarana kesehatan.	Terwujudnya kebijakan pola rujukan khusus bagi daerah terpencil yang kesulitan menjangkau sarana kesehatan.		
		3. Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam ketenagakerjaan	Jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja	Meningkatnya jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.	1. Mengembangkan pendidikan kejuruan 2. Membangun tata kelola sektor ketenagakerjaan	1. Mengoptimalkan pendidikan kejuruan 2. Meningkatkan tata kelola sektor ketenagakerjaan
		4. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dibandingkan akhir tahun RPJMD III.	1. Mengembangkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender (PUG) 2. Mengembangkan pemberdayaan perempuan	1. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender (PUG) 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
			Perlindungan anak	Meningkatnya upaya perlindungan anak dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya upaya perlindungan anak dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Mengembangkan perlindungan anak	Meningkatkan perlindungan anak
		5. Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan dalam pembangunan daerah	Partisipasi pemuda	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dibandingkan akhir tahun RPJMD III.	1. Mengembangkan kapasitas dan kualitas pemuda 2. Mengembangkan peran pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda 2. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
			Jumlah prestasi olahraga	Meningkatnya upaya pengembangan budaya dan prestasi olahraga dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya upaya pengembangan budaya dan prestasi olahraga dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.	Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga	Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga
		6. Meningkatnya kualitas spiritualitas	Intensitas kegiatan lembaga keagamaan dan ormas	Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga	a. Meningkatkan peran institusi keagamaan	1. Meningkatkan peran institusi keagamaan

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
		masyarakat yang beragam		dan ormas dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	keagamaan dan ormas dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.	dan lembaga keormasan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat madani b. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama c. Meningkatkan Implementasi nilai-nilai agama dan spiritualitas yang ada dalam setiap tindakan dan perilaku masyarakat	dan lembaga keormasan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat madani 2. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama 3. Meningkatkan Implementasi nilai-nilai agama dan spiritualitas yang ada dalam setiap tindakan dan perilaku masyarakat
			Angka kriminalitas	20%	16%		
			Konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbau SARA	Menurunnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbau SARA dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Menurunnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbau SARA dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.		
			Angka tawuran pelajar/kelompok/pemuda	Menurunnya angka tawuran pelajar/kelompok/pemuda dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Menurunnya angka tawuran pelajar/kelompok/pemuda dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III		
			Kerjasama lintas agama, suku dan ras dalam menjaga kerukunan hidup beragama	Meningkatnya kerjasama lintas agama, suku dan ras dalam menjaga kerukunan hidup beragama dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya kerjasama lintas agama, suku dan ras dalam menjaga kerukunan hidup beragama dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.		
	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan	1. Peningkatan kelestarian kawasan konservasi dan kawasan lindung	Intensitas gangguan dan degradasi lingkungan pada kawasan konservasi dan lindung	30% kawasan lindung yang mengalami gangguan terbebas dari gangguan	60% kawasan lindung yang mengalami gangguan terbebas dari gangguan	1. Mengembangkan pola *collaborative management* dalam pengelolaan kawasan lindung 2. Mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kelestarian hutan lindung	Mengembangkan pola *Collaborative Management* dalam pengelolaan kawasan konservasi dan lindung
		2. Terwujudnya tata kelola Sumberdaya	Pemanfaatan sumberdaya alam tanpa ijin/illegal	Penambangan illegal berkurang sebanyak 25% dari	Penambangan illegal berkurang sebanyak 75%	1. Mengembangkan regulasi daerah yang	Meningkatkan intensitas penegakan hukum

Visi	Misi	Sasaran Pokok Indikator dan Target				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
		Alam yang Berkelanjutan (*Good Natural Resources Governance)*		kondisi awal	dari kondisi awal	menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 2. Meningkatkan upaya penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan	berdasarkan regulasi daerah dan database yang kuat
		3. Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan pada kawasan budidaya	Kawasan kumuh dan tidak layak huni di perkotaan	1. Tersedianya data dan informasi tentang kawasan kumuh dan tidak layak huni 2. Munculnya regulasi tentang penanganan masalah kawasan kumuh dan tidak layak huni	Berkurangnya jumlah kawasan kumuh dan tidak layak huni sebanyak 50% dari kondisi awal	2. Mengembangkan regulasi daerah tentang kualitas lingkungan hidup dan budaya hidup sehat pada kawasan budidaya 3. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat umum dan pengusaha tentang pentingnya *Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan*	a. Mengembangkan pola-pola partisipatif dalam penanganan kawasan kumuh dan tidak layak huni b. Meningkatkan intensitas kampanye tentang pentingnya lingkungan yang sehat
		4. Terpulihkannya lingkungan hidup yang telah mengalami degradasi	Luas lingkungan hidup yang telah terdegradasi baik berupa lahan hutan/non hutan, terumbu karang dan hutan mangrove	1. Adanya data tentang komponen-komponen lingkungan hidup yang mengalami degradasi 2. Adanya regulasi tentang penanganan lingkungan berdegradasi secara partisipatif dan kolaboratif	20% dari lingkungan yang berdegradasi mengalami pemulihan (angka ini dengan mempertimbangkan luas lahan kritis yang ada)	1. Mengembangkan pola partisipatif dan berkelanjutan dalam pemulihan lahan kritis atau lingkungan yang telah terdegradasi. 2. Mengembangkan sistem mitigasi bencana lokal dan regional secara alami dan pemanfaatan teknologi (rekayasa)	a. Mempertegas penegakan hukum agar tidak terjadi perluasan degradasi/ kerusakan lingkungan b. Meningkatkan sistem mitigasi bencana lokal dan regional secara alami dan teknologi (rekayasa)
	Mengembangkan Perekonomian yang	1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	2,6%	3,4%	1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti	1. Memantapkan peningkatan produksi

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
	Berdaya Saing	berbasis sektor unggulan				luas secara adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur. 3. Memperkuat perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan. 4. Memperkuat kelembagaan petani. 5. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. 6. Meningkatkan penerapan teknologi yang tepat untuk pengembangan sektor unggulan.	pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan. 2. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur 3. Memantapkan perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan 4. Memantapkan kelembagaan petani 5. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas. 6. Mengoptimalkan penerapan teknologi yang tepat untuk pengembangan sektor unggulan.
			Laju pertumbuhan PDRB industri	6,75%	9,75%		
			Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	9,5-10%	11,5 - 12%		
		2. Meningkatnya nilai investasi berbasis sumberdaya lokal	Nilai PMDN dan PMA	460.950,5 juta rupiah	690.885,5 juta rupiah	1. Meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. 2. Meningkatkan infrastruktur dan utilitas 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam investasi.	1. Mewujudkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. 2. Mengembangkan pembangunan infrastruktur dan utilitas. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
							investasi.
		3. Meningkatnya diversifikasi kesempatan kerja dan berusaha	Jumlah pelaku UKM	115.229 unit	137.590 unit	1. Meningkatkan kegiatan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan kearifan dan keunggulan lokal. 2. Meningkatkan pengembangan kesempatan kerja dan berwirausaha. 3. Meningkatkan peran UMKM dalam ekonomi wilayah.	1. Mengoptimalkan kegiatan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan kearifan dan keunggulan lokal. 2. Mengoptimalkan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha. 3. Mengoptimalkan peran UMKM dalam perekonomian wilayah.
	Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	1. Terstrukturnya wilayah pengembangan dan pusat pelayanan sesuai dengan penataan ruang	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	1. PKN: Tarakan 2. PKSN: a. Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang (Kabupaten Nunukan) b. Long Nawang (Kabupaten Malinau) semakin berkembang fungsi dan perannya dibandingkan tahun akhir 2012	1. PKN: Tarakan 2. PKSN: a. Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang (Kabupaten Nunukan) b. Long Nawang (Kabupaten Malinau) semakin mantap fungsi dan perannya dibandingkan akhir tahun RPJMD III	1. Meningkatkan peran kota sebagai pusat pelayanan wilayah sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang 2. Meningkatkan pengendalikan pengembangan wilayah bagian timur (pulau kecil) 3. Memantapkan pengembangan wilayah bagian tengah dan pantai timur 4. Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan 5. Mempersiapkan calon daerah otonomi baru	
		2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, utilitas dan fasilitas yang merata	Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	75%	100%	1. Mengutamakan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara). 2. Mendorong	

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
						pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh wilayah terlebih di daerah perbatasan dan terpencil. 3. Memeratakan pembangunan fasilitas fisik, sosial, ekonomi dan pengelolaan di seluruh wilayah terlebih di daerah perbatasan dan terpencil.	
			Panjang jalur kereta api	Membangun rintisan jalur kereta api	Terwujudnya prasyarat jalur kereta api		
			Jumlah pelabuhan dan dermaga	Meningkatkan jumlah pelabuhan dan dermaga sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan jumlah dan atau kelas/ tipe pelabuhan dan dermaga hingga ketersediaannya memadai		
			Jumlah dan kelas bandara	Meningkatkan jumlah bandara	Meningkatkan jumlah dan atau kelas bandara		
			Jumlah, frekuensi dan trayek angkutan penumpang dan barang moda transportasi darat, air (laut dan sungai) dan udara.	Sebagian besar wilayah kabupaten/kota terutama perbatasan dan terpencil tersedia layananan transportasi darat, air (laut dan sungai) dan udara.	Seluruh wilayah kabupaten/kota terutama perbatasan dan terpencil terlayani transportasi darat, air (laut dan sungai) dan udara yang mencakup angkutan barang dan penumpang dengan frekuensi layanan memadai.		
			Jumlah terminal penumpang dan atau barang	Seluruh kabupaten/kota memiliki terminal penumpang dan atau barang.	Seluruh kabupaten/kota dan kecamatan memiliki terminal penumpang dan atau barang.		
			Peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta penyediaan layanan transportasi	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta penyediaan layanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan	Masyarakat dan pelaku ekonomi selalu diikut sertakan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta penyediaan layanan transportasi di		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
				terpencil.	seluruh wilayah terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.		
			Persentase rumah tangga pengguna listrik	75%	100%		
			Jumlah dan jenis produksi listrik	Jumlah dan jenis produksi listrik bertambah baik dari pemerintah maupun sumber alternatif lain	Seluruh daerah dapat menikmati penggunaan listrik		
			Persentase rumah tangga pengguna air bersih	60%	75%		
			Persentase keluarga dengan sumber air minum terlindungi	80%	100%		
			Persen rumah tangga bersanitasi	75%	85%		
			Standar mutu baku air bersih	Tersedianya sistem pengelolaan air baku dan sistem sanitasi yang dapat mengurangi pencemaran air baku.	Tersedianya air olahan yang sudah memenuhi standar baku mutu dan dapat dimanfaatkan secara proporsiona.l		
			Ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah	Tersedia jaringan komunikasi dan informasi di sebagian besar wilayah terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.	Tersedia berbagai jenis jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.		
			Jumlah masyarakat aktif yang menggunakan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatkan jumlah pengguna jaringan komunikasi dan informasi dengan prioritas wilayah perbatasan dan wilayah terpencil.	Sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah menjadi pengguna jaringan komunikasi dan informasi.		
			Jumlah masyarakat aktif menggunakan jaringan komunikasi dan informasi	Akses jaringan komunikasi dan informasi mulai masuk ke daerah terpencil.	Pembelajaran kepada penduduk di daerah pelosok mengenai jaringan komunikasi dan informasi.		
		3. Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh masyarakat	Jjumlah keluarga sejahtera	Meningkatnya keluarga sejahtera dan sejahtera 1 (51%)	Meningkatnya keluarga sejahtera dan sejahtera 1 (57%)	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dengan menerapkan prinsip gotong royong, partisipasi, dan	

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
						keswadayaan. 2. Mengembangkan sistem jaminan sosial formal yang dilakukan oleh pemerintah maupun jaminan sosial informal yang dilakukan oleh masyarakat. 3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan sosial. 4. Memberikan jaminan hak-hak sosial ekonomi dan budaya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. 5. Mengembangkan potensi sumber-sumber kesejahteran sosial. 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. 7. Meningkatkan pengembangkan pemberdayaan masyarakat terlebih di daerah pedalaman, komunitas adat terpencil dan perbatasan.	
			Angka PMKS	Menurunnya angka PMKS	Menurunnya angka PMKS		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
			Angka kemiskinan	Menurunnya kemiskinan (7,4%)	Menurunnya kemiskinan (5,1%)		
			Sumber-sumber kesejahteraan sosial dari sektor publik, swasta dan masyarakat.	Meningkatnya sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial dibandingkan akhir tahun 2012	Meningkatnya sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial dibandingkan akhir tahun RPJMD III		
			Jumlah kelompok masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan komunitas adat terpencil yang dibina (kelompok sasaran)	Meningkatnya kelompok masyarakat di perbatasan, terpencil termasuk komunitas adat terpencil yang dibina dibandingkan akhir tahun 2012	Meningkatnya kelompok masyarakat di perbatasan, terpencil termasuk komunitas adat terpencil yang dibina dibandingkan akhir tahun RPJMD III		
	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya penerapan pemerintahan yang baik(partisipatif, transparan, dan akuntabel) dan kepuasan masyarakat	Mencapai nilai minimal B untuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.	1. Menyusun sistem tata kelola pemerintahan daerah dan administrasi pemerintah. 2. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah tahap I. 3. Monitoring dan evaluasi tahap I sistem implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah.	1. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah tahap II. 2. Monitoring dan evaluasi tahap IIsistem implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah.	a. Meningkatkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya. b. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif. c. Meningkatkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat. d. Meningkatkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses dari tingkat provinsi hingga tingkat pemerintahan desa.	a. Mengoptimalkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya. b. Mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif. c. Mengoptimalkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat. d. Mengoptimalkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses dari tingkat provinsi hingga tingkat pemerintahan desa.
			Mencapai opini pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).				
			Meningkatnya jumlah regulasi mengenai penataan SDM,	1. Menyusun regulasi daerah khusus mengatur	1. Implementasi pelaksanaan regulasi	a.	

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
			pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM.	mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah. 2. Implementasi pelaksanaan regulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah tahap I. 3. Monitoring dan Evaluasi tahap I regulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah.	daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah tahap II. 2. Monitoring dan Evaluasi tahap IIregulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, Pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah.		
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100%	1. Membangun sistem tata kelola penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). 2. Implementasi integrasi pengelolaan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) tahap I.	Implementasi integrasi pengelolaan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) tahap I.		
			Tingkat pencapaian penegakan Perda 100%	1. Membentuk mekanisme teknis penegakan Perda. 2. Pelaksanaan penegakan Perda tahap I mencapai 80%.	Pelaksanaan penegakan Perda tahap II mencapai 100%.		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di	3. Menyusun standar pelayanan minimal (SPM)	Implementasi pelaksanaan standar elayanan minimal		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
			seluruh SKPD	di seluruh SKPD. 4. Implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh SKPD Tahap I.	(SPM) di seluruh SKPD Tahap II.		
			Adanya Sistem Informasi Desa (SID) di setiap pemerintahan lokal setingkat desa yang mendukung pengelolaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah	1. Membentuk regulasi daerah tentang sistem informasi desa (SID). 2. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola informasi desa di setiap pemerintah lokal setingkat desa tahap I.	Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola informasi desa di setiap pemerintah lokal setingkat desa tahap II.		
			Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai mutu pelayanan minimal B	Melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik di seluruh instansi yang berwenang menyelenggarakan pelayanan publik Tahap I.	Melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik diseluruh instansi yang berwenang menyelenggarakan pelayanan publik Tahap II.		
			Tersusunnya analisis beban kerja untuk seluruh SKPD (PERKA BKN No. 19Tahun 2011)	Pelaksanaan analisis beban kerja seluruh SKPD Tahap I	Pelaksanaan analisis beban kerja seluruh SKPD Tahap II		
			Terpenuhinya standar kinerja pegawai di seluruh SKPD (PERKA BKN No. 1 Tahun 2013)	1. Menyusun regulasi tentang standar kinerja pegawai di seluruh SKPD 2. Implementasi pelaksanaan regulasi tentang standar kinerja pegawai di seluruh SKPD Tahap I	Implementasi pelaksanaan regulasi tentang standar kinerja pegawai di seluruh SKPD Tahap II		
			Terlaksananya evaluasi jabatan di seluruh SKPD (PERKA BKN No. 21 Tahun 2011)	Pelaksanaan evaluasi jabatan di seluruh SKPD Tahap I	Pelaksanaan evaluasi jabatan di seluruh SKPD Tahap I		
			Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah sudah diimplementasikan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.	1. Menyusun regulasi pemerintah daerah tentang sistem informasi manajemen pemerintahan daerah. 2. Implementasi	Implementasi pelaksanaan regulasi pemerintah daerah tentang sistem informasi manajemen pemerintahan daerah Tahap II.		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
				pelaksanaan regulasi pemerintah daerah tentang sistem informasi manajemen pemerintahan daerah Tahap I.			
			1. Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam hal pemantapan kawasan. 2. Ketertiban perijinan dalam pemanfaatan lahan.	1. Penyediaan peta konflik/tumpang tindih pemanfaatan lahan. 2. Meningkatkan intensitas komunikasi dan sinergi dengan parapihak yang berkonflik. 3. Menyusun regulasi daerah yang mendukung penyelesaian konflik pemanfatan lahan.	Meningkatkan intensitas penegakan hukum dalam rangka penyelesaian kasus tumpang tindih pemanfaatan lahan.		
		2. Terwujudnya penguatan *collaborative governance* antara sektor pemerintah, swasta, civitas akademika dan NGO mengenai pembangunan daerah untuk seluruh wilayah terlebih di perbatasan	Meningkatnya regulasi strategis dan MoU di tingkat pemerintahan daerah yang mengatur tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar *stakeholder* (pemerintah, swasta, civitas akademika/ perguruan tinggi dan NGO)	1. Menyusun regulasi strategis dan MoU tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar stakeholder 2. Implementasi pelaksanaan regulasi strategis dan MoU tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar stakeholder Tahap I	Implementasi pelaksanaan regulasi strategis dan MoU tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar stakeholder Tahap II.	1. Membangun penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah. 2. Meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait. 3. Meningkatkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan. 4. Membuka ruang konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom.	1. Mengembangkan penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah. 2. Mengoptimalkan keterpaduan antar instansi terkait. 3. Mengoptimalkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan. 4. Mengembangkan konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom.
			Terbentuknya Unit Pelayanan Teknis maupun non teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Bidang (Kesehatan, Perhubungan dan	1. Membentuk sistem kelembagaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Teknis (Kesehatan,	Implementasi tata kelola Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Teknis (Kesehatan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika,		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
			Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) di setiap kecamatan dalam rangka mendukung implementasi PATEN (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan).	Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan). 2. Menyiapkan struktur kelembagaan 3. Implementasi tata kelola Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Teknis (Kesehatan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Tahap I.	Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Tahap II.		
			Terbentuknya sistem pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	1. Membentuk mekanisme tentang sistem tata kelola pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. 2. Implementasi mekanisme sistem tata kelola pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Tahap I.	Implementasi mekanisme sistem tata kelola pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Tahap II.		
			Terbentuknya peraturan daerah yang menjamin sistem tata kelola pemerintahan lokal setingkat desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014	1. Menyusun sistem tata kelola pemerintahan lokal setingkat desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan strategi dan instrumen pemberdaayan desa, investasi dan penetapan kewenangan desa skala lokal dan asal usul, perencananan desa, kebijakan keuangan desa, dan pedoman penyusunan APBDes. 2. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan lokal	Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan lokal setingkat desa tahap II.		

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
				setingkat desa tahap I.			
		3. Menguatnya kelembagaan pranata adat	Terbentuknya dewan budaya daerah.	1. Membentuk regulasi sistem tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan dengan kelembagaan tingkat lokal. 2. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan kelembagaan tingkat lokal Tahap I.	Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan kelembagaan tingkat lokal Tahap II.	1. Membangun kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah. 2. Meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik. 3. Meningkatkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya lokal.	1. Mengembangkan kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah. 2. Mengoptimalkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik. 3. Mengoptimalkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya.
	Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	Terbangunnya Pusat Pemerintahan	1. Tersusunnya rencana pembangunan pusat pemerintahan 100% 2. Perkantoran untuk eksekutif 100% 3. Perkantoran Legislatif 100% 4. Perkanatoran instansi pemerintahan lainnya 100% 5. Infrastruktur dan utilitas pendukung 100% yang diperlukan				1. Menyiapkan perencanaan dan implementasi pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan
		Terbangunnya Pusat Perekonomian	1. Tersusunnya rencana pembangunan pusat pemerintahan 100% 2. Pusat perdagangan (CBD) skala propinsi terbangun dengan pertumbuhan bertahap (mengikuti pentahapan RTRW/RDTRK) 3. Pasar pusat dan pasar pelayanan bagian				1. Menyiapkan perencanaan dan implementasi pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyrakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan

Visi	Misi	Sasaran Pokok				Arah Kebijakan Pembangunan	
		Indikator dan Target					
		Uraian	Indikator Kinerja Daerah	RPJMD III	RPJMD IV	RPJMD III	RPJMD IV
			perkotaan (mengikuti pentahapan RTRW/RDTRK)				dana masyarakat
		Terbangunnya lingkungan permukiman ibukota pemerintahan	1. Tersusunnya rencana detail kawasan permukiman 2. Terbangunnya lingkungan permukiman perkotaan berbagai type dan jenis di ibukota perkotaan (mengikuti pentahapan RTRW/RDTRK)				1. Mereview dan merencanakan kembali serta melaksanakan pembangunan permukiman berbagai type dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada
		Terbangunnya infrastruktur pendukung kota pusat pemerintahan	1. Tersusunnya rencana detail infrastruktur pendukung pusat pemerintahan propinsi 2. Terbangunnya infrastruktur perkotaaan (mengikuti pentahapan RTRW/RDTRK)				1. Mereview dan merencanakan kembali serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku

*) *Keterangan: Range dilihat dari nilai terendah sampai nilai tertinggi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara*

Tabel 5.1.2
Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2012)	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan. 2. Meningkatkan akses, pemerataan, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. 4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah,terlebih di daerah terpencil dan perbatasan.	Angka melek huruf *)	90,15-99,04	Meningkat sebesar 1,5% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 1,5% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 1,5% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III
	Angka rata-rata lama sekolah *)	7,55-9,44	Meningkat sebesar 0,7% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III
	Pendidikan tertinggi ditamatkan *)	Tidak Tamat SD 19,21-32,77	Menurun sebesar -10% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar -10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Menurun sebesar -10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III
		Tamat SD 22,15-28,47	Menurun sebesar -4% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar -4% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Menurun sebesar -4% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III
		Tamat SMP 14,33-20,23	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		Tamat SMA 17,51-33,35	Meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		Tamat Perguruan Tinggi 4,43-12,13	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
	Angka partisipasi kasar *)	SD 84,46-109,27	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		SMP 83,87-95,74	Meningkat sebesar 3% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 3% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 3% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		SMA 54,42-98,33	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
	Angka partisipasi murni *)	SD 72,59-94,33	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		SMP 50,83-73,94	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		SMA 40,53-72,59	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
	Angka putus sekolah *)	SD 0,24-1,15	Menurun sebesar 0,5% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar 0,25% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Menurun sebesar 0,25% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		SMP 1,25-5,05	Menurun sebesar -2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar -2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Menurun sebesar -2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		SMA 20,09-34,5	Menurun sebesar 3% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Menurun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Menurun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
	Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah *)	SD-SMP 23,12-75,83	Meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
		SMA 17,08-25,93	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2012)	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
	Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV *)	49,01-71,68	Meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.	Meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun akhir RPJMD III.
Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan prima sesuai dengan target nasional. 2. Mengoptimalkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. 3. Memantapkan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. 4. Mengoptimalkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui media komunikasi, penyuluhan maupun kurikulum pendidikan formal maupun informal. 5. Mengoptimalkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan.	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	167	150 (Target MDG's 2015 = 102)	140	140
	Angka kematian bayi per 1.000 KH	16,86	14 (Target MDG's 2015 = 23)	12	12
	Angka kematian balita per 1.000 KH	6,18	4 (Target MDG's 2015 = 32)	2	2
	Kasus penyakit menular maupun tidak menular	Belum ada	Berkurangnya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Berkurangnya penyakit menular dan penyakit tidak menular dibandingkan tahun akhir RPJMD III	Berkurangnya penyakit menular dan penyakit tidak menular dibandingkan tahun akhir RPJMD III.
	Persentase gizi buruk balita	0,80%	0,60% (Target MDG's 2015 = 3,15%)	0,40%	0,40%
	Usia harapan hidup	71,78 tahun	72 tahun (Target RPJMN 2014 = 72 tahun)	73 tahun	73 tahun
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88%	93% (Target SPM 2015 = 90%)	98%	98%
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	65,8%	80% (Target SPM 2015 = 80%)	90 %	90 %
	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	34,95	38 (Target Indonesia Sehat 2010 = 40)	41	41
	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	5,97	7 (Target Indonesia Sehat 2010 = 7)	8	8
	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	8,61	11 (Target Indonesia Sehat 2010 = 11)	12	12
	Rasio bidan per 100.000 penduduk	89	95 (Target Indonesia Sehat 2010 = 100)	100	100
	Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk	12	17 (Ttarget Indonesia Sehat 2010 = 22)	22	22
	Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk	9	15 (Target Indonesia Sehat 2010 = 40)	21	21
	Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	23	28 (Target Indonesia Sehat 2010 = 40)	33	33
	Jumlah tenaga medis dan kesehatan yang bersertifikasi	Belum ada data	100%	100%	100%
	Rumah sakit	7 buah (1 unit di Nunukan, Malinau, dan Bulungan, Tana Tidung belum ada, 4 unit di Tarakan)	9 unit (pembangunan RS di Kabupaten Tana Tidung dan Malinau selatan (Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Pujungan)	11 buah (pembangunan RS di wilayah Nunukan bagian perbatasan, Bulungan)	11 buah

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2012)	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
	Puskesmas	Jumlah 48 buah. Rasio 8,43 per 100.000 penduduk	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi.	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi
	Puskesmas pembantu	Jumlah 171 buah. Rasio 30,03 per 100.000 penduduk	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi.	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi	Pemerataan setiap daerah berdasarkan kepadatan penduduk dan topografi
	Puskesmas keliling	Banyak pusling dalam kondisi rusak terutama pusling air.	Memperbaiki kualitas dan kuantitas pusling sesuai topografi.	Memperbaiki kualitas dan kuantitas pusling sesuai topografi	Memperbaiki kualitas dan kuantitas pusling sesuai topografi
	Pola Rujukan	Belum adanya kebijakan khusus terkait pola rujukan bagi daerah terpencil yang kesulitan menjangkau sarana kesehatan.	Terwujudnya kebijakan pola rujukan khusus bagi daerah terpencil yang kesulitan menjangkau sarana kesehatan.	Terwujudnya kebijakan pola rujukan khusus bagi daerah terpencil yang kesulitan menjangkau sarana kesehatan.	Terwujudnya kebijakan pola rujukan khusus bagi daerah terpencil yang kesulitan menjangkau sarana kesehatan.
Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam ketenagakerjaan					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mengoptimalkan pendidikan kejuruan 2. Meningkatkan tata kelola sektor ketenagakerjaan	Jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja	234.817 orang	Meningkatnya jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.
Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV : 1. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender (PUG) 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10,26 – 35,89	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dibandingkan akhir tahun RPJMD III.	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dibandingkan akhir tahun RPJMD III.
3. Meningkatkan perlindungan anak.	Perlindungan anak	Belum ada data	Meningkatnya upaya perlindungan anak dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya upaya perlindungan anak dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya upaya perlindungan anak dibandingkan kondisi akhir tahun 2012
Sasaran Pokok 5 : Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan dalam pembangunan daerah					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda 2. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Partisipasi pemuda	Belum ada data	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dibandingkan akhir tahun RPJMD III.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dibandingkan akhir tahun RPJMD III.
3. Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	Belum ada data	Meningkatnya upaya pengembangan budaya dan prestasi olahraga dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya upaya pengembangan budaya dan prestasi olahraga dibandingkan kondisi akhir tahun	Meningkatnya upaya pengembangan budaya dan prestasi olahraga dibandingkan kondisi akhir tahun

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2012)	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
				RPJMD III.	RPJMD III.
Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya kualitas spiritualitas masyarakat yang beragam					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Meningkatkan peran institusi keagamaan dan lembaga keormasan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat madani 2. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama 3. Meningkatkan Implementasi nilai-nilai agama dan spiritualitas yang ada dalam setiap tindakan dan perilaku masyarakat	Intensitas kegiatan lembaga keagamaan dan ormas	Belum ada data	Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga keagamaan dan ormas dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga keagamaan dan ormas dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.	Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga keagamaan dan ormas dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.
	Angka kriminalitas	24,4%	20%	16%	16%
	Konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbau SARA	Belum ada data	Menurunnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbau SARA dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Menurunnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbau SARA dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.	Menurunnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbau SARA dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.
	Angka tawuran pelajar/kelompok/pemuda	Belum ada data	Menurunnya angka tawuran pelajar/kelompok/pemuda dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Menurunnya angka tawuran pelajar/kelompok/pemuda dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III	Menurunnya angka tawuran pelajar/kelompok/pemuda dari periode sebelumnya
	Kerjasama lintas agama, suku dan ras dalam menjaga kerukunan hidup beragama	Belum ada data	Meningkatnya kerjasama lintas agama, suku dan ras dalam menjaga kerukunan hidup beragama dibandingkan kondisi akhir tahun 2012.	Meningkatnya kerjasama lintas agama, suku dan ras dalam menjaga kerukunan hidup beragama dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.	Meningkatnya kerjasama lintas agama, suku dan ras dalam menjaga kerukunan hidup beragama dibandingkan kondisi akhir tahun RPJMD III.

**) Keterangan: Range dilihat dari nilai terendah sampai nilai tertinggi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara*

Misi 2 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2012)	Tahap		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
Sasaran Pokok 1 : Peningkatan kelestarian kawasan konservasi dan kawasan lindung					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: Mengembangkan pola *Collaborative Management* dalam pengelolaan kawasan konservasi dan lindung	Intensitas gangguan dan degradasi lingkungan pada kawasan konservasi dan lindung	Masih adanya gangguan dan lingkungan yang berdegradasi pada kawasan lindung	30% kawasan lindung yang mengalami gangguan terbebas dari gangguan	60% kawasan lindung yang mengalami gangguan terbebas dari gangguan	Kawasan lindung yang telah terbebas dari gangguan sebagian telah terpulihkan kondisinya. Masyarakat dan pihak-pihak yang berkonflik meningkat kesadarannya dalam melestarikan kawasan konservasi dan lindung
Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya tata kelola Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan (*Good Natural Resources Governance)*					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: Meningkatkan intensitas penegakan hukum berdasarkan regulasi daerah dan database yang kuat	Pemanfaatan sumberdaya alam tanpa ijin/illegal	Masih adanya pemanfaatan SDA yang *illegal*	Penambangan illegal berkurang sebanyak 25% dari kondisi awal	Penambangan illegal berkurang sebanyak 75% dari kondisi awal	Pengusahaan sumberdaya alam illegal menjadi sangat minimal dalam jumlah dan volume yang kecil
Sasaran Pokok 3 : Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan pada kawasan budidaya					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mengembangkan pola-pola partisipatif dalam penanganan kawasan kumuh dan tidak layak huni 2. Meningkatkan intensitas kampanye tentang pentingnya lingkungan yang sehat	Kawasan kumuh dan tidak layak huni di perkotaan	Kawasan kumuh masih muncul dan kurang tertata masih dijumpai di beberapa kota namun belum ada pemetaan dan pendataan	1. Tersedianya data dan informasi tentang kawasan kumuh dan tidak layak huni 2. Munculnya regulasi tentang penanganan masalah kawasan kumuh dan tidak layak huni	Berkurangnya jumlah kawasan kumuh dan tidak layak huni sebanyak 50% dari kondisi awal	Kalimantan Utara akan menjadi provinsi baru dengan standar kualitas lingkungan hidup yang tinggi dan dapat menjadi percontohan di tingkat nasional
Sasaran Pokok 4 : Terpulihkannya lingkungan hidup yang telah mengalami degradasi					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mempertegas penegakan hukum agar tidak terjadi perluasan degradasi/ kerusakan lingkungan 2. Meningkatkan sistem mitigasi bencana lokal dan regional secara alami dan teknologi (rekayasa)	Luas lingkungan hidup yang telah terdegradasi baik berupa lahan hutan/non hutan, terumbu karang dan hutan mangrove	Beberapa komponen sumberdaya alam dan lahan dalam kondisi terdegradasi	1. Adanya data tentang komponen-komponen lingkungan hidup yang mengalami degradasi 2. Adanya regulasi tentang penanganan lingkungan berdegradasi secara partisipatif dan kolaboratif	20% dari lingkungan yang berdegradasi mengalami pemulihan (angka ini dengan mempertimbangkan luas lahan kritis yang ada)	Lingkungan hidup yang berdegradasi mengalami pemulihan secara bertahap dan terukur dan didukung oleh partisipasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait

Misi 3 Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2012)	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
Sasaran pokok 1 : Meningkatnya nilai tambah perekonomian berbasis sektor unggulan					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Memantapkan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan. 2. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur 3. Memantapkan perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan 4. Memantapkan kelembagaan petani 5. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas. 6. Mengoptimalkan penerapan teknologi yang tepat untuk pengembangan sektor unggulan.	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	1,93%	2,6%	3,4%	3,4%
	Laju pertumbuhan PDRB industri	3,75%	6,75%	9,75%	9,75%
	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	8,81%	9,5-10%	11,5 - 12%	11,5 - 12%
Sasaran pokok 2 : Meningkatnya nilai investasi berbasis sumberdaya lokal					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mewujudkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. 2. Mengembangkan pembangunan infrastruktur dan utilitas. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam investasi.	Nilai PMDN dan PMA	192.693 juta rupiah (nilai realisasi investasi PMDN dan PMA)	460.950,5 juta rupiah	690.885,5 juta rupiah	690.885,5 juta rupiah
Sasaran pokok 3 : Meningkatnya diversifikasi kesempatan kerja dan berusaha					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mengoptimalkan kegiatan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan kearifan dan keunggulan lokal. 2. Mengoptimalkan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha. 3. Mengoptimalkan peran UMKM dalam perekonomian wilayah.	Jumlah pelaku UKM	90.963 unit (Tahun 2011)	115.229 unit	137.590 unit	137.590 unit

Misi 4 Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
Sasaran pokok 1 : Terstrukturnya wilayah pengembangan dan pusat pelayanan sesuai dengan penataan ruang					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mengoptimalkan peran kota sebagai pusat pelayanan wilayah sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang 2. Mengendalikan wilayah pengembangan bagian timur (pulau kecil) 3. Memantapkan pengembangan wilayah bagian tengah dan pantai timur 4. Mengoptimalkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan 5. Mempersiapkan calon daerah otonomi baru yang memungkinkan dengan melanjutkan proses yang belum selesai dan memulai pengembangan tahap persiapan bagi daerah otonomi baru yang sudah jadi.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	1. PKN: Tarakan 2. PKSN: 1. Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang (Kabupaten Nunukan) 2. Long Nawang (Kabupaten Malinau)	1. PKN: Tarakan 2. PKSN: c. Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang (Kabupaten Nunukan) d. Long Nawang (Kabupaten Malinau) semakin berkembang fungsi dan perannya dibandingkan tahun akhir 2012	1. PKN: Tarakan 2. PKSN: c. Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang (Kabupaten Nunukan) d. Long Nawang (Kabupaten Malinau) semakin mantap fungsi dan perannya dibandingkan akhir tahun RPJMD III	1. PKN: Tarakan 2. PKSN: a. Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang (Kabupaten Nunukan) b. Long Nawang (Kabupaten Malinau) semakin mantap fungsi dan perannya dibandingkan akhir tahun RPJMD III
Sasaran pokok 2 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur, utilitas dan fasilitas yang merata					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara). 2. Meningkatnya pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh wilayah terlebih daerah perbatasan dan terpencil. 3. Terwujudnya pembangunan fasilitas fisik, sosial, ekonomi dan pengelolaan di seluruh wilayah terlebih di daerah perbatasan dan terpencil.	Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	56,4%	75%	100%	100%
	Panjang jalur kereta api	Belum ada	Membangun rintisan jalur kereta api	Terwujudnya prasyarat jalur kereta api	Terwujudnya prasyarat jalur kereta api.
	Jumlah pelabuhan dan dermaga	6 pelabuhan	Meningkatkan jumlah pelabuhan dan dermaga sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan jumlah dan atau kelas/ tipe pelabuhan dan dermaga hingga ketersediaannya memadai	Tersedia fasilitas pelabuhan dan dermaga yang memadai di seluruh wilayah yang terlayani transportasi air.
	Jumlah dan kelas bandara	28 bandara	Meningkatkan jumlah bandara	Meningkatkan jumlah dan atau kelas bandara	Tersedia bandara yang memadai dan mampu menjangkau seluruh wilayah hingga wilayah perbatasan dan terpencil.
	Jumlah, frekuensi dan trayek angkutan penumpang dan barang moda transportasi darat, air (laut dan sungai) dan udara.	Layanan yang ada belum merata dan masih terbatas	Sebagian besar wilayah kabupaten/kota terutama perbatasan dan terpencil tersedia layananan transportasi darat, air (laut dan sungai) dan udara.	Seluruh wilayah kabupaten/kota terutama perbatasan dan terpencil terlayani transportasi darat, air (laut dan sungai) dan udara yang mencakup angkutan barang dan penumpang	Seluruh wilayah terlayani angkutan barang dan penumpang menggunakan moda transportasi darat, air (laut dan sungai) dan udara hingga wilayah perbatasan dan terpencil dengan

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
				dengan frekuensi layanan memadai.	frekuensi layanan memadai.
	Jumlah terminal penumpang dan atau barang	12	Seluruh kabupaten/kota memiliki terminal penumpang dan atau barang.	Seluruh kabupaten/kota dan kecamatan memiliki terminal penumpang dan atau barang.	Seluruh kabupaten/kota dan kecamatan memiliki terminal penumpang dan barang.
	Peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta penyediaan layanan transportasi	Peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta penyediaan layanan transportasi masih sangat rendah.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta penyediaan layanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.	Masyarakat dan pelaku ekonomi selalu diikut sertakan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta penyediaan layanan transportasi di seluruh wilayah terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.	Masyarakat dan pelaku ekonomi terlibat akif dalam kegiatan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur transportasi dan penyediaan layanan transportasi dengan baik.
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	35,88%	75%	100%	100%
	Jumlah dan jenis produksi listrik	Masih banyak daerah yang belum memiliki jaringan listrik	Jumlah dan jenis produksi listrik bertambah baik dari pemerintah maupun sumber alternatif lain	Seluruh daerah dapat menikmati penggunaan listrik	Seluruh daerah dapat menikmati penggunaan listrik
	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	45%	60%	75%	100%
	Persentase keluarga dengan sumber air minum terlindungi	< 80% (kecuali Tarakan)	80%	100%	100%
	Persen rumah tangga bersanitasi	65%	75%	85%	100%
	Standar mutu baku air bersih	Sekitar setengah dari total penduduk sudah memiliki sanitasi dan pengolahan air bersih yang baik, sedangkan setengahnya lagi belum.	Tersedianya sistem pengelolaan air baku dan sistem sanitasi yang dapat mengurangi pencemaran air baku.	Tersedianya air olahan yang sudah memenuhi standar baku mutu dan dapat dimanfaatkan secara proporsiona.l	Semua sistem pengolahan air sudah sesuai standar baku mutu dan dapat dimanfaatkan secara proporsional di seluruh wilayah.
	Ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah	Belum ada data	Tersedia jaringan komunikasi dan informasi di sebagian besar wilayah terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.	Tersedia berbagai jenis jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.	Tersedia berbagai jenis jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.
	Jumlah masyarakat aktif yang menggunakan jaringan komunikasi dan informasi	Sebagian besar penduduk di daerah terpencil belum memanfaatkan jaringan komunikasi dan informasi.	Meningkatkan jumlah pengguna jaringan komunikasi dan informasi dengan prioritas wilayah perbatasan dan wilayah terpencil.	Sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah menjadi pengguna jaringan komunikasi dan informasi.	Sebagian besar masyarakat menjadi pengguna aktif yang dapat memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi dengan baik.
	Jumlah masyarakat aktif menggunakan jaringan komunikasi dan informasi	Sebagian besar penduduk di daerah terpencil belum mendapatkan jaringan komunikasi dan informasi.	Akses jaringan komunikasi dan informasi mulai masuk ke daerah terpencil.	Pembelajaran kepada penduduk di daerah pelosok mengenai jaringan komunikasi dan informasi.	Sebagian besar masyarakat menjadi pengguna aktif yang dapat memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi dengan baik.
Sasaran pokok 3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh masyarakat					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV:	Jjumlah keluarga sejahtera	Angka keluarga sejahtera dan sejahtera 1 (46,11%)	Meningkatnya keluarga sejahtera dan sejahtera 1 (51%)	Meningkatnya keluarga sejahtera dan sejahtera 1 (57%)	Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera I (57%)
1. Meningkatkan standar	Angka PMKS	Data tentang Penyandang	Menurunnya angka PMKS	Menurunnya angka PMKS	Menurunnya angka PMKS.

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Mengembangkan kapasitas modal sosial masyarakat untuk mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 3. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan globalisasi.		Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
	Angka kemiskinan	Data tentang kondisi eksisting kemiskinan dari semua kabupaten/kota (9,7%)	Menurunnya kemiskinan (7,4%)	Menurunnya kemiskinan (5,1%)	Menurunnya kemiskinan (5,1%)
	Sumber-sumber kesejahteraan sosial dari sektor publik, swasta dan masyarakat.	Belum ada data	Meningkatnya sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial dibandingkan akhir tahun 2012	Meningkatnya sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial dibandingkan akhir tahun RPJMD III	Meningkatnya sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial dibandingkan akhir tahun RPJMD III.
	Jumlah kelompok masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan komunitas adat terpencil yang dibina (kelompok sasaran)	Data eksisting jumlah kelompok masyarakat di daerah perbatasan, terpencil termasuk komunitas adat terpencil yang sudah dibina	Meningkatnya kelompok masyarakat di perbatasan, terpencil termasuk komunitas adat terpencil yang dibina dibandingkan akhir tahun 2012	Meningkatnya kelompok masyarakat di perbatasan, terpencil termasuk komunitas adat terpencil yang dibina dibandingkan akhir tahun RPJMD III	Meningkatnya kelompok masyarakat di perbatasan, terpencil termasuk komunitas adat terpencil yang dibina dibandingkan akhir tahun RPJMD III.

Misi 5 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
Sasaran pokok 1 : Meningkatnya penerapan pemerintahan yang baik(partisipatif, transparan, dan akuntabel) dan kepuasan masyarakat					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mengoptimalkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya. 2. Mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif. 3. Mengoptimalkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat. 4. Mengoptimalkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses dari tingkat provinsi hingga tingkat pemerintahan desa.	Mencapai nilai minimal B untuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.	Belum ada informasi kondisi akuntabilitas pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.	1. Menyusun sistem tata kelola pemerintahan daerah dan administrasi pemerintah. 2. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah tahap I. 3. Monitoring dan evaluasi tahap I sistem implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah.	1. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah tahap II. 2. Monitoring dan evaluasi tahap IIsistem implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah.	Nilai B Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
	Mencapai opini pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Belum ada informasi kondisi pemeriksaan BPK di Provinsi Kalimantan Utara.			Opini pemeriksaan BPK Provinsi Kalimantan Utara mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
	Meningkatnya jumlah regulasi mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM.	Belum ada regulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM	1. Menyusun regulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah. 2. Implementasi pelaksanaan regulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah tahap I. 3. Monitoring dan Evaluasi tahap I regulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah.	1. Implementasi pelaksanaan regulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah tahap II. 2. Monitoring dan Evaluasi tahap IIregulasi daerah khusus mengatur mengenai penataan SDM, Pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM daerah.	Adanya sejumlah regulasi mengenai penataan SDM, pengelolaan kawasan perbatasan, perlindungan HAKI dan kebudayaan, pengelolaan lingkungan dan ESDM.
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100%	Belum terintegrasinya sistem pengelolaan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) antar kabupaten/kota	1. Membangun sistem tata kelola penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). 2. Implementasi integrasi pengelolaan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) tahap I.	Implementasi integrasi pengelolaan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) tahap I.	Terintegrasinya sistem pengelolaan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) antar kabupaten/kota.

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
	Tingkat pencapaian penegakan Perda 100%	Masih lemahnya tingkat pencapaian penegakan Perda antar kabupaten/kota	1. Membentuk mekanisme teknis penegakan Perda. 2. Pelaksanaan penegakan Perda tahap I mencapai 80%.	Pelaksanaan penegakan Perda tahap II mencapai 100%.	Tingkat pencapaian penegakan Perda di seluruh kabupaten/kota mencapai 100%.
	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh SKPD	Belum ada standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh SKPD	1. Menyusun standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh SKPD. 2. Implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh SKPD Tahap I.	Implementasi pelaksanaan standar elayanan minimal (SPM) di seluruh SKPD Tahap II.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh SKPD.
	Adanya Sistem Informasi Desa (SID) di setiap pemerintahan lokal setingkat desa yang mendukung pengelolaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah	Belum berkembangnya sistem informasi desa (SID) di setiap pemerintahan lokal setingkat desa	1. Membentuk regulasi daerah tentang sistem informasi desa (SID). 2. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola informasi desa di setiap pemerintah lokal setingkat desa tahap I.	Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola informasi desa di setiap pemerintah lokal setingkat desa tahap II.	Adanya sistem informasi desa (SID) di setiap pemerintahan lokal setingkat desa.
	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai mutu pelayanan minimal B	Lemahnya sistem pengelolaan pelayanan masyarakat tentang kualitas pelayanan publik	Melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik di seluruh instansi yang berwenang menyelenggarakan pelayanan publik Tahap I.	Melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik diseluruh instansi yang berwenang menyelenggarakan pelayanan publik Tahap II.	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai mutu pelayanan minimal B.
	Tersusunnya analisis beban kerja untuk seluruh SKPD (PERKA BKN No. 19Tahun 2011)	Belum ada analisis beban kerja untuk seluruh SKPD.	Pelaksanaan analisis beban kerja seluruh SKPD Tahap I	Pelaksanaan analisis beban kerja seluruh SKPD Tahap II	Adanya hasil analisis jabatan untuk seluruh SKPD
	Terpenuhinya standar kinerja pegawai di seluruh SKPD (PERKA BKN No. 1 Tahun 2013)	Belum ada regulasi tentang standar kinerja pegawai di seluruh SKPD.	1. Menyusun regulasi tentang standar kinerja pegawai di seluruh SKPD 2. Implementasi pelaksanaan regulasi tentang standar kinerja pegawai di seluruh SKPD Tahap I	Implementasi pelaksanaan regulasi tentang standar kinerja pegawai di seluruh SKPD Tahap II	Standar kinerja pegawai di seluruh SKPD sesuai dengan (PERKA BKN nomor 1 tahun 2013)
	Terlaksananya evaluasi jabatan di seluruh SKPD (PERKA BKN No. 21 Tahun 2011)	Belum ada evaluasi jabatan di seluruh SKPD	Pelaksanaan evaluasi jabatan di seluruh SKPD Tahap I	Pelaksanaan evaluasi jabatan di seluruh SKPD Tahap I	Adanya evaluasi jabatan di seluruh SKPD (Perka BKN No. 21 Tahun 2011)
	Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah sudah diimplementasikan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.	Belum ada regulasi pemerintah daerah tentang sistem informasi manajemen pemerintahan daerah.	1. Menyusun regulasi pemerintah daerah tentang sistem informasi manajemen pemerintahan daerah. 2. Implementasi pelaksanaan regulasi pemerintah daerah tentang sistem informasi manajemen pemerintahan daerah Tahap I.	Implementasi pelaksanaan regulasi pemerintah daerah tentang sistem informasi manajemen pemerintahan daerah Tahap II.	Sistem informasi manajemen pemerintah daerah sudah diimplementasikan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota sesuai regulasi yang ada.
	1. Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam hal pemantapan kawasan. 2. Ketertiban perijinan dalam	1. Terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan hutan dengan sektor lain seperti perkebunan dan	1. Penyediaan peta konflik/tumpang tindih pemanfaatan lahan. 2. Meningkatkan intensitas komunikasi dan sinergi dengan parapihak yang	Meningkatkan intensitas penegakan hukum dalam rangka penyelesaian kasus tumpang tindih pemanfaatan lahan.	Konflik atau tumpang tindih pemanfaatan lahan dapat diminimalkan sehingga dapat menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
	pemanfaatan lahan.	pertambangan 2. Perambahan kawasan hutan untuk kepentingan pemukiman dan bahkan perkantoran. 3. Belum tersedia peta konflik kawasan sebagai dasar penyelesaian	berkonflik. 3. Menyusun regulasi daerah yang mendukung penyelesaian konflik pemanfatan lahan.		pengelolaan sumber daya hutan.
Sasaran pokok 2 : Terwujudnya penguatan *collaborative governance* antara sektor pemerintah, swasta, civitas akademika dan NGO mengenai pembangunan daerah untuk seluruh wilayah terlebih di perbatasan					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mengembangkan penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah. 2. Mengoptimalkan keterpaduan antar instansi terkait. 3. Mengoptimalkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan. 4. Mengembangkan konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom.	Meningkatnya regulasi strategis dan MoU di tingkat pemerintahan daerah yang mengatur tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar *stakeholder* (pemerintah, swasta, civitas akademika/ perguruan tinggi dan NGO)	Belum ada regulasi strategis dan MoU tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar *stakeholder*	1. Menyusun regulasi strategis dan MoU tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar stakeholder 2. Implementasi pelaksanaan regulasi strategis dan MoU tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar stakeholder Tahap I	Implementasi pelaksanaan regulasi strategis dan MoU tentang kerjasama pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan antar stakeholder Tahap II.	Terwujudnya penguatan *collaborative governance* antara sektor pemerintah, swasta, civitas akademika dan NGO mengenai pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan.
	Terbentuknya Unit Pelayanan Teknis maupun non teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Bidang (Kesehatan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) di setiap kecamatan dalam rangka mendukung implementasi PATEN (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan).	Belum terbentuknya sistem kelembagaan Unit Pelayanan Teknis maupun non Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Bidang (Kesehatan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) setiap kecamatan.	1. Membentuk sistem kelembagaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Teknis (Kesehatan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan). 2. Menyiapkan struktur kelembagaan 3. Implementasi tata kelola Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Teknis (Kesehatan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Tahap I.	Implementasi tata kelola Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Teknis (Kesehatan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Tahap II.	Terbentuknya kelembagaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perijinan dan UPTD Teknis (Kesehatan, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan).
	Terbentuknya sistem pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Budaya partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dalam kegiatan pembangunan, kondisi kualitas SDM dan sistem tata kelola pemerintahan desa yang masih belum optimal fungsinya.	1. Membentuk mekanisme tentang sistem tata kelola pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. 2. Implementasi mekanisme sistem tata kelola pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Tahap I.	Implementasi mekanisme sistem tata kelola pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Tahap II.	Meningkatnya partisipasi jumlah pemberdayaan masyarakat dan sistem kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
	Terbentuknya peraturan daerah yang menjamin sistem tata kelola pemerintahan lokal setingkat desa	Belum ada peraturan daerah yang menjamin sistem tata kelola pemerintahan lokal	1. Menyusun sistem tata kelola pemerintahan lokal setingkat desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014	Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan lokal setingkat desa tahap II.	Terlaksananya sistem kelola pemerintahan lokal setingkat desa yang mampu mendukung perkembangan

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			RPJMD III	RPJMD IV	
	sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014	penunjang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014	yang berkaitan dengan strategi dan instrumen pemberdaayan desa, investasi dan penetapan kewenangan desa skala lokal dan asal usul, perencananan desa, kebijakan keuangan desa, dan pedoman penyusunan APBDes. 2. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan lokal setingkat desa tahap I.		dinamika pembangunan daerah.
Sasaran pokok 3 : Menguatnya kelembagaan pranata adat					
Arah kebijakan pembangunan ke-IV: 1. Mengembangkan kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah. 2. Mengoptimalkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik. 3. Mengoptimalkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya.	Terbentuknya dewan budaya daerah.	Belum terintegrasinya sistem tata kelola pemerintahan dengan kelembagaan tingkat lokal.	1. Membentuk regulasi sistem tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan dengan kelembagaan tingkat lokal. 2. Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan kelembagaan tingkat lokal Tahap I.	Implementasi pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan kelembagaan tingkat lokal Tahap II.	Terintegrasinya sistem tata kelola pemerintahan dengan kelembagaan tingkat lokal.

Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			RPJMD III	RPJMD IV	
Sasaran pokok 1.Terbangunnya Pusat Pemerintahan					
1. Menyiapkan perencanaan RDTR ibukota propinsi	Perda RTRW ibukota	Belum ada	100%	100%	100%
2. Mengimplementasaikan rencana pusat perkantoran eksekutif	Perkantoran eksekutif	Belum ada	25%	75%	75% dari R20
3. Mengimplementasaikan rencana pusat perkantoran legislatif	Pperkantoran legislatif	Belum ada	25%	75%	75% dari R20
4. Mengimplementasaikan rencana perkantoran instansi lainnya	Pperkantoran instansi lainnya	Belum ada	25%	75%	75% dari R20
5. Mengimplementasaikan rencana kelengkapan infrastruktur dan utilitas perkantoran pemerintah	Kelengkapan infrastruktur dan utilitas pusat perkantoran	Belum ada	25%	75%	75% dari R20
Sasaran Pokok 2 Terbangunnya Pusat Perekonomian					
Arah kebijakan pembangunan: Menyiapkan perencanaan dan implementasi pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyrakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat					
1. Menyiapkan perencanaan detail pusat perekonomian	Rencana detail kawasan perekonomian	Belum ada	100%	100%	100%
2. Mengimplementasaikan rencana pusat perekonomian/CBD	Kawasan perdagangan pusat	Kondisi existing 2015 yang bersifat emrional	25%	50%	50% dari R20
3. Mengimplementasaikan rencana perpasaran masyarakat di pusat dan lingkunganwilayah	Kawasan perpasaran pust dan lingkungan wilayah	Kondisi existing 2015 yang bersifat pelayanan PKL	25%	50%	50% dari R20
Sasaran Pokok 3 Terbangunnya lingkungan permukiman ibukota pemerintahan					
Arah kebijakan pembangunan: Mereview dan merencanakan kembali serta melaksanakan					

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			RPJMD III	RPJMD IV	
pembangunan permukiman berbagai tipe dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada sesuai kemampuan masyrakat					
1. Menyiapkan rencana detail kawasan permukiman	Rencana detail kawasan permukiman	Belum ada	100%	100%	100%
2. Mengimplementasikan rencana pembangunan lingkungan permukiman perkotaan berbagai type dan jenis di ibukota perkotaan (mengikuti pentahapan RTRW/RDTRK)	Kawasanpermukiman perkotaan	Kondisi existing 2015 yang bersifat emrional	25% terkerangkai rencana pemanfaatan ruang	50% terkerangkai rencana pemanfaatan ruang	50% dari R20 rencana pemanfaatan ruang
Sasaran Pokok 4 Terbangunnya infrastruktur pendukung kota pusat pemerintahan					
Arah Kebijakan pembangunan: Mereview dan merencanakan kembali serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku					
1. Mereview dan menyusun rencana detail infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku	Rencana detail infrastruktur perkotaan pendukung ibukota propinsi	Belum ada	100%	100%	100%
2. Mengimplementasikan pembangunan infrastruktur pendukung ibukota propinsi	Infrastruktur Kawasan ibukota propinsi	Kondisi existing 2015 yang bersifat emrional	25% terkerangkai rencana struktur ruang	50% terkerangkai rencana struktur ruang	50% dari R20 rencana struktur ruang

5.2. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Arah pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan yakni dengan visi *Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara sebagai Wilayah Perbatasan Terdepan yang Berbudaya, Sejahtera, Adil, dan Beradab*. Pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dipergunakan kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Sesuai dengan dasar tersebut, maka untuk tahapan dan skala prioritas disusun sebagai berikut:

5.2.1 TAHAP LIMA TAHUN KE-3

Rencana pembangunan pada tahap lima tahun ketiga ditekankan pada hal berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia**
   a. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
   b. Meningkatkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, termasuk di perbatasan
   c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah, dan di perbatasan
   d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah, dan di perbatasan
   e. Meningkatkan pelayanan kesehatan prima minimal sejajar dengan pelayanan kesehatan negara tetangga
   f. Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah khususnya di daerah terpencil dan perbatasan
   g. Meningkatkan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
   h. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui media komunikasi, penyuluhan, maupun kurikulum pendidikan formal maupun informal
   i. Meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan
   j. Mengembangkan pendidikan kejuruan
   k. Membangun tata kelola sektor ketenagakerjaan
   l. Meningkatkan pengarustamaan gender
   m. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender
   n. Meningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan keormasan
   o. Mengembangan kerjasama antar lembaga pemerintah, lembaga lintas agama untuk mewujudkan masyarakat madani.
   p. Mendorong institusi keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai fokus untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar membentuk karakteristik generasi muda.

2. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan**
   a. Mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kelestarian kawasan lindung
   b. Memperkuat sistem pemantauan kondisi kawasan lindung
   c. Mengembangkan regulasi daerah yang memperkuat PSDA yg berkelanjutan
   d. Memperkuat sistem pemantauan praktek-praktek pengusahaan sumber daya alam
   e. Menyusun dan menetapkan RTRWP
   f. Mengembangkan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan RTRWP

g. Merumuskan peraturan daerah tentang standar kualitas lingkungan hidup dan membangun budaya hidup sehat pada kawasan budidaya
h. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya *Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan*
i. Mengembangkan pola-pola partisipatif dan berkelanjutan dalam pemulihan lahan kritis atau lingkungan yang telah terdegradasi
j. Mengembangkan sistem pemantauan terhadap lahan dan lingkungan terdegradasi

3. Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing

a. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat
b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
c. Memperkuat regulasi ketahanan dan kedaulatan pangan
d. Memperkuat kelembagaan petani
e. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan
f. Meningkatkan penerapan teknologi yang tepat untuk pengembangan sektor unggulan
g. Meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif
h. Meningkatkan infrastruktur dan utilitas
i. Meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif
j. Meningkatkan peran UMKM dalam ekonomi wilayah

4. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

a. Meningkatkan peran kota sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang (yang berfungsi PKN dan PKSN sebagai pusat pelayanan)
b. Mengendalikan wilayah pengembangan bagian timur (pulau kecil)
c. Memantapkan wilayah pengembangan bagian tengah dan pantai timur
d. Mengembangkan wilayah pengembangan yang berada di perbatasan
e. Mengutamakan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara)
f. Mendorong pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar
g. Memeratakan pembangunan fasilitas fisik, sosial, dan ekonomi dasar
h. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi.
i. Mengembangkan sistem jaminan sosial formal yang dilakukan oleh pemerintah maupun jaminan sosial informal yang dilakukan oleh masyarakat dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan sosial
j. Memberikan jaminan hak hak sosial ekonomi dan budaya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
k. Mengembangkan potensi sumber sumber kesejahteran sosial dan meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
l. Mengembangkan program program pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan komunitas adat terpencil

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

a. Meningkatkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya
b. Meningkatkan kinerja sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif
c. Meningkatkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat

d. Meningkatkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses hingga tingkat pemerintahan desa
e. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pihak terkait (masyarakat dan swasta tentang kebijakan pemanfaatan dan tata kelola sumber daya hutan dan *good forest governance*
f. Membangun penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah
g. Meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait
h. Meningkatkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan
i. Membuka ruang konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom
j. Membangun kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah
k. Meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik
l. Meningkatkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya

6. Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

a. Menyiapkan perencanaan pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan
b. Iimplementasi sebagian rencana pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan. Menyiapkan perencanaan pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyarakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat
c. Iimplementasi pembangunan sebagian pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyrakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat
d. Mereview dan merencanakan kembali serta pembangunan permukiman berbagai tipe dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada sesuai kemampuan masyrakat
e. Melaksanakan pembangunan sebagian/tahap awal permukiman berbagai tipe dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada sesuai kemampuan masyrakat
f. Mereview dan merencanakan kembali pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku
g. Melaksanakan pembangunan tahap awal infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku

5.2.2 TAHAP LIMA TAHUN KE-4

Rencana pembangunan tahap lima tahun keempat ditekankan pada:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia

a. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
b. Meningkatkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, termasuk di perbatasan
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah, dan di perbatasan
d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah, dan di perbatasan
e. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan prima
f. Mengoptimalkan pemerataan sarana pelayanan dan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kesehatan di seluruh wilayah
g. Memantapkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui berbagai media
h. Mengoptimalkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan

i. Mengoptimalkan pendidikan kejuruan
j. Meningkatkan tata kelola sektor ketenagakerjaan
k. Meningkatkan pengarustamaan gender
l. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender
m. Meningkatkan peran institusi keagamaan dan lembaga keormasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat madani
n. Meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama
o. Meningkatkan Implementasi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan dan perilaku masyarakat

2. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan**
   a. Mengembangkan pola-pola *Collaborative Management* dalam pengelolaan kawasan konservasi dan lindung
   b. Meningkatkan intensitas penegakan hukum berdasarkan regulasi daerah dan database yang kuat
   c. Meningkatkan intensitas penegakan hukum berdasarkan regulasi daerah dan database yang kuat
   d. Mengembangkan pola-pola partisipatif dalam penanganan kawasan kumuh dan tidak layak huni
   e. Meningkatkan intensitas kampanye tentang pentingnya lingkungan yang sehat
   f. Mempertegas penegakan hukum agar tidak terjadi perluasan degradasi/kerusakan lingkungan

3. **Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing**
   a. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan
   b. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur
   c. Memantapkan regulasi ketahanan dan kedaulatan pangan
   d. Memantapkan kelembagaan petani
   e. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dalam arti lua
   f. Mengoptimalkan penerapan teknologi yang tepat untuk pengembangan sektor unggulan
   g. Mewujudkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif
   h. Mengembangkan pembangunan infrastruktur dan utilitas
   i. Mengoptimalkan kegiatan ekonomi kreatif
   j. Mengoptimalkan peran UMKM dalam perekonomian wilayah

4. **Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**
   a. Mengoptimalkan peran kota sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang
   b. Mengendalikan wilayah pengembangan bagian timur (pulau kecil)
   c. Memantapkan wilayah pengembangan bagian tengah dan pantai timur
   d. Mengoptimalkan pengembangan wilayah yang berada di perbatasan
   e. eningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara)
   f. Meningkatnya pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar
   g. Terwujudnya pembangunan fasilitas fisik, sosial, dan ekonomi dasar secara merata
   h. Meningkatkan standar kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat.
   i. Mengembangkan kapasitas modal sosial masyarakat untuk mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
   j. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
   k. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan globalisasi

5. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**
   a. Mengoptimalkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya

b. Mengoptimalkan kinerja sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif
c. Mengoptimalkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat
d. Mengoptimalkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses hingga tingkat pemerintahan desa
e. Memantapkan kesadaran dan pemahaman para pihak terkait (masyarakat dan swasta tentang kebijakan pemanfaatan dan tata kelola sumber daya hutan dan *good forest governance.*
f. Mengembangkan penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah
g. Mengoptimalkan keterpaduan antar instansi terkait
h. Mengoptimalkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan
i. Mengembangkan konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom
j. Mengembangkan kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah
k. Mengoptimalkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik
l. Mengoptimalkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya

6. Mewujudkan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

a. Implementasi tahap penyelesaian pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan
b. Implementasi tahap lanjutan pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyrakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat
c. Melaksanakan pembangunan tahap lanjutan permukiman berbagai type dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada...
d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur tahap lanjutan yang diperlukan bagi perkotaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku..

Tabel 5.1.3.
Tahapan dan Prioritas Jangka Panjang

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	a. Meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan. b. Meningkatkan akses, pemerataan, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah,terlebih di daerah terpencil dan perbatasan.
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a. Meningkatkan pelayanan kesehatan prima sesuai dengan target nasional. b. Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah

		terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. c. Meningkatkan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui media komunikasi, penyuluhan maupun kurikulum pendidikan formal maupun informal. e. Meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan.
	3. Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam ketenagakerjaan	a. Mengembangkan pendidikan kejuruan b. Membangun tata kelola sektor ketenagakerjaan
	4. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Mengembangkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender (PUG) b. Mengembangkan pemberdayaan perempuan c. Mengembangkan perlindungan anak
	5. Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan dalam pembangunan daerah	a. Mengembangkan kapasitas dan kualitas pemuda b. Mengembangkan peran pemuda dalam pembangunan c. Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga
	6. Meningkatnya kualitas spiritualitas masyarakat yang beragam	a. Meningkatkan peran institusi keagamaan dan lembaga keormasan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat madani b. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama c. Meningkatkan Implementasi nilai-nilai agama dan spiritualitas yang ada dalam setiap tindakan dan perilaku masyarakat
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	a. Meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan. b. Meningkatkan akses, pemerataan, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah,terlebih di daerah terpencil dan perbatasan.
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan prima sesuai dengan target nasional. b. Mengoptimalkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terlebih di daerah terpencil dan perbatasan. c. Memantapkan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. d. Mengoptimalkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui media komunikasi, penyuluhan maupun kurikulum pendidikan formal maupun informal. e. Mengoptimalkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, terlebih di daerah terpencil dan perbatasan.

	3. Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam ketenagakerjaan	a. Mengoptimalkan pendidikan kejuruan b. Meningkatkan tata kelola sektor ketenagakerjaan
	4. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender (PUG) b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan c. Meningkatkan perlindungan anak
	5. Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan dalam pembangunan daerah	a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda b. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan c. Mengembangkan budaya dan prestasi olahraga
	6. Meningkatnya kualitas spiritualitas masyarakat yang beragam	a. Meningkatkan peran institusi keagamaan dan lembaga keormasan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat madani b. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama c. Meningkatkan Implementasi nilai-nilai agama dan spiritualitas yang ada dalam setiap tindakan dan perilaku masyarakat

Misi 2 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	5. Peningkatan kelestarian kawasan konservasi dan kawasan lindung	a. Mengembangkan pola *collaborative management* dalam pengelolaan kawasan lindung b. Mengembangkan regulasi daerah yang mendukung kelestarian hutan lindung
	6. Terwujudnya tata kelola Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan (*Good Natural Resources Governance)*	a. Mengembangkan regulasi daerah yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan b. Meningkatkan upaya penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan
	7. Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan pada kawasan budidaya	a. Mengembangkan regulasi daerah tentang kualitas lingkungan hidup dan budaya hidup sehat pada kawasan budidaya b. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat umum dan pengusaha tentang pentingnya *Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan*
	8. Terpulihkannya lingkungan hidup yang telah mengalami degradasi	a. Mengembangkan pola partisipatif dan berkelanjutan dalam pemulihan lahan kritis atau lingkungan yang telah terdegradasi. b. Mengembangkan sistem mitigasi bencana lokal dan regional secara alami dan pemanfaatan teknologi (rekayasa)
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	1. Peningkatan kelestarian kawasan konservasi dan kawasan lindung	Mengembangkan pola *Collaborative Management* dalam pengelolaan kawasan konservasi dan lindung
	2. Terwujudnya tata kelola Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan (*Good Natural Resources Governance)*	Meningkatkan intensitas penegakan hukum berdasarkan regulasi daerah dan database yang kuat
	3. Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan pada kawasan budidaya	a. Mengembangkan pola-pola partisipatif dalam penanganan kawasan kumuh dan tidak layak huni b. Meningkatkan intensitas kampanye tentang pentingnya lingkungan yang sehat
	4. Terpulihkannya lingkungan hidup yang telah mengalami degradasi	a. Mempertegas penegakan hukum agar tidak terjadi perluasan degradasi/ kerusakan lingkungan b. Meningkatkan sistem mitigasi bencana lokal dan regional secara alami dan teknologi (rekayasa)

Misi 3 Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian berbasis sektor unggulan	a. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur. c. Memperkuat perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan. d. Memperkuat kelembagaan petani. e. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. f. Meningkatkan penerapan teknologi yang tepat untuk pengembangan sektor unggulan.
	2. Meningkatnya nilai investasi berbasis sumberdaya lokal	a. Meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. b. Meningkatkan infrastruktur dan utilitas c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam investasi.
	3. Meningkatnya diversifikasi kesempatan kerja dan berusaha	a. Meningkatkan kegiatan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan kearifan dan keunggulan lokal. b. Meningkatkan pengembangan kesempatan kerja dan berwirausaha. c. Meningkatkan peran UMKM dalam ekonomi wilayah.
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian berbasis sektor unggulan	a. Memantapkan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan. b. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur c. Memantapkan perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan d. Memantapkan kelembagaan petani e. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas. f. Mengoptimalkan penerapan teknologi yang tepat untuk pengembangan sektor unggulan.
	2. Meningkatnya nilai investasi berbasis sumberdaya lokal	a. Mewujudkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. b. Mengembangkan pembangunan infrastruktur dan utilitas. c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam investasi.
	3. Meningkatnya diversifikasi kesempatan kerja dan berusaha	a. Mengoptimalkan kegiatan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan kearifan dan keunggulan lokal. b. Mengoptimalkan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha. c. Mengoptimalkan peran UMKM dalam perekonomian wilayah.

Misi 4 Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	1. Terstrukturnya wilayah pengembangan dan pusat pelayanan sesuai dengan penataan ruang	a. Meningkatkan peran kota sebagai pusat pelayanan wilayah sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang b. Meningkatkan pengendalikan pengembangan wilayah bagian timur (pulau kecil) c. Memantapkan pengembangan wilayah bagian tengah dan pantai timur d. Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan e. Mempersiapkan calon daerah otonomi baru
	2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, utilitas dan fasilitas yang merata	a. Mengutamakan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara). b. Mendorong pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh wilayah terlebih di daerah perbatasan dan terpencil. c. Memeratakan pembangunan fasilitas fisik, sosial, ekonomi dan pengelolaan di seluruh wilayah terlebih di daerah perbatasan dan terpencil.
	3. Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh masyarakat	a. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dengan menerapkan prinsip gotong royong, partisipasi, dan keswadayaan. b. Mengembangkan sistem jaminan sosial formal yang dilakukan oleh pemerintah maupun jaminan sosial informal yang dilakukan oleh masyarakat. c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan sosial. d. Memberikan jaminan hak-hak sosial ekonomi dan budaya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. e. Mengembangkan potensi sumber-sumber kesejahteran sosial. f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. g. Meningkatkan pengembangkan pemberdayaan masyarakat terlebih di daerah pedalaman, komunitas adat terpencil dan perbatasan.
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	1. Terstrukturnya wilayah pengembangan dan pusat pelayanan sesuai dengan penataan ruang	a. Mengoptimalkan peran kota sebagai pusat pelayanan wilayah sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang b. Mengendalikan wilayah pengembangan bagian timur (pulau kecil) c. Memantapkan pengembangan wilayah bagian tengah dan pantai timur d. Mengoptimalkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan e. Mempersiapkan calon daerah otonomi baru yang memungkinkan dengan melanjutkan proses yang belum selesai dan memulai pengembangan tahap persiapan bagi daerah otonomi baru yang sudah jadi.
	2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, utilitas dan fasilitas yang merata	a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan

Misi 4 Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
		udara). b. Meningkatnya pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh wilayah terlebih daerah perbatasan dan terpencil. c. Terwujudnya pembangunan fasilitas fisik, sosial, ekonomi dan pengelolaan di seluruh wilayah terlebih di daerah perbatasan dan terpencil.
	3. Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh masyarakat	a. Meningkatkan standar kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat. b. Mengembangkan kapasitas modal sosial masyarakat untuk mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. c. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. d. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan globalisasi.

Misi 5 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	1. Meningkatnya penerapan pemerintahan yang baik(partisipatif, transparan, dan akuntabel) dan kepuasan masyarakat	e. Meningkatkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya. f. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif. g. Meningkatkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat. h. Meningkatkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses dari tingkat provinsi hingga tingkat pemerintahan desa.
	2. Terwujudnya penguatan *collaborative governance* antara sektor pemerintah, swasta, civitas akademika dan NGO mengenai pembangunan daerah untuk seluruh wilayah terlebih di perbatasan	a. Membangun penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah. b. Meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait. c. Meningkatkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan. d. Membuka ruang konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom.
	3. Menguatnya kelembagaan pranata adat	a. Membangun kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah. b. Meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik. c. Meningkatkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya lokal.
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	1. Meningkatnya penerapan pemerintahan yang baik(partisipatif, transparan, dan akuntabel) dan kepuasan masyarakat	a. Mengoptimalkan sistem dan standar pelayanan publik berikut implementasinya. b. Mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif. c. Mengoptimalkan pembangunan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat. d. Mengoptimalkan pengelolaan unit pelayanan daerah dan kemudahan akses dari tingkat provinsi hingga tingkat pemerintahan desa.
	2. Terwujudnya penguatan *collaborative governance* antara sektor pemerintah, swasta, civitas akademika dan NGO mengenai pembangunan daerah untuk seluruh wilayah terlebih di perbatasan	a. Mengembangkan penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah. b. Mengoptimalkan keterpaduan antar instansi terkait. c. Mengoptimalkan kemampuan penerapan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan. d. Mengembangkan konsolidasi antar stakeholder dan memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom.
	3. Menguatnya kelembagaan pranata adat	a. Mengembangkan kelembagaan pranata adat di bidang kebudayaan daerah. b. Mengoptimalkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasi-lokasi yang berpotensi konflik.

		c. Mengoptimalkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah dalam menjaga kearifan dan kelestarian budaya.

Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara		
Tahapan	**Sasaran Pokok**	**Arah Kebijakan Pembangunan**
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	1. Terbangunnya Pusat Pemerintahan	a. Menyiapkan perencanaan pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan b. Iimplementasi sebagian rencana pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan
	2. Terbangunnya Pusat Perekonomian	a. Menyiapkan perencanaan pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyarakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat b. Iimplementasi pembangunan sebagian pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyrakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat
	3. Terbangunnya lingkungan permukiman ibukota pemerintahan	a. Mereview dan merencanakan kembali serta pembangunan permukiman berbagai tipe dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada sesuai kemampuan masyarakat b. Melaksanakan pembangunan sebagian/tahap awal permukiman berbagai tipe dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada sesuai kemampuan masyarakat
	4. Terbangunnya infrastruktur pendukung kota pusat pemerintahan	a. Mereview dan merencanakan kembali pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku b. Melaksanakan pembangunan tahap awal infrastruktur yang diperlukan bagi perkotaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	1. Terbangunnya Pusat Pemerintahan	Implementasi tahap penyelesaian pembangunan perkantoran pemerintahan dan infrastruktur serta utilitas pendukung secara bertahap sesuai rencana tata ruang dengan sumber dana sesuai ketentuan
	2. Terbangunnya Pusat Perekonomian	Implementasi tahap lanjutan pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perpasaran masyrakat perkotaan secara bertahap sesuai RTRW/RDTRK dengan dana dari berbagai sumber diutamakan dana masyarakat
	3. Terbangunnya lingkungan permukiman ibukota pemerintahan	Melaksanakan pembangunan tahap lanjutan permukiman berbagai type dan jenis sesuai rencana tata ruang yang ada
	4. Terbangunnya infrastruktur pendukung kota pusat pemerintahan	Melaksanakan pembangunan infrastruktur tahap lanjutan yang diperlukan bagi perkotaan ibukota propinsi sesuai dengan rencana struktur ruang yang berlaku

SALINAN

BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005–2025 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada sektor pembangunan prioritas dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Di satu sisi, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Utara. RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005–2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJP Nasional. Di sisi lain, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya bagi seluruh *stakeholder* terkait.

RPJPD Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kalimantan Utara 20 tahun mendatang, menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen perencanaan tersebut juga menjadi pedoman bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur periode tahun 2015 sampai dengan 2025 dalam dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam kaitannya tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 sebagai berikut:

1) Kepala daerah terpilih (Gubernur/ Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara) berkewajiban melaksanakan tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah provinsi, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*), untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005-2025. Selain itu juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional serta RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
5) RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.
6) Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Provinsi Kalimantan Utara, serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025.
7) Dalam rangka implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 ke dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan periode berkenaan.

(2) ketersediaan pendanaan yang mendukung implementasi kebijakan (3) konsistensi kebijakan pemerintah; (4) keberpihakan kepada rakyat; dan (5) peran serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Keberhasilan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagimana telah ditentukan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok yang sekurang-kurangnya harus dicapai tiap lima tahun.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUHARTO, SH
NIP 19561022 197904 1 001